

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026



Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2021



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 346), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Periode Efektif 2016-2025) (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
35. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
dan
BUPATI PESISIR BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu Penunjang Urusan Perencanaan serta Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung, RTRW dan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, serta RPJPN dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III : Gambaran Umum Keuangan Daerah
 - BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis
 - BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB IX : Penutup

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. terjadi perubahan yang mendasar (bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional).
 - b. sisa masa berlaku RPJMD tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal **25 Oktober** 2021
BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal **25 Oktober** 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

N. LINGGA KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2021 NOMOR **7**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG NOMOR **06/1218/PSB/2021**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis melalui rangkaian proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Pusat dan daerah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah strategis itu kemudian dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa tujuan dari sistem Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, merujuk Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, oleh sebab itu pemerintah daerah kemudian menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk pembangunan 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 merupakan tahap ke-2 (tahap akhir) pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat, serta menjadi momentum

strategis untuk memantapkan dan mewujudkan pencapaian visi RPJPD yaitu Pesisir Barat Madani dan Sejahtera.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 selanjutnya akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, serta menjadi salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala daerah dan kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 72

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG RPJMD TAHUN 2021-2026
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-7
 1.3.1 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pesisir
 Barat Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun
 2020-2024 I-8
 1.3.2 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pesisir
 Barat tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi
 Lampung Tahun 2019-2024 I-13
 1.3.3 Hubungan antara RJPMD Kabupaten Pesisir
 Barat Tahun 2021-2026 dengan RPJPD
 Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 I-18
 1.3.4 Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen
 RKPD dan Renstra Perangkat Daerah I-24
 1.3.5 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pesisir
 Barat Tahun 2021-2026 dengan RTRW
 Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 I-25
 1.3.6 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pesisir
 Barat Tahun 2021-2026 dengan KLHS RPJMD
 Tahun 2021-2026 I-36
 1.3.7 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pesisir
 Barat Tahun 2021-2026 dengan RKPD
 Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 I-40
 1.3.8 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pesisir
 Barat Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Daerah
 Perbatasan I-43
 1.3.9 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pesisir
 Barat Tahun 2021-2026 dengan Dokumen
 sektoral lainnya I-46
1.4 Maksud dan Tujuan I-46
 1.4.1 Maksud I-46
 1.4.2 Tujuan I-47
1.5 Sistematika Penulisan I-47



BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.2	Kondisi Topografi	II-3
2.1.3	Kondisi Hidrologi.....	II-5
2.1.4	Kondisi Geologi.....	II-8
2.1.5	Kondisi Klimatologi.....	II-9
2.1.6	Kondisi Kebencanaan.....	II-10
2.1.7	Penggunaan Lahan	II-13
2.1.8	Potensi Pengembangan Wilayah	II-15
2.1.9	Wilayah Rawan Bencana.....	II-19
2.1.10	Kondisi Demografi.....	II-21
2.1.11	Jumlah Penduduk.....	II-22
2.1.12	Ketenagakerjaan	II-24
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-25
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.	II-26
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-34
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-41
2.3	Aspek Pelayanan Umum.....	II-44
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	II-45
2.3.2	Urusan Pemerintah Pilihan	II-117
2.3.3	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-139
2.3.4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-141
2.3.5	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-150
2.3.6	Unsur Kewilayahan	II-151
2.3.7	Unsur Pemerintahan Umum	II-152
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-155
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-155
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-161
2.4.3	Fokus Iklim Investasi	II-162
2.4.4	Fokus Sumberdaya Manusia.....	II-163
2.5	Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM	II-183
2.6	Capaian Tujuan Pembangunan	
	Berkelanjutan/Sustainable Development Goals	
	(TPB/SDGs).....	II-189

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2	Neraca Daerah	III-12
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-23
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-24
3.2.2	Analisis Pembiayaan Daerah	III-24
3.3	Kerangka Pendanaan.....	III-27
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-27
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III-33



BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1	Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1	Permasalahan Pembangunan Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.1.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	IV-2
4.2	Isu Strategis.....	IV-7
4.2.1	Perekonomian Masyarakat.....	IV-8
4.2.2	Sumber Daya Manusia.....	IV-9
4.2.3	Sarana dan Prasarana.....	IV-12
4.2.4	Kemampuan Keuangan Daerah	IV-13
4.2.5	Aksesibilitas Wilayah.....	IV-13
4.2.6	Karakteristik Daerah.....	IV-13

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1	Visi	V-6
5.1.1	Pesisir Barat yang Amanah.....	V-7
5.1.2	Pesisir Barat Maju	V-7
5.1.3	Pesisir Barat Sejahtera	V-7
5.2	Misi.....	V-7
5.3	Tujuan dan Sasaran.....	V-9

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1	Strategi.....	VI-1
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan	VI-4
6.3	Program Pembangunan Daerah	VI-14

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IX. PENUTUP

9.1	Kaidah Pelaksanaan	IX – 1
9.2	Pedoman Transisi.....	IX – 2



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	5 Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024	I-9
Tabel 1.2.	Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional di Kabupaten Pesisir Barat	I-10
Tabel 1.3.	Agenda Kerja Utama Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	I-14
Tabel 1.4.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap ke-2 RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025	I-19
Tabel 1.5.	Arah Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pembangunan RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037	I-26
Tabel 1.6.	Isu dan Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026.....	I-36
Tabel 1.7.	Strategi, Arah kebijakan, program, RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026	1-41
Tabel 2.1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat.....	II-3
Tabel 2.2.	Nama Gunung dan Tingginya di Kabupaten Pesisir Barat.....	II-5
Tabel 2.3.	Data Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan	II-6
Tabel 2.4.	Kawasan Lindung dan Konservasi Kabupaten Pesisir Barat.....	II-17
Tabel 2.5.	Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Per-Bulan September Tahun 2020	II-22
Tabel 2.6.	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (miliar rupiah).....	II-28
Tabel 2.7.	Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Pesisir Barat Tahun 2016- 2020 (dalam persen).....	II-29
Tabel 2.8.	Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (dalam persen)	II-30
Tabel 2.9.	Inflasi di kota bandar lampung dan kota metro tahun 2016-2020	II-31
Tabel 2.10.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat, 2016-2020.....	II-32



Tabel 2.11.	PDRB ADHK Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020 (Juta Rupiah)	II-33
Tabel 2.12.	PDRB ADHB Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020 (Juta Rupiah)	II-34
Tabel 2.13.	Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-34
Tabel 2.14.	Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020	II-36
Tabel 2.15.	Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020	II-37
Tabel 2.16.	Persentase Kelulusan dan Persentase Putus Sekolah Tahun 2016-2020	II-37
Tabel 2.17.	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018- 2020	II-38
Tabel 2.18.	Angka Partisipasi Kasar kabupaten pesisir barat tahun 2018- 2020	II-38
Tabel 2.19.	Seni dan Budaya Kabupaten Pesisir Barat Menurut Kecamatan Tahun 2020.....	II-41
Tabel 2.20.	Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020.....	II-42
Tabel 2.21.	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2.22.	Jumlah Pemuda yang Berwirausaha Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2.23.	Perkembangan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020.....	II-43
Tabel 2.24.	Persatuan Cabang Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-44
Tabel 2.25.	Data Pendidikan Tingkat PAUD/TK Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-45
Tabel 2.26.	Data Pendidikan Tingkat SD sederajat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-45
Tabel 2.27.	Data Pendidikan Tingkat SMP sederajat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-46
Tabel 2.28.	Data Pondok Pesantren di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-46
Tabel 2.29.	Data Madrasah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-47
Tabel 2.30.	Angka Buta Huruf Tahun 2016-2020.....	II-48
Tabel 2.31.	Angka Melek Huruf Tahun 2016-2020	II-48
Tabel 2.32.	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016-2020.....	II-49
Tabel 2.33.	Lokasi Stunting Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020....	II-51
Tabel 2.34.	Jumlah Penderita Penyakit menular dan penyakit tidak menular di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-51
Tabel 2.35.	Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat	II-52
Tabel 2.36.	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-52

Tabel 2.37.	Pencapaian Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-53
Tabel 2.38.	Jumlah Pelayanan dan Perawatan Ibu Hamil dan Bayi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-53
Tabel 2.39.	Data Ketersediaan Infranstruktur Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-54
Tabel 2.40.	Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 – 2020	II-55
Tabel 2.41.	Jumlah Rumah Layak Huni Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-57
Tabel 2.42.	Data Kawasan Kumuh Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-57
Tabel 2.43.	Jumlah Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Perumahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.....	II-58
Tabel 2.44.	Konflik Sosial dan Pelanggaran Perda Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-60
Tabel 2.45.	Kondisi Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Pesisir Barat.....	II-60
Tabel 2.46.	Data Kejadian Bencana di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-61
Tabel 2.47.	Jumlah Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-70
Tabel 2.48.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-71
Tabel 2.49.	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.....	II-71
Tabel 2.50.	Data Jumlah Penduduk Lansia dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.....	II-72
Tabel 2.51.	Pencapaian Indikator Kinerja Sosial Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-73
Tabel 2.52.	Jumlah Penduduk yang Bekerja Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-75
Tabel 2.53.	Jumlah Tenaga Kerja Per Sektor Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020.....	II-76
Tabel 2.54.	Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020	II-76
Tabel 2.55.	Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-77
Tabel 2.56.	Jumlah Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-78
Tabel 2.57.	Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-79
Tabel 2.58.	Jumlah Tenaga Rehabilitasi Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-79
Tabel 2.59.	Perkembangan tingkat capaian ketersediaan energi, protein dan skor PPH ketersediaan tahun 2018-2020 ...	II-81

Tabel 2.60.	Komoditas Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-81
Tabel 2.61.	Konsumsi energi setiap kelompok pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-82
Tabel 2.62.	Konsumsi Penduduk terhadap Bahan Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-82
Tabel 2.63.	Cadangan pangan di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017-2020	II-83
Tabel 2.64.	Pencapaian Indikator Kinerja pertanahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-83
Tabel 2.65.	Pencapaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-84
Tabel 2.66.	Indeks Kualitas Air Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-85
Tabel 2.67.	Indeks Kualitas Udara Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-85
Tabel 2.68.	Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-86
Tabel 2.69.	Data Badan Usaha/Instansi terkait Izin Pembuangan Limbah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.....	II-87
Tabel 2.70.	Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Sex Ratio Kabupaten Pesisir Barat Per-Bulan September Tahun 2020.....	II-88
Tabel 2.71.	Jumlah Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-89
Tabel 2.72.	Jumlah Pemeluk Agama Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-89
Tabel 2.73.	Jumlah Pekon tertinggal Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-90
Tabel 2.74.	Status desa kabupaten Pesisir Barat tahun 2020.....	II-91
Tabel 2.75.	Jumlah BUMDes Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 ..	II-93
Tabel 2.76.	Potensi Desa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-98
Tabel 2.77.	Lembaga Kemasyarakatan Desa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-99
Tabel 2.78.	Jumlah Peserta Keluarga Berencana dan Kelompok Bina Keluarga Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.....	II-100
Tabel 2.79.	Angka Kelahiran dan Kematian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-102
Tabel 2.80.	Perkembangan Urusan Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-102
Tabel 2.81.	Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-103
Tabel 2.82.	Perkembangan Jumlah Fasilitas Kelengkapan Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-104
Tabel 2.83.	Pencapaian Indikator kinerja perhubungan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-104
Tabel 2.84.	Sarana Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Barat.....	II-105

Tabel 2.85.	Data Ketersediaan Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-105
Tabel 2.86.	Data Koperasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-107
Tabel 2.87.	Jumlah UMKM Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020.....	II-110
Tabel 2.88.	Jumlah Investasi di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-111
Tabel 2.89.	Pencapaian Indikator Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-112
Tabel 2.90.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut Kategori Pekerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2020	II-112
Tabel 2.91.	Pencapaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020.....	II-113
Tabel 2.92.	Kerjasama Statistik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan BPS Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-114
Tabel 2.93.	Sebaran Potensi Wisata Religi dan Budaya Kabupaten Pesisir Barat	II-115
Tabel 2.94.	Data Urusan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020	II-116
Tabel 2.95.	Data Urusan Kearsipan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020	II-117
Tabel 2.96.	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-118
Tabel 2.97.	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Budidaya Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-118
Tabel 2.98.	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 (1).....	II-120
Tabel 2.99.	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 (2).....	II-120
Tabel 2.100.	Sebaran Bantuan yang diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Perikanan Tahun 2017-2020	II-121
Tabel 2.101.	Sebaran Bantuan yang diserahkan kepada kelompok usaha bersama Perikanan Budidaya Tahun 2017-2020	II-121
Tabel 2.102.	Sebaran Bantuan yang diserahkan kepada kelompok usaha bersama pengelolaan hasil perikanan tahun 2017-2020	II-122
Tabel 2.103.	Sebaran Potensi Wisata Bahari Kabupaten Pesisir Barat	II-123
Tabel 2.104.	Sebaran Potensi Ekowisata Kabupaten Pesisir Barat.....	II-124
Tabel 2.105.	Nama dan Luas Lokasi Suaka Alam dan Cagar Budaya di Kabupaten Pesisir Barat.....	II-124
Tabel 2.106.	Akomodasi Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Kecamatan Tahun 2020.....	II-124
Tabel 2.107.	SDM Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 ...	II-125
Tabel 2.108.	Jumlah Wisatawan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2020.....	II-125

Tabel 2.109.	Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-127
Tabel 2.110.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-127
Tabel 2.111.	Jumlah Produksi Sayuran dan Buah Semusim Holtikultura di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-128
Tabel 2.112.	Jumlah Produksi Sayuran dan Buah Setahun Holtikultura di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-128
Tabel 2.113.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-129
Tabel 2.114.	Tingkat Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-130
Tabel 2.115.	Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-131
Tabel 2.116.	Jumlah Pasar Desa di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020.....	II-132
Tabel 2.117.	Jumlah Pasar Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-133
Tabel 2.118.	Data Industri Kecil Menengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-134
Tabel 2.119.	Data Pemasaran Industri Kecil Menengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-135
Tabel 2.120.	Pencapaian Indikator Kinerja Perindustrian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-136
Tabel 2.121.	Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) di Kabupaten Pesisir Barat.....	II-137
Tabel 2.122.	Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Kabupaten Pesisir Barat.....	II-138
Tabel 2.123.	Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-139
Tabel 2.124.	Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-141
Tabel 2.125.	Pencapaian Indikator Kinerja Perencanaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-142
Tabel 2.126.	Pencapaian Indikator Kinerja Keuangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-144
Tabel 2.127.	Pencapaian Indikator Kinerja Kepegawaian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-145
Tabel 2.128.	Pencapaian Indikator Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-145
Tabel 2.129.	Pencapaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-148
Tabel 2.130.	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-148
Tabel 2.131.	Pencapaian Indikator Kinerja Pengawasan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-150



Tabel 2.132.	Pencapaian Indikator Kinerja Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-151
Tabel 2.133.	Pencapaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020.....	II-152
Tabel 2.134.	Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-153
Tabel 2.135.	Data Ulama/Penceramah di Kabupaten Pesisir Barat di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-154
Tabel 2.136.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Pesisir Barat Tahun 2016- 2020 (dalam miliar rupiah) .	II-156
Tabel 2.137.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Pesisir Barat Tahun 2016- 2020(dalam miliar rupiah)	II-158
Tabel 2.138.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (dalam miliar rupiah) ..	II-158
Tabel 2.139.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Pesisir Barat Tahun 2016- 2020 (dalam miliar rupiah) .	II-159
Tabel 2.140.	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)	II-160
Tabel 2.141.	Akses Bandara M. Taufik Kemas Kabupaten Pesisir Barat.....	II-161
Tabel 2.142.	Fasilitas Bandara M. Taufik Kemas Kabupaten Pesisir Barat.....	II-162
Tabel 2.143.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Barat 2020	II-163
Tabel 2.144.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat	II-164
Tabel 2.145.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020.....	II-183
Tabel 2.146.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020.....	II-184
Tabel 2.147.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020	II-185
Tabel 2.148.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020	II-187
Tabel 2.149.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020	II-188

Tabel 2.150.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020	II-188
Tabel 2.151.	Pencapaian TPB Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020	II-189
Tabel 2.152.	Rincian TPB Berdasarkan Tujuan, Target dan Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target Nasional Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020	II-193
Tabel 2.153.	Rincian TPB Berdasarkan Tujuan, Target dan Indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target Nasioanal Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020....	II-195
Tabel 2.154.	Rincian TPB Berdasarkan Tujuan, Target dan Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target Nasional Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020	II-196
Tabel 2.155.	Rincian TPB Berdasarkan Tujuan, Target dan Indikator yang belum memiliki data Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020	II-203
Tabel 3.1.	Perkembangan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	III-5
Tabel 3.2.	Rata-rata Pertumbuhan APBD 2016-2020 Kabupaten Pesisir Barat (%).....	III-8
Tabel 3.3.	APBD Kabupaten Pesisi Barat Tahun 2021	III-14
Tabel 3.4.	Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020	III-16
Tabel 3.5.	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	III-20
Tabel 3.6.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020 ...	III-24
Tabel 3.7.	Defisit Riil anggaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020	III-25
Tabel 3.8.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020	III-25
Tabel 3.9.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	III-26
Tabel 3.10.	Penetapan dan Proyeksi APBD Tahun 2022-2026	III-30
Tabel 3.11.	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022-2026.....	III-34
Tabel 3.12.	Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah.....	III-36
Tabel 3.13.	Kebijakan Umum Anggaran yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal 2022-2026	III-37
Tabel 4.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.....	IV-2
Tabel 4.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Hasil KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026	IV-16
Tabel 5.1.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap ke-2 RPJPD Kabupaten Pesisir Barat 2005-2025	V-1

Tabel 5.2.	Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026	V-9
Tabel 5.3.	Visi Misi dan Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026	V-11
Tabel 5.4.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026	V-12
Tabel 5.5.	Hasil Penyelarasan Indikator Makro RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026	V-15
Tabel 5.6.	Hasil Penyelarasan Dukungan Program prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026	V-16
Tabel 6.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026	VI-2
Tabel 6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026	VI-4
Tabel 6.3.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 Menurut Misi dan Bidang Urusan Pemerintahan	VI-7
Tabel 6.4.	Sasaran dan Target Capaian sasaran Jangka Menengah Daerah menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026	VI-12
Tabel 6.5.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026.....	VI-15
Tabel 6.6.	Analisis Hasil KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026	IV-31
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026	VII-3
Tabel 7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026	VII-5
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Barat	VIII-2
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir barat	VIII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-8
Gambar 1.2. Bagan Alur hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah	1-25
Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Pesisir Barat.....	II-2
Gambar 2.2. Luas Wilayah per-Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat .	II-3
Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pesisir Barat.....	II-5
Gambar 2.4. Peta Hidrologi Kabupaten Pesisir barat.....	II-6
Gambar 2.5. Peta Geologi Kabupaten Pesisir Barat.....	II-8
Gambar 2.6. Peta Curah Hujan Kabupaten Pesisir Barat	II-9
Gambar 2.7. Peta Resiko Tsunami di Kabupaten Pesisir Barat	II-10
Gambar 2.8. Peta Ancaman Longsor dikabupaten Pesisir Barat.....	II-11
Gambar 2.9. Peta Ancaman Gempa di Kabupaten Pesisir Barat.....	II-12
Gambar 2.10. Peta Resiko Banjir di Kabupaten Pesisir Barat.....	II-13
Gambar 2.11. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pesisir Barat	II-15
Gambar 2.12. Peta Pola Ruang Kabupaten Pesisir Barat	II-16
Gambar 2.13. Peta Kawasan strategis di Kabupaten Pesisir Barat.....	II-16
Gambar 2.14. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Pesisir Barat.....	II-20
Gambar 2.15. Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016- 2020	II-23
Gambar 2.16. Gambaran Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-24
Gambar 2.17. Jumlah Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018- 2020	II-24
Gambar 2.18. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-25
Gambar 2.19. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-26
Gambar 2.20. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-27
Gambar 2.21. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-35
Gambar 2.22. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-35
Gambar 2.23. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020	II-36
Gambar 2.24. Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020	II-37
Gambar 2.25. Jumlah Gizi Buruk Tahun 2016-2020 di Kabupaten Pesisir Barat	II-39
Gambar 2.26. Garis kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) di kabupaten pesisir barat 2018-2020.....	II-40

Gambar 2.27. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir barat tahun 2016-2020	II-40
Gambar 2.28. Kondisi Bangunan Ruang Kelas SD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-47
Gambar 2.29. Kondisi Bangunan Ruang Kelas SMP Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-48
Gambar 2.30. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016-2020.....	II-49
Gambar 2.31. Kematian Ibu di kabupaten pesisir barat tahun 2016-2020	II-50
Gambar 2.32. Kematian bayi di kabupaten pesisir barat 2016-2020....	II-50
Gambar 2.33. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-53
Gambar 2.34. Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 - 2020	II-55
Gambar 2.35. Kondisi Irigasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 - 2020	II-56
Gambar 2.36. Persentase Cakupan Sarana Prasarana Air Bersih Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-59
Gambar 2.37. Persentase Cakupan Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-59
Gambar 2.38. Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-71
Gambar 2.39. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (Kepala Keluarga)	II-73
Gambar 2.40. Jumlah Nominal Bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (Rp. dalam ribu).....	II-74
Gambar 2.41. Tingkat Partipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-74
Gambar 2.42. Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2020	II-75
Gambar 2.43. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-78
Gambar 2.44. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2020	II-80
Gambar 2.45. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-85
Gambar 2.46. Indeks Kualitas Air, Kualitas Udara, Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2020	II-86
Gambar 2.47. Diagram Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-88
Gambar 2.48. Status Desa kabupaten Pesisir Barat tahun 2020	II-90
Gambar 2.49. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-100
Gambar 2.50. Peserta Keluarga Berencana Aktif Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-101

Gambar 2.51. Angka Kelahiran Total Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-101
Gambar 2.52. Jumlah Menara Telekomunikasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-105
Gambar 2.53. Jangkauan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-106
Gambar 2.54. Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-110
Gambar 2.55. Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-119
Gambar 2.56. Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	II-119
Gambar 2.57. Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-126
Gambar 2.58. Nilai Tukar Petani Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-131
Gambar 2.59. Jumlah Industri Kecil Mikro Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-135
Gambar 2.60. Rasio Elektrifikasi dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-138
Gambar 2.61. Nilai SAKIP Kabupaten Pesisir Barat 2018-2020	II-140
Gambar 2.62. Pencapaian Indikator Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-142
Gambar 2.63. Persentase PAD terhadap APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)	II-143
Gambar 2.64. Rekapitulasi Pencapaian TPB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-192
Gambar 2.65. Indikator TPB Yang sudah dilaksanakan dan mencapai Target Nasional Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-192
Gambar 2.66. Indikator TPB Yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai Target Nasional Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-194
Gambar 2.67. Indikator TPB Yang belum dilaksanakan dan belum mencapai Target Nasional Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-196
Gambar 2.68. Indikator TPB Yang belum memiliki data Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	II-203
Gambar 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah).....	III-10
Gambar 3.2. Proporsi Kontribusi Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (persen)	III-11
Gambar 3.3. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020	III-12

Gambar 3.4. Persentase Perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (Persen)..... III-12

Gambar 3.5. Perkembangan Perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (Persen)..... III-13

Gambar 5.1. Logframe Visi dan Misi..... V-8



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR: 7 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis dan terarah untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki daerah sebagai modal dasar pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan pembangunan yang merata masyarakat akan memperoleh kesempatan kerja dan berusaha, akses pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan publik yang baik. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar pembangunan daerahnya terarah dan mencapai tujuan yang dicita-citakan adalah dengan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah yang disusun dan dirumuskan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional tentu merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah juga mempedomani aturan antara lain yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 disusun dan dirumuskan berdasarkan peraturan perundangan di atas, dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RPJMD Kabupaten Pesisir Barat juga memperhatikan RPJPD Pesisir Barat Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pesisir Barat Tahun 2017-2037, RPJM Nasional 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024.

RPJMD Pesisir Barat Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai tolok ukur pencapaian kinerja pada setiap tahun dan akhir periode RPJMD.

RPJMD Pesisir Barat Tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang secara substantif memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif. Selain dari itu, RPJMD Pesisir Barat juga digunakan sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya dimulai dari tahun 2021 sampai dengan 2026. RKPD merupakan rencana kerja tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja serta kerangka anggaran pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang berupa stimulasi pembangunan kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD Pesisir Barat Tahun 2021-2026 merupakan Tahap Ke-II dari Program Jangka Panjang Pesisir Barat yang tertuang dalam RPJPD Pesisir Barat Tahun 2005-2025. Sesuai amanah RPJPD Pesisir Barat, untuk melanjutkan pengembangan kemajuan dan kesejahteraan daerah dengan menekankan pada peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana daerah dan pelayanan publik. Maksud tahapan ini untuk pengembangan kemajuan dan kesejahteraan semua aspek, yaitu peningkatan sarana dan prasarana kabupaten, infrastruktur di sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemerataan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara aktif secara integratif dengan penekanan pada moral dan norma-norma agama sebagai landasan berperilaku dan bertindak dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat.

Berdasarkan amanah tersebut serta diintegrasikan dengan permasalahan, isu strategis serta visi misi kepala daerah, maka Dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Barat diharapkan mampu menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pesisir Barat dalam kerangka waktu 2021-2026.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 sangat tepat ketika terbit dan diberlakukannya beberapa peraturan perundangan yang sangat prinsip digunakan dalam penyusunan dokumen ini. Beberapa peraturan perundangan yang diberlakukan antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta peraturan turunan lainnya. Sedangkan pedoman penyusunan RPJMD secara teknis tetap mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

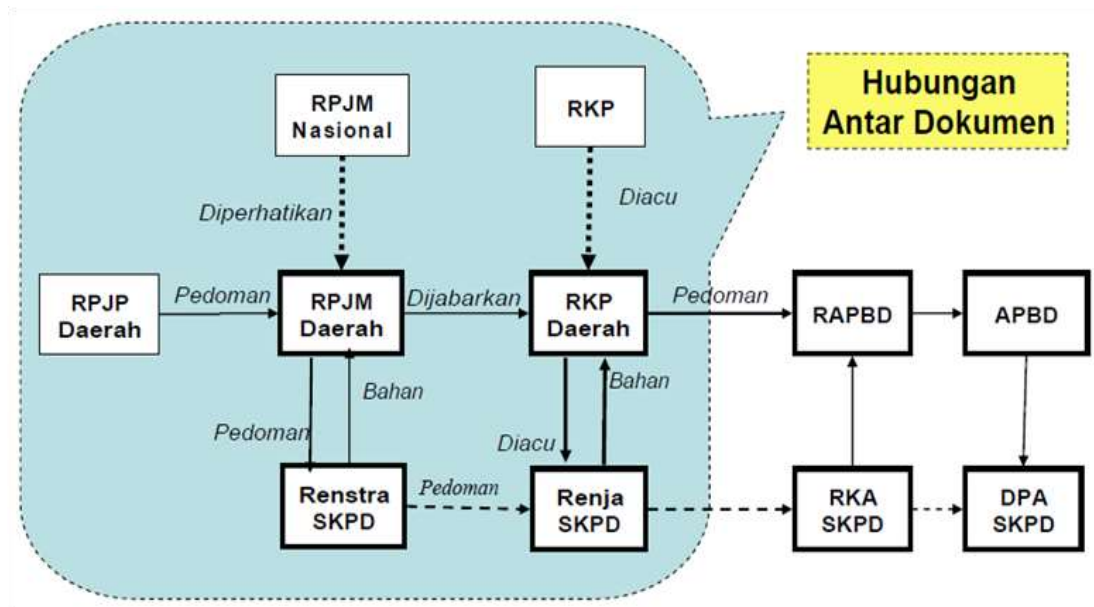
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 346), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 499);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Periode Efektif 2016-2025) (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
35. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Karenanya dalam penyusunan RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah harus berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya RPJMD dijabarkan menjadi RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada RKP serta sebagai pedoman Renstra perangkat daerah. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1. Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

1.3.1. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

RPJM Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional. RPJM Nasional Tahun 2020-2024 berlampirkan 4 (empat) dokumen, yaitu: (i) Lampiran I yang memuat Narasi RPJMN Tahun 2020-2024; (ii) Lampiran II yang memuat Proyek Prioritas Strategis RPJMN Tahun 2020-2024; (iii) Lampiran III yang memuat Matrik Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024; (iv) Lampiran IV yang memuat Arah Pembangunan Wilayah RPJMN Tahun 2020-2024. RPJMN tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026.

Visi Presiden Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 (sembilan) Misi yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;

- 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan;

Visi dan Misi Presiden Tahun 2020-2024 tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam 5 arahan presiden dan 7 agenda pembangunan sebagai berikut:

Tabel 1.1. 5 Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024

No	Misi Presiden	Arahan Presiden	7 Agenda Pembangunan
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1. Pembangunan SDM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing		
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	2. Pembangunan Infrastruktur	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	3. Penyederhanaan Regulasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
7	Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	4. Penyederhanaan Birokrasi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
8	Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	5. Transformasi Ekonomi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sumber: Lampiran 1 Narasi RPJMN Tahun 2020-2024

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah otonom harus melaksanakan kelima arahan Presiden dan ketujuh agenda pembangunan Nasional di dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024 tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah. Agenda-agenda pembangunan Nasional di dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024 tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan hingga tahun 2024. Beberapa program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas Nasional yang terkait langsung dengan pembangunan wilayah Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional di Kabupaten Pesisir Barat

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target 2024	Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	0 (seluruh daerah tertinggal terentaskan)	Misi V <u>Tujuan :</u> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas <u>Sasaran :</u> Meningkatkan Pembangunan Desa
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung	1. Penduduk miskin di daerah tertinggal	13,2 -13,7%;	Misi III <u>Tujuan :</u> Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah berlandaskan pada potensi lokal <u>Sasaran :</u> Menurunkan tingkat kemiskinan daerah
	2. Rata-rata IPM di daerah tertinggal	67,6 - 68,1	Misi I <u>Tujuan :</u> Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas <u>Sasaran :</u> Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas
Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya	Jumlah rumah swadaya yang difasilitasi pembangunannya (unit)	154	Misi II <u>Tujuan :</u> Meningkatkan pembangunan Infrastruktur wilayah <u>Sasaran :</u> Tersedianya layanan insfrastruktur dan utilitas dasar permukiman dan perumahan yang berkualitas
Penyediaan Air Baku di Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) *Indikatif Pendanaan Masih Bersifat Total Seluruh Daerah 3T di Setiap Provinsi	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	0,19	Misi II <u>Tujuan :</u> Meningkatkan pembangunan Infrastruktur wilayah <u>Sasaran :</u> Tersedianya sumber daya air untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air
Pasar Rakyat yang Dibangun/ Direvitalisasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu	Terbangunnya pasar rakyat (unit)		Misi II <u>Tujuan :</u> Meningkatkan pembangunan Infrastruktur wilayah <u>Sasaran :</u> Tersedianya layanan insfrastruktur dan utilitas dasar permukiman dan perumahan yang berkualitas

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target 2024	Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Daerah Tertinggal	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitasnya di daerah tertinggal (orang)	15	Misi I <u>Tujuan :</u> Meningkatkan Produktifitas dan daya saing pemuda dan penduduk usia kerja <u>Sasaran :</u> Tingkat pengangguran terbuka rendah
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Aparatur Pemda Dalam Penanggulangan Bencana di Daerah Tertinggal	Jumlah masyarakat terdampak bencana yang ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan ekonomi keluarga (<i>livelihood</i>) (orang)	96	Misi II <u>Tujuan :</u> Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah <u>Sasaran :</u> Tersedianya Prasaranan, sarana, dan utilitas pengurangan resiko dan penanggulangan bencana daerah
Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (KPM)	11,687	Misi III <u>Tujuan :</u> Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah belandaskan pada potensi lokal <u>Sasaran :</u> Menurunnya tingkat kemiskinan daerah
Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pangan melalui kartu sembako murah (KPM)	9,344	Misi III <u>Tujuan :</u> Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah belandaskan pada potensi lokal <u>Sasaran :</u> Menurunnya tingkat kemiskinan daerah
Penyediaan Moda Transportasi Darat	Jumlah moda transportasi darat yang disediakan (unit)		Misi II <u>Tujuan :</u> Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah <u>Sasaran :</u> Tersedianya prasarana, sarana transportasi yang handal
Penyediaan Moda Transportasi Air	Jumlah moda transportasi air yang disediakan (unit)		Misi II <u>Tujuan :</u> Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah <u>Sasaran :</u> Tersedianya prasarana, sarana transportasi yang handal
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	65,81	Misi V <u>Tujuan :</u> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target 2024	Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah
			<u>Sasaran :</u> Meningkatnya Pembangunan desa
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan desa digital (desa)	408	Misi V <u>Tujuan :</u> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas <u>Sasaran :</u> Meningkatnya Pembangunan desa
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	-
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		-
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	Misi V <u>Tujuan :</u> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas <u>Sasaran :</u> Meningkatnya Pembangunan desa
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	Misi V <u>Tujuan :</u> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas <u>Sasaran :</u> Meningkatnya Pembangunan desa
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	408	Misi V <u>Tujuan :</u> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas <u>Sasaran :</u> Meningkatnya Pembangunan desa
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	803	Misi V <u>Tujuan :</u> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas <u>Sasaran :</u> Meningkatnya Pembangunan desa
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	3	Misi V <u>Tujuan :</u> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target 2024	Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah
			berkualitas <u>Sasaran :</u> Terwujudnya tata kelola keuangan dan asset daerah yang berkualitas
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	-
Usaha Ekonomi Desa yang Dikembangkan yang Terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)	1	Misi V <u>Tujuan :</u> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas <u>Sasaran :</u> Meningkatnya Pembangunan desa
Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa	Jumlah kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa (kabupaten)	4	Misi 1 <u>Tujuan :</u> Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas <u>Sasaran :</u> Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas

Sumber: Lampiran 4 Arah Pembangunan Wilayah RPJMN Tahun 2020-2024

1.3.2. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah **“Rakyat Lampung Berjaya”**. Makna dari Visi tersebut adalah:

1. Kehidupan Masyarakat yang Aman;
2. Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya;
3. Kehidupan Masyarakat yang Maju dan Berdaya Saing;
4. Kehidupan yang Sejahtera.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan Kehidupan yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai.
2. Mewujudkan *“Good Governance”* untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas.

4. Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah.
5. Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Perdesaan Yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan.
6. Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama.

Keenam misi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam agenda-agenda kerja utama sebagai berikut:

Tabel 1.3. Agenda Kerja Utama Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Misi RPJMD Provinsi Lampung	Sektor Prioritas Pembangunan	Agenda Kerja Utama RPJMD Provinsi Lampung		Arah Kebijakan Daerah RPJMD Kabupaten Pesisir Barat
Misi 1: Menciptakan Kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai	Pembangunan Bidang Pariwisata dan Budaya	1	Lampung Merawat Indonesia: Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Dan Menjadikan Rumah Ibadah Dan Pondok Pesantren Sebagai Pusat Informasi Dan Pendidikan Publik Untuk Menangkal Radikalisme Serta Mengembangkan Sikap Kebangsaan	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum
		2	Memberikan Insentif Khusus Kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad Dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid Dan Rumah Ibadah Lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, Pendeta Dan Para Pemimpin Berbagai Agama, Serta P3NTR, Bersinergi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum
		3	Lampung Mengaji: Memfasilitasi Pengembangan Pemahaman Dan Penghafalan Al-Quran Dan Mendirikan Pusat Studi Al-Quran	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum
		4	Lampung Kaya Festival : Menjadikan Budaya Dan Kekayaan Alam Lampung Sebagai Daya Tarik Festival Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif, Merawat Kebudayaan Lokal Dan Mengembangkan Kesenian Serta Mendukung Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Peningkatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Dan Destinasi Pariwisata Yang Terintegrasi Dengan Pengelolaan Kebudayaan Daerah Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten

Misi RPJMD Provinsi Lampung	Sektor Prioritas Pembangunan	Agenda Kerja Utama RPJMD Provinsi Lampung		Arah Kebijakan Daerah RPJMD Kabupaten Pesisir Barat
		5	Lampung Menuju Bebas Narkoba	Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas Kesehatan, Layanan Kesehatan, Dan Informasi Kesehatan Baik Pada Tingkat Individu, Keluarga, Maupun Masyarakat
Misi 2: Mewujudkan “good governance” untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	6	Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan, Melalui Sistem Penjenjangan Karir Berbasis Kinerja Dan Kompetensi (<i>Job Fit Assessment</i>) Dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Professional
		7	APBD Rakyat Berjaya, Melalui Peningkatan PAD Dan Mendayagunakan APBD Untuk Program Pengentasan Kemiskinan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	Membangun Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Tertib, Taat Peraturan Perundang-Undangan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan Dan Bertanggung Jawab Dengan Memperhatikan Azas Keadilan, Kepatuhan Dan Manfaat Untuk Masyarakat
		8	<i>Smart Village</i> : Meningkatkan Literasi Internet Dan Layanan Perpustakaan Desa, Digitalisasi, Administrasi Desa Dan <i>E-Participation</i>	Penguatan Tata Kelola Informasi Dan Komunikasi Public Berbasis Media Elektronik
		9	Pendampingan Program Pembangunan Desa	Peningkatan Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kawasan Transmigrasi
Misi 3: Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	Perempuan Berjaya : Memandirikan Perempuan Secara Ekonomi, Pengarusutamaan Gender Dan Pendampingan Hukum Perempuan	Peningkatan Kualitas Hidup, Penurunan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Dan Diskriminasi, Serta Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Semua Bidang Pembangunan
		11	Lampung Ramah Perempuan Dan Anak: Mengembangkan Fasilitas Dan Ruang Publik Ramah Perempuan Dan Anak, Menurunkan Tingkat Kematian Ibu Dan Anak (Bersinergi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota)	Peningkatan Kualitas Hidup, Penurunan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Dan Diskriminasi, Serta Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Semua Bidang Pembangunan
		12	Anak Muda Berjaya : Mendorong Kompetensi Dan Festival Seni/Olahraga, Gerakan Malu Menganggur, Mencetak Wirausaha Muda, Pendirian Gelanggang Remaja	Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan

Misi RPJMD Provinsi Lampung	Sektor Prioritas Pembangunan	Agenda Kerja Utama RPJMD Provinsi Lampung		Arah Kebijakan Daerah RPJMD Kabupaten Pesisir Barat
		13	Mengembalikan Kejayaan Lampung Dalam Dunia Olahraga: Memperbaiki Dan Memperbanyak Fasilitas- Fasilitas Olahraga, Meningkatkan Kualitas Pembinaan Atlet Dan Memberikan Insentif Bagi Atlet Berprestasi Serta Memperbaiki Tata Kelola Organisasi Olahraga	Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan
	Pembangunan Bidang Kesehatan	14	Lampung Sehat: Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), Perbaikan Kualitas Layanan Kesehatan, Puskesmas Dan Rumah Sakit (Bersinergi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota)	Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas Kesehatan, Layanan Kesehatan, Dan Informasi Kesehatan Baik Pada Tingkat Individu, Keluarga Maupun Masyarakat
	Pembangunan Bidang Pendidikan	15	<i>Smart School</i> : Pemanfaatan IT Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Anak Usia Dini Yang Terjangkau Dan Bermutu Bagi Seluruh Penduduk
		16	Revitalisasi SMK Mengintegrasikan SMK Ke Dunia Kerja (Kurikulum Magang)	-
Misi 4: Mengembangkan Infrastruktur guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah	Pembangunan Bidang Infrastruktur	17	Infrastruktur Lampung Berjaya : Konektivitas Antar Kabupaten/Kota Untuk Mengembangkan Pusat Pertumbuhan Baru, Infrastruktur Untuk Kawasan Wisata, Infrastruktur Pertanian, Pelabuhan Dan Infrastruktur Telekomunikasi	Penyelenggaraan Insfrastruktur Jalan Dan Jembatan Terutama Pada Pusat-Pusat Kegiatan Dan Pusat Produksi
		18	Unit Reaksi Cepat (URC) Perbaikan Infrastruktur: Berbasis Peran Serta Warga Dan Pemanfaatan IT	Penyelenggaraan Insfrastruktur Jalan Dan Jembatan Terutama Pada Pusat-Pusat Kegiatan Dan Pusat Produksi
		19	Lampung Terang Berjaya: Swasembada Sumber Energi Listrik	Pencegahan, Penanggulangan, Dan Pemulihan Pencemaran Dan Kerusakan Kualitas Udara, Air, Lahan Serta Laut Dan Pesisir
Misi 5: Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Perdesaan yang seimbang dengan Wilayah Perkotaan	Pembangunan Bidang Pertanian dan Perdesaan	20	Kartu Petani Berjaya (KPB): Memberikan Jaminan Kepada Para Petani Untuk Mendapatkan Bibit, Pupuk, Pasar, Modal Dan Beasiswa Bagi Anak Petani (Pertanian Secara Luas)	Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Dan Kelembagaan Petani
		21	Beasiswa Mahasiswa Pertanian : Mendorong Minat Generasi Muda Pada Pertanian	-
		22	Mencegah Dan Memberantas Peredaran Pupuk Palsu	Peningkatan Ketersediaan Sarana Dan Utilitas Pendukung Perdagangan Barang Dan Jasa

Misi RPJMD Provinsi Lampung	Sektor Prioritas Pembangunan	Agenda Kerja Utama RPJMD Provinsi Lampung		Arah Kebijakan Daerah RPJMD Kabupaten Pesisir Barat
		23	Revitalisasi Lada (Lampung <i>Black Pepper</i>)	Pengembangan, Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pertanian
		24	Meningkatkan Daya Saing Kopi, Kakao Dan Komoditas Unggulan Lainnya (Jagung, Singkong, Udang) Serta Mewujudkan Lampung Sebagai Lumbung Ternak Nasional Melalui Penerapan Teknologi Produksi, Pengembangan Industri Hilir Serta Perluasan Pasar Dalam Negeri	Pengembangan, Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pertanian
		25	Nelayan Berjaya : Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Mendorong Tumbuhnya Usaha Budidaya Perikanan, Memberikan Pendampingan Pemasaran, Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan, Jaminan Sosial, Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Anak-Anak Nelayan, SPBU Untuk Nelayan	Optimasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Dan Perikanan Budidaya
		26	Lampung Sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata (Mengembangkan Destinasi Wisata Unggulan, Pusat Agrowisata Dan Ekowisata, Infrastruktur Mendukung Pariwisata, Percepatan Bandara M. Taufik Kiemas)	Peningkatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Dan Destinasi Pariwisata Yang Terintegrasi Dengan Pengelolaan Kebudayaan Daerah Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten
		27	Memfungsikan BUMD Untuk Menangani Komoditi Strategis Bidang Pertanian (Bersinergi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota)	Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Dan Kelembagaan Petani
	Pembangunan Bidang Industri	28	Mengembangkan Industri Pengolahan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	Peningkatan Kinerja Sector Industry Pengolahan Berbasis Bahan Baku Lokal
		29	Mengembangkan Ekonomi Kreatif, UMKM Dan Koperasi	Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Koperasi Dan UMKM
		30	Lampung Ramah Usaha : Menata Regulasi Dan Kebijakan Pengembangan Dunia Usaha	Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat Yang Terintegrasi Dengan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
		31	Memfasilitasi Percepatan Terwujudnya Lampung Sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia (Bersinergi Dengan Kementerian Pertahanan)	-

Misi RPJMD Provinsi Lampung	Sektor Prioritas Pembangunan	Agenda Kerja Utama RPJMD Provinsi Lampung		Arah Kebijakan Daerah RPJMD Kabupaten Pesisir Barat
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama	Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	32	Mengelola Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Rakyat	Pencegahan, Penanggulangan Dan Pemulihan Pencemaran Dan Kerusakan Kualitas Udara, Air, Lahan Serta Laut Dan Pesisir
		33	Lampung Sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara	Pencegahan, Penanggulangan Dan Pemulihan Pencemaran Dan Kerusakan Kualitas Udara, Air, Lahan Serta Laut Dan Pesisir

Sumber: RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

1.3.3. Hubungan antara RJPMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025

RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025. Tahap ini ditujukan untuk melanjutkan pengembangan kemajuan dan kesejahteraan daerah dengan menekankan pada peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana daerah dan pelayanan publik. Maksud tahapan ini untuk pengembangan kemajuan dan kesejahteraan semua aspek, yaitu peningkatan sarana dan prasarana kabupaten, infrastruktur di sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemerataan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara aktif secara integratif dengan penekanan pada moral dan norma-norma agama sebagai landasan berperilaku dan bertindak dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat.

RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan secara rinci tahapan 5 (lima) tahun selama Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat Periode 2021-2026 untuk mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Barat 2005-2025 yaitu **“PESISIR BARAT MADANI DAN SEJAHTERA 2025”**.

Untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dasar Wilayah dalam Skala Mantap, Tanggap Bencana, dan Berwawasan Lingkungan;
2. Membangun Struktur Perekonomian yang Kuat dan Berkelanjutan Berbasis Pariwisata, Sumber Daya Alam, dan Kearifan Lokal;
3. Membangun Pesisir Barat yang Asri dan Lestari;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing;
5. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Demokratis, Berbudaya, dan Tentram dengan Mengedepankan Supremasi Hukum;

6. Membangun Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good and Clean Governance*).

Misi-misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pesisir Barat tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap periode lima tahun. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat, pada saat ini merupakan RPJMD tahap 2 dari RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025, yaitu periode tahun 2021-2025. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahap 2 dari RPJPD Kabupaten Pesisir Barat 2005-2025 tersebut menjadi pedoman utama dalam pembangunan lima tahun Kabupaten Pesisir Barat periode 2021-2026 yang dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahap 2 dari RPJPD Kabupaten Pesisir Barat 2005-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Ke-2 RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi 1 : Membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dasar Wilayah dalam Skala mantap, Tanggap Bencana, dan Berwawasan Lingkungan	
1 Tersedianya prasarana (infrastruktur) dan sarana transportasi yang handal, mengkoneksikan seluruh pelosok daerah, terintegrasi dengan upaya pembangunan bidang lainnya, serta sesuai dengan RTRW	1 Pemantapan sistem jaringan transportasi darat untuk mendukung konektivitas antar pusat-pusat kegiatan yang merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten
	2 Pemantapan sistem jaringan transportasi laut serta sistem jaringan transportasi udara sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi daerah yang saling terkoneksi dan terintegrasi dengan baik
	3 Pemantapan pelayanan angkutan umum yang mudah diakses, aman, nyaman, tertib, serta menjangkau seluruh pelosok daerah
2 Terpenuhinya kebutuhan air minum dan sanitasi yang berkualitas, layak, sehat, aman, mencukupi kebutuhan, serta berkelanjutan	1 Pemantapan layanan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, aman, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan
3 Tersedianya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup (manusia, tumbuhan, dan hewan), baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang	1 Penguatan upaya konservasi untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
	2 Pemantapan pendayagunaan sumber daya air yang ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif
	3 Penguatan upaya mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	kawasan yang terkena dampak banjir, dan abrasi pantai
4 Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal, efisien sesuai kebutuhan, berkelanjutan, dan ramah lingkungan	1 Pemantapan layanan jaringan teknologi informasi dan komunikasi pada seluruh kawasan kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan daerah
	2 Intensifikasi aplikasi teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan komprehensif kepada masyarakat, pemerintah, dan dunai usaha dalam rangka pengembangan ekonomi, pelayanan sosial, budaya, dan pemerintahan
5 Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata	1 Pemantapan layanan jaringan teknologi informasi dan komunikasi pada seluruh kawasan kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan daerah
	2 Intensifikasi aplikasi teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan komprehensif kepada masyarakat, pemerintah, dan dunai usaha dalam rangka pengembangan ekonomi, pelayanan sosial, budaya, dan pemerintahan
6 Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas pendukung mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kebakaran, kekeringan, serta bencana lainnya)	1 Pemantapan kualitas prasarana dan sarana pendukung penanggulangan bencana alam (khususnya bencana pesisir) dengan menerapkan teknologi yang mutakhir (canggih), tepat guna dan tepat sasaran
7 Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang wilayah	1 Pemantapan penerapan, pengendalian, dan pengawasan penataan ruang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)
8 Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas dasar (PSU) perkantoran pemerintahan daerah kabupaten dalam skala mantap	1 Pemantapan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (PSU) perkantoran pemerintahan daerah dilakukan strategis, efektif, dan efisien dengan memperhatikan ketersediaan lahan, anggaran serta dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, swasta, dan partisipasi masyarakat
Misi 2 : Membangun Struktur Perekonomian yang Kuat dan Berkelanjutan Berbasis Pariwisata, Sumber Daya Alam, dan Kearifan Lokal	
1 Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi berlandaskan pada struktur ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan	1 Peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk pertanian (pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan) melalui penerapan teknologi pertanian tepat guna, padat karya, dan mutakhir
	2 Penguatan daya saing destinasi wisata daerah pada tingkat regional, nasional, dan internasional yang terintegrasi dengan upaya pelestarian dan pengembangan seni, budaya, dan kreatifitas masyarakat

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	3 Peningkatan dan penguatan daya saing industri daerah pada level nasional dan internasional
2 Pendapatan perkapita masyarakat tinggi disertai dengan penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masyarakat	1 Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM pada level regional, nasional, dan internasional melalui penerapan teknologi tepat guna, padat karya, dan mutakhir
3 Peningkatan peran investasi/penanaman modal dalam pembangunan ekonomi daerah	1 Pemantapan daya saing investasi yang berorientasi global untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah
4 Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan jasa	1 Memantapkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa seperti pasar rakyat dan pusat distribusi lainnya untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang dan jasa kebutuhan pokok dan barang penting
	2 Memperkuat jaminan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah
	3 Penguatan perlindungan konsumen
Misi 3 : Membangun Pesisir Barat yang Asri dan Lestari	
1 Terwujudnya lingkungan yang indah berseri	1 Peningkatkan upaya penataan lingkungan untuk keindahan dan kenyamanan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan upaya konservasi dan restorasi
2 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	1 Memperkuat upaya penjagaan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah/kawasan, didukung oleh kebijakan dan kerangka regulasi, SDM dan institusi berkualitas dan keterlibatan partisipasi masyarakat
3 Meningkatkan perilaku peduli lingkungan dan kehutanan	1 Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	2 Memperkuat penegakan hukum lingkungan secara adil dan merata
Misi 4 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing	
1 Peningkatan kualitas hidup manusia (SDM) - Peningkatan derajat pendidikan masyarakat	1 Menjamin kepastian layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, tinggi, serta pendidikan masyarakat yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1 Memantapkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada seluruh siklus, lapisan/tingkatan kehidupan manusia secara adil dan merata dengan menerapkan seluruh pendekatan yang modern dan tanggap kebutuhan untuk mempercepat pembangunan manusia Kabupaten Pesisir Barat yang Sejahtera
2 Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang	1 Penguatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas
	2 Pemantapan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil secara terpadu dengan menerapkan teknologi yang mutakhir dan terintegrasi dengan basis data pembangunan bidang lainnya
3 Penurunan tingkat pengangguran dan perluasan kesempatan kerja	1 Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat bersaing pada pasar bebas tenaga kerja yang diberlakukan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan sesuai dengan Mutual Recognition Arrangement (MRA)"
4 Peningkatan Pembangunan Berkesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	1 Memperkuat upaya peningkatan kualitas hidup dan menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
	2 Penguatan integrasi kebijakan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam kebijakan pembangunan
	3 Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat daerah
5 Peningkatan aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial	1 Memantapkan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adil, merata, dan menyeluruh pada setiap aspek penghidupan
	2 Memperkuat peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
6 Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda	1 Memperkuat karakter dan kompetensi pemuda melalui pengembangan pengetahuan dan kemampuan teknis (<i>soft skill</i> dan <i>hard skill</i>) pemuda
	2 Optimalisasi partisipasi pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik
	3 Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan
7 Peningkatan Pembinaan Olahraga	1 Penguatan tata kelola olahraga daerah

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi 5 : Membangun Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Berbudaya, Tentram, dan Demokratis dengan Mengedepankan Supremasi Hukum	
1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang religius	1 Penguatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama pada seluruh siklus kehidupan (individu, keluarga, dan masyarakat) dan aktivitas masyarakat
	2 Perluasan akses dan mutu pendidikan agama bagi masyarakat
	3 Penguatan sikap dan perilaku saling percaya, saling menghormati dan saling toleran inter dan antar kelompok masyarakat
2 Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudaya dan berperadaban luhur	1 Penguatan revitalisasi, reaktualisasi, internalisasi, dan apresiasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, sinergi dan terintegrasi dengan pembangunan bidang lainnya (sosial, ekonomi, dll)
3 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan nyaman	1 Penguatan penyelenggaraan pencegahan, dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban umum dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dan juga pihak-pihak berwenang di bidang keamanan dan ketertiban umum
4 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis	1 Memperkuat kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik
	2 Menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan public
	3 Memperkuat media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat
	4 Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan
5 Terwujudnya karakter masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum	1 Memperkuat pemahaman dan persamaan persepsi serta kesadaran hukum dalam rangka membentuk budaya hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia
	2 Memantapkan penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil
Misi 6 : Membangun Pemerintahan yang Baik dan Bersih (<i>Good And Clean Governance</i>)	
1 Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintah daerah yang profesional	1 Penguatan kapasitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, netral, dan sejahtera
2 Terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien	1 Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan sistem manajemen pemerintahan daerah
3 Kapasitas keuangan pemerintah daerah	1 Penguatan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
4 Pelayanan publik yang berkualitas	1 memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik, penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik, dan pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan public
5 Kapasitas lembaga legislatif daerah	1 Memperkuat lembaga legeslatif (DPRD) sebagai lembaga perwakilan yang adil, independent, dan profesional melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan

Sumber: RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025

1.3.4. Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahunan serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sedangkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi acuan oleh Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja dalam Renstra tersebut. Pelaksanaan RPJMD dijabarkan dalam 5 tahun RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, mulai RKPD Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026. Rancangan RKPD setiap tahun menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. RKPD harus berpedoman pada RPJMD, dalam artian rencana program prioritas tahunan daerah tahunan harus selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas daerah dalam RPJMD. Arah kebijakan daerah tahunan dalam RKPD adalah tema dan/atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak dalam proses pencapaian menuju pencapaian sasaran secara keseluruhan dalam periode 5 (lima) tahun.

Gambar 1.2. Bagan Alur Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

1.3.5. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dengan RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 khususnya pada Pasal 12 ayat (2) ditegaskan bahwa penyusunan RPJMD selain berpedoman pada RPJP Daerah juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam hal ini RTRW Kabupaten Pesisir Barat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037. Hubungan antara RPJMD dan RTRW sebagaimana ketentuan Pasal 160 adalah dengan mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat rencana:

1. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026, selain berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah sendiri, juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah sekitarnya, agar tercipta sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta adanya keterpaduan struktur dan pola ruang antar kabupaten diseputarannya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten dalam Provinsi Lampung, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh mempengaruhi dalam

pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat. Dan yang paling urgen dalam RTRW Kabupaten Pesisir Barat ada beberapa Kawasan strategis nasional dan provinsi yang berada di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 1.5. Arah Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pembangunan RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
A	Pengembangan Struktur Ruang							
A1	Pemantapan Rencana Pusat-Pusat Pelayanan							
A1.1	Peningkatan fungsi PKL Krui	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor Pemerintah Kabupaten	Pesisir Tengah				Penataan Bangunan Gedung	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Pusat Perdagangan Barang dan Jasa	Pesisir Tengah				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag
		Pengembangan Kawasan pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah	Pesisir Tengah				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pesisir Tengah				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan SPAM Perpipaan dan Berbasis Masyarakat	Pesisir Tengah				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Kawasan Permukiman	Pesisir Tengah				Pengembangan Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
A1.2	Peningkatan Fungsi PKLp Kota Jawa	Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa	Bangkunat				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag
		Pengembangan Kawasan Pariwisata	Bangkunat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Bangkunat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas Pertanian	Bangkunat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Kawasan Industri	Bangkunat				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
A1.3	Peningkatan Fungsi PKLp Biha	Penyusunan Rencana Detail/Rinci Kawasan Perkotaan Biha	Pesisir Selatan				Penyelenggara an Penataan Ruang	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa	Pesisir Selatan				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag
		Pengembangan kawasan pariwisata	Pesisir Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pesisir Selatan				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pesisir Selatan				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Kawasan Industri	Pesisir Selatan				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
		Pengembangan Jaringan Irigasi Teknis	Pesisir Selatan				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
A1.4	Peningkatan Fungsi PKLp Lemong	Penyusunan Rencana Detail/Rinci Kawasan Perkotaan Lemong	Lemong				Penyelenggara an Penataan Ruang	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa	Lemong				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembangan kawasan pariwisata	Lemong				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Lemong				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Lemong				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1. 5	Peningkatan Fungsi PPK Negeri Ratu Ngambur	Pengembangan kawasan pariwisata	Ngambur				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Ngambur				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1. 6	Peningkatan Fungsi PPK Way Napal	Pengembangan kawasan pariwisata	Krui Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Krui Selatan				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Pusat Pelayanan Kesehatan	Krui Selatan				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
A1. 7	Peningkatan Fungsi PPK Gunung Kemala	Pengembangan kawasan pariwisata	Way Krui				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Way Krui				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.8	Peningkatan Fungsi PPK Kebuayan	Pengembangan kawasan pariwisata	Karya Penggawa				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Karya Penggawa				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.9	Peningkatan Fungsi PPL Parda Suka	Pengembangan kawasan Pariwisata	Ngaras				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Ngaras				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Ngaras				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.10	Peningkatan Fungsi PPL Kuripan	Pengembangan kawasan pariwisata	Pesisir Utara				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pesisir Utara				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.11	Peningkatan Fungsi PPL Pasar Pulau Pisang	Pengembangan Kawasan Pariwisata	Pulau Pisang				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pulau Pisang				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pulau Pisang				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Kawasan Industri Kecil	Pulau Pisang				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
A2	Sistem Prasarana Utama							
A2.1	Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Darat	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer	Pesisir Barat				Penyelenggara an Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten	Pesisir Barat				Penyelenggara an Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Pesisir Barat				Penyelenggara an Jalan	Dinas PU dan PR
		Rehabilitasi Jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan	Pesisir Barat				Penyelenggara an Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Terminal Tipe C	Bangkunat, Lemong				Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Pesisir Barat				Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Pengembangan Jaringan Pelayanan Lalu Lintas	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
A2.2	Pengembangan Sistem Prasarana Transportasi Laut	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Khusus Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
A3	Sistem Prasarana lainnya							
A3.1	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi	Pembangunan Sistem Jaringan Telekomunikasi (Komunikasi, Data dan Informasi)	Pesisir Barat				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
		Pembangunan jaringan Hotspot di Kawasan Wisata	Pesisir Barat				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Kegiatan Pemerintahan dan Dunia Usaha	Pesisir Barat				Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
A3.2	Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air	Peningkatan dan Pemeliharaan Sumberdaya Air Berskala Regional Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan Dilakukan pada Seluruh Sungai yang Berhulu di TNBBS	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Daerah Irigasi	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas PU dan PR; Dinas Pertanian
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang Tersebar di Seluruh Kecamatan di Pesisir Barat	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas PU dan PR; Dinas Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir di Seluruh Wilayah	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pembangunan dan Rehabilitasi System Drainase Primer, Sekunder dan Tersier	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
		Pengamanan Abrasi Pantai	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
A3.3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan							
A3.3.1	Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Berbasis Masyarakat	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Minum	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
A3.3.2	Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan	Pembangunan Dan Peningkatan TPA	Ngaras, Krui Selatan dan Pesisir Utara				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
		Pembangunan TPST	Pesisir Barat				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
		Pembanguunan TPS	Pesisir Barat				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pesisir Tengah				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
A3.3.3	Pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah	Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Limbah di Pusat Pelayanan Kesehatan	Pesisir Barat				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pembangunan IPLT	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
		Pembangunan sarana dan prasarana air limbah di pedesaan	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Sarana dan Prasarana pengelolaan Air Limbah	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
B	Pengembangan Pola Ruang							
B1	Pengembangan Kawasan Budidaya							
B1.1	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertanian	Pengembangan Lahan Padi Sawah Beririgasi Teknis pada Areal-areal Potensial	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Peningkatan Produktivitas Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Budidaya Perkebunan	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Budidaya Peternakan	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Peningkatan Produktivitas Produksi Perkebunan melalui Intensifikasi Lahan dan Peningkatan Keterampilan Petani Kebun	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Kawasan Pertanian melalui Pendekatan Agropolitan pada Kawasan-kawasan Potensial	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
B1.2	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan	Pengembangan Perikanan Tangkap	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Sarana dan Prasaranan Perikanan Nelyanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Optimalisasi TPI	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Sentra Budidaya Perikanan Laut (udang, kerapu, dan rumput laut)	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Sentra Budidaya Perikanan Air Tawar	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Kegiatan Minapolitan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
B1.3	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Pembangunan Kawasan Industri	Pesisir Selatan, Bangkuntat				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengendalian Lingkungan pada Kawasan Industri	Pesisir Barat				Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
		Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Industri	Pesisir Selatan, Bangkunt				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
		Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pesisir Barat				Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperindag
B1. 4	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata	Pengembangan Kawasan Pariwisata Berkelanjutan	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Promosi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Pesisir Barat				Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
B1. 5	Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Pesisir Barat				Pengembangan Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan	Pesisir Barat				Kawasan Permukiman	Dinas PR dan KP
		Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasaran Permukiman	Pesisir Barat				Pengembangan Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pengembangan Perumahan Rakyat	Pesisir Barat				Pengembangan Perumahan	Dinas PR dan KP
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permukiman	Pesisir Barat				Pengembangan Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pembangunan dan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pesisir Barat				Pengembangan Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
		Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Cepat Tumbuh Perkotaan	Pesisir Barat				Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PU dan PR
C	Pengembangan Kawasan Strategis							
C1	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi	Pengembangan Kawasan Pulau Pisang	Pulau Pisang				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Kawasan Tanjung Setia	Pesisir Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Kawasan Perkotaan	Pesisir Tengah				Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PU dan PR

Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

1.3.6. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat dan/atau kebijakan, rencana, dan program dari masing-masing Perangkat Daerah. Di dalam peyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026, integrasi KLHS ke dalam RPJMD dilakukan sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Adapun rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6. Isu dan Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

No	Pilar	Isu Strategis		Rekomendasi
1	Sosial	1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pesisir Barat	- Meningkatkan perlindungan/ jaminan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial yang lebih tepat sasaran dengan kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan; - Mengurangi beban pengeluaran kebutuhan masyarakat miskin melalui bantuan/santunan sembako dan uang tunai yang bersifat langsung; - Memberikan pelatihan kerja dan modal kerja usaha baru bagi masyarakat miskin; - Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan

No	Pilar	Isu Strategis		Rekomendasi
				pendapatan dan memberikan lapangan kerja lebih luas kepada masyarakat, khususnya keluarga miskin;
				• Bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi harus dikucurkan untuk membantu menurunkan angka kemiskinan di Kab. Pesisir Barat; • Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui produktivitas pertanian;
		2	Prevelensi Kekurangan Gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	• Pengembangan balai benih ikan; • Penerapan teknologi bioflok pada budidaya lele secara intensif; • Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan keamanan obat ikan; • Penguatan kelompok masyarakat dan nelayan dalam pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan; • Pengadaan anggaran peningkatan fasilitas kompetensi bagi kelompok usaha pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan.
		3	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	• Menyelenggarakan program-program untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan; • Mengembangkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan; • Penguatan database peserta penerima bantuan iuran melalui jaminan kesehatan/Kartu Indonesia Sehat; • Penganggaran untuk peserta penerima bantuan iuran melalui jaminan kesehatan/Kartu Indonesia Sehat.
		4	Prevelensi Kekerasan terhadap Perempuan	• Pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender (PUG); • Pembuatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
				• Meningkatkan perlindungan pada anak dan perempuan melalui pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, diskriminasi serta perdagangan manusia; • Mengoptimalkan pengarusutamaan gender pada penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran; • Meningkatkan upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan
2	Ekonomi	1	Persentase Akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke Layanan Keuangan	• Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; • Meningkatkan pengembangan

No	Pilar	Isu Strategis		Rekomendasi
				wirausaha baru dan berdaya saing; Menyelenggarakan kemitraan di dunia usaha dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.
		2	Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	- Meningkatkan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah; - Meningkatkan pengembangan teknologi industri khususnya teknologi hasil pertanian/perkebunan; - Peningkatan penataan sistem distribusi daerah yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian berusaha, dan perlindungan konsumen.
3	Lingkungan	1	Persentase kawasan sumber air, wilayah sungai, embung dan sumber daya air lainnya (prioritas) yang dikonservasi	- Penambahan anggaran untuk pembangunan embung; - Memperbanyak kerjasama internasional dan dukungan pengembangan program terkait air; - Pembangunan dan peningkatan sarana air bersih; - Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, aman, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan.
		2	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	- Melakukan penambahan anggaran untuk pembangunan jalan lingkungan, drainase lingkungan, MCK Komunal, sumur bor komunal, SPAM Perdesaan, penyediaan lahan untuk pembangunan tempat pengolahan sampah 3R (TPS 3R); - Memberikan bantuan rumah suwadaya peningkatan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah; - Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, aman, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan.

No	Pilar	Isu Strategis		Rekomendasi
		3	Jumlah kecamatan yang melaksanakan pengelolaan 3R	• Pembangunan TPS3R di masing masing Kecamatan; • Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah dan Bank Sampah di setiap Kecamatan; • Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis 3R.
		4	Persentase Kelompok Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang mendapat Fasilitas Peningkatan	• Penyediaan Alat Tangkap Ikan (Rumpon); • Sosialisasi kepada Nelayan dalam Melestarikan Ekosistem dan Cara Penangkapan Ikan yang Efektif dan Efisien; • Pembatasan dalam Penangkapan Ikan, baik dari Jenis maupun beratnya;
		5	Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur pertanian belum memadai	• Sosialisasi penggunaan pestisida dalam perawatan tanaman pangan dan pertanian; • Penyediaan sarana dan prasarana pertanian; • Optimalisasi penggunaan bahan organik dalam perawatan tanaman pangan dan pertanian; • Meningkatkan daya tahan tanaman dari serangan penyakit.
		6	Optimalisasi Pemanfaatan Pohon Damar sebagai Komoditas Unggulan	• Sosialisasi kepada masyarakat dalam melestarikan pohon damar; • Memberikan himbauan untuk tidak melakukan penebangan pohon damar dan alih fungsi lahan hutan damar; • Optimalisasi penggunaan bahan organik dalam perawatan pohon damar; • Mengoptimalkan hasil damar dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat;
		7	Proporsi Tutupan Hutan terhadap Luas Lahan Keseluruhan	• Melakukan koordinasi pengelolaan hutan; • Bekerjasama dengan KPH, Balai Besar TNBBS, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Pusat, NGO dan Masyarakat; • Meningkatkan kemitraan konservasi dalam melakukan pemanfaatan hutan; • Mensosialisasikan Program Perhutanan Sosial
4	Tata Kelola Kelembagaan	1	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Undang-undang Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	• Mendorong Pembuatan produk hukum yang memberikan kepastian dan berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha; • Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi antara produk hukum daerah dan pusat dan antar produk hukum daerah;

No	Pilar	Isu Strategis		Rekomendasi
				• Pengembangan kepastian institusi nasional yang terkait pada semua level; • Penegakan hukum yang mantap secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil; • Meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil;

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

1.3.7. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dengan RPKD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, strategi daerah dalam pengentasan kemiskinan sedapat mungkin bersinergi dan terintegrasi dengan dokumen RPJMD. Sinergitas dan integrasi strategi daerah dalam pengentasan kemiskinan merujuk pada indikasi program prioritas daerah yang diambil dan arah kebijakannya. Sementara itu isu strategis Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) *corona virus disease* 2019 (covid-19); (4) kependudukan; (5) peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi daerah; (6) aksesibilitas wilayah; (7) penguatan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial; (8) penguatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; (9) kapasitas fiskal daerah; (10) efektivitas pengelolaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai indikator kinerja pembangunan daerah, profil kemiskinan, determinan kemiskinan daerah, keuangan daerah, tinjauan terhadap kebijakan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan baik Nasional, Provinsi Lampung, maupun daerah Kabupaten Pesisir Barat saat ini dan masa yang akan datang, maka rumusan tujuan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin”.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026, maka strategi, arah kebijakan, program penanggulangan kemiskinan daerah dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 1.7. Strategi, Arah Kebijakan, Program, RPKD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

No	Strategi	Arah Kebijakan		Program	Perangkat Daerah
1	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	1	Penguatan dan perluasan perlindungan sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		2	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin yang mengalami kerentanan sebagai akibat dari permasalahan fisik/disabilitas, ketidakberdayaan karena usia, gender dan sosial, ketidakadaan karena kejadian bencana dan konflik sosial, diskriminasi, eksploitasi serta guncangan ekonomi akibat bencana	Rehabilitas Sosial	Dinas Sosial
2	Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin	1	Peningkatan kompetensi dan keterampilan kerja anggota rumah tangga miskin dalam usia senja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		2	Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		3	Meningkatkan dan memperluas akses pendidikan bagi anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin	Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan miskin	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		5	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan untuk mendorong kenaikan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan prasarana dan sarana, serta penyuluhan pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian

No	Strategi	Arah Kebijakan		Program	Perangkat Daerah
3	Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil	1	Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah usaha mikro dan kecil sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar dan berdaya saing tinggi	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperindag
				Pengembangan UMKM	Dinas Koperindag
4	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan infrastruktur dasar yang layak dan berkelanjutan	1	Meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap layanan sumber daya air minum layak dan berkelanjutan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		2	Meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
		3	Meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan	Penyelenggaraan Jalan	Dinas PU dan PR
5	Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan	1	Peningkatan konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat baik antar sektor, antar level pemerintahan, maupun dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sekretariat Daerah
		2	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
6	Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan penguatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1	Peningkatan pembinaan dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas PP dan KB
		2	Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera dan harmoni	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas PP dan KB

Sumber : RPKD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

1.3.8. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Daerah Berbatasan

Kabupaten Pesisir Barat secara administratif berbatasan dengan kabupaten tetangga di Provinsi Lampung, yaitu (1) Kabupaten Lampung Barat dan (2) Kabupaten Tanggamus. Batas wilayah ini sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Prahu Kecamatan Balik Bukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, Desa Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Sirnagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Naningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

1) RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022

Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah induk dari Kabupaten Pesisir Barat. RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025. Visi RPJMD yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat Hebat dan Sejahtera.” Kata Hebat memiliki akronim : Harmoni, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa.

Selanjutnya, misi yang ditetapkan untuk pencapaian dari visi Lampung Barat yang Hebat dan Sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing;
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumber daya lokal;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik;

5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan yang diambil selama kurun waktu periode tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan infrastruktur, sarana dan prasarana, utilitas pada kawasan stretegis dan kawasan budidaya;
2. Peningkatan penjaminan layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat bagi seluruh masyarakat baik dari segi akses dan mutu;
3. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya (SDA dan SDM) dan kearifan lokal;
4. Pemanfaatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas tata kelola keuangan daerah;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera.

Berdasarkan pada rumusan misi dan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sedikit banyak selaras dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026. Hal ini dapat dilihat bahwa fokus pengembangan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat daerah ada pada (1) peningkatan kualitas infrastruktur; (2) pengembangan SDM dan SDA; (3) pengembangan ekonomi dengan berbasis masyarakat; dan (4) reformasi birokrasi.

2) RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

Kabupaten Tanggamus berbatasan langsung dengan Kabupaten Pesisir Barat pada sisi selatan, selain juga keduanya sama-sama berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan merupakan daerah jalur nasional lintas barat sumatera. RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 merupakan tahun terakhir dari RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025. Visi yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2018-2023 adalah “Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera”.

Misi untuk RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas;
2. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, unggul berkarakter dan berdaya saing;
3. Mewujudkan pekon sebagai titik berat pembangunan bagi kehidupan sosial yang religius dan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, gotong royong dan bhineka tunggal ika;
4. Mengembangkan inovasi sektor pertanian dan perikanan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi;

5. Menyediakan sarana infrastruktur secara berkelanjutan yang berkeadilan dan merata;
6. Mewujudkan pembangunan dan pengelolaan sektor pariwisata berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal;

Demi pencapaian visi dan misi daerah untuk periode tahun 2018-2023, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penataan sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengelolaan aset daerah;
2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan;
3. Peningkatan akses layanan kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan menuju Tanggamus Emas;
4. Percepatan pemenuhan akses prasarana-sarana layanan dasar pendidikan menuju Tanggamus Cerdas;
5. Penyempurnaan program perlindungan sosial, peningkatan akses rumah tangga miskin terhadap pelayanan dasar dan pelatihan *soft-skill* menuju tenaga kerja yang berdaya saing tinggi;
6. Pemberdayaan masyarakat, pengurangan PMKS melalui penguatan kapasitas rehabilitasi sosial dan pengembangan forum kerja sama lintas budaya, agama dan adat dalam rangka menjaga stabilitas keamanan agar tidak terjadi konflik sosial;
7. Pembangunan pusat pertumbuhan baru yang berorientasi pada sinergitas kewilayahan;
8. Pengembangan *digital market place*, pengembangan jiwa kewirausahaan dan pengembangan *integrated marketing system* untuk produk UMKM;
9. Pengembangan strategi promosi dan kerja sama investasi yang berpijak pada peningkatan daya saing investasi;
10. Pengembangan kawasan pedesaan melalui konsep *smart pekon*;
11. Penghapusan kekerasan rumah tangga dan perlindungan bagi perempuan dan anak;
12. Penguatan petani, peternakan dan nelayan melalui kebijakan yang afirmatif terhadap penyediaan bibit unggul, pupuk, harga dan pasar;
13. Menjaga kemandirian pangan dengan swasembada komoditas pangan;
14. Mengurangi disparitas infrastruktur kawasan pedesaan dan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh;
15. Pemenuhan perumahan/pemukiman rakyat yang memiliki akses sanitasi dan air bersih serta tersedianya fasilitas ruang publik;
16. Rehabilitasi lahan dan lingkungan kritis serta gerakan merdeka dari sampah;
17. Peningkatan dukungan pemerintah dalam pencegahan/mitigasi bencana dan rehabilitasi pasca bencana;

18. Penguatan regional branding “Majestic Tanggamus”, “Pesona Wisata Ratu” dan peningkatan event pariwisata (Tanggamus Festival) serta pembangunan fasilitas destinasi pariwisata dalam bentuk penyusunan *site plan* dan *detail engineering design* kawasan destinasi wisata unggulan.

Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus juga merupakan daerah sisi barat Lampung yang diarahkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk pengembangan pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari arah kebijakan pembangunan daerah yang memfokuskan pariwisata sebagai salah satu unggulan daerah dengan mengedepankan pembangunan masyarakat dan budaya lokal. Berdasarkan pada rumusan misi dan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 terlihat selaras dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026. Hal ini dapat dilihat bahwa fokus pengembangan daerah ada pada sektor (1) peningkatan kualitas infrastruktur; (2) pengembangan SDM dan SDA; (3) peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat (4) pengembangan ekonomi pariwisata daerah dengan berbasis masyarakat; (4) mitigasi bencana; dan (5) peningkatan pelayanan publik pemerintah daerah.

1.3.9. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Sektorial Lainnya

Penyusunan RPJMD juga tetap memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain dokumen (i) Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDG's), (ii) Pengaturan dan penetapan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian/Lembaga dan diterapkan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat yang melaksanakan 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, (iii) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2025, (iv) Rencana induk Kelitbangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022-2026 dan (v) dokumen perencanaan sektoral lainnya yang dapat memberikan panduan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Maksud Dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 ini disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 41-42 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

1.4.1. Maksud

RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 penyusunannya dimaksudkan untuk:

1. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat;

2. Menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan;

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 adalah:

1. Memberikan gambaran umum tentang kondisi daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam kurun waktu 2016-2020 melalui data-data capaian pembangunan;
2. Memberikan gambaran umum tentang permasalahan dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun perencanaan 2021-2026;
3. Memberikan gambaran umum tentang kemampuan keuangan daerah sehingga dapat dirumuskan prioritas, strategi dan arah kebijakan yang sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
4. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2021-2026
5. Sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah melalui penetapan indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam jangka waktu 5 tahun ke depan;
6. Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengendalian.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan kinerja keuangan pada periode RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021 berdasarkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2016-2019 (penyusunan Rancangan Awal dilakukan pada tahun 2020 atau sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih). Berdasarkan pada target dan realisasi capaian keuangan tersebut akan diperoleh acuan dalam memproyeksikan kemampuan keuangan daerah pada selama jangka menengah daerah mendatang serta penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan pada masa mendatang.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan makna visi dan misi selanjutnya dijabarkan dalam bentuk tujuan, dan sasaran berikut indikator-indikator capaian selama periode 2021-2026.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Selain itu dalam bab ini juga diuraikan mengenai program-program yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 serta pedoman transisi pada RKPD Tahun 2027.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui adalah salah satu dari lima belas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 (Lembaran Negara Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5364) tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung tertanggal 16 November 2012 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2012.

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Pesisir Barat perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Pesisir Barat.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Gambaran umum pada aspek geografis akan menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Barat.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

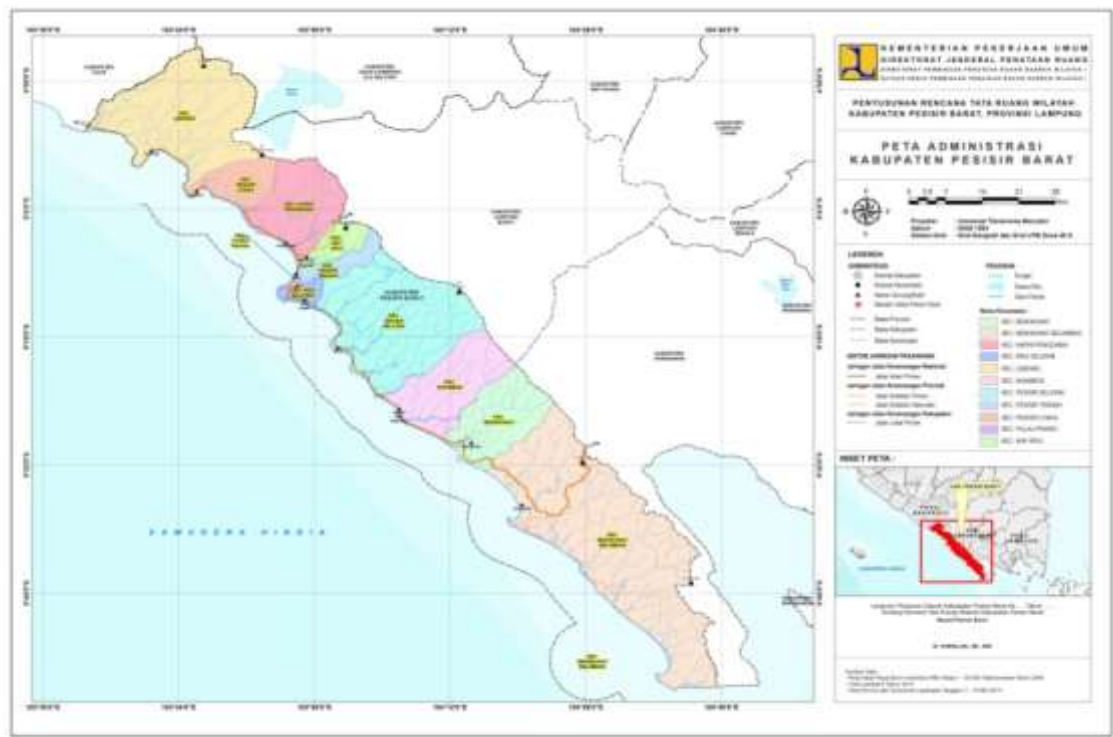
Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terletak di ujung bagian Barat Provinsi Lampung yang bagian barat wilayahnya merupakan garis pantai Samudera Hindia dengan letak wilayah bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Lampung Barat, wilayah bagian Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan wilayah bagian barat merupakan garis pantai Samudera Hindia. Kabupaten Pesisir Barat Letak administratif ini menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai lalu lintas penghubung antara Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu - Kabupaten Pesisir Barat - Kabupaten Lampung Barat - Kabupaten Tanggamus.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten yang berada di ujung bagian barat Provinsi Lampung yang terletak pada koordinat :4°, 40', 0" - 6°, 0', 0" Lintang Selatan dan 103°, 30', 0" - 104°, 50', 0" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas ± 2.907,23 Km² atau 8,39% dari luas wilayah Provinsi Lampung, memiliki garis pantai 221,5 Km (daratan dan garis pulau-pulau) dan garis pantai daratan 210 Km.

Batas wilayah administratif Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ujung Rembun, Desa Pancur Mas, Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Desa Kubu Prahua Kecamatan Balik Bukit, Desa Kutabesi, Desa Sukabumi Kecamatan Batu Brak, Desa Sukamarga, Desa Ringinsari, Desa Sumber Agung, Desa Tuguratu, Desa Banding Agung Kecamatan Suoh, Desa Hantatai, Desa Tembelang, Desa Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Desa Gunung Doh Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Desa Ngarit, Desa Rejosari, Desa Petekayu, Desa Sirnagalih Kecamatan Ulu Belu, Desa Datar Lebuay Kecamatan Naningan Kabupaten Tanggamus, Desa Way Beluah, dan Desa Melaya Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawa, Desa Sedayu, Desa Sidomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir Barat disebut Pekon) dan 2 kelurahan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Bangkunt dengan luas 943,70 Km² dan yang terkecil adalah Kecamatan Krui Selatan dengan luas 36,25 Km².

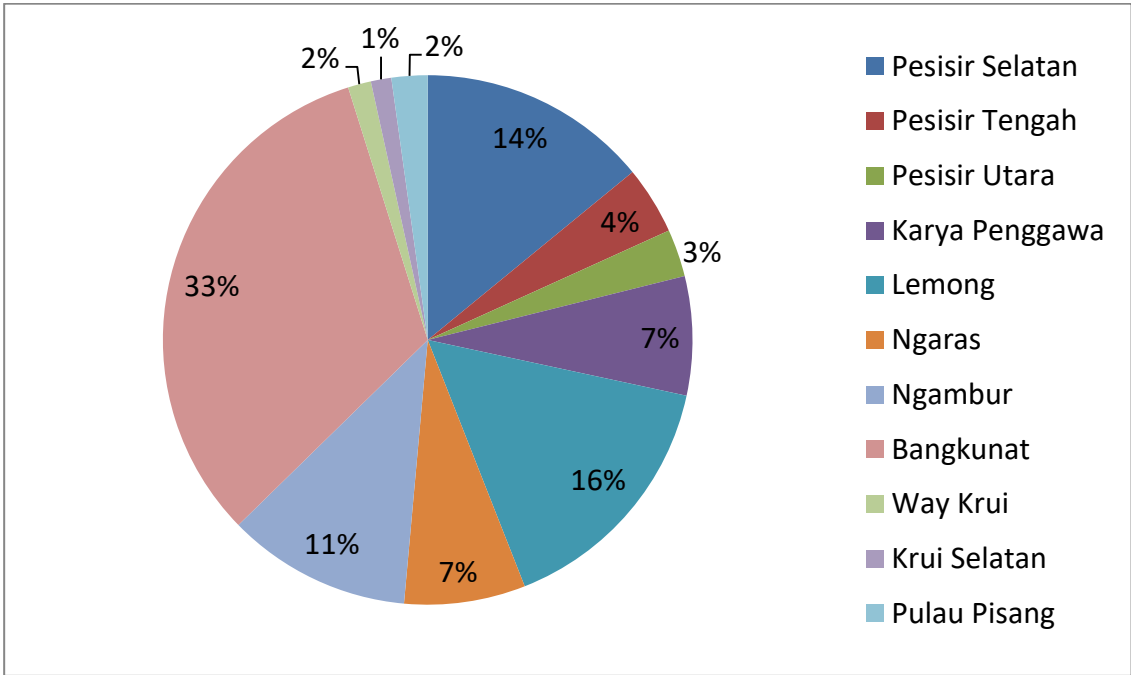
Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat

No	Kecamatan	Luas(Km ²)	Persentase (%)
1	Pesisir Selatan	409,17	14,07
2	Pesisir Tengah	120,64	4,15
3	Pesisir Utara	84,27	2,9
4	Karya Penggawa	211,11	7,26
5	Lemong	454,97	15,65
6	Ngaras	215,03	7,4
7	Ngambur	327,17	11,25
8	Bangkunat	943,7	32,46
9	Way Krui	40,92	1,41
10	Krui Selatan	36,25	1,25
11	Pulau Pisang	64	2,2
	Jumlah	2.907,23	100,00

Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Sementara itu, luas wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara administratif per kecamatan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2. Luas Wilayah per-KecamatanKabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

2.1.2. Kondisi Topografi

Secara topografi daerah, Kabupaten Pesisir Barat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu:

1. Daerah dataran rendah (ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut);
2. Daerah berbukit (ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut);
3. Daerah pegunungan (daerah ketinggian 1.000 sampai dengan 2.000 meter dari permukaan laut). Keadaan wilayah sepanjang Pantai Pesisir Barat

umumnya datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar 3% sampai 5%. Di bagian Barat Laut Kabupaten Pesisir Barat terdapat gunung-gunung dan bukit, yaitu diantaranya Gunung *Pugung* (1.964 m). Dengan kondisi topografi tersebut, maka kawasan permukiman pada umumnya berlokasi di daerah yang relatif datar, tetapi dengan kondisi luas lahan yang terbatas ada kemungkinan arah pengembangan pemukiman ke daerah-daerah yang bertopografi dan kolektor kontur tajam.

Secara umum kemiringan lereng bervariasi dari datar sampai sangat terjal. Sebagian besar wilayah Pesisir Barat berlereng miring sampai sangat terjal sebesar 70 % dari seluruh luasan wilayah Pesisir Barat. Wilayah ini memanjang dari utara ke selatan di sepanjang Patahan Semangka. Wilayah terjal sampai sangat terjal dengan kemiringan 25% – 40% dan >40% terdapat di Kecamatan Lemong (Pekon Lemong, Malaya, Bandar Pugung, Pagar Dalam, Hutan, Balam), sebagian besar wilayah Kecamatan Karya Penggawa, dan Kecamatan Ngaras (Pekon Marang, Biha, Mon, Gedung Cahya, Kota Baru). Wilayah dengan kemiringan lahan antara datar (0 – 0,2%) sampai landai (0,2 – 2%) terdapat di pantai barat Kecamatan Pesisir Selatan dan Ngaras.

Secara fisiografis daerah Pesisir Barat dibedakan atas 3 (tiga) bagian yakni daerah pesisir di bagian barat dengan kemiringan 0 sampai dengan 15 persen, daerah pegunungan yang merupakan daerah Bagian Tengah dengan kemiringan 15 sampai dengan atau lebih dari 40 persen, daerah bergelombang dengan kemiringan lahan 2 sampai 40 persen. Ketinggian wilayah Kabupaten Pesisir Barat, dibedakan menjadi 3 wilayah yaitu:

- a. Dataran rendah dengan ketinggian 0 – 200 meter dpl
- b. Daerah perbukitan dengan ketinggian 200 - 1000 meter dpl,
- c. Daerah pegunungan dengan ketinggian 1000 – 2000 meter dpl

Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Tengah dan Pesisir Selatan pada umumnya mempunyai ketinggian berkisar antara 0 – 500 meter dpl. Bentuk bentang alam sepanjang pesisir barat datar sampai berombak dengan kemiringan berkisar antara 3 – 5 persen. Di beberapa wilayah Kabupaten Pesisir Barat terdapat gunung-gunung dan bukit.

Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Tabel 2.2. Nama Gunung dan Tingginya di Kabupaten Pesisir Barat

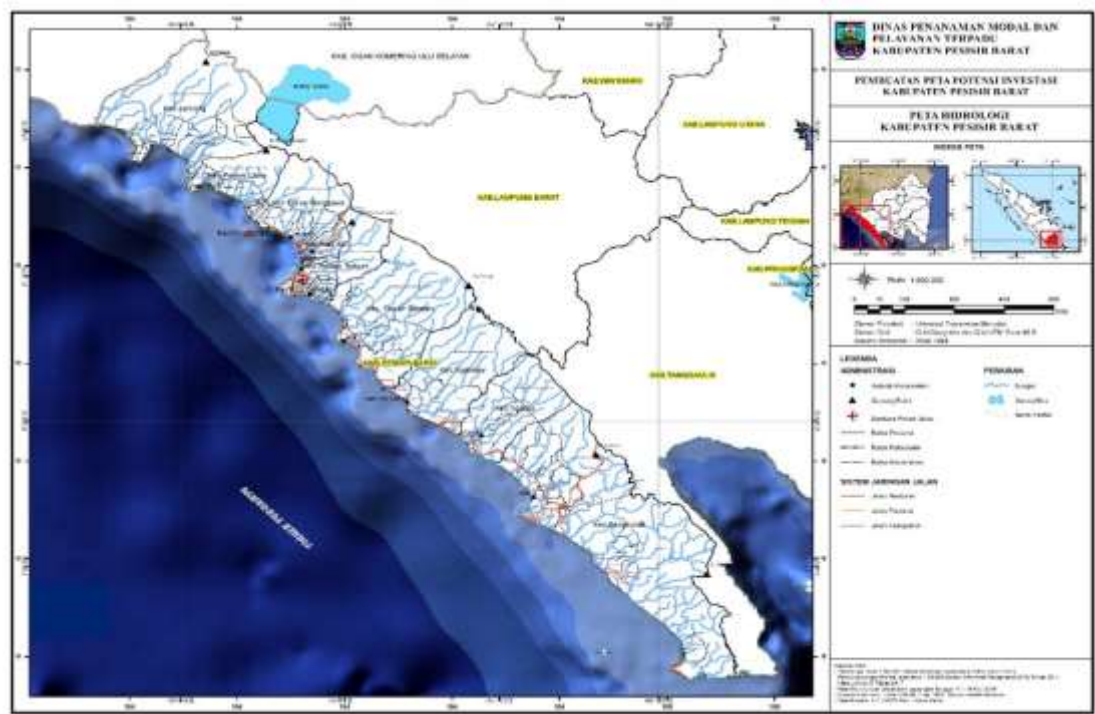
No	Kecamatan	Tinggi (m)	Letak
1	Gunung Pugung	1.964	Pesisir Utara

Sumber : BPS Pesisir Barat, Pesisir Barat Dalam Angka, 2020

2.1.3. Kondisi Hidrologi

Wilayah Pesisir Barat di bagian barat mempunyai sungai-sungai yang mengalir pendek dengan pola aliran dendritik yang menyebabkan daerah ini ditandai dengan jarangya banjir sebab pada saat musim hujan datang bersamaan air tidak terkonsentrasi dan timing lagnya menjadi lambat. Delta marine ditandai dengan agregat kasar hasil endapan aluvial vulkanik, hal ini menyebabkan bila air besar muara sungai sering berpindah (meander). Sungai – sungai yang berukuran pendek dan mengalir di lereng terjal seperti ini sukar dikembangkan untuk irigasi, kecuali yang sudah mengalir di daerah delta pantai, umumnya mudah dikembangkan walaupun masih terkena pengaruh pasang surut laut.

Gambar 2.4. Peta Hidrologi Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Pada bagian timur Pesisir Barat merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*) sungai-sungai besar yang mengalir ke arah timur antara lain : Way Besai, Way Seputih dan sebagainya. Proses erosi yang sudah lanjut, besarnya material yang terangkut (*sediment load*) menyebabkan makin cepatnya daerah ini mengalami kemiskinan unsur hara tanah. Dengan berkurangnya flora penutup tanah dan sifat drainase tanah yang baik (terdiri dari lempung pesiran bergeluh) praktis daya simpan air daerah ini sangat kecil, ini menyebabkan fluktuasi aliran permukaan (*run off*) makin besar, sungai-sungai yang mengalir ke sebelah timur menjadi terganggu kestabilannya. Umumnya sungai-sungai yang mengalir ke sebelah barat masih stabil karena didukung oleh banyaknya flora penutup tanah dan belum terganggunya air tanah dangkal sebagai sumber mata air.

Tabel 2.3. Data Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Nama DAS
1	Lemong	1. DAS Selayan; 2. DAS Mengkudu; 3. DAS Halami; 4. DAS Simpang Balak; 5. DAS Amaisano; 6. DAS Atau; 7. DAS Walur.
2	Pesisir Utara	1. DAS Tanjung Alur; 2. DAS Bayuk; 3. DAS Balam; 4. DAS Batu Lawang; 5. DAS Nata; 6. DAS Gedau; 7. DAS Way Kendaway; 8. DAS Way Pemancar.

No	Kecamatan	Nama DAS
3	Karya Penggawa	1. DAS Tembakak; 2. DAS Kebuduk; 3. DAS Kebuduk Tunggal; 4. DAS Karwi; 5. DAS Nukak; 6. DAS La Ay; 7. DAS Hanuan.
4	Way Krui	1. DAS Way Krui; 2. DAS Toulunik; 3. DAS Way Ngison,
5	Pesisir Tengah	1. DAS Mahnai; 2. DAS Way Batu; 3. DAS Way Tuwok.
6	Pesisir Selatan	1. DAS Tanjung Jati; 2. DAS Biha; 3. DAS Way Tenumbang; 4. DAS Marang.
7	Ngambur	1. DAS Ngambur Bunak; 2. DAS Temuli; 3. DAS Sumber Agung; 4. DAS Ngambur.
8	Ngaras	1. DAS Ngaras; 2. DAS Surabalak; 3. DAS Titan; 4. DAS Titan Kanan.
9	Bangkunat	1. DAS Bambang; 2. DAS Ceringin; 3. DAS Heni. 4. DAS Pemerihan; 5. DAS Cangup; 6. DAS Babuta; 7. DAS Napaliut; 8. DAS Manangakiri; 9. DAS Betung; 10. DAS Nipah; 11. DAS Paya; 12. DAS Panagon Hilir; 13. DAS Pariago; 14. DAS Kawat Kiri; 15. DAS Kawat Kecil; 16. DAS Haru; 17. DAS Belimbing; 18. DAS Sleman; 19. DAS Balak; 20. DAS Kejadian; 21. DAS Tirompedaka; 22. DAS Asahan; 23. DAS Cang; 24. DAS Kaur Gading; 25. DAS Muaratanco; 26. DAS Belambang; 27. DAS Way Pintau; 28. DAS Tampang.

Sumber : Dinas PU dan PR dan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 (data diolah)

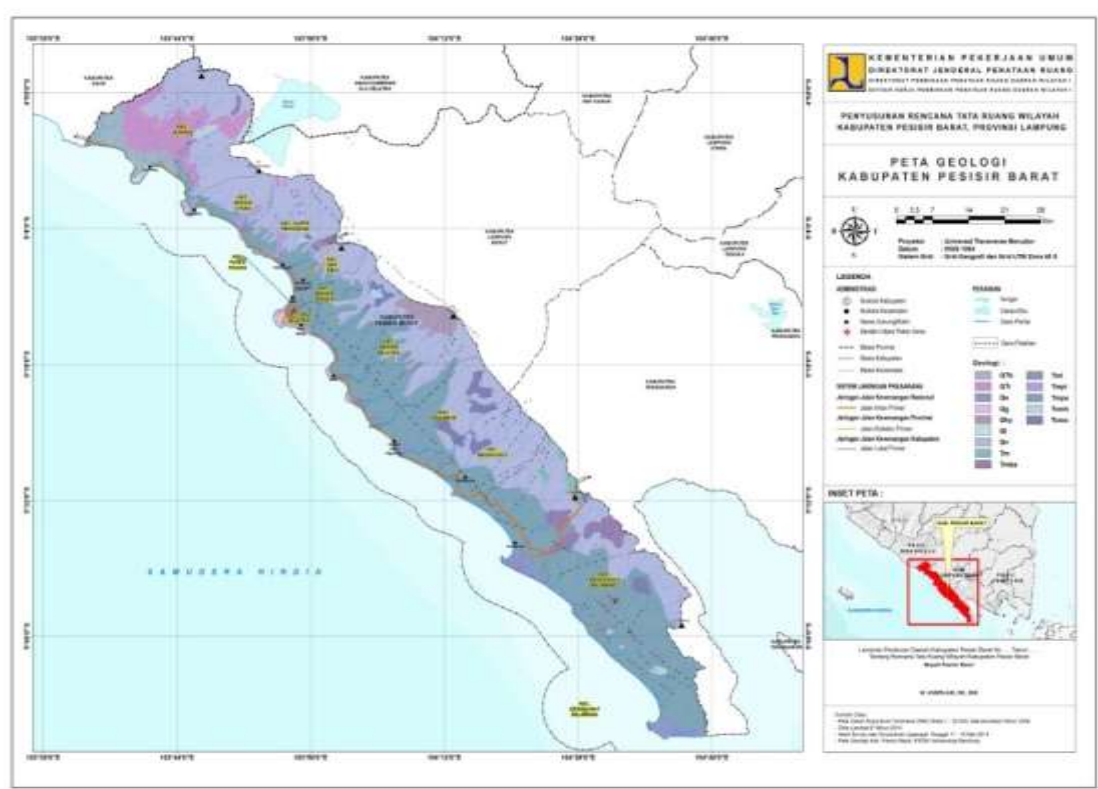
2.1.4. Kondisi Geologi

Batuan yang umum dijumpai di Kabupaten Pesisir Barat adalah endapan gunung api, batu pasir neogen, granit batu gamping, metamorf, tufa Lampung, dan alluvium. Formasi tufa masam dari debu gunung api di sekitar Bukit Barisan. Sedangkan endapan gunung api menutupi sebagian besar wilayah dan kadang-kadang dijumpai endapan emas dan perak serta mineral logam lainnya sebagai mineral ikutan.

Berdasarkan peta geologi Provinsi Lampung skala 1:250.000 yang disusun oleh S. Gafoer, TC Amin, Andi Mangga (1989) dalam Bakosurtanal (2004), Pesisir Barat terdiri dari batuan Vulkan Tua (Old Quarternary Young), Formasi Simpang Aur, Formasi Ranau, Formasi Bal, dan Batuan Intrusive. Litologi yang dominan adalah jenis vulkanik, seperti Andesit – Basaltik. Jenis batuan ini menyebar hampir di semua kecamatan, kecuali di Kecamatan Karya Penggawa yang mempunyai jenis batuan gamping. Batuan sedimen (alluvium) menyebar di sepanjang pantai Barat, yaitu di kaki lereng Bukit Barisan.

Sedangkan berdasarkan peta geologi Provinsi Lampung skala 1 : 250.000 yang disusun oleh S. Gafoer, TC Amin, Andi Mangga (1989), Pesisir Barat terdiri dari batuan vulkan tua (Old Quarternary Young), Formasi simpang aur, formasi ranau, formasi bal, atuan intrusive sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.5. Peta Geologi Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

2.1.5. Kondisi Klimatologi

Menurut Oldeman, Irsal L Darwis (1979), akibat pengaruh dari rantai pegunungan Bukit Barisan, maka Pesisir Barat memiliki 2 (dua) zone iklim yaitu:

- 1. Zone A (Jumlah bulan basah > 9 Bulan) terdapat di bagian barat Taman Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Termasuk Krui dan Bintuhan.
- 2. Zone BL (Jumlah bulan basah 7 - 9 bulan) terdapat di bagian timur Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Berdasarkan curah hujan dari Badan Meteorologi dan Geofisika, curah hujan Pesisir Barat berkisar antara 2.500–3.500 milimeter per tahun atau 140–221 milimeter per bulan. Tinggi curah hujan di Kabupaten Pesisir Barat terbagi atas:

- a. Curah hujan antara 2500 – 3000 mm per tahun
- b. Curah hujan antara 3000 – 3500 mm per tahun

Secara umum Kabupaten Pesisir Barat beriklim tropis humid dengan angin laut lembab yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan 2 (dua) angin/musim setiap tahunnya. Pada bulan November sampai dengan bulan Maret angin bertiup dari arah barat dan barat laut, bulan Juli sampai dengan Agustus angin bertiup dari arah timur dan tenggara dengan kecepatan angin rata-rata 70 km/hari. Temperatur udara maksimum 33°C dan temperatur minimum 22°C. Rata-rata kelembaban udara sekitar 80-88 persen, akan semakin tinggi pada daerah yang lebih rendah.

Gambar 2.6. Peta Curah Hujan Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

2.1.6. Kondisi Kebencanaan

Rawan bencana adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (Tondobala, 2012). Rawan bencana yang dimaksud adalah daerah yang memiliki kemungkinan suatu bahaya akan terjadi, bahaya tersebut akibat dari kondisi geografis, geologis, demografis ataupun karena ulah manusia. Contoh daerah rawan bencana adalah seperti kawasan rawan gempa, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang ekstrim, dan lain sebagainya.

Gambar 2.7. Peta Resiko Tsunami di Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Hasil Analisis Data, 2020

Pendidikan mitigasi bencana tsunami yang melibatkan masyarakat sebagai sarana untuk memberikan informasi mengenai risiko yang bisa ditimbulkan dari bencana tsunami. Selain itu pendidikan mitigasi bencana tsunami yang dilaksanakan di masyarakat sebagai upaya untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana tsunami, pendidikan yang dilaksanakan di masyarakat merupakan pendidikan yang melibatkan masyarakat dengan melakukakn pembelajaran yang mengangkat fakta-fakta yang terjadi dilingkungan tersebut seperti potensi terjadinya bencana di wilayah, masalah sosial dan lain sebagainya. Diharapkan dengan pendidikan yang melibatkan masyarakat tersebut bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai fenomena atau kejadian yang ada di sekitar masyarakat sehingga bisa menghadapi masalah sosial yang begitu dinamis (Putri., dkk. 2018).

Gambar 2.8. Peta Ancaman Longsor dikabupaten Pesisir Barat



Sumber : Hasil Analisis Data, 2020

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng (Dwiyanto, 2002).

Tanah longsor terjadi disebabkan oleh adanya gerakan tanah sebagai akibat dari Bergeraknya masa tanah atau batuan yang bergerak kesepanjang lereng atau di luar lereng karena faktor gravitasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Juhadi, dkk (2018) “bahwasanya penyebab terjadinya tanah longsor adalah adanya gerakan tanah pada kondisi tanah yang labil, tipe tanah longsor sering dipicu oleh tingginya curah hujan”. Wilayah yang memiliki kerentanan tanah longsor adalah yang berbatasan dengan perbukitan hal ini sesuai dengan keadaan Pesisir Barat yang rentan akan bencana longsor karena didominasi oleh tebing Pegunungan Bukit Barisan Selatan.

Gambar 2.9. Peta Ancaman Gempa di Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Hasil Analisis Data, 2020

Gempa bumi merupakan sebuah guncangan hebat yang menjalar ke permukaan bumi yang disebabkan oleh gangguan di dalam litosfir (kulit bumi). Gangguan ini terjadi karena di dalam lapisan kulit bumi dengan ketebalan 100 km terjadi akumulasi energi akibat dari pergeseran kulit bumi itu sendiri. Lapisan kulit bumi mempunyai temperatur relatif jauh lebih rendah dibandingkan lapisan di bawahnya (mantel dan inti bumi) sehingga terjadi aliran konvektif, yaitu massa dengan suhu tinggi mengalir ke daerah bersuhu lebih rendah. Massa bersuhu tinggi ini berada di lapisan astenosfir yang bersifat sangat kental yang mengalir secara perlahan. Akibat gerakan-gerakan ini, maka kulit bumi terpecah-pecah menjadi bagian-bagian berupa lempengan yang saling bergerak satu sama lain, yang kemudian disebut dengan lempeng tektonik.

Gambar 2.10. Peta Resiko Banjir di Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Hasil Analisis Data, 2020

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki curah hujan yang tinggi. Kemungkinan yang terjadi akibat tingginya curah hujan adalah meluapnya air di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) salah satunya adalah DAS Biha. Keadaan ini dapat menjadi semakin parah karena ekosistem suatu daerah itu rusak sehingga terjadi pendangkalan dan penyempitan aliran sungai.

Kerentanan banjir (*flood susceptibility*) adalah tingkat kemudahan suatu daerah untuk terkena banjir (Dibyosaputro,1984). Daerah yang sangat terpengaruh adanya banjir adalah daerah dengan relief datar dan landai seperti dataran aluvial, teras sungai erosional, teras marin, dan dataran nyaris. Bentuk lahan yang berbukit jarang mengalami banjir karena memiliki kemiringan lereng yang relatif curam sehingga sebagian besar air hujan langsung mengalir menjadi aliran permukaan. Akan tetapi, aliran permukaan ini tidak menyebabkan banjir karena hanya mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah. Selain itu, sebagian kecil air hujan mengalami infiltrasi masuk ke dalam tanah.

2.1.7. Penggunaan Lahan

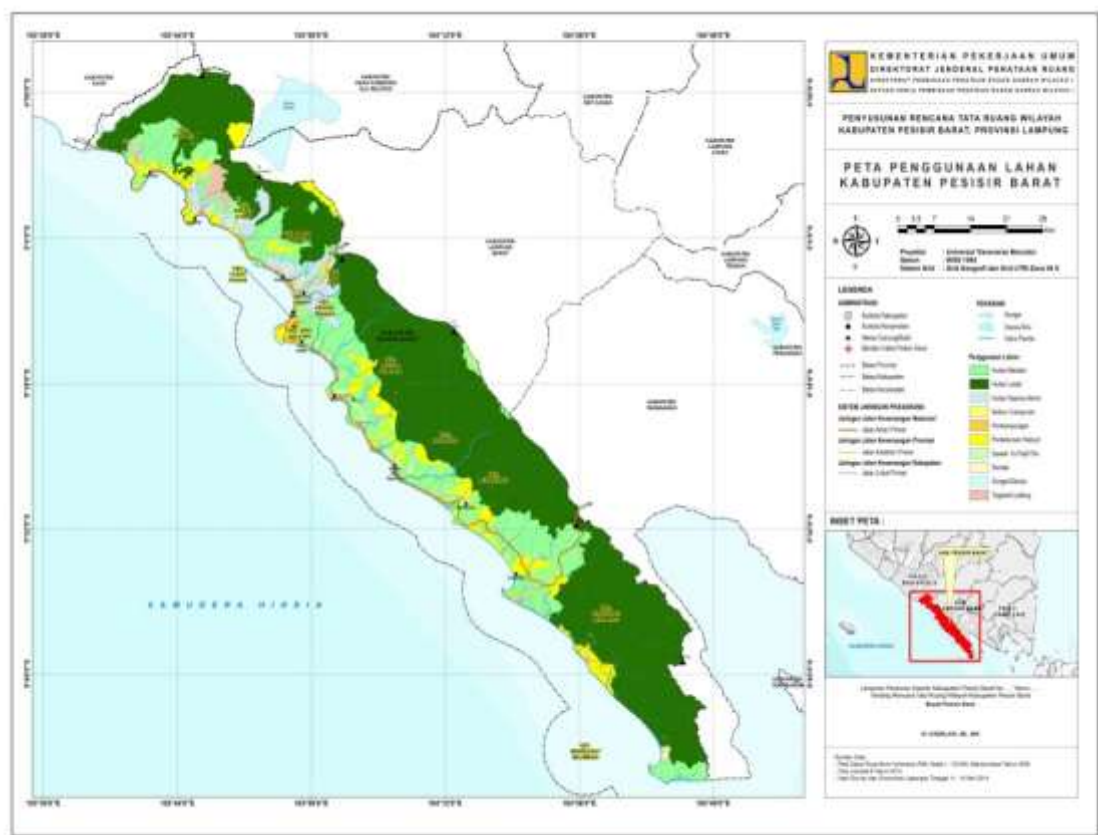
Kabupaten Pesisir Barat lebih dari 60% luas wilayahnya adalah kawasan hutan lebat yang merupakan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) 192.575 Ha, Hutan Lindung Pesisir 9.360 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 33.358 Ha, hal ini menunjukkan Kabupaten Pesisir Barat mempunyai peranan penting sebagai Daerah Tampung Air (*catchment area*). Sementara itu rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi pada (a) kawasan lindung dan (b) kawasan budidaya.

Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung secara garis besar mencakup pada 5 (lima) fungsi perlindungan, sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Lindung, dengan luas kurang lebih 9.580 Ha, meliputi Kecamatan Bangkunt dengan luas kurang lebih 4.803 Ha; Kecamatan Ngaras dengan luas kurang lebih 1.389 Ha; Kecamatan Ngambur dengan luas kurang lebih 681 Ha; Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas kurang lebih 398 Ha; Kecamatan Pesisir Tengah dengan luas kurang lebih 775 Ha; Kecamatan Way Krui dengan luas kurang lebih 156 Ha; Kecamatan Pesisir Utara dengan luas kurang lebih 484 Ha; dan Kecamatan Lemong dengan luas kurang lebih 894 Ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya adalah kawasan resapan air yang berada dalam kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 6.030 Ha, meliputi Kecamatan Bangkunt dengan luas kurang lebih 1.539 Ha; Kecamatan Ngaras dengan luas kurang lebih 74 Ha; Kecamatan Pesisir Selatan dengan luas kurang lebih 398 Ha; Kecamatan Krui Selatan dengan luas kurang lebih 15 Ha; Kecamatan Way Krui dengan luas kurang lebih 120 Ha; Kecamatan Karya Penggawa dengan luas kurang lebih 1.110 Ha; Kecamatan Pesisir Utara dengan luas kurang lebih 26 Ha; dan h. Kecamatan Lemong dengan luas kurang lebih 1.300 Ha.
3. Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi : (a) kawasan sempadan pantai; (b) kawasan sempadan sungai; (c) kawasan sekitar danau/waduk; dan (d) kawasan ruang terbuka hijau.
4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, terdiri atas: (a) Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan luasan kurang lebih 186.565 Ha, tersebar di Kabupaten Pesisir Barat. ; (b) kawasan Cagar Alam Laut dengan luasan kurang lebih 8.878 Ha, terdapat di Kecamatan Bangkunt dan Kecamatan Lemong; (c) cagar budaya terdapat di seluruh Kabupaten Pesisir Barat.
5. Kawasan Rawan Bencana Alam, terdiri atas (a) Kawasan rawan bencana longsor diantaranya di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa dan Kecamatan Way Krui; (b) Kawasan rawan bencana tsunami/ gelombang pasang air laut ditetapkan di seluruh wilayah pesisir kabupaten; (c) Kawasan rawan bencana banjir diantaranya di Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bangkunt; (d) Kawasan rawan bencana gempa bumi ditetapkan di seluruh wilayah kabupaten.

Sementara itu, arahan pola ruang untuk Kawasan Budidaya terdiri atas 8 (delapan) pembagian, yaitu (1) kawasan peruntukan hutan produksi; (2) kawasan peruntukan pertanian; (3) kawasan peruntukan perikanan; (4) kawasan peruntukan pertambangan; (5) kawasan peruntukan industri; (6) kawasan peruntukan pariwisata; (7) kawasan peruntukan permukiman; dan (8) kawasan peruntukan lainnya.

Gambar 2.11. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Dari aspek geografis daerah Kabupaten Pesisir Barat yang berada pada sisi terluar Provinsi Lampung yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu memiliki nilai strategis dan wajib untuk terus dikembangkan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Kabupaten Pesisir Barat membagi pola ruang menjadi 5 (lima) bagian, yaitu (1) kawasan hutan lindung; (2) kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya; (3) kawasan perlindungan setempat; (4) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan (5) kawasan rawan bencana alam.

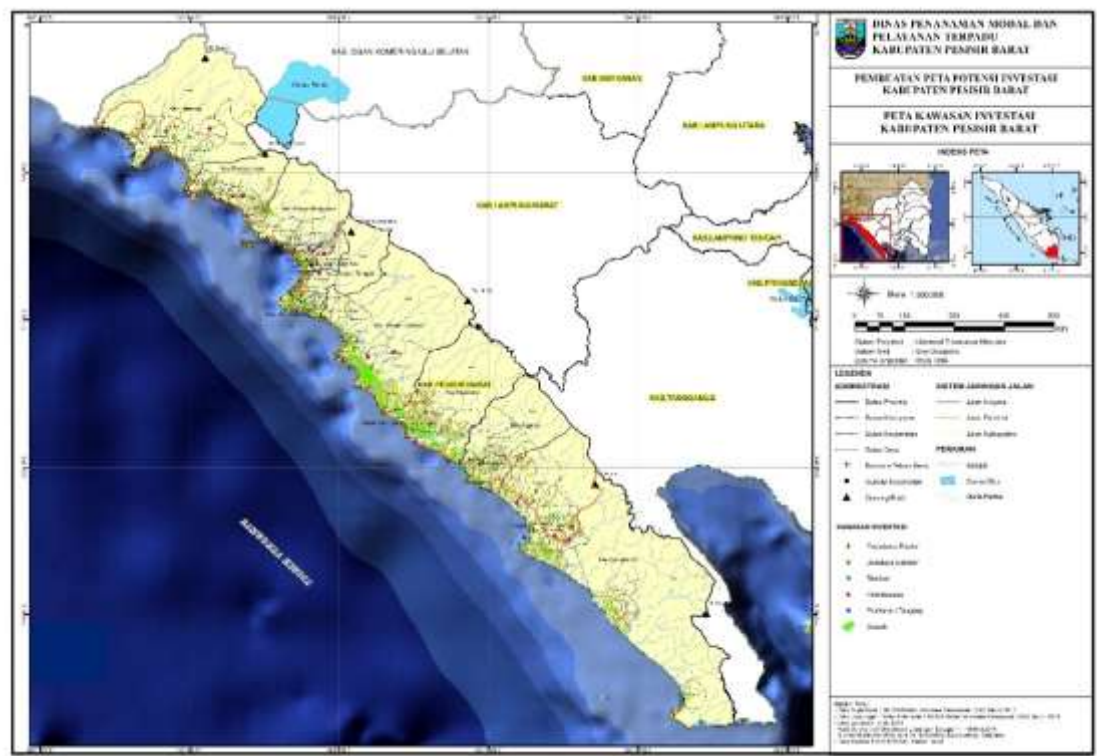
Gambar 2.12. Peta Pola Ruang Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Kondisi alam Kabupaten Pesisir Barat secara umum dibatasi oleh kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang membentang dari wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus sebelah Barat dengan Kabupaten Lampung Barat, sebelah Utara dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan sebelah Timur dengan Samudera Hindia.

Gambar 2.13. Peta Kawasan Strategis di Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Tabel 2.4. Kawasan Lindung dan Konservasi Kabupaten Pesisir Barat

No	Jenis Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan)	192.575
2	Hutan Lindung Pesisir	9.360
3	Hutan Produksi Terbatas	33.358
Total		235.293

Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

Selain kawasan lindung berupa hutan terdapat juga kawasan lindung berupa Cagar Alam Laut (CAL) yaitu Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Pekon Muara Tambulih (Kecamatan Ngambur), merupakan tempat konservasi penyu langka antara lain Penyu Lekang, Penyu Belimbing, Penyu Sisik dan Penyu Hijau.

Sebagai perwujudan perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat pengembangan kawasan budidaya diarahkan untuk tidak merusak kultur dan kontur serta lingkungan yang ada. Pengembangan wilayah di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat terarah dan merata di setiap unit wilayah kabupaten pesisir barat sehingga dapat meratakan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat. Rencana pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Pesisir Barat direncanakan pada:

1. Arahan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 29.257Ha yang tersebar di Kecamatan Lemong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Bangkumat. kawasan dikembangkan dengan pola kerjasama dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil hutan berupa kayu maupun non kayu.
2. Arahan Kawasan Peruntukan Pertanian dengan luasan kurang lebih 57.207Ha, dikembangkan dengan sistem agropolitan dan terpadu serta berkelanjutan, terdiri atas:
 - a. Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas sawah dan non sawah dikembangkan di Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur;
 - b. Kawasan pertanian hortikultura, dikembangkan di Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Ngambur;
 - c. Kawasan perkebunan dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat;
 - d. Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat.

3. Arahan Kawasan Peruntukan Perikanan, dengan luasan kurang lebih 3.798 Ha dikembangkan dengan pola minapolitan, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi Kecamatan Bangkunt, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pulau Pisang.
 - b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan meliputi (i) budidaya air tawar dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat; (ii) budidaya air laut dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat; dan (iii) budidaya air payau dikembangkan di Kecamatan Bangkunt dan Kecamatan Ngaras.
 - c. Kawasan peruntukan pengolahan ikan meliputi Kecamatan Bangkunt, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Lemong dan Kecamatan Pulau Pisang.
4. Arahan Kawasan Peruntukan Pertambangan, dengan luasan sekitar 20 Ha, dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat.
5. Arahan Kawasan Peruntukan Industri, dengan luasan sekitar 78 Ha, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan industri besar dikembangkan di Kecamatan Bangkunt dan/atau Kecamatan Pesisir Selatan.
 - b. Kawasan peruntukan industri menengah di Kabupaten Pesisir Barat.
 - c. Kawasan peruntukan industri kecil dikembangkan di permukiman (industri rumah tangga) dan kawasan wisata (sentra industri kerajinan tangan) di Kabupaten Pesisir Barat.
6. Kawasan Peruntukan Pariwisata, dengan luasan kurang lebih 438 Ha, terdiri atas:
 - a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, dikembangkan pada daerah yang memiliki potensi daya tarik wisata budaya di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain Makam Abang Kunat, Goa Matu, Makam Gajah Mada, Makam Syekh Aminullah, Kampung Wisata, Makam Tokoh Adat dan Sumur Puteri.
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata alam, dikembangkan pada daerah yang memiliki potensi daya tarik wisata alam di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain Kawasan Tambling, Pantai Ujung Bangkunt, Pantai Teluk Ngaras, Way Cangkuk, Pantai Curup Indah, Rhino Camp, Pantai Sukanegara, Pantai Siging, Pantai Sumber Agung, Pantai Tanjung Setia, Pantai Way Jambu, Pantai Pasar Senin, Pantai Melasti, Pantai Biha, Pantai Marang, Pantai Mandiri, Pantai Lintik, Pantai Walur, Pantai Ilahan, Pantai Labuhan Jukung, Pantai Way Redak, Pantai Serai, Bukit Selalaw, Pantai Muara Way La'ay, Pantai Harapan Kita, Pantai Way Sindi, Pantai pasir Hitam, Pantai Tembakak, Pantai Penengahan, Batu Lawang, Pantai Walur Pesisir Utara, Air Terjun Rata Agung, Air Terjun Way Nyercik, Pantai Pugung dan Pulau Pisang.

- c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan, dikembangkan di Kabupaten Pesisir Barat, antara lain: Penakaran Penyu Muara Tembulih, Bendungan Way Biha, Pelabuhan Kuala Stabas, Kawasan Labuhan Jukung dan Kawasan Tanjung Setia.
7. Kawasan Peruntukan Permukiman dengan luasan sekitar 5.058 Ha, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: Kecamatan Bangkunt, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Tengah, dan Kecamatan Lemong.
 - b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Ngaras, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Krui Selatan, Kecamatan Way Krui, Kecamatan Karya Penggawa, Kecamatan Pesisir Utara.
8. Kawasan Peruntukan Lainnya, meliputi :
- a. Kawasan pertahanan keamanan adalah pembangunan dan peningkatan kawasan pertahanan keamanan di masing-masing kecamatan, meliputi (i) Kodim di Kabupaten Pesisir Barat; (ii) Polres di Kabupaten Pesisir Barat; (iii) Koramil di setiap kecamatan pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat; (iv) Polsek di setiap kecamatan pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
 - b. Kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana terdiri dari (i) wilayah pesisir tersebar di Kabupaten Pesisir Barat; dan (ii) pulau-pulau kecil meliputi Pulau Pisang dan Pulau Betuah.

2.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana merupakan kawasan yang diidentifikasi berpotensi tinggi mengalami bencana. Kabupaten Pesisir Barat dengan karakteristik wilayah tersebut berpotensi terhadap terjadinya bencana alam dengan dominasi bencana tsunami, banjir, tanah longsor, Gempa dan kebakaran hutan akibat kekeringan. Bila ditelaah lebih jauh, kelima macam bencana di Kabupaten Pesisir Barat ini saling terkait, dengan sebab baik karena kondisi awal alamnya maupun karena dampak pembangunan, kerusakan lingkungan dan perambahan hutan.

Pengembangan kawasan di daerah kawasan rawan bencana perlu ada pengkajian dan penelitian yang akurat agar tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan alam lebih jauh. Secara umum Kawasan Rawan Bencana diklasifikasikan menjadi:

1. Wilayah Pesisir/Pantai, Untuk Kabupaten Pesisir Barat kawasan yang berpotensi tinggi sebagai kawasan rawan bencana adalah daerah garis pantai yang merupakan kawasan rawan bencana tsunami, luas kawasan rawan bencana tsunami ± 25.283 Ha meliputi 11 wilayah kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat dan merupakan salah satu kawasan rawan banjir karena kawasan tersebut merupakan dataran rendah dimana ketinggian muka tanahnya lebih rendah atau sama dengan ketinggian muka air laut pasang rata-rata (*Mean Sea Level, MSL*), dan menjadi tempat bermuaranya sungai-

- sungai. Di samping itu, kawasan pesisir/pantai dapat menerima dampak dari gelombang pasang yang tinggi, sebagai akibat dari badai angin topan atau gempa yang menyebabkan tsunami.
2. Wilayah Dataran Banjir (*Flood Plain Area*), Adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan alur sungai, yang kemiringan muka tanahnya sangat landai dan relatif datar. Aliran air dari kawasan tersebut menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan potensi banjir menjadi lebih besar, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal. Kabupaten Pesisir Barat memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) pendek yang langsung bermuara ke laut Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan sedimen yang sangat subur, dan terdapat di bagian hilir sungai. Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Daerah Sempadan Sungai seringkali merupakan daerah pengembangan kota, seperti permukiman, pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri dan lain sebagainya. Kawasan ini memiliki potensi bencana banjir yang cukup besar juga, karena debit banjir yang cukup besar yang dapat terbawa oleh sungai tersebut. Potensi bencana banjir akan lebih besar lagi apabila terjadi hujan cukup besar di daerah hulu dan hujan lokal di daerah tersebut, disertai pasang air laut.

Gambar 2.14. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Perda Kabupaten Pesisir Barat No 8 Tahun 2017

3. Wilayah Pengunungan dan Perbukitan, secara topologi Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki kawasan berpotensi mengalami bencana tanah longsor terutama daerah-daerah yang berbukit dan berada di lereng-lereng gunung. Daerah lereng pegunungan dan perbukitan secara umum memiliki struktur tanah yang tidak stabil ini dapat menimbulkan bencana tanah longsor, apalagi pemanfaatan pengembangan budidaya pemukiman, pertanian, perkebunan dan lainnya tidak memperhatikan pelestarian lingkungan. Pemicu adanya

- bencana tanah longsor umumnya disebabkan oleh gempa dan curah hujan yang tinggi dan dapat diperparah jika terjadi kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan di kawasan pegunungan dan perbukitan.
4. Wilayah Hutan dan Padang Rumput, kawasan ini juga merupakan kawasan rawan bencana terutama pada saat musim kemarau yaitu bencana kebakaran hutan. Luasnya kawasan hutan dan padang rumput dapat menyebabkan kebakaran hutan yang dipicu panas akibat kekeringan dan pembakaran hutan yang dilakukan oleh perambah hutan.
 5. Wilayah yang dilalui Lajur Patahan dan Penunjaman (Palung Samudera Indonesia). Berdasarkan Peta Seismotektonik Indonesia, secara regional wilayah Kabupaten Pesisir Barat terletak pada zona sumber gempa bumi Samudera Indonesia. Lajur penunjaman (Palung Samudera Indonesia) yang terletak di sebelah barat wilayah Pesisir Barat menjadikan wilayah ini rawan bencana gempa bumi. Kemungkinan akumulasi energi yang terjadi pada jalur penunjaman dapat menjadi pemicu terjadinya gempa bumi akibat pelepasan energi akumulatif tersebut. Selanjutnya energi ini akan merambat lebih cepat melalui patahan-patahan yang terletak pada satu sistem dengan episentrum. Pola struktur di wilayah Kabupaten Pesisir Barat yang berarah tenggara-barat laut dan timurlaut-barat daya sangat berpotensi menjadi zona lemah. Untuk itu zona sepanjang patahan-patahan dalam sistem ini harus diwaspadai sebagai daerah bahaya gempa bumi merusak. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu variabel utama dalam menentukan tingkat kerawanan bencana di wilayah ini. Sistem patahan dan kondisi litologi merupakan media yang mampu menghantarkan gelombang gempa ke wilayah-wilayah di sekitar titik episentrum. Daerah-daerah yang harus diwaspadai terkait dengan bencana gempa bumi adalah daerah-daerah pada sisten patahan terutama pada daerah yang ditutupi oleh batuan yang bersifat lepas (*unconsolidated*), yang pada umumnya berumur kuartar.

2.1.10. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat pada tiap kecamatan relatif stabil walaupun dipengaruhi oleh beberapa faktor penambah dan pengurang jumlah penduduk antara lain penduduk pindah, datang, lahir dan meninggal. Secara umum, dengan perkembangan daerah Kabupaten Pesisir Barat jumlah pendudukn juga semakin semakin berkembang dikarenakan lebih meratanya pembangunan daerah, dengan berkembangnya suatu daerah diiringi juga bertambahnya jumlah penduduk baik itu bertambah secara alami maupun adanya migrasi dari daerah luar.

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020 berdasarkan hasil sensus penduduk adalah 162.697 jiwa yang terdiri dari 84.717 laki-laki dan 77.980 perempuan (dengan rasio jenis kelamin sebesar 108.64). Dengan luas wilayah 2.907,23 km², Pesisir Barat memiliki rata-rata kepadatan penduduk sekitar 55 orang per kilometer per segi. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Bangkunt yang disusul Kecamatan Pesisir Selatan, sementara jumlah penduduk terendah di Kecamatan Pulau Pisang.

Komposisi Penduduk Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 16,60% Post Generasi Z (Penduduk yang lahir tahun 2013 dst, dengan perkiraan usia 0 sampai dengan 7 ta- hun), 28,47% Generasi Z (Penduduk yang lahir tahun 1997-2012 dengan perkiraan usia sekarang 8 sampai 23 tahun), 24,64% milenial (Penduduk yang lahir tahun 1981-1996 dengan perkiraan usia sekarang 24 sampai 39 tahun), 18,36% Generasi X (Penduduk yang lahir tahun 1965-1980 dengan perkiraan usia sekarang 40 sampai 55 tahun), 10,51% Baby Boomer (Penduduk yang lahir tahun 1946-1964 dengan perkiraan usia sekarang 56 sampai 74 tahun), serta 1,42% Generasi Pre Boomer (Penduduk yang lahir sebelum tahun 1945 dengan perkiraan usia sekarang $\geq$ 75 tahun).

Pada tahun 2020 hingga bulan September 2020 jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat adalah 161.509 Jiwa yang terdiri dari 84.287 Jiwa penduduk Laki-laki dan 77.222 Jiwa penduduk wanita dengan total 47.059 Kepala Keluarga. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020. Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Jenis Kelamin Per-Bulan September Tahun 2020 ditampilkan dalam tabel berikut

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Per-Bulan September Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Pesisir Tengah	10.274	9.744	20.018	5.799
2	Pesisir Selatan	13.696	12.739	26.435	7.556
3	Lemong	6.588	5.841	12.429	3.634
4	Pesisir Utara	4.418	4.064	8.482	2.467
5	Karya Penggawa	8.196	7.589	15.785	4.393
6	Pulau Pisang	825	745	1.570	470
7	Way Krui	4.697	4.343	9.040	2.594
8	Krui Selatan	5.399	5.079	10.478	2.903
9	Ngambur	11.182	10.287	21.469	6.461
10	Ngaras	5.039	4.514	9.653	2.717
11	Bangkunat	13.973	12.277	26.250	8.065
	Jumlah	84.287	77.222	161.509	47.059

Sumber : Dinas Dukcapil, 2021

Penduduk Kabupaten Pesisir Barat tersebar dalam 11 kecamatan dengan kepadatan yang berbeda pada setiap kecamatan. Penduduk di Kecamatan Pesisir Selatan merupakan penyumbang penduduk terbesar pada Kabupaten Pesisir Barat yaitu 26.250 Jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah di Kecamatan Pulau Pisang dengan jumlah penduduk 1.570 Jiwa.

2.1.11. Jumlah Penduduk

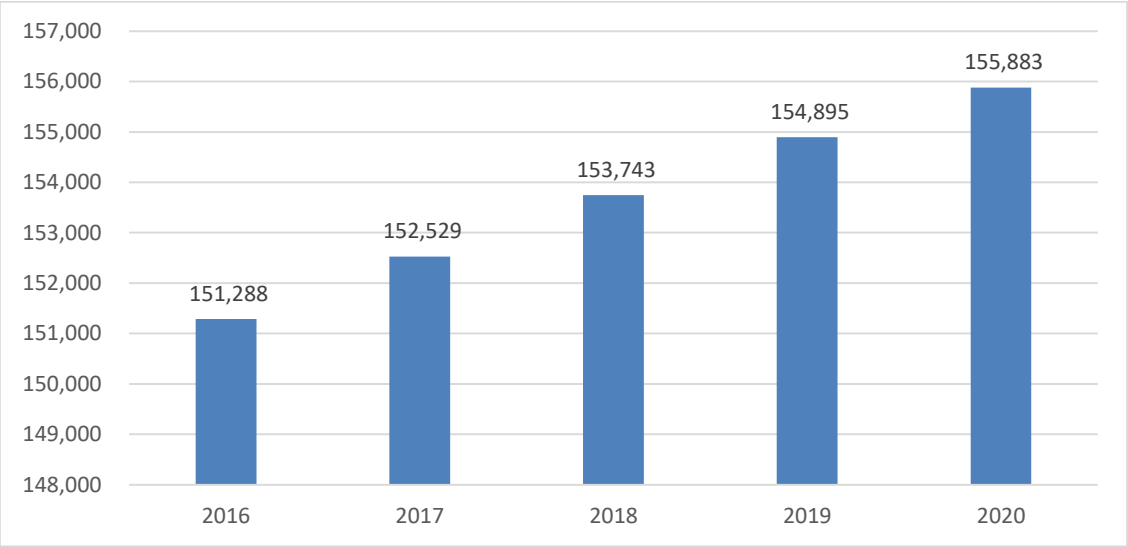
Pada tahun 2020 hingga bulan September 2020 jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat adalah 161.509 jiwa yang terdiri dari 84.287 jiwa penduduk Laki-laki dan 77.222 jiwa penduduk wanita dengan total 47.059 Kepala Keluarga.

Penduduk Kabupaten Pesisir Barat pada umumnya menempati wilayah yang memiliki pelayanan yang lebih baik dibandingkan wilayah lain dan menempati daerah yang nyaman. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan trend yang meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat yang meningkat. Kepadatan penduduk menunjukkan tingkat perbandingan antara jumlah penduduk dan luas lahan di Kabupaten Pesisir Barat, semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan pada tingkat kerapatan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun, sehingga bisa dikatakan semakin tinggi beban lingkungan hidup.

Berdasarkan struktur umur penduduk, penduduk Kabupaten Pesisir Barat tergolong penduduk early intermediate. Struktur umur penduduk tipe ini menunjukkan tingkat kelahiran bayi sudah mulai dapat dikendalikan dan angka kematian mulai menurun. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pesisir Barat sebesar 111 menerangkan bahwa setiap 100 perempuan terdapat 111 laki-laki.

Pada tahun 2020 piramida penduduk Kabupaten Pesisir Barat masih mencirikan piramida ekspansif (piramida penduduk muda) dimana angka kelahiran masih tinggi dan kelompok terbesar adalah penduduk usia muda.

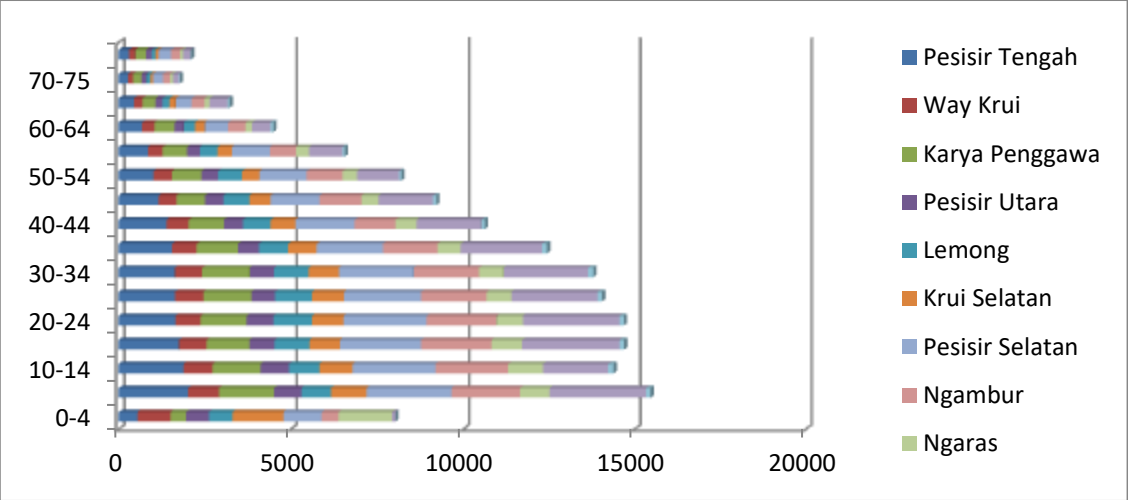
Gambar 2.15. Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2021

Berdasarkan data pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa terjadi pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat sejak Tahun 2016-2020, ppertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat masih sangat sedikit, sejak tahun 2016-2020 pertumbuhan penduduk hanya 4000an jiwa.

Gambar 2.16. Gambaran Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

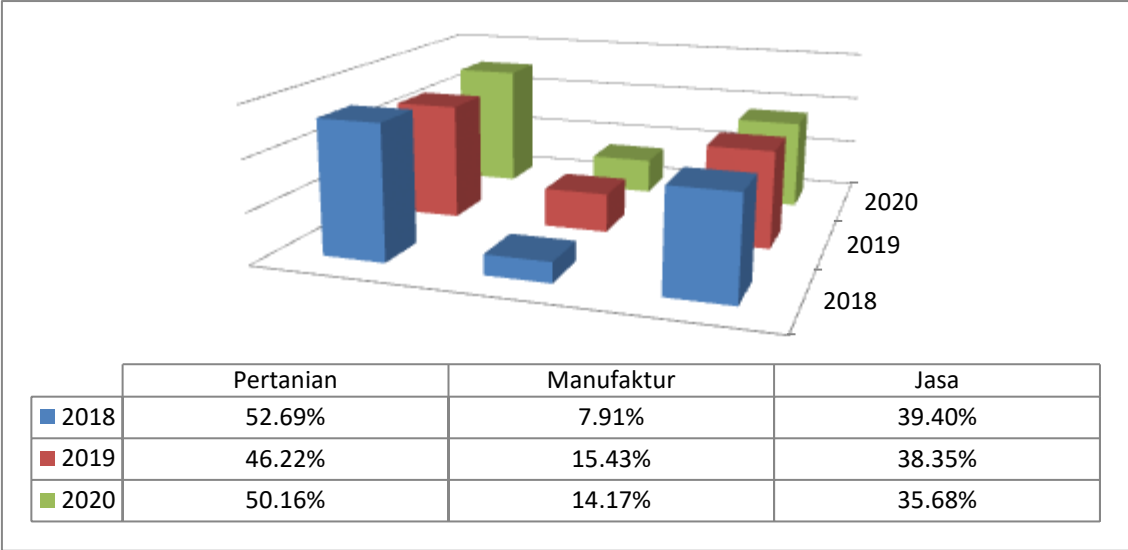


Sumber : Dinas Dukcapil, 2021

2.1.12. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat secara garis besar masih didominasi oleh lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan dan pertambangan dan penggalian dengan 50.15%. Selanjutnya sektor manufaktur dengan jumlah persentase 14.16% Sementara itu lapangan pekerjaan jasa/service dengan persentasenya pada angka 35.67%. Angka ini tidak banyak berubah bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun lalu, hal ini disebabkan masih belum berkembangnya sektor-sektor lapangan pekerjaan lain di Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bersama, karena tidak mungkin selamanya bergantung pada sektor pertanian, pengembangan daerah harus bertumpu pada sektor manufaktur dan jasa/service.

Gambar 2.17. Jumlah Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, PBDA, 2021

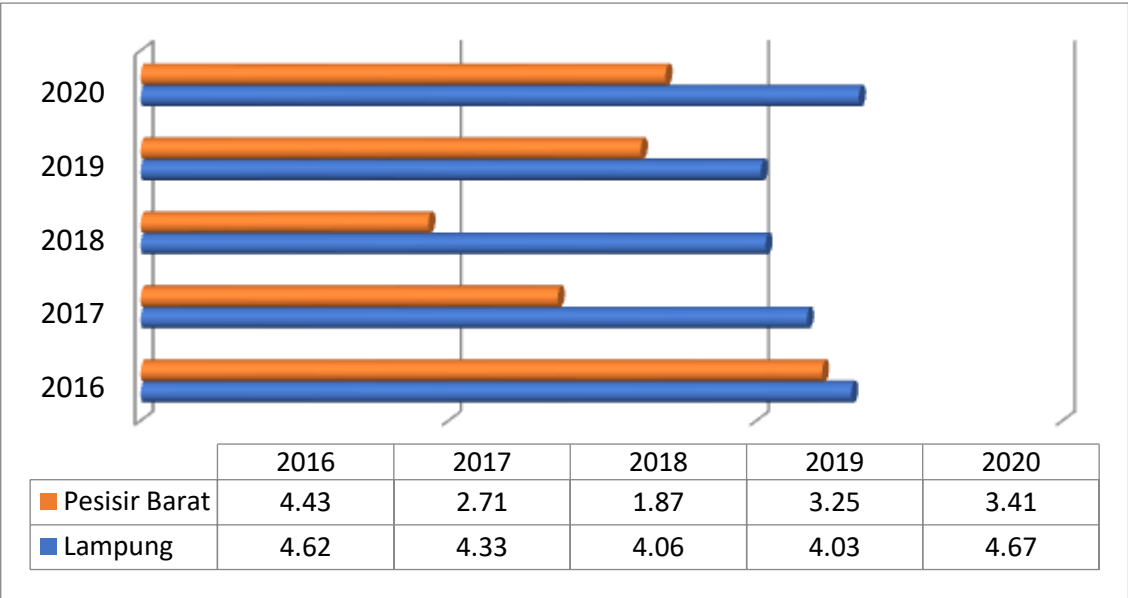
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan isu penting dan strategis dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 disamping penguatan perekonomian dan peningkatan derajat pengetahuan materil dan spiritual. Terlebih pada RKPD Tahun 2022 ini perencanaan daerah diarahkan pada pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang mengguncang sendi-sendi ekonomi masyarakat secara luas.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pesisir Barat mengalami kinerja perbaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini berkaca dari persentase pada tahun 2016 yang sebesar 4,43% dan menurun pada tahun 2017 sebesar 2,71s% dan kembali menurun ke angka 1,87% pada tahun 2018. Namun demikian, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan walaupun belum melebihi angka pada tahun 2016, yaitu pada tahun 2019 TPT Kabupaten Pesisir Barat berada pada 3,26% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 3.40%. Peningkatan TPT pada tahun 2020 dimungkinkan dipengaruhi oleh efek Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh wilayah.

Angka capaian pada tahun 2020 3,40% secara umum masih lebih baik dari TPT Provinsi Lampung yang pada tahun 2020 tercatat pada angka 4,67%. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang Kabupaten Pesisir Barat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan banyak lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakatnya sehingga jumlah pengangguran terbuka dapat terus ditekan dan diminimalisir.

Gambar 2.18. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

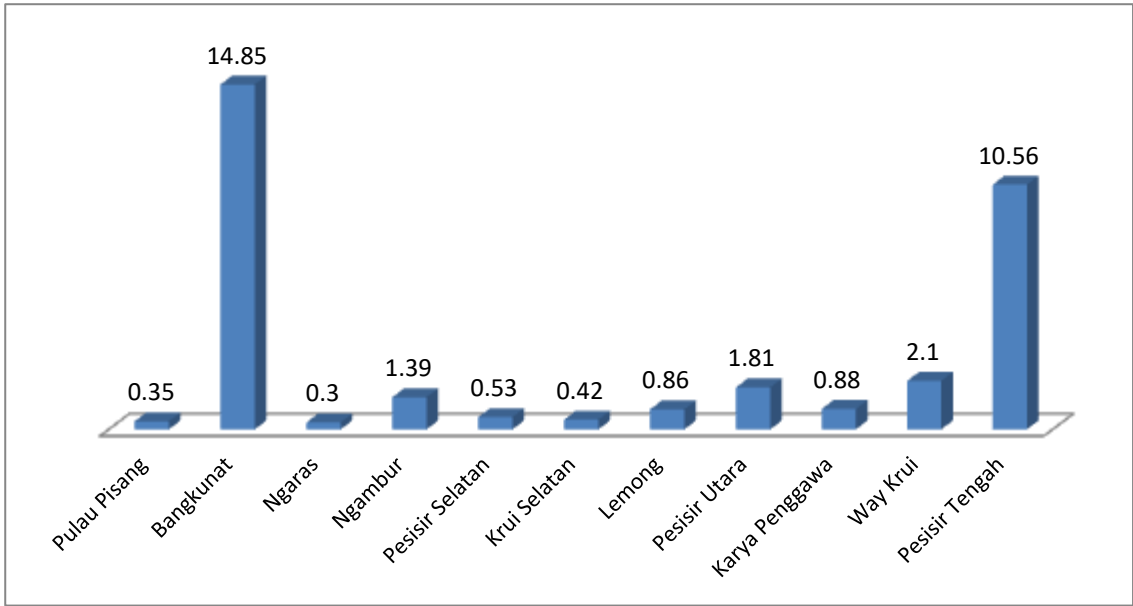


Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, PBDA, 2021

Ditingkat kecamatan, TPT tertinggi berada di Kecamatan Bangkunt 14,40% dan Kecamatan Pesisir Tengah dengan angka 10,24%. Berikutnya TPT terendah berada di Kecamatan Krui Selatan dengan TPT 0,41% dan Kecamatan Pesisir Selatan dengan angka 0,44%. Berdasarkan pada hal tersebut di atas dapat dilihat

bahwa TPT di perkotaan masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah perdesaan.

Gambar 2.19. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020



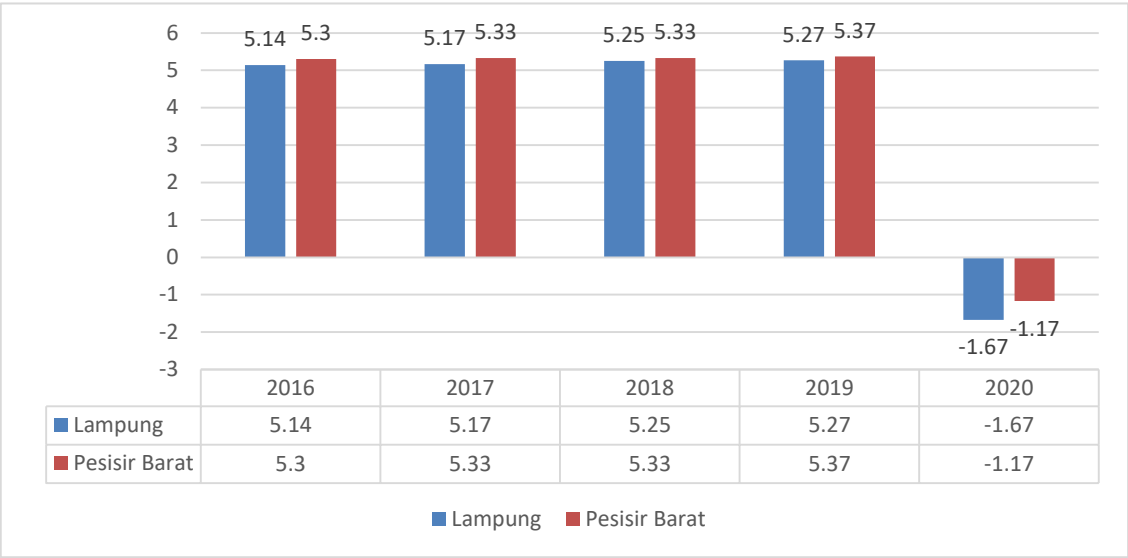
Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, PBDA, 2021

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang bisa menggambarkan perkembangan kinerja ekonomi suatu daerah selama dalam kurun periode tertentu. Angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan laju capaian nilai tambah riil daerah yang menggambarkan kemajuan perkeekonomian yang dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut: pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi berada pada 4,69%, selanjutnya pada tahun 2015 sebesar 4,94%, tahun 2016 sebesar 5,30%, tahun 2017 sebesar 5,33% dan data tahun 2018 dengan pertumbuhan 5,33%. Tahun 2019 kembali meningkat ke angka 5,37%. Angka 5,37% pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebesar (0,04). Meningkat minornya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat lebih dikarenakan pengaruh kondisi ekonomi global, regional dan nasional yang secara umum mengalami perlambatan.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang lalu mengalami pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya, yaitu sebesar (1,17%). Angka ini lebih baik dari pencapaian Provinsi Lampung yang berada pada angka (1,67%). Pertumbuhan negatif ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengubah pola ekonomi masyarakat global secara menyeluruh. Pencapaian ini merupakan indikator dari masih lemahnya sistem kesehatan daerah dan kemampuan daya beli masyarakat.

Gambar 2.20. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2016 angka PDRB ADHB sebesar 3.615,62 (dalam miliar rupiah) yang dihitung mengalami kenaikan sebesar 10% dari tahun 2015. Pada tahun 2017 PDRB ADHB sebesar 3.947,58 (dalam miliar rupiah) atau mengalami peningkatan 10%. Selanjutnya tahun 2018 PDRB ADHB sebesar 4.282,38 (dalam miliar rupiah) dinilai mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 9%. Selanjutnya pada tahun 2019 PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat berada pada angka 4.619,17 (dalam miliar rupiah) dan pada tahun 2020 kembali meningkat minor dan berada pada angka 4.628,78 (dalam miliar rupiah).

Berikutnya secara konstan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat fluktuatif pada beberapa sektor terjadi penurunan dan kenaikan dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 4,00-5,00%. Pada tahun 2016 angka PDRB ADHK sebesar 2.654,54 (dalam miliar rupiah) yang dihitung mengalami kenaikan sebesar 5,30% dari tahun 2015. Pada tahun 2017 PDRB ADHK sebesar 2.795,95 (dalam miliar rupiah) atau mengalami peningkatan 5,33%. Selanjutnya tahun 2018 PDRB ADHK sebesar 2.944,88 (dalam miliar rupiah) dinilai mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 5,33%. Pada tahun 2019 PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat berada pada angka 3.103,00 (dalam miliar rupiah) atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,37%. Berikutnya pada tahun lalu, PDRB ADHK mengalami penurunan (1,17%) dengan capaian menjadi 3.066,66 (dalam miliar rupiah).

Lebih lanjut bila dilihat dari persentase kontribusi sektor-sektor dalam PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016 sampai dengan 2020 selama 5 (lima) tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan. Hal ini lebih disebabkan oleh kebijakan dalam pembiayaan daerah selama kurun waktu tersebut juga tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan mampu merubah persentase per sektor pada perhitungan PDRB. Pada tahun 2016-2020 sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Barat adalah sektor pertanian, yaitu rata-rata diatas 49-50,00%, sedangkan sektor

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berada di urutan kedua yaitu di atas 10,00-12,00%. Sedangkan untuk sektor pertambangan dan penggalian, sektor administasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor konstruksi mampu memberikan sumbangan di atas 5,00-6,00%. Sedangkan sektor lain yang kontribusinya masing-masing berada di bawah 5,00%.

Terhadap sektor-sektor PDRB yang secara distribusi dinilai masih kecil terus diusahakan untuk dapat ditingkatkan karena pada dasarnya semua sektor penunjang PDRB Kabupaten Pesisir Barat merupakan potensi yang layak dikembangkan dan menjadi penunjang perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat pada masa-masa yang akan datang. Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir Barat dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (miliar rupiah)

Tahun	PDRB	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2016	3.615,62	2.654,54
2017	3.947,58	2.795,95
2018	4.282,38	2.944,88
2019*	4.619,17	3.103,00
2020 **	4.628,78	3.066,66

Sumber : BPS Pesisir Barat, PBDA, 2021

*angka sementara

**angka sangat sementara

Ada tiga kelompok sektor dalam PDRB menurut lapangan usaha, yaitu kelompok sektor Primer, kelompok Sektor Sekunder dan kelompok Sektor Tersier. Kelompok Sektor Primer terdiri dari 2 (dua) sektor, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor Pertambangan, Kelompok sektor Sekunder terdiri dari 3 (tiga) sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor konstruksi, sedangkan kelompok sektor tersier terdiri dari 4 (empat) sektor lainnya yaitu sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa lainnya.

Dari awal Kabupaten Pesisir Barat berdiri hingga tahun 2018 yang lalu, kelompok sektor Primer memegang dominasi paling kuat dalam struktur ekonomi Kabupaten Pesisir Barat atau dapat dikatakan struktur ekonomi daerah adalah struktur ekonomi yang masih berbasis primer atau sektor tradisional, dan pada urutan kedua penyumbang terbesar adalah di sektor Tersier dan menunjukkan angka yang stabil. Ini merupakan potensi bagi daerah untuk meningkatkan perekonomian di sektor Tersier dan mulai mengembangkan potensi ekonomi modern yang tidak lagi berbasis atau mengandalkan sektor Primer atau tradisional. Laju PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7. Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (dalam persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,84	3,15	2,99	1,39	0,01
B	Pertambangan dan Penggalian	6,47	9,97	7,66	5,75	-2,49
C	Industri Pengolahan	4,71	2,21	1,54	-1,32	-12,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20,16	27,09	17,60	26,56	5,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	6,59	1,71	5,02
F	Konstruksi	14,60	14,42	13,85	28,50	-2,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,27	7,01	7,86	9,41	-3,95
H	Transportasi dan Pergudangan	7,87	6,79	6,45	7,50	-4,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,68	10,03	9,81	10,32	-4,59
J	Informasi dan Komunikasi	16,42	11,80	8,64	5,75	8,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,20	3,91	2,24	2,98	0,29
L	Real Estate	5,42	7,24	6,15	6,25	-3,80
M,N	Jasa Perusahaan	3,29	7,00	3,87	8,47	-1,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,55	6,90	8,83	8,53	1,34
P	Jasa Pendidikan	4,32	5,20	8,94	8,51	4,09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,82	5,79	8,20	8,60	9,53
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,36	12,45	9,96	8,20	-4,49
	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK	5,30	5,33	5,33	5,37	-1,17

Sumber : BPS Pesisir Barat, PBDA, 2021

*angka sementara

**angka sementara

Sementara itu Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.8. Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Pesisir Barat Tahun 2016- 2020 (dalam persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	52,38	51,55	51,00	49,49	50,26
B	Pertambangan dan Penggalian	5,55	5,77	5,80	5,69	5,64
C	Industri Pengolahan	5,36	5,13	4,88	4,50	3,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	5,13	5,59	5,90	7,12	6,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,93	11,04	11,30	11,85	11,53
H	Transportasi dan Pergudangan	1,03	1,03	1,01	1,01	0,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,64	1,68	1,73	1,79	1,71
J	Informasi dan Komunikasi	2,14	2,21	2,24	2,20	2,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,50	1,49	1,45	1,41	1,40
L	Real Estate	3,57	3,71	3,74	3,74	3,66
M,N	Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,01	5,06	5,12	5,17	5,28
P	Jasa Pendidikan	3,53	3,45	3,52	3,64	3,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,06	1,07	1,09	1,20
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,96	1,02	1,04	1,08	1,02
	Distribusi PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Pesisir Barat, PBDA, 2021

*angka sementara

B. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Pesisir Barat mengikuti perkembangan inflasi di Kotamadya Bandar Lampung dan Kota Metro, sehingga data yang digunakan merujuk pada data dua daerah tersebut. Indeks Harga Konsumen Provinsi Lampung mengalami peningkatan indeks dari 105,54 pada Oktober 2020 menjadi 105,66 pada November 2020, dengan demikian terjadi inflasi sebesar 0,12 persen. Berdasarkan penghitungan inflasi tahun kalender (*point to point*) November 2020 mengalami inflasi sebesar 1,33 persen, sedangkan inflasi *year on year* (yoy) November 2020 terhadap November 2019 adalah sebesar 1,73 persen.

Dari sebelas kelompok pengeluaran, lima kelompok pengeluaran mengalami inflasi, yaitu kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 0,42 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau 0,28 persen; kelompok kesehatan 0,02 persen; kelompok pakaian dan alas kaki; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan masing-masing sebesar 0,01 persen. Sebaliknya, tiga kelompok mengalami penurunan indeks harga, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami deflasi sebesar 0,13 persen; diikuti kelompok perumahan, air listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,05 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,04 persen. Sementara, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran relatif stabil (tidak mengalami perubahan indeks harga).

Tabel 2.9. Inflasi di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro Tahun 2016-2020

Kota Bandar Lampung		Kota Metro	
Tahun	Inflasi	Tahun	Inflasi
2016	2,75	2016	1,98
2017	3,14	2017	2,32
2018	2,92	2018	1,64
2019	3,53	2019	2,97
2020	0,92	2020	2,53

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Dari dua kota pemantauan di Lampung pada November 2020, Kota Bandar Lampung mengalami inflasi sebesar 0,09 persen, dan Kota Metro sebesar 0,40 persen. Inflasi Kota Bandar Lampung menempati peringkat ke-78 dan Kota Metro peringkat ke-27 dari 90 kota yang diamati perkembangan harganya. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau memberikan andil inflasi tertinggi, yaitu sebesar 0,08 persen. Adapun subkelompok yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada bulan November 2020 adalah subkelompok makanan yaitu sebesar 0,08 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditi di dua kota pemantauan pada November 2020, secara umum mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan harga di dua kota, pada bulan ini terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,54 pada bulan Oktober 2020 menjadi 105,66 pada November 2020 atau mengalami inflasi sebesar 0,12 persen. Laju inflasi tahun kalender sebesar 1,33 persen dan inflasi year on year adalah sebesar 1,73 persen.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Pesisir Barat mengikuti perkembangan tingkat inflasi Provinsi Lampung dan juga Kota Madya Bandar Lamung dan Kota Metro. Dari data series 5 (lima) tahun terakhir terlihat inflasi Lampung mempunyai tren di bawah atau sama dengan inflasi nasional. Penekanan dan pengendalian inflasi perlu dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan sebagai stakeholder di semua sektor kehidupan masyarakat.

C. PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat

Pembangunan tidak hanya cukup pada pencapaian pertumbuhan ekonomi saja. Akan tetapi terdapat banyak dimensi yang dicakup dan target yang ingin dicapai dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Pertumbuhan hanyalah sasaran antara (syarat perlu) bagi tercapainya kesejahteraan. Tanpa pertumbuhan, tujuan pembangunan akan sulit terwujud. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator yang komprehensif karena masalah aspek multidimensi yang melatarbelakanginya. Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggunakan berbagai alternatif, diantaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB perkapita. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Pesisir Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2016, PDRB per kapita tercatat sebesar 23,96 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019, yaitu mencapai 29,82 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Kemudian, menurun menjadi 28,45 juta rupiah pada 2020. Angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per Kapita Kabupaten Pesisir Barat secara riil mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016, PDRB per kapita tercatat sebesar 17,55 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019, yaitu mencapai 20,03 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Dengan mengeluarkan faktor inflasi, tercatat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2020 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2019. PDRB per kapita Kabupaten Pesisir Barat atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2020 bernilai sebesar 18,85 juta rupiah, lebih rendah dari tahun 2019 yang bernilai sebesar 20,03 juta rupiah

Tabel 2.10. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB/GRDP Value (miliar rupiah)					
Atas Dasar Harga Berlaku	3.616	3.948	4.282	4.619	4.629
Atas Dasar Harga Konstan 2010	2.655	2.796	2.945	3.103	3.067
PDRB Per Kapita/Per Capita GRDP (juta rupiah)					
Atas Dasar Harga Berlaku	23,9	25,88	27,85	29,82	29,7

Atas Dasar Harga Konstan 2010	17,55	18,33	19,15	20,03	19,67
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	4,33	4,47	4,49	4,59	-1,8
Jumlah Penduduk/ Population (orang)	151.288	152.529	153.743	154.895	155.883
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	0,93	0,82	0,8	0,75	1,34

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat. 2021

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (frame work) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (basic measure) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (product) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Berikut data PDRB berdasarkan pengeluaran kabupaten pesisir barat tahun 2016-2018 ditampilkan dalam tabel.

Tabel 2.11. PDRB ADHK Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	PDRB Kategori Pengeluaran	PDRB ADHK Pengeluaran (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1.894.408	2.007.416	2.120.525	2.231.657	2.190.388
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	38.192	40.863	47.147	51.495	51.896
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	93.283	93.754	95.701	98.370	96.939
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	570.753	605.465	654.288	712.754	670.110
5	Perubahan Inventori	27.367	36.791	27.135	8.488	14.313
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	30.540	11.665	85.820	237.800	43.012
	Produk Domestik Regional Bruto	2.654.543	2.795.954	2.944.882	3.103.002	3.066.657

Sumber : BPS Pesisir Barat, 2021

Tabel 2.12. PDRB ADHB Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	PDRB Kategori Pengeluaran	PDRB ADHB Pengeluaran (Juta Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	2.281.894	2.496.799	2.753.861	3.025.929	3.276.240	3.276.471
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	49.913	56.197	62.554	76.328	84.655	87.024
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	120.054	129.856	134.130	140.379	147.136	148.141
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	645.448	736.713	831.847	935.820	1.047.567	1.017.883
5	Perubahan Inventori	41.374	74.201	61.592	63.788	18.962	10.785
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	93.125	121.858	103.595	40.134	44.613	88.472
	Produk Domestik Regional Bruto	3.231.809	3.615.625	3.947.578	4.282.378	4.619.173	4.628.776

Sumber : BPS Pesisir Barat, 2021

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan IPM yang selama lima tahun terakhir tentunya tidak terlepas dari hasil kinerja pemerintah yang menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan juga peningkatan anggaran bagi sektor-sektor yang mendukung dalam peningkatan angka IPM. Hal ini tercermin dari peningkatan tiga komponen utama IPM dengan metode baru yaitu, Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Riil per Kapita (PRK) secara rinci terdapat dalam tabel sebagai berikut :

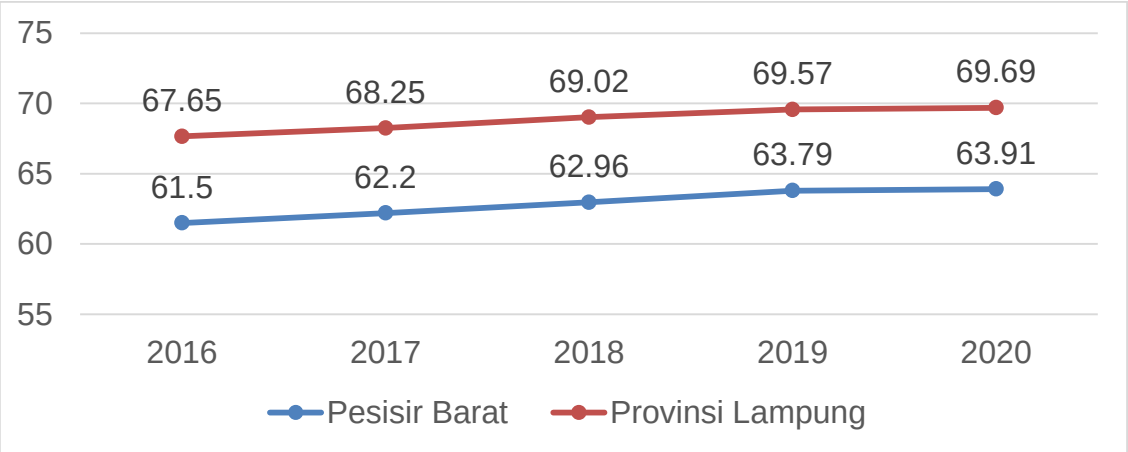
Tabel 2.13. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

No	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	62,29	62,54	62,85	63,27	63,5
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,48	7,58	7,59	7,82	8,01
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,85	11,95	11,97	11,98	11,99
4	Pengeluaran Riil per Kapita (000 Rp.)	7.616	7.890	8.355	8.652	8.457

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Perkembangan IPM Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2016 berada pada angka 61,50 poin. Selanjutnya pada tahun 2017 berada pada 62.20 poin atau meningkat 0,7 poin. Lalu pada tahun 2018 naik 0,76 poin menjadi 62,96 poin. Untuk tahun 2019 meningkat menjadi 63,79 poin atau naik 0,83 poin.

Gambar 2.21. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

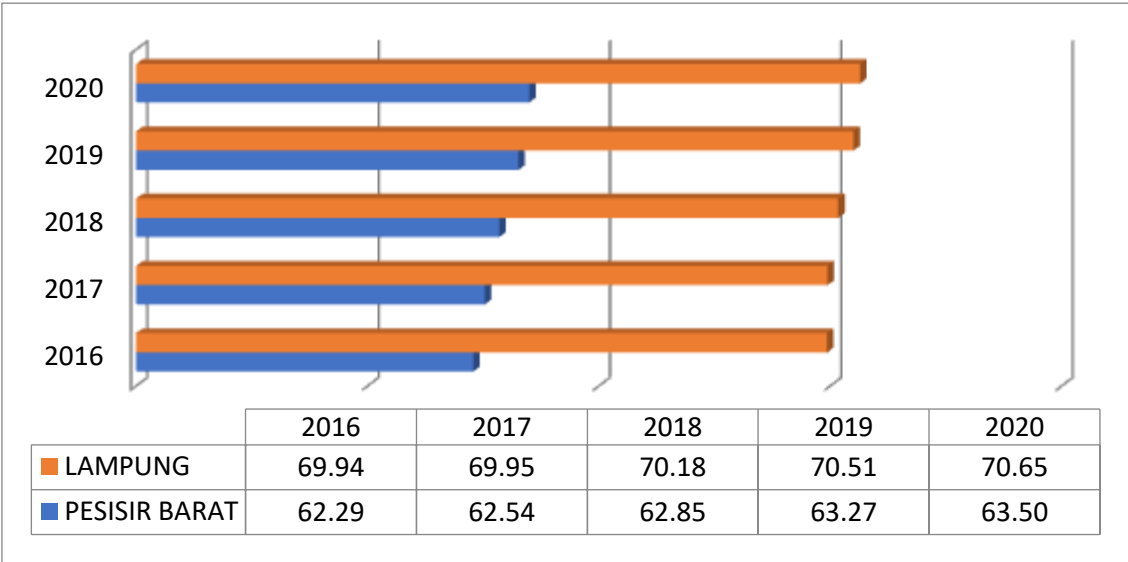


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

B. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup bisa berbeda dari masa ke masa, bahkan juga berbeda pada tiap daerah maupun negara. Perbedaan angka harapan hidup ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari lingkungan, status kesehatan, hingga status ekonomi. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada dasarnya, cara memperpanjang angka harapan hidup suatu wilayah tidak hanya bergantung pada otoritas pemerintah setempat, tetapi juga didukung oleh perilaku masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Barat ditampilkan dalam gambar berikut.

Gambar 2.22. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Berdasarkan pada gambar di atas, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pesisir Barat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, peningkatan yang terjadi tidak lebih dari 1 persen, Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung.

C. Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya sekolah atau *years of schooling* merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Rata-rata lama sekolah merupakan salah indikator dalam penghitungan nilai IPM. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2016-2020 secara umum terus mengalami peningkatan 0,40-0,50 per tahun. Peningkatan masih tergolong stagnan, namun masih dalam koridor meningkat, sehingga harapan untuk terus mengalami peningkatan diharapkan semakin meningkat pada tahun berikutnya.

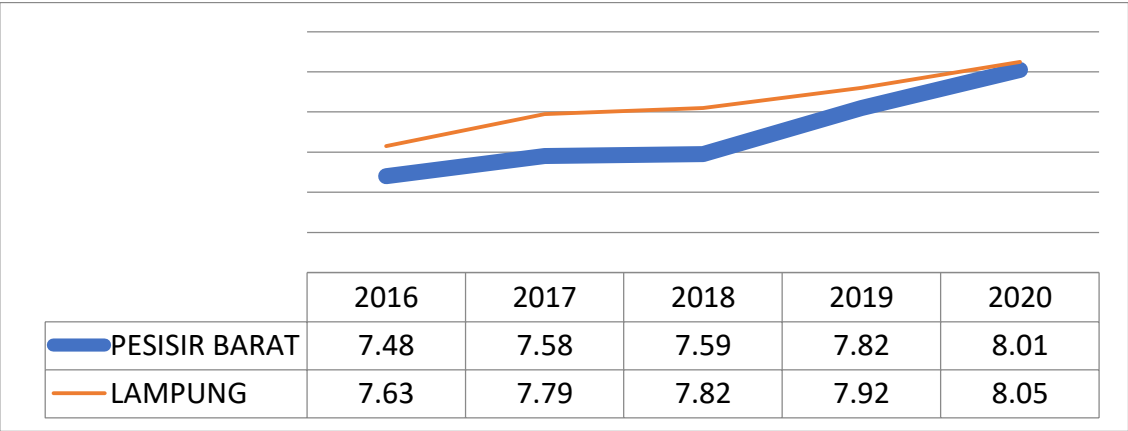
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Lama Sekolah	7,48	7,58	7,59	7,82	8,01

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Gambar 2.23. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

D. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan ukuran bagi seorang individu yang berada pada jenjang pendidikan untuk dapat menikmati fasilitas pendidikan yang ada disuatu daerah. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga ketersediaan guru pengajar adalah beberapa hal mendasar yang membantu dalam pencapaian indikator ini. Harapan Lama

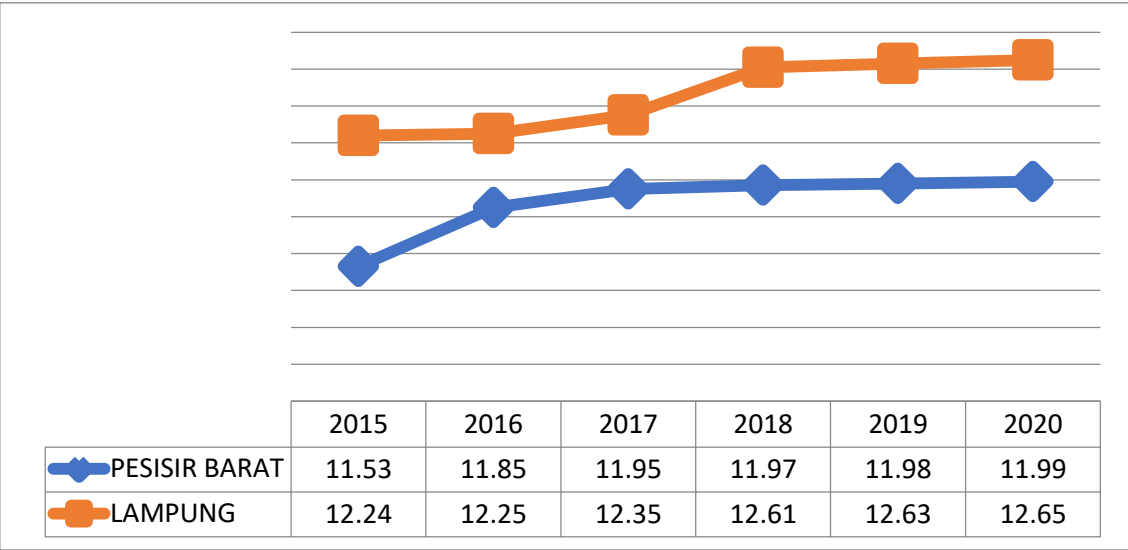
Sekolah Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2016-2020 secara umum terus mengalami peningkatan 0,45 tahun. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15. Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Lama Sekolah	11,85	11,95	11,97	11,98	11,99

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Gambar 2.24. Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Persentase Kelulusan SD dan SMP secara umum dari tahun 2016-2020 telah mencapai 100%. Selanjutnya untuk persentase putus sekolah SD dan SMP juga terus menurun menuju 0%. Beberapa hal yang menjadi penyebab putus sekolah peserta didik adalah: (i) faktor ekonomi keluarga dan (ii) akses pendidikan yang jauh.

Tabel 2.16. Persentase Kelulusan dan Persentase Putus Sekolah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kelulusan SD	100	100	100	100	100
2	Persentase Kelulusan Sekolah SMP	100	100	100	100	100
3	Persentase Putus Sekolah SD	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
4	Persentase Putus Sekolah SMP	0,30	0,30	0,25	0,20	0,20

Sumber : Dinas P dan K, 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berikut data Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 ditampilkan dalam tabel

Tabel 2.17. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020

No	Tingkat	APM		
		2018	2019	2020
1	SD	78,97	78,81	79,77
2	SMP	69,57	68,65	70,25
3	SMA	59,90	65,15	65,03

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2018-2020

APM disuatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Berdasarkan data pada tabel di atas APM tingkat pendidikan sekolah dasar di tahun 2020 sebesar 83,39, untuk tingkat sekolah menengah pertama 70,25 dan untuk tingkat sekolah menengah atas sebesar 65,03.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan, Misalnya dengan menambah fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 ditampilkan dalam tabel

Tabel 2.18. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020

No	Tingkat	APK		
		2018	2019	2020
1	SD	92,6	91,10	91,07
2	SMP	97,0	94,94	92,08
3	SMA	81,3	85,22	89,22

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2018-2020

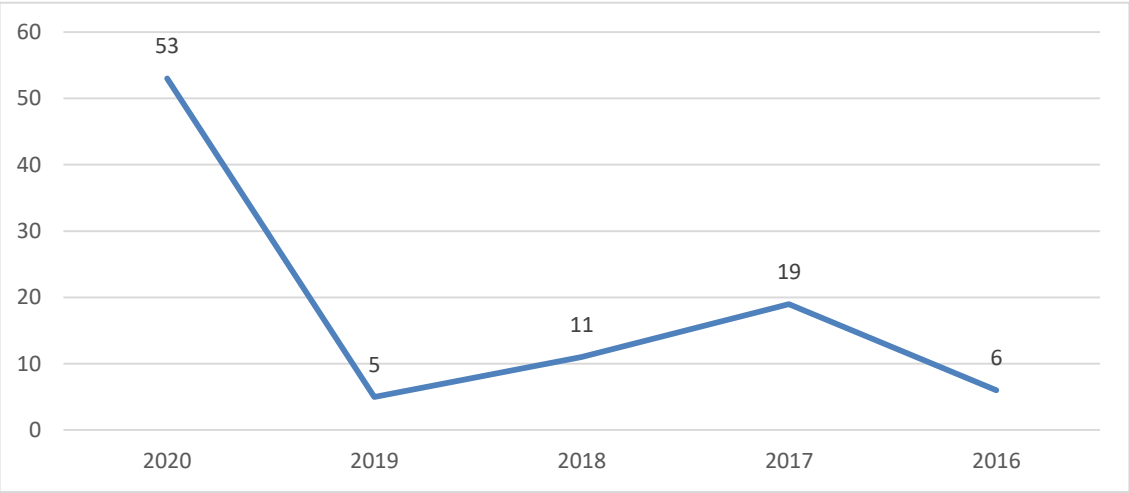
APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Berdasarkan tabel diatas Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 untuk tingkat sekolah dasar sebesar 91,07, dan untuk tingkat sekolah menengah pertama sebesar 92,08 dan angka partisipasi kasar untuk tingkat sekolah menengah atas sebesar 89,22.

E. Gizi Buruk

Gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Nutrisi yang didapat bisa terlalu sedikit atau terlalu banyak. Kondisi ini dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan seperti stunting, gangguan mata, diabetes, dan penyakit jantung.

Gizi buruk dapat disebabkan oleh pola makan yang kurang baik, status ekonomi yang rendah, sulit mendapatkan makanan, serta berbagai kondisi medis dan kesehatan mental. Bila seorang anak pada masa 1000 hari pertama kehidupan tidak mendapatkan nutrisi yang adekuat/seimbang, maka seorang anak dapat mengalami kekurangan kalori dan protein. Gejala gizi buruk dapat berupa anak kurang aktif, perkembangan terganggu dan penurunan berat badan. Penatalaksanaan gizi buruk dilakukan dengan memberikan tambahan nutrisi yang kurang dan mengobati penyebab yang mendasarinya/penyakit. Berikut data jumlah gizi buruk di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016-2020 ditampilkan dalam gambar

Gambar 2.25. Jumlah gizi buruk tahun 2016-2020 di Kabupaten Pesisir Barat



Sumber : Komunikasi Data Kemenkes RI 2021

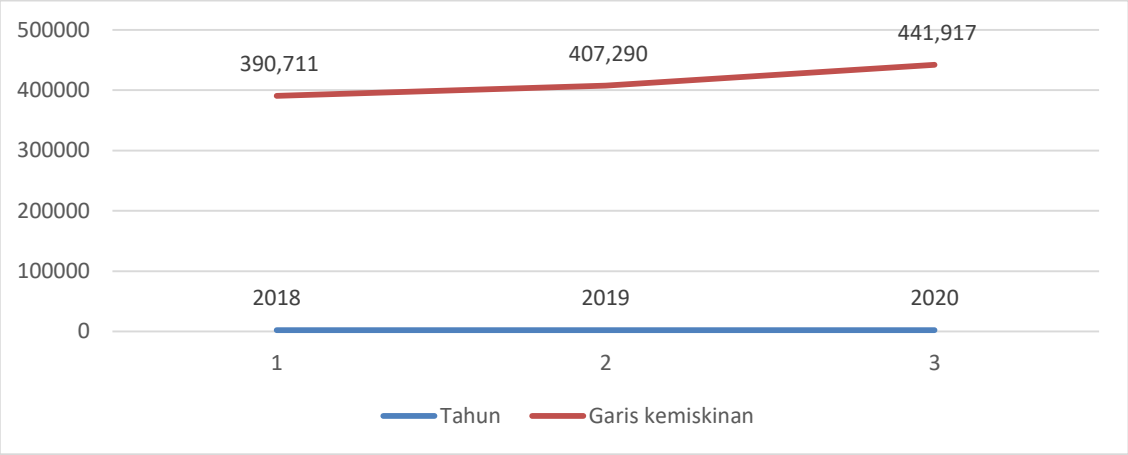
Status Gizi Buruk/stunting sampai dengan tahun 2020 sebanyak 53 kasus (pendek dan sangat pendek), meningkat bila dibandingkan dengan data pada tahun 2019 sebanyak 5 kasus, sebelumnya pada tahun 2018 sebanyak 11 kasus, pada tahun 2017 terjadi 19 kasus sementara pada tahun 2016 sebanyak 6 kasus. Masalah utama dari status gizi buruk ini adalah malnutrisi/kekurangan kalori, protein, Anemia Zat Besi, Vitamin A dan gangguan akibat kekurangan Yodium.

F. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK).

Garis kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2020 ditampilkan dalam gambar berikut;

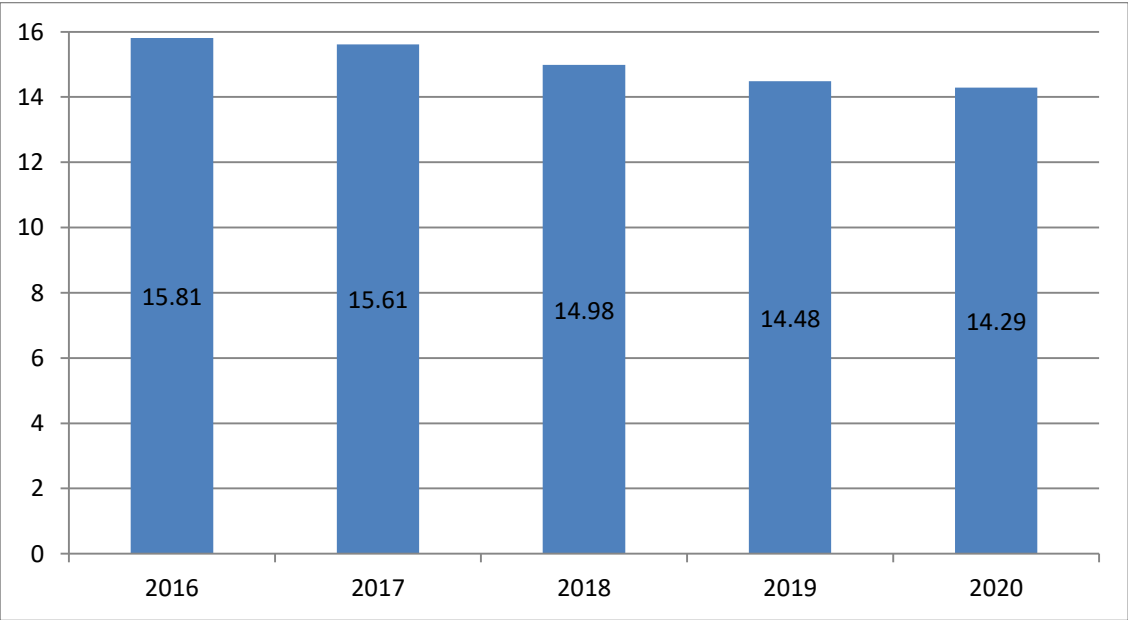
Gambar 2.26. Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) di Kabupaten Pesisir Barat 2018-2020



Sumber BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2021

Berdasarkan data pada gambar di atas terdapat peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2020, garis kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018 sebesar 390.711 menjadi 441.917 di tahun 2020. Persentasi penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat di tampilkan dalam gambar berikut:

Gambar 2.27. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Pesisir Barat, 2021

Berdasarkan data pada gambar di atas menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pada tahun 2016 sebesar 15,81% penduduk daerah masuk dalam kategori miskin dan pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat

sebesar 15,61 %, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat menurun di tahun 2018 menjadi 14,98. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebesar 14,29 %.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Seni Budaya

Pembangunan seni dan budaya yang merupakan cerminan peradaban manusia, dan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah- tengah semakin deras nya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Disisi lain, pengembangan seni budaya di Kabupaten Pesisir Barat diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Pesisir Barat.

Integralitas pembangunan seni budaya dan pariwisata merupakan sesuatu yang lazim berlaku di Indonesisa dan perkembangannya ke masa depan, berhubungan erat dengan kualitas kondisi alam dan lingkungan, politik dan keamanan, serta sarana dan prasarana. Berikut sarana dan prasarana seni dan budaya berdasarkan kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020:

Tabel 2.19. Seni dan Budaya Kabupaten Pesisir Barat Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Nama Sanggar	Alamat	Jenis Kesenian
I	Kecamatan Bangkunt		
1	Tari Hadra	Pekon Sukamaju	Tari Daerah
2	Tunas Jaya Perkasa	Pekon Kotajawa	Jaran Kepang
3	Pronggo Budoyo	Pekon Kotajawa	Jaran Kepang
II	Kecamatan Ngaras		
4	SLTP Bandar Agung	Ngaras	Tari Lampung
5	Serindu Sehati	Ngaras	Tari Daerah
III	Kecamatan Pesisir Selatan		
6	Tari Lampung	Tanjung Setia, Pesisir Selatan	Tari /Lagu Lampung
7	Paguyuban	Marang, Pesisir Selatan	Tari Bali
8	Gita Kusuma	Marang, Pesisir Selatan	Tari Bali
9	Paguyuban Marang	Marang, Pesisir Selatan	Tari Bali
IV	Kecamatan Pesisir Tengah		
10	Alam Gemisikh	Pesisir Tengah	Tari Lampung
11	Tembilung	Pesisir Tengah	Tari Lampung
12	Teluk Stabas	Kampung Jawa, Pesisir Tengah	Tari Lampung
13	Sai Betik	Rawas, Pesisir Tengah	Tari Daerah
V	Kecamatan Karya Penggawa		
14	Al Hidayah	Karya Penggawa	Qosidah
VI	Kecamatan Pesisir Utara		
15	Saguntala	Pesisir Utara	Hadra /Bedikekh
16	Pangkong	Pesisir Utara	Reog
17	Jejala	Pesisir Utara	Orkes Lampung

Sumber : Dinas P dan K, 2021

Gedung kesenian sebagai sarana untuk mengapresiasi seni para seniman sama sekali tidak terdapat di tiap-tiap kecamatan, bahkan di pusat pemerintahan belum terdapat gedung gedung kesenian yang sangat dibutuhkan oleh para seniman sebagai tempat berekspresinya para seniman Pesisir Barat. Selain belum adanya gedung kesenian, minimnya sarana prasarana dan infastruktur pendukung pengembangan sektor kebudayaan juga menjadi masalah kurang berkembangnya sektor wisata budaya di Kabupaten Pesisir Barat.

B. Pemuda dan Olahraga

Peningkatan kualitas hidup masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia pemuda dan pemudi serta pengembangan olahraga di kalangan pelajar dan masyarakat (baik olahraga prestasi maupun olahraga non prestasi).

Pemerintah daerah terus berusaha untuk dapat meningkatkan fasilitas pendukung pengembangan kepemudaan, melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan *hardskill* dan *softskill* serta bantuan stimulan alat-alat produksi. Pada tahun 2016, jumlah organisasi kepemudaan yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah sebanyak 10%, angka ini tidak banyak berkembang dari tahun ke tahun dikarenakan minimnya ketersediaan pendanaan, pada tahun 2017 (15%); tahun 2018 (20%); tahun 2019 (25%); tahun 2019 dan tahun 2020 (25%). Sementara itu untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2016-2020 stagnan pada 60%.

Tabel 2.20. Jumlah Organisasi Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Organisasi	
		Olahraga	Pemuda
1	Pesisir Tengah	21	21
2	Pesisir Selatan	2	2
3	Lemong	0	0
4	Pesisir Utara	0	0
5	Karya Penggawa	0	4
6	Pulau Pisang	0	0
7	Way Krui	0	0
8	Krui Selatan	1	3
9	Ngambur	0	6
10	Ngaras	0	0
11	Bangkunat	0	1
	Jumlah	24	37

Sumber : Dinas Pora, 2021

Tabel 2.21. Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pesisir Tengah	0	0	0	2	2
2	Karya Penggawa	0	0	0	1	1
3	Pesisir Selatan	0	0	0	1	2
4	Ngaras	0	0	0	1	1
5	Lemong	0	0	0	1	1
6	Pesisir Utara	0	0	0	1	0
7	Bangkunat	0	0	0	1	0
8	Ngambur	0	20	0	0	0
9	Krui Selatan	0	0	0	2	2
10	Way Krui	0	0	0	1	3
11	Pulau Pisang	0	0	0	1	3
	Jumlah	0	20	0	12	15

Sumber : Dinas Pora, 2021

Tabel 2.22. Jumlah Pemuda yang Berwirausaha Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pesisir Tengah	10	12	12	10	31
2	Karya Penggawa	9	9	10	7	19
3	Pesisir Selatan	3	4	5	4	16
4	Ngaras	7	9	9	9	18
5	Lemong	9	8	8	8	5
6	Pesisir Utara	4	3	3	3	6
7	Bangkunat	2	3	3	3	21
8	Ngambur	10	10	10	10	0
9	Krui Selatan	4	5	5	3	10
10	Way Krui	7	7	9	9	5
11	Pulau Pisang	5	4	5	5	2
	Jumlah	70	74	79	71	133

Sumber : Dinas Nakertrans, 2021

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pelatihan keterampilan kewirausahaan yang diberikan oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan kondisi di daerah, pelatihan yang dikembangkan antara lain adalah: perbengkelan, pembuatan kerajinan tangan/souvenir dari bahan-bahan ramah lingkungan, dan pelatihan diversifikasi produk tapis. Sementara itu untuk bidang olahraga terus dikembangkan dan dilaksanakan penyelenggaraan kejuaraan dari masing-masing cabang olahraga yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.23. Perkembangan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Voli	Biliard	Lapangan Terbuka	Basket
1	Pesisir Tengah	8	7	2	7
2	Pesisir Selatan	7	5	4	5
3	Lemong	6	3	0	4

No	Kecamatan	Voli	Biliard	Lapangan Terbuka	Basket
4	Pesisir Utara	4	2	0	4
5	Karya Penggawa	5	4	1	2
6	Pulau Pisang	2	1	0	1
7	Way Krui	3	3	0	1
8	Krui Selatan	6	4	3	2
9	Ngambur	7	4	5	4
10	Ngaras	5	3	1	3
11	Bangkunat	8	3	1	4
	Jumlah	61	39	17	37

Sumber : SIPD Kabupaten Pesisir Barat, 2020

Selanjutnya, dari tahun 2016 hingga tahun 2020 telah ada 24 persatuan cabang olahraga yang berada di bawah naungan KONI. Ke-24 persatuan cabang olahraga tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.24. Persatuan Cabang Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Nama Persatuan Cabang Olahraga	Jumlah Atlet Binaan
1	Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)	81
2	Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)	23
3	Perasatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI)	27
4	Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI)	16
5	Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI)	35
6	Persatuan Atletik Indonesia (PASI)	39
7	Persatuan Olahraga Beladiri Tarung Derajat	11
8	Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)	11
9	Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)	9
10	Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI)	23
11	Taekwondo Indonesia (TI)	13
12	Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (PERKEMI)	14
13	Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)	35
14	Persatuan Senam Indonesia (PERSANI)	2
15	Wushu Indonesia (WI)	1
16	Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (PORLASI)	3
17	Ikatan Motor Indonesia (IMI)	41
18	Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)	35
19	Perwosi	10
20	Muaythai	10
21	Woodball	8
22	Hapkido	10
23	PBSA	20
24	ISSI	10
	Jumlah	487

Sumber : Dinas Pora, 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan di suatu daerah, tidak terkecuali Kabupaten Pesisir Barat yang masih dalam taraf awal pembangunan. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai intervensi dalam pembangunan pendidikan ini, melalui banyak program dan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan taraf pendidikan masyarakat yang mengarah pada perbaikan kualitas taraf hidup masyarakat.

Tabel 2.25. Data Pendidikan Tingkat PAUD Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	PAUD			
		Sekolah	Guru	Peserta Didik	Ruang Belajar
1	Pesisir Tengah	13	44	594	29
2	Pesisir Utara	10	14	248	11
3	Lemong	14	19	312	17
4	Bangkunat	20	34	516	24
5	Ngaras	7	11	191	7
6	Ngambur	6	9	131	7
7	Pesisir Selatan	17	27	421	20
8	Krui Selatan	6	14	136	9
9	Way Krui	8	12	176	12
10	Karya Penggawa	14	27	383	23
11	Pulau Pisang	1	3	21	2
Jumlah		116	214	3.129	161

Sumber : DAPODIK Dinas P dan K, 2020

Berdasarkan pada data di atas, beberapa kecamatan masih belum memiliki rasio ideal antara guru dan murid, atau rata-rata 1:14 dari idealnya 1:10. Hampir disemua kecamatan kecuali kecamatan Krui Selatan (1:9) dan Pulau Pisang (1:7) memiliki rasio guru dan murid yang belum ideal. Kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah Kecamatan Pesisir Utara (1:17), Kecamatan Ngaras (1:17) dan Kecamatan Lemong (1:16).

Tabel 2.26. Data Pendidikan Tingkat SD sederajat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Sekolah Dasar/sederajat			
		Sekolah	Guru	Peserta Didik	Ruang Belajar
1	Pesisir Tengah	14	178	2.751	116
2	Pesisir Utara	12	114	997	75
3	Lemong	17	153	1.328	116
4	Bangkunat	19	250	3.092	155
5	Ngaras	9	111	1.094	63
6	Ngambur	11	169	2.301	97
7	Pesisir Selatan	17	210	2.891	135
8	Krui Selatan	8	90	1.149	51
9	Way Krui	5	55	571	35
10	Karya Penggawa	12	119	1.684	83

11	Pulau Pisang	2	19	124	12
Jumlah		126	1.444	17.946	938

Sumber : DAPODIK Dinas P dan K, 2020

Sementara itu, untuk pendidikan dasar, rasio antara guru dan murid secara umum berada pada angka 1:12. Kecamatan yang sudah mencukupi ketersediaan guru dibandingkan dengan murid adalah kecamatan Pesisir Utara (1:8), Kecamatan Lemong (1:8), Kecamatan Ngaras (1:9), Kecamatan Way Krui (1:10) dan Kecamatan Pulau Pisang (1:6). Sementara itu Kecamatan yang belum ideal rasio guru dan muridnya Pesisir Tengah (1:15) dan Kecamatan Karya Penggawa (1:14).

Tabel 2.27. Data Pendidikan Tingkat SMP sederajat Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Sekolah Menengah Pertama/sederajat			
		Sekolah	Guru	Peserta Didik	Ruang Belajar
1	Pesisir Tengah	3	139	1.492	70
2	Pesisir Utara	2	40	330	16
3	Lemong	7	88	490	39
4	Bangkunat	6	121	896	40
5	Ngaras	4	73	345	24
6	Ngambur	5	101	856	36
7	Pesisir Selatan	5	128	1.067	47
8	Krui Selatan	1	34	287	12
9	Way Krui	1	32	187	20
10	Karya Penggawa	1	38	292	14
11	Pulau Pisang	1	11	66	8
Jumlah		36	805	6.308	326

Sumber : DAPODIK Dinas P dan K, 2020

Berdasarkan pada data pendidikan tingka SMP di Kabupaten Pesisir Barat, disemua kecamatan rata-rata rasio siswa dan murid berada pada 1:7 dengan Kecamatan Ngaras yang memiliki rasio terbaik 1:4 serta Kecamatan Pesisir Tengah dengan rasio terendah dengan angka 1:10. Sementara itu, kecamatan lain berada pada posisi ideal dengan angka 1:5-1:8.

Selain lembaga pendidikan umum, lembaga pendidikan berbasis agama terus tumbuh dengan berdirinya beberapa pondok pesantren dan madrasah-madrasah yang tersebar di beberapa kecamatan sebagai bagian dari usaha pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan akses dan pilihan pendidikan kepada masyarakat. Berikut ini data Pondok Pesantren dan madrasah di Kabupaten Pesisir Barat :

Tabel 2.28. Data Pondok Pesantren di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Nama	Alamat
1	Al Falah	Jl. Pesantren II Pagar Baru Krui - Pasar Krui – Kec. Pesisir Tengah
2	Miftahurrohmah	Jl. Raden Anom No. 01 Pekon Seray - Seray – Kec. Pesisir Tengah
3	Barokatul Qodiri	Jl. Pesantren - Padang Rindu – Kec. Pesisir Utara

4	Darus Sholihin	Jl. Karya Bakti Pekon Marang - Marang – Kec. Pesisir Selatan
5	Miftahunnajaah	Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat - Marang – Kec. Pesisir Selatan
6	Al Irsyad	Jl. Lintas Barat - Mulang Maya – Kec. Ngaras
7	Nur Islami al Mujaddid	Jl. Lintas Barat Sumatera 175, Pekon Sukamaju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat - Sukamaju – Kec. Ngaras
8	Nidaul Islam	Pekon Way Nukak - Way Nukak – Kec. Karya Penggawa

Sumber : Kantor Kemenag Kabupaten Pesisir Barat, 2020

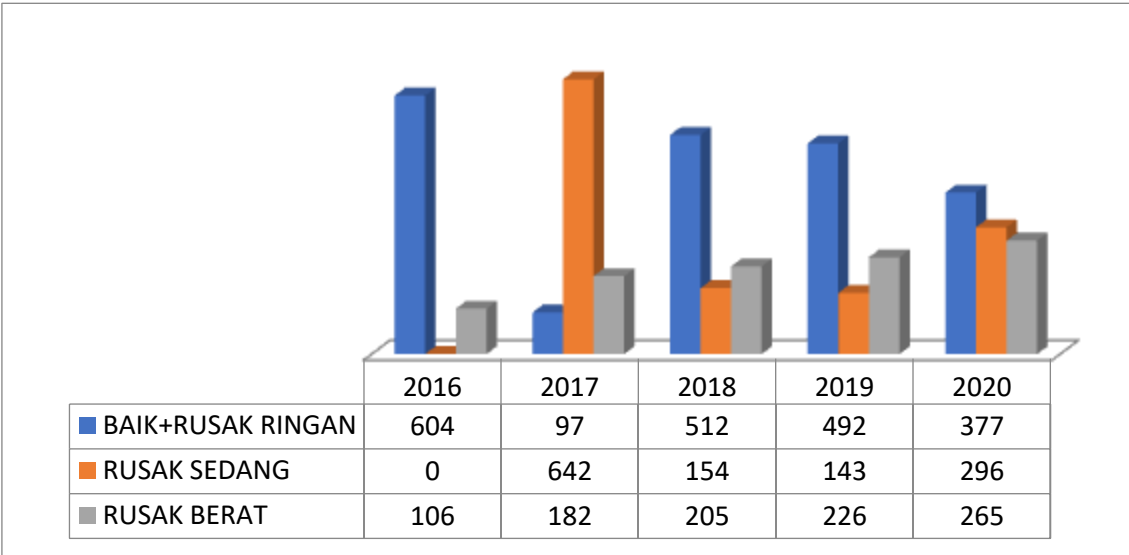
Tabel 2.29. Data Madrasah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta	Total
1	Raudhotul Athfa	-	7	7
2	Madrasah Ibtidaiyah	1	13	14
3	Madrasah Tsanawiyah	-	21	21
4	Madrasah Aliyah	1	6	7

Sumber : Kantor Kemenag Kabupaten Pesisir Barat, 2020

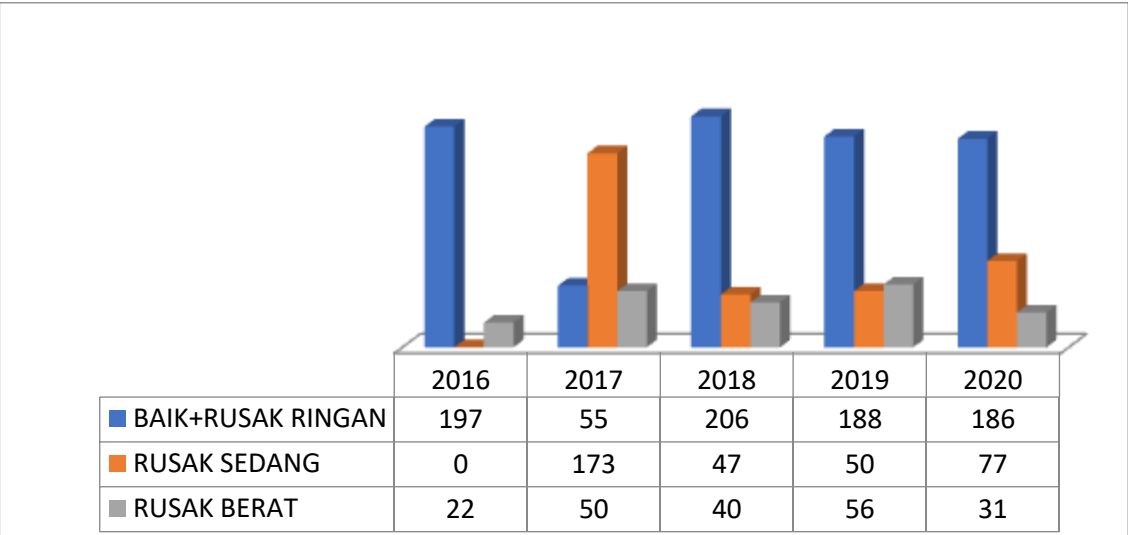
Sektor pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat masih terkendala dengan masih banyak ruang kelas yang dalam kondisi rusak, baik ringan, sedang maupun berat. Di bawah ini tabel kondisi ruang kelas SD dan SMP.

Gambar 2.28. Kondisi Bangunan Ruang Kelas SD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Disdikbud Kabupaten Pesisir Barat, 2021

Gambar 2.29. Kondisi Bangunan Ruang Kelas SMP Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Disdikbud Kabupaten Pesisir Barat, 2021

Angka Melek Huruf

Kesejahteraan sosial dengan beberapa indikator keberhasilan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pesisir Barat, terdapat perkembangan angka melek huruf dan penurunan buta aksara setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30. Angka Buta Huruf Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf	9,67	9,69	9,71	9,76	9,76

Sumber : Dinas P dan K, 2021

Tabel 2.31. Angka Melek Huruf Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf	90,33	90,31	90,29	90,24	90,24

Sumber : Dinas P dan K, 2021

Pada tabel di atas, Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Pesisir Barat dari tahun-tahun cenderung mengalami peningkatan, sedangkan Angka Buta Huruf (ABH) terus mengalami penurunan. Capaian terhadap indikator di atas masih belum maksimal, dikarenakan angka AMH yang belum mencapai 10% serta perkembangan dari tahun ke tahun yang stagnan.

Sementara itu bila melihat pada data Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik tingkat pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah pertama terus mengalami peningkatan. Hal ini bila dibandingkan dengan capaian nilai AMH dan APS menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan belum menyeluruh hingga seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat kelompok masyarakat pingggiran dan

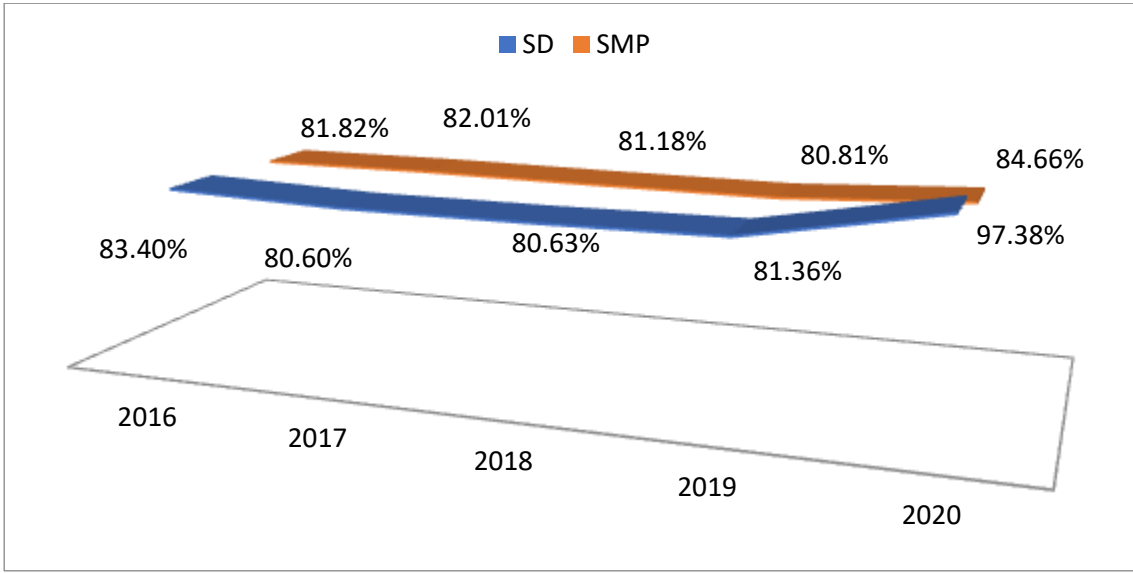
marginal yang belum memperoleh akses terhadap pendidikan yang murah, mudah dan terjangkau dari sisi biaya dan akomodasi.

Tabel 2.32. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Sekolah SD	83,40	80,60	80,63	81,36	97,38
Angka Partisipasi Sekolah SMP	81,82	82,01	81,18	80,81	84,55

Sumber : Dinas P dan K, 2021

Gambar 2.30. Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016-2020



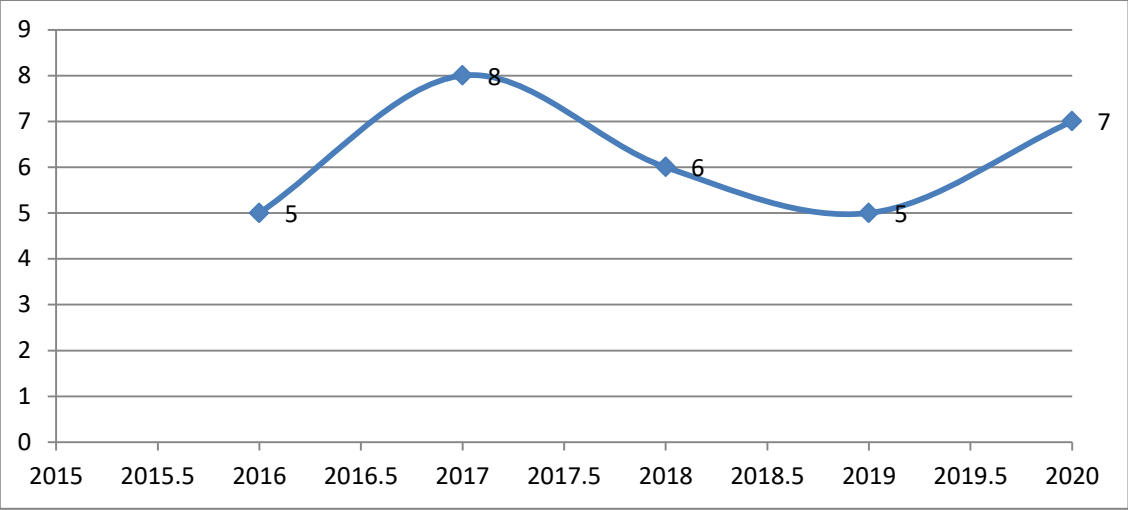
Sumber : Dinas P dan K, 2021

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan tetap dititikberatkan pada peningkatan pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, terutama yang sedang digalakkan saat ini sosialisasi dan penatalaksanaan stunting, sebagaimana program nasional atau Pemerintah Pusat. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah mengoptimalkan peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana yang ada serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan fungsi pelayanan kesehatan.

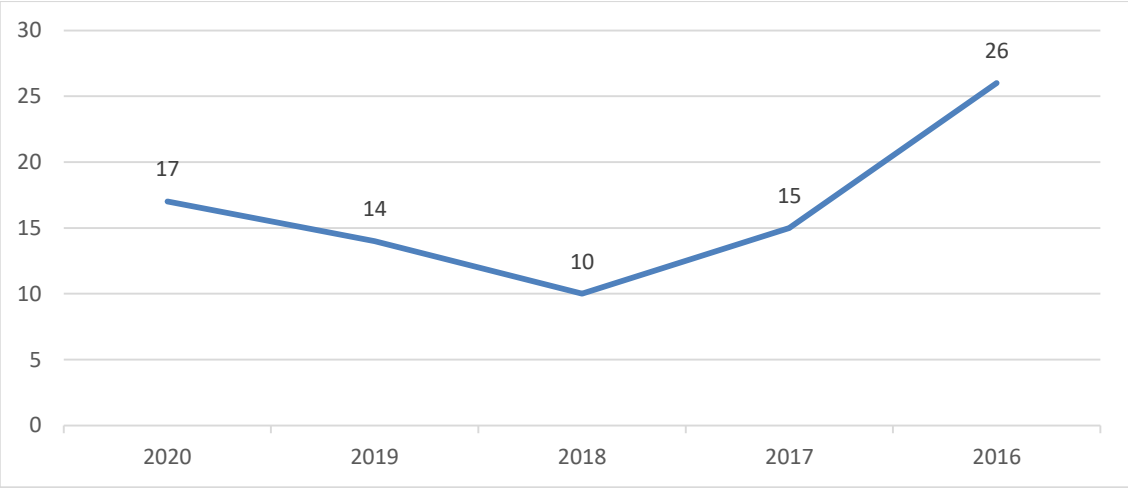
Berikut beberapa indikator pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2016-2020:

Gambar 2.31. Kematian Ibu di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Komunikasi Data Kemenkes, 2021

Gambar 2.32. Kematian Bayi di Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020



Sumber : Komunikasi Data Kemenkes, 2021

- a. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2020 sebanyak 7 kasus. tahun 2019 sebanyak 8 kasus, tahun 2018 sebanyak 6 kasus.
- b. Angka Kematian Bayi, data pada tahun 2020 sebanyak 17 atau meningkat bila dibandingkan dengan data pada tahun 2019 tercatat sebanyak 14 kasus kematian, angka ini mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2018 sebanyak 10 kasus. Angka ini terus membaik bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 15 kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 26 kasus serta pada tahun 2015 sebanyak 21 kasus. Penurunan ini disebabkan sudah membaiknya penanganan medis dan semakin tersedianya jumlah tenaga medis dan perawat di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Pesisir Barat.
- c. Status Gizi Buruk/stunting sampai dengan tahun 2020 sebanyak 17 kasus (sangat pendek). Masalah utama dari status gizi buruk ini adalah malnutrisi/

kekurangan kalori, protein, Zat Besi, kekurangan Vitamin A dan gangguan akibat kekurangan Yodium.

Tabel 2.33. Lokasi Stunting Kabupaten Pesisir Barat 2020

No	Kecamatan	Pekon	Kasus Stunting	Jumlah Kasus Stunting
1	Karya Penggawa	Menyancang	4	7
2		Way Sindi	3	
3	Ngambur	Gedung Cahaya Kuningan	3	6
4		Sumber Agung	1	
5		Pekon Mon	1	
6	Ngaras	Negara Ngambur	1	
7		Suka Maju	2	4
8		Suka Rame	1	
9		Raja Basa	1	
		Total	17	

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

- d. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) sudah dilaksanakan oleh dinas terkait meskipun belum maksimal. Berikut contoh tabel jumlah penderita penyakit menular dan tidak menular.

Tabel 2.34. Jumlah Penderita Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Penyakit Menular			ODGJ/ Penyakit Tidak Menular
		Demam Berdarah	ISPA	Malaria	
1	Pesisir Tengah	10	586	0	16
2	Pesisir Selatan	12	396	1	8
3	Lemong	2	165	1	7
4	Pesisir Utara	1	307	0	15
5	Karya Penggawa	11	140	0	22
6	Pulau Pisang	0	48	0	0
7	Way Krui	2	43	0	11
8	Krui Selatan	1	67	0	12
9	Ngambur	16	238	0	9
10	Ngaras	1	762	0	5
11	Bangkunat	2	492	0	14
Jumlah		58	3.244	2	119

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Di Kabupaten Pesisir Barat Tersedia 11 Puskesmas dan 17 Puskesmas pembantu, 160 Posyandu, 30 Pos Kesehatan Desa, 11 Puskesmas Keliling yang tersebar di 11 kecamatan. Rincian kinerja pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.35. Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat

No	Kecamatan	RSUD	Pusk. Induk	Pustu	Posyandu	Poskesdes	Pusling
1	Lemong		1	2	23	5	1
2	Pesisir Utara		1	2	14	2	1
3	Pulau Pisang		1	0	6	0	1
4	Karya Penggawa		1	1	13	5	1
5	Pesisir Tengah		1	0	12	1	1
6	Way Krui		1	1	10	0	1
7	Krui Selatan	1	1	2	10	1	1
8	Pesisir Selatan		1	2	24	4	1
9	Ngambur		1	3	14	6	1
10	Ngaras		1	0	10	1	1
11	Bangkunat		1	4	24	5	1
	Jumlah	1	11	17	160	30	11

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Tabel 2.36. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

Kec.	Dok Spes	dr	drg	Bidan	Pera wat	Apt	Kesm as	Anal is	Nutrisi onis	Kesling
Lemong		2		23	7	2	2	1	1	1
Pesisir Utara		2		17	10	2	1	1	1	2
Pulau Pisang				13	9	2	1	1	1	1
Karya Penggawa		1		26	12	2	2	1	1	2
Way Krui		1		15	7	1	1	1	1	1
Pesisir Tengah		3		48	28	2	4	1	1	2
Krui Selatan		1		23	6	1	0	2	1	2
Pesisir Selatan		2		49	22	2	2	1	2	2
Ngambur		2	1	42	20	3	0	1	3	1
Ngaras		2		28	19	2	2	1	2	1
Bangkunat		2		43	18	2	1	2	2	1
RSUD	6	5	2	40	31	3	2	3	4	3
Jumlah	6	23	3	367	189	24	18	16	20	19

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

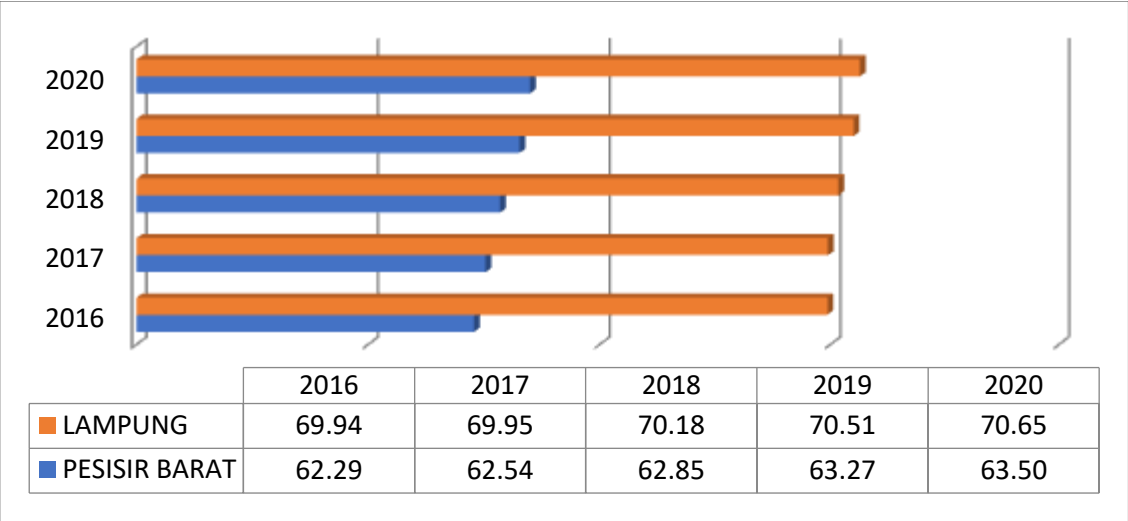
Kecamatan Pesisir Tengah yang terdapat 3 Dokter, dengan jumlah penduduk yang mencapai 20.168 orang, maka ketersediaan tenaga Dokter per penduduk masih jauh dari rasio ideal, atau perhitungan rasionya masih berada pada angka 1:6773. Hal ini tentu saja merupakan pekerjaan rumah bagi daerah dalam proses penyediaan akses dan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Tabel 2.37. Pencapaian Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	62,29	62,54	62,85	63,27	63,50
Jumlah Kematian Bayi	Kasus	26	15	10	14	17
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	8	6	6	4	7

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Gambar 2.33. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Tabel 2.38. Jumlah Pelayanan dan Perawatan Ibu Hamil dan Bayi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

Kec	Ibu				Bayi		
	K1	K4	Faskes	Pelayanan Nipas (KF1)	Asi Eksklusif	M PASI	Imunisasi
Pesisir Tengah	372	328	260	261	163	3	335
Pesisir Selatan	532	442	438	448	400	10	347
Lemong	245	196	214	215	135	10	238
Pesisir Utara	174	117	149	149	83	9	136
Karya Penggawa	320	288	288	289	176	20	300
Pulau Pisang	13	10	12	12	9	0	16
Way Krui	185	169	165	166	141	3	158
Krui Selatan	188	146	163	163	119	3	186
Ngambur	471	452	431	430	308	11	371
Ngaras	176	186	166	171	131	7	191
Bangkunat	566	425	317	499	128	1	560
Jumlah	3.242	2.759	2.603	2.803	1.793	77	2.838

Sumber : Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur merupakan unsur utama dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah. Jalan merupakan salah satu penggerak ekonomi utama bagi suatu wilayah. Keterkaitan dan kelancaran perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dapat terhubung dengan adanya jalan. Demi mendukung perkembangan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan infrastruktur di daerah.

Ketersediaan jalan nasional yang ada di Kabupaten Pesisir Barat sepanjang 208,13 km. Sedangkan ketersediaan jalan provinsi sepanjang 11.996 km, ketersediaan jalan kabupaten sepanjang 644,08 km dan jalan desa/lokal sepanjang 463,34 km. Berikut adalah fasilitas sarana pendukung transportasi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat:

Tabel 2.39. Data Ketersediaan Infranstruktur Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Jenis Data	Panjang (Km)	Ket
1	Panjang Jalan Berdasarkan Kelas:		
	a. Jalan Nasional	208,13	Baik
	b. Jalan Provinsi	11.996	Baik
	c. Jalan Kabupaten	644,08	Mantab dan Sedang
	c. Jalan Desa/Lokal	463,34	Sedang
2	Kondisi Jalan:		
	a. Aspal	263,034	
	b. Pengerasan Beton	14,885	
	c. Kerikil	122,929	
	d. Tanah	243,233	
3	Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi:		
	a. Jalan Baik	182,660	28,36%
	b. Jalan Sedang	68,750	10,67%
	c. Jalan Rusak Ringan	35,290	5,48%
	d. Jalan Rusak Berat	357,380	55,49%
4	Jembatan		49.000 Buah
	Panjang	727	
5	Terminal Darat		1 Buah
6	Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi: Kolektor	208,13	
7	Status Jalan:		
	a. Desa/Lokal	463,34	
	b. Kabupaten	644,08	
	c. Nasional	208,13	
8	Irigasi:		
	a. Primer	57,457	
	b. Sekunder	3,3	
	c. Tersier	9,15	

Sumber : Dinas PU dan PR, 2021

Sampai dengan tahun 2020 kondisi jalan kabupaten untuk kategori “jalan rusak berat” sepanjang 357,280 km atau meningkat 69 km bila dibandingkan dengan data pada tahun 2019 sepanjang 288,924 km. Untuk jalan kategori “jalan rusak ringan” data tahun 2020 sepanjang 35,29 km atau turun bila dibandingkan dengan data pada tahun 2019 sepanjang 77,706 km menurun secara rata-rata pertahun 4,21%. Berikutnya untuk kategori “jalan sedang” pada tahun 2020

sepanjang 68,750 km atau mengalami perbaikan bila dibandingkan pada tahun 2019 sepanjang 80,670 km. Sedangkan untuk jalan dengan kategori “jalan baik” pada tahun 2020 sepanjang 182,66 km atau mengalami penurunan panjang bila dibandingkan pada tahun 2019 sepanjang 196,78 km. Penurunan secara umum kondisi jalan di Kabupaten Pesisir Barat disebabkan oleh kondisi fiskal daerah pada tahun 2020 yang mewajibkan pemotongan anggaran untuk belanja modal dan diarahkan untuk pencegahan pandemi Covid-19.

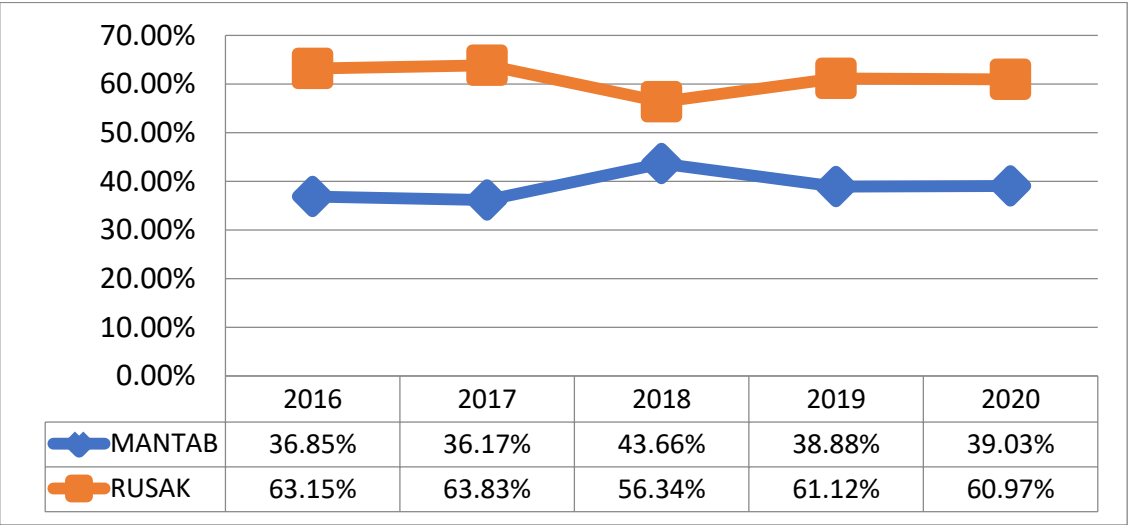
Penurunan yang terjadi terlihat minor, namun hal ini disebabkan oleh konsrentasi penanganan jalan tidak hanya fokus pada peningkatan tapi juga pemeliharannya. Terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur jalan antara lain kondisi struktur tanah yang labil mengakibatkan sering terjadi longsor ketika terjadi hujan deras, kondisi demografi Kabupaten Pesisir Barat (jarak antar desa yang cukup jauh terpisah), kendaraan yang melintas melebihi tonase yang diizinkan serta terbatasnya dana pemeliharaan jalan. Untuk lebih lengkapnya rincian kondisi jalan Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40. Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 - 2020

Kondisi Jalan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Baik	140.766	135.830	196.637	169.772	182.660
Sedang	96.861	97.127	84.590	80.678	68.750
Rusak Ringan	81.410	82.930	74.432	77.706	35.290
Rusak Berat	325.883	328.193	288.421	315.924	357.380
Jumlah (Km)	644.920	644.080	644.080	644.080	644.080

Sumber : Dinas PU dan PR, 2021

Gambar 2.34. Kondisi Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 - 2020

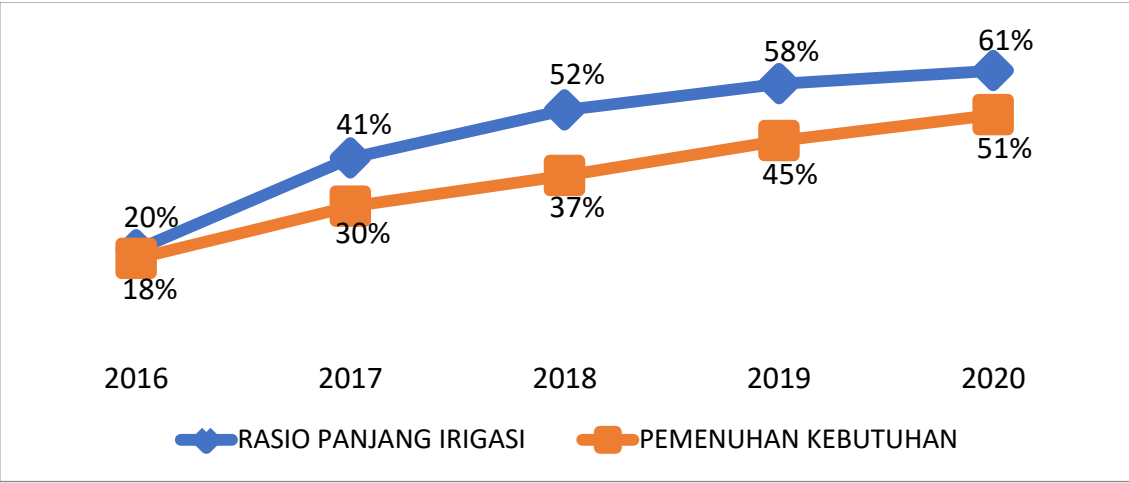


Sumber : Dinas PU dan PR, 2021

Berdasarkan pada data di atas, secara umum kondisi jalan mantab terus meningkat dari tahun 2016-2020. Walaupun bila dilihat dari peningkatan yang tidak signifikan. Kenaikan yang cenderung lambat ini dikarenakan proses peningkatan jalan menuju kondisi jalan mantab tidak berbanding lurus dengan

penurunan jumlah jalan rusak. Pada tahun 2020, target jalan mantab yang ditetapkan adalah 63,66% namun baru mampu tercapai 39,93% atau hanya mampu mencapai 63,61% dari target yang ditetapkan. Permasalahan utama rendahnya capaian kondisi jalan mantab adalah pada pendanaan yang tersedia tidak berbanding lurus dengan panjang jalan yang daerah yang menjadi kewenangan.

Gambar 2.35. Kondisi Irigasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 - 2020



Sumber : Dinas PU dan PR, 2021

Sementara itu untuk kondisi irigasi daerah selama kurun waktu tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan walaupun belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat pertanian. Berdasarkan pada data di atas, pada tahun 2016 pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi untuk masyarakat baru terpenuhi 18% dan terus meningkat menjadi 51% pada tahun 2020. Sedangkan untuk rasio panjang jaringan irigasi pada tahun 2016 sebesar 20% dan telah mencapai 61% pada tahun 2020.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan kumuh masih merupakan salah satu hal sub urusan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Hingga tahun 2020, jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 14,-15% dari keseluruhan luas wilayah. Beberapa upaya dan usaha dari pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah kawasan dan rumah kumuh terus digalakkan. Intervensi program lintas sektoral diharapkan mampu menekan angka ini.

Hingga pada tahun 2020, Kecamatan Bangkunan merupakan daerah yang paling banyak memiliki jumlah rumah tidak layak huni dengan jumlah rumah 332 unit, berikutnya Kecamatan Pesisir Utara dengan sebanyak 206 unit rumah tidak layak huni dan Kecamatan Karya Penggawa dengan dengan jumlah 47 unit.

Tabel 2.41. Jumlah Rumah Layak Huni Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Rumah (Unit)		
		Layak Huni	Tidak Layak Huni	Total Rumah
1	Pesisir Tengah	5.499	41	5.540
2	Pesisir Selatan	6.534	101	6.635
3	Lemong	2.925	105	3.030
4	Pesisir Utara	2.202	206	2.408
5	Karya Penggawa	3.997	117	4.114
6	Pulau Pisang	404	28	432
7	Way Krui	2.375	74	2.449
8	Krui Selatan	2.604	113	2.717
9	Ngambur	4.695	112	4.807
10	Ngaras	2.292	50	2.342
11	Bangkunat	5.849	332	6181
	Jumlah	39.376	2.530	41.906

Sumber : Dinas PR dan KP, 2021 (data diolah)

Sementara untuk data luasan wilayah kumuh secara total untuk Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 110 Ha dengan sebaran titik kawasan permukiman sebanyak 61 titik dan tersebar di 3 kecamatan (lokasi yang sudah ditetapkan yaitu Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Utara dan Bangkunat). Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

Tabel 2.42. Data Kawasan Kumuh Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Kawasan Kumuh Kabupaten	
		Kawasan Permukiman (Titik)	Luas Kawasan Permukiman (Ha)
1	Pesisir Tengah	12	28,26
2	Pesisir Selatan	0	0,00
3	Lemong	0	0,00
4	Pesisir Utara	17	27,65
5	Karya Penggawa	0	0,00
6	Pulau Pisang	0	0,00
7	Way Krui	0	0,00
8	Krui Selatan	0	0,00
9	Ngambur	0	0,00
10	Ngaras	0	0,00
11	Bangkunat	32	54,79
	Jumlah	61	110,7

Sumber : Dinas PR dan KP, 2021 (data diolah)

Disektor air bersih yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, Sampai dengan tahun 2020, tingkat ketersediaan air bersih di Kabupaten Pesisir Barat telah mampu melayani 33,00% dari keseluruhan rumah tangga yang ada di Kabupaten Pesisir Barat atau meningkat dari tahun 2018 sebanyak 21,00%. Pada tahun 2017 berada pada angka 9%. Sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 4%. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan yang cukup baik disebabkan interfensi dari kegiatan Program Air Minum dan Sanitasi Masyarakat “Pamsimas” yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan juga bagian dari swadaya masyarakat.

Mengingat program Pamsimas terus berjalan dari tahun 2020 ini diharapkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat akan terus meningkat dan mampu melayani masyarakat.

Sistem pengaliran pendistribusian air umumnya secara grafitasi. Masalah sumber air baku yang dihadapi di Kabupaten Pesisir Barat merupakan masalah umum untuk sistem penyediaan air bersih yang memanfaatkan air permukaan sebagai sumber air baku, yaitu meningkatnya kekeruhan (*turbidity*) berlainan, curah hujan tinggi di daerah tangkapan (*catchment area*). Sedangkan masalah khusus adalah umumnya mata air sangat dipengaruhi oleh kondisi musim. Pada musim kemarau mata air mengalami penurunan (*drop*) yang cukup tinggi.

Tabel 2.43. Jumlah Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Perumahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

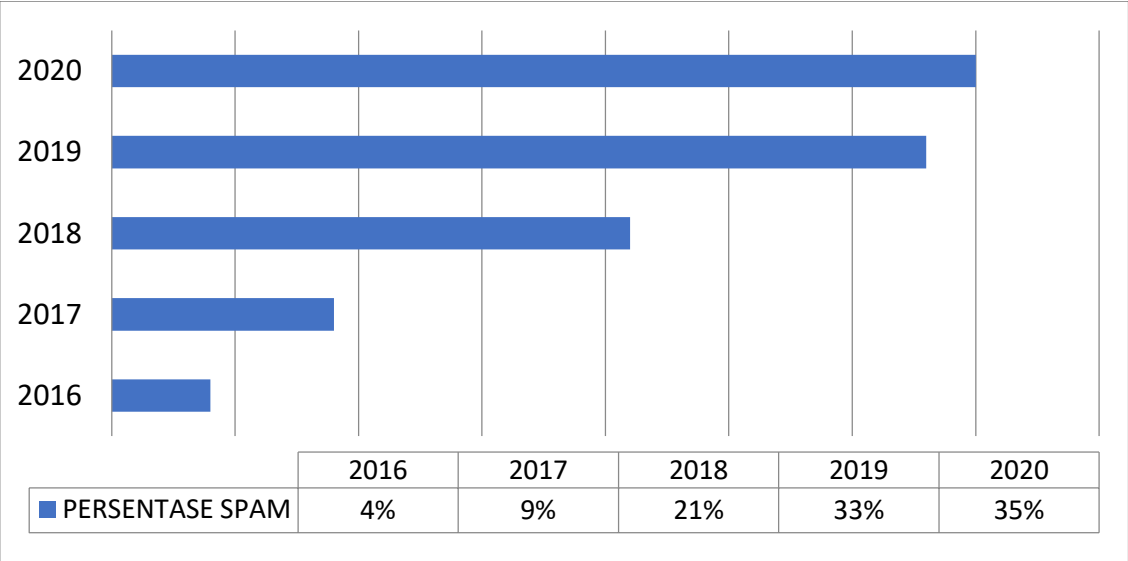
No	Kecamatan	Air Limbah		Air Bersih	
		Individual	Komunal	Perpipaan	Air Bawah Tanah
1	Pesisir Tengah	80	25	254	633
2	Pesisir Selatan	25	0	666	1.486
3	Lemong	25	50	879	933
4	Pesisir Utara	25	0	381	442
5	Karya Penggawa	25	50	683	886
6	Pulau Pisang	0	0	0	105
7	Way Krui	0	25	274	633
8	Krui Selatan	25	50	0	633
9	Ngambur	0	0	1.282	1.145
10	Ngaras	0	0	483	550
11	Bangkunat	0	75	1.299	2.269
Jumlah		205	275	6.201	9.715

Sumber : Dinas PR dan KP, 2021

Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air bersih di Kabupaten Pesisir Barat juga terus mengalami peningkatan, dimulai dari tahun 2016 yang berada pada angka 4% dan terus meningkat menjadi 9% pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 kembali naik menjadi 21% dan pada tahun 2019 dan 2020 telah mampu memenuhi 33% dan 25% dari jumlah rumah tangga di daerah.

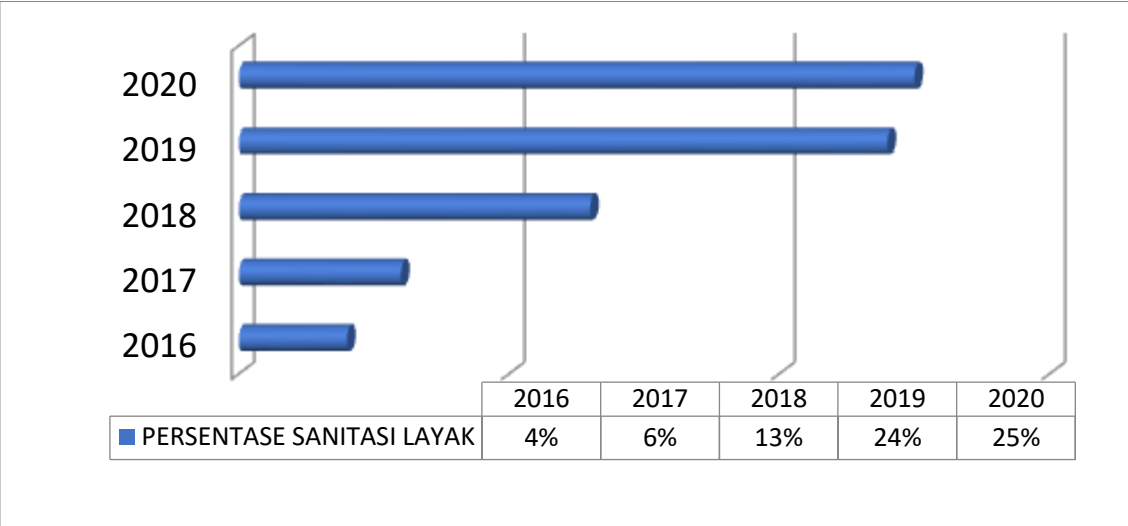
Sementara itu cakupan sanitasi di Kabupaten Pesisir Barat juga terus mengalami peningkatan, dimulai dari tahun 2016 yang berada pada angka 4% dan terus meningkat menjadi 6% pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 kembali naik menjadi 13% dan pada tahun 2019 telah mampu memenuhi 24% dari jumlah rumah tangga daerah. Pada tahun 2020 data meningkat menjadi 35% jumlah rumah tangga telah memiliki sanitasi yang layak.

Gambar 2.36. Persentase Cakupan Sarana Prasarana Air Bersih Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas PR dan KP, 2021

Gambar 2.37. Persentase Cakupan Sanitasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas PR dan KP, 2021

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan adil bagi setiap warga masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, maka dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum harus didukung oleh aparaturnegara. Salah satu aparaturnegara di daerah ialah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disingkat dengan Satpol PP. Satpol PP di Kabupaten Pesisir Barat dalam nomenklaturnya bergabung dengan Satuan Pemadam Kebakaran dengan tugas utama untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Fungsi utamanya adalah dengan memastikan penegakan perda dan peraturan kepala daerah termasuk konflik sosial yang terjadi. Berdasarkan pada data terkait dengan konflik sosial, di Kabupaten Pesisir Barat pada dasarnya konflik sosial yang terjadi masih bersifat lokal dan tidak membawa isu SARA (Suku, Agama dan RAS). Berikutnya terkait dengan pelanggaran perda yang terjadi adalah untuk kasus pelanggaran Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang RTRW Tahun 2017-2037.

Tabel 2.44. Konflik Sosial dan Pelanggaran Perda Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
I	Konflik Sosial					
1	Jumlah Kejadian	0	1	0	1	0
2	Penyelesaian Kejadian	0	1	0	1	0
II	Pelanggaran Perda					
1	Jumlah Kejadian	0	9	21	33	4
2	Penyelesaian Kejadian	0	6	13	24	3

Sumber : Satpol PP dan Damkar, 2021

Kabupaten Pesisir Barat tidak luput dari kejadian bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Hal ini dapat dilihat dari sisi topografi dan geografi daerah yang tergolong ke dalam daerah rawan bencana.

Tabel 2.45. Kondisi Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Pesisir Barat

No	Kecamatan	Rawan Banjir	Rawan Gunung Meletus	Rawan Longsor	Rawan Gempa Bumi	Rawan Tsunami
1	Pesisir Tengah	6	0	5	1	1
2	Pesisir Selatan	14	0	15	1	1
3	Lemong	2	0	13	1	1
4	Pesisir Utara	3	0	11	1	1
5	Karya Penggawa	12	0	0	1	1
6	Pulau Pisang	0	0	1	1	1
7	Way Krui	8	0	6	1	1
8	Krui Selatan	9	0	8	1	1
9	Ngambur	4	0	3	1	1
10	Ngaras	8	0	7	1	1
11	Bangkunat	5	0	8	1	1

Sumber : BPBD, 2021

Berdasarkan pada data tahun 2020, kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Pesisir Barat hampir semuanya masih bersifat lokal/kabupaten. Hal ini dapat dilihat dari kejadian yang telah lalu, dimana daerah-daerah yang terkena bencana sifatnya kecil (lokal) dalam lingkup desa/pekon hingga maksimal beberapa desa/pekon atau kecamatan sebab tidak sampai mengakibatkan adanya evakuasi penduduk secara masif. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui dinas/instansi terkait (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) secara umum masih mampu untuk menangani bencana-bencana dimaksud.

Pada tahun 2020 setidaknya telah terjadi 108 kasus bencana, yang secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.46. Data Kejadian Bencana di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
1	Longsor, 9 Januari 2020	Pekon Gedau – Kecamatan Pesisir Utara	Longsor Badan Jalan
2	Banjir, 9 Januari 2020	Pekon Negeri Ratu – Kecamatan Ngambur	Banjir terjadi di Pekon Negeri Ratu Ngambur akibat Curah Hujan Tinggi.
3	Banjir, 9 Januari 2020	Pekon Kota Batu – Kecamatan Ngaras	Banjir terjadi di Pekon Kota Batu akibat Curah Hujan Tinggi.
4	Banjir, 9 Januari 2020	Kelurahan Pasar Ulu Krui – Kecamatan Pesisir Tengah	Banjir terjadi di Kelurahan Pasar Ulu Krui akibat Curah Hujan Tinggi.
5	Banjir, 9 Januari 2020	Pekon Gunung Kemala – Kecamatan Way Krui	Banjir terjadi di Kelurahan Pasar Ulu Krui akibat Curah Hujan Tinggi.
6	Longsor, 24 Januari 2020	Jalur Liwa Krui – Kecamatan Way Krui	Akses jalan tertutup dan terhambat dapat segera dievakuasi.
7	Longsor, 25 Januari 2020	Pekon Gedau – Kecamatan Pesisir Utara	Longsor menimpa rumah warga. Dapat dievakuasi.
8	Longsor, 25 Januari 2020	Pemangku Way Karwi, Kecamatan Karya Penggawa	Akses jalan tertutup dan terhambat dapat segera dievakuasi.
9	Banjir, 25 Januari 2020	Pekon Sukarame Way Tenumbang – Kecamatan Pesisir Selatan	Banjir terjadi di Pekon Sukarame Way Tenumbang akibat Curah Hujan Tinggi dan Luapan Sungai Way Tenumbang.
10	Banjir, 25 Januari 2020	Pekon Way Nukak – Way Mayah - Kecamatan Karya Penggawa	Banjir terjadi di Pekon Way Nukak – Way Mayah - Kecamatan Karya Penggawa akibat Curah Hujan Tinggi dan Luapan Sungai Way Tenumbang.
11	Longsor, 25 Januari 2020	Pekon Gedau – Kecamatan Pesisir Utara	Longsor menimpa rumah, warga dapat dievakuasi.
12	Gelombang Ekstrem, 29 Januari 2020	Pekon Kota Jawa – Kecamatan Bangkunt	Terjadi kejadian gelombang ekstrem yang menimpa nelayan di laut wil. Kota Jawa berhasil dievakuasi.

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
13	Angin Puting Beliung, 3 Februari 2020	Jalur Liwa Krui – Kecamatan Way Krui	Terjadi pohon tumbang akibat angin puting beliung dapat dievakuasi oleh petugas BPBD.
14	Gempa, 7 Februari 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah pesisir barat 3.1 Skala Richter. Tak ada korban jiwa.
15	Longsor, 8 Februari 2020	Pekon Tebakak – Kecamatan Way Krui	Akses jalan tertutup dan terhambat dapat segera dievakuasi.
16	Banjir, 8 Februari 2020	Pekon Kota Jawa – Kecamatan Bangkumat	Banjir terjadi di Pekon Kota Jawa – Kecamatan Bangkumat akibat Curah Hujan Tinggi dan Luapan dari Tambak Warga
17	Longsor, 8 Februari 2020	Pekon Gedau – Kecamatan Pesisir Utara	Longsor menimpa rumah, warga dapat dievakuasi.
18	Gempa, 11 Februari 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 3.1 Skala Richter. Tak ada korban jiwa.
19	Angin Puting Beliung, 15 Februari 2020	Jalur Liwa Krui – Kecamatan Way Krui	Terjadi pohon tumbang akibat angin puting beliung dapat dievakuasi oleh petugas BPBD.
20	Angin Puting Beliung, 22 Februari 2020	Jalur Lintas Arah Sedayu, Pekom Pemerihan – Kecamatan Bengkumat	Terjadi pohon tumbang akibat angin puting beliung dapat dievakuasi oleh petugas BPBD.
21	Gempa, 24 Februari 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 3.4 Skala Richter. Tak ada korban jiwa.
22	Gempa, 24 Februari 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 3.7 Skala Richter. Tak ada korban jiwa.
23	Banjir, 3 Maret 2020	Kelurahan Pasar Kota Krui –Kecamatan Pesisir Tengah	Banjir terjadi di Kelurahan Pasar Kota Krui –Kecamatan Pesisir Tengah akibat curah hujan tinggi dan luapan Sungai Way Balau.
24	Longsor, 10 Maret 2020	Pekon Tebakak – Kec. Karya Penggawa	Longsor badan jalan dapat di evakuasi petugas BPBD dan gabungan masyarakat
25	Gempa, 10 Maret 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 5.8 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Bengkulu. Tak ada korban jiwa.
26	Angin Puting Beliung, 12 Maret 2020	Jalur Lintas Arah Sedayu, Pekom Pemerihan – Kecamatan Bengkumat	Terjadi pohon tumbang akibat angin puting beliung dapat dievakuasi oleh petugas BPBD.
27	Banjir, 20 Maret 2020	Kelurahan Pasar Kota Krui – Kecamatan Pesisir Tengah	Banjir terjadi di Kelurahan Pasar Kota Krui –Kecamatan Pesisir tengah akibat curah hujan tinggi.
28	Gempa, 21 Maret 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 4.3 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Tanggamus. Tak ada korban jiwa.

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
29	Longsor, 25 Maret 2020	Pekon Gedau – Kec. Pesisir Utara	Longsor badan jalan dapat di evakuasi petugas BPBD dan gabungan masyarakat
30	Angin Puting Beliung, 30 Maret 2020	Kuala Stabas – Kecamatan Pesisir Tengah	Terjadi pohon tumbang akibat angin puting beliung dapat dievakuasi oeh petugas BPBD.
31	Gempa, 1 April 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi Gempa wilayah Pesisir Barat 3.4 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Tanggamus.
32	Angin Puting Beliung, 7 April 2020	Jalur Liwa Krui – Kecamatan Way Krui	Terjadi pohon tumbang akibat angin puting beliung dapat dievakuasi oeh petugas BPBD.
33	Gempa, 15 April 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 3.5 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Lampung Barat.
34	Gelombang Ekstrem, 16 April 2020	Pekon Tanjung Setia – Kecamatan Pesisir Selatan	Terjadi kejadian gelombang ekstrem yang menimpa nelayan di laut wil. Laut Tanjung Setia. Dalam Kejadian ini menewaskan Nelayan. A.n Hilmi (65 Thn)
35	Gempa, 16 April 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 3.9 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah perairan Bengkulu.
36	Angin Puting Beliung, 16 April 2020	Jalur Lintas Arah Sedayu, Pekon Pemerihan – Kecamatan Bengkunat	Terjadi pohon tumbang akibat angin puting beliung dapat dievakuasi oeh petugas BPBD.
37	Gempa, 18 April 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 3.5 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah perairan Bengkulu.
38	Gempa, 22 April 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 3.2 Skala Richter. pusat titik gempa wilayah perairan Bengkulu.
39	Gelombang Ekstrem, 28 April 2020	Pekon Balam – Kec. Pesisir Utara	Terjadi kejadian gelombang ekstrem yang menimpa salah satu warga yang saat ini belum bisa diidentifikasi lebih jauh. Dalam Kejadian ini menewaskan 1 orang Korban.
40	Gempa, 29 April 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 4.8 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah perairan Bengkulu Selatan. Tak ada korban jiwa.
41	Pergeseran Tanah, 30 April 2020	Pekon Pagar Dalam – Way Kerkai – Kec. Lemong	Terjadi kejadian pergeseran lempengan tanah yang menyebabkan retakan dan menimpa puluhan rumah warga. Akibat kejadian ini banyak rumah warga mengalami kerusakan.

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
42	Longsor, 3 Mei 2020	Pekon Lab. Mandi – Kecamatan Way Krui	Longsor badan jalan dapat di evakuasi petugas BPBD dan gabungan masyarakat
43	Gempa, 3 Mei 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 5.3 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah perairan Tanggamus - Lampung.
44	Longsor, 9 Mei 2020	Jalur Liwa – Krui	Longsor badan jalan dapat di evakuasi petugas BPBD dan gabungan masyarakat dan lintas sektor terkait menggunakan alat berat.
45	Angin Puting Beliung, 11 Mei 2020	Jalur Lintas Arah Sedayu, Pekom Pemerihan – Kecamatan Bengkunat	Terjadi pohon tumbang akibat angin puting beliung dapat dievakuasi oleh petugas BPBD.
46	Gempa, 15 Mei 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 3.4 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah perairan Pesisir Barat.
47	Longsor, 15 Mei 2020	Pemangku Way Kerkai, Pekon Pagar Dalam Kec. Lemong	Longsor tanah di Pemangku Way Kerkai, Pekon Pagar Dalam Kec. Lemong yang mengenai +- 100 rumah warga sehingga mengalami rusak sedang maupun berat.
48	Gempa, 16 Mei 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 4.3 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah perairan Pesisir Barat.
49	Gelombang Ekstrem, 21-26 Mei 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gelombang air laut yang menyebabkan gelombang ekstrem di wilayah - wilayah terdampak di Kab. Pesisir Barat. Dalam kejadian ini merupakan siklus Siklon Tropis Mangga yang berdampak di perairan wilayah Indonesia.
50	Gelombang Banjir Rob, 27 Mei 2020	Pekon Kota Karang – Kec. Pesisir Utara	Terjadi gelombang air laut yang menyebabkan banjir rob di Pekon Kota Karang – Kec. Pesisir Utara menyebabkan 3 rumah warga rusak sedang.
51	Gempa, 28 Mei 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 4.4 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah perairan Enggano - Bengkulu.
52	Gelombang Banjir Rob, 28 Mei 2020	Pekon Kerbang Dalam – Kec. Pesisir Utara	Terjadi gelombang air laut yang menyebabkan banjir rob di Pekon Kota Karang – Kec. Pesisir Utara menyebabkan air laut masuk kerumah warga.
53	Gempa, 28 Mei 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 4.9 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah perairan Enggano - Bengkulu.

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
54	Banjir, 31 Mei 2020	Pekon Laay – Kec. Way Krui	Terjadi banjir akibat luapan sungai di Pekon Laay yang menutup saluran irigasi Way Laay Kiri oleh material banjir. Petugas BPBD dan gabungan masyarakat dan lintas sektor terkait ikut dalam pembersihan akibat banjir.
55	Gempa, 1 Juni 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 3.6 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah perairan Tanggamus - Lampung.
56	Gempa, 5 Juni 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 5.0 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah perairan Krui - Bengkulu.
57	Gempa, 10 Juni 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 5.0 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Muko – Muko - Bengkulu. Tak ada korban jiwa.
58	Gempa, 1 Juli 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 3.0 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah perairan Krui - Bengkulu.
59	Gempa, 7 Juli 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi Gempa wilayah Pesisir Barat 6.1 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah perairan Laut Jepara - Jateng.
60	Angin Puting Beliung, 9 Juli 2020	Jalur Lintas Arah Sedayu, Pekon Pemerihan – Kec Bengkunt	Terjadi pohon tumbang akibat angin puting beliung dapat dievakuasi oleh petugas BPBD.
61	Gempa, 9 Juli 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 4.1 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah perairan Laut Tanggamus – Lampung.
62	Gempa, 12 Juli 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 3.9 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah perairan laut Pesisir Barat – Lampung.
63	Gelombang Ekstrem, 15-16 Juli 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gelombang tinggi air laut 4- 6 meter yang menyebabkan gelombang ekstrem di wilayah - wilayah terdampak di Kab. Pesisir Barat. Dalam kejadian ini merupakan siklus gelombang tinggi yang berdampak di Perairan Wilayah Indonesia.
64	Gempa, 15 Juli 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 3.9 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Lampung Barat- Lampung.
65	Angin Puting Beliung, 20 Juli 2020	Jalur Liwa Krui – Kecamatan Way Krui	Terjadi pohon tumbang akibat angin puting beliung dapat dievakuasi oleh petugas BPBD.

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
66	Longsor, 23 Juli 2020	Jalur Liwa – Krui	Longsor badan jalan dapat di evakuasi petugas BPBD dan gabungan masyarakat dan lintas sektor terkait menggunakan alat berat. Kejadian ini terjadi di Pal 6-7.
67	Angin Puting Beliung, 26 Juli 2020	Pekon Penyandingan - Kec. Bengkunt	Telah terjadi kejadian angin puting beliung yang menimpa rumah warga a.n Suparyadi. Tak ada korban dalam kejadian ini. Melainkan rusak robohnya rumah korban.
68	Angin Puting Beliung, 28 Juli 2020	Pekon Pelita Jaya – Kec. Pesisir Selatan	Telah terjadi kejadian angin puting beliung yang merobohkan tiang listrik menimpa rumah warga a.n. Irhamudin. Korban mengalami luka ringan. Rumah beserta isinya mengalami kerusakan total.
69	Banjir Rob, 6 Agustus 2020	Pekon Way Nukak – Kecamatan Karya Penggawa	Kejadian banjir rob yang terjadi di Pekon Way Nukak mengenai bangunan musholla dan rumah warga akibat gerusan air laut dan sungai.
70	Angin Puting Beliung, 13 Agustus 2020	Pasar Kudan – Pesisir Tengah	Telah terjadi kejadian angin puting beliung yang merobohkan pohon dan menimpa rumah warga a.n. Rijuat . Tak ada korban dalam kejadian ini. Melainkan rusak robohnya rumah korban.
71	Banjir, 13 Agustus 2020	Pekon Way Batu- Pasar Kota Krui – Pesisir Tengah	Terjadi banjir akibat luapan Sungai Way Balau di Pekon Way Batu- Pasar Kota Krui – Pesisir Tengah yang masuk kedalam rumah warga . Petugas BPBD dan gabungan masyarakat dan lintas sektor terkait ikut dalam pembersihan akibat banjir.
72	Gempa, 19 Agustus 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 6.9 Skala Richter. Pusat Titik Gempa Wilayah Bengkulu.
73	Angin Puting Beliung, 23 Agustus 2020	Jalur Lintas Arah Sedayu, Pekom Pemerihan – Kecamatan Bengkunt	Terjadi pohon tumbang akibat angin puting beliung dapat dievakuasi oeh petugas BPBD.
74	Gempa, 31 Agustus 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 1.9 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Lampung Barat- Lampung.

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
75	Angin Puting Beliung, 2 September 2020	Pekon Negeri Ratu – Kecamatan Pesisir Utara	Terjadi kejadian bencana angin puting beliung di Pekon Negeri Ratu – Kec. Pesisir Utara. Dampak dari bencana ini puluhan rumah warga mengalami rusak sedang dan berat. Petugas BPBD dan gabungan masyarakat melakukan pembersihan dan evakuasi.
76	Angin Puting Beliung, 4 September 2020	Jalur Lintas Arah Sedayu, Pekom Pemerihan – Kecamatan Bengkunat	Terjadi pohon tumbang akibat angin puting beliung dapat dievakuasi oleh petugas BPBD
77	Banjir, 10 September 2020	Pekon Way Batu- Pasar Kota Krui – Pesisir Tengah	Terjadi banjir akibat luapan sungai Way Balau di Pekon Way Batu- Pasar Kota Krui – Pesisir Tengah yang masuk kedalam rumah warga . Petugas BPBD dan gabungan masyarakat dan lintas sektor terkait ikut dalam pembersihan akibat banjir.
78	Longsor, 13 September 2020	Jalur Krui- Bengkulu. Pekon Tebakak – Kec. Karya Penggawa	Longsor badan jalan dapat di evakuasi petugas BPBD dan gabungan masyarakat dan lintas sektor terkait
79	Gempa, 13 September 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 4.0 Skala Richter. Pusat Titik Gempa Wilayah Tanggamus Lampung.
80	Gempa, 13 September 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 2.8 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Lampung Barat - Lampung.
81	Gempa, 14 September 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 2.8 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Lampung Barat - Lampung.
82	Gempa, 20 September 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 2.6 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Lampung Barat - Lampung.
83	Gempa, 24 September 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 2.2 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Pesawaran - Lampung.
84	Longsor, 28 September 2020	Jalur Krui- Bengkulu. Pekon Pemanar – Kec. Karya Pesisir Utara	Longsor badan jalan dapat di evakuasi petugas BPBD dan gabungan masyarakat dan lintas sektor terkait menggunakan alat berat.
85	Gempa, 4 Oktober 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 3.7 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Tanggamus - Lampung.

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
86	Gempa, 10 Oktober 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 5.0 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Bengkulu Selatan-Bengkulu.
87	Angin Puting Beliung, 10 Oktober 2020	Jalur Lintas Arah Sedayu, Pekom Permerihan – Kecamatan Bengkunt	Terjadi pohon tumbang akibat angin puting beliung dapat dievakuasi oeh petugas BPBD.
88	Gempa, 16 Oktober 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 5.0 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah ENGGANO -Bengkulu.
89	Gempa, 17 Oktober 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 5.0 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Muko Muko -Bengkulu.
90	Gempa, 18 Oktober 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 5.3 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Muko Muko -Bengkulu.
91	Banjir Bandang, 25 Oktober 2020	Pekon Sukarame – Kec. Krui Selatan	Terjadi kejadian banjir bandang di Pekon Sukarame yang menyebabkan 1 orang tewas akibat kejadian ini
92	Banjir, 25 Oktober 2020	Pekon Mandiri Sejati – Kec. Krui Selatan	Terjadi banjir akibat luapan sungai yang masuk kedalam rumah warga di Pekon Mandiri Sejati –Kec. Krui Selatan . Petugas BPBD dan gabungan masyarakat dan lintas sektor terkait ikut dalam pembersihan akibat banjir.
93	Abrasi Pantai, 29 Oktober 2020	Pekon Kota Karang-Kec. Pesisir Utara	Terjadi kejadian gelombang tinggi yang mengakibatkan abrasi pantai akibat air yang menghantam badan jalan desa di Pekon Kota Karang.
94	Longsor, 31 Oktober 2020	Pekon Lab. Mandi – Kec. Way Krui	Terjadi kejadian longsor di Pekon Labuhan Mandi-Kec. Way Krui.
95	Longsor, 1 November 2020	Pekon Lab. Mandi – Kec. Way Krui	Lanjutan kejadian longsor di Pekon Labuhan Mandi-Kec. Way Krui. Rumah rusak berat. Petugas gabungan dibantu alat berat melakukan evakuasi dan pembersihan material longsor.
96	Gelombang Tinggi, 5-6 November 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi kejadian gelombang tinggi akibat siklon tropis di Laut China selatan yang mengakibatkan perairan wilayah Pesbar mengalami ketinggian.
97	Gempa, 10 November 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 5.5 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Tanggamus Lampung.

No	Kejadian Bencana	Lokasi	Keterangan
98	Gempa, 11 November 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi Gempa wilayah Pesisir Barat 3.3 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Ogan Komering Ulu –SUMSEL.
99	Gelombang Ekstrem, 12 November 2020	Kuala Stabas – Pesisir Tengah	Terjadi kejadian nelayan hilang akibat gelombang tinggi yang mengakibatkan kapal yang mereka pakai terbalik. Nelayan dapat ditemukan dalam keadaan selamat.
100	Gempa, 16 November 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 3.4 Skala Richter. Pusat Titik Gempa Wilayah Pesisir Barat - Lampung.
101	Angin Puting Beliung, 29 November 2020	Jalur Lintas Arah Sedayu, Pekom Permerihan – Kecamatan Bengkunt	Terjadi pohon tumbang akibat angin puting beliung dapat dievakuasi oeh petugas BPBD.
102	Gempa, 29 November 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi gempa wilayah Pesisir Barat 5.1 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah KAUR - Bengkulu.
103	Gempa, 2 Desember 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi Gempa wilayah Pesisir Barat 4.6 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Pesawaran - Lampung.
104	Gempa, 2 Desember 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi Gempa wilayah Pesisir Barat 4.3 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Tanggamus - Lampung.
105	Angin Puting Beliung, 5 Desember 2020	Jalur Lintas Arah Sedayu, Pekom Permerihan – Kecamatan Bengkunt	Terjadi pohon tumbang akibat angin puting beliung dapat dievakuasi oeh petugas BPBD.
106	Banjir, 6 Desember 2020	Pekon Mandiri Sejati – Kec. Krui Selatan	Terjadi banjir akibat luapan sungai yang masuk kedalam rumah warga di Pekon Mandiri Sejati –Kec. Krui Selatan. Petugas BPBD dan gabungan masyarakat dan lintas sektor terkait ikut dalam pembersihan akibat banjir.
107	Gempa, 27 Desember 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi Gempa wilayah Pesisir Barat 3.5 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Pesisir Barat - Lampung.
108	Gempa, 28 Desember 2020	Wilayah Pesisir Barat	Terjadi Gempa wilayah Pesisir Barat 3.4 Skala Richter. Pusat titik gempa wilayah Pesisir Barat - Lampung.

Sumber : BPBD, 2021

Kesiapan suatu daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana erat kaitannya dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Harus diakui bahwa jumlah sarana dan prasarana pendukung mitigasi bencana di Kabupaten Pesisir Barat sangat minim, terlebih bila dibandingkan dengan luasan wilayah. Keterbatasan dana merupakan penyebab utama dari minimnya sarana dan prasarana dimaksud. Berikut ketersediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana di Kabupaten Pesisir Barat:

Tabel 2.47. Jumlah Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Sistem Elektronik Peringatan Dini Gempa	1 Unit	Baik
2	Sistem Elektronik Peringatan Dini Tsunami	1 Unit	Baik
3	Kendaraan Roda 2	4 Unit	Baik
4	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Baik
5	Kendaraan Roda ≥ 4	1 Unit	Baik
6	Speedboat	4 Unit	Baik

Sumber : BPBD, 2020

6. Sosial

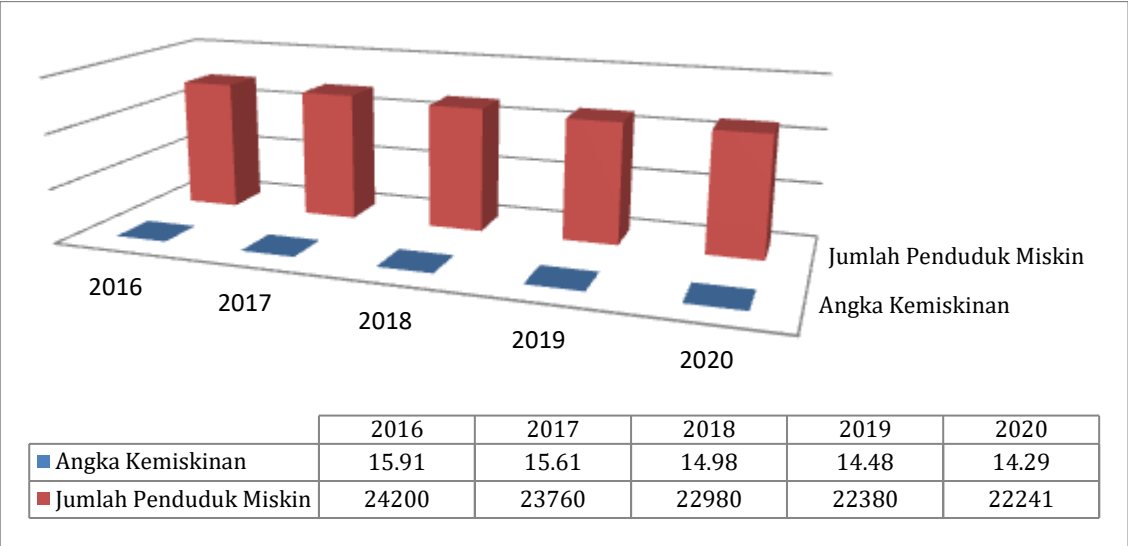
Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana masyarakat tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat pada dasarnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 yang lalu, tingkat kemiskinan berada pada angka 14,29% atau menurun dari tahun 2019 yang berada pada angka 14,48% atau turun 0,19%. Sebelumnya pada tahun 2019 juga terus menurun (0,50) dari tahun 2018 yang lalu tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat berada pada angka 14,98%. Angka 14,98% pada tahun 2018 turun (0,63%) bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 yang berada pada angka 15,61% setelah sebelumnya pada tahun 2016 berada pada tingkatan 15.91% atau turun (0,30%) dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Sementara itu jumlah penduduk miskin Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2020 sebanyak 22.241 jiwa dan pada tahun 2019 sebanyak 23.293 jiwa, angka ini naik bila dibandingkan kondisi pada tahun 2018 yang memiliki sebanyak 22.980 jiwa penduduk miskin atau naik 313 jiwa. Data tahun 2018 bila dibandingkan dengan data tahun 2017 turun 780 jiwa bila yang sebanyak 23.760 jiwa. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin yang tercatat ada sebanyak 23.760 jiwa.

Berikutnya untuk data keparahan kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2016-2020 berada pada indeks 0,40-0,50%.

Gambar 2.38. Angka Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Tabel 2.48. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk Miskin	Rumah Tangga Miskin
1	Pesisir Tengah	6.452	1.698
2	Pesisir Selatan	10.5886	2.662
3	Lemong	7.963	1.929
4	Pesisir Utara	4.896	1.227
5	Karya Penggawa	6.368	1.478
6	Pulaupisang	1.268	346
7	Way Krui	5.666	1.402
8	Krui Selatan	4.346	1.070
9	Ngambur	9.156	2.399
10	Ngaras	4.125	988
11	Bangkunat	17.495	4.558
	Jumlah	78.321	19.757

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat, 2020

Tabel 2.49. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Jenis-jenis PPKS	Jumlah PPKS	
		2019	2020
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	6	5
2	Anak Terlantar (AT)	6	6
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	6	8
4	Anak Jalanan	0	0
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	35	0
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	23	32
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	0

No	Jenis-jenis PPKS	Jumlah PPKS	
		2019	2020
8	Lanjut Usia	9.152	8.133
9	Penyandang Disabilitas	259	440
10	Tuna sosial	33	0
11	Gelandangan	2	2
12	Pengemis	3	2
13	Pemulung	6	13
14	Kelompok Minoritas	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP)	188	232
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	4	2
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	15	16
18	Korban trafficking	9	0
19	Korban tindak kekerasan	8	7
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	3	55
21	Korban bencana alam	13	11
22	Korban bencana sosial	9	15
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	98	116
24	Fakir Miskin	89.562	83.327
25	Keluarga masalah sosial Psikologis	0	0
26	Komunitas adat terpencil	0	0
	Jumlah	98.419	91.823

Sumber : Dinas Sosial, 2020

Tabel 2.50. Data Jumlah Penduduk Lansia dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Lansia	Penyandang Disabilitas
1	Lemong	865	1
2	Pesisir Utara	697	0
3	Pulau Pisang	234	0
4	Karya Penggawa	747	102
5	Way Krui	761	0
6	Pesisir Tengah	913	62
7	Krui Selatan	489	14
8	Pesisir Selatan	820	117
9	Ngambur	804	91
10	Ngaras	325	11
11	Bangkunat	1.478	42
	Total	8.133	440

Sumber : Dinas Sosial, 2020

Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah tertinggal yang pada struktur ekonomi masyarakatnya masih bergantung pada kekayaan alam dikategorikan pada golongan daerah pedesaan. Perlu upaya dari berbagai *stake holder* dalam pengentasan kemiskinan dengan peningkatan pembangunan di daerah – daerah yang tergolong daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat dengan cara

peningkatan infrastruktur dan akses juga penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan pertanian. Lebih lanjut indikator kinerja bidang sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

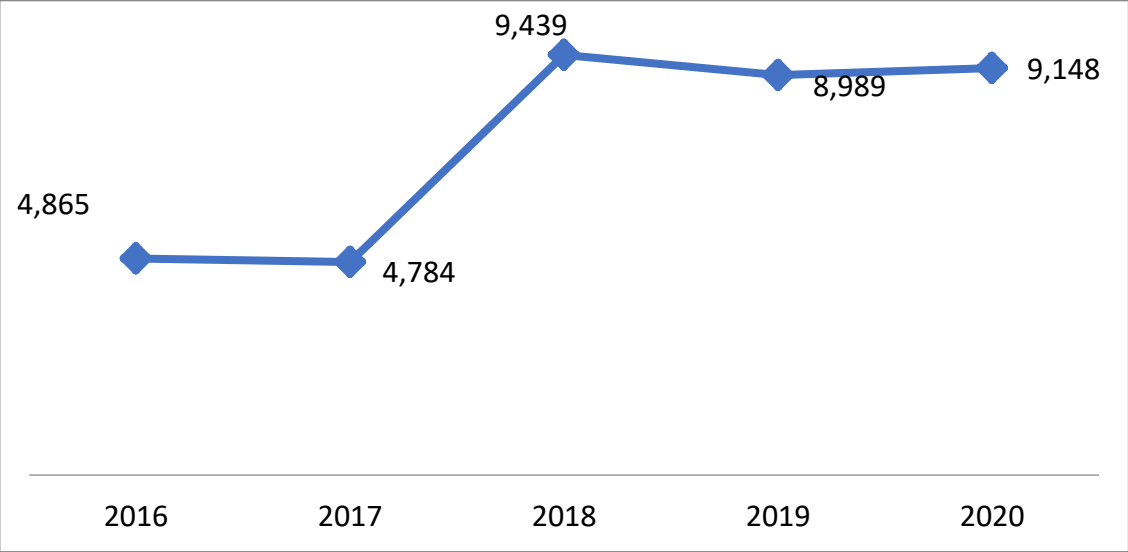
Tabel 2.51. Pencapaian Indikator Kinerja Sosial Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kemiskinan	Persen	15,91	15,61	14,98	14,48	14,29
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	24.200	23.760	22.980	23.293	22.241
Tingkat Keparahan Kemiskinan	Poin	0,72	0,48	0,59	0,47	0,46

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

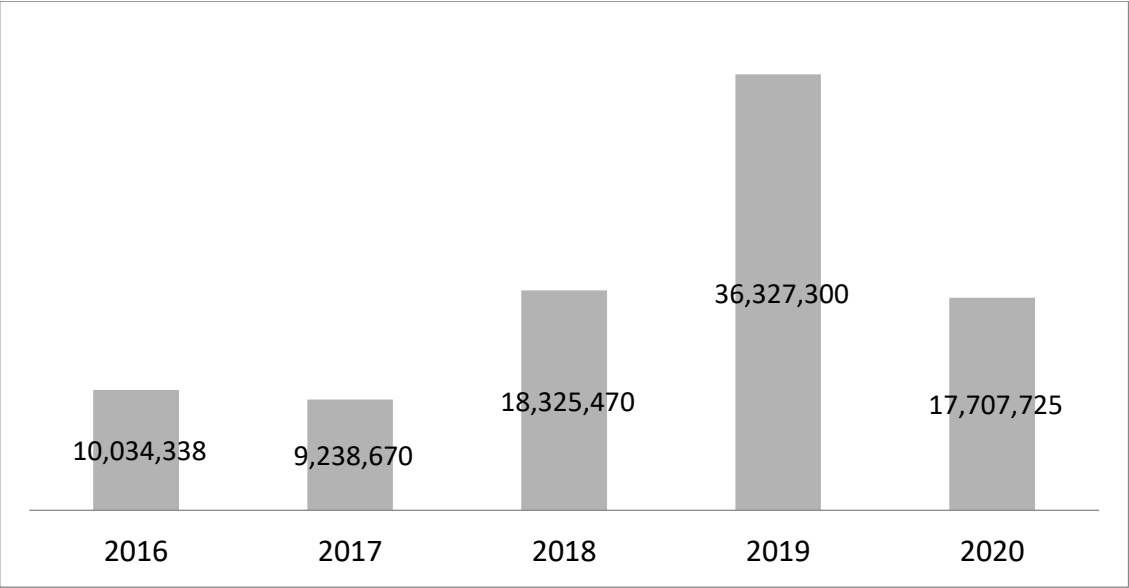
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus berupaya melakukan penurunan angka kemiskinan daerah. Baik intervensi dalam bentuk program/kegiatan atau pemberian bantuan atau jaringan pengaman sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, baik bantuan yang pendanaannya melalui pemerintah pusat dan/atau daerah. Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan terus berupaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penerima manfaat dan juga besaran nominal yang disalurkan kepada PKH dimaksud. Pada tahun 2016 jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 4.865 orang (Rp.10.034.338.750,00), angka ini terkoreksi pada tahun 2017 yang berada pada jumlah 4.784 orang (Rp.9.238.670.000,00). Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah KPM diangka 9.439 orang (Rp.18.325.470.000,00) namun kembali terkoreksi menjadi pada tahun 2019 menjadi 8.989 orang (Rp.36.327.300.000,00). Berikutnya pada tahun 2020 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 9.149 orang (Rp.17.707.725.000,00).

Gambar 2.39. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (Kepala Keluarga)



Sumber : Dinas Sosial, 2020

Gambar 2.40. Jumlah Nominal Bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (Rp. dalam ribu)



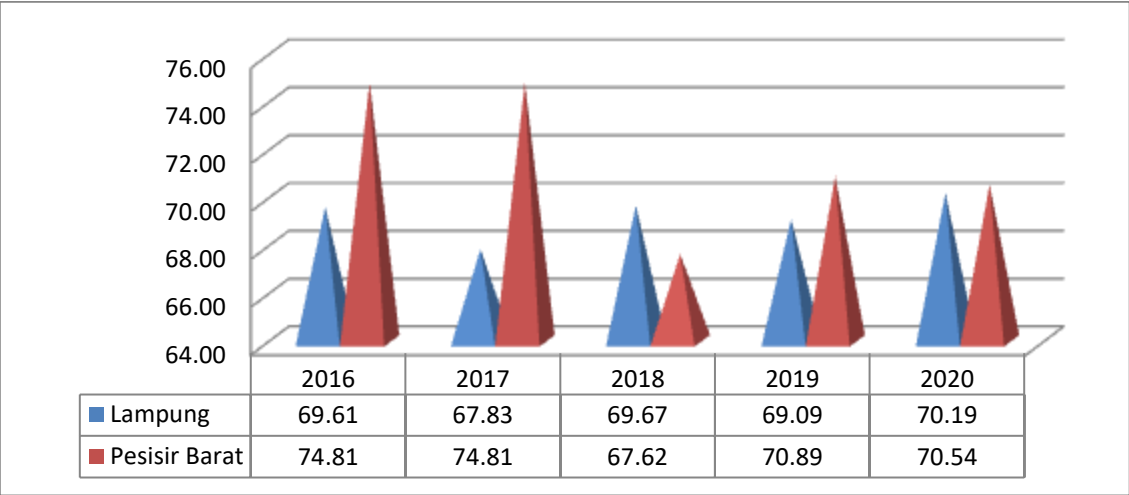
Sumber : Dinas Sosial, 2020

2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Informasi ketenagakerjaan tahun 2015 di Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 74,71% dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 74,81%. Angka TPAK ini mulai tetap pada tahun 2017 dengan capaian 74,81%. TPAK turun pada tahun 2018 dengan capaian 67,62% dan tahun 2019 dengan capaian TPAK menjadi 70,89%. Pada tahun 2020 TPAK Kabupaten Pesisir Barat menurun menjadi 70,54%. Angka 70,54% ini sedikit diatas Provinsi Lampung dengan nilai TPAK 70,19%.

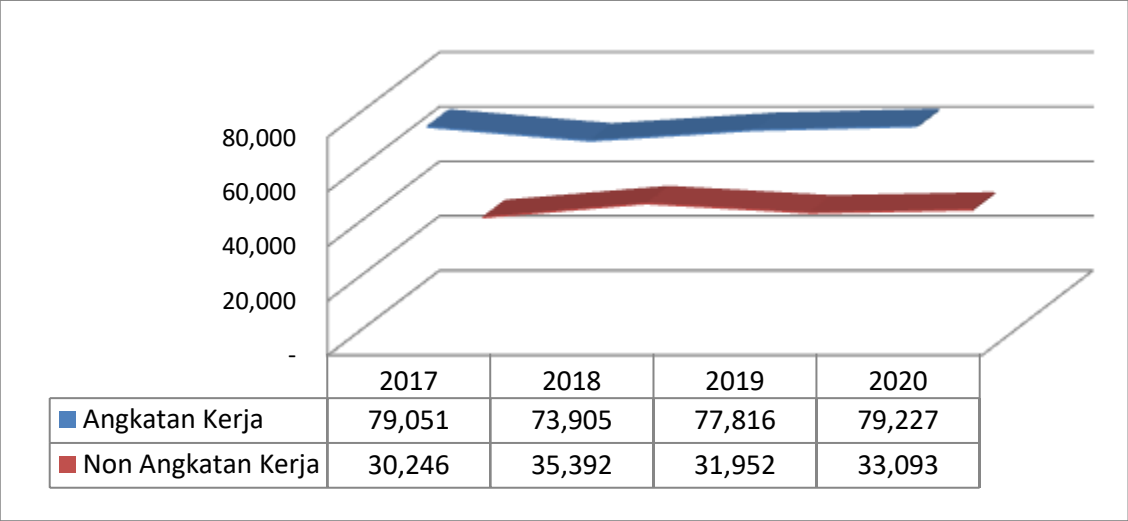
Gambar 2.41. Tingkat Partipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, PBDA 2021

Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi angkatan kerja yang besar, data pada tahun 2016 tidak tersedia (n/a). Selanjutnya berdasarkan data pada tahun 2017 sebanyak 79.051 orang yang menjadi angkata kerja di Kabupaten Pesisir Barat. Berikutnya pada tahun 2018 sebanyak 73.905 orang (67,62%) dan meningkat menjadi 77.861 orang (70,89%) pada tahun 2019. Jumlah ini kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 79.227 orang (70,54%).

Gambar 2.42. Angkatan Kerja di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2020



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, PBDA 2021

Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2020 sebanyak 106.524 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 55.293 orang dan perempuan sebanyak 51.231 orang. Bila dibandingkan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan cenderung berimbang atau dengan perhitungan tenaga kerja laki-laki sebanyak 51,91% dan perempuan 48,09%.

Tabel 2.52. Jumlah Penduduk yang Bekerja Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pesisir Tengah	6.869	6.457	13.326
2	Pesisir Selatan	9.061	8.560	17.621
3	Lemong	4.440	3.955	8.395
4	Pesisir Utara	2.903	2.679	5.582
5	Karya Penggawa	5.252	4.917	10.169
6	Pulau Pisang	543	509	1.052
7	Way Krui	3.098	2.903	6.001
8	Krui Selatan	3.545	3.312	6.857
9	Ngambur	7.242	6.912	14.154
10	Ngaras	3.300	3.008	6.308
11	Bangkunat	9.040	8.019	17.059
	Jumlah	55.293	51.231	106.524

Sumber : Dinas Nakertrans, 2021

Tabel 2.53. Jumlah Tenaga Kerja Persektor Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020

No	Sektor Pekerjaan	Tahun			Total
		2018	2019	2020	
1	Pertanian	38,213	34,801	38,385	111,399
2	Manufaktur	5,739	11,618	10,842	28,199
3	Jasa	28,571	28,871	27,302	84,744
	Jumlah	72,523	75,290	76,529	224,342

Sumber : Dinas Nakertrans, 2020

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa tenaga kerja pada sektor pertanian masih mendominasi sektor pekerjaan di Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2018-2020. Secara umum sektor pertanian menyumbang 49,66% jumlah tenaga kerja, berikutnya sektor jasa dengan sumbangan 37,77%. Sementara itu untuk sektor manufaktur memberikan sumbangan 12,57% dari total sektor pekerjaan. Lebih lanjut, berdasarkan pada data 2018-2020 dapat dilihat bahwa sektor manufaktur cenderung mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja dengan peningkatan mencapai 88,92%. Untuk sektor pertanian tetap meningkat dengan data peningkatan 0,49%. Sementara itu sektor jasa mengalami penunan (4,44%) dari tahun 2018-2020. Hal ini menandakan bahwa sektor manufaktur atau industri mulai meningkat menggantikan sektor pekerjaan tradisional seperti pertanian. Namun penurunan pada sektor jasa juga menjadi indikasi belum berkembangnya ekonomi masyarakat ke arah daerah perkotaan.

Tabel 2.54. Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

No	Kec	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	D I	S1	S2	
1	Pesisir Tengah	2.536	3.235	3.774	4.339	1.130	414	48	15.476
2	Pesisir Selatan	3.561	8.013	4.597	3.872	269	192	14	20.518
3	Lemong	1.885	4.859	2.622	1.947	137	68	11	11.529
4	Pesisir Utara	1.550	2.467	1.442	2.006	309	161	5	7.940
5	Karya Penggawa	1.461	4.709	3.031	3.592	180	143	8	13.124
6	Pulau Pisang	108	398	483	451	181	59	1	1.681
7	Way Krui	239	1.088	2.214	2.980	2.110	377	123	9.131
8	Krui Selatan	1.286	2.652	2.283	2.350	154	93	0	8.818
9	Ngambur	2.569	7.121	3.069	2.270	154	117	7	15.307
10	Ngaras	2.721	2.940	1.560	2.372	189	78	5	9.865
11	Bangkunat	4.422	4.986	4.565	3.836	171	110	1	18.091
	Jumlah	22.338	42.468	29.640	30.015	4.984	1.812	223	131.480

Sumber : Dinas Nakertrans, 2020

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan "sebagai sumber daya insani, potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas tidak dibawah laki-laki. Namun kenyataannya masih dijumpai bahwa status perempuan dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki, untuk membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan bertaqwa serta terlindungi.

Realisasi pemberdayaan perempuan dilakukan dengan usaha-usaha: (i) Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan; (ii) Meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; (iii) Meningkatkan kualitas perandaa kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan; (iv) Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender; (v) Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak.

Sedangkan kebijakan Dasar Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut: (i) Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dilakukan melalui "one door policy" atau kebijakan satu pintu; (ii) Peningkatan kualitas SDM perempuan; (iii) Pembaharuan hukum dan peraturan perundang-undangan; (iv) Penghapusan kekerasan terhadap perempuan; (v) Penegakkan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan, (vi) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; (vii) Pempampuan lembaga pemerintah dalam pemberdayaan perempuan; (viii) Peningkatan peran serta masyarakat; (ix) Perluasan jangkauan pemberdayaan perempuan; (x) Peningkatan penerapan komitmen internasional.

Tabel 2.55. Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Bidang			
		Politik	Hukum	Sosial	Ekonomi
1	Pesisir Tengah	21	0	2	152
2	Pesisir Selatan	15	0	3	256
3	Lemong	10	0	2	170
4	Pesisir Utara	12	0	1	200
5	Karya Penggawa	17	0	2	296
6	Pulau Pisang	13	0	1	3
7	Way Krui	15	0	1	35
8	Krui Selatan	11	0	1	241
9	Ngambur	13	0	2	28
10	Ngaras	15	0	1	0
11	Bangkunat	11	0	2	136
	Jumlah	155	0	18	1.517

Sumber : Dinas PP dan PA, 2021

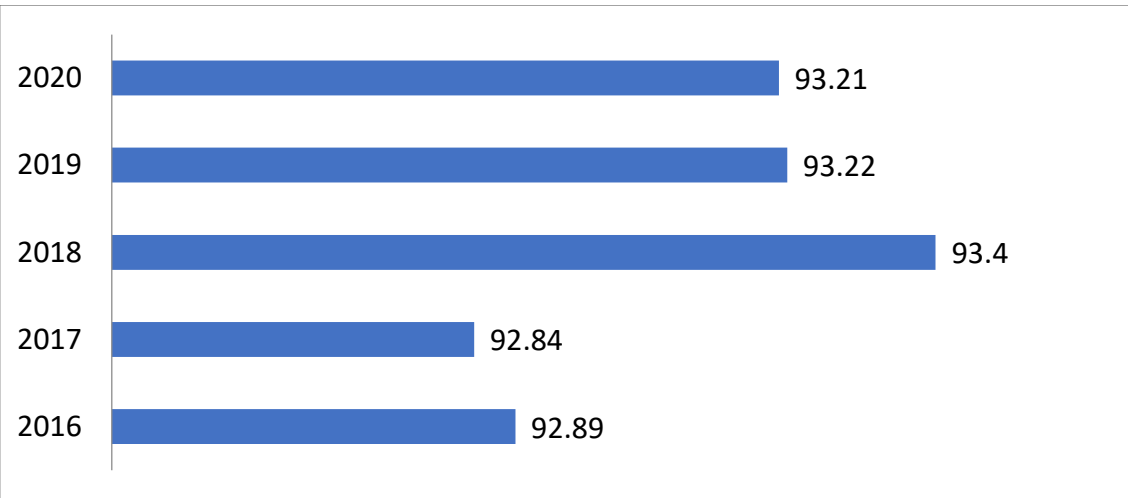
Tabel 2.56. Jumlah Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Kepala Keluarga		Persentase
		Perempuan	Total	
1	Pesisir Tengah	376	5.799	15,42
2	Pesisir Selatan	621	7.556	12,17
3	Lemong	279	3.634	13,03
4	Pesisir Utara	233	2.467	10,59
5	Karya Penggawa	293	4.393	14,99
6	Pulau Pisang	53	470	8,87
7	Way Krui	264	2.594	9,83
8	Krui Selatan	305	2.903	9,52
9	Ngambur	395	6.461	16,36
10	Ngaras	151	2.717	17,99
11	Bangkunat	419	8.065	19,25
	Jumlah	3.389	47.059	13.89

Sumber : Dinas PP dan PA, 2020

Perkembangan Pembangunan Gender di Kabupaten Pesisir Barat dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 secara umum berada pada range 92,89-92,96. Pada tahun 2016 berada pada 92,89 poin, sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 92,84 atau turun (0,04). Berikutnya pada tahun 2018 naik sebanyak 0,12 menjadi 92,96, dan pada tahun 2019 menurun kembali sebanyak (0,07) menjadi 92.89, dan pada tahun 2020 capaian berada pada angka 93.21.

Gambar 2.43. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Perlindungan perempuan dan anak masih menjadi isu strategis di Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya lembaga khusus yang menangani perlindungan perempuan dan anak termasuk sangat minimnya tenaga pendampingnya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.57. Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Lembaga Perlindungan	Jumlah
1	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)	1
2	Pusat Krisis Terpadu (PKT)	0
3	Women Crisis Center (WCC)	0
4	Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)	0
5	Satgas Perlindungan TKI Bermasalah	0
6	UPT Dinas Sosial	0

Sumber : Dinas PP dan PA, 2020

Tabel 2.58. Jumlah Tenaga Rehabilitasi Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Psikolog	Konselor	Rohaniawan	Nakes	APH	Tenaga Reintegrasi
1	Pesisir Tengah	1	0	0	2	1	0
2	Pesisir Selatan	0	0	0	0	1	0
3	Lemong	0	0	0	0	0	0
4	Pesisir Utara	0	0	0	0	1	0
5	Karya Penggawa	0	0	0	0	0	0
6	Pulau Pisang	0	0	0	0	0	0
7	Way Krui	0	0	0	0	0	0
8	Krui Selatan	0	0	0	0	0	0
9	Ngambur	0	0	0	0	0	0
10	Ngaras	0	0	0	0	1	0
11	Bangkunat	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	0	0	2	4	0

Sumber : Dinas PP dan PA, 2020

Sementara itu, terkait dengan data perlindungan anak, bahwa pada tahun 2020 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 9 orang dengan 6 orang sebagai pelaku (Pesisir Selatan) dan 3 orang sebagai korban (1 anak di Pesisir Selatan; 1 anak di Karya Penggawa; dan 1 anak di Way Krui). Selanjutnya jumlah anak yang berkebutuhan khusus sebanyak 48 anak.

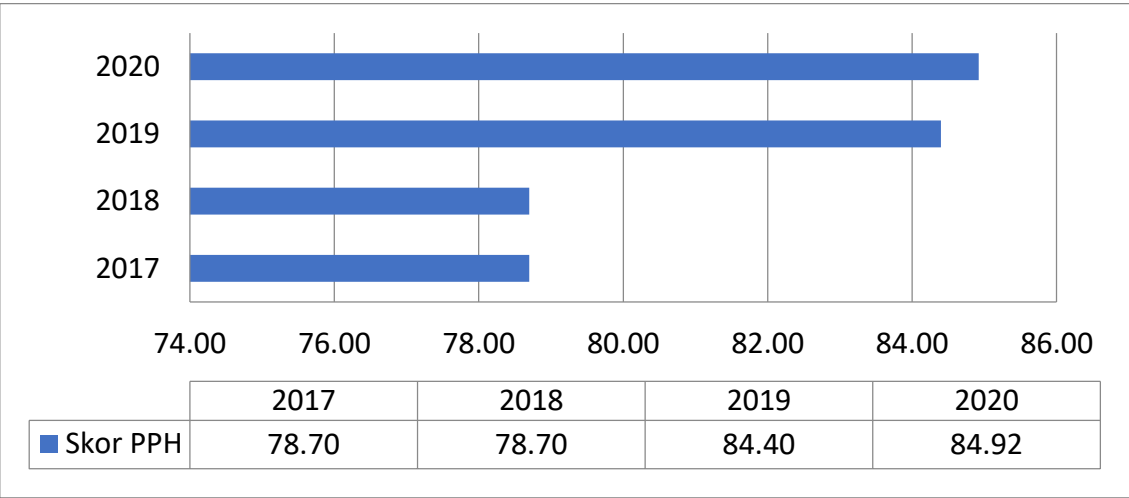
3. Pangan

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.

Masalah krisis pangan dan gizi di Indonesia seharusnya dapat ditanggulangi secara mendasar dan berkesinambungan melalui program pengembangan produksi dalam pemanfaatan sumber daya hasil pertanian pangan lokal, dengan cara meningkatkan pemberdayaan industri pangan dan masyarakat petani.

Berdasarkan pada data Skor Pola Pangan Harapan (PPH) selama tahun 2017-2020 di Kabupaten Pesisir Barat terus mengalami peningkatan. Dimulai pada tahun 2017 sebesar 78.70% dan bertahan pada tahun 2018 dengan angka yang sama. Kenaikan 6.0% pada tahun 2018 menjadi 84.7%. berikutnya, pada tahun 2020 Skor PPH naik kembali 0,54 menjadi 84.92%.

Gambar 2.44. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2020



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Masalah krisis pangan dan gizi di Indonesia seharusnya dapat ditanggulangi secara mendasar dan berkesinambungan melalui program pengembangan produksi dalam pemanfaatan sumber daya hasil pertanian pangan lokal, dengan cara meningkatkan pemberdayaan industri pangan dan masyarakat petani.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan uapaya dalam pembangunan di Bidang Pangan antara lain:

a. Aspek Ketersediaan

Berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012, rekomendasi angka kecukupan gizi (AKG) pada tingkat konsumsi adalah 2.150 kal/kap/hr untuk energi dan 57 gr/kap/hr untuk protein. Rekomendasi pada tingkat ketersediaan adalah 2.400 kal/kap/hr untuk energi dan 63 gr/kap/hr untuk protein. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya pemenuhan kecukupan gizi dengan mempertimbangkan keberagaman pangan dalam produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter, salah satunya adalah Pola Pangan Harapan (PPH).

Data Ketersediaan Energi dan Protein didapat dari Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), adapun Perkembangan Tingkat Capaian

Ketersediaan Energi, Protein dan Skor PPH Ketersediaan pada kurun waktu tahun 2018-2021 adapt dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.59. Perkembangan Tingkat Capaian Ketersediaan Energi, Protein dan Skor PPH Ketersediaan Tahun 2018-2020

Tahun	Energi (Kalori/Hari)	Protein (Gram/Hari)	Skor PPH Ketersediaan
2018	3.622,14	99,41	78,80
2019	4.821	266,08	80,60
2020	4.580,34	235,70	84,92

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Tabel 2.60. Komoditas Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Jumlah Produksi Komoditas Pangan	Jumlah	Satuan
A	Nabati		
1	Beras	34.315,95	Ton
2	Jagung	16.823,19	Ton
3	Kedelai	167,00	Ton
4	Kacang Tanah	92,00	Ton
5	Ubi Kayu	2.810,00	Ton
6	Ubi Jalar	654,00	Ton
7	Sayur	3.613,99	Ton
8	Buah buahan	27.232,10	Ton
B	Hewani		
1	Daging Sapi / Kerbau	118,11	Ton
2	Daging Ayam	22,26	Ton
3	Telur	27,79	Ton
4	Ikan	347.570,00	Ton

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

b. Aspek Konsumsi

Gambaran pemenuhan kuantitas konsumsi pangan diketahui dari tingkat konsumsi energi dan protein, yaitu proporsi konsumsi energi atau protein aktual terhadap Angka Kecukupan Gizi/AGK (rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG XI Tahun 2014, yaitu Angka Kecukupan Energi/AKE 2.150 kkal/kapita/hari, dan Angka Kecukupan Protein/AKP sebesar 57 gram/kapita/hari).

Berdasarkan perhitungan kajian pada Buku Pola Konsumsi Pangan tahun 2020, konsumsi pada setiap kelompok bahan pangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.61. Konsumsi Energi Setiap Kelompok Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kelompok Bahan Makanan	Kalori (kkl)	Protein (gram)
1	Padi-padian	953,29	22,37
2	Umbi-umbian	29,29	0,27
3	Ikan/udang/cumi/kerang	54,85	9,25
4	Daging	42,91	2,60
5	Telur dan susu	43,26	2,62
6	Sayur-sayuran	56,60	3,54
7	Kacang-kacangan	44,59	4,38
8	Buah-buahan	67,70	0,82
9	Minyak dan kelapa	306,23	0,63
10	Bahan minuman	111,22	1,70
11	Bumbu-bumbuan	7,74	0,32
12	Konsumsi lainnya	45,20	0,85
13	Makanan dan minuman jadi	344,42	8,88
	Total	2.107,32	58,23

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Pada tahun 2020 angka kecukupan energi sebesar 2.107,32 kkal/kapita/hari dan angka kecukupan protein sebesar 58,23 gram/kapita/hari. Angka kecukupan energi belum tercapai dari 2.150 yang diharapkan baru tercapai 2.107,32 kkal/kapita/hari, namun untuk angka Kecukupan Protein sebesar 58,23 gram/kapita/hari, angka ini sudah melampaui dari target sebesar 57 gram/kapita/hari.

Tabel 2.62. Konsumsi Penduduk terhadap Bahan Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kelompok Pangan	Nilai	Satuan
1	Padi-padian	71,00	Kg
2	Umbi-umbian	17,10	Kg
3	Pangan hewani	96,33	Kg dan liter
4	Minyak dan lemak	31,40	Liter
5	Buah/biji berminyak	15,89	Kg
6	Kacang-kacangan	17,30	Kg
7	Gula	10,69	Kg
8	Sayur dan buah	126,80	Kg
	Jumlah	386,51	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2020

c. Aspek Kerawanan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan yang dilakukan oleh Kabupaten Pesisir Barat adalah memberikan bantuan pangan berupa beras pada masyarakat yang terdampak Covid19 di 11 kecamatan di tahun 2020. Selain itu, rekomendasi dari masyarakat dan beberapa OPD Penanganan daerah rawan yang berkaitan dengan akses jalan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah membangun akses jalan menuju menuju Pekon Way Haru dan Pekon Bandar Dalam. Upaya yang berkesinambungan dalam penanganan rawan pangan dan aspek ketersediaan

pangan, Kabupaten Pesisir Barat memiliki cadangan pangan berupa beras, yang sewaktu-waktu apabila ada keadaan darurat yang berkaitan dengan kerawanan pangan dapat disalurkan kepada Masyarakat.

Tabel 2.63. Cadangan Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2020

Tahun	Pengadaan (Kg)	Penyaluran (Kg)	Sisa (kg)
2017	15.000	2.000	13.000
2018	15.000	12.000	16.000
2019	15.000	0	31.000
2020	25.820	30.820	25.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Kondisi cadangan pangan di Kabupaten Pesisir Barat berada pada 25.000kg, posisi tersebut merupakan akumulasi dari proses pengadaan dan penyaluran dari tahun 2017-2020. Kondisi ideal cadangan pangan pertahun di Kabupaten Pesisir Barat adalah 35.000kg. Masih perlu dilakukan peningkatan untuk pengadaan dan penyaluran pangan dimaksud.

4. **Pertanahan**

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan urusan pertanahan berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 meliputi: (i) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten; (ii) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah; (iii) penetapan subjek dan objek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten; (iv) penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten; (v) penerbitan izin membuka tanah; dan (vi) perencanaan pembangunan tanah yang hamparannya dalam daerah.

Tabel 2.64. Pencapaian Indikator Kinerja Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rumusan kebijakan dan produk hukum penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, toponimi, dan pertanahan yang diselesaikan secara tepat waktu dan taat peraturan perundang-undangan	Persen	70,00	72,00	72,00	75,00	75,00
Titik luas lahan bersertifikat	Lokasi	61	67	68	75	78
Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	1	1	0	0	0
Penyelesaian izin lokasi	Lokasi	2	3	9	13	26

Sumber : Setdakab dan Dinas PR dan KP, 2021

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat secara periodik terus melakukan perbaikan dalam hal pengelolaan batas wilayah kabupaten. Hal ini untuk menjamin tertib batas wilayah dan tata ruang di daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dengan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037. Hingga tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan upaya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk penegasan batas daerah dengan:

- a. Batas Kabupaten Pesisir Barat dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Batas Kabupaten Pesisir Barat dengan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

5. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup diserahkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan arahan agar kondisi dan kualitas lingkungan hidup di daerah dapat terjaga dan dapat terus mendukung ekosistem lingkungan. Ada beberapa sub bidang yang menjadi urusan pemerintah kabupaten antara lain pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota, pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota, dll

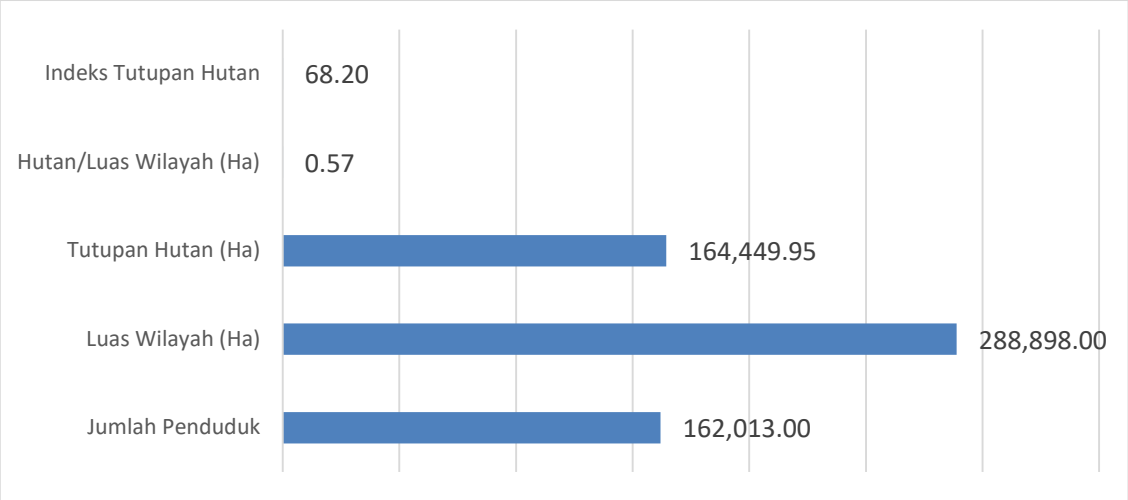
Tabel 2.65. Pencapaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	67,0	68,5	68,5	68,5	68,5
Rasio Ruang Terbuka Hijau	Persen	1	1.2	1,5	4,52	4,52

Sumber : Dinas LH, 2021

Faktor pendukung kualitas lingkungan hidup terdiri dari kualitas udara, kualitas air, tutupan lahan dengan indeks sebagai berikut:

Gambar 2.45. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Tabel 2.66. Indek Kualitas Air Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

Status	Jumlah titik Sampel	Persentase	Bobot	Nilai Indeks
Memenuhi	54	0,78	70	54,6
Ringan	27	0,22	50	11
Sedang	0	0	30	0
Berat	0	0	10	0
Nilai Indeks Kualitas Air	65,6			

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

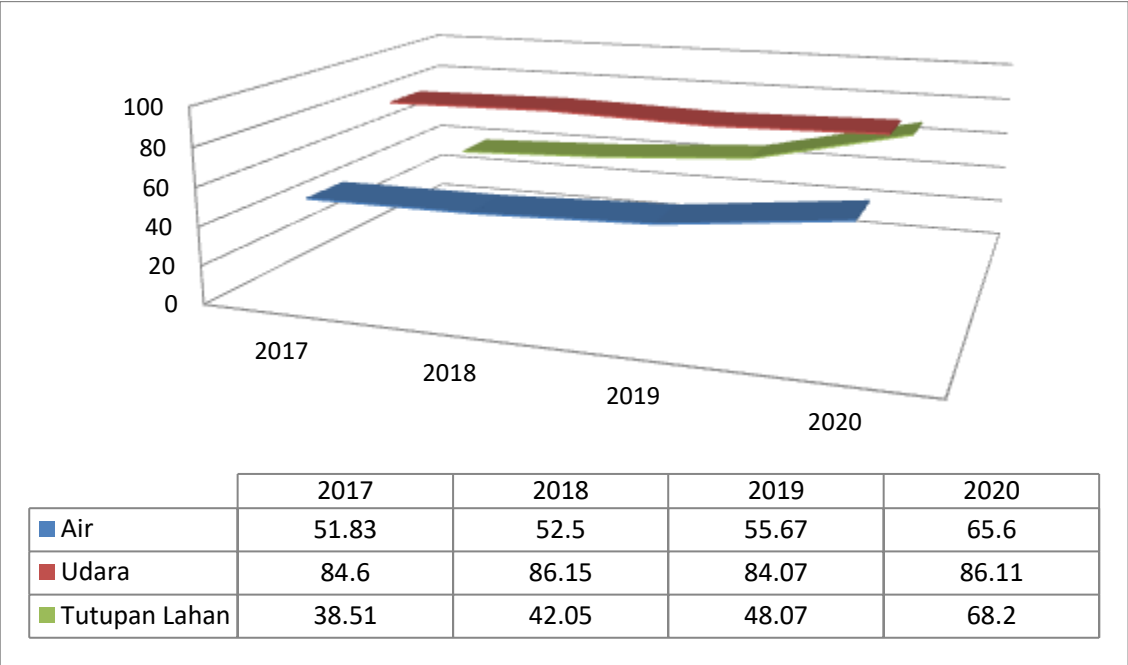
Tabel 2.67. Indek Kualitas Udara Kabupaten Pesisir Barat 2020

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO2	5,93	40	0,12
SO2	11,56	20	0,58
Rata-Rata			0,35
Indeks Kualitas Udara			86,11

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Berdasarkan pada perhitungan indeks kualitas airm udara dan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2020 terus mengalami perbaikan kualitas. Bahwa pada tahun 2017 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air berada pada angka 51,83 dan menjadi 65,6 pada tahun 2020. Selanjutnya untuk Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara pada tahun 2017 berada pada angka 84,6 dan meningkat minor pada tahun 2020 menjadi 86,11. Berikutnya untuk Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2017 tercatat 38,51 dan menjadi 68,20 pada tahun 2020.

Gambar 2.46. Indeks Kualitas Air, Kualitas Udara, Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2020



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Berikutnya terkait dengan kondisi lingkungan hidup, khususnya pada kondusi lahan pada dasarnya masih berada pada taraf yang baik. Berdasarkan data tercatat pada tahun 2020, Kabupaten Pesisir Barat memiliki Kawasan Suaka Alam seluas 192.575,00 Ha dan Kawasan Taman Nasional 186.926,00 Ha. Dari kedua luasan kawasan tersebut dapat tergambar kondisi geografis dan administratif Kabupaten Pesisir Barat yang berbatasan dengan kawasan TNBBS Bukit Barisan Selatan. Secara lebih lengkap, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.68. Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kawasan	Luasan Lahan (Ha)	Keterangan
1	Luas Kawasan Resapan Air	6.032,00	Kondisi Baik
2	Luas Sempadan Pantai	7.400,00	Kondisi Baik
3	Luas Sempadan Sungai	19.890,00	Kondisi Baik
4	Luas Kawasan Suaka Alam	192.575,00	Kondisi Baik
5	Luas Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan	14.866,87	Kondisi Baik
6	Luas Kawasan Pantai Berhutan Bakau	7,60	Kondisi Baik
7	Luas Taman Nasional	186.926,00	Kondisi Baik
8	Luas Taman Wisata Alam	1.222,13	Kondisi Baik
9	Luas Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	0,02	Kondisi Baik

Sumber : Dinas LH, 2021

Terkait pengelolaan pembuangan air limbah, pemerinatah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mengeluarkan rekomendasi untuk kegiatan usaha/lainnya. Berikut jumlah badan usaha/instansi yang melakukan pembuangan air limbah di Kabupaten Pesisir Barat .

Tabel 2.69. Data Badan Usaha/Instansi terkait Izin Pembuangan Limbah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Badan Usaha/Instansi
1	Sudah Memperoleh Izin Pembuangan Limbah	14
2	Belum Memperoleh Izin Pembuangan Limbah	12

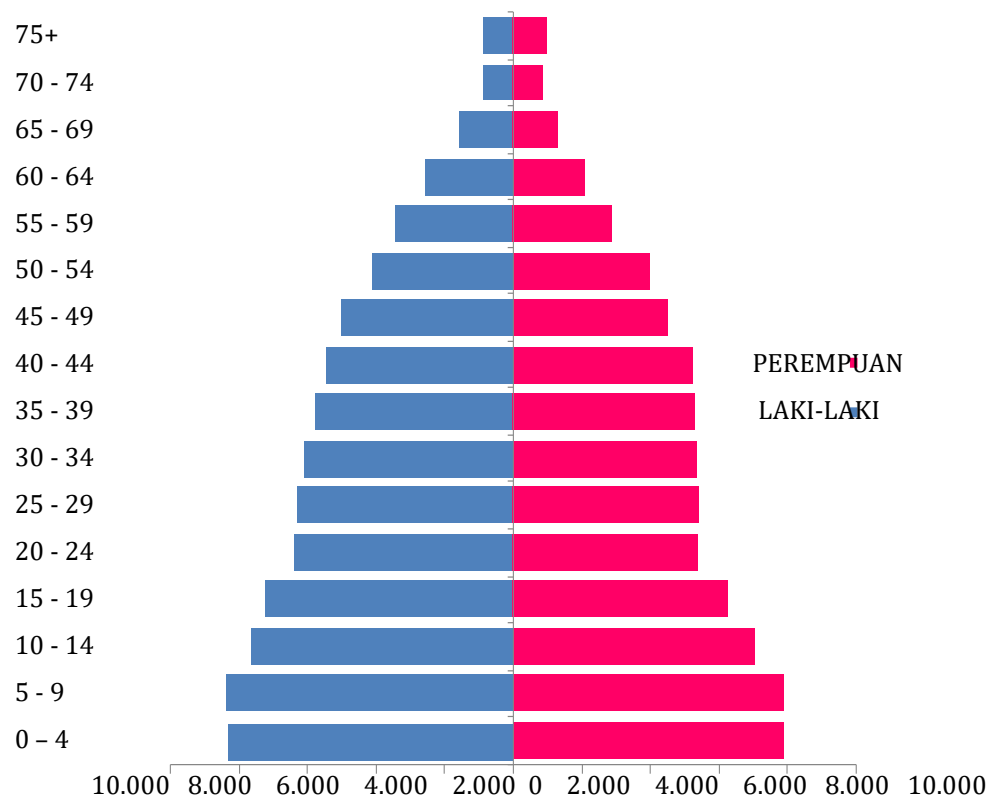
Sumber : Dinas LH, 2021

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki peranan yang besar dalam rangka pengendalian penduduk dan pencatatannya. Data yang dihasilkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan demografi di suatu daerah. Selain berdasarkan jenis kelamin, struktur penduduk juga dapat dilihat berdasarkan umur. Struktur umur penduduk sangat penting untuk menjadi dasar perencanaan pemerintah dalam segala bidang pembangunan termasuk dalam bidang bisnis. Pengetahuan mengenai struktur umur penduduk di suatu wilayah diharapkan dapat menjadi dasar atau acuan yang pasti agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Selain itu juga kita dapat melihat angka beban ketergantungan suatu wilayah. Angka beban ketergantungan adalah rasio antara jumlah penduduk non produktif dengan jumlah penduduk produktif.

Angka beban ketergantungan menunjukkan besar benban tanggungan penduduk usia produktif atas penduduk usia non produktif. Semakin besar angka keetrgantungan semakin besar beban penduduk usia produktif. Secara ekonomi, hal ini juga menggambarkan beban ekonomi penduduk yang bekerja terhadap penduduk yang belum bekerja atau tidak bekerja lagi.Piramida Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Per-Bulan September Tahun 2020.

Gambar 2.47. Diagram Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020



Sumber : Dinas Dukcapil, 2021

Dari perbandingan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), maka didapat angka ketergantungan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2020 yaitu sebesar 54 persen. Artinya dari seratus penduduk yang produktif harus menanggung beban 54 penduduk non produktif. Selain itu, angka ini menunjukkan juga bahwa Kabupaten Pesisir Barat belum memasuki masa bonus demografi.

Tabel 2.70. Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Sex Ratio Kabupaten Pesisir Barat Per-Bulan September Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Kepadatan (per Km²)	Sex Ratio
1	Pesisir Tengah	20.018	5.799	164.02	105.94
2	Pesisir Selatan	26.435	7.556	64.78	107.03
3	Lemong	12.429	3.634	28.30	111.26
4	Pesisir Utara	8.482	2.467	100.43	109.17
5	Karya Penggawa	15.785	4.393	250.58	107.77
6	Pulau Pisang	1.570	470	24.28	114.05
7	Way Krui	9.040	2.594	214.44	107.50
8	Krui Selatan	10.478	2.903	291.94	107.18
9	Ngambur	21.469	6.461	198.25	107.37
10	Ngaras	9.653	2.717	44.41	111.28
11	Bangkunat	26.250	8.065	28.77	112.14
	Jumlah	161.509	47.059	55.96	108.64

Sumber : Dinas Dukcapil, 2021

Sebagai salah satu unsur pelayanan publik, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terus berupaya memberikan pelayanan untuk penyediaan dokumen kependudukan dan akta-akta kepada seluruh lapisan masyarakat yang memerlukannya. Perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta dengan yang belum setiap tahunnya selalu berkurang, hal ini menunjukkan perbaikan kinerja dan juga kesadaran dari masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Data-data terkait hal dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.71. Jumlah Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Elektronik KTP		Akta Kelahiran		Kartu Keluarga	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	Pesisir Tengah	13.205	120	6.536	267	3.400	4.115
2	Pesisir Selatan	16.805	688	8.323	725	4.562	5.219
3	Lemong	8.112	254	3.842	283	2.092	3.564
4	Pesisir Utara	4.720	942	2.632	208	1.469	1.838
5	Karya Penggawa	10.317	253	5.001	280	2.611	2.979
6	Pulau Pisang	949	123	461	49	275	427
7	Way Krui	6.126	46	2.781	171	1.601	1.786
8	Krui Selatan	6.473	248	3.557	280	1.859	1.949
9	Ngambur	13.241	705	6.830	641	3.991	4.756
10	Ngaras	5.553	492	3.181	338	1.676	1.977
11	Bangkunat	15.635	270	8.737	1.068	5.288	5.624
	Jumlah	101.136	4.141	51.881	4.310	28.824	34.234

Sumber : Dinas Dukcapil, 2021

Penduduk Kabupaten Pesisir Barat sebagian besar atau mayoritas adalah Islam dengan jumlah pemeluk sebanyak 98.79%; sementara itu agama Hindu sebanyak 0.95%; agama Protestan dengan jumlah 0,19%; agama Katolik dengan jumlah 0.06, lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.72. Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Kong Hu Cu
1	Pesisir Tengah	20.132	6	28	9	2	0
2	Pesisir Selatan	26.089	21	73	414		0
3	Lemong	12.528	1	19	2	3	0
4	Pesisir Utara	8.407	0	0	1		0
5	Karya Penggawa	15.774	0	1	0		0
6	Pulau Pisang	1.583	0	4	0		0
7	Way Krui	9.020	0	2	0		0
8	Krui Selatan	10.595	9	1	0		0
9	Ngambur	20.594	63	122	605		0
10	Ngaras	9.608	0	16	17		0
11	Bangkunat	25.715	5	41	498	1	0
	Jumlah	160.045	105	307	1.546	6	0

Sumber : Dinas Dukcapil, 2021

7. Pembedayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini sudah merupakan suatu hal mutlak bagi setiap kabupaten. Masyarakat dan desa harus mampu berkembang dan mampu sejahtera dan swadaya dalam pengembangan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya, baik secara finansial maupun secara kualitas SDM. Dana Desa yang disediakan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah harus dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan desa. Hal utama adalah bagaimana desa bisa mandiri, sementara itu untuk Kabupaten Pesisir Barat dikarenakan masih banyak desa (pekon) tertinggal maka untuk jangka pendek dan menengah adalah bagaimana pekon-pekon tersebut dapat keluar dari ketertinggalan dan kemiskinan.

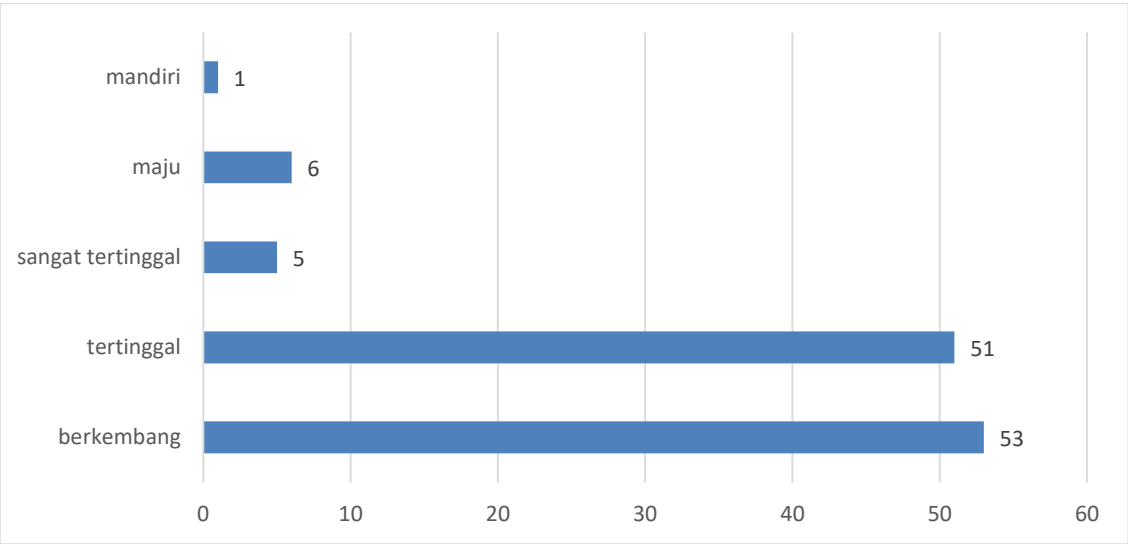
Tabel 2.73. Jumlah Pekon Tertinggal Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Pekon Tertinggal				
		2016	2017*	2018	2019	2020
1	Bangkunat	8	-	11	9	11
2	Ngaras	2	-	6	6	7
3	Ngambur	5	-	6	2	2
4	Pesisir Selatan	8	-	15	6	6
5	Krui Selatan	5	-	4	2	1
6	Pesisir Tengah	2	-	2	0	0
7	Way Krui	4	-	8	5	5
8	Karya Penggawa	12	-	3	0	0
9	Pesisir Utara	10	-	12	11	7
10	Lemong	8	-	7	9	6
11	Pulau Pisang	6	-	5	6	6
	Jumlah	70		79	56	51

Sumber : Dinas PMP, 2021

*tahun 2017 data tidak dihitung oleh Kementerian PDT dan Transmigrasi

Gambar 2.48. Status Desa Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020



Sumber : SK PPM Kemendesa Nomor 303 tahun 2020

Berdasarkan data pada gambar di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan SK PPM KEMENDES no 303 Tahun 2020 jumlah desa mandiri di Kabupaten Pesisir Barat 1, desa maju 6, desa sangat tertinggal 5, desa tertinggal 51, dan desa berkembang 53, untuk lebih jelas mengenai sebaran status desa, ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.74. Status Desa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

Kecamatan	Desa	Status desa
Bangkunat	Bandar Dalam	Sangat tertinggal
Bangkunat	Kota Jawa	Tertinggal
Bangkunat	Pagar Bukit	Tertinggal
Bangkunat	Pagar Bukit Induk	Tertinggal
Bangkunat	Pemerihan	Berkembang
Bangkunat	Penyandingan	Tertinggal
Bangkunat	Siring Gading	Tertinggal
Bangkunat	Suka Marga	Tertinggal
Bangkunat	Suka Negeri	Tertinggal
Bangkunat	Sumberejo	Tertinggal
Bangkunat	Tanjung Kemala	Sangat tertinggal
Bangkunat	Tanjung Rejo	Tertinggal
Bangkunat	Way Haru	Tertinggal
Bangkunat	Way Tias	Tertinggal
Karya Penggawa	Asahan Way Sindi	Berkembang
Karya Penggawa	Kebuayan	Berkembang
Karya Penggawa	Laay	Berkembang
Karya Penggawa	Menyancang	Berkembang
Karya Penggawa	Penengahan	Berkembang
Karya Penggawa	Penggawa V Tengah	Berkembang
Karya Penggawa	Penggawa V Ulu	Berkembang
Karya Penggawa	Tembakak Way Sindi	Berkembang
Karya Penggawa	Way Nukak	Berkembang
Karya Penggawa	Way Sindi	Berkembang
Karya Penggawa	Way Sindi Hanuan	Berkembang
Karya Penggawa	Way Sindi Utara	Berkembang
Krui Selatan	Balai Kencana	Berkembang
Krui Selatan	Lintik	Berkembang
Krui Selatan	Mandiri Sejati	Berkembang
Krui Selatan	Padang Haluan	Berkembang
Krui Selatan	Padang Raya	Berkembang
Krui Selatan	Pemerihan	Maju
Krui Selatan	Suka jadi	Maju
Krui Selatan	Walur	Maju
Krui Selatan	Way Napal	Tertinggal
Krui Selatan	Way Suluh	Berkembang
Lemong	Bambang	Tertinggal
Lemong	Bandar Pugung	Tertinggal
Lemong	Cahaya Negeri	Tertinggal
Lemong	Lemong	Mandiri
Lemong	Malaya	Berkembang
Lemong	Pagar Dalam	Maju
Lemong	Parda Haga	Berkembang
Lemong	Penengahan	Berkembang
Lemong	Rata Agung	Tertinggal
Lemong	Sukamulya	Berkembang
Lemong	Tanjung Jati	Tertinggal
Lemong	Tanjung Sakti	Tertinggal

Kecamatan	Desa	Status desa
Lemong	Way Batang	Berkembang
Ngambur	Bumi Ratu	Tertinggal
Ngambur	Gedung Cahya Kuningan	Berkembang
Ngambur	Muara Tembulih	Berkembang
Ngambur	Negeri Ratu Ngambur	Berkembang
Ngambur	Pekon Mon	Tertinggal
Ngambur	Suka Banjar	Berkembang
Ngambur	Suka Negara	Berkembang
Ngambur	Sumber Agung	Berkembang
Ngambur	Ulok Mukti	Berkembang
Ngaras	Bandar Jaya	Tertinggal
Ngaras	Kota Batu	Sangat tertinggal
Ngaras	Mulang Maya	Tertinggal
Ngaras	Negeri Ratu Ngaras	Tertinggal
Ngaras	Padang Alam	Tertinggal
Ngaras	Pardasuka	Tertinggal
Ngaras	Rajabasa	Sangat tertinggal
Ngaras	Suka Maju	Tertinggal
Ngaras	Sukarame	Tertinggal
Pesisir Selatan	Bangun Negara	Berkembang
Pesisir Selatan	Biha	Berkembang
Pesisir Selatan	Marang	Tertinggal
Pesisir Selatan	Negeri Ratu Tenumbang	Tertinggal
Pesisir Selatan	Pagar Dalam	Berkembang
Pesisir Selatan	Paku Negara	Berkembang
Pesisir Selatan	Pelita Jaya	Berkembang
Pesisir Selatan	Sukarame	Tertinggal
Pesisir Selatan	Sumur Jaya	Berkembang
Pesisir Selatan	Tanjung Jati	Berkembang
Pesisir Selatan	Tanjung Raya	Tertinggal
Pesisir Selatan	Tanjung Setia	Berkembang
Pesisir Selatan	Tulung Bamban	Tertinggal
Pesisir Selatan	Ulok Manik	Tertinggal
Pesisir Selatan	Way Jambu	Berkembang
Pesisir Tengah	Kampung Jawa	Berkembang
Pesisir Tengah	Pahmungan	Berkembang
Pesisir Tengah	Rawas	Maju
Pesisir Tengah	Serai	Maju
Pesisir Tengah	Suka Negara	Berkembang
Pesisir Tengah	Way Redak	Berkembang
Pesisir Utara	Balam	Tertinggal
Pesisir Utara	Batu Raja	Tertinggal
Pesisir Utara	Gedau	Tertinggal
Pesisir Utara	Kerbang Dalam	Sangat tertinggal
Pesisir Utara	Kerbang Langgar	Tertinggal
Pesisir Utara	Kota Karang	Tertinggal
Pesisir Utara	Kuripan	Berkembang
Pesisir Utara	Negeri Ratu	Berkembang
Pesisir Utara	Padang Rindu	Tertinggal
Pesisir Utara	Pemancar	Tertinggal
Pesisir Utara	Walur	Berkembang
Pesisir Utara	Way Narta	Berkembang
Pulaupisang	Bandar Dalam	Tertinggal
Pulaupisang	Labuhan	Tertinggal
Pulaupisang	Pasar Pulau Pisang	Tertinggal
Pulaupisang	Pekon Lok	Tertinggal

Kecamatan	Desa	Status desa
Pulaupisang	Suka Marga	Tertinggal
Pulaupisang	Sukadana	Tertinggal
Way Krui	Banjar Agung	Tertinggal
Way Krui	Bumi Waras	Tertinggal
Way Krui	Gunung Kemala	Berkembang
Way Krui	Gunung Kemala Timur	Tertinggal
Way Krui	Labuhan Mandi	Tertinggal
Way Krui	Pajar Bulan	Tertinggal
Way Krui	Penggawa Lima	Berkembang
Way Krui	Penggawa V Ilir	Berkembang
Way Krui	Suka Karu	Berkembang
Way Krui	Ulu Krui	Berkembang

Sumber : SK PPM Kemendesa No 303 tahun 2020

Berdasarkan data yang dari Kementerian Desa, masih terdapat desa sangat tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2020, desa yang masuk dalam desa sangat tertinggal adalah Kerbang Dalam di Kecamatan Pesisir Utara, Kota Batu, Rajabasa, di Kecamatan Ngaras, dan Bandar Dalam, Tanjung Kemala di Kecamatan Bangkunt.

Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal, Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar dan keuntungan yang di peroleh ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa difasilitasi oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa.

Adapun operasionalisasi dikontrol secara bersama oleh LHP, pemerintah desa dan anggota BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Tabel 2.75. Jumlah BUMDes Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	No. Perdes	Jenis Usaha
1	Pulau Pisang	Pasar	Pujama	141/15/2001/psr/2016	Tangkap nelayan
		Bandar Dalam	Minjak Bakhong	141/54/7.11/03/2016	Home Stay
		Pekon Lok	Anak Delok	140/131/18.13.06/2004/2016	Tangkap nelayan
2	Ngaras	Suka maju	Parda jaya	08.TH.2018	Ternak ayam Kampung
		Pardasuka	Maju Jaya	03.TH.2018	Jasa sewa tarup dan layar tancap
		Mulang Maya	Bina Tani		Jual beli hasil

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	No. Perdes	Jenis Usaha
					bumi dan jasa sewa
		Negeri Ratu	Usaha		Jual beli hasil
		Ngaras	Jejama		bumi & jasa sewa
		Padang Dalam	Pemula		Penggemukan sapi
3	Karya Penggawa	Way Sindi	Way Ulok	08 TH 2016	Sulam tapis, batako, simpan pinjam dan peternakan
		Menyancang	Geluk cakak	No.14 TH.2017	Jasa perdagangan
		Way Sindi Utara	Bum-Pekon Way Sindi Utara	140/10/13.05/10/wsu/2017	Ternak sapi dan sarana pertanian
4	Pesisir Tengah	Way Redak	Harapan Jaya	141/02/7.0 6.01/KPTS/2017	Ternak kambing
		Seray	Maju jejama	400/01/7.0 6.Feb-2017	Simpan pinjam
		Kampung Jawa	Sewawangan	02 TH 2017	Usaha jasa dan perdagangan
		Rawas	Selajokhan	518/6/VII.0 6.4.2016	Pemecah batu, jasa sewa, pasar pekan
		Suka Negara	Pujama	Peraturan PekonNo 04 Tahun 2017	Jasa sewa
		Pahmungan	Nekhamdo	100/03/706 /17	Jasa sewa
5	Ngambur	Negeri Ratu	BUM-Pekon	140 Th 20216	Primadona beton
		Ngambur	Busemaya		Perdagangan umum
6	Pesisir Selatan	Tulung Bamban	Bamban Jaya	13 TH.2017	Pertanian dan perdagangan
		Negeri Ratu Tenumbang	Bumi Lebu	36 TH 2017	Pertanian, perdagangan, peternakan
		Sukarame	Sukarame	Peraturan Pekon No 2/2017	Pertambangan dan perdagangan, perikanan
		Pelita jaya	Berkah Jaya	Peraturan Pekon No 21/2017	Pertanian, perkebunan, pertambangan
		Sumur jaya	Sumur Jaya Jejama	Peraturan Pekon No 6/2017	Perikanan, pertanian
		Tanjung jati	Sinar	peraturan pkn	Perdagangan,
			Harapan	17 th 2017	Peternakan, pertanian, perikanan
		Pagar Dalam	Harapan Jaya	Peraturan	Nelayan,

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	No. Perdes	Jenis Usaha
				Pekon No. 5/2017	pertanian
		Tanjung Setia	Permata Jaya	Peraturan Pekon 16/2017	Jasa, pertanian, perdagangan
		Biha	Biha Jejama	Peraturan Pekon No 1/2017	Perdagangan, perikanan, pertanian
		Ulok Manik	Ulok Manik Sejahtera	Peraturan Pekon No. 27/2017	Pertanian, perdagangan
		Paku Negara	Pakor Sejahtera	Peraturan Pekon No. 10/2017	Pertanian, perdagangan
		Way Jambu	Usaha Khamdo	Peraturan Pekon No. 9/2017	Pertanian dan nelayan
		Bangun Negara	Haga maju	Peraturan Pekon No. 8/2017	Pertanian dan perdagangan
		Tanjung Raya	Haga jaya	Peraturan Pekon No. 05/2017	Pertanian dan perdagangan
		Marang	Marang Bebarong	Peraturan Pekon No. 20/2017	Pertanian, perdagangan dan perikanan
	BUMdes bersama	Biha, Ulok manik, Paku Negara	Mebatin Baghong	peraturan Pekon No 01 Tahun 2017	Pelayanan Jasa Perdagangan Dan Pertanian, IKM
	BUMdes bersama	Bangun negara	Kalau	peraturan pkn	Penggilingan
		Tanjung raya	Selajoran	TH.2017	Padi
7	Pesisir Utara	Batu Raja	Sariwonan	3 Tahun 2017	Jualan Pupuk Obat-Obatan, Bahan Pertanian
		Way Narta	Harapan jaya	144/19/VII. 09.08/2018	SPP, Pertanian dan Dagang
		Gedau	Karya Bersama	141/150/VII .09.2012/2018	Pertanian
		Kerbang Dalam	Seandanan	141/1/VII.0 6.2012/2018	Angkutan Matrial
		Walur	Titian Jaya	140/85/VII. 09.2010/2018	Perdagangan
		Balam	Maju Bersama	476/008/04 .2006/2018	Sewa panggung, tarub
		Negeri Ratu	Karya Makmur	141/59/VII. 09.2013/2018	Jual obat pertanian
		Kerbang Langgar	Kekalau Merawan	460/32/VII. 08.2008/2018	Jual alat pertanian

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	No. Perdes	Jenis Usaha
		Kota Karang	Batu Tihang	140/032/VII .09.08.2012/ 2018	Jual alat pertanian
		Padang Rindu	Maju Bersama	141/32/VII. 09.2003/20 18	Sewa panggung dan kursi
		Kuripan	Kuripan	141/07/VII. 03.2001/20 16	Sembako
		Pemancar	Kubang Liman	135/18.13.0 4.2011/201 8	Jasa dan perdagangan
8	Krui Selatan	Mandiri Sejati	Mandiri Jejama	Perdes No.04 TH.2016 141/10 V.08.2008/2 016	Pariwisata
		Balai Kencana	Keberamaan	Perdes No 03 TH.2016 141/10 V.08.2008/2 016	Sewa tarup
		Padang Raya	Bunga Mekar	Perdes No.01 TH.2017 141/10 V.08.2009/2 017	Sewa tarup
		Way Suluh	Maju Bersama	Perdes No.14 TH.2017 140/14 V.08.2002/ WS/ 2017	Sewa tarup
		Way Napal	Guwai Jejama	Perdes No.01 TH.2017 140/09 V.08.2004/2 017	Sewa tarup
		Padang Haluan	Bunga Cempaka	Perdes No.01 TH.2017 141/01 V.08.2004/2 017	Sewa tarup
		Lintik	Mujor Tepor	Perdes No.04 TH.2016 141/08 V.08.2005/2 016	Sewa tarup

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	No. Perdes	Jenis Usaha
		Suka Jadi	Suka Jadi	Perdes No.04 TH.2016 412/100 BUMDES/2016	Sewa tarup
		Walur	Harapan Jaya	Perdes NO.08 TH.2016 141/02 V.08.2007/2017	Sewa tarup
		Pemerihan	Pemerihan	Perdes No.03 TH.2017 141/10 V.08.2007/2017	Sewa tarup
9	Way Krui	Labuhan Mandi	Helauni Kik Barong	No.047/01/7.07.10/2016	Jual beli damar
		Gunung Kemala Timur	Parda Maju	No.900/31/KPTS/X/07/13/2017	Jual beli hasil bumi
		Ulu Krui	Parda Ngangon	No.141/01/7.07/2017	Pelayanan jasa perdagangan
		Suka Baru	Kawokan	No.900/04/7.07.06/2018	Sewa alat-alat pesta, perdagangan dan peternakan
		Penggawa Lima Ilir	Maju Bersama	No.141/004/v.24.04/7/07/2017	Sewa alat-alat pesta, peternakan bebek
		Banjar Agung	Agung Sukses	No.140/010/07.05/2018	Sewa tarup, kursi panggung
		Bumi Waras	Jambat Mupakat	No.140/8/KPTS/02/2017	Sewa tarup
		Pajar Bulan	Harapan Jaya	No.140/17/KPTS/7.07/01/2016	Alat-alat pesta
10	Bangkunat	Tanjung Rejo	Way Pintau	141/44/13.11.12.KPTS/2018	Pengelolaan air bersih
		Penyandingan	Kili Andan	141/035/KPTS/III/2017	Pertanian, perdagangan
		Way Haru	Jaya Usaha	141/05/KPTS/I/2018	Perternakan
		Kota Jawa	Maju Karya		Pengembangan ikan sidat
11	Lemong	Suka Mulya	Jejama Senang	140/125/KPTS/18.13.03.12/17	Biro jasa, pertanian, perdagangan

No	Kecamatan	Nama Desa	Nama Bumdes	No. Perdes	Jenis Usaha
		Rata Agung	Beguai Bebarong	474/040/13.03.11/2017	Simpan pinjam
		Tanjung Jati	Helauni Kik Barong	141/026/KP TS/18.13.01/2017	Perikanan, pertanian, simpan pinjam
		Lemong	Muloh Tungga	820/77/18.13.03.2004/2017	Simpan pinjam
		Way Batang	Mujor Tepor	900/02/KPT S-BUM/13.03.03/2017	Sewa alat pesta, simpan, pinjam, toserba

Sumber : Dinas PMP, 2021

Pemberdayaan masyarakat dan desa perlu dilakukan secara terpadu dan saling berkaitan antar sektor pembangunan dengan mengedepankan prinsip kemandirian dan potensi unggulan dari masing-masing desa. Pengembangan potensi ekonomi di satu desa diharapkan dapat saling melengkapi dengan desa lainnya, sehingga tidak ada desa yang tidak berkembang. Secara umum walaupun berada di pinggir pantai, hanya ada 5 desa di Kabupaten Pesisir Barat yang fokus pada pengembangan perikanan. Angka ini sangat kecil bila dibandingkan dengan desa agraris sebanyak 116 desa. Sementara itu ada 39 desa yang menjadikan pariwisata sebagai unggulan daerah.

Tabel 2.76. Potensi Desa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Agraris	Nelayan	Pariwisata
1	Pesisir Tengah	6	0	5
2	Pesisir Selatan	15	1	6
3	Lemong	13	1	3
4	Pesisir Utara	12	0	5
5	Karya Penggawa	12	1	5
6	Pulau Pisang	6	1	4
7	Wai Krui	10	0	2
8	Krui Selatan	10	0	3
9	Ngambur	9	1	2
10	Ngaras	9	0	2
11	Bangkunat	14	0	2
	Jumlah	116	5	39

Sumber : Dinas PMP, 2021

Pemberdayaan masyarakat dan desa juga perlu melakukan pembinaan terhadap kualitas sumber daya manusia, baik dilakukan secara individu maupun secara komunal. Bagaimana desa mampu memberdayakan masyarakatnya sehingga mampu mandiri secara ekonomi dengan tetap mengedepankan unsur kearifan lokal dan juga potensi unggulan daerah.

Tabel 2.77. Lembaga Kemasyarakatan Desa Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Karang Taruna	PKK	LSM	LKMD	Lembaga Adat
1	Pesisir Tengah	6	6	27	6	11
2	Pesisir Selatan	14	15	77	15	23
3	Lemong	11	13	96	13	30
4	Pesisir Utara	12	11	38	12	12
5	Karya Penggawa	12	12	69	12	29
6	Pulau Pisang	6	6	26	6	5
7	Wai Krui	8	8	32	10	5
8	Krui Selatan	10	10	74	10	18
9	Ngambur	9	9	52	9	16
10	Ngaras	9	9	29	9	9
11	Bangkunat	12	14	53	14	7
	Jumlah	109	113	573	116	165

Sumber : Dinas PMP, 2021

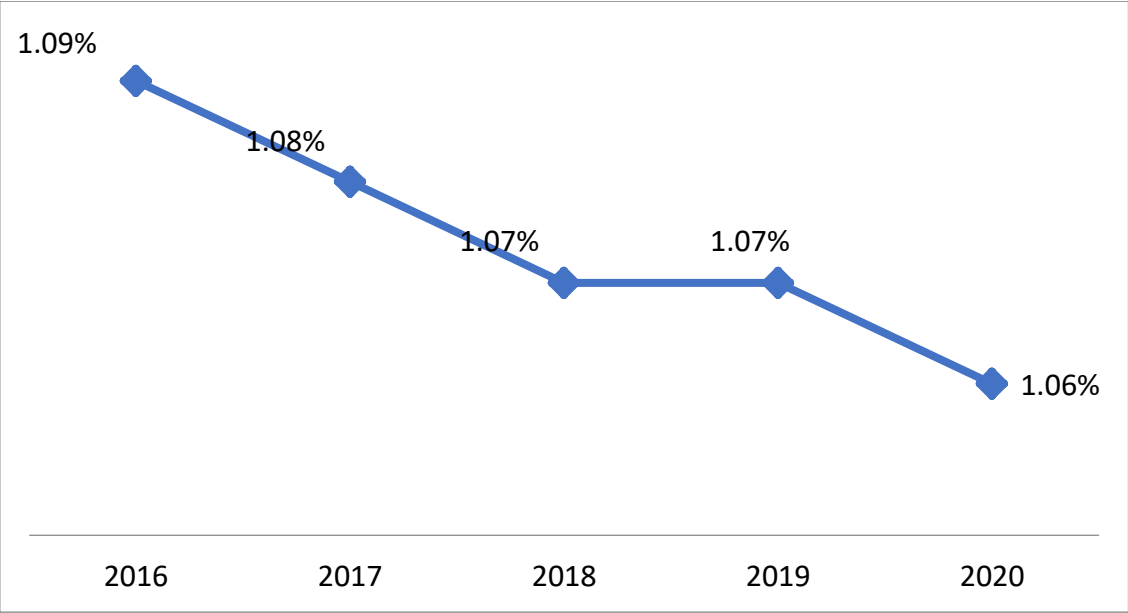
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Setiap tahun jumlah penduduk di dunia termasuk di Indonesia mengalami pertambahan yang cukup signifikan. Bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk semakin banyak sedangkan lahan yang ada tidak mengalami penambahan. Dengan bertambahnya penduduk pasti akan membutuhkan tambahan berbagai fasilitas seperti perumahan, sekolah, rumah sakit, pasar/pusat perbelanjaan dan lain-lain dengan pemenuhan berbagai fasilitas tersebut akan berdampak pada lahan untuk bercocok tanam menjadi semakin berkurang sehingga penyediaan makanan/hasil pertanian turut berkurang pula. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, apakah pengendalian penduduk perlu dilakukan secara merata di semua wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Pesisir Barat, jawabannya harus dilakukan agar tercipta keseimbangan antara manusia dan alam.

Salah satu usaha dalam proses pengendalian penduduk adalah dengan peningkatan kesehatan ibu, yang mana, salah satunya caranya adalah dengan Program Keluarga Berencana. Keluarga berencana memiliki makna yang strategis, komprehensif, dan fundamental dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan sejahtera. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak antara kelahiran, usia ideal ibu untuk hamil dan melahirkan, yang mana semuanya itu dilakukan melalui aktifitas promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pada Tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 1,09% dan terus menurun pada tahun 2017 menjadi 1,08% atau turun 0,01. Berikutnya pada tahun 2018 kembali menurun sebesar 0,01 menjadi sebesar 1,07%. Selanjutnya tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk tetap berada pada posisi 1,07% serta pada tahun 2020 menjadi 1,06% atau kembali turun 0,01%. Peningkatan ini dinilai masih cukup wajar melihat dari kondisi demografi dan juga luasan lahan budidaya dari Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar 2.49. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas PP dan KB, 2021

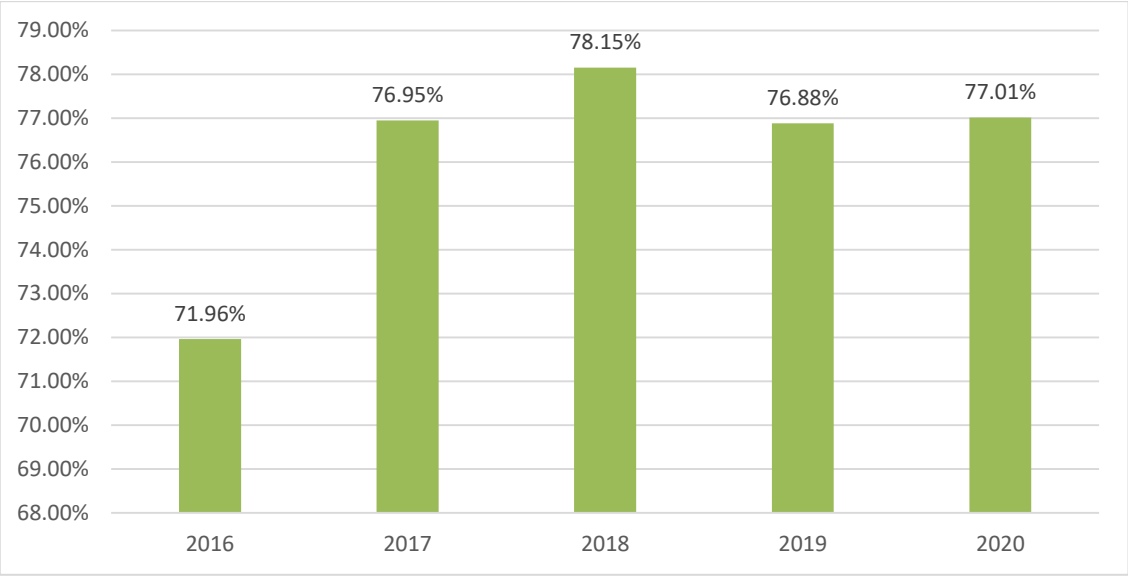
Berdasarkan pada data yang ada, laju pertumbuhan penduduk juga diiringi dengan kenaikan jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) aktif daerah. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2016-2020 lebih banyak dipengaruhi oleh angka kelahiran dari keluarga baru. Pada Tahun 2016 jumlah KB aktif di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 71,96% dan terus meningkat pada tahun 2017 menjadi 76,95% atau naik 4,99%. Berikutnya pada tahun 2018 kembali meningkat sebesar 1,20 menjadi sebesar 78,15%. Selanjutnya tahun 2019 peserta KB aktif menurun menjadi 76,88% dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 77,01%. Fluktuasi dan perkembangan ini tetap berada pada range yang normal. Peningkatan ini diharapkan dapat terus stabil untuk menjamin kemampuan daerah dalam menyediakan kebutuhan dari penduduk.

Tabel 2.78. Jumlah Peserta Keluarga Berencana dan Kelompok Bina Keluarga Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Usia Subur Peserta KB		Kelompok Bina Keluarga		
		Sudah	Belum	Balita	Remaja	Lansia
1	Pesisir Tengah	3.118	596	4	4	4
2	Pesisir Selatan	2.734	1.123	6	5	5
3	Lemong	2.619	660	1	2	2
4	Pesisir Utara	1.915	581	3	2	2
5	Karya Penggawa	2.948	1.006	10	11	10
6	Pulau Pisang	494	156	7	6	5
7	Wai Krui	1.793	760	6	6	6
8	Krui Selatan	1.850	471	11	10	9
9	Ngambur	3.935	915	2	2	2
10	Ngaras	2.571	680	1	2	4
11	Bangkunat	4.329	678	9	7	4
	Jumlah	28.306	7.626	55	57	53

Sumber : Dinas PP dan KB, 2020

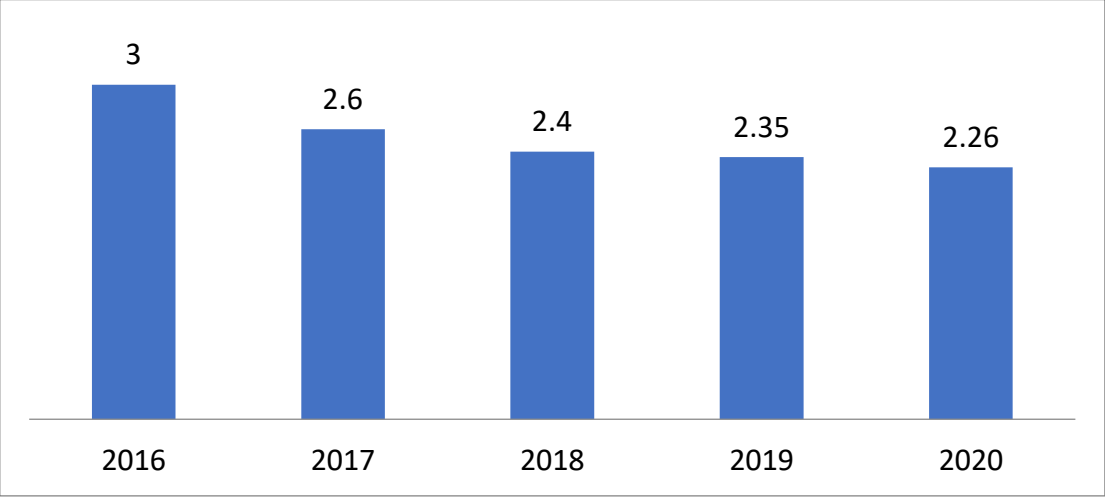
Gambar 2.50. Peserta Keluarga Berencana Aktif Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas PP dan KB, 2021

Lebih lanjut laju pertumbuhan penduduk dan juga persentase KB aktif erat kaitannya dengan kondisi angka kelahiran total. Angka kelahiran total di Kabupaten Pesisir Barat terus mengalami penurunan yang positif. Bila dilihat pada tahun 2016 berada pada 2,63, lalu turun menjadi 2,49 pada tahun 2017. Berikutnya pada tahun 2018 kembali turun menjadi 2.35. Namun, pada tahun 2019 naik sebanyak 0,25 menjadi 2,60. Berikutnya pada tahun 2020 angka ini tetap menjadi 2,60 Kenaikan ini lebih disebabkan banyaknya pernikahan di antara penduduk. Namun demikian, hal ini harus tetap menjadi catatan bagi daerah dalam usaha untuk menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Gambar 2.51. Angka Kelahiran Total Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas PP dan KB, 2021

Tabel 2.79. Angka Kelahiran dan Kematian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Rata-rata Kelahiran (Jiwa/Bulan)	Jumlah Kelahiran (Jiwa)	Jumlah Kematian (Jiwa)
1	Pesisir Tengah	21	259	24
2	Pesisir Selatan	33	442	28
3	Lemong	18	215	27
4	Pesisir Utara	12	149	37
5	Karya Penggawa	24	28	2
6	Pulau Pisang	1	12	3
7	Way Krui	14	165	35
8	Krui Selatan	13	159	10
9	Ngambur	36	430	23
10	Ngaras	14	172	26
11	Bangkunat	41	495	26
	Jumlah	232	2786	241

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

9. Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan urusan wajib yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dengan membagi kewenangan berdasarkan pada beban. Perhubungan terkait dengan mobilitas manusia maupun barang baik dalam rangka perpindahan, aktivitas maupun distribusi. Pelaksanaan urusan perhubungan di Kabupaten Pesisir Barat turut berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya simpul-simpul transportasi dan akses masyarakat.

Tabel 2.80. Perkembangan Urusan Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
I	Transportasi Darat			
A	kendaraan pribadi			
	Roda 4	4.188	unit	
	Roda 2	6.007	unit	
B	Truk Barang	400	unit	
C	Truk Tangki	6	unit	
D	Bus	14	unit	
E	Angkutan Kota	30	unit	
F	Ojek Sepeda Motor	200	unit	
G	Becak	20	unit	
H	Pengguna Layanan Terminal Tipe C			Terminal Way Batu
	Masuk	9.000	orang	
	Keluar	11.000	orang	
II	Transportasi Laut			
A	Kapal	1	unit	
B	Perahu/sampan	275	unit	
C	Pengguna Layanan Pelabuhan			Pelabuhan Koala Stabas
	Keluar	9.000	orang	
	Masuk	9.000	orang	

III	Transportasi Udara			
A	Jumlah Maskapai	1	maskapai	(Wings Air) Lion Air Group
B	Jumlah Pengguna Layanan			Bandara M. Taufik Kiemas
	Penumpang	1.337	orang	
	Barang	5.371	Kg	

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Tabel 2.81. Sarana dan Prasarana Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Nama Sarana/ Prasarana	Jumlah	Lokasi	Keterangan
1	Terminal	Terminal Way Batu	1 Unit	Jl. Pasar Way Batu Terminal Kota Krui Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Kode Pos 34874	Tipe C
2	Bandara	Bandara M. Taufik Kiemas	1 Unit	Pekon Seray, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat Kode Pos 34874	Bandara
3	Dermaga	Dermaga Pulau Pisang	1 Unit	Pasar Pulau Pisang, Kec. Pesisir Utara, Kab. Pesisir Barat Kode Pos 34878	Butuh Perbaikan
		Dermaga Kuala Stabas	1 Unit	Jl. Merdeka (Pasar Krui), Kelurahan Pasar Krui, Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat	Pelabuhan Yang Tidak Diusahakan
		Pelabuhan Nusantara	1 Unit	Pekon Kota Jawa, Bangkumat, Kab. Pesisir Barat	Pelabuhan Perikanan

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Untuk tetap mendukung kelancaran dan keselamatan transportasi angkutan penumpang dan barang di jalan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah berupaya melengkapi fasilitas penunjang lalu-lintas di jalan antara lain melalui pengadaan marka jalan, rambu-rambu lalu-lintas, rambu-rambu pendahulu penunjuk jalan/jurusan (RPPJ), patok *delineator*, halte, dan lampu peringatan di jalan (*warning light*). Adapun perkembangan jumlah fasilitas kelengkapan jalan dalam rangka mendukung kelancaran dan keselamatan lalu-lintas angkutan penumpang dan barang di jalan dari tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.82. Perkembangan Jumlah Fasilitas Kelengkapan Jalan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

No	Jenis	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rambu Lalu-lintas	305	305	305	403	410
2	RPPJ	10	10	50	55	57
3	Halte	7	7	9	9	9
4	Warning Light	-	1	2	3	3

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Tabel 2.83. Pencapaian Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	19.320	22.680	22.680	28.560	30.240
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	18.400	21.600	21.600	27.200	28.800
Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	40	45	47	47	50
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	lokasi	4	5	5	5	5
Pemasangan Rambu rambu	Unit	280	305	305	403	410

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Berdasarkan pada pencapaian indikator urusan perhubungan secara umum terus mengalami perbaikan kinerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2016 sebanyak 19.320 orang meningkat menjadi 30.240 orang pada tahun 2020. Berikutnya untuk jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2016 sebanyak 18.400 orang dan menjadi 28.800 orang pada tahun 2020. Berikutnya untuk indikator jumlah uji kir angkutan umum untuk tahun 2016 sebanyak 40 unit dan tahun 2020 sebanyak 50 unit. Sementara untuk jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis sebanyak 5 lokasi dan jumlah pemasangan Rambu rambu sebanyak 410 unit pada tahun 2020 setelah sebelumnya hanya 280 unit pada tahun 2016.

10. Komunikasi dan Informatika

Fasilitas pemerintah yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika disediakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia dan PT. Pos Indonesia. Sementara itu provider telekomunikasi swasta yang membuka cabang di Kabupaten Pesisir Barat adalah Telkomsel, Indosat dan XL. Ketiga perusahaan tersebut memiliki kantor di Kecamatan Pesisir Tengah, sebagai ibukota Kabupaten.

Tabel 2.84. Sarana Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Barat

Kecamatan	Kantor Pos	Kantor Telkom	Kantor Provider Telekomunikasi (internet)
Pesisir Tengah	1	1	3

Sumber : Dinas Kominfo, 2021

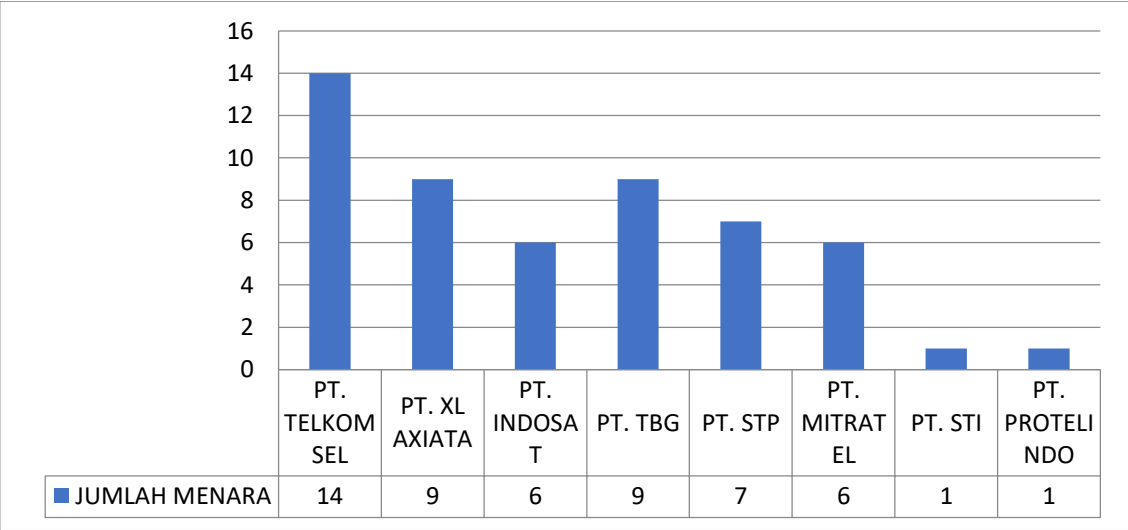
Khusus untuk penyediaan sarana komunikasi dan informatika dari pihak swasta, selain Telkomsel yang telah menyediakan kantor cabang untuk pelayanan pelanggan di Kecamatan Pesisir Tengah, secara umum seluruh ibukota kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat telah mendapatkan fasilitas komunikasi 3G dan 4G yang disediakan oleh: Telkomsel, Indosat dan XL. Diharapkan pada tahun mendatang seiring dengan perkembangan daerah akan lebih banyak provider lain yang hadir, dan juga provider yang telah ada mampu melakukan pengembangan dan perluasan cakupan jangkauan pelayanan hingga ke daerah-daerah terluar.

Tabel 2.85. Data Ketersediaan Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa Terlayani	Jumlah Desa Belum Terlayani	Jumlah BTS	Jumlah Provider
1	Pesisir Tengah	8	0	5	5
2	Pesisir Selatan	15	0	7	7
3	Lemong	10	3	6	6
4	Pesisir Utara	10	2	4	4
5	Karya Penggawa	12	0	5	5
6	Pulau Pisang	6	0	0	0
7	Wai Krui	10	0	2	2
8	Krui Selatan	10	0	5	5
9	Ngambur	9	0	6	6
10	Ngaras	9	0	5	5
11	Bangkunat	11	3	9	9
	Jumlah	110	8	57	54

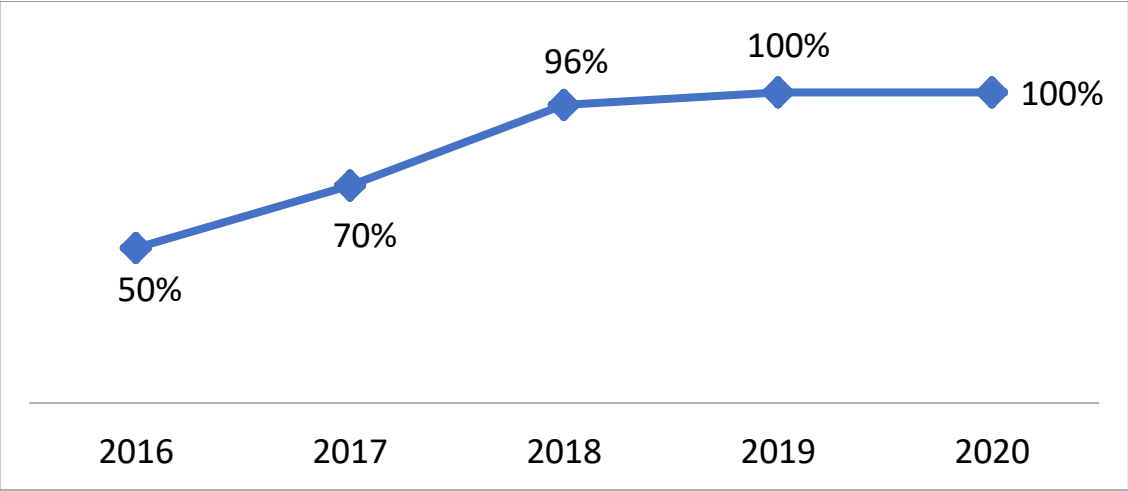
Sumber : Dinas Kominfo, 2021

Gambar 2.52. Jumlah Menara Telekomunikasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020



Sumber : Dinas Kominfo, 2021

Gambar 2.53. Jangkauan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kominfo, 2021

Jangkauan telekomunikasi di Kabupaten Pesisir Barat telah mencapai 100% pada tahun 2019 dan 2020. Perhitungan ini berdasarkan pada lokasi ibu kota kecamatan dan ibu kota kelurahan/pekon/desa. Jangkauan telekomunikasi khususnya pada layanan jaringan telepon dan internet. Pada tahun 2016 capaian masih berada pada 50%, tahun 2017 sebanyak 70% wilayah telah terlayani. Angka ini terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 96%.

11. Koperasi

Koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang mempunyai anggota di mana setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang akan diambil. Peran koperasi dalam perekonomian khususnya di Kabupaten Pesisir Barat paling tidak dapat dilihat dari kedudukannya sebagai salah satu pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, sebagai penyedia lapangan kerja cukup besar, dan juga sebagai pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan dapat meningkatkan pencapaian sasaran indikator kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, koperasi sebagai sokoguru perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat akan lebih ditingkatkan lagi. Hal ini sesuai dengan tupoksi Dinas Koperindag yang berkaitan dengan perkoperasian, yakni menumbuhkembangkan masyarakat untuk berkoperasi. Selain itu, banyak usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berbagai macam usaha yang berpotensi untuk dijadikan badan usaha yang berbadan hukum koperasi.

Tabel 2.86. Data Koperasi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

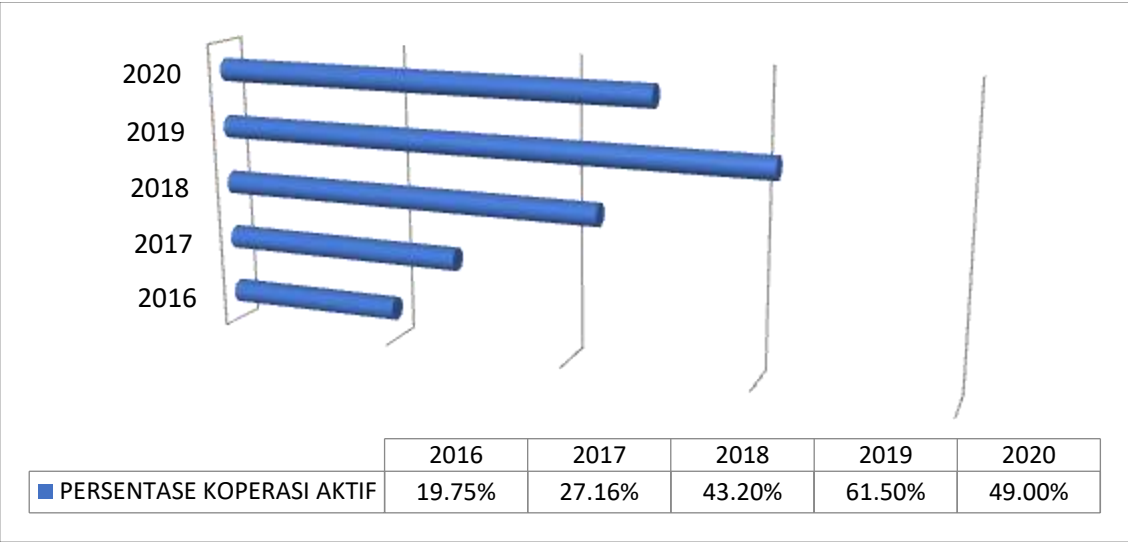
No	IDKOP	Koperasi	Pekon	Kecamatan	Sektor Usaha
1	18130200 10004	Koperasi Unit Desa Sinar Selatan	Padang Dalam	Ngaras	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan
2	18130200 10001	Koperasi Unit Desa Karya Mandiri	Pagar Bukit	Ngaras	Lain-Lain
3	18130600 10005	Koperasi Unit Desa Selalau	Krui	Pesisir Tengah	Listrik, Gas dan Air Bersih
4	18130600 10001	Koperasi Pondok Pesantren Al- Maarif	Pasar Krui	Pesisir Tengah	Lain-Lain
5	18131100 10004	Koperasi Pertanian Batu Inton	Pasar	Pulau Pisang	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan
6	18130800 10013	Koperasi Perkebunan Damar Penggawa Lima	Gunung Kemala	Karya Penggawa	Lain-Lain
7	18130600 10018	Koperasi Pegawai Negeri Sangmuarian	Bumi Waras	Pesisir Tengah	Lain-Lain
8	18130200 10011	Koperasi Lambapu Jaya	Gedung Cahaya	Ngaras	Pertambangan dan Penggalian
9	18130200 10009	Koperasi Serba Usaha Multi Guna	Parda Suka	Ngaras	Perdagangan, Hotel dan Restoran
10	18130800 10005	Koperasi Wanita Tani Lestari	Penengahan	Karya Penggawa	Lain-Lain
11	18130900 10006	Koperasi Pertanian Andan Sangon	Kota Karang	Pesisir Utara	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan
12	18130200 10008	Koperasi Pondok Pesantren Ittihad	Negeri Ratu Ngambur	Ngaras	Lain-Lain
13	18130600 10010	Koperasi Perikanan Mutiara Lobster	Way Redak	Pesisir Tengah	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan
14	18130600 10011	Koperasi Perikanan Mina Bahari	Pasar Krui	Pesisir Tengah	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan
15	18130900 10002	Koperasi Perikanan Mina Kelumbai Gading	Penengahan	Pesisir Utara	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan
16	18130700 10014	Koperasi Perkebunan Petani Damar	Pahmungan	Way Krui	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan

No	IDKOP	Koperasi	Pekon	Kecamatan	Sektor Usaha
17	18130800 10001	Koperasi Pertanian Dua Serangkai	Penggawa Lima	Karya Penggawa	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan
18	18130700 10015	Koperasi Pekebunan Damar Bina Tani	Gunung Kemala	Way Krui	Lain-Lain
19	18130900 10007	Koperasi Pertanian Sangun Kelapa	Padang Rindu	Pesisir Utara	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan
20	18130600 10007	Koperasi Pertanian Rawas Asri	Rawas	Pesisir Tengah	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan
21	18130800 10002	Koperasi Perkebunan Nila Karya	Way Sindi	Karya Penggawa	Lain-Lain
22	18130600 10002	Koperasi Pegawai Negeri Tut Wuri Handayani	Pasar Krui	Pesisir Tengah	Lain-Lain
23	18130600 10008	Koperasi Pertanian Adi Usaha	Kampung Jawa	Pesisir Tengah	Lain-Lain
24	18130900 10010	Koperasi Pegawai Negeri Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sangonan	Kuripan	Pesisir Utara	Lain-Lain
25	18130500 10004	Koperasi Pondok Pesantren Bina Islami	Balai Kencana	Krui Selatan	Lain-Lain
26	18130100 10009	Koperasi Wanita Kakap Merah	Kota Jawa	Bangkunat	Lain-Lain
27	18130600 10016	Koperasi Pondok Pesantren Miftahurohman	Seray	Pesisir Tengah	Lain-Lain
28	18130700 10001	Koperasi Labuwai Lestari	Pahmungan	Way Krui	Lain-Lain
29	18131000 10005	Koperasi Jaya Bersama	Rata Agung	Lemong	Lain-Lain
30	18130900 10011	Koperasi Bina Hutan Utara	Kota Karang	Pesisir Utara	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan
31	18130200 10010	Koperasi Pematang Jaya	Kota Batu	Ngaras	Lain-Lain
32	18130400 10011	Koperasi Cahaya Bersama	NR Tenumbang	Pesisir Selatan	Lain-Lain

No	IDKOP	Koperasi	Pekon	Kecamatan	Sektor Usaha
33	18130100 10010	Koperasi Produsen Bina Karya	Tanjung Rejo	Ngaras	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan
34	18130400 10012	Koperasi Tanera	Marang	Pesisir Selatan	Lain-Lain
35	18130200 10012	Koperasi Perkebunan Pematang Jaya	Kota Batu	Ngaras	Lain-Lain
36	18130400 10009	Koperasi Pertanian Biha Abadi	Biha	Pesisir Selatan	Lain-Lain
37	18130300 10002	Koperasi Sumber Alam Sejahtera (SAS)	Gedung Cahaya Kuningan	Ngambur	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan
38	18130400 10005	Koperasi Serba Usaha Serba Usaha	Marang	Pesisir Selatan	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan
39	18130400 10008	Koperasi Serba Usaha Karya Bakti Mandiri	Marang	Pesisir Selatan	Perdagangan, Hotel dan Restoran
40	18130400 10013	Koperasi Simpan Pinjam Pitana	Marang	Pesisir Selatan	Lain-Lain
41	18130600 10022	Koperasi Serba Usaha Bintang Seroja	Pasar Krui	Pesisir Tengah	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan
42	18130800 10014	Koperasi Serba Usaha Kerudung Sakti	Ulok Pandan	Karya Penggawa	Lain-Lain
43	18130400 10014	Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Lestari	Pagar Bukit	Pesisir Selatan	Lain-Lain
44	18130500 10005	Koperasi Pemerih Seangonan	Pemerihan	Krui Selatan	Lain-Lain
45	18130300 10003	Koperasi Lambar Sumur Rezeki	Sumber Agung	Ngambur	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan
46	18130400 10015	Koperasi Serba Usaha Seprina Laut	Bangun Negara	Pesisir Selatan	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan
47	18130600 10024	Koperasi Mina Makmur Lestari	Pasar Krui	Pesisir Tengah	Pertanian, Pternakan, Kehutanan dan Perikanan

Sumber : Dinas Koperindag, 2021

Gambar 2.54. Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Koperindag, 2021

Jumlah persentase koperasi aktif di Kabupaten Pesisir Barat secara umum terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Berdasarkan data, pada tahun 2016 hanya terdapat 19.75% jumlah koperasi aktif, angka ini terus meningkat pada tahun 2017 menjadi 27.16%. Pada tahun 2018 persentase menjadi 43.20% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 61.50%. Namun demikian pada tahun 2020 angka ini turun menjadi 49,00%. Penurunan lebih disebabkan pada efek domino dari Pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh segala sektor kehidupan masyarakat termasuk pada sisi ekonomi.

Berikutnya, berdasarkan pada klasifikasi jenis usaha industri kecil, proporsi terbesar adalah industri lainnya dengan persentase 66,46% disusul dengan industri kuliner dengan proporsi 14,22%. Berikutnya industri agrobisnis dengan capaian 10,11. Untuk industri otomotif terdapat 6,80% dan terakhir adalah industri fashion dengan persentase sebanyak 2,42%. Jenis industri kecil dimaksud menunjukkan masih terus berkembangnya industri kecil di Kabupaten Pesisir Barat, namun demikian untuk peningkatan kualitas produk serta diversifikasi produk dan pemasaran masih merupakan permasalahan utama pemilik industri.

Tabel 2.87. Jumlah UMKM Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis UMKM				
		Kuliner	Fashion	Otomotif	Agrobisnis	Lainnya
1	Pesisir Tengah	82	12	9	63	265
2	Pesisir Selatan	12	6	9	43	76
3	Lemong	11	1	9	20	140
4	Pesisir Utara	9	6	5	35	126
5	Karya Penggawa	25	0	0	13	63
6	Pulau Pisang	4	6	1	4	32
7	Way Krui	49	5	5	28	172
8	Krui Selatan	33	2	23	4	138
9	Ngambur	24	8	22	1	124

10	Ngaras	22	4	12	15	141
11	Bangkunat	47	4	57	0	209
	Jumlah	318	54	152	226	1.486

Sumber : Dinas Koperindag, 2021

12. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu urusan yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam menjaring para pengusaha/investor untuk menanamkan modal usaha di daerahnya dalam upaya memberdayakan berbagai potensi unggulan daerah dan membuka lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tahun 2020 jumlah penanaman modal dalam negeri di berbagai sektor usaha di Kabupaten Pesisir Barat mencapai Rp.284.209.050.110,00 di mana sektor perdagangan dan reparasi menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp.221.973.433.797,00 (424 unit usaha) dan sektor tanaman pangan serta kehutanan dengan nilai terkecil sebesar Rp.180.000.000,00 (3 unit usaha).

Berikutnya jumlah unit usaha keseluruhan sektor yang berinvestasi di Kabupaten Pesisir Barat mencapai 729 unit usaha dengan sektor perdagangan dan reparasi yang terbanyak dengan 424 unit usaha serta tanaman pangan dan perkebunan dengan 1 unit usaha. Tabel Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri beserta jumlah unit usaha yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.88. Jumlah Investasi di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Sektor Investasi	Jumlah Investasi (Rp.)	Unit Usaha
1	Tanaman Pangan dan Perkebunan	180.000.000	1
2	Peternakan	234.000.000	7
3	Kehutanan	180.000.000	2
4	Perikanan	22.616.000.000	24
5	Industri Makanan	1.504.500.800	48
6	Industri Tekstil	1.285.500.500	39
7	Industri Lainnya	6.141.000.000	8
8	Konstruksi	436.060.008	121
9	Perdagangan dan Reparasi	221.973.433.797	424
10	Hotel dan Restoran	30.010.200.500	36
11	Jasa Lainnya	921.000.000	19
	Jumlah	284.209.050.110	729

Sumber : Dinas PM dan PTSP, 2021

Tabel 2.89. Pencapaian Indikator Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan/Orang	n/a	n/a	61	417	254
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta)	Rupiaj	n/a	n/a	301.541	379.635	344.158
Rasio daya serap tenaga kerja	Orang	n/a	n/a	82	139	186

Sumber : Dinas PM dan PTSP, 2021

Berdasarkan pada pencapaian kinerja urusan penanaman modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2020 mencapai 254 perusahaan/orang dengan nilai investasi mencaoi 344.158 (juta rupiah). Capaian ini meningkat bila dibandingkan dengan data pada tahun 2018 sebanyak 61 perusahaan/orang investor dengan nilai investasi berada pada angka 301.541 (juta rupiah). Berikutnya untuk rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2018 sebanyak 82 orang yang terdata dan tahun 2020 sebanyak 186 orang pekerja. Data untuk tahun 2016 dan 2017 tidak tersedia.

13. **Kepemudaan dan Olahraga**

Fasilitasi bagi generasi muda untuk dapat mengembangkan diri dan kompetensi secara positif merupakan salah satu langkah dari Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berkualitas pada usia kerja dan produktif. Pemuda sebagaimana diatur pada UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, adalah warga negara yang memasuki periode penting dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Pemuda sebagai calon penerus kepemimpinan di daerah dan negara harus dikelola untuk dapat dipersiapkan dengan baik, khususnya dari sisi kompetensi dalam bidang ekonomi dan kepemimpinan.

Berdasarkan pada data kependudukan di Kabupaten Pesisir Barat, jumlah angkatan kerja cukup besar sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.90. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kategori Pekerja di Kabupaten Pesisir Barat, 2017-2020

Kategori	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Angkatan kerja	79.051	73.905	77.816	79.227
Bukan angkatan kerja	26.617	35.392	31.952	33.093
Jumlah/ Total	105.668	109.297	109.768	112.320

Sumber : BPS Lampung, 2021

Besarnya angkatan kerja di Kabupaten Pesisir Barat dari Tahun 2017-2020 yang berkisar antara 73-905-79.227 orang harus menjadi perhatian daerah untuk dapat mengelola dan mempersiapkan pemuda yang dapat berprestasi dalam seluruh bidang pembangunan.

Tabel 2.91. Pencapaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase organisasi kepemudaan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan	Persen	10	15	20	25	25
Persentase penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan olahraga skala kabupaten yang difasilitasi pemda	Persen	60	60	60	60	60
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Orang	1	2	2	4	4
Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	5	6	10	15	33
Jumlah atlet berprestasi	Orang	4	10	17	17	22

Sumber : Dinas Pora, 2021

Berdasarkan pada data di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Pesisir Barat dalam pengembangan urusan kepemudaan dan olahraga terus berusaha untuk dapat meningkatkan peranan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari indikator persentase organisasi kepemudaan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan pada tahun 2016 sebesar 10% dan terus meningkat menjadi 25% pada tahun 2020. Berikutnya untuk sisi olahraga setidaknya pemerintah daerah selama 1 tahun terus berusaha untuk dapat menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan olahraga skala kabupaten sebesar 60%.

Lebih lanjut, jumlah cakupan Pelatih yang bersertifikasi masih terasa minim dengan jumlah 4 orang di tahun 2020. Hal ini sejalan dengan jumlah atlet berprestasi sebanyak 22 orang pada tahun 2020, setelah sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 4 orang, tahun 2017 10 orang, tahun 2018 dan 2019 sebanyak 17 orang. Jumlah atlet berprestasi tersebut berbanding lurus dengan jumlah cakupan pembinaan atlet muda yang selama periode tahun 2016-2020 terus meningkat dari 4 atlet pada tahun 2016, 6 atlet pada 2017, 10 atlet pada 2018, 15 atlet pada 2019 dan 33 atlet pada tahun 2020.

14. Statistik

Ketersediaan data statistik dalam perencanaan pembangunan di suatu daerah merupakan suatu hal yang mutlak dan wajib ada. Data statistik dipergunakan sebagai salah satu alat ukur dalam menilai keberhasilan suatu program/kegiatan dan juga sebagai patokan dalam pengambilan sebuah kebijakan. Hingga saat ini, Kabupaten Pesisir Barat belum memiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Kebutuhan

data masih disediakan oleh BPS Kabupaten Lampung Barat. BPS sebagai lembaga yang menyediakan data sekunder sangat diharapkan mampu memberikan fasilitas pelayanan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui ketersediaan dan kecepatan data, karena belum banyak dokumen dan/atau data yang mampu disediakan oleh BPS Lampung Barat bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.92. Kerjasama Statistik Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan BPS Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Nama Dokumen	Keterangan
1	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	Bappeda
2	PDRB Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	Bappeda
3	PDRB Kabupaten Pesisir Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020	Bappeda
4	Pesisir Barat Dalam Angka (PBDA) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020	Bagian Ekonomi Setdakab
5	Kecamatan Pesisir Tengah Dalam Angka 2020	Bagian Ekonomi Setdakab
6	Kecamatan Pesisir Selatan Dalam Angka 2020	Bagian Ekonomi Setdakab
7	Kecamatan Pesisir Utara Dalam Angka 2020	Bagian Ekonomi Setdakab
8	Kecamatan Krui Selatan Dalam Angka 2020	Bagian Ekonomi Setdakab
9	Kecamatan Lemong Dalam Angka 2020	Bagian Ekonomi Setdakab
10	Kecamatan Karya Penggawa Dalam Angka 2020	Bagian Ekonomi Setdakab
11	Kecamatan Way Krui Dalam Angka 2020	Bagian Ekonomi Setdakab
12	Kecamatan Ngambur Dalam Angka 2020	Bagian Ekonomi Setdakab
13	Kecamatan Ngaras Dalam Angka 2020	Bagian Ekonomi Setdakab
14	Kecamatan Bangkunt Dalam Angka 2020	Bagian Ekonomi Setdakab
15	Kecamatan Pulau Pisang Dalam Angka 2020	Bagian Ekonomi Setdakab

Sumber : Bappeda , 2021

15. Persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Urusan persandian pada dasarnya adalah kegiatan pengamanan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh intern pemerintah daerah dalam pelayanan kedinasan pimpinan daerah. Hingga saat ini, Kabupaten Pesisir Barat dalam kaitannya dengan pelaksanaan urusan persandian fokus pada menjaga informasi yang wajib dilindungi agar selama masa berlakunya informasi yang wajib dilindungi tersebut/dikecualikan tetap dapat terjaga kerahasiannya, keutuhan dan keasliannya, untuk menjaga stabilitas daerah. Informasi dimaksud terpisah dengan informasi yang dapat diakses oleh publik/masyarakat.

Hingga saat ini, Kabupaten Pesisir Barat baru memiliki 1 (satu) orang ASN yang memiliki sertifikasi sebagai sandiman. Sementara itu hingga tahun 2020, perangkat daerah yang mempergunakan persandian dalam mengelola informasi

sebanyak 10% dari keseluruhan jumlah perangkat daerah. Secara bertahap urusan persandian akan ditingkatkan baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

16. Kebudayaan

Sebagai bentuk dari upaya untuk mempromosikan kebudayaan daerah, Kabupaten Pesisir Barat selalu berupaya untuk dapat mengikuti dan/atau melaksanakan kegiatan/event promosi kebudayaan. Kegiatan rutin yang diikuti setidaknya adalah (1) pementasan di TMII; (2) pementasan di Pameran Pembangunan Provinsi; (3) Pementasan di Pameran Pembangunan Kabupaten. Pengembangan kebudayaan daerah diarahkan bersamaan dengan pengembangan pariwisata daerah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah yang memiliki banyak atraksi budaya khas yang merupakan salah satu magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah.

Bermacam kegiatan adat istiadat masyarakat asli Lampung Krui masih tetap ada dan lestari, sehingga dapat dijadikan sebagai potensi wisata budaya. Adapun daya tarik yang ditawarkan seperti upacara adat serta berbagai kesenian daerah. Selain itu, tempat-tempat bersejarah juga banyak dijumpai yang berguna untuk apresiasi seni dan budaya, penelitian sejarah serta ziarah. Obyek-obyek wisata budaya/religi tersebut diantaranya:

Tabel 2.93. Sebaran Potensi Wisata Religi dan Budaya Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Daya Tarik
1	Makam Abang Kunat	Ngaras	Makam Bersejarah
2	Goa Matu	Karya Penggawa	Goa Wisata
3	Makam Gajah Mada	Pesisir Utara	Makam Bersejarah
4	Makam Syekh Aminullah	Lemong	Makam Bersejarah
5	Tenun Tapis	Pulau Pisang	Praktek Tenun Tapis Lampung

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Selanjutnya Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki beberapa kegiatan/event budaya yang rutin diselenggarakan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, antara lain sebagai berikut:

- *Festival Teluk Stabas*, merupakan salah satu festival ragam budaya yang ada di daerah Pesisir Barat. Pelaksanaannya merupakan rangkaian kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pesisir Barat. Dalam kegiatan Teluk Stabas ini diadakan perlombaan budaya dan olahraga lain: kebut Pesagi, Kebut Jukung (sampan), Pawai Budaya, dan lomba tarian adat tradisional.
- *Ngumbai Lawok*, merupakan pesta rakyat yang bermakna sedekah laut (ruwat laut). Pesta ini dilakukan setahun sekali di Krui Kec. Pesisir Tengah.
- *Krui Fair*, merupakan event pameran pembangunan Kabupaten Pesisir Barat yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Pameran ini dalam pelaksanaannya bersanding dengan kegiatan Festivasi Teluk Stabas.

Berikutnya, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 telah ada 7 Warisan Budaya Tak benda milik pemerintah daerah yang sudah ditetapkan, dan ada sekitar 100 situs Cagar Budaya yang belum ditetapkan. Penetapan cagar budaya melalui Peraturan Daerah menjadi salah satu indikator kinerja yang ingin segera dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Penetapan cagar budaya ini akan memudahkan daerah dalam mengembangkan kebudayaan yang terarah dan terukur.

17. Perpustakaan

Kabupaten Pesisir Barat hingga saat ini belum memiliki gedung/bangunan khusus perpustakaan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Koleksi buku masih belum dikumpulkan di perpustakaan daerah, namun berada pada masing-masing perangkat daerah. Pengembangan perpustakaan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar sedang direncanakan secara bertahap.

Tabel 2.94. Data Urusan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020

No	Uraian	Jumlah		
		2018	2019	2020
1	Perpustakaan Kabupaten	1	1	1
a	Perpustakaan Kecamatan	10	10	10
b	Perpustakaan Desa	23	23	23
c	Perpustakaan SMP	26	26	26
d	Perpustakaan SD	45	45	45
e	Perpustakaan TK	0	0	0
2	Jumlah Buku	3.237 Buku	3.345 Buku	3.350 Buku
3	Jenis Buku	11 Jenis Buku	13 Jenis Buku	15 Jenis Buku
4	Jumlah Judul Buku	385 Judul	570 Judul	575 Judul
5	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	50	70	150
6	Jumlah Pustakawan Daerah	5	5	5

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2021

Jumlah buku di perpustakaan daerah pada tahun 2018 sebanyak 3.237 buku (385 judul), meningkat pada tahun 2019 menjadi 3.345 buku (570 judul) dan pada tahun 2020 menjadi 3.350 buku (575 judul). Sementara itu untuk jumlah pustakawan di daerah hingga tahun 2020 sebanyak 5 (lima) pustakawan.

Pengembangan urusan perpustakaan masih menjadi tantangan bagi daerah, baik dari sisi penyediaan sarana dan prasarana pendukung, jumlah SDM, hingga upaya-upaya dalam meningkatkan minat baca dan literasi dari penduduk. Idealnya, urusan perpustakaan juga diarahkan untuk memperkuat perannya dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan akses informasi diantara penduduk.

18. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan daerah adalah keseluruhan kegiatan dalam upaya meliputi kebijakan, pengelolaan, pembinaan serta pengawasan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh SDM, sarana dan prasarana, pendanaan serta sumber daya lainnya yang relevan. Sebagai daerah baru, jumlah arsip statis dan arsip dinamis yang berasal dari perangkat daerah belum dikelola secara optimal.

Hingga tahun 2020, terdapat 85 arsip vital yang telah disimpan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Sementara itu, hingga saat ini di Kabupaten Pesisir Barat jumlah ASN yang memiliki sertifikat sebagai arsiparis masih 0 (nol). Hal ini tentu saja menjadikan pengembangan urusan kearsipan memiliki tantangan yang besar.

Tabel 2.95. Data Urusan Kearsipan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020

No	Uraian	Jumlah		
		2018	2019	2020
1	Jumlah Arsip / Dokumen Yang Dipelihara	85 Arsip Vital	85 Arsip Vital	85 Arsip Vital
2	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	15%	15%	20%
3	Jumlah Arsiparis Daerah	0	0	0

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2021

2.3.2. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Pesisir Barat tersebar di seluruh wilayah yang terdiri dari potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap berada di sepanjang ± 210 km dari garis pantai Kabupaten Pesisir Barat atau 19% dari panjang garis pantai Provinsi Lampung, yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Sejauh 0-4 mil (±168.941 Ha) adalah merupakan wilayah tangkap yang dikelola Kabupaten Pesisir Barat dengan Jumlah nelayan mencapai ±15.100 orang.

Potensi ikan tangkap di perairan Kabupaten Pesisir Barat mencapai ±140.000 ton/tahun dengan total hasil tangkapan baru mencapai ±14.000 ton/tahun atau hanya 10,00%. Potensi ikan bernilai ekonomis tinggi yang dihasilkan diantaranya ikan Tuhuk/Blue Marlin sebesar 1.728 ton/tahun, ikan tongkol dengan total tangkapan sebesar 3.352 ton/tahun, berikutnya ikan kakap dengan jumlah tangkapan 664 ton/tahun.

Tabel 2.96. Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kec	Jenis Ikan (ton)										
		Tongkol	Layur	Tuhuk	Lobster	Tuna	Tenggiri	Layang	Simba	Kakap	Gurita	Lain-lain
1	Bangkunat	452	300	0	300	0	174	100	134	100	126	200
2	Ngaras	350	75	0	0	0	25	0	0	0	0	250
3	Ngambur	435	0	150	0	0	40	0	0	0	0	50
4	Pesisir Selatan	379	250	275	0	225	0	0	0	50	0	350
5	Krui Selatan	0	175	0	0	0	147	0	0	75	0	215
6	Pesisir Tengah	530	450	650	300	741	300	200	150	239	300	722
7	Way Krui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Karya Penggawa	0	175	0	0	0	125	0	0	0	0	225
9	Pesisir Utara	400	0	378	0	0	217	0	0	50	0	250
10	Lemong	428	250	0	0	200	200	350	0	50	50	268
11	Pulau Pisang	378	0	275	0	184	75	61	0	100	50	193
Jumlah		3.352	1.675	1.728	600	1.350	1.303	711	284	664	526	2.723

Sumber : Dinas Perikanan, 2021

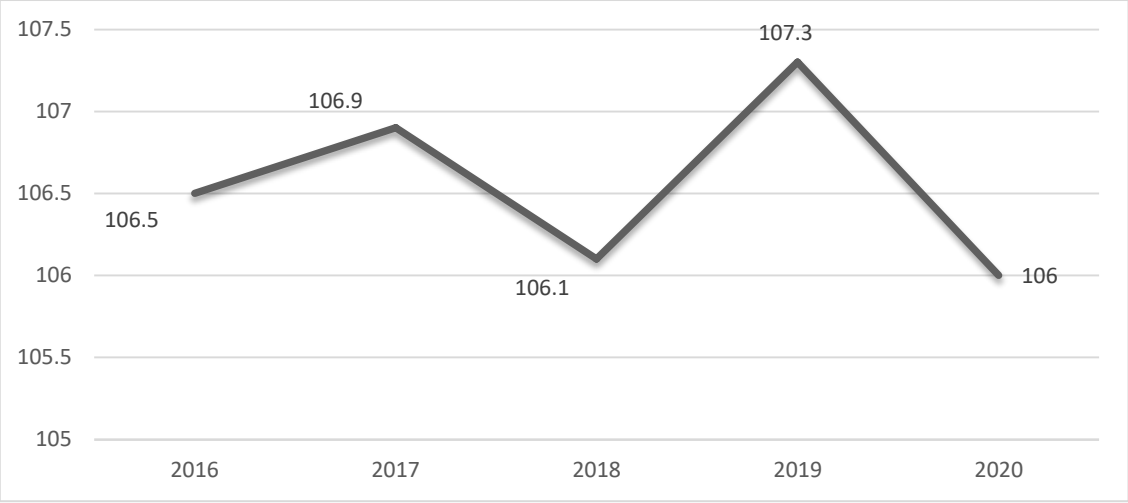
Produksi perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Pesisir Barat yang paling banyak dibudidayakan adalah ikan nila dengan total produksi 104 ton/tahun, ikan lele dengan total produksi mencapai 31,90 ton/tahun. Budidaya perikanan air tawar ini tersebar di hampir seluruh kecamatan.

Tabel 2.97. Jumlah Produktivitas Hasil Perikanan Budidaya Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kec	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Produksi (Ton)			
				Mas	Gurame	Lele	Nila
1	Lemong	0,25	0,13	2,00	2,00	0,40	1,50
2	Karya Penggawa	0,28	0,18	3,70	1,30	2,00	14,50
3	Pesisir Utara	0,23	0,12	3,00	2,40	2,20	14,00
4	Way Krui	0,28	0,16	1,50	2,70	5,00	13,40
5	Pesisir Tengah	0,20	0,09	2,00	3,70	4,00	17,00
6	Krui Selatan	0,18	0,09	2,00	1,50	4,00	5,00
7	Pesisir Selatan	0,23	0,15	2,80	3,00	5,00	8,00
8	Ngambur	0,18	0,003	5,00	2,50	4,00	12,00
9	Ngaras	0,12	0,06	1,00	2,70	3,00	5,00
10	Bangkunat	0,12	0,06	1,50	1,50	2,30	14,00
11	Pulau Pisang	-	-	0	0	0	0
Jumlah		2,07	1,043	24,50	23,30	31,90	104,00

Sumber : Dinas Perikanan, 2021

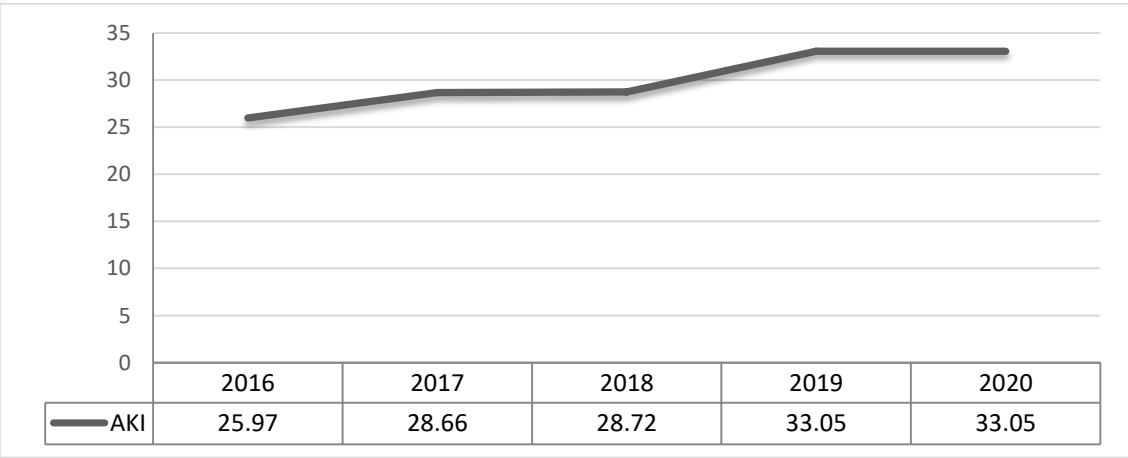
Gambar 2.55. Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Perkembangan NTN di Kabupaten Pesisir Barat secara umum tidak berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data pada tahun 2016 NTN berada pada angka 106.5, tahun 2017 naik sedikit menjadi 106.9 dan pada tahun 2018 turun menjadi 106.1. Pada tahun 2019 sempat naik keangka 107.3. namun kembali turun pada tahun 2020. Covid-19 yang menjangkit Indonesia sejak 2020 memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat, sehingga mempengaruhi berbagai sektor, diantaranya sektor perikanan, Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki banyak nelayan juga merasakan dampak dari hal tersebut, dapat dilihat penurunan NTN Kabupaten Pesisir Barat tahun 2019 menuju tahun 2020.

Gambar 2.56. Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016-2020



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat kabupaten Pesisir Barat, rata rata peningkatan yang terjadi sebesar 8,59 persen. Pada tahun 2016 sebesar 25.97 dan terus meningkat pada tahun 2017 menjadi 28.66 dan 28.72 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali naik menjadi 33.05 dan terus bertahan pada angka 33.05 di tahun 2020.

Tabel 2.98. Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 (1)

No	Kecamatan	Jumlah (Unit)		
		Perahu Bermotor	Perahu Tanpa Motor	Kapal
1	Lemong	87	48	
2	Karya Penggawa	16	10	-
3	Pesisir Utara	33	20	-
4	Way Krui	-	-	-
5	Pesisir Tengah	179	16	-
6	Krui Selatan	25	15	-
7	Pesisir Selatan	137	11	-
8	Ngambur	64	15	-
9	Ngaras	66	11	
10	Bangkunat	83	6	-
11	Pulau Pisang	46	70	-
Jumlah		736	222	-

Sumber : Dinas Perikanan, 2021

Tabel 2.99. Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 (2)

No	Kecamatan	Jenis Alat Tangkap			
		Rawai	Gill Net	Jaring Rampus	Pancing
1	Lemong	-	10	200	175
2	Karya Penggawa	15	20	12	50
3	Pesisir Utara	-	15	50	200
4	Way Krui	-	-	-	-
5	Pesisir Tengah	500	40	100	800
6	Krui Selatan	25	-	50	60
7	Pesisir Selatan	200	30	250	300
8	Ngambur	75	125	50	175
9	Ngaras	75	200	600	150
10	Bangkunat	50	26	800	200
11	Pulau Pisang	175	26	54	300
Jumlah		1.115	492	2.166	2.410

Sumber : Dinas Perikanan, 2021

Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap mutlak dibutuhkan dalam proses peningkatan produksi dan produktivitas perikanan. Luasnya lautan untuk penangkapan ikan dan kondisi perairan tangkap di Kabupaten Pesisir Barat yang cenderung berombak tinggi (Samudera Hindia) perlu dibarengi dengan perlengkapan penangkapan ikan yang modern, efektif dan efisien serta ramah lingkungan.

Pemerintah daerah melalui dinas terkait terus berusaha untuk berperan aktif dalam peningkatan kualitas dan kuantitas dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya termasuk pada pengelolaan hasil perikanan yang ada. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah dengan pemberian bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama nelayan/pembudidaya perikanan di Kabupaten Pesisir Barat. Secara umum, Jumlah bantuan yang diberikan terus meningkat dengan menyesuaikan pada kebutuhan dari masyarakat.

Pada perikanan tangkap, fokus pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah pada sarana dan prasarana penangkapan ikan mulai dari kapal nelayan. Jaring penangkap ikan hingga pada alat pancing. Sementara untuk perikanan budidaya, pemberian bantuan difokuskan pada pengadaan bibit ikan, pakan ikan, dan paket percontohan perikanan budidaya. Selanjutnya, untuk pengolahan ikan, bantuan yang diberikan berupa mesin pembuat pelet ikan, cool box penyimpanan ikan dan alat pengolahan ikan menjadi fillet.

Tabel 2.100. Sebaran Bantuan yang diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Perikanan Tangkap Tahun 2017-2020

No	Kec.	Tahun (KUB)										
		2017	2018	2019				2020				
1	Lemong	3		6	1	3	2	6	5			
2	Karya Penggawa	1		1		1		1	1	1		
3	Pesisir Utara	1	1	4	2	3	2	2	3			
4	Way Krui	3										
5	Pesisir Tengah	10	1	9	2	5	4	4	8		5	2
6	Krui Selatan	2		1		1			1			
7	Pesisir Selatan	2	1	5	2	5	6	7	16			1
8	Ngambur	1	1	1		1					1	
9	Ngaras	2		1	1	1	3		1		1	
10	Bangkunat	2	1	2		2	3	2	2			
11	Pulau Pisang	2	1						1			2
	Jumlah	26	6	30	8	22	20	22	38	1	7	5
		*	*	*	**	***	****	*	**	***	****	*****

Sumber : Dinas Perikanan, 2021

Keterangan

2017 *Jaring Rampus

2018 *Rumpon

2019 *Jaring Rampus

 **Rumpon

 ***Gill Net

 ****Rawai dan Pancing

2020 *Gill Net

 **Rawai dan Pancing

 ***Perahu 3GT

 ****Rumpon

 *****Rampus

Tabel 2.101. Sebaran Bantuan yang diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Perikanan Budidaya Tahun 2017-2020

No	Kec	Tahun (KUB)										
		2017		2018		2019		2020				
1	Lemong	2	1		1							1
2	Karya Penggawa	2	1		2		3		2	1		
3	Pesisir Utara	2							1			
4	Way Krui	4			1					1		1
5	Pesisir Tengah	1	1	1	2	1	1		5	1		1
6	Krui Selatan	5	1		1		1		2			
7	Pesisir Selatan	3	1		2		1	3	2	1	2	
8	Ngambur	2			2		1			1		1
9	Ngaras	1		1	1	1		1				

10	Bangkunat	1	1										
11	Pulau Pisang												
	Jumlah	23*	6**	2*	12**	2***	4*	6**	1*	12**	5***	2****	4*****

Sumber : Dinas Perikanan, 2021

Keterangan	2017	*Bibit Ikan
		**Mesin Pelet Ikan
	2018	*Paket Budidaya Ikan Patin
		**Bibit Ikan
		***Paket Budidaya Lele
	2019	*Paket Budidaya
		**Bibit Ikan dan Pakan
	2020	*Percontohan Budidaya Udang
		**Bibit Ikan dan Pakan
		***Percontohan Budidaya Nila
		****Percontohan Budidaya Patin
		*****Percontohan Budidaya Gurame

Tabel 2.102. Sebaran Bantuan yang diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Pengelolaan Hasil Perikanan Tahun 2017-2020

No	Kec	Tahun (KUB)						
		2017		2018		2019	2020	
1	Lemong	1	5		1		1	
2	Karya Penggawa	1		5				1
3	Pesisir Utara		4				1	
4	Way Krui			1		1		1
5	Pesisir Tengah	1	1	14	5	1	2	1
6	Krui Selatan	1		4		1		
7	Pesisir Selatan	1	4	6				
8	Ngambur							
9	Ngaras		2					
10	Bangkunat	1	2				1	
11	Pulau Pisang				1			
	Jumlah	1*	18**	30*	7**	3*	5*	3**

Sumber : Dinas Perikanan, 2021

Keterangan	2017	*Mesin Pelet Ikan
		**Cool Box
	2018	*Alat Pengolahan Ikan
		**Cool Box
	2019	*Mesin Pelet Ikan
	2020	*Cool Box 220 Li
		**Cool Box dan Perlengkapannya

2. Pariwisata

Kabupaten Pesisir Barat yang dianugerahi garis pantai sepanjang 210 km yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki banyak sekali obyek wisata pantai yang potensial untuk dikembangkan. Dimana pada umumnya, pesona dan aktivitas yang ditawarkan pada obyek wisata pantai adalah snorkeling, surfing, menyelam, berenang, berlayar, berperahu motor, memancing, berjemur matahari, spooning nooks, menikmati panorama alam, fotografi, upacara adat pada saat tertentu, berkemah, trekking dan bersepeda. Untuk sektor Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat memiliki 49 Wisata Pantai, dengan lahan seluas 213,5 Ha.

Berikut ini disajikan objek wisata bahari pada Kabupaten Pesisir Barat yang dirinci berdasarkan tiap Kecamatan.

Tabel 2.103. Sebaran Potensi Wisata Bahari Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Daya Tarik
1	Pantai Ujung Belimbing	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
2	Pantai Teluk Bengkumat	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
3	Tampang Belimbing	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
4	Way Cangkuk	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
5	Pantai Pelabuhan Nusantara	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
6	Pantai Curup Indah	Bangkunat	Panorama Alam Pantai
7	Pantai Suka Negara	Ngaras	Panorama Alam Pantai
8	Pantai Siging	Ngaras	Panorama Alam Pantai
9	Way Cangkuk	Ngaras	Panorama Alam Pantai
10	Pantai Tanjung Setia	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai, Surfing
11	Pantai Way Jambu	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
12	Pantai Pasar Senin	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
13	Pantai Melasti	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
14	Pantai Karang Nyimbur	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
15	Pantai Biha	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
16	Pantai Marang	Pesisir Selatan	Panorama Alam Pantai
17	Pantai Negeri Ratu	Ngambur	Panorama Alam Pantai
18	Pantai Sumber Agung	Ngambur	Panorama Alam Pantai
19	Pantai Way Batang	Ngambur	Panorama Alam Pantai
20	Labuhan Bakhu	Ngambur	Panorama Alam Pantai
21	Pantai Mandiri	Krui Selatan	Panorama Alam Pantai
22	Pantai Lintik	Krui Selatan	Panorama Alam Pantai
23	Pantai Walur	Krui Selatan	Panorama Alam Pantai
24	Pantai Berandai Mahenai	Krui Selatan	Panorama Alam Pantai
25	Pantai Ilahan	Krui Selatan	Panorama Alam Pantai
26	Pantai Labuhan Jukung	Pesisir Tengah	Panorama Alam Pantai
27	Pelabuhan Laut Kuala Stabas	Pesisir Tengah	Pelabuhan Nelayan
28	Pantai Way Redak	Pesisir Tengah	Panorama Alam Pantai
29	Pantai Seray	Pesisir Tengah	Panorama Alam Pantai
30	Bukit Pantai Selalau	Pesisir Tengah	Panorama Alam Pantai
31	Muara Way La'ay	Karya Penggawa	Muara Sungai
32	Pantai Harapan Kita	Karya Penggawa	Panorama Alam Pantai
33	Pantai Way Sindi	Karya Penggawa	Panorama Alam Pantai
34	Pantai Pasir Hitam	Karya Penggawa	Panorama Alam Pantai
35	Pantai Tembakak	Karya Penggawa	Panorama Alam Pantai
36	Pantai Penengahan	Pesisir Utara	Panorama Alam Pantai
37	Batu Lawang	Pesisir Utara	Formasi Batuan Pantai
38	Pantai Walur	Pesisir Utara	Panorama Alam Pantai
39	Pantai Pulang Pisang	Pulau Pisang	Panorama Alam Pantai
40	Pantai Parda Haga	Lemong	Panorama Alam Pantai
41	Pantai Bambang	Lemong	Panorama Alam Pantai
42	Pantai Tanjung Jati	Lemong	Panorama Alam Pantai
43	Pantai Batu Mirau	Lemong	Panorama Alam Pantai
44	Pantai Way Utong	Lemong	Panorama Alam Pantai
45	Pantai Tahawang	Lemong	Panorama Alam Pantai
46	Pantai Pugung Penengahan	Lemong	Panorama Alam Pantai

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Selain mengandalkan objek wisata bahari, Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki potensi ekowisata dan suaka alam – cagar budaya yang dapat diandalkan untuk menarik wisatawan hadir berkunjung. Selain itu, terdapat juga atraksi seni dan budaya yang khas dan tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain.

Tabel 2.104. Sebaran Potensi Ekowisata Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Daya Tarik
1	Ekowisata Pemerihan	Bangkunat	Ekowisata TNBBS
2	Rhino Camp	Bangkunat	Ekowisata TNBBS
3	Penangkaran Penyu Muara Tembulih	Ngambur	Penangkaran Penyu
4	Repong Damar	Way Krui	Panen Getah Damar Tradisional

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Tabel 2.105. Nama dan Luas Lokasi Suaka Alam dan Cagar Budaya di Kabupaten Pesisir Barat

No	Kawasan	Luas (km ²)
1	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)	1.846,08
2	Cagar Alam Laut (CAL) Bukit Barisan Selatan	93,44
	Jumlah	1.940,52

Sumber : Bappeda Kabupaten Pesisir Barat, 2021

Kemampuan ekonomi daerah kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplayer effect* bagi peningkatan ekonomi daerah. Kemampuan daerah dalam menyediakan akomodasi wisata erat kaitannya dengan peluang daerah mendapatkan kunjungan wisatawan, dengan efek lama tinggal yang lebih lama dan *spending money* yang lebih besar.

Tabel 2.106. Akomodasi Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Hotel/ Losmen	Kamar	Tempat Tidur
1	Pesisir Tengah	24	198	310
2	Pesisir Selatan	20	179	276
3	Lemong	-	-	-
4	Pesisir Utara	2	8	14
5	Karya Penggawa	1	4	8
6	Pulau Pisang	13	32	41
7	Way krui	-	-	-
8	Krui Selatan	7	34	54
9	Ngambur	1	4	7
10	Ngaras	-	-	-
11	Bangkunat	-	-	-
	Jumlah	68	459	710

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Dari data akomodasi pariwisata di atas, secara umum akomodasi belum menyebar secara merata. Khusus untuk daerah Lemong dan Way Krui hingga saat ini belum ada hotel/losmen yang dikelola oleh swasta ataupun Pemerintah Pusat. Khusus untuk Kecamatan Ngaras dan Bangkumat diarahkan untuk kawasan pengembangan budidaya perikanan. Selanjutnya dari total 68 akomodasi pariwisata hingga saat ini belum ada Sumber Daya Pariwisata Profesional yang bersertifikat. Untuk paket pariwisata yang dikelola juga langsung oleh pihak pemilik akomodasi wisata.

Tabel 2.107. Sumber Daya Manusia Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	SDM Pariwisata	
		Profesional	Non Profesional
1	Pesisir Tengah	30	125
2	Pesisir Selatan	16	150
3	Lemong	0	75
4	Pesisir Utara	0	125
5	Karya Penggawa	0	125
6	Pulau Pisang	0	100
7	Way krui	0	50
8	Krui Selatan	15	75
9	Ngambur	0	50
10	Ngaras	0	50
11	Bangkumat	3	75
	Jumlah	64	1000

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Jumlah wisatawan yang hadir di Kabupaten Pesisir Barat secara umum masih didominasi oleh wisatawan lokal dengan perbandingan dengan wisatawan luar negeri 3:1. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 166,283 orang, angka ini sempat turun pada tahun 2017 menjadi sebanyak 135,833 orang. Pada tahun 2018 kunjungan wisatawan kembali meningkat menjadi 166,283 orang. Pada tahun 2019 merupakan kunjungan tertinggi dengan jumlah wisatawan yang hadir sebanyak 203,173 orang. Namun demikian, pada tahun 2020 jumlah tercatat hanya sebanyak 50,730 orang. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab penurunan drastis jumlah ini.

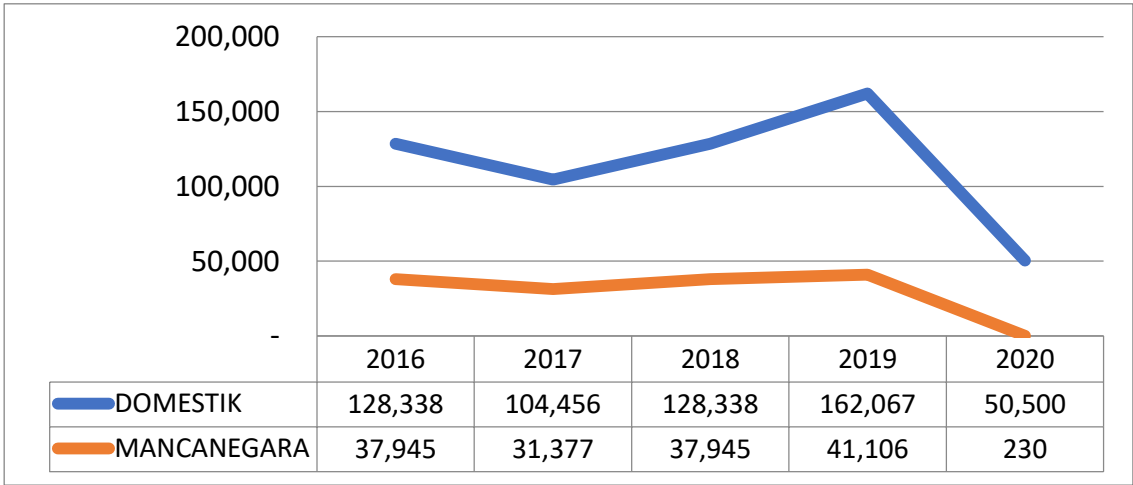
Tabel 2.108. Jumlah Wisatawan Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2020

No	Kec	2017		2018		2019		2020	
		Luar	Lokal	Luar	Lokal	Luar	Lokal	Luar	Lokal
1	Lemong	2.672	728	3.414	1.342	145	3.678		
2	Pesisir Utara	3.320	634	4.527	1.222	1.103	6.003		
3	Karya Penggawa	2.636	853	3.181	1.994	555	12.780		
4	Way Krui	1.922	428	1.736	893	170	1.301		
5	Pesisir Tengah	3.932	42.749	5.439	43.404	11.788	103.400	173	50.500
6	Pesisir Selatan	4.160	33.428	5.556	41.869	2.067	2.543	57	

7	Krui Selatan	2.804	2.215	3.437	2.333	22.589	11.349		
8	Ngambur	2.916	695	3.622	1.225	123	3.077		
9	Ngaras	1.904	412	1.681	858	87	354		
10	Bangkunat	2.168	352	1.740	809	178	1.780		
11	Pulau Pisang	2.907	21.962	3.612	32.439	2.301	15.802		
Total		31.377	104.456	37.945	128.338	41.106	162.067	230	50.500

Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Gambar 2.57. Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pariwisata, 2021

Penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2020 lalu murni disebabkan oleh bencana non alam Covid-19 yang membatasi pergerakan orang dan membatasi jumlah orang untuk berkumpul. Hal ini tentu saja sangat memukul sektor pariwisata Kabupaten Pesisir Barat yang baru akan berkembang. Namun demikian, harapannya dengan kebijakan yang tepat pada tahun-tahun mendatang dapat kembali mengundang wisatawan untuk dapat hadir di Kabupaten Pesisir Barat.

3. Pertanian

Kabupaten Pesisir Barat terdapat sektor pertanian yang masih merupakan salah satu pilar utama bagi perkembangan wilayah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Barat. Dukungan sektor pertanian terhadap PDRB dicapai melalui peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat, Luas lahan pertanian pangan Pesisir Barat mencapai mencapai ±16.434 Ha. Dari luas lahan tersebut tanaman padi sawah, jagung dan padi ladang didaulat menjadi komoditas unggulan dari sektor pertanian, disamping ubi kayu dan ubi jalar.

Tabel 2.109. Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah (Ha)		Lahan Kering (Ha)	
		Irigasi	Tadah Hujan	Kebun	Ladang
1	Pesisir Tengah	64	162	1.498	0
2	Pesisir Selatan	1.445	987	2.016	762
3	Lemong	414	74	50	30
4	Pesisir Utara	160	224	392	57
5	Karya Penggawa	286	382	210	2.876
6	Pulau Pisang	0	0	5	6
7	Way krui	211	13	1.143	50
8	Krui Selatan	278	248	729	0
9	Ngambur	1.216	546	3.752	0
10	Ngaras	329	300	1.441	1.149
11	Bangkunat	525	723	5.145	0
	Jumlah	4.928	3.659	16.381	4.880

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Hasil produksi tanaman padi sawah kabupaten pesisir barat tiap tahunnya rata-rata mencapai 85.000-90.000 ton/tahun, dimana pada tahun 2020 sebanyak 26,01% (23.760 ton/tahun) produksinya terdapat di Kecamatan Pesisir Selatan, disusul Kecamatan Ngambur dengan hasil mencapai 16.231 ton/tahun atau 18,20% dari total produksi Kabupaten dan Kecamatan Bangkunat dengan produksi mencapai 13.087 ton/tahun atau 16,55%. Jika produksi tersebut dikonversi ke beras maka akan menjadi ±53.976 ton/tahun dengan asumsi rendemen saat giling sebesar 62.74%.

Tabel 2.110. Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Produksi (Ton/Tahun)					
		Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	Lemong	4.434	0	0	0	79	0
2	Pesisir Utara	4.784	0	0	7	59	9
3	Pulau Pisang	0	0	0	7	198	0
4	Karya Penggawa	5.777	11	0	0	20	0
5	Way Krui	3.179	0	0	0	0	0
6	Pesisir Tengah	2.594	54	21	0	119	0
7	Krui Selatan	4.579	431	0	6	139	0
8	Pesisir Selatan	23.760	146	0	26	336	244
9	Ngambur	16.231	3.866	21	13	198	75
10	Ngaras	7.606	2.824	29	22	79	56
11	Bangkunat	13.087	12.007	96	24	1.009	440
	Jumlah	86.031	19.337	167	105	2.236	845

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Meskipun Kabupaten Pesisir Barat bukan merupakan sentra dari produksi tanaman padi di Provinsi Lampung, tetapi mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mendukung program pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ketahanan pangan dan kemandirian pangan menuju kedaulatan pangan. Pada subsektor hortikultura, Kabupaten Pesisir Barat juga penghasil tanaman sayuran

dan buah-buahan, dengan komoditas utama adalah tomat, terung, cabai rawit dan cabe besar.

Tabel 2.111. Jumlah Produksi Sayuran dan Buah Semusim Holtikultura di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Produksi (Ton)							
		Cabai Besar	Cabai Rawit	Semangka	Alpukat	Duku	Durian	Pisang	Pepaya
1	Lemong	32	27	0	14	0	0	17	0
2	Pesisir Utara	17	10	0	16	10	0	84	10
3	Pulau Pisang	0	0	0	4	0	0	11	7
4	Karya Penggawa	1	4	0	13	17	12	379	143
5	Way Krui	0	0	0	6	22	0	6	4
6	Pesisir Tengah	1	0	0	8	24	0	7	11
7	Krui Selatan	34	33	0	2	23	18	31	4
8	Pesisir Selatan	61	9	440	15	40	95	31	56
9	Ngambur	45	35	384	19	5	17	54	8
10	Ngaras	199	1	228	46	12	0	825	17
11	Bangkunat	114	70	0	68	52	50	1.045	1.960
Jumlah		503	189	1.052	210	204	191	2.489	2.221

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Tabel 2.112. Jumlah Produksi Sayuran dan Buah Setahun Holtikultura di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Produksi (Ton)							
		Alpukat	Duku	Durian	Pisang	Sawo	Melinjo	Petai	Jengkol
1	Pesisir Selatan	15	40	95	31	135	44	70	91
2	Ngaras	46	12	0	825	0	5	9	0
3	Pesisir Tengah	8	24	0	7	5	2	7	4
4	Krui Selatan	2	23	18	31	103	274	41	14
5	Way Krui	6	22	0	6	9	12	42	14
6	Karya Penggawa	13	17	12	379	12	15	54	19
7	Pesisir Utara	16	10	0	84	24	88	12	13
8	Lemong	14	0	0	17	47	38	11	4
9	Ngambur	19	5	17	54	35	5	10	24
10	Bangkunat	68	52	50	1.045	255	45	200	685
11	Pulau Pisang	4	0	0	11	12	9	10	66
Jumlah		268,00	484,90	975,80	3347,30	586,00	421,70	385,50	282,30

Sumber : Dinas Pertanian, 2021

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat, luas lahan perkebunan kabupaten pesisir barat mencapai 26.694,20 Ha dengan total hasil produksi tanaman perkebunan sebesar 29.222,8 ton/tahun. Dimana berdasarkan luas dan jumlah hasil produksi yang menjadi komoditas unggulan sektor perkebunan Kabupaten Pesisir Barat adalah :

1. Cengkeh yang memiliki lahan produksi seluas 2.136,00 Ha dengan produksi sebesar 424,10 ton/tahun. Yang menjadi sentra produksi adalah Kecamatan Pesisir Utara dengan produksi 80,00 ton/tahun.

2. Kakao yang memilii lahan produksi seluas 1.129,00 Ha dengan produksi 689,7 ton/tahun. Yang menjadi sentra produksi adalah Kecamatan Bangkumat dengan produksi 199 ton/tahun.
3. Kelapa Dalam yang memiliki lahan produksi seluas 7.286 Ha dengan produksi 7.887,00 ton/tahun. Yang menjadi sentra produksi adalah Kecamatan Pesisir Selatan dengan produksi 2.095 ton/tahun.
4. Karet dengan luas lahan 680 Ha dengan produksi 217,5 ton/tahun. Yang menjadi sentra produksi adalah Kecamatan Pesisir Selatan dengan produksi 123,00 ton/tahun.
5. Kelapa Sawit dengan luas lahan 7.114 Ha dengan produksi 14.865,00 ton/tahun. Yang menjadi sentra produksi adalah Kecamatan Ngambur dengan produksi 8.150 ton/tahun.
6. Pala dengan luas lahan 84 Ha dengan produksi 15,30 ton/tahun. Yang menjadi sentra produksi adalah Kecamatan Bangkumat dengan produksi 6,50 ton/tahun.
7. Kopi Robusta dengan luas lahan 6.704 Ha dengan produksi 3.466,30 ton/tahun. Yang menjadi sentra produksi adalah Kecamatan Lemong dengan produksi 1.076 ton/tahun.
8. Lada dengan luas lahan 3.228 Ha dengan produksi 1.441,70 ton/tahun. Yang menjadi sentra produksi adalah Kecamatan Lemong dengan produksi 535 ton/tahun.
9. Pinang dengan luas lahan 248,00 Ha dengan produksi 59,80 ton/tahun. Yang menjadi sentra produksi adalah Kecamatan Pesisir Selatan dengan produksi 9,80 ton/tahun.

Tabel 2.113. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Produksi (Ton)					
		Cengkeh	Kakao	Kelapa	Sawit	Kopi	Lada
1	Lemong	25	102	790	18	1.076	535
2	Pesisir Utara	80	58	675	8	625	35
3	Pulau Pisang	45	1	230	0	0	0
4	Karya Penggawa	72	44	505	0	193	27
5	Way Krui	12	34	265	0	12	6
6	Pesisir Tengah	15	37	377	78	9	9
7	Krui Selatan	5	18	370	47	7	4
8	Pesisir Selatan	13	53	2.095	1.255	325	30
9	Ngambur	36	82	1.105	8.150	350	260
10	Ngaras	50	63	525	2.255	230	220
11	Bangkumat	71	199	950	3.045	640	316
Jumlah		424	690	7.887	14.865	3.467	1.442

Sumber : BPS-Dinas Pertanian, 2021

Tabel 2.114. Tingkat Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Produktivitas (Kg/Ha)					
		Cengkeh	Kakao	Kelapa	Sawit	Kopi	Lada
1	Lemong	321	1.074	1.549	1.200	633	594
2	Pesisir Utara	500	1.018	1.448	2.000	590	673
3	Pulau Pisang	459	350	1.870	-	-	400
4	Karya Penggawa	320	1.100	1.481	-	581	563
5	Way Krui	228	723	1.410	-	857	600
6	Pesisir Tengah	375	881	1.514	2.000	708	531
7	Krui Selatan	200	750	2.418	2.136	262	475
8	Pesisir Selatan	224	883	1.520	4.115	524	588
9	Ngambur	300	745	1.639	2.435	603	737
10	Ngaras	267	954	1.522	2.076	714	603
11	Bangkunat	364	1.099	1.520	2.181	800	527
Rata-Rata Produktivitas		342	954	1.561	2.391	634	600

Sumber : BPS-Dinas Pertanian, 2021

Populasi ternak besar di Kabupaten Pesisir Barat untuk ternak sapi mencapai 9.761 ekor, kerbau 689 ekor, kambing 7.466 ekor dan domba 931 ekor serta babi 836 ekor. Populasi ternak kecil di Kabupaten Pesisir Barat untuk ternak ayam buras dengan capaian populasi 75.684 ekor, ternak itik sebanyak 8.148 ekor dan bebek sebanyak 13.216 ekor.

Sentra populasi ternak sapi ada di Kecamatan Pesisir Selatan dengan jumlah populasi sebesar 2.918 ekor dan Kecamatan Ngambur dengan jumlah 1.419 ekor, populasi kerbau terbesar ada di Kecamatan Lemong yang mencapai 160 ekor. Untuk ternak kambing populasi terbesar ada di Kecamatan Lemong 1.607 ekor dan Kecamatan Ngambur dengan populasi 1.334 ekor. Untuk ternak domba populasi tertinggi ada di Kecamatan Karya Penggawa dengan populasi 356 ekor serta ternak babi berada hanya di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pesisir Selatan dengan populasi 523 ekor, Kecamatan Ngambur dengan populasi 264 ekor dan Kecamatan Bangkunat dengan 49 ekor.

Berikutnya untuk sentra populasi ternak Ayam Buras ada di Kecamatan Pesisir Selatan dengan jumlah 26.122 ekor dan Kecamatan Bangkunat dengan jumlah populasi 18.199 ekor. Selanjutnya untuk ternak itik ada di Kecamatan Karya Penggawa dengan populasi 3.087 ekor dan Kecamatan Bangkunat dengan populasi 1.489 ekor. Sedangkan ternak bebek ada di Kecamatan Bangkunat dengan populasi 5.841 ekor.

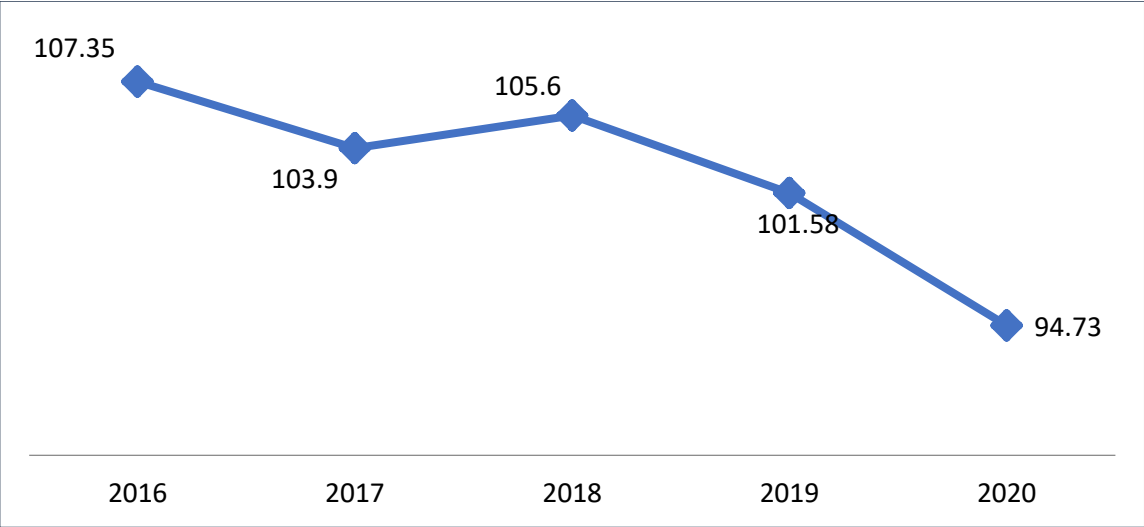
Untuk lebih detail populasi hewan ternak di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.115. Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Populasi (Ekor)							
		Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik	Bebek
1	Lemong	473	163	1.607	0	9.764	500	246	1.485
2	Pesisir Utara	376	51	185	17	1.042	0	342	292
3	Pulau pisang	159	0	98	0	894	0	0	0
4	Karya Penggawa	574	77	848	356	7.883	0	3.087	599
5	Way Krui	340	139	178	67	1.496	0	314	244
6	Pesisir Tengah	626	49	265	91	3.678	0	532	1.374
7	Krui Selatan	1.028	33	553	0	3.372	600	436	1.028
8	Pesisir Selatan	2.918	69	1.000	212	26.122	0	1.058	2.081
9	Ngambur	1.419	0	1.334	0	2.322	700	540	705
10	Ngaras	496	108	278	33	912	500	104	198
11	Bangkunat	1.352	0	1.120	155	18.199	0	1.489	5.841
Jumlah		9.761	689	7.466	931	75.684	2.300	8.148	13.216

Sumber : BPS-Dinas Pertanian, 2021

Gambar 2.58. Nilai Tukar Petani Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Sehingga semakin tinggi NTP maka diasumsikan semakin sejahtera nelayan. Bila melihat dari data NTP di Kabupaten Pesisir Barat, terjadi fluktuasi dengan kecenderungan menurun.

Pada tahun 2016 NTP daerah adalah 107,35, lalu turun menjadi 103,9 pada tahun 2017. Angka NTP sempat naik pada tahun 2018 ke angka 105,6. Namun demikian kembali turun menjadi 101,58 pada tahun 2019. Tidak stabilnya nilai NTP ini dikarenakan masih belum stabilnya harga produk pertanian, sementara itu biaya produksi untuk menghasilkan produk memiliki kecenderungan naik dari tahun ke tahun.

4. Perdagangan

Selama tahun 2014–2019 perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor primer yaitu sektor pertanian. Sedangkan perdagangan selama tahun 2014–2019 merupakan penyumbang kedua PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat yaitu rata-rata sebesar 11–14%. Kawasan perdagangan di Kabupaten Pesisir Barat terpusat berada di pasar-pasar yang ada di setiap kecamatan dan merupakan pasar besar (pasar kota). Kondisi saat ini sebagian besar pemerintah desa kurang berdaya dalam mengelola aset desa, hal ini disebabkan keterbatasan pendanaan dan juga kemampuan manajerial yang dimiliki sehingga pada akhirnya pemerintah desa dan masyarakat belum dapat memanfaatkan secara optimal semua aset yang ada untuk membangun perekonomian desa.

Oleh karenanya, dengan adanya kemauan dan keinginan yang kuat masyarakat di perdesaan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraannya serta adanya komitmen dan dukungan keberpihakan semua pihak-pihak yang berkompeten terhadap pemberdayaan desa, merupakan peluang untuk meningkatkan perekonomian desa sekaligus membangun sistem ekonomi perdesaan melalui pengembangan aset desa secara efektif Perlu adanya perhatian khusus dan penataan pasar-pasar yang merupakan aset desa dan aset Pemerintah Daerah yang bisa menjadi BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) dapat menambah sumber Pendapatan Asli Desa/Daerah. Pada Tabel di bawah adalah daftar Pasar Desa yang ada di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.116. Jumlah Pasar Desa di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Nama Pasar
1	Pesisir Selatan	Pasar Biha, Pasar Sumur Jaya, Pasar Senen
2	Bangkunat	Pasar pintau, Pasar Way Heni
3	Ngambur	Pasar Way Batang, Pasar Lansak, Pasar Cahaya Kuningan, Pasar Sumber Agung
4	Pesisir Utara	Pasar Kerbang Langgar, Pasar Gedau, Pasar Rata Agung
5	Lemong	Pasar Lemong, Pasar Melesom
6	Karya Penggawa	Pasar Ulok Pandan, Pasar Menyancang, Pasar Penengahan, Pasar Kebuayan, Pasar Laay
7	Krui Selatan	Pasar Mandiri, Pasar Way Napal,
8	Ngaras	Pasar Bandar Agung,
9	Pesisir Tengah	Pasar Way Batu, Pasar Pagi, Pasar Klewer

Sumber : Dinas Koperindag, 2021

Tabel 2.117. Jumlah Pasar Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Pekon/ Kelurahan	Jumlah			
			Los	Kios	Hamparan	Pedagang
1	Karya Penggawa	Pekon Kebuayaan :				
		Pasar Kebuayaan	4		50	54
2	Pesisir Tengah	Kelurahan Pasar Krui				
		Pasar Lama	65			120
		Pasar Way Batu 1	34		197	
		Pasar Way Batu 2	35		165	
3	Pesisir Selatan	Pekon Biha:				
		Pasar Biha 1	12		48	60
		Pasar Biha 2	10			Baru
4	Ngambur	Pekon Gedung Cahya Kuningan				
		Pasar Gedung Cahya Kuningan 1	16		64	80
		Pasar Gedung Cahya Kuningan 2	28			Baru
		Pasar Minggu	10			Baru
5	Bangkumat	Pekon Pagar Bukit				
		Pasar Pintau	24	14	73	80

Sumber : Dinas Koperindag, 2021

Hingga tahun 2020, Kabupaten Pesisir Barat memiliki 10 Pasar yang berada di 5 kecamatan. Kondisi pasar-pasar tersebut dalam kondisi baik dan mampu menjadi wadah bagi roda perekonomian pada tataran kecamatan hingga kabupaten. Revitalisasi beberapa pasar dan juga pembangunan pasar-pasar baru yang lebih modern diperlukan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi masyarakat daerah.

5. Perindustrian

Dari sektor perindustrian, Kabupaten Pesisir Barat masih tergolong dalam daerah yang belum maju. Hal ini dapat dilihat dari jenis industri di Kabupaten Pesisir Barat yang masih fokus pada pengembangan industri kecil, yaitu sektor industri pengolahan pangan, industri pengolahan kayu dan industri pariwisata. Untuk sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang relatif tetap. Besaran kontribusi tersebut terutama ditentukan oleh besarnya peran aktif sektor swasta dalam mendukung pengembangan perekonomian, walaupun kinerja belum mencapai optimal.

Secara lebih rinci data potensi perindustrian di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

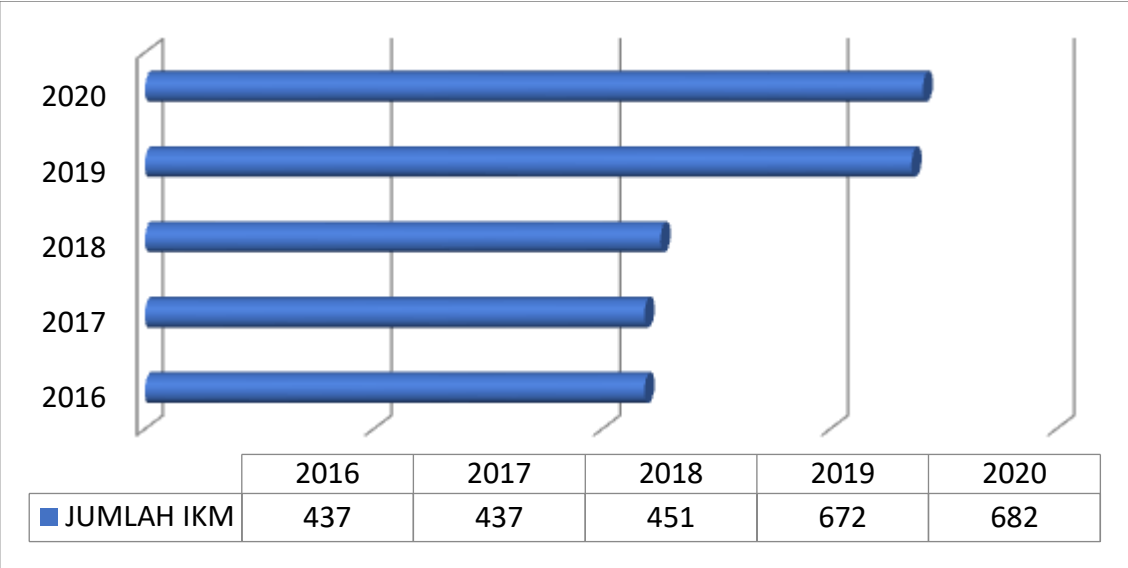
Tabel 2.118. Data Industri Kecil Menengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja (org)	Nilai Investasi (Rp.000)	Kapasitas Produksi		Nilai Produksi (Rp.000)
					Jumlah	Satuan	
1	Gula Merah	19	57	12,527	35,206		41,184
2	Pengolahan Kopi dan Teh	25	30	9,810	2,868		37,053
3	Sulaman Tapis	74	224	52,385	176,589		685,822
4	Anyaman	17	32	7,965	6,072		179,106
5	Batu Bata	37	122	21,528	6,379		2.069,313
6	Tahu Tempe	54	136	4,797	1,286		3.657,715
7	Pengolahan Ikan	21	72	8,000	29,331		982,889
8	Furniture dari Kayu	45	103	46,819	35,795		188,889
9	Kerajinan dari kayu bukan mebeler	17	22	23,114	2,986		365,618
10	Makanan olahan	23	32	4,828	1,065		3.092,778
11	Industri Air Minum	11	23	1,371	406,319		5.477,690
12	Penggilingan padi dan Penyosoan beras	39	97	63,219			
13	Industri pengelasan dan mesin	2	4	3,766	901,764		148,294
14	Industri kerajinan YTDL	16	24	750,00			
15	Industri krupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya	23	56	6,852	8,759		986,189
16	Industri Perlengkapan dan peralatan rumah tangga	7	16	11,765	1,260		454,680
17	Industri Lainnya	7	33	2,614	41,613		295,200

Sumber : Dinas Koperindag, 2021

Pada tahun 2016, secara total terdapat 437 jumlah industri kecil mikro di Kabupaten Pesisir Barat, jumlah ini bertahan pada tahun 2017. Berikutnya pada tahun 2018 jumlah IKM meningkat menjadi 451 usaha. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan cukup signifikan menjadi 672 usaha IKM. Berikutnya pada tahun 2020 jumlah tersebut menjadi 682 usaha IKM yang tersebar merata di Kabupaten Pesisir Barat. Peningkatan ini disebabkan pula oleh perkembangan beberapa sektor lainnya, termasuk pariwisata, pertanian dan perikanan. Perkembangan *e-commerce* tentu saja memberikan andil yang besar dalam proses perkembangan IKM di Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar 2.59. Jumlah Industri Kecil Mikro Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Koperindag, 2021

Permasalahan permodalan dan/atau fasilitasi serta pemasaran untuk IKM di daerah masih tergolong minim. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah merupakan faktor penghambat dari upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor ini. Diperlukan kreatifitas dari pemilik IKM untuk dapat memanfaatkan peluang, khususnya pada pemasaranan melalui *e-commerce* yang saat ini sedang berada pada masa *booming*.

Tabel 2.119. Data Pemasaran Industri Kecil Menengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha	Pemasaran Tradisional	Pemasaran e-commerce
1	Penggaraman/ Pengeringan Ikan	6	6	0
2	Pengasapan/ Pemanggangn Ikan	8	8	0
3	Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	11	11	0
4	Tempe Kedelai	43	43	0
5	Tahu Kedelai	23	23	0
6	Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	63	63	0
7	Produk Roti Dan Kue	16	16	2
8	Gula Merah	20	20	2
9	Makanan Dan Masakan Olahan	17	17	5
10	Pengolahan Kopi	29	29	15
11	Industri Pengolahan The	1	1	0
12	Kue Basah	3	3	1
13	Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	38	38	5
14	Produk Makanan Lainnya	2	2	2
15	Air Minum Dan Air Mineral	11	11	0
16	Kain Tenun Ikat	3	3	0
17	Kain Sulaman/Bordir	83	83	0

18	Penjahitan Dan Pembuatan pakaian Sesuai Pesanan	3	3	1
19	Barang Bangunan Dari kayu	9	9	0
20	Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	17	17	0
21	Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	59	59	20
22	Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik	41	41	0
23	Barang Logam Lainnya Ytdl	1	1	0
24	Furnitur Dari Kayu	27	27	0
25	Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	4	4	0
26	Permata	4	4	0
27	Kerajinan Ytdl	15	15	0
28	Besi & Baja Dasar	3	3	0
29	Jasa Industri Untuk Pengerjaan Khusus	119	119	50
30	Perlengkapan Dan Peralatan Rumah	3	3	0
	Jumlah	682	682	103

Sumber : Dinas Koperindag, 2021

Tabel 2.120. Pencapaian Indikator Kinerja Perindustrian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	5,36	5,13	4,88	4,50	3,98

Sumber : Dinas Koperindag, 2021

Berdasarkan pada target kinerja urusan perindustrian, didapatkan gambaran bahwa untuk perkembangan sektor ini terhadap PDRB terus menurun. Hal ini memang disebabkan belum berkembangnya sektor industri besar di Kabupaten Pesisir Barat. Industri masih terfokus pada IKM atau industri skala rumah. Fokus dari pemerintah daerah untuk mengembangkan industri pengolahan juga belum optimal dikarenakan kondisi geografis daerah yang belum representatif untuk jalur distribusi. Pada tahun 2016 industri pengolahan menyumbang 5,36%, pada tahun 2017 menurun menjadi 5,13%. Sharing sektor industri pengolahan terus menurun menjadi 4,88% pada tahun 2018, 4,50% pada tahun 2019 dan menjadi 3,98% pada tahun 2020.

6. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan program pemerintah dalam rangka pemerataan penyebaran penduduk dan pendayagunaan lahan. Efek lain dari transmigrasi mencakup juga pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu daerah yang menjadi pilot project pengembangan transmigrasi. Sebagaimana dipahami, wilayah transmigrasi tidak menyebar di seluruh daerah. Dari awal pelaksanaan program hingga tahun 2019, pemukiman transmigrasi hanya terdapat di Kecamatan Ngambur dengan sebaran rumah tinggal sebanyak 1.139 unit yang ditinggali oleh 2.129 Kepala keluarga. Dengan luas lahan sebanyak 557,1 hektar (*sumber : SIPD Kabupaten Pesisir Barat, 2020*).

7. Energi

Daerah Pesisir Barat cukup kaya akan berbagai sumber daya energi seperti gas bumi/panas bumi, tenaga air (air terjun, air deras dan gelombang laut, tenaga angin dan sebagainya). Perlu diadakan penelitian dan pengembangan lebih lanjut terhadap sumber energi tersebut agar dapat digunakan sebagai energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada Tabel di bawah ini menunjukkan pemanfaatan energi alternatif sebagai sumber listrik.

Tabel 2.121. Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) di Kabupaten Pesisir Barat

Sumber Energi	Produksi	Lokasi	
		Desa	Kecamatan
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH)	3.22 MW	Tanjung Rejo	Bangkunat
	2-2.5 MW	Way Ngambur	Ngaras
	2-2.5 MW	Way Tembulih	Ngambur
	69 KW	Ulok Mukti	Ngambur
	4.57 MW	Way Simpang Kanan, Laay	Karya Penggawa
	8-20 MW	Way Simpang Kiri, Laay	Karya Penggawa
	7.21 MW	Way Simpang Balak	Pesisir Utara
	3.81 MW	Way Simpang Lunik	Pesisir Utara
	1.25 MW	Khampang Kota Karang	Pesisir Utara
	2-2.5 MW	Way Malaya	Lemong
	4.20 MW	Way Melesom	Lemong
	2.13 MW	Way Halami	Lemong

Sumber : Bappeda, 2020

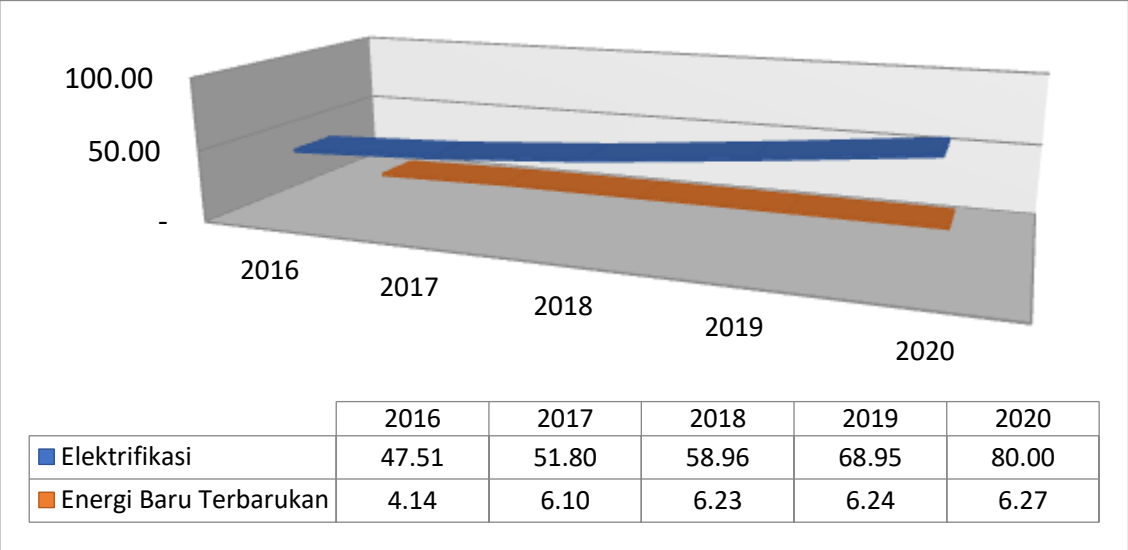
Jaringan listrik di Kabupaten Pesisir Barat dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Untuk memenuhi kebutuhan listrik, PT PLN telah melayani hampir seluruh ibukota Kecamatan dan hampir seluruh desa di Kabupaten Pesisir Barat. Salah satu potensi pembangkit listrik di Kabupaten Pesisir Barat adalah pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro hidro (PLTMH) yang terletak di Kecamatan Bangkunat, Pesisir Utara dan Lemong.

Tabel 2.122. Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Kabupaten Pesisir Barat

No	Kecamatan	Pekon	Potensi Produksi	Keterangan
1	Bangkunat	Tanjung Rejo	4 MW	Koperasi Bina Karya dan PT. Mara Makmur
2	Bengkunat	Way Ngambur	2.25 MW	-
3	Ngambur	Way Tembulih	2.25 MW	-
		Ulok Mukti	6.9 MW	-
4	Karya Penggawa	Way Simpang Kanan, Laay	4.57 MW	-
		Way Simpang Kiri, Laay	8.20 MW	-
5	Pesisir Utara	Way Simpang Balak	7.21 MW	-
		Way Simpang Lunik	3.81 MW	-
		Way Khua Pampang, Kota Karang	1.25 MW	-
6	Lemong	Way Malaya	6 MW	Tahap Usulan Perizinan
		Way Melesom	4.20 MW	-
		Way Halami	2.31 MW	-

Sumber : PT. PLN Rayon Lampung Barat, 2018

Gambar 2.60. Rasio Elektrifikasi dan Energi Baru Terbarukan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas PM dan PTSP, 2021

Pada pengembangan sektor energi di Kabupaten Pesisir Barar, baik dari sisi rasio elektrifikasi atau listrik dari PLN serta penggunaan energi baru terbarukan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data rasio elektrifikasi yang terus meningkat dari tahun 2016 (47,51%), tahun 2017 (51,80%), tahun 2018 (58,96%), tahun 2019 (68,95%) dan tahun 2020 telah mencapai (80,00%). Data ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi masyarakat untuk dapat menikmati layanan dari PLN. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat 4 (empat) pekon yang belum

mendapatkan fasilitasi listrik PLN, yaitu: (1) Pekon Bandar Dalam; (2) Pekon Way Haru; (3) Pekon Way Tiyas; dan (4) Pekon Siring Gading, keempat pekon dimaksud berada di Kecamatan Bangkumat.

Sementara itu disisi lainnya, yaitu penggunaan energi baru terbarukan oleh masyarakat juga meningkat. Hal ini menggambarkan kesadaran dari masyarakat untuk memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui, khususnya sinar matahari dan tenaga air. Berdasarkan data pada tahun 2016 (4,14%), tahun 2017 (6,10%), tahun 2018 (6,23%), tahun 2019 (6,24%) dan tahun 2020 dengan capaian mencapai 6,27%.

2.3.3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

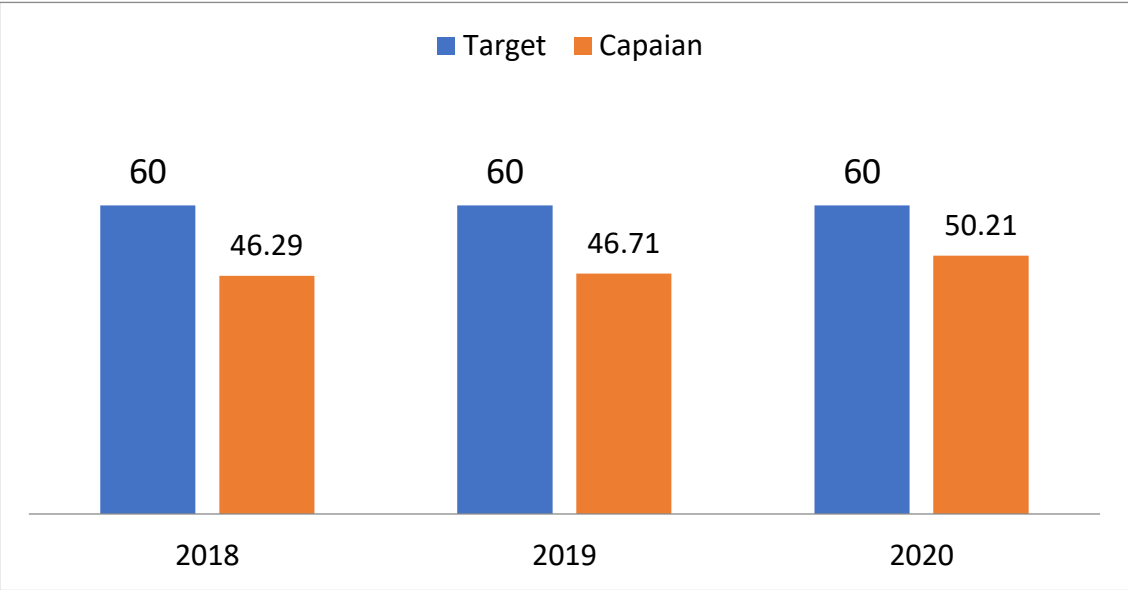
Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah Kabupaten bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

Tabel 2.123. Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Realisasi Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan oleh Pemda	Persen	80	80	80	80	100
Persentase Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai Standar Kualitas yang Baik	Persen	70,00	72,00	73,30	73,30	73.30
Persentase Dokumen Administrasi Perkantoran yang diselesaikan tepat waktu	Persen	72,50	72,50	75,00	80,00	80,00
Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Perda Bermasalah yang dibatalkan	Persen	0	0	0	0	0
Persentase Prolegda yang terealisasi	Persen	80	85	85	85	55
Nilai Sakip	Skor	-	-	C	CC	CC

Sumber : Sekretariat Daerah, 2021

Gambar 2.61. Nilai SAKIP Kabupaten Pesisir Barat 2018-2020



Sumber : Bappeda, 2021

Sekretariat Daerah yang melaksanakan unsur pendukung pemerintahan daerah dan fokus pada pelayanan kedinasan kepada kepala daerah dalam penetapan kinerja setidaknya melaksanakan sektor program/kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi keagamaan, keprotokolan pimpinan daerah, penyediaan sarana dan prasarana aparatur, penyusunan dokumen administrasi perkantoran termasuk penatausahaan kegiatan, penyusunan dokumen pelaporan daerah, hukum dan peraturan perundang-undangan daerah. Berdasarkan pada data tahun 2016-2019, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan secara konsisten pada angka 80,00-100%. Sementara itu untuk Kegiatan Keprotokolan kepada pimpinan daerah juga konsisten pada angka 100% (tahun 2016-2020).

Berikutnya untuk indikator Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai Standar Kualitas yang Baik berdasarkan pada data tahun 2016 sebanyak 70,00% dan tahun 2017 sebesar 72,00%. Berikutnya pada tahun 2018 capaian pada angka 73,30% dan tahun 2019 mencapai angka 73,30% dan tetap hingga tahun 2020. Belum optimalnya pencapaian indikator ini dikarenakan kebutuhan pendanaan untuk mencukupi sarana dan prasarana seluruh aparatur daerah dianggarkan secara bertahap.

Untuk indikator Dokumen Administrasi Perkantoran yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan data tahun 2016 dan 2017 tetap pada angka 72,50%, tahun 2018 meningkat menjadi 75,00% dan kembali naik pada tahun 2019 dan 2020 pada angka 80,00%. Lebih lanjut untuk Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi yang diselesaikan tepat waktu data tahun 2016-2020 konsisten pada pencapaian 100%.

Dari sisi pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan, Persentase Perda Bermasalah yang dibatalkan data dari tahun 2016-2020 konsisten pada capaian 0%. Angka ini dikarenakan berdasarkan pada data 2016-2020 belum ada perda yang dibatalkan dikarenakan bermasalah. Selanjutnya, untuk Persentase

Prolegda yang terealisasi pada tahun 2016 sebesar 80% dan mulai tahun 2017-2019 naik menjadi 85% dan turun pada tahun 2020 menjadi 55%.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat Daerah. Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh sekretaris dewan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.

Tabel 2.124. Pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Politik Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persen	80,00	85,00	87,00	90,00	90,00
Persentase Ranperda dibahas	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD, 2021

Sekretariat DPRD yang melaksanakan unsur staf pendukung pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya pada tahun 2016-2020 telah memenuhi target 100% indikator persentase ranperda dibahas bersama dengan pemerintah daerah. Sedangkan untuk indikator peningkatan peran dan fungsi politik lembaga DPRD dalam track positif, dimulai tahun 2016 dengan capaian 80%, tahun 2017 meningkat menjadi 85% dan tahun 2018 dengan 87%. Selanjutnya persentase mencapai 90% pada tahun 2019 dan bertahan diangka yang sama pada tahun 2020.

2.3.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Perencanaan daerah merupakan kewenangan dari kepala daerah dan merupakan unsur penunjang dalam proses pembangunan daerah. Kewenangan dari kepala daerah dalam perencanaan daerah setidaknya dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD. Berdasarkan pada dokumen perencanaan tersebut akan disusun dokumen penganggaran dan juga dokumen penunjang pembangunan lainnya.

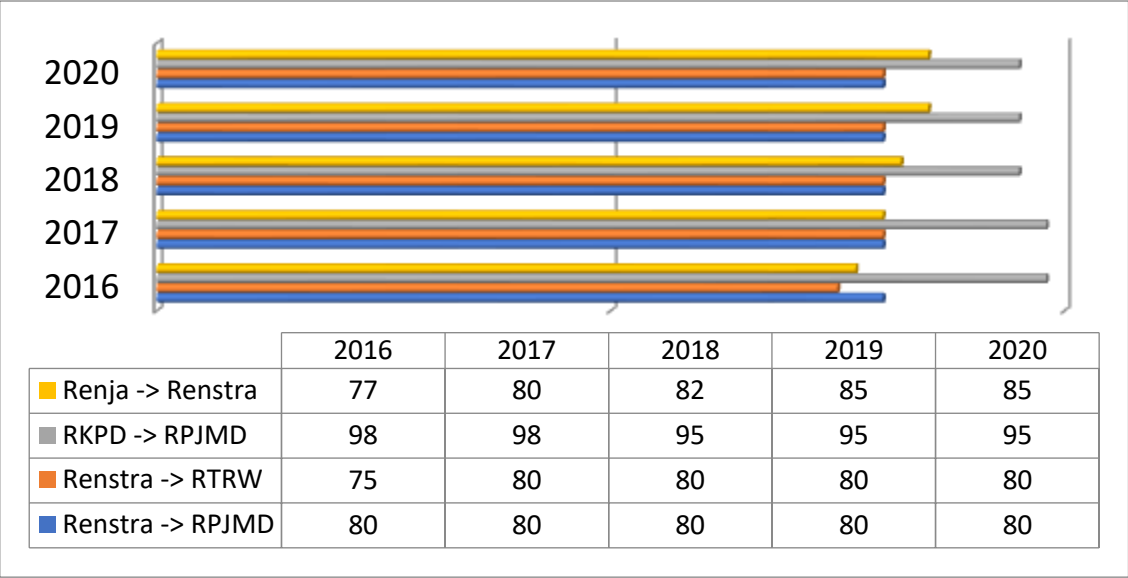
Perencanaan daerah yang optimal dan taat asas serta peraturan perundang-undangan sebagai salah satu syarat menjamin arah dan tujuan pembangunan daerah yang mengarah pada pencapaian target pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, perencanaan yang baik akan menghasilkan penganggaran yang proposional dan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2.125. Pencapaian Indikator Kinerja Perencanaan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang muatan Renstra-nya sesuai dengan RPJMD	Persen	80	80	80	80	80
Persentase Perangkat Daerah yang muatan Renstra-nya sesuai dengan RTRW Kabupaten	Persen	75	80	80	80	80
Tingkat Kesesuaian antara Muatan RKPD dengan RPJMD	Persen	98	98	95	95	95
Persentase Muatan Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD	Persen	77	80	82	85	85

Sumber : Bappeda, 2021

Gambar 2.62. Pencapaian Indikator Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Bappeda, 2021

Unsur penunjang perencanaan daerah dalam pencapaian target Perangkat Daerah yang muatan Renstra-nya sesuai dengan RPJMD dari tahun 2016-2020 telah mencapai 80%. Belum optimalnya nilai ini disebabkan karena sebagai daerah baru dan pertama kali memiliki RPJMD, kemampuan aparatur dalam menterjemahkan dan mengurai RPJMD ke dalam Renstra belum memadai. Berikutnya, Persentase Perangkat Daerah yang muatan Renstra-nya sesuai dengan RTRW Kabupaten pada tahun 2016 sebesar 75%, hal ini dikarenakan pada tahun 2016 Perda RTRW Kabupaten belum ditetapkan (materi Renstra menggunakan materi teknis RTRW). Selanjutnya pada tahun 2017-2020 telah mencapai 80%.

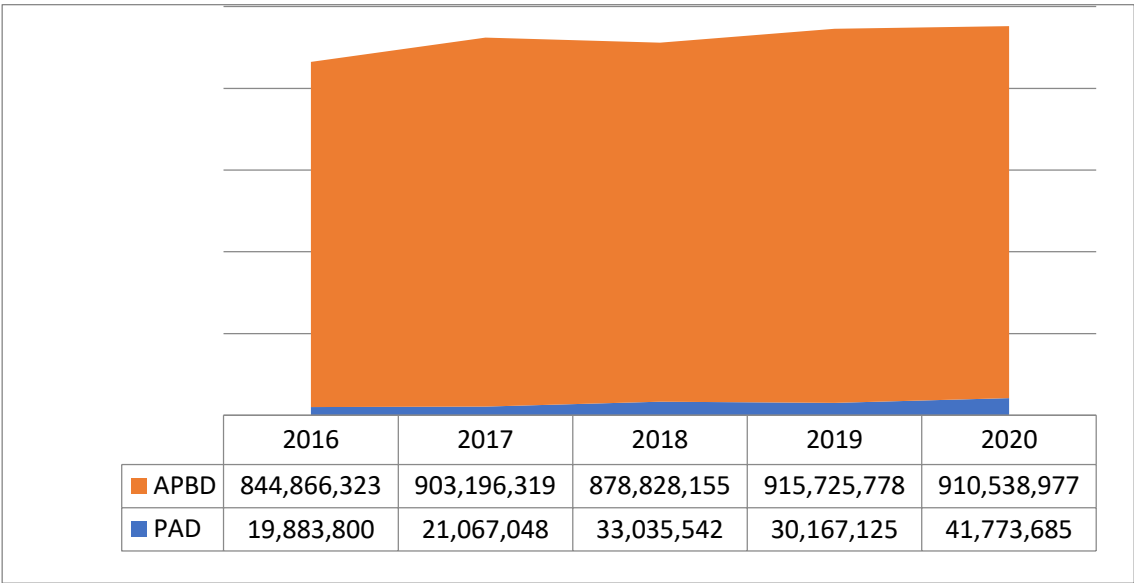
Selanjutnya, untuk Tingkat Kesesuaian antara Muatan RKPD dengan RPJMD secara umum konsisten pada angka 95-98%, hal ini berdasarkan pada data capaian tahun 2016 dan 2017 sebesar 98%. Angka ini turun pada tahun 2018-2020 yang berada pada angka 95%. Kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam menjaga konsistensi arah pembangunan.

Sementara itu untuk capaian Persentase Muatan Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD juga masih belum mencapai nilai optimal, berdasarkan pada data tahun 2016 capaian sebesar 77%, lalu pada tahun 2017 sebesar 80%. Lebih lanjut pada tahun 2018 capaian menjadi 82%. Pada data tahun 2019-2020 capaian sedikit meningkat menjadi 85%.

2. Keuangan

Keuangan daerah mencakup kewenangan daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diwujudkan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam mebiayai urusan-urusan rumah tanggaya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah.

Gambar 2.63. Persentase PAD terhadap APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)



Sumber : BPKAD, 2021

Kemampuan keuangan daerah erat kaitannya dengan bagaimana daerah mampu membiayai pengeluarannya sendiri. Dalam hal ini adalah bagaimana daerah bisa terus meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pada data tahun 2016-2020 nilai persentase PAD terhadap APBD terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 (2,35%), tahun 2017 (2.33%), tahun 2018 (3,76%), tahun 2019 (3,29%) dan tahun 2020 (4,59%).

Selanjutnya bila melihat dari perhitungan persentase Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah atau dari sisi Pendapatan Daerah akan didapatkan data peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 rasio sebesar 1,05%. Angka ini meningkat menjadi 2,80% pada tahun 2016. Berikutnya pada tahun 2017 menjadi 5,27%, namun kembali turun pada angka 3,03% pada tahun 2018. Rasio PAD kembali meningkat pada tahun 2019 diangka 3,53%. Selanjutnya pada tahun 2020, rasio PAD mengalami penurunan (0,88%) menjadi hanya 2,65%.

Secara persentase atau rasio nilai PAD terlihat terus mengalami peningkatan, namun demikian bila melihat dari sisi nominal angka PAD masih relatif kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan belanja daerah. Diperlukan usaha lebih giat dalam optimalisasi peningkatan nilai PAD pada tahun mendatang.

Tabel 2.126. Pencapaian Indikator Kinerja Keuangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK atas LKPD	nilai	<i>Disclaimer</i>	WDP	WDP	WTP	WTP
Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Persen	2,80	5,27	3,03	3,53	2.65

Sumber : Bapenda, 2021

Opini BPK atas LKPD sebagai indikator yang menunjukkan nilai akuntabilitas daerah dalam melakukan penata usahaan keuangan daerah pada tahun 2019 dan tahun 2020 telah berhasil mencapai WTP, yang mana sebelumnya pada tahun 2015 dan 2016 dengan predikat disclaimer. Pada tahun 2017 dan 2018 dengan predikat WDP. Pencapaian nilai WTP ini wajib dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang.

3. Kepegawaian

Unsur penunjang kepegawaian daerah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dari ASN daerah dan dilakukan dengan suatu sistem manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian merupakan bagian dari hukum administrasi dan manajemen. Manajemen kepegawaian mendasarkan fungsi pada serangkaian upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat profesionalime yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, dan penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Manajemen pegawai negeri sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Tabel 2.127. Pencapaian Indikator Kinerja Kepegawaian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	23	34	34	32	33
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	113	139	149	146	152
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1.241	1.146	1.231	1.610	1.559

Sumber : BKD, 2021

Berdasarkan pada indikator capaian kinerja, jumlah JPTP terus mengalami peningkatan, dimulai pada tahun 2016 sebanyak 23 orang dan menjadi 33 orang pejabat pada tahun 2020. Berikutnya pada indikator jumlah jabatan administrasi juga mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sebanyak 113 jabatan, 2017 139 jabatan, tahun 2018 sebanyak 149 jabatan. Pada tahun 2019 jumlah jabatan administrasi menjadi 146 dan terakhir pada tahun 2020 sebanyak 152 jabatan. Sementara itu untuk posisi jabatan fungsional pada tahun 2016 sebanyak 1.241 jabatan dan pada tahun 2020 sebanyak 1.559 jabatan fungsional. Persentase Instansi yang menerapkan kebijakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Kabupaten Pesisir Barat, secara umum hingga tahun 2020 belum mampu mencapai angka 100%. Data capaian pada tahun 2016 hingga 2020 sebesar 90%.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Unsur penunjang pendidikan dan pelatihan terhadap ASN daerah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dari ASN daerah dan dilakukan dengan suatu sistem manajemen kepegawaian terstruktur dan terbuka. Pendidikan dan pelatihan dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi dari ASN dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan aparatur hingga pada penegakan disiplin aparatur.

Tabel 2.128. Pencapaian Indikator Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Persen	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	38.00	71.00	81.00	92.00	15.00
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	38.00	31.00	31.00	17.00	15.00

Sumber : BKD, 2021

Berdasarkan pada indikator capaian kinerja, jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2016 menuju tahun 2020 mengalami penurunan. Capaian pada tahun 2016 sebesar 38% meningkat menjadi 71% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 angka ini menjadi 81% dan 92% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 hanya 15% ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal. Penurunan capaian kinerja juga terjadi pada jumlah pejabat yang mendapatkan pelatihan, dari tahun 2016 yang mencapai 38% menurun pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 31%. Angka capaian ini kembali turun pada tahun 2019 menjadi 17%. Pada tahun 2020 kembali turun menjadi hanya 15%. Penurunan capaian ini tentu saja menjadi catatan bagi pengembangan ASN di Kabupaten Pesisir Barat.

5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan daerah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis baik yang bersifat epistemologi maupun bersifat empiris dalam memperoleh informasi, data dan atau pembuktian terhadap kebenaran yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Peran Litbang dalam tata kelola pemerintahan adalah mengidentifikasi setiap permasalahan baik yang bersifat aktual maupun prediktif yang berkembang di daerah. Penelitian dan pengembangan daerah saat ini erat kaitannya dengan inovasi daerah.

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi di pemerintahan daerah dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Inovasi pelayanan publik juga merupakan bentuk dari inovasi di pemerintahan daerah yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik, inovasi jenis dan bentuk barang. Selain itu, inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik sebagai cerminan dari reformasi birokrasi tentunya menjadi harapan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Keberadaan birokrasi yang diharapkan diantaranya harus memiliki kinerja yang baik didasarkan pada perwujudan perilaku aparatur birokrasi yang berintegritas, profesional, dinamis dan inovatif. Hal ini diperlukan karena dinamika perubahan lingkungan serta tantangan lainnya menuntut adanya responsibilitas yang tinggi dari Pemerintah. Salah satu isu nasional terkait dengan penyelenggaraan birokrasi adalah masalah akuntabilitas keuangan negara dan daerah, dimana kualitasnya masih perlu banyak pembenahan termasuk dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, harapan ideal dari setiap pemerintah daerah mengharapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah menyusun roadmap *roadmap* SIDA Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021 sebagai acuan pengembangan potensi unggulan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2016 sebagai hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Lampung. Essensi dari isi roadmap SIDA ini merupakan peta rencana pendekatan pembangunan ekonomi melalui penerapan kerangka sistem inovasi. Dokumen roadmap ini menjadi acuan bagi seluruh program dan kegiatan-kegiatan kolaboratif di Kabupaten Pesisir Barat yang melibatkan berbagai pihak dengan peran dan fungsi masing-masing.

Selanjutnya guna mempermudah dan menajamkan pelaksanaan evaluasi pada *roadmap* SIDA, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja sebagai obyek pengukuran dari evaluasi pelaksanaan inovasi tersebut, yaitu :

1. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah
2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian pengembangan khususnya dalam hal inovasi daerah, sebagaimana yang tertuang dalam *roadmap* SIDA di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan berbagai program kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan inovasi diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dengan stakeholder terkait.
2. Melakukan dan menjalin komunikasi yang intensif dengan beberapa daerah khususnya daerah yang telah berhasil mendapatkan nominasi penilaian inovasi terbaik di tingkat nasional.
3. Menjalni komunikasi dengan Balitbang Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ikut mulai berperan serta dalam ajang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2020.
4. Ikut berpartisipasi pada Lomba Inovasi Daerah Dalam Penyiapan dan Rencana Pelaksanaan Tatanan Kehidupan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kemendagri Republik Indonesia, dan telah berhasil meraih juara 3 pada Sektor Pasar Tradisional (Pasar Tradisional C-19).
5. Pada ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di mana Kabupaten Pesisir Barat telah berhasil menyampaikan dan melaporkan sebanyak 57 inovasi daerah di mana 13 diantaranya merupakan inovasi tata kelola pemerintahan, 30 inovasi pelayanan publik dan 14 inovasi bentuk lainnya, dan telah berhasil meraih predikat sebagai Daerah Terinovatif pada Klaster Daerah Tertinggal.

Tabel 2.129. Pencapaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	n/a	100	66.70	85.70	85.70
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	80	80	80	80	80
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	n/a	100	100	100	100

Sumber : Bappeda, 2021

Kelitbangan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan penguatan kelembagaan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan fungsi kelitbangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dalam menyediakan dokumen/kajian untuk materi penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Pesisir Barat melalui Bappeda dari tahun 2016-2020 telah melakukan penyusun dokumen kelitbangan sebagai berikut:

Tabel 2.130. Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

No	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kajian dan Basic Design Jalan Alternatif Lintas Barat Kabupaten Pesisir Barat	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Updating Data Potensi Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat	RAD Program Pemberantasan Korupsi	RAD Sustainable Development Goals
2	Masterplan Kawasan Wisata Tanjung Setia	Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP)	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RP3KP	RAD Sustainable Development Goals	RAD Pangan dan Gizi
3	Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pesisir Barat	Kajian adat istiadat dan budaya masyarakat krui	Pengembangan Master Plan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Pesisir Barat	RAD Pangan dan Gizi	Kajian Potensi Pengembangan Energi Baru Terbarukan Kabupaten Pesisir Barat
4	Studi Kelayakan (Feasibility Study) Perkantoran Pemda Kabupaten Pesisir Barat	RAD Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Indikator Kesejahteraan Kabupaten Pesisir Barat	Updating Data Potensi Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat	Rencana Induk Pengembangan Wilayah Kawasan Bandara M. Taufik Kiemas

No	2016	2017	2018	2019	2020
5	Indikator Ekonomi Daerah	Masterplan Kota Krui		Indeks Rasio Gini Kabupaten Pesisir Barat	Masterplan e Government Kabupaten Pesisir Barat
6	Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Pesisir Barat	Masterplan Pariwisata Pulau Pisang	Indeks Rasio Gini Kabupaten Pesisir Barat	Masterplan Agropolitan Kabupaten Pesisir Barat	Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Pesisir Barat
7	Updating data ekonomi dan promosi, publikasi potensi investasi daerah	RAD Program Pemberantasan Korupsi	Roadmap Inflasi Kabupaten Pesisir Barat	Grand Design Kependudukan Kabupaten Pesisir Barat	Masterplan Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat
8	Rencana Induk (Master Plan) Minapolitan Kabupaten Pesisir Barat	RAD Sustainable Developments Goals	Updating Informasi dan Profil Daerah	Roadmap Potensi Bencana dan Strategi Peningkatan Ketahanan Bencana	Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Kabupaten Pesisir Barat
9	RAD Program Pemberantasan Korupsi			Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan Kabupaten Pesisir Barat	Updating Data Potensi Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat
10	RAD Sustainable Developments Goals kabupaten pesisir barat			Indikator Kesejahteraan Kabupaten Pesisir Barat	
11	Update Pendataan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat			Indeks Pembangunan manusia Kabupaten Pesisir Barat	
12	Analisis Situasi Ibu dan Anak			Peta Potensi Investasi Kabupaten Pesisir Barat	
13	RAD Pangan dan Gizi			Dokumen Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan	
14				Survey Harga Konsumen Pengendalian Inflasi	

Sumber : Bappeda, 2021

2.3.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten daerah dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah.

Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. Oleh karena itu, tugas dan fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat.

Tabel 2.131. Pencapaian Indikator Kinerja Pengawasan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Skor Capaian Penyelenggaraan SPIP	nilai	---	---	56,76	56,76	56,76
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS	Persen	80	84	87	90	90
Skor LAKIP/LKJ	nilai	-	-	C	CC	CC

Sumber : Inspektorat, 2021

Untuk indikator Skor capaian SPIP, di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2016-2017 belum dilakukan penilaian oleh BPKP Provinsi Lampung, sedangkan untuk penilaian tahun 2018-2020 mendapatkan nilai skor 56,76. Selanjutnya untuk indikator Skor Lakip/LKJ yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, Kabupaten Pesisir Barat mendapatkan penilaian C pada tahun 2018. Skor ini naik pada tahun 2019-2020 dengan nilai CC. Penilaian pada tahun 2016 dan 2017 belum dilaksanakan.

Selanjutnya pada indikator penurunan pelanggaran disiplin PNS, terdapat kenaikan dari tahun ke tahun, dengan data awal pada tahun 2016 sebesar 80% dan menjadi 84% pada tahun 2017. Lebih lanjut angka ini naik menjadi 87% pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 90% pada tahun 2019 dan 2020.

2.3.6. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan ecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengertian kecamatan memiliki konteks 'kewilayahan'.

Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah), berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Jadi berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Sebagai perangkat daerah, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di Wilayah Kecamatan

Tabel 2.132. Pencapaian Indikator Kinerja Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan	nilai	65,00	70,00	72,50	75,00	75.00

Sumber : Sekretariat Daerah, 2021

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini di kecamatan. Tujuan dari pengukuran IKM Kecamatan ini adalah sebagai tolok ukur/evaluasi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pada tingkatan kecamatan apakah sudah semakin baik atau tidak.

Berdasarkan pada data tahun 2016 nilai IKM sebesar 65%, angka ini membaik pada tahun 2017 di angka 70,00% dan 72,50% pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 kembali meningkat di angka 75,00% dan bertahan dengan angka yang sama 75,00% pada tahun 2020.

2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Daerah selain berstatus sebagai daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Bupati Pesisir Barat meliputi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman aerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Tabel 2.133. Pencapaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya Persentase Partisipasi Politik masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	Persen	n/a	n/a	68,97	80,00	84.08
Persentase Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas organisasi	Persen	35,00	45,00	65,00	70,00	70.00

Sumber : Badan Kesbangpol, 2021

Berdasarkan pada data tahun 2016 dan 2017 partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan pemilukada tidak dihitung dikarenakan tidak ada pelaksanaan pemilu dan/atau pemilukada. Selanjutnya pada tahun 2018 yang dilaksanakan Pemilukada Gubernur Lampung mencapai angka 68,97%. Berikutnya pada tahun 2019 yang dilaksanaksan Pemilu Pilpres dan Pileg angka capaian adalah 80%. Angka ini naik menjadi 84.08% pada saat pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2020.

Untuk indikator persentase Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas oleh pemerintah daerah data tahun 2016 (35%). tahun 2017 (45%), tahun 2018 (65%) dan tahun 2019 (70%). Angka capaian ini bertahan pada tahun 2020 di (70%).

Beberapa data pendukung dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut:

Tabel 2.134. Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Nama Ormas / LSM
1	Pesisir Tengah	1. MPC Pemuda Pancasila 2. Dewan Dakwah Islamiah Indonesia 3. DPD Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Pesisir Barat 4. Kumpulan Masyarakat Pesisir Barat (KUMPAR) 5. Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Kabupaten Pesisir Barat 6. Palang Merah Indonesia (PMI) 7. Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) 8. Forum Peduli Pembangunan Krui (FP2K) 9. Lembaga Independent Pemantau Anggaran Negara (LIPAN) 10. Development Committee 11. Marga Pasar Krui 12. SALIMAH 13. NASYIATUL AISYIAH 14. Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) 15. Lumbung Informasi Tepat Akurat (LITA) 16. Aliansi Jurnalistik Online (AJOI) 17. Persaudaraan Setia Hati Terate 18. PUJA KESUMA 19. Radio Antar Penduduk Indonesia 20. Komunitas Trail Adventure Krui 21. Lembaga Pelindungan Anak (LPA) 22. Barakuda Krui 23. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) 24. Himpunan Pengusaha Mikro Dan Kecil (HIKMIKINDO) 25. Himpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia 26. Kerta Wredatama Republik Indonesia 27. Dewan Pimpinan Cabang Komite Wartawan Reformasi Indonesia (DPC. KWRI) 28. Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (GEPAK) 29. DPC. Himpunan Pramuwisata Indonesia 30. Nahdatul Ulama 31. Ikatan Dokter Indonesia 32. Pimpinan Daerah Muhammadiyah

		33. Perkumpulan Keluarga Anggota Dewan (PEKAD) 34. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) 35. Persatuan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/POLRI (FKPPI)
2	Way Krui	1. Ikatan Keluarga Besar Suwiji (IKBS) 2. DPD Pembela Kesatuan Tanah Air (PEKAT) Indonesia Bersatu 3. Poskoperjuangan Rakyat (POSPERA) 4. Kerukunan Lebuai Pesisir Lampung (KLPL) 5. Purna Paskibraka Indonesia 6. DPC. SPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) 7. Ikatan Keluarga Purnabakti Guru (IKPG) 8. Pembela Kesatuan Tanah Air Bersatu 9. Laskar Merah Putih Perjuangan
3	Karya Penggawa	1. Persatuan Perangkat Desa Indonesia 2. Peguyuban Rasa Sosial Jawa (PRASOJO) 3. Team Operasional Penyelamatan Aset Negara RI (TOPAN)
4	Krui Selatan	1. Pejuang Siliwangi Indonesia (PSI) 2. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 3. DPC.LAN 4. Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan
5	Pesisir Selatan	1. DPN . Garuda Bakti Nusantara 2. Forum Pers Independent Indonesia (FPPII) 3. Perkumpulan Guai Minak Muakhi Pesisir Barat (GM2PB) 4. Pimpinan Majelis Daerah Korps Alumni 5. Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Pesisir Barat Lampung
6	Ngambur	1. Brantas Narkotika dan Maksiat (BNM) RI 2. Aliansi Putra Lampung (ASPAL) 3. Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP)
7	Lemong	-
8	Pesisir Utara	-
9	Pulau Pisang	1. Forum Komunikasi Masyarakat Pulau Pisang (FKMPP)
10	Bangkunat	-
11	Ngaras	-

Sumber : Badan Kesbangpol , 2021

Aktivitas keagamaan di Kabupaten Pesisir Barat banyak diwarnai oleh kehadiran ulama/penceramah dan guru ngaji dalam menyiarkan dan mendakwahkan nilai-nilai agama kepada masyarakat. Berikut data nama-nama ulama/penceramah dan jumlah guru ngaji di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.135. Data Ulama/Penceramah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Ulama/Penceramah	Guru Ngaji
1	Pesisir Tengah	22	42
2	Lemong	12	53
3	Karya Penggawa	8	10
4	Pulau Pisang	3	8
5	Way Krui	n/a	19
6	Krui Selatan	n/a	37
7	Ngambur	n/a	23
8	Ngaras	13	31

9	Bangkunat	21	55
10	Pesisir Utara	n/a	
11	Pesisir Selatan	15	
	Jumlah	94	278

Sumber : Kantor Kemenag Kabupaten Pesisir Barat, 2020 (data diolah)

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. PDRB dan PDRB Perkapita

1) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)

Pada Tahun 2014 PDRB ADHB sebesar 2.921,38 (dalam miliar rupiah) meningkat 13% bila dibandingkan nilai tahun 2013. Berikutnya pada tahun 2015 meningkat sebesar 11% menjadi sebesar 3.231,80 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2016 angka PDRB ADHB sebesar 3.615,62 (dalam miliar rupiah) yang dihitung mengalami kenaikan sebesar 10% dari tahun 2015. Pada tahun 2017 PDRB ADHB sebesar 3.947,58 (dalam miliar rupiah) atau mengalami peningkatan 10%. Selanjutnya tahun 2018 PDRB ADHB sebesar 4.282,38 (dalam miliar rupiah) dinilai mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 9%. Pada tahun 2019 PDRB ADHB mencapai 4.619,17 (dalam miliar rupiah) dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 4.628,78 (dalam miliar rupiah).

Penyumbang tertinggi PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat adalah disektor pertanian dengan nilai PDRB tahun 2014 sebesar 1.549,92 (dalam miliar rupiah) atau naik 12% dari tahun 2013, tahun 2015 sebesar 1.702,50 (dalam miliar rupiah) atau naik 10%, dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 1.893,72 (dalam miliar rupiah) atau naik sebesar 4,84%. Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian pada tahun 2017 sebesar 3,15% atau menjadikan nilai PDRB ADHB Pertanian menjadi sebesar 2.034,80 (dalam miliar rupiah), lalu pada tahun 2018 menjadi sebesar 2.183,97 (dalam juta rupiah) atau naik 2,99% bila dibandingkan pada tahun 2017. Pada tahun 2019 nilai sektor ini pada tahun 2019 menjadi 2.286,21 (dalam miliar rupiah) dengan pertumbuhan 1,39% dan naik kembali menjadi 2.326,63 (dalam miliar rupiah) pada tahun 2020 dengan perhitungan pertumbuhan 0,01%. Secara umum perkembangan nilai pada sektor pertanian ini terus mengalami penurunan.

Penurunan laju pertumbuhan sektor pertanian ini di pengaruhi oleh iklim/musim kemarau yang mengakibatkan menurunnya produksi sektor pertanian juga di pengaruhi oleh tidak stabilnya perekonomian dan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (penurunan kondisi ekonomi global) yang mempengaruhi harga pupuk dan obat-obatan pertanian. Namun demikian, penurunan ini dibarengi dengan peningkatan pada sektor-sektor lainnya. Sehingga nilai PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat tahun 2014-2020 secara umum terus meningkat dengan rata-rata nilai laju pertumbuhan sebesar 5,00% pertahun.

Pada level kedua penyumbang PDRB Tahun 2014 sampai dengan 2020 tetap sama yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta sektor Industri Pengolahan tingginya sektor ini sebagai penyumbang PDRB terbesar di pengaruhi oleh meningkatnya pemenuhan kebutuhan sekunder dari masyarakat Pesisir Barat. Laju pertumbuhan pada sektor ini bila diratakan berada pada angka 10,6%. Tahun 2014 PDRB ADHB Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki nilai sebesar 327,12 (dalam miliar rupiah) meningkat 7% bila dibandingkan nilai tahun 2013. Berikutnya pada tahun 2015 meningkat sebesar 8% menjadi sebesar 353,90 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2016 sebesar 395,10 (dalam miliar rupiah) yang dihitung mengalami kenaikan sebesar 2,27% dari tahun 2015. Pada tahun 2017 berada pada angka 436,00 (dalam miliar rupiah) atau mengalami peningkatan 7,01%. Selanjutnya tahun 2018 PDRB ADHB sektor ini sebesar 547,33 (dalam miliar rupiah) dinilai mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 7,86%.

Data pada tahun 2019 nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran kembali meningkat sebesar 9,41% dengan nilai 547,33 (dalam miliar rupiah), namun pada tahun 2020 angka ini terkoreksi menjadi 533,81 (dalam miliar rupiah) atau dengan capaian laju sebesar (3,95%).

Tabel 2.136. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Pesisir Barat Tahun 2016- 2020 (dalam miliar rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.893,72	2.034,80	2.183,97	2.286,21	2.326,63
B	Pertambangan dan Penggalian	200,77	227,92	248,19	262,93	261,02
C	Industri Pengolahan	193,71	202,40	208,79	207,86	184,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,31	0,44	0,57	0,75	0,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,99	1,99	2,15	2,19	2,31
F	Konstruksi	185,31	220,74	252,84	328,72	320,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	395,10	436,00	483,81	547,33	533,81
H	Transportasi dan Pergudangan	37,15	40,63	43,35	46,88	45,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	59,38	66,21	73,95	82,70	79,29
J	Informasi dan Komunikasi	77,44	87,28	95,74	101,81	110,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	54,18	58,75	62,19	65,06	64,95
L	Real Estate	129,06	146,44	160,18	172,73	169,55
M,N	Jasa Perusahaan	5,43	5,90	6,30	6,94	7,01

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	181,22	199,81	219,47	238,69	244,47
P	Jasa Pendidikan	127,47	136,20	150,63	168,28	176,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	38,77	41,89	45,69	50,37	55,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	34,63	40,19	44,56	49,71	47,09
	PDRB ADHB	3.615,62	3.947,58	4.282,38	4.619,17	4.628,78

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat PBDA 2020

*angka sementara

**angka sangat sementara

Laju pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku selama tiga tahun terakhir cenderung berfluktuasi, hampir disemua sektor. Walaupun PDRB dari tahun ketahun cenderung naik tetapi pada lajunya terlihat menurun. Hal ini di pengaruhi banyak faktor terutama faktor-faktor eksternal seperti kondisi politik nasional dan regional. Walaupun kondisi laju pertumbuhan berfluktuasi, namun dalam kurun tiga tahun terakhir tidak ada kecenderungan pergeseran peran. Pertanian dan perdagangan dan jasa tetap menjadi primadona sebagai penyumbang PDRB.

Selanjutnya, bila melihat pada PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014-2018 sejalan dengan kondisi perekonomian daerah yang terus meningkat. Penyumbang persentase terbesar selama kurun waktu 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan dengan komponen pengeluaran adalah (i) Konsumsi Rumah Tangga; (ii) PMTB; (iii) Net Ekspor Barang dan Jasa (iv) Konsumsi Pemerintahan; (v) Konsumsi LNPRT dan (vi) Perubahan Inventori.

Konsumsi Pemerintah masih lebih kecil bila dibandingkan dengan Konsumsi rumah tangga, dengan perbandingan ± 2.000,00–3.000,00 (dalam miliar rupiah). Konsumsi pemerintah pada tahun 2016 sebesar 129,85 (dalam miliar rupiah) dan naik menjadi 134,12 (dalam miliar rupiah) pada tahun 2017. Berikutnya pada tahun 2018 angka kembali meningkat menjadi 140,37 (dalam miliar rupiah) dan 147,13 (dalam miliar rupiah) pada tahun 2019. Berikutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan minor dan berada pada angka 148,14 (dalam miiar rupiah).

Secara umum, PDRB Atas Dasar pengeluaran dari tahun 2016-2020 rata-rata berada pada kisaran angka 4.000,00 (dalam miliar rupih), perhitungan ini berdasarkan pada data tahun 2020 yang berada pada angka 3.615,62 (dalam miliar rupiah), kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 3.947,58 (dalam miliar rupih). Pada tahun 2018 meningkat ke angka 4.282,38 (dalam miliar rupiah) dan di tahun 2019 masih terus meningkat menjadi sebesar 4.619,17 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2020 tetap meningkat namun dengan margin yang tidak terlalu besar sehingga berada pada angka 4.628,77 (dalam miliar rupiah).

Tabel 2.137. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Pesisir Barat Tahun 2016- 2020 (dalam miliar rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Konsumsi Rumah Tangga	2.496,79	2.753,86	3.025,92	3.276,24	3.276,47
2	Konsumsi LNPRT	56,19	62,55	76,32	84,65	87,02
3	Konsumsi Pemerintah	129,85	134,12	140,37	147,13	148,14
4	PMTB	73,67	83,18	93,58	1.047,56	1.017,88
5	Perubahan Inventori	74,20	61,59	63,78	18,96	10,78
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	121,85	103,59	401,34	446,13	884,72
	Total PDRB	3.615,62	3.947,58	4.282,38	4.619,17	4.628,77

Sumber : BPS Pesisir Barat, PBDA 2020

*angka sementara

**angka sangat sementara

2) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)

Secara konstan selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2019 PDRB Kabupaten Pesisir Barat fluktuatif pada beberapa sektor terjadi penurunan dan kenaikan dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 5,00-5,30%. Pada tahun 2014 PDRB ADHK sebesar 2.402,31 (dalam miliar rupiah) meningkat 5,62% bila dibandingkan nilai tahun 2013. Berikutnya pada tahun 2015 meningkat sebesar 4,94% menjadi sebesar 2.520,88 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2016 angka PDRB ADHK sebesar 2.654,54 (dalam miliar rupiah) yang dihitung mengalami kenaikan sebesar 5,30% dari tahun 2015. Pada tahun 2017 PDRB ADHK sebesar 2.795,95 (dalam miliar rupiah) atau mengalami peningkatan 5,33%. Selanjutnya tahun 2018 PDRB ADHK sebesar 2.944,88 (dalam miliar rupiah) dinilai mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 5,35%. Pada tahun 2019 pertumbuhan mengalami peningkatan menjadi 5,37% dengan nilai PDRB ADHB mencapai 3.103,00 (dalam miliar rupiah). Baru pada tahun 2020 pertumbuhan mengalami penurunan menjadi (-1,17%) dengan nilai 3.066, 66 (dalam miliar rupiah).

Tabel 2.138. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (dalam miliar rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.399,12	1.443,17	1.486,37	1.507,06	1.507,16
B	Pertambangan dan Penggalian	136,17	149,74	161,22	170,48	166,24
C	Industri Pengolahan	141,81	144,94	147,17	145,23	126,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0	0	0	0	0

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,33	1,33	1,41	1,44	1,51
F	Konstruksi	135,58	155,14	176,62	226,95	222,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	313,63	335,63	362,01	396,09	380,44
H	Transportasi dan Pergudangan					
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi	56,70	63,39	68,87	72,82	79,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	39,40	40,94	41,86	43,11	42,23
L	Real Estate	101,08	108,39	115,06	122,25	117,61
M,N	Jasa Perusahaan	3,66	3,81	3,96	4,29	4,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	117,59	125,70	136,80	111,35	115,90
P	Jasa Pendidikan	89,54	94,20	102,62	111,35	115,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28,24	29,88	32,33	25,11	38,45
R,S,T,U	Jasa lainnya	25,27	28,42	31,25	33,81	32,29
	PDRB ADHK	2.654,54	2.795,95	2.944,88	3.103,00	3.066,66

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, PBDA 2020

*angka sementara

**angka sangat sementara

Berikutnya disampaikan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.139. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (dalam miliar rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Konsumsi Rumah Tangga	1.894,41	2.007,42	2.120,52	2.231,65	2.190,38
2	Konsumsi LNPRT	38,19	40,86	47,14	51,49	51,89

3	Konsumsi Pemerintahan	93,28	93,75	95,70	98,37	96,93
4	PMTB	570,75	605,47	654,28	712,75	670,11
5	Perubahan Inventori	27,37	36,79	27,13	8,48	1,43
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	30,54	11,66	85,82	23,78	43,01
	Total PDRB	2654,54	2.795,95	2.944,88	3.103,00	3.066,65

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, PBDA 2020

*angka sementara

**angka sangat sementara

3) PDRB Perkapita

Jika dilihat dari jumlah PDRB Perkapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesisir Barat mengalami pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2014 adalah 2.921,38 (dalam miliar rupiah) dengan nilai Pendapatan Perkapita (PPK) 19.68 (dalam miliar rupiah) lalu pada tahun 2015 PPK sebesar 21.56 (dalam miliar rupiah) atau naik 3,90% dengan nilai PDRB ADHB 3.231,80. Berikutnya pada tahun 2016 di nilai naik menjadi 3.615,62 (dalam miliar rupiah) atau naik 4,33% dengan PPK 23.90 (dalam miliar rupiah) dan pada tahun 2017 menjadi 25.88 (dalam miliar rupiah) atau naik sebesar 4,47% dengan nilai PDRB 3.947,58 (dalam miliar rupiah).

Selanjutnya pada tahun 2018 menjadi sebesar 27.85 (dalam miliar rupiah) atau naik 4,52% bila dibandingkan dengan tahun 2017 dengan nilai PDRB 4.282,38 (dalam miliar rupiah). Pada tahun 2019 jumlah PDRB ADHB senilai 4.619,17 (dalam miliar rupiah) dan nilai PPK tercatat 29.82 (dalam miliar rupiah). Perhitungan PPK pada tahun 2020 adalah 28.45 (dalam miliar rupiah) dengan nilai PDRB ADHB sebesar 4.628,78 (dalam miliar rupiah). Kenaikan pada tahun berikutnya diproyeksikan stabil, hal ini dikarenakan melihat tantangan perekonomian nasional dan provinsi yang semakin berat. Namun demikian, optimisme akan terjadinya pertumbuhan ekonomi juga masih diharapkan.

Tabel 2.140. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Pesisir Baratm Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)

Tahun	PDRB ADHB	Jumlah Penduduk (berdasarkan BPS)	PDRB Perkapita (PPK)
2016	3,615.62	151,288	23.90
2017	3,947.58	152,529	25.88
2018	4,282.38	153,743	27.85
2019*	4,619.17	154,895	29.82
2020**	4,628.78	162,697	28.45

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, PBDA 2020

*angka sementara

**angka sangat sementara

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a) Perkembangan Konektivitas Wilayah

Indikator utama pelaksanaan pembangunan dalam pengembangan konektivitas suatu wilayah adalah terwujudnya kelancaran dan keselamatan transportasi baik angkutan penumpang maupun barang. Untuk mencapai sasaran indikator tersebut beberapa upaya telah dilaksanakan. Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran dan keselamatan lalu-lintas angkutan penumpang dan barang antara lain adalah meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan.

Kemudian, salah satu keunggulan Kabupaten Pesisir Barat adalah memiliki ketersediaan Bandar Udara sebagai salah satu pendukung transportrasi udara menuju Kabupaten Pesisir Barat dan wilayah sekitar. Pada Bulan November 2016 telah dilaksanakan serah terima aset Bandar Udara M. Taufik Kiemas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Panjang run way saat Ini adalah 1.700 meter dan lebar 23 meter, serta apron yang ada pada Bandara berukuran 91 X 55 meter dengan kapasitas untuk 2 (dua) pesawat. Mulai tahun 2019, Maskapai Wings Air telah membuka jalur penerbangan Krui-Bandar Lampung. Diharapkan hal ini dapat diikuti oleh maskapai lainnya.

Untuk fasilitas Bandara Muhammad Taufiq Kiemas yang ada sekarang ini adalah sebagai berikut:

- o Gedung Terminal Luas 400 M2, Kapasitas 20 Penumpang.
- o Kantor Bandara
- o Power House
- o Rumah Pompa Air
- o Pos Keamanan
- o Operasial Housing

Berikut adalah akses lokasi Bandar Udara M. Taufik Kiemas, Kabupaten Pesisir Barat

Tabel 2.141. Akses Bandara M. Taufik Kemas Kabupaten Pesisir Barat

No	Menuju Lokasi	Jarak (Km)
1	Tanjung Setia	± 29,5
2	Labuhan Jukung	± 3
3	Pasar Krui	± 3,8
4	Kantor Bupati Pesisir Barat	± 3,6
5	Liwa	±35,8
6	Kota Agung	±156,3
7	Kaur	±126,4
8	Bandar Lampung (Via Liwa)	± 275
9	Bandar Lampung (Via Kota Agung)	± 247,8
10	Bandar Udara Radin Intan Ii (Via Liwa)	± 243

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Tabel 2.142. Fasilitas Bandara M. Taufik Kemas Kabupaten Pesisir Barat

No	Fasilitas	Keterangan
1	Panjang Landasan	1.700 m X 23 m
2	Apron	91 m X 55 m
3	Jalur Taksi (Taxy Way)	98 m X 18 m
4	Ruang Istirahat (Rest Area)	90 m X 46 m
5	Jalan akses Bandara Seray	1.800 m X 25 m
6	Gedung Administrasi	2 Unit
7	Rumah Dinas	3 Unit

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

Di Indonesia ada dua jenis investasi, yang pertama adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan yang kedua adalah Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut Panjaitan, Penanaman Modal Asing adalah satu kegiatan penanaman modal yang didalamnya terdapat unsur asing (foreign element) yang ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal, dan sebagainya. Dalam penanaman modal asing, modal yang ditanam merupakan modal milik asing maupun modal patungan antara modal milik asing dengan modal dalam negeri. Sedangkan pengertian penanaman modal dalam negeri (PMDN) menurut UU No.6 tahun 1968 adalah penggunaan modal dalam negeri (yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan usaha) bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Iklim investasi dalam pengertian konsepsional dan kontekstual adalah sebuah kondisi yang tercipta dari berbagai dimensi yang saling tarik-menarik. Iklim Investasi merupakan salah satu yang paling esensial namun paling sulit diukur secara kuantitatif. Namun pada kenyataannya dalam laporan Survey Iklim Investasi, dalam dunia nyata seorang investor yang akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha tertentu akan selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, ketertiban umum, kepastian hukum, status lahan investasi dan dukungan pemerintah menjamin keberlangsungan investasi.

Penegakan hukum adalah faktor yang dominan mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kuatnya penegakan hukum akan memperkuat kepercayaan investor yang berujung pada kepastian atas keamanan investasinya. Begitupun sebaliknya. Akibat dari lemahnya penegakan hukum dapat menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme dan persaingan yang tidak sehat yang membuat para investor melarikan modalnya ke negara lain.

Memperkuat penegakan hukum pada sektor penanaman modal berarti memberikan jaminan serta perlindungan hukum kepada para investor. Jaminan terhadap perlindungan dan penegakan hukum akan menghindari penanam modal dari berbagai risiko politik dan sosial yang dapat membawa kerugian besar bagi penanam modal.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai asset. Oleh karena itu, individu tersebut harus dikembangkan dan dilatih kemampuannya. Berikut data ASN Kabupaten Pesisir barat ditampilkan dalam tabel

Tabel 2.143. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Barat 2020

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	2	0	2
2	SMP	3	1	4
3	SMA	163	141	304
4	DI	3	7	10
5	DII	66	138	204
6	DIII	74	241	315
7	DIV	7	29	36
8	Sarjana	630	631	1261
9	Pasca Sarjana	112	33	145
10	Spesialis	0	1	1
11	Profesi	10	20	30
	Total	1070	1244	2312

Sumber : BKD, 2021

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, berikut ditampilkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tabel di bawah ini. data-data yang ditampilkan merupakan data-data untuk mendukung narasi dan analisis dari data-data yang telah disajikan sebelumnya.

Tabel 2.144. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar (2020)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Pertumbuhan PDRB	5.30	5.33	5.33	5.37	-1.17	5.90	<
1.2	Laju Inflasi	2.75	3.14	2.92	3.53	1.93	n/a	n/a
1.3	PDRB per kapita	23.9	25.88	27.85	29.82	28.45	28.27	>
1.4	Indeks Gini	0.36	0.34	0.33	0.33	0.34	0.33	<
1.5	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	84.19	84.09	84.39	85.52	85.71	91.00	<
1.6	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	15.91	15.61	14.98	14.48	14.29	9.00	<
1.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	61.5	62.20	62.96	63.79	63.91	63.78	>
1.8	Angka Melek Huruf	90.33	90.31	90.29	90.24	90.24	92.8	<
1.9	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7.48	7.58	7.59	7.82	8.01	9.73	<
1.10	Angka Usia Harapan Hidup	62.29	62.54	62.85	63.27	63.50	64.46	<
1.1	Presentase Balita Gizi Buruk	52.00	10.00	9.00	9.00	8.00	8.00	=
1.1	Prevelensi Balita Gizi Kurang	50.00	48.00	45.00	42.00	42.00	42.00	=
1.1	Cakupan Desa Siaga Aktif	38.00	0.00	28.00	57.00	60.00	35.00	>
1.1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	n/a	79.05	73.91	77.82	79.23	81.00	<
1.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74.81	74.81	67.62	70.89	70.54	81.28	<
1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.43	2.71	1.87	3.25	3.41	1.82	<
1.2	Rasio penduduk yang bekerja	n/a	0.97	0.98	0.97	0.95	0.97	<
1.2	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	n/a	1.03	1.02	1.03	1.05	1.04	>
1.2	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	n/a	63.93	65.16	66.32	67.47	65.72	>

1.20	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1	n/a	n/a	21.446	22.222	20.618	16.0715	<
1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	65.00	70.00	72.50	75.00	75.00	77.50	<
1.2	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	2.80	5.27	3.03	3.53	2.65	25.17	<
1.2	Opini BPK	Disclaimer	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	=
1.2	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	n/a	78.70	78.70	84.40	84.92	82.98	>
1.3	Penguatan Cadangan Pangan	n/a	15.000	15.000	15.000	25.820	35.820	<
1.3	Penanganan Daerah Rawan Pangan	0	31	30	26	22	22	=
1.3	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB	52.38	51.55	51.00	49.49	50.26	50.94	<
1.3	Produksi Sektor Pertanian (milyar)	1.399,12	1.443,17	1.486,37	1.507,06	1.507,16	1.468,58	>
1.3	Produksi Sektor Perkebunan (milyar)	1.399,12	1.443,17	1.486,37	1.507,06	1.507,16	1.468,58	>
1.30	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	5.55	5.77	5.80	5.69	5.64	5.69	<
1.3	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	1.64	1.68	1.73	1.79	1.71	1.71	=
1.3	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	52.38	51.55	51.00	49.49	50.26	50.94	<
1.3	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	10.93	11.04	11.3	11.85	11.53	11.33	>
1.3	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	5.36	5.13	4.88	4.50	3.98	4.77	<
1.4	Pertumbuhan Industri	4.71	2.21	1.54	-1.32	-12.56	2.82	<
2	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	76.20	75.57	70.93	54.92	54.92	66.51	<
2.1.1.2	Angka Partisipasi Kasar	n/a	n/a	60.85	95.75	86.15	80.92	>
2.1.1.3	Angka Partisipasi Kasar SD	n/a	n/a	92.60	91.10	91.07	91.59	<
2.1.1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP	n/a	n/a	97.00	94.94	92.08	94.67	<
2.1.1.5	Angka Partisipasi Kasar SMA	n/a	n/a	81.30	85.22	89.22	85.25	>
2.1.1.6	Angka Pendidikan yang ditamatkan	11.53	11.85	11.965	11.97	11.97	11.97	=

2.1.1.7	Angka Partisipasi Murni	74.70	74.26	73.73	76.82	78.24	74.00	>
2.1.1.8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	n/a	n/a	78.97	78.81	79.77	80.00	>
2.1.1.9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	n/a	n/a	69.57	68.65	70.25	69.49	>
2.1.1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	n/a	n/a	59.90	65.15	65.03	63.36	>
2.1.1.11	Angka Partisipasi Sekolah	74.70	74.26	73.73	76.82	78.24	62.01	>
2.1.1.12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	83.40	80.60	80.63	81.36	97.38	84.67	>
2.1.1.13	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	81.82	82.01	81.18	80.81	84.55	82.07	>
2.1.1.14	Angka Putus Sekolah (APS) SD/Mi	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	<
2.1.1.15	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS/	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.25	>
2.1.1.16	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	=
2.1.1.17	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS	100	100	100	100	100	100	=
2.1.1.18	Angka Melanjutkan (AM)	95.23	94.76	94.73	95.44	94.58	96.00	<
2.1.1.19	Fasilitas Pendidikan Sekolah kondisi bangunan baik	152	346	388	254	281	250	>
2.1.1.20	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	199	197	199	191	190	190	=
2.1.1.21	Rasio guru / murid sekolah pendidikan dasar	16	13	15	13	13	24	<
2.1.1.22	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	13	11	11	8	8	24	<
2.1.1.23	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata sekolah dasar	2	2	2	2	2	2	=
2.1.1.24	Rasio guru/ terhadap murid per kelas rata-rata	3	3	2	3	3	3	=
2.1.1.25	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	2.993	2.991	3.002	2.994	2.962	2.988	<

2.1.1.26	Angka Melek huruf penduduk usia 15-25 tahun, perempuan dan laki-laki	28.933	28.828	28.712	28.638	28.910	23.022	>
2.1.1.27	Penduduk usia 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	2.630	2.620	2.610	2.603	2.628	2.618	>
2.1.1.28	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	1.553	1.627	1.668	1.680	1.709	1.600	>
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Angka kematian bayi (AKB) Per 1.000 kelahiran hidup	26 kasus	15 kasus	10 kasus	14 kasus	17 kasus	4 kasus	<
2.1.2.2	Angka Kelangsungan hidup bayi	2.418	2.749	2.751	2.752	2.752	2.806	<
2.1.2.3	angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	15	12	10	9	9	10	>
2.1.2.4	angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	6	8	11	12	20	30	>
2.1.2.5	angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	3 kasus	8 kasus	6 kasus	8 kasus	7 kasus	2 kasus	<
2.1.2.6	Rasio posyandu per satuan balita	173	173	98	173	173	150	<
2.1.2.7	Rasio puskesmas poli klinik, pustu, persatuan penduduk	9	9	9	11	11	9	>
2.1.2.8	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	1.52	1.55	1.58	1.61	1.61	2.00	<
2.1.2.9	Rasio Dokter persatuan penduduk	19	19	19	30	30	32	<
2.1.2.10	Rasio Tenaga Medis persatuan penduduk	138	138	151	165	159	161	<
2.1.2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	1.209	1.980	3.029	2.989	3.242	3.373	<
2.1.2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	2.975	2.805	3.099	3.210	2.806	3.219	<
2.1.2.13	Cakupan desa/ kelurahan universal child imunization (UCI)	17	17	17	17	17	18	<
2.1.2.14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	309	334	322	310	308	308	=

2.1.2.15	Proporsi penduduk dengan usapan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan indonesia 2.100 kkal/ kapita/hari)	140.000	133.000	130.000	129.000	125.000	125.000	=
2.1.2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	3.100	2.260	1.700	1.870	1.809	2.116	<
2.1.2.17	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	1	1	1	1	1	1	=
2.1.2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	323	345	343	241	237	237	=
2.1.2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	775	798	737	689	677	677	=
2.1.2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 penduduk)	775	798	737	655	615	615	=
2.1.2.21	Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	16	16	12	13	33	109	>
2.1.2.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	220	80	737	85	85	130	<
2.1.2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	95	85	53	80	85	105	<
2.1.2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	5	5	5	5	9	10	<
2.1.2.25	Penderita Diare yang ditangani	1.755	1.526	1.270	1.189	1.829	3.928	<
2.1.2.26	Angka kejadian malaria	1	1	1	1	1	0	<
2.1.2.27	Tingkat Kematian akibat malaria	0.98	0.95	0.98	0.98	0.85	0.00	<
2.1.2.28	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	9.012	9.020	9.310	9.020	9.210	9.100	>
2.1.2.29	Prevalensi HIV/ AIDS (Persen) dari total populasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	<
2.1.2.30	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	90.00	90.00	28.00	90.00	90.00	90.00	=
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2.1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	36.85	36.17	43.66	38.88	39.03	63.66	<

2.1.3.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (km)	247.35	247.71	247.71	247.71	247.71	250.00	<
2.1.3.3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	36.85	36.17	43.66	38.88	39.03	63.66	<
2.1.3.4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	17.19	25.00	26.56	29.69	30.31	60.00	<
2.1.3.5	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	10.16	10.16	10.16	26.56	26.56	10.00	<
2.1.3.6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	n/a	45.88	46.33	64.86	65.30	70.00	<
2.1.3.7	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	22.00	18.00	17.00	16.00	12.00	20.00	>
2.1.3.8	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	30.00	33.00	25.00	40.00	40.00	50.00	<
2.1.3.9	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	4	1	4	5	3	2	<
2.1.3.10	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	6.00	7.00	9.00	5.00	3.00	8.00	<
2.1.3.11	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	12.00	13.00	15.00	11.00	10.00	35.00	<
2.1.3.12	Rasio Jaringan Irigasi	18.00	30.00	37.00	45.00	50.94	69.00	<
2.1.3.13	Persentase penduduk berakses air minum	4.00	9.00	21.00	33.00	35.00	92.91	<
2.1.3.14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	4.00	9.00	21.00	33.00	35.00	92.91	<
2.1.3.15	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	0	0	4	4	4	4	=
2.1.3.16	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0.0025	0.0025	0.0031	0.0037	0.005	0.005	=
2.1.3.17	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	1	1.2	1.5	4.52	4.52	30.00	<
2.1.3.18	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	=

2.1.3.19	Ketaatan terhadap RTRW	100	100	100	96.00	96.00	100	<
2.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
2.1.4.1	Rasio rumah layak huni	n/a	68,13	71.00	72.00	85.97	90.00	<
2.1.4.2	Persentase pemukiman yang tertata	n/a	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	<
2.1.4.3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	n/a	n/a	n/a	51.69	51.69	50.00	<
2.1.4.4	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	n/a	n/a	n/a	n/a	515	515	=
2.1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
2.1.5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (jumlah petugas)	n/a	1.204	1.204	1.204	1.204	1.180	>
2.1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	n/a	24	24	24	24	24	=
2.1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	n/a	9	9	39	12	12	=
2.1.5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	n/a	15	15	15	15	15	=
2.1.5.5	Persentase Penegakan PERDA	n/a	66.67	61.90	72.72	75.00	75.00	=
2.1.6	Sosial							
2.1.6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (KK)	10.81	10.63	20.98	19.98	20.33	22.00	<
2.1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani	55.75	59.25	65.94	88.47	84.10	80.00	>
2.1.6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (KK)	10.81	10.63	20.98	19.98	20.33	22.00	<
2.1.6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	=
2.1.6.5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100	100	=

2.1.6.6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	64.00	72.00	48.00	59.00	30.00	70.00	<
2.2	Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
2.2.1	Tenaga Kerja							
2.2.1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	n/a	33	33	44	44	40	>
2.2.1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	n/a	3	2	4	3	4	<
2.2.1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	630	1.246	1.418	1.659	758	1.500	<
2.2.1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	84	84	84	103	564	570	<
2.2.1.5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	n/a	n/a	1	1	1	1	=
2.2.1.6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	n/a	n/a	20	20	60	60	=
2.2.1.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	35	40	20	30	0	25	<
2.2.1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	20	20	20	20	10	18	<
2.2.1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	20	20	20	20	20	20	=
2.2.1.10	Rasio lulusan S1/S2/S3	1.00	1.15	1.20	1.40	1.55	2.00	>
2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	n/a	985	1.053	1.018	1.261	2.342	<
2.2.2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	3	3	3	1	1	8	<
2.2.2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	n/a	244	294	346	445	1.500	<

2.2.2.4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	n/a	143.00	110.00	136.00	121.00	100.00	>
2.2.2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	0	950	1.050	1.193	1.483	5.925	<
2.2.2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	n/a	5	6	7	4	10	<
2.2.2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	n/a	5	6	7	4	5	=
2.2.2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	n/a	5	6	7	4	4	=
2.2.2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	n/a	1	2	3	3	4	<
2.2.2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	n/a	1	3	7	3	3	<
2.2.2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	n/a	1	3	7	3	3	<
2.2.2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	n/a	5	3	7	4	4	=
2.2.2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	n/a	17.775	17.925	17.975	17.969	18.000	<
2.2.2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	n/a	6.248	6.328	6.348	6.257	6.400	<
2.2.2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	n/a	6.235	6.283	6.331	6.227	6.400	<
2.2.2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	n/a	2.435	2.479	2.419	2.641	2.650	<

2.2.2.17	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	32.693	33.015	33.073	33.094	33.100	<
2.2.2.18	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	n/a	193	205	205	225	300	<
2.2.3	Pangan							
2.2.3.1	Ketersediaan pangan utama (ton)	n/a	n/a	22.750	27.417	27.752	31.000	<
2.2.3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	n/a	n/a	99.41	267.08	235.70	240.00	<
2.2.3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	n/a	440	440	440	440	450	<
2.2.4	Pertanahan							
2.2.4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	61.00	67.00	68.00	75.00	78.00	90.00	<
2.2.4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	1	1	0	0	0	10	<
2.2.4.3	Penyelesaian izin lokasi	2	3	9	13	26	30	<
2.2.5	Lingkungan Hidup							
2.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	0	0	0	1	1	1	=
2.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	0	0	0	1	1	1	=
2.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	0	0	0	1	1	1	=
2.2.5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	n/a	51.83	52.50	55.67	65.60	54.00	>
2.2.5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	n/a	84.60	86.15	84.07	86.11	83.20	<
2.2.5.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	n/a	38.51	42.05	48.07	68.20	61.60	>
2.2.5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izinlingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	8	10	11	9	10	10	=
2.2.5.8	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	1	1	1	1	1	1	=
2.2.5.9	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	1	1	1	1	1	1	=

2.2.5.10	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0	1	1	1	1	1	=
2.2.5.11	Penetapan hak MHA	0	0	0	1	1	1	=
2.2.5.12	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (orang)	0	0	0	0	218	300	<
2.2.5.13	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	150	295	210	132	0	150	<
2.2.5.14	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat (orang)	0	0	0	0	218	218	=
2.2.5.15	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampak dikabupaten/kota	7	8	8	9	2	10	<
2.2.5.16	Timbulan sampah yang ditangani (ton)	105.000	121.000	122.494	122.494	120.000	120.000	<
2.2.5.17	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	1	1	3	3	3	3	=
2.2.5.18	Persentase cakupan area pelayanan	25	30	35	40	45	90	<
2.2.5.19	Persentase jumlah sampah yang tertangani	13.00	13.50	14.00	15.68	14.45	22.00	<
2.2.5.20	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	1	1	2	2	2	2	=
2.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
2.2.6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (orang)	94.725	95.457	100.778	102.853	104.259	107.586	<
2.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran (orang)	41.242	44.296	44.527	52.562	52.732	57.246	>
2.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah (orang)	70	78	169	174	197	300	<
2.2.6.4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Orang)	94.725	95.457	100.778	102.853	104.259	107.586	<
2.2.6.5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (orang)	94.725	95.457	100.778	102.853	104.259	107.586	<
2.2.6.6	Cakupan penerbitan akta kelahiran (jiwa)	41.242	44.296	44.527	52.562	52.732	10.758	>

2.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.2.7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	23	23	27	32	116	35	>
2.2.7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	76	88	95	116	116	116	=
2.2.7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	116	116	116	116	116	116	=
2.2.7.4	Persentase LSM aktif	116	150	202	315	259	256	>
2.2.7.5	Persentase LPM Berprestasi	35	39	48	61	62	60	>
2.2.7.6	Persentase PKK aktif	116	116	116	116	116	116	=
2.2.7.7	Persentase Posyandu aktif	170	180	180	180	180	180	=
2.2.7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	11	29	57	0	0	60	<
2.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2.2.8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1.09	1.08	1.07	1.07	1.06	1.19	<
2.2.8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2.63	2.49	2.35	2.30	2.26	2.00	<
2.2.8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	8	8	8	8	8	8	=
2.2.8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	1	1	1	1	1	1	=
2.2.8.5	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.57	2.50	2.49	2.46	2.45	2.40	<
2.2.8.6	Ratio Akseptor KB	25.323	28.717	29.257	29.398	29.433	38.479	<
2.2.8.7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	25.323	28.717	29.257	29.398	29.433	38.479	<
2.2.8.8	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	43	42	37	36	30	39	<
2.2.8.9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	8.752	8.692	7.198	7.959	7.962	7.500	<

2.2.8.10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	14.10	12.92	11.61	11.70	13.09	10.15	<
2.2.8.11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	87.52	86.92	71.98	79.59	81.35	82.50	<
2.2.8.12	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	71.96	76.95	78.15	76.88	76.49	70.22	>
2.2.8.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	712	841	983	1.017	795	795	=
2.2.8.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-Kb	111	177	234	247	186	186	=
2.2.8.15	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	270	450	450	630	630	600	>
2.2.8.16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (kecamatan)	11	11	11	11	11	11	=
2.2.8.17	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	256	261	317	307	273	300	<
2.2.8.18	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	118	118	118	118	118	118	=
2.2.8.19	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	9	9	9	11	12	11	>
2.2.8.20	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	3	11	15	11	11	28	<
2.2.8.21	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	2.751	3.052	3.395	3.373	2.818	2.260	>

2.2.8.22	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	712	841	983	1017	795	446	>
2.2.9	Perhubungan							
2.2.9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	19.320	22.680	22.680	28.560	30.240	25.200	>
2.2.9.2	Jumlah uji kir angkutan umum	40	45	47	47	50	60	<
2.2.9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	4	5	5	5	5	7	<
2.2.9.4	Pemasangan Rambu rambu	280	305	305	403	410	450	<
2.2.9.5	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	18.400	21.600	21.600	27.200	28.800	24.000	>
2.2.10	Komunikasi dan Informatika							
2.2.10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (kecamatan)	0	0	11	11	11	11	=
2.2.10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	50.00	70.00	96.00	100	100	100	=
2.2.10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	n/a	n/a	30.00	32.50	35.00	50.00	<
2.2.10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (pekon/kelurahan)	n/a	n/a	117	117	118	118	=
2.2.10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	n/a	n/a	20.00	21.00	23.00	35.00	<
2.2.11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							
2.2.11.1	Persentase koperasi aktif	19.75	27.16	43.20	61.50	49.00	76.67	<
2.2.11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	1.483	1.662	1.756	1.899	2.110	2.000	>
2.2.11.3	Persentase BPR/LKM aktif	13	23	27	33	38	35	>
2.2.11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	65.04	73.26	77.52	84.00	93.39	80.00	>
2.2.12	Penanaman Modal							
2.2.12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	n/a	n/a	61	417	254	250	>
2.2.12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta)	n/a	n/a	301.541	379.635	344.158	320.000	>

2.2.12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	n/a	n/a	82	139	186	200	<
2.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga							
2.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	20	31	18	25	29	30	<
2.2.13.2	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (orang)	1	2	2	4	4	10	<
2.2.13.3	Cakupan pembinaan atlet muda (orang)	5	6	10	15	33	50	<
2.2.13.4	Jumlah atlet berprestasi (orang)	4	10	17	17	22	15	<
2.2.13.5	Jumlah prestasi olahraga (orang)	2	2	2	3	2	2	=
2.2.14	Statistik							
2.2.14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	4	4	4	4	4	4	=
2.2.14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	1	1	1	1	1	1	=
2.2.14.3	Buku "PDRB"	1	1	1	1	1	1	=
2.2.15	Persandian							
2.2.15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	<
2.2.16	Kebudayaan							
2.2.16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	4	4	5	2	5	<
2.2.16.2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	0	0	5	5	=
2.2.17	Perpustakaan							
2.2.17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	n/a	n/a	50	70	150	250	<
2.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	n/a	n/a	3.237	3.345	3.350	3.000	>
2.2.17.3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	n/a	n/a	385	570	575	600	<
2.2.17.4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	n/a	n/a	5	5	5	5	=
2.2.18	Kearsipan							
2.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	25.00	<
2.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	0	1	2	1	2	<

2.3	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.3.1	Kelautan dan Perikanan							
2.3.1.1	Produksi perikanan (ton)	14.540	14.021	14.434	15.582	19.054	18.000	>
2.3.1.2	Konsumsi ikan	25.97	28.66	28.72	33.05	33.05	40.00	<
2.3.1.3	Cakupan bina kelompok nelayan	268	127	135	58	246	246	=
2.3.1.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	34.00	34.00	35.00	40.00	41.00	80.00	<
2.3.1.5	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	8.800	8.882	8.884	8.886	8.888	8.868	>
2.3.1.6	Nilai tukar nelayan	102.00	104.00	106.00	108.00	110.00	109.00	>
2.3.2	Pariwisata							
2.3.2.1	Kunjungan wisata (orang)	166.283	135.833	166.283	203.173	50.730	591.906	<
2.3.2.2	Lama kunjungan Wisata (hari)	8	8	8	8	8	14	<
2.3.2.3	PAD sektor pariwisata (juta)	47.350	63.350	104.417	52.049	17.322	60.000	<
2.3.3	Pertanian							
2.3.3.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	52.38	51.55	51.00	49.49	50.26	50.94	<
2.3.3.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5.28	5.29	5.01	5.01	5.13	5.44	<
2.3.3.3	Cakupan bina kelompok petani	803	837	910	918	929	950	<
2.3.4	Energi dan Sumber Daya Mineral							
2.3.4.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	47.51	51.80	58.96	68.95	80.00	66.67	>
2.3.5	Perdagangan							
2.3.5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	121.85	103.59	401.34	446.13	884.72	391.53	>
2.3.5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	210	304	405	470	511	500	>
2.3.6	Perindustrian							
2.3.6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	20	25	30	30	35	100	<
2.3.7	Transmigrasi							
2.3.7.1	Persentase transmigran swakarsa	0	0	0	0	0	10	<

2.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
2.4.1	Sekretariat Dewan							
2.4.1.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	11	10	12	12	9	11	<
2.4.1.2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	14	13	15	12	11	15	<
2.4.1.3	Terintegrasi programprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	11	9	11	10	9	12	<
2.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
2.5.1	Perencanaan							
2.5.1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1	1	1	1	1	1	=
2.5.1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1	1	1	1	1	1	=
2.5.1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1	1	1	1	1	1	=
2.5.1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	0	1	1	1	1	1	=
2.5.1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	75.00	80.00	80.00	80.00	87.43	100	<
2.5.1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	75.00	80.00	82.00	85.00	89.57	100	<

2.5.1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	75.00	80.00	80.00	80.00	100	100	=
2.5.2	Keuangan							
2.5.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Disclaimer	Disclaimer	WDP	WDP	WTP	WTP	=
2.5.2.2	Persentase belanja pendidikan (20%) (juta)	140.038	143.017	157.805	190.792	171.724	195.485	<
2.5.2.3	Persentase belanja kesehatan (10%) (juta)	33.863	79.524	75.917	73.091	96.429	117.153	<
2.5.2.4	Penetapan APBD (juta)	732.750	811.738	797.058	818.270	917.633	917.633	=
2.5.3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
2.5.3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	=
2.5.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	38.00	71.00	81.00	92.00	15.00	100	<
2.5.3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	38.00	31.00	31.00	17.00	15.00	21.00	<
2.5.3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	23	34	34	32	33	35	<
2.5.3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	113	139	149	146	152	150	<
2.5.3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.241	1.146	1.231	1.610	1.559	1.800	<
2.5.4	Penelitian dan pengembangan							
2.5.4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	n/a	100	66.70	85.70	85.70	100	<
2.5.4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100	<
2.5.4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	n/a	100	100	100	100	100	=
2.5.4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	n/a	70.00	70.00	80.00	90.00	100.00	<

2.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
2.6.1	Inspektorat Daerah							
2.6.1.1	Persentase tindak lanjut temuan (jumlah)	120	190	195	601	1.316	1.316	=
2.6.1.2	Persentase pelanggaran pegawai	20.00	30.00	27.00	33.00	30.00	30.00	=
2.6.1.3	Jumlah temuan BPK	120	48	71	53	48	48	=
3	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	1.560,49	1.721,16	1.891,2	2.047,65	2.047,79	1.513,24	>
3.2	Nilai tukar petani	107.35	103.9	105.6	101.58	94.73	113	<
3.3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	5.15	4.98	5.06	5.02	5.08	5.06	>
3.4	Produktivitas total daerah	3.615,6	3.947,6	4.282,4	4.619,2	4.628,8	4.218,7	>
3.5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	0.03	0.03	0.04	0.06	0.06	0.10	<
3.6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	3.37	2.62	9.37	9.66	19.11	8.826	>

Sumber : Bappeda, 2021

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat terdapat 300 (tiga ratus) indikator pembangunan sebagaimana dimaksud pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sebanyak 53,00% indikator atau sebanyak 159 indikator masih belum mencapai target. Berikutnya sebanyak 140 indikator atau sebesar 46,57% indikator telah mencapai dan/atau melampaui target yang ditetapkan serta 0,33% atau 1 indikator tidak memiliki data.

Beberapa target yang belum mencapai target capaian pada tahun 2020 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) penetapan target yang terlalu tinggi; (2) Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan pola kehidupan masyarakat, termasuk pola kerja dari Pemerintah Daerah memerlukan penyesuaian; dan (3) kondisi struktur APBD TA 2020 dan Perubahan APBD TA 2020 yang mengalami perubahan akibat pandemic Covid-19. Sehingga walaupun target yang tidak tercapai sebanyak 53,00% namun secara umum kondisi ini masih berada pada koridor pencapaian target secara keseluruhan yang baik.

2.5. Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara, berikut pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan (6) Sosial.

Tabel 2.145. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	85,01	76,13	75,80	79,43	79,77
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100	100	100	100	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	76,20	75,57	70,93	54,92	54,92

Sumber : Dinas P dan K, 2021

Tabel di atas menunjukkan capaian SPM pada urusan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016-2020. Berdasarkan pada data di atas, untuk indikator pendidikan kesetaraan telah dilaksanakan dengan optimal. Berikutnya untuk capaian pendidikan tingkat PAUD masih belum mencapai 100%, yaitu 54,92%. Sementara untuk pendidikan dasar baru mencapai 79,77%. Hal ini tentu saja menjadi catatan dalam proses peningkatan kualitas SDM dan pendidikan di daerah.

Tabel 2.146. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator SPM	2016		2017		2018		2019		2020	
		ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	3619	99,81	3552	99,72	3484	99,57	3417	99,45	2953	88
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3057	90,02	3129	93,57	3107	93,02	2947	89,85	4519	76
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3115	96,32	3163	99,31	2841	89,26	2978	96,5	2534	84
4	Pelayanan Kesehatan Balita	11914	90,14	11846	90,98	9580	74,7	12526	99,18	9895	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Dasar	6759	36,91	7461	40,19	7429	39,36	7162	37,52	4784	25
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	3303		19775	39,66	27261	26,38	10572	10,83	5156	5
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	248	13,24	1539	21,58	1288	11,06	5615	46,12	3923	31
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2109	-	4373	19,67	8342	37,08	21203	99,74	2932	14
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	698	-	902	12,41	2276	30,94	2260	32,51	1319	19
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	-	-	28	22,95	182	147,97	159	128,23	119	95,2
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	958	39,92	787	12,63	809	13,42	652	23,54	652	24

No	Indikator SPM	2016		2017		2018		2019		2020	
		ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	16	8,56	68	1,55	134	70,16	1.993	64,27	2426	72

Sumber : Komunikasi Data Dinas Kesehatan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa secara umum telah ada perbaikan kinerja pada pelaksanaan urusan kesehatan. Bahwa capaian kinerja terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun hanya pelayanan terhadap balita yang telah mencapai 100%. Sementara itu indikator lainnya belum mencapai 100%. Catatan khusus untuk pelayanan terhadap penderita penyakit diabetes dan TBC.

Beberapa hal terkait dengan pencapaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Pesisir Barat adalah masih terdapat ibu hamil yang bersalin di dukun terutama pada daerah kantong dengan akses yang sulit dan sangat sulit, pelayanan sudah dilaksanakan sesuai dengan jumlah ibu bersalin, pelayanan BBL tercapai, kegiatan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar masih belum memenuhi target karena pelayanan luar gedung puskesmas masih terkendala proses pembelajaran dilakukan secara daring akibat dari pandemi Covid 19, Masih rendahnya kunjungan di puskesmas untuk percepatan penemuan penyakit HT (darah tinggi) dikarenakan pandemi, Masih rendahnya kunjungan di puskesmas untuk percepatan penemuan penyakit Diabetes Melitus dikarenakan pandemi, Rendahnya kegiatan *screening* di puskesmas untuk percepatan orang dengan gangguan jiwa, Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan *Home Sweeping* di puskesmas untuk percepatan penemuan penderita dan deteksi dini kasus.

Tabel 2.147. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

No	Jenis Layanan Dasar			Indikator Pencapaian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sumber Daya Air	Prioritas Utama Penyediaan Air untuk Kebutuhan Masyarakat		Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	20	30	40	50	60
				Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	70	72	75	76	60
2	Jalan	Jaringan	Aksesibilitas	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten/Kota	0	0	93.01	93.47	93.47
			Mobilitas	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	0	0	44.78	50.84	51.7

No	Jenis Layanan Dasar			Indikator Pencapaian	2016	2017	2018	2019	2020
			Keselamatan	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	26.41	36.17	43.66	38.88	39.64
		Ruas	Kondisi	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	26.41	36.17	43.66	38.88	39.64
			Kecepatan	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	26.41	36.17	43.66	38.88	39.64
3	Air Minum	Cluster Pelayanan	Sangat buruk	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 Liter/Orang/Hari	0	0	0	0	0
			Buruk		0	0	48.20	47.70	46.26
			Sedang		0	0	17.84	17.03	16.90
			Baik		0	0	2.63	2.91	3.69
			Sangat Baik	Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 Liter/Orang/Hari	0	0	0.81	0.84	0.93
4	Penyehatan Lingkungan Permukiman	Air Limbah permukiman		Tersedianya Sistem Air Limbah setempat yang memadai	0	0	58	61	64.69
				Tersedianya Sistem Air Limbah Skala Komunitas/ Kawasan/Kota	0	0	0	0	0
		Pengelolaan sampah		Tersedianya Fasilitas pengurangan sampah di Perkotaan	10	20	30	40	50
				Tersedianya Sistem Penanganan Sampah di Perkotaan	10	20	30	40	50
		Drainase		Tersedianya sistem jaringan drainase skala Kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	25	31	34	37	40
5	Penataan bangunan dan lingkungan	Harga standar bangunan gedung negara (HSBGN)		Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/kota	100	100	100	100	100
6	Jasa konstruksi	Sistem informasi jasa konstruksi		Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	0	0	0	0	0
7	Penataan ruang	Informasi penataan ruang		Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	0	0	0	0	0
		Pelibatan peran masyarakat dalam proses penyusunan RTR		Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	100	100	100	100	100

No	Jenis Layanan Dasar		Indikator Pencapaian	2016	2017	2018	2019	2020
		Pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	100	100	100	100	100
		Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) Publik	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	1	1.2	1,5	4,52	4,52

Sumber : Dinas Pu dan PR, 2021

Untuk pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih berada di bawah target 100% capaian. Kondisi luasan kewenangan daerah dan pendanaan daerah yang terbatas merupakan hal utama yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian SPM. Namun demikian, usaha-usaha perbaikan kinerja dan peningkatan pendanaan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2.148. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Rumah Layak Huni	Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni Secara Menyeluruh	0	68,13	71	72	85,94
2	Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman	0	0	30	30	35
3	Tersedianya pelayanan sanitasi sub sektor air limbah domestik	Cakupan pelayanan sanitasi sub sektor air limbah domestik	0	0	0	57	87,90
4	Jumlah penduduk yang memiliki akses jamban sanitasi layak	Persentase penduduk yang memiliki akses jamban sanitasi layak	0	0	0	57	87,90
5	Tersedianya pelayanan sanitasi sub sektor drainase lingkungan	Cakupan pelayanan sanitasi sub sektor drainase lingkungan	0	0	0	57	87,90
6	Luas kawasan kumuh yang ada dan ditangani	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas PR dan KP, 2021

Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah. Seluruh indikator kinerja masih berada di bawah target 100% capaian. Kondisi luasan kewenangan daerah dan pendanaan daerah yang terbatas merupakan hal utama yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian SPM. Khusus untuk penanganan kawasan kumuh belum ada realisasi, hal ini disebabkan oleh belum adanya penetapan lokasi yang masuk dalam kawasan

kumuh daerah. Usaha-usaha perbaikan kinerja dan peningkatan pendanaan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan penyediaan layanan dasar terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 2.149. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Trantibumlinmas	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100	100	100	100	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP dan Damkar - BPBD, 2021

Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat telah mencapai target capaian. Peningkatan dan konsistensi dalam menjaga capaian indikator perlu terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2.150. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sosial Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas sosial di luar panti	n/a	n/a	n/a	6,39	18,02
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	0	0	0	0	4,83
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	n/a	n/a	n/a	1,76	0,36

4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	0	0	0	0	0
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, 2021

Data pada pencapaian SPM Urusan Sosial, hanya pada indikator perlindungan sosial bagi korban bencana yang telah mencapai titik optimal. Sementara itu untuk indikator penyandang disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia masih jauh dari target yang ditetapkan. Sementara itu untuk rehabilitasi kepada gelandangan belum ada realisasi, hal ini dikarenakan di Kabupaten Pesisir Barat tidak terdapat gelandangan. Peningkatan kinerja, kerja keras dan konsistensi dalam proses pencapaian indikator perlu terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah dengan terus melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan.

2.6. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Penilaian dan analisis capaian indikator TPB di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan hasil analisis data terbagi atas 4 (empat) kategori yaitu: (1) sudah dilaksanakan dan sudah mencapai indikator nasional; (2) sudah dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional; (3) belum dilaksanakan dan belum mencapai indikator nasional; dan (4) belum ada data.

Tabel 2.151. Pencapaian TPB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

TPB	Sudah dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target	Sudah dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Tidak Ada Data
Tujuan 1 Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	3	5	9	8
Tujuan 2 Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan	0	4	4	3
Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	12	3	14	5

TPB	Sudah dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target	Sudah dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Tidak Ada Data
Tujuan 4 Menjamin Kualitas PendidikanYang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Bagi Semua	3	0	6	4
Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan	1	0	12	1
Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	0	2	14	2
Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Handal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua	1	0	1	0
Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua	2	0	16	1
Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi	2	1	9	1
Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara	0	2	9	0
Tujuan 11 Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	0	1	11	2
Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	0	0	4	1

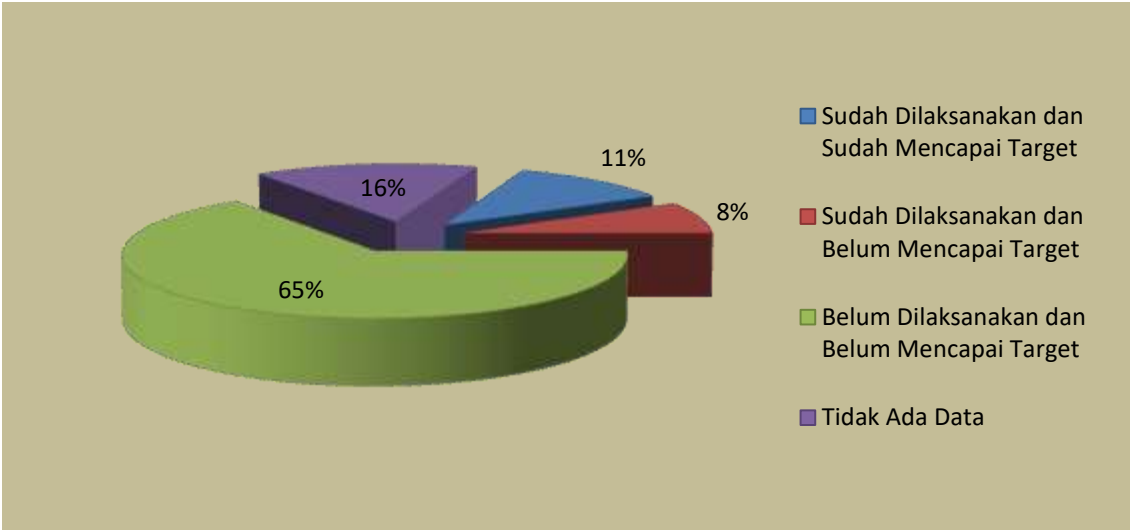
TPB	Sudah dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target	Sudah dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Tidak Ada Data
Tujuan 13 Membuat Langkah Segera Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	0	0	1	0
Tujuan 14 Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	0	0	0	0
Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Mempromosikan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Manajemen Hutan Lestari, Mengurangi Penggurunan, Menghentikan dan Mengembalikan Degradasi Lahan serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	0	0	4	0
Tujuan 16 Mempromosikan Perdamaian dan Masyarakat yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	1	0	18	2
Tujuan 17 Menguatkan Cara Pelaksanaan dan Revitalisasi Kerjasama Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	0	0	12	4
Jumlah	25	18	144	34

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Berdasarkan pada data di atas, masih terdapat 144 indikator TPB yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dari total 221 indikator atau 65%. Sementara itu, baru 25 indikator atau 11% yang telah mencapai target dengan 18 indikator atau 8% yang belum mencapai target. Sementara itu masih ada 34 indikator yang data capainnya tidak tersedia atau 16%. Hal ini tentu saja menjadi catatan dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Pesisir Barat, bahwa seluruh program pembangunan Perangkat Daerah seyogyanya mengarah pada pencapaian indikator TPB, selain pada pencapaian SPM dan program kerja kepala daerah.

Rincian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan pencapaian terhadap indikator nasional dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 2.64. Rekapitulasi Pencapaian TPB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



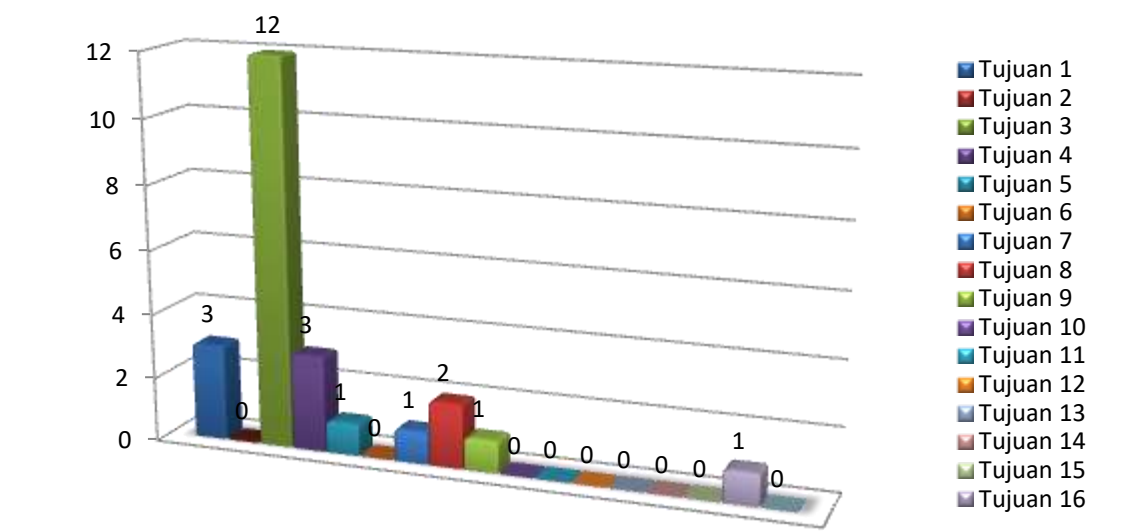
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Berdasarkan pada data pencapaian TPB di atas, tentu saja menjadi tantangan bagi Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun-tahun yang akan datang untuk berupaya melaksanakan indikator TPB dan dapat mencapai target nasional.

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional

Jumlah keseluruhan indikator TPB Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 14 Tujuan, 40 Target, dan 77 indikator. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat 25 indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target atau sebesar 32,5%. Rincian pencapaian indikator TPB yang telah dilaksanakan dan mencapai target dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 2.65. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Rincian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Target dan Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional sebagai berikut:

Tabel 2.152. Rincian TPB berdasarkan Tujuan, Target dan Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah Mencapai Target Nasional Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

TPB	Target	Jumlah Indikator
Tujuan 1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumberdaya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	3
Tujuan 3	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	2
Tujuan 3	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	1
Tujuan 3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	2
Tujuan 3	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	1
Tujuan 3	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	1
Tujuan 3	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	1
Tujuan 3	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	4
Tujuan 4	Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif.	2
Tujuan 4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	1
Tujuan 5	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimana pun.	1
Tujuan 7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	1

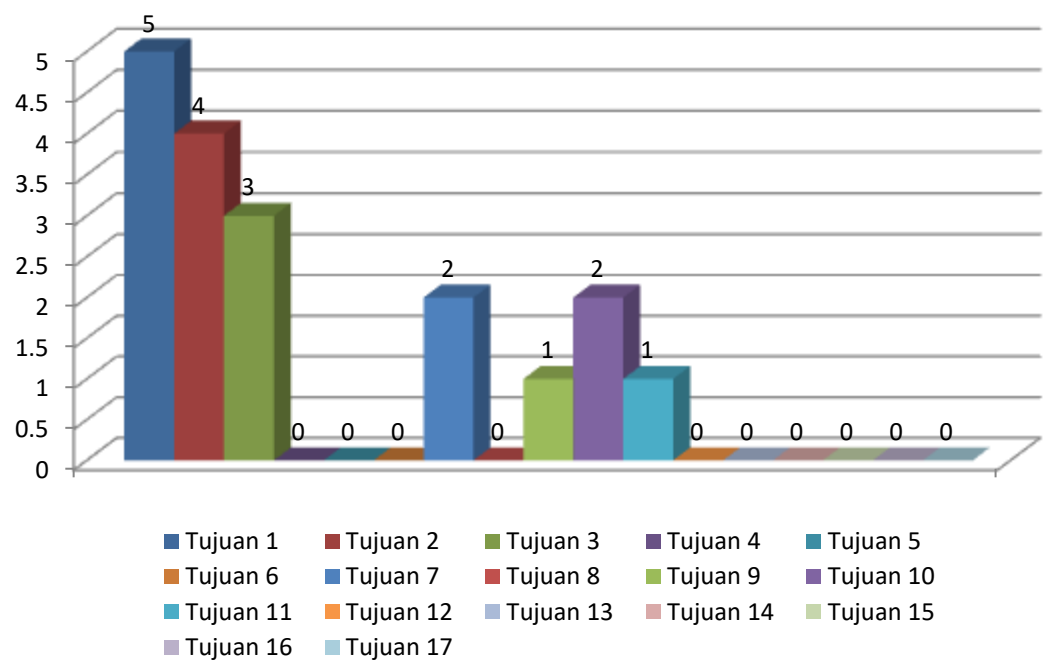
Tujuan 8	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	1
Tujuan 8	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	1
Tujuan 9	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke alam rantai nilai Pasar.	2
Tujuan 16	Mempromosikan Perdamaian dan Masyarakat yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.	1

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

2. Indikator TPB Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional

Dari keseluruhan indikator TPB sebanyak 77, terdapat 18 indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target atau sebesar 23,3%. Rincian pencapaian indikator dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 2.66. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Adapun rincian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Target dan Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.153. Rincian TPB berdasarkan Tujuan, Target dan Indikator yang sudah dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target Nasional Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

TPB	Target	Jumlah Indikator
Tujuan 1	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan disemua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1
Tujuan 1	Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan.	2
Tujuan 1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	2
Tujuan 2	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	1
Tujuan 2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	3
Tujuan 3	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	2
Tujuan 3	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	1
Tujuan 6	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	1
Tujuan 6	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	1
Tujuan 9	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke alam rantai pasar.	1
Tujuan 10	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	2

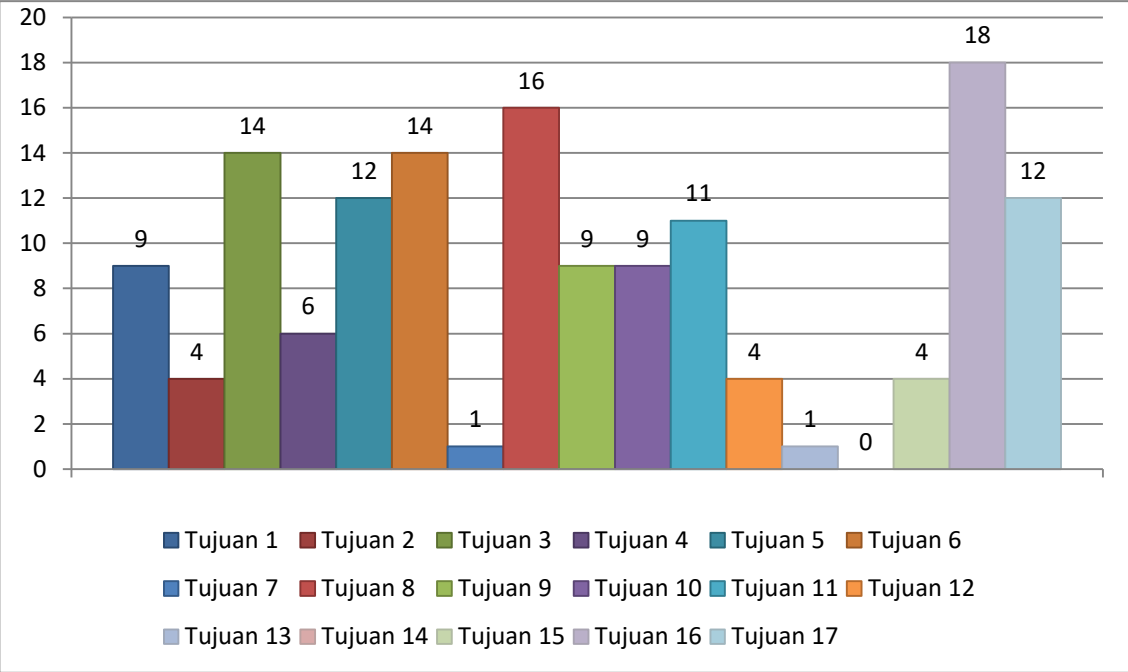
Tujuan 11	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota	1

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

3. Indikator TPB Belum dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

Dari keseluruhan indikator TPB sebanyak 221, terdapat 144 indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target atau sebesar 65%. Rincian jumlah pencapaian indikator dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 2.67. Indikator TPB yang Belum dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Berikut rincian dari TPB, Target dan Indikator TPB yang Belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional selama Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.154. Rincian TPB berdasarkan Tujuan, Target dan Indikator yang Belum dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

TPB	Target	Jumlah Indikator
Tujuan 1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	2

TPB	Target	Jumlah Indikator
Tujuan 1	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	5
Tujuan 1	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	2
Tujuan 2	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	3
Tujuan 2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	1
Tujuan 3	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	1
Tujuan 3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	2
Tujuan 3	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	2
Tujuan 3	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	2
Tujuan 3	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	2
Tujuan 3	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	1
Tujuan 3	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	1

TPB	Target	Jumlah Indikator
Tujuan 3	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	1
Tujuan 4	Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif.	2
Tujuan 4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	1
Tujuan 4	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	1
Tujuan 4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	1
Tujuan 4	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	1
Tujuan 5	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimana pun.	1
Tujuan 5	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	3
Tujuan 5	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	3
Tujuan 5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	2
Tujuan 5	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	3
Tujuan 6	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	2

TPB	Target	Jumlah Indikator
Tujuan 6	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	4
Tujuan 6	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	4
Tujuan 6	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	1
Tujuan 6	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumberdaya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	4
Tujuan 7	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	1
Tujuan 8	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	1
Tujuan 8	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	1
Tujuan 8	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	3
Tujuan 8	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	3
Tujuan 8	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	5
Tujuan 8	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	3
Tujuan 9	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke alam rantai nilai Pasar.	4

TPB	Target	Jumlah Indikator
Tujuan 9	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	2
Tujuan 9	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	1
Tujuan 9	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan mengusahakan penyediaan akses universal internet negara negara kurang berkembang pada tahun 2020	2
Tujuan 10	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	5
Tujuan 10	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	1
Tujuan 10	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	2
Tujuan 10	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	1
Tujuan 11	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	2
Tujuan 11	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	2
Tujuan 11	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	4
Tujuan 11	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	1
Tujuan 11	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.	1

TPB	Target	Jumlah Indikator
Tujuan 11	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.	1
Tujuan 12	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	1
Tujuan 12	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	1
Tujuan 12	Meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	1
Tujuan 12	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	1
Tujuan 13	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	1
Tujuan 15	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	1
Tujuan 15	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	1
Tujuan 15	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	1
Tujuan 15	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi, dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	1
Tujuan 16	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.	4
Tujuan 16	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	2
Tujuan 16	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	1

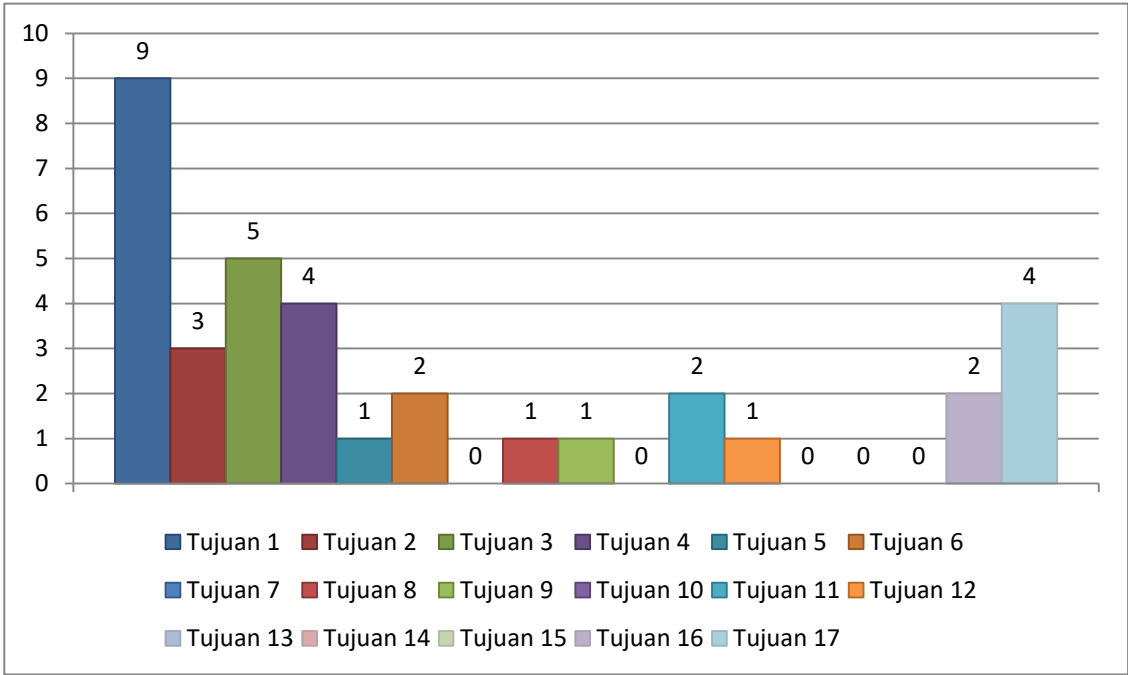
TPB	Target	Jumlah Indikator
Tujuan 16	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	6
Tujuan 16	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	1
Tujuan 16	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	2
Tujuan 16	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	1
Tujuan 16	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	1
Tujuan 17	Memperkuat mobilisasi sumberdaya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	1
Tujuan 17	Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	2
Tujuan 17	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi	1
Tujuan 17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	1
Tujuan 17	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	4
Tujuan 17	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	3

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

4. Indikator TPB Belum Memiliki Data

Dari keseluruhan indikator TPB sebanyak 221 dan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pesisir barat sebanyak 77 indikator, terdapat 34 indikator yang belum memiliki data atau sebesar 44,2%. Rincian pencapaian indikator TPB Belum Memiliki Data dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 2.68. Indikator TPB yang Belum Memiliki Data Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Berikut rincian dari TPB, Target dan Indikator TPB yang Belum Memiliki Data dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.155. Rincian TPB berdasarkan Tujuan, Target dan Indikator yang Belum Memiliki Data Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

TPB	Target	Jumlah Indikator
Tujuan 1	Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan.	2
Tujuan 1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	3
Tujuan 1	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	3

TPB	Target	Jumlah Indikator
Tujuan 2	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2
Tujuan 2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	1
Tujuan 3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	2
Tujuan 3	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan	1
Tujuan 3	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	1
Tujuan 3	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	1
Tujuan 4	Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif	2
Tujuan 4	Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	1
Tujuan 4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	1
Tujuan 5	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	1
Tujuan 6	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	1
Tujuan 6	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumberdaya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	1

TPB	Target	Jumlah Indikator
Tujuan 8	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	
Tujuan 9	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan mengusahakan penyediaan akses universal internet negara negara kurang berkembang pada tahun 2020	1
Tujuan 11	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	1
Tujuan 11	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia	1
Tujuan 12	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	1
Tujuan 16	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	1
Tujuan 16	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	1
Tujuan 16	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	1
Tujuan 17	Memperkuat mobilisasi sumberdaya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	3
Tujuan 17	Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi	1

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab untuk memenuhi asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengawasan APBD dimaksud yang ditetapkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta pihak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Gambaran umum keuangan daerah menguraikan beberapa aspek berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan rencana kerangka pendanaan. Masing-masing dari aspek tersebut diuraikan dengan analisis sebagaimana diuraikan di bawah ini.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya merupakan acuan bagi daerah dalam memproyeksikan dan merencanakan pembangunan daerah pada masa berikutnya, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan mendatang. Berdasarkan pada hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, dapat diketahui berapa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah,

dan pembiayaan daerah yang dapat menjadi ukuran dalam penentuan target keuangan daerah.

Ruang lingkup analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. LKPD dimaksud disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan audit keuangan. Analisis keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan LKPD, analisis ini dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah direncanakan dan anggarkan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sehingga menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan dan struktur masing-masing pos kode rekening dalam APBD.

Kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah selama kurun waktu tahun RPJMD Tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari pemerintah pusat yang diperoleh dari bagian daerah atas Dana Perimbangan merupakan sumber utama dari pendapatan daerah, dengan tetap berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah;
2. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan objektif, efektif, efisien, ekonomis dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil pembangunan yang optimal sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dan mengikuti kaidah *money follow program*;
3. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dicatat dalam APBD;
4. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi dari pengeluaran belanja;
5. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dan/atau mencukupi anggarannya dalam APBD;

6. Pengelolaan keuangan daerah wajib mempedomani asas-asas umum, yaitu:
 - a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan dari tugas desentralisasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah didanai oleh APBD;
 - e. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan serta pembiayaan daerah yang berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan dari pembangunan daerah;
 - f. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
 - g. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - i. Pendapatan Daerah;
 - ii. Belanja Daerah;
 - iii. Pembiayaan Daerah;
 - h. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan;
 - i. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja;

- j. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus pendanaan yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan.

Analisis APBD Kabupaten Pesisir Barat pada dokumen ini menggunakan data pada rentang waktu tahun anggaran 2016-2020. Penentuan batas waktu ini ditujukan untuk memudahkan proses analisis kinerja keuangan daerah di masa lalu yang akan digunakan untuk memproyeksi keuangan daerah pada masa yang akan datang. Melalui analisis keuangan pada rentang waktu 2016-2020 tersebut diharapkan mampu memberikan proyeksi keuangan daerah di masa mendatang dengan lebih baik dan Proporsional demi terwujudnya target-target pembangunan daerah.

Tabel 3.1. Perkembangan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi TA 2016	Realisasi TA 2017	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2020
A	PENDAPATAN	738.441.026.059	813.113.164.459	775.333.888.139	831.574.978.358	806.559.354.257
1	Pendapatan Asli Daerah	20.710.860.363	42.895.150.221	23.481.041.773	29.323.369.726	27.813.379.281
1.1	Pajak daerah	3.856.121.890	5.101.054.614	6.415.256.314	7.189.278.671	7.140.880.419
1.2	Retribusi Daerah	8.185.158.050	2.499.888.783	2.880.782.306	3.254.153.503	3.020.413.607
1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	0	0	0	0	1.929.479.534
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	8.669.580.423	35.294.206.824	14.185.003.153	18.879.937.552	15.722.605.721
2	Dana Perimbangan	594.201.363.000	628.776.506.574	573.283.931.025	587.653.782.034	578.256.314.977
2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	16.395.731.502	26.204.844.375	22.151.402.963	13.260.928.984	16.261.616.870
2.2	DAU	413.299.797.000	410.991.252.000	417.316.170.000	435.029.435.000	404.769.066.000
2.3	DAK	164.505.834.498	191.580.410.199	133.816.358.062	139.363.418.050	142.779.101.107
2.4	DID	0	0	0	0	14.446.531.000
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	123.528.802.696	141.441.507.664	178.568.915.340	214.597.826.598	200.489.659.999
3.1	Hibah	0	0	21.440.640.000	24.512.160.000	24.737.150.000
3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	51.348.160.696	48.798.737.208	47.783.898.569	69.068.458.502	55.972.412.999
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	0	10.000.000.000	0	0
3.6	Pendapatan Lainnya	72.180.642.000	224.865.760	393.800.675	8.500.000	25.000.000
3.7	Dana Desa	0	92.417.904.696	98.950.576.096	121.008.708.096	119.755.097.000

No	Uraian	Realisasi TA 2016	Realisasi TA 2017	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2020
B	BELANJA	732.750.194.933	811.738.309.195	797.058.152.359	818.269.505.936	837.530.914.781
1	Belanja Tidak Langsung	304.504.504.773	323.026.153.203	353.159.255.351	400.271.319.721	425.855.469.548
1.1	Belanja Pegawai	197.151.294.389	170.107.362.226	189.415.710.881	209.123.552.806	213.485.448.258
1.2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4	Belanja Hibah	9.451.187.000	13.581.840.000	9.989.355.000	15.407.253.421	40.831.248.160
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.848.200.000	1.617.175.000	7.610.893.500	7.352.036.050	2.343.601.000
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota/ dan Pemerintahan Desa	0	542.960.501	1.063.495.200	748.183.200	0
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	95.969.039.384	136.815.049.726	143.863.694.400	166.083.346.194	164.807.343.000
1.8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0	0	331.106.370	331.948.050	333.637.130
1.9	Belanja Tidak Terduga	84.784.000	361.765.750	885.000.000	1.225.000.000	4.054.192.000
2	Belanja Langsung	428.245.690.160	488.712.155.992	443.898.897.008	417.998.186.215	411.675.445.233
2.1	Belanja Pegawai	0	40.890.871.438	61.326.754.932	63.465.961.167	61.847.639.108
2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.684.850.537	133.579.037.293	152.870.696.217	177.481.191.113	164.792.991.727
2.3	Belanja Modal	330.560.839.623	314.242.247.261	229.701.445.859	177.051.033.935	185.034.814.399

Sumber : BPKAD, 2021

Realisasi pendapatan daerah berdasarkan pada APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016-2020 terlihat fluktuatif. Naik di tahun 2017, turun di tahun 2018, begitu juga di tahun 2019 menunjukkan kenaikan namun turun pada tahun 2020. Pada tahun 2017 Kenaikkan terbesar pada pendapatan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari 107 persen. Secara rata-rata tingkat pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah pada periode 2016-2020 juga yang terbesar, yaitu 32 persen lebih. Kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2016-2020 sudah tidak menerima lagi dana penyesuaian, sebagai daerah otonomi baru yang terbentuk di tahun 2012 dan juga daerah termuda di Provinsi Lampung.

Secara rinci tingkat pertumbuhan dari masing-masing pos penerimaan dan belanja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Rata-rata Pertumbuhan APBD 2016-2020 Kabupaten Pesisir Barat (%)

No	Uraian	Realisasi TA 2016	Realisasi TA 2017	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2020	Rata-rata Pertumbuhan
A	PENDAPATAN	29,49	10,11	-4,65	7,25	-2,98	7,85
1	Pendapatan Asli Daerah	78,57	107,11	-45,26	24,88	-4,31	32,20
1.1	Pajak daerah	6,44	32,28	25,76	12,07	-0,67	15,18
1.2	Retribusi Daerah	748,15	-69,46	15,24	12,96	2,08	141,79
1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	23,67	307,10	-59,81	33,10	-6,79	59,46
2	Dana Perimbangan	36,55	5,82	-8,83	2,51	-1,60	6,89
2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	8,35	59,83	-15,47	-40,14	22,63	7,04
2.2	DAU	13,83	-0,56	1,54	4,24	-6,96	2,42
2.3	DAK	188,86	16,46	-30,15	4,15	2,45	36,35
2.4	DID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0,01	14,50	26,25	20,18	-6,59	10,87
3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	14,33	0,92	3,05
3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	57,29	-4,96	-2,08	44,54	-18,96	15,17
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-20,00
3.6	Pendapatan Lainnya	83,51	-99,69	75,13	-97,84	-100,00	-27,78
3.7	Dana Desa	0,00	0,00	7,07	22,29	-1,04	5,66
B	BELANJA	32,99	10,78	-1,81	2,66	2,35	9,40
1	Belanja Tidak Langsung	23,20	6,08	9,33	13,34	6,39	11,67
1.1	Belanja Pegawai	24,03	-13,72	11,35	10,40	2,09	6,83
1.2	Belanja Bunga	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
1.3	Belanja Subsidi	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
1.4	Belanja Hibah	-42,06	43,71	-26,45	54,24	165,01	38,89
1.5	Belanja Bantuan Sosial	295,76	-12,50	370,63	-3,40	-68,12	116,47

No	Uraian	Realisasi TA 2016	Realisasi TA 2017	Realisasi TA 2018	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2020	Rata-rata Pertumbuhan
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota/ dan Pemerintahan Desa	-100,00	100,00	95,87	-29,65	-100,00	-6,76
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	35,14	42,56	5,15	15,44	-0,77	19,51
1.8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,25	0,51	0,15
1.9	Belanja Tidak Terduga	0,00	326,69	144,63	38,42	230,95	148,14
2	Belanja Langsung	40,95	14,12	-9,17	-5,83	-1,51	7,71
2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	49,98	3,49	-2,52	10,19
2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,19	36,74	14,44	16,10	-7,15	15,86
2.3	Belanja Modal	48,99	-4,94	-26,90	-22,92	4,50	-0,25

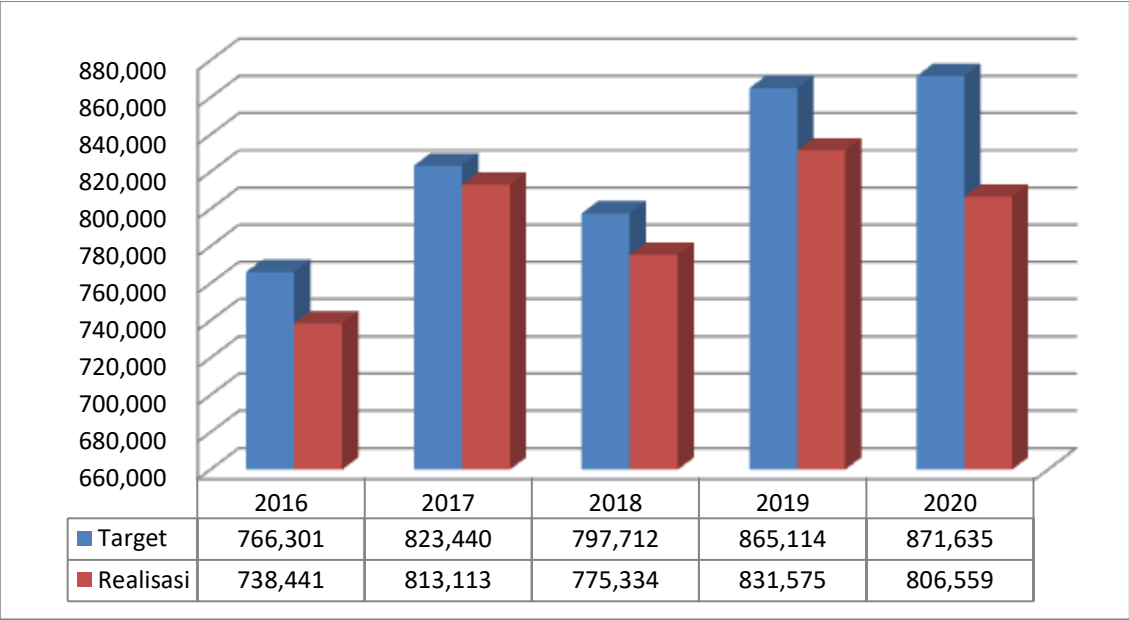
Sumber : BPKAD, 2021

Pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Pesisir Barat dalam periode 2016-2020 tumbuh rata-rata sebesar 7,80 persen pertahun, sedangkan belanja daerah tumbuh rata-rata sebesar 9,40 persen pertahun, lebih besar dari pertumbuhan pendapatan daerah.

a. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam kurun waktu periode 2016-2020 telah mengalami perkembangan yang signifikan, dimulai pada tahun 2016 pendapatan daerah berada pada angka Rp.766.301 milyar rupiah dengan capaian realisasi Rp.738.441 milyar rupiah atau mencapai 99,88% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp.871.635 milyar rupiah dengan capaian sebanyak Rp.806.559 milyar rupiah atau sebesar 97,19%. Berdasarkan pada perhitungan, pendapatan daerah setiap tahunnya rata-rata mengalami peningkatan sebesar 4,91% dengan rata-rata capaian realisasi sebanyak 97,19%. Secara lengkap data perkembangan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

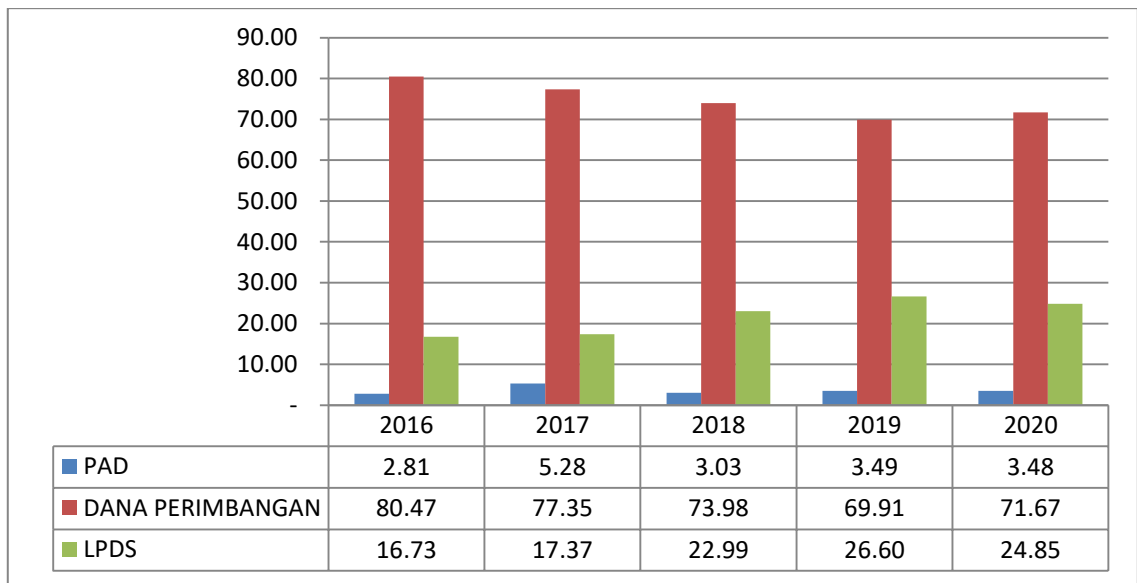
Gambar 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah)



Sumber : BPKAD, 2021

Pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Barat masih didominasi oleh Pendapatan dari Dana Perimbangan atau Transfer dari Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi. Selama Tahun 2016—2020 kontribusi Dana Perimbangan rata-rata sebesar 74,68 persen, kemudian Lain-lain Pendapan Daerah yang Sah (LPDS) rata-rata sebesar 21,31 persen, sedangkan kontribusi PAD rata-rata hanya 3,62 persen.

Gambar 3.2. Proporsi Kontribusi Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020 (persen)



Sumber: BPKAD, 2021

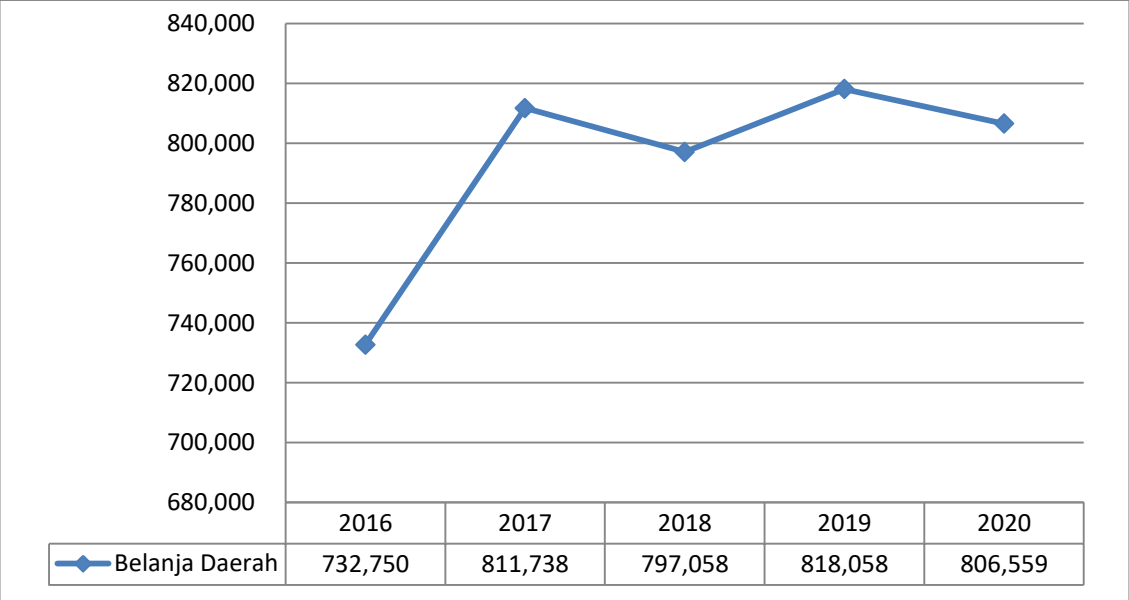
b. Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban dari pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan dari nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2016-2020. Pada penjabaran tentang belanja daerah dalam periode 2016-2020 ini masih mempergunakan struktur belanja daerah berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga penjabaran menggunakan pos Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah. Belanja Tidak Langsung dianggarkan untuk membiayai : (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Bunga; (3) Belanja Subsidi; (4) Belanja Hibah; (5) Bantuan Sosial; (6) Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota/ dan Pemerintahan Desa; (7) Belanja Bantuan Keuangan Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa; (8) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan (9) Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Wajib (Wajib Pelayanan Dasar dan Wajib Non Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan, Fungsi Penunjang dan Fungsi Pendukung Pemerintahan Daerah yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah. Belanja Langsung dianggarkan untuk (1) Belanja Pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja; (2) Belanja Barang dan Jasa; dan (3) Belanja Modal.

Pada tahun 2016 realisasi total belanja daerah sebesar Rp.732.750 milyar rupiah dan pada Tahun 2020 mencapai Rp.806,559 miliar. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Pesisir Barat dengan membandingkan antara target dan realisasi dalam kurun waktu 2016-2020 secara rinci sebagai berikut:

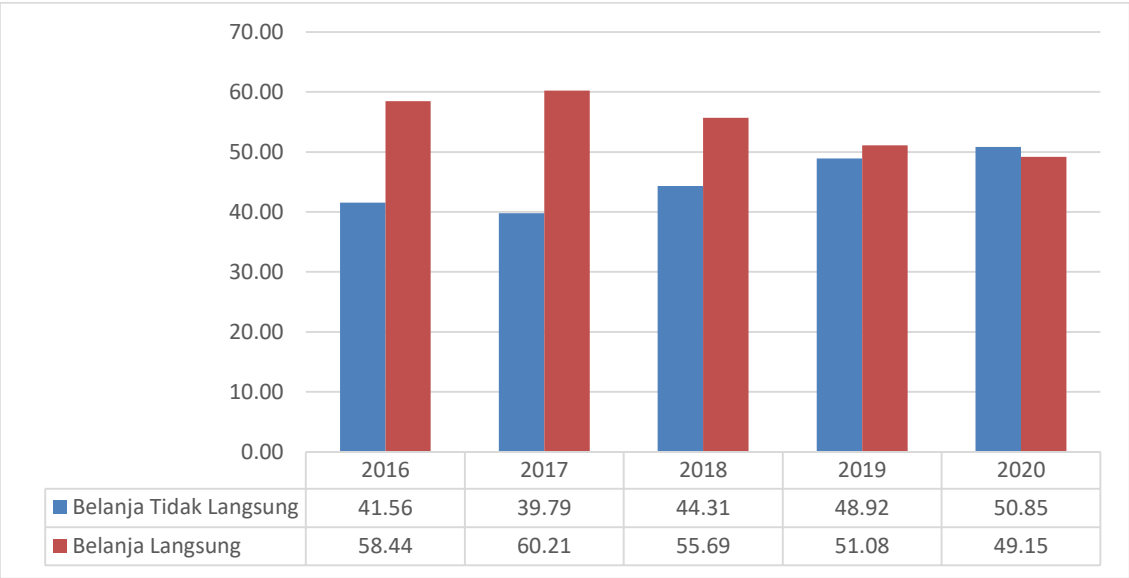
Gambar 3.3. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020



Sumber : BPKAD, 2021

Selama kurun waktu tahun 2016-2020 porsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Belanja Daerah sudah cukup baik, di mana porsi Belanja Langsung selalu lebih besar dibandingkan Belanja Tidak Langsung. Selama periode itu rata-rata Belanja Tidak Langsung sebesar 45,05 persen dan Belanja Langsung sebesar 54,95 persen.

Gambar 3.4. Perkembangan Perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Pesisir Barat Tahun 2016—2020 (Persen)



Sumber : BPKAD, 2021

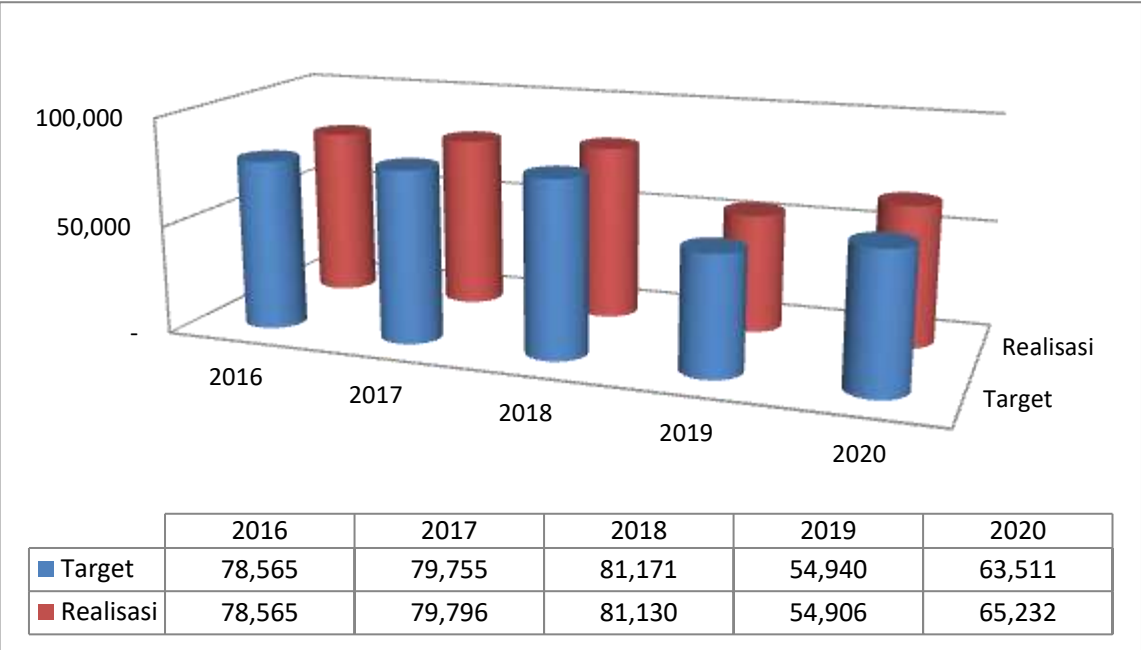
c. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah daerah, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dan dirinci berdasarkan pada urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2016 sebesar Rp.78.565.102.023,00 dan telah terealisasi sebanyak Rp.78.565.102.023,00 atau 100%. Pada tahun 2017 pembiayaan daerah berada pada angka 79.755.933.149,00 dan terealisasi pada angka Rp.79.796.752.551,00 atau 100,05%. Berikutnya pada tahun 2018 angka target sebesar Rp.81.171.607.815,00 dengan capaian sebesar 99,95% atau Rp.81.130.752.613,00. Sedangkan target pada tahun 2019 sebesar Rp.54.940.244.357,00 dengan capaian Rp.54.906.488.393,00 atau 99,94%. Sementara itu, pada tahun 2020, angka target sebesar Rp.63.511.960.815 dan terealisasi Rp.65.232.030.209,00 atau 102.71%.

Gambaran mengenai perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam kurun waktu tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Gambar 3.5. Persentase Perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung APBD Pesisir Barat Tahun 2016—2020 (Persen)



Sumber : BPKAD, 2021

Atas dasar analisis kinerja APBD Tahun 2016—2020 berikut pertumbuhan sebagaimana diuraikan di atas, maka ditargetkan APBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021

No	Uraian	Target 2021
A	PENDAPATAN DAERAH	903.369.140.919
1	Pendapatan Asli Daerah	61.094.634.392
1.1	Pajak daerah	10.940.455.300
1.2	Retribusi Daerah	2.030.833.050
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	1.929.479.534
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	46.193.866.508
2	Pendapatan Transfer	812.303.446.527
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	702.385.517.000
2.1.1	Dana Perimbangan	574.118.585.000
	- DBH	11.856.204.000
	- DAU	414.730.347.000
	- DAK	147.532.034.000
2.1.2	Dana Insentif Daerah	8.511.835.000
2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0
2.1.4	Dana Keistimewaan	0
2.1.5	Dana Desa	119.755.097.000
2.2	Transfer Antar Daerah	109.917.929.527
2.2.1	DBH	109.917.929.527
2.2.2	Bantuan Keuangan	0
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	29.971.060.000
3.1	Pendapatan Hibah	29.971.060.000
3.1.1	Dana Darurat	0
3.1.2	Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0
B	BELANJA DAERAH	920.869.140.919
1	Belanja Operasi	521.926.031.285
1.1	Belanja Pegawai	263.146.814.696
1.2	Belanja Barang dan Jasa	241.082.524.459
1.3	Belanja Bunga	0
1.4	Belanja Subsidi	0
1.5	Belanja Hibah	11.272.242.130
1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.424.450.000
2	Belanja Modal	228.075.666.012
3	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000
4	Belanja Transfer	164.867.443.622
4.1	Belanja Bagi Hasil	2.117.690.622
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	162.749.753.000
	SURPLUS/DEFISIT	(17.500.000.000)
C	PEMBIAYAAN DAERAH	
1	Penerimaan Pembiayaan	25.000.000.000
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	25.000.000.000
2	Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000
2.1	Penyertaan modal daerah	7.500.000.000
2.2	Pengeluaran pembiayaan lainnya	0

Sumber : BPKAD, 2021

Pendapatan Daerah di tahun 2021 meningkat sekitar 11,97 persen menjadi Rp.903.369.140.919 dan pada sisi Belanja Daerah juga meningkat sekitar 6,53 persen menjadi Rp.920.869.140.919 sehingga diperkirakan APBD Tahun 2021 mengalami defisit sekitar Rp.17,5 miliar.

3.1.2. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui informasi kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktiva serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana untuk pembangunan daerah pada periode tertentu. Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada pemerintah daerah, legislatif daerah maupun kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah, stakeholders pembangunan serta masyarakat luas tentang keadaan kekayaan daerah atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Elemen utama dari neraca daerah meliputi pada aset daerah, kewajiban daerah dan ekuitas dana yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening. Data yang dipergunakan adalah pelaporan neraca daerah Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 31 desember periode tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 3.4. Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat 2016-2020

Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	82.614.243.558	79.153.926.449	58.968.497.992	66.187.396.346	33.954.832.521
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	6.877.000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	467.275.774	872.528.060	94.461.769	2.869.049	-
Kas di BLUD	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara JKN dan Kas di Bendahara FKTP	1.190.286.946	1.004.166.625	344.770.400	466.042.541	223.433.691
Kas di Bendahara BOS			-	1.626.200.000	146.957.883
Kas Lainnya	40.819.402	195.835.202	-	-	20.046.777
Setara Kas	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
Piutang Pendapatan	8.672.937.843	33.562.806.788	35.155.502.735	26.738.272.266	24.749.794.512
Piutang Lainnya	227.166.921	-	-	9.733.303.550	170.000.000
Penyisihan Piutang	- 503.977.807	- 606.312.233	- 701.532.553	- 793.377.683	- 986.793.838
Beban di Bayar di Muka	231.583.332	30.000.000	202.309.863	373.958.067	418.381.131
Persediaan	2.271.679.054	5.522.589.277	7.125.142.438	7.682.560.685	9.634.139.990
JUMLAH ASET LANCAR	95.212.015.023	119.735.540.169	101.189.152.646	112.024.101.821	68.330.792.667
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
Investasi Jangka Panjang Kepada Intensitas Lainnya	-	-	-	-	-

Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-
Dana Bergulir	-	-	-	-	-
Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen					-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7.465.217.262	7.703.096.352
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7.465.217.262	7.703.096.352
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7.465.217.262	7.703.096.352
ASET TETAP					
Tanah	104.518.131.499	158.057.636.092	175.443.697.402	155.494.775.798	155.893.316.501
Peralatan dan Mesin	124.556.167.386	157.311.748.032	180.275.690.486	217.326.334.170	239.763.914.689
Gedung dan Bangunan	281.757.068.571	263.996.917.843	349.438.807.228	579.798.190.616	625.775.481.638
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	663.108.417.325	787.796.083.321	891.823.888.370	950.977.093.199	1.014.433.740.581
Aset Tetap Lainnya	18.985.757.288	21.694.674.968	26.093.276.804	32.440.928.105	36.504.756.339
Konstruksi dalam	51.187.890.773	116.963.090.377	176.991.524.518	17.050.715.204	76.933.715.132

Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
Pengerjaan					
Akumulasi dalam Penyusutan	- 291.144.271.757	- 348.623.540.038	- 423.401.551.590	- 515.219.867.348	- 608.681.591.274
JUMLAH ASET TETAP	952.969.161.084	1.157.196.610.595	1.376.665.333.218	1.437.868.169.744	1.540.623.333.606
DANA CADANGAN					-
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	278.193.715	1.591.741.043	1.591.741.043	1.587.933.979
Kemitraan dengan Pihak Ke Tiga	-	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	-	-	184.954.000	469.416.300	498.011.538
Aset Lain-Lain	650.327.395	- 6.071.481.568	2.162.505.153	2.162.505.153	3.119.794.448
JUMLAH ASET LAINNYA	650.327.395	- 5.793.287.853	3.939.200.195	4.223.662.495	5.205.739.964
JUMLAH ASET	1.049.331.503.503	1.276.138.862.910	1.486.793.686.058	1.561.581.151.322	1.621.862.962.589
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	15.873.129	333.042.236	196.818.812	269.194.100	276.571.167
Untung Bunga	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Pendapatan diterima dimuka	-	-	-	-	-

Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
Utang Beban	20.570.256	160.482.922	311.985.534	329.172.419	13.316.128
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.530.640.963	1.128.465.530	60.110.916.713	46.269.427.314	47.524.529.134
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.567.084.348	1.621.990.688	60.619.721.059	46.867.793.833	47.814.416.429
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	718.892.442	718.892.442
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	718.892.442	718.892.442
JUMLAH KEWAJIBAN	1.567.084.348	1.621.990.688	60.619.721.059	47.586.686.275	48.533.308.871
EKUITAS					
EKUITAS	1.047.764.419.155	1.274.516.872.222	1.426.173.965.000	1.513.994.465.047	1.573.204.653.720
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.049.331.503.503	1.276.138.862.910	1.486.793.686.058	1.561.581.151.322	1.621.737.962.591

Sumber : BPKAD, 2021

Sebagaimana tabel di atas, Aset Kabupaten Pesisir Barat terus bertambah, pada tahun 2016 senilai Rp.1.049.331.503.503,00 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.1.621.862.962.589,00. Jumlah kewajiban ternyata juga meningkat, pada tahun 2016 tercatat hanya Rp.1.567.084.348,00 dan pada tahun 2020 menjadi Rp.48.533.308.871,00. Sebesar 98,5 persen merupakan kewajiban jangka pendek, hanya 1,5 persen yang merupakan kewajiban jangka panjang. Sementara itu ekuitas dana pada tahun 2016 sebesar Rp.1.047.764.419.155,00 dan pada tahun 2020 sebesar Rp.1.573.204.653.720.00.

Tabel 3.5. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2020

Uraian	Rata-rata Pertumbuhan
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Kas Daerah	-11,73
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-47,76
Kas di BLUD	0,00
Kas di Bendahara JKN dan Kas di Bendahara FKTP	-24,14
Kas di Bendahara BOS	1,81
Kas Lainnya	95,95
Setara Kas	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00
Piutang Pendapatan	38,11
Piutang Lainnya	-23,17
Penyisihan Piutang	33,16
Beban di Bayar di Muka	273,82
Persediaan	47,60
JUMLAH ASET LANCAR	-6,24
INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00
Investasi Jangka Panjang Kepada Intensitas Lainnya	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00
Dana Bergulir	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	210,50
Investasi Permanen Lainnya	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	210,50
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	210,50
ASET TETAP	0,00
Tanah	17,09
Peralatan dan Mesin	23,50
Gedung dan Bangunan	21,57
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18,86
Aset Tetap Lainnya	19,95

Uraian	Rata-rata Pertumbuhan
Konstruksi dalam Pengerjaan	102,80
Akumulasi dalam Penyusutan	19,66
JUMLAH ASET TETAP	19,04
DANA CADANGAN	0,00
Dana Cadangan	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00
ASET LAINNYA	0,00
Tagihan Jangka Panjang	0,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	114,39
Kemitraan dengan Pihak Ke Tiga	0,00
Aset Tidak Bewujud	51,98
Aset Lain-Lain	-223,09
JUMLAH ASET LAINNYA	-223,77
JUMLAH ASET	16,46
KEWAJIBAN	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	383,44
Untung Bunga	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
Pendapatan diterima dimuka	0,00
Utang Beban	156,83
Utang Jangka Pendek Lainnya	1019,30
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	707,35
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00
Utang Dalam Negeri	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	707,58
EKUITAS	0,00
EKUITAS	16,07
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	16,46

Sumber : BPKAD, 2021

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan aset Kabupaten Pesisir Barat mengalami pertumbuhan signifikan rata-rata 16,46 persen pertahun. Namun kewajiban juga mengalami pertumbuhan rata-rata 707,58 persen pertahun. Sementara perhitungan ekuitas mengalami pertumbuhan rata-rata 16,07 persen pertahun.

Dari kedua tabel di atas dapat diberikan penekanan gambaran kondisi asset daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut:

1. Aset Kabupaten Pesisir Barat selama periode 2016-2020. Pada tahun 2016 jumlah aset sebesar Rp.1,049 triliun dan pada tahun 2020 mencapai Rp.1,62 triliun. Bertambah sekitar Rp.572,53 miliar atau meningkat sebesar 54,56 persen.
2. Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat selama periode 2016-2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 hanya Rp.1,567 miliar sedangkan pada akhir tahun 2020 mencapai Rp.48,66 miliar.

- Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Pesisir Barat periode 2016-2020 naik rata-rata sebesar 16,07% pertahun.
- Berdasarkan dari neraca Kabupaten Pesisir Barat periode tahun 2016--2020, maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	6.075,74	7.382,01	166,92	235,41	140,79
2	Rasio Cepat (<i>Quick Ratio</i>)	5.930,78	7.041,53	155,17	222,63	122,76
3	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,15	0,13	4,08	3,00	2,95
4	Rasio Hutang terhadap Modal	0,15	0,13	4,25	3,10	3,04

Sumber : BPKAD, 2021 (data diolah)

Hasil perhitungan rasio-rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan berikut ini:

a) Rasio Likuiditas

Rasio *likuiditas* yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Pesisir Barat yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, kemampuan aset lancar untuk menyelesaikan masalah utang lancar (jangka pendek) masih sangat baik, meskipun semakin menurun hingga tahun 2020. Kemampuan membayar hutang jangka pendek (hutang lancar) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selama 2016-2020 rata-rata sebesar 2.526,31 kali.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick rasio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih *likuid*. Sama halnya dengan perkembangan kondisi *Current Ratio*, berdasarkan tabel di atas, *quick rasio* juga mengalami penurunan kemampuan dari tahun 2016-2020, meskipun demikian kemampuan

membayar hutang Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggunakan dana cepat rata-rata sebesar 2.435,29 kali.

b) Rasio Likuiditas

1. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio *solvabilitas* terdiri atas:

2. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2016 sebesar 1,22 dan pada tahun 2020 sebesar 2,95. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil sekali

3. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2016 rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 1,24 serta tahun 2020 sebesar 3,04. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis terhadap kebijakan pengelolaan keuangan periode sebelumnya memberikan gambaran terhadap arah pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Barat khususnya dalam pemenuhan target-target pembangunan. Kebijakan yang akan dilihat terkait dengan pengelolaan belanja daerah, khususnya pada belanja pegawai aparatur dan pengelolaan pembiayaan daerah dalam menyeimbangkan neraca APBD.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah, khususnya pada belanja pegawai aparatur. Proporsi dari penganggaran belanja pegawai aparatur dapat memberikan gambaran pengelolaan keuangan APBD, apakah telah dikelola dengan efektif dan efisien. Semakin tinggi proporsi belanja pegawai aparatur maka diasumsikan akan semakin rendah Proporsi belanja yang bersifat subtransial untuk pembangunan dan/atau pemenuhan program dan kegiatan, sebaliknya bila semakin rendah proporsi belanja pegawai aparatur maka diasumsikan akan semakin tinggi proporsi belanja untuk pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Oleh karena itu, perhitungan proporsi belanja pegawai aparatur dapat memberikan gambaran tentang efektivitas perencanaan dan penganggaran dalam APBD dan kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan. Berikut perhitungan proporsi belanja pegawai aparatur Kabupaten Pesisir Barat:

Tabel 3.6. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020

Tahun	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (%)
2018	189.415.710.881	796.540.612.359	23,78
2019	209.123.552.806	822.769.505.935	25,42
2020	213.485.448.258	840.530.914.781	25,40

Sumber : BPKAD, 2021

Berdasarkan pada data di atas, dapat dilihat bahwa proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur menunjukkan prosentase yang fluktuatif. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Pesisir Barat selama 2018-2020 rata-rata sebesar 24% dari keseluruhan total pengeluaran.

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Barat ditinjau berdasarkan pada posisi surplus dan/atau defisit anggaran. Kondisi surplus APBD adalah apabila jumlah target pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan jumlah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan, sebaliknya kondisi defisit APBD adalah apabila jumlah target pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan jumlah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Sementara itu surplus riil dan/atau defisit riil didapatkan dari perhitungan realisasi APBD.

Tabel 3.7. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018—2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	775.333.888.139	831.574.978.358	806.559.354.257
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	797.058.152.359	818.269.505.936	837.530.914.781
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	4.500.000.000	3.000.000.000
	Defisit Riil	-21.724.264.220	8.805.472.422	-33.971.560.524

Sumber : BPKAD, 2021

Berdasarkan pada data realisasi APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018-2020, defisit riil terjadi pada 2018 (Rp.21,724 miliar), dan 2020 (Rp.33,971 miliar). Defisit riil sebagaimana dapat dilihat pada data di atas ditutupi dengan komponen pembiayaan daerah, yaitu berasal dari SiLPA.

Tabel 3.8. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018-2020

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil		
		2018 (Rp.)	2019 (Rp.)	2020 (Rp.)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	81.130.752.613	59.406.488.392	68.232.030.209
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

Sumber : BPKAD, 2021

Seluruh defisit yang terjadi yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2020 seluruhnya dapat ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang seratur persen (100%) teralisasi pada setiap tahunnya.

Tabel 3.9. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

No	Uraian	2018		2019		2020	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	81.130.752.613	100	59.406.488.392	100	68.232.030.209	100
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD, 2021

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan daerah bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan pendanaan dan/atau pembiayaan suatu organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun dengan memperhatikan kondisi capaian kinerja pendanaan pada tahun-tahun sebelumnya serta memperhitungkan kemungkinan peluang, hambatan dan tantangan dalam lima tahun mendatang . Dalam hal ini, kerangka pendanaan yang disusun untuk Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022-2026 dengan berdasarkan pada capaian tahun 2016-2020.

Proyeksi keuangan untuk lima tahun ke depan atau Tahun 2022-2026 akan berpedoman pada regulasi yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , serta peraturan turunan lainnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan anggaran dan kapasitas daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan umum. Oleh karena itu, pendapatan daerah merupakan hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan anggaran. Perhitungan kemampuan anggaran Kabupaten Pesisir Barat terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah bergantung pada kemampuan pendanaan anggaran dalam kurun waktu periode RPJMD kedepan.

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang bersifat indikatif atau dapat berubah dan/atau berbeda sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsi yang dipergunakan tidak mengalami perubahan. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data historis realisasi selama tahun 2016-2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki, antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi (i) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat; (ii) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah; (iii) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; (iv) Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Pendapatan Transfer yang meliputi : (i) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah; (ii) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK); (iii) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; dikoordinasikan sesuai dengan kewenangan.

Berdasarkan pada arah kebijakan peningkatan pendapatan daerah dimaksud, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022-2026 menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Dana Transfer, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia juga mempengaruhi kemampuan Masyarakat dalam sektor Perekonomian, sehingga mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah masih dalam tahapan peningkatan kesehatan masyarakat dan memperbaiki kembali struktur ekonomi yang terguncang akibat Pandemi Covid-19.
4. Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan daerah paling tinggi berada pada kisaran 1-2%.

Pada sisi belanja, Belanja Daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di suatu daerah akan digerakkan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut.

Proyeksi Belanja didasarkan pada perhitungan proyeksi pendapatan daerah dan pembiayaan daerah serta dengan memperhatikan pada rata-rata pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2016-202. Sementara itu, dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Proyeksi belanja daerah dilakukan berdasarkan pada data historis realisasi selama tahun 2016-2020, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan belanja daerah tahun 2016-2020 meskipun rata-rata naik 42,66% namun yang difokuskan pada Belanja Tidak Langsung dengan variabel *fix cost* utamanya yaitu belanja pegawai yang mengalami rata-rata kenaikan 9,46 persen;
2. Pertumbuhan belanja langsung tahun 2016-2020 dengan melihat Pertumbuhan belanja barang dan jasa tahun 2016-2020 sebesar 6,41%;
3. Meskipun Pertumbuhan belanja modal tahun 2016-2020 mengalami rata-rata penurunan (0,25%), namun proyeksi ke depan belanja modal justru akan mengalami kenaikan karena banyak infrastruktur yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh daerah selama periode RPJMD Tahun 2016-2020.
4. Kebijakan Belanja untuk memenuhi prioritas pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Barat.

Proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026 secara ringkas ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 3.10. Penetapan dan Proyeksi APBD Tahun 2022-2026

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN DAERAH	909.641.882.399	904.309.437.334	910.362.926.302	916.815.619.232	923.719.539.232
1.1	Pendapatan Asli Daerah	62.620.651.202	63.142.198.886	63.899.468.010	64.933.913.584	66.355.689.080
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	11.649.500.830	11.882.490.847	12.120.140.664	12.423.144.180	12.795.838.506
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.923.927.000	2.116.319.700	2.539.583.640	3.174.479.550	4.126.823.415
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.929.479.534	1.931.409.014	1.933.340.423	1.935.273.763	1.937.209.037
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	47.117.743.838	47.211.979.326	47.306.403.284	47.401.016.091	47.495.818.123
1.2	Pendapatan Transfer	816.450.749.997	809.985.347.624	814.657.929.651	819.440.066.435	824.273.378.154
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	578.265.888.470	582.544.257.021	586.869.403.350	591.303.517.011	595.788.217.115
	1 Dana Bagi Hasil	11.856.204.000	12.093.328.080	12.335.194.642	12.643.574.508	12.959.663.870
	2 Dana Alokasi Umum	418.877.650.470	423.066.426.975	427.297.091.244	431.570.062.157	435.885.762.778
	3 Dana Alokasi Khusus	147.532.043.000	147.384.501.966	147.237.117.464	147.089.880.347	146.942.790.466
	b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	128,266,932,000	128.514.954.029	128.763.463.590	129.012.461.650	129.261.949.177
	1 Dana Insentif Daerah	8.511.835.000	8.520.346.835	8.528.867.182	8.537.396.049	8.545.933.445
	2 Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
	3 Dana Keistimewaan	0	0	0	0	0
	4 Dana Desa	119.755.097.000	119.994.607.194	120.234.596.408	120.475.065.601	120.716.015.732
	c. Pendapatan Transfer Antar Daerah	109.917.929.527	98.926.136.574	99.025.062.711	99.124.087.774	99.223.211.861
	1 Pendapatan Bagi Hasil	109.917.929.527	98.926.136.574	99.025.062.711	99.124.087.774	99.223.211.861
	2 Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	30.570.481.200	31.181.890.824	31.805.528.640	32.441.639.213	33.090.471.998
	1 Hibah	30.570.481.200	31.181.890.824	31.805.528.640	32.441.639.213	33.090.471.998
	2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
	3 Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan Per-UU-an	0	0	0	0	0

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		2022	2023	2024	2025	2026
2	Belanja	927.308.985.778	921.809.437.332	927.862.926.302	933.815.619.233	940.719.539.231
	a. Belanja Operasi	548.414.492.607	546.784.402.096	571.286.828.295	555.370.871.935	558.354.344.975
	1 Belanja Pegawai	251.326.044.640	251.577.370.685	254.093.144.391	256.634.075.835	259.200.416.594
	2 Belanja Barang dan Jasa	281.303.471.757	279.181.517.439	274.977.836.224	282.509.720.197	282.784.698.033
	3 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
	4 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
	5 Belanja Hibah	11.650.576.210	11.767.081.972	38.000.000.000	11.884.752.792	11.896.637.545
	6 Belanja Bantuan Sosial	4.134.400.000	4.258.432.000	4.215.847.680	4.342.323.110	4.472.592.804
	b Belanja Modal	206.885.049.549	204.748.577.079	186.949.975.992	207.468.090.990	211.037.129.765
	c Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	4.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
	d Belanja Transfer	166.009.443.622	166.276.458.158	166.626.122.014	166.976.656.308	167.328.064.491
	1 Belanja Bagi Hasil	2.117.690.622	2.138.867.528	2.160.256.204	2.181.858.766	2.203.677.353
	2 Belanja Bantuan Keuangan	163.891.753.000	164.137.590.630	164.465.865.811	164.794.797.542	165.124.387.137
	SURPLUS/DEFISIT	(17.667.103.379)	(17.499.999.999)	(17.500.000.000)	(17.000.000.000)	(16.999.999.999)
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
	a Penerimaan Pembiayaan	22.667.103.379	23.500.000.000	23.500.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000
	1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	22.667.103.379	23.500.000.000	23.500.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000
	2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
	3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	0	0	0	0	0
	4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
	5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau	0	0	0	0	0
	6 Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan per UU an yg berlaku	0	0	0	0	0

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		2022	2023	2024	2025	2026
	b. Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
	1 Pembayaran cicilan pokok utang yg jatuh tempo	0	0	0	0	0
	2 Penyertaan modal daerah	5.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
	3 Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0
	4 Pemberian pinjaman daerah; dan/atau	0	0	0	0	0
	5 Pengeluaran pembiayaan lainnya	0	0	0	0	0
4	Pembiayaan Netto	17.667.103.379	17.500.000.000	17.500.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0	0	0	0	0

Sumber : Proyeksi RPJMD Tahun 2021-2026

Meskipun proyeksi terhadap pendapatan daerah pada periode lima tahun ke depan akan mengalami kenaikan namun tingkat kenaikannya tidak terlalu signifikan sehingga masih sangat terbatas untuk mendanai berbagai program pembangunan. Sebagai daerah otonomi baru (DOB), pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Barat masih sangat tergantung kepada dana transfer pemerintah pusat, sementara pemerintah pusat sendiri masih berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi dan antisipasi terhadap pandemi yang kemungkinan masih akan berlangsung.

Proyeksi pendapatan daerah yang disusun dianggap masih realistis seiring dengan kemampuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam melakukan optimalisasi PAD dan mengupayakan peningkatan Dana Transfer Pusat dan Provinsi Lampung serta sumber pendapatan lainnya yang sah. Pemulihan ekonomi global, nasional dan regional pasca Pandemi Covid-19 diperkirakan akan mulai memasuki babak baru, dimana sektor-sektor perekonomian akan kembali tumbuh dan berkembang.

Pada sisi belanja daerah, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terus ditingkatkan untuk dapat mencapai hasil maksimal dari setiap mata anggaran demi pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk pengembangan BUMD PT. Krui Sukses Mandiri serta penyertaan Modal pada PT. Bank Lampung. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kedepan juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pinjaman daerah bila berdasarkan pada perkembangan tahun berjalan terdapat kondisi-kondisi yang menyebabkan hal tersebut.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan proyeksi lima tahun, 2022-2026. Setiap pengeluaran daerah harus selalu didasarkan pada kapasitas pendapatan. Mengingat luas dan besarnya cakupan tantangan pembangunan daerah yang akan dihadapi, maka harus ada upaya untuk dapat mendorong partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan, serta optimalisasi penggunaan Dana Desa.

Kemampuan keuangan daerah merupakan total dari ketersediaan dana yang diperkirakan dapat tersedia pada periode tertentu untuk membiayai seluruh program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Adapun kapasitas riil kemampuan keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah dikurangi dengan belanja yang wajib mengikat dan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.11. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022-2026

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		2022	2023	2024	2025	2026
I	Penerimaan :					
1	Pendapatan	909,641,882,399	904,309,437,334	910,362,926,302	916,815,619,232	923,719,539,232
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	22,667,103,379	23,500,000,000	23,500,000,000	23,000,000,000	23,000,000,000
	Total Penerimaan (1 s.d. 3)	932,308,985,778	927,809,437,334	933,862,926,302	939,815,619,232	946,719,539,232
	Dikurangi					
II	Pengeluaran :					
1	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000
	Kapasitas Riil kemampuan keuangan (I- II)	927,308,985,778	921,809,437,334	927,862,926,302	933,815,619,232	940,719,539,232

Sumber : RKPD Tahun 2022 dan Proyeksi RPJMD Tahun 2021-2026

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian tindakan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat keterbatasan anggaran, maka penerapan prinsip money follow program dan money follow function mutlak dilaksanakan.

Selanjutnya Kapasitas riil keuangan sebagaimana tabel 3.11 akan dialokasikan dengan skala prioritas, yaitu untuk mendanai :

- a. **Prioritas I**, pendanaan daerah dialokasikan untuk mendanai program-program untuk (a) belanja pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 6 urusan wajib pelayanan dasar: (i) Pendidikan; (ii) Kesehatan; (iii) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (iv) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (v) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; (vi) Sosial, (b) belanja pegawai dan (c) belanja barang dan jasa pemenuhan sarana dan prasarana kantor;
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk (a) belanja penambahan aset tetap dan peningkatan nilai aset tetap terutama dalam bidang infrastruktur pemerintah daerah, (b) belanja prioritas daerah berupa program kerja dari kepala daerah terpilih dan (c) pendanaan belanja program-program urusan pemerintahan daerah sebagaimana menjadi kewenangan dari daerah guna mendukung pencapaian dan sinergitas dengan program pemerintah (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan program Provinsi Lampung (RPJMD Provinsi Lampung 2019—2024) serta memberikan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah;
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk pembiayaan belanja penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya selain yang menjadi Prioritas I dan II, belanja ini diarahkan untuk (a) Belanja Bunga, (b) Belanja Subsidi, (c) Belanja Hibah, (d) Belanja Bantuan Sosial, (e) Belanja Tidak Terduga, (f) Belanja Bagi Hasil, dan (g) Belanja Bantuan Keuangan. Belanja pada Prioritas III wajib memperhatikan terlebih dahulu pemenuhan terhadap belanja Prioritas I dan II;

Tabel 3.12. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Uraian	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	927,308,985,778	921,809,437,332	927,862,926,302	933,815,619,233	940,719,539,231
Mendanai:					
Prioritas I:					
Belanja Pegawai	251,326,044,640	251,577,370,685	254,093,144,391	256,634,075,835	259,200,416,594
Belanja Barang Jasa	281,303,471,757	279,181,517,439	274,977,836,224	282,509,720,197	282,784,698,033
Prioritas II					
Belanja Modal	206,885,049,549	204,748,577,079	186,949,975,992	207,468,090,990	211,037,129,765
Prioritas III					
Belanja Bunga	0	0	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	11,650,576,210	11,767,081,972	38,000,000,000	11,884,752,792	11,896,637,545
Belanja Bantuan Sosial	4,134,400,000	4,258,432,000	4,215,847,680	4,342,323,110	4,472,592,804
Belanja Tidak Terduga	6,000,000,000	4,000,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
Belanja Bagi Hasil	2,117,690,622	2,138,867,528	2,160,256,204	2,181,858,766	2,203,677,353
Belanja Bantuan Keuangan	163,891,753,000	164,137,590,630	164,465,865,811	164,794,797,542	165,124,387,137
Total Belanja Prioritas I dan II	927,308,985,778	921,809,437,332	927,862,926,302	933,815,619,233	940,719,539,231
Surplus/Defisit	0	0	0	0	0

Sumber : Proyeksi RPJMD Tahun 2021-2026

Berikutnya, untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat didapatkan asumsi perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.13. Kebijakan Umum Anggaran yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022-2026

No	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Pagu Anggaran (dalam juta rupiah)					Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	58,480	58,539	59,124	62,080	65,184	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	56,104	56,162	61,778	64,867	65,516	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4,787	4,846	4,918	5,164	5,216	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	290	348	351	369	388	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,580	1,639	1,802	2,704	2,839	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	8,121	8,179	12,269	18,404	20,061	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Permukiman	1,433	1,491	1,641	2,133	3,200	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,215	1,274	2,275	3,413	3,720	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,015	1,074	1,975	2,962	3,229	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2,084	2,142	2,544	3,308	3,606	

No	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Pagu Anggaran (dalam juta rupiah)					Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6,783	6,842	7,184	10,058	14,400	
		Program Penataan Bangunan Gedung	157,686	146,671	96,818	64,362	47,581	
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	3,616	3,675	3,678	4,009	4,210	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	467	473	473	516	542	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	308	314	314	343	360	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	1,084	1,142	1,643	2,136	2,329	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	1,000	1,058	1,164	1,513	1,649	
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3,782	3,840	3,844	4,997	5,247	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1,107	1,165	1,177	1,236	1,297	
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	679	737	738	1,107	1,162	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2,313	2,371	2,373	2,587	2,716	
		Program Penanggulangan Bencana	1,108	1,166	1,168	1,226	1,287	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	254	312	312	328	344	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	3,339	3,398	3,401	3,571	3,750	

No	Urusan Pemerintahan	Program Prioritas	Pagu Anggaran (dalam juta rupiah)					Perangkat Daerah
			2022	2023	2024	2025	2026	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	395	454	454	477	501	
		Program Penanganan Bencana	232	291	291	305	321	
		Total	319,275	309,613	273,723	264,188	260,666	

Sumber : Proyeksi RPJMD Tahun 2021-2026

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Permasalahan Pembangunan Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain:

1. Hingga tahun 2020, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesisir Barat masih berada pada peringkat ke-14 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan. Hal tersebut berarti terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Pesisir Barat bila dibandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia;
3. Tingkat Kemiskinan Daerah Kabupaten Pesisir Barat selalu berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Lampung. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat hingga tahun 2020 masih berada pada peringkat ke-4 jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung;
4. Rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Pesisir Barat selama 5 tahun terakhir (2015-2019) adalah sebesar 5 persen, namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat mengalami pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya, yaitu sebesar (1,17%). Pertumbuhan negatif ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang mengubah pola ekonomi masyarakat global secara menyeluruh. Capaian negatif ini juga terjadi pada daerah lainnya di Provinsi Lampung;
5. PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Pesisir Barat berada di bawah rata-rata PDRB Perkapita Provinsi Lampung. Jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung, maka PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat berada pada peringkat ke-13;
6. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Pesisir Barat terus mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2020 NTP Kabupaten Pesisir Barat hanya sebesar 94,73. Atau dengan kata lain petani di Kabupaten Pesisir Barat mengalami defisit pada tahun 2020. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya;
7. Hingga tahun 2020 jalan kabupaten sepanjang 182,660 Km (28,36%) yang tergolong dalam kondisi jalan baik dan hanya sepanjang 68,750 Km (10,67%) yang tergolong dalam kondisi jalan sedang. Mayoritas jalan di

Kabupaten Pesisir Barat berada dalam kondisi rusak, yaitu sepanjang 392,97 Km (60.97%);

- 8. Di Kabupaten Pesisir Barat, hingga tahun 2020 hanya sebanyak 33 persen penduduk penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman. Jika mengacu pada target SDGs, pada tahun 2030 mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua, maka tugas yang sangat berat bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkannya. Bahwa capaian SPM Kabupaten Pesisir Barat secara umum belum optimal;
- 9. Rasio jaringan irigasi atau perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya di Kabupaten Pesisir Barat masih cukup rendah, yaitu hanya 50,94 persen pada tahun 2020. Angka 50,94% tersebut merupakan perbandingan panjang irigasi yang tersedia dibandingkan dengan jumlah panjang irigasi yang dibutuhkan);
- 10. Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan resiko bencana yang berada pada zona merah. Hampir seluruh skor indeks resiko per ancaman berada pada kelas resiko tinggi, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi. Bahkan pada ancaman bencana cuaca ekstrim Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten dengan skor indeks resiko tertinggi di Indonesia.
- 11. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2020 masih berada dalam kategori CC, yang berarti hanya berada pada skor 50-60;
- 12. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2020 berada pada peringkat ke-317 dari 434 kabupaten di Indonesia. Pada tahun tersebut masih terdapat 5 Pekon yang tergolong sebagai Desa Sangat Tertinggal.

4.1.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan yang akan disajikan dalam dokumen RPJMD ini dihasilkan dari analisa data yang disajikan dalam Bab II serta berdasarkan pada tindak lanjut dari hasil rekomendasi KLHS RPJMD. Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	A	Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan;
		B	Masih rendahnya kualitas tenaga pendidikan;
		C	Kondisi Sarana dan Prasarana yang belum optimal;

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
		D	Pencapaian SPM di bidang pendidikan belum optimal;
2	Kesehatan	A	Belum Optimalnya kualitas pelayanan kesehatan;
		B	Rasio tenaga Kesehatan per penduduk masih belum ideal;
		C	Belum Terpenuhinya 9 Jenis Profesi Tenaga Kesehatan;
		D	Belum meratanya distribusi tenaga Kesehatan;
		E	Pencapaian SPM di bidang kesehatan belum optimal;
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A	Jumlah jalan dalam kondisi baik yang belum memadai;
		B	Pembangunan jaringan jalan, jembatan dan drainase belum dilakukan secara integratif;
		C	Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik yang belum memadai;
		D	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang belum ideal dibandingkan dengan jumlah pegawai;
		E	Jumlah sarana dan prasarana fasilitas umum yang belum memadai;
		F	Belum optimalnya pengendalian penataan ruang daerah;
		G	Pencapaian SPM di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang belum optimal;
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	A	Masih rendahnya jumlah jaringan air minum dari sumber air ke rumah tangga dan hunian;
		B	Masih rendahnya jaringan limbah rumah tangga dan hunian;
		C	Masih rendahnya jaringan sanitasi rumah tangga dan hunian;
		D	Jumlah jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik yang belum memadai;
		E	Pencapaian SPM di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum optimal;
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	A	Masih rendahnya budaya dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan peraturan daerah;
		B	Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah yang rawan bencana: tsunami, gempa, banjir, angin kencang, tanah longsor;
		C	Masih minimnya sarana dan prasarana mitigasi dan pasca bencana;
6	Sosial	A	Angka kemiskinan daerah yang tinggi dibandingkan dengan Provinsi Lampung;
		B	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tinggi;
		C	Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat termajinalkan;
		D	Masih rendahnya fasilitas umum yang ramah untuk kaum difabel;
		E	Pencapaian SPM di bidang sosial belum optimal;

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
II	Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja	A	Kurangnya lapangan kerja yang ada di daerah disebabkan kurangnya kebijakan yang mendukung investasi;
		B	Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan skill khusus untuk menciptakan masyarakat wirausaha yang mandiri;
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A	Masih kurangnya pemberdayaan perempuan dalam keluarga hingga pembangunan;
		B	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat;
		C	Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dan masyarakat;
3	Pangan	A	Belum banyaknya diversifikasi produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
		B	Belum optimalnya ketersediaan pangan di lingkungan keluarga;
		C	Masih terjadi kenaikan harga bahan pokok pada hari-hari tertentu disebabkan oleh inflasi daerah
4	Pertanahan	A	Masih terjadi kasus-kasus konflik pertanahan atau sengketa kepemilikan lahan daerah dengan taman nasional hutan bukit barisan selatan;
		B	Masih rendahnya jumlah aset tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan.
5	Lingkungan Hidup	A	Belum optimalnya pengendalian/ pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan;
		B	Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah masyarakat;
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	Belum optimalnya kualitas pelayanan pencatatan sipil;
		B	Belum optimalnya kuantitas pelayanan pencatatan sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	Belum optimalnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan desa dan daerah;
		B	Belum optimalnya kualitasnya aparatur pekon;
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A	Belum optimalnya persiapan daerah dalam menghadapi bonus demografi daerah;
		B	Belum optimalnya penyuluhan terkait Keluarga Berencana di masyarakat;
9	Perhubungan	A	Minimnya jumlah sarana dan prasarana perhubungan daerah;
		B	Belum tersusunnya moda transportasi di daerah dengan baik;
10	Komunikasi dan Informatika	A	Masih minimnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika daerah;
		B	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas manajemen informatika;

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
		C	Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan jumlah BTS;
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	A	Masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai penggerak ekonomi lokal;
		B	Belum optimalnya pembinaan terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah;
		C	Masih sulitnya usaha kecil menengah dalam mengakses bantuan modal dari pihak perbankan;
		D	Masih relatif minimnya pengembangan dan pelatihan softskill dan hardskill pelaku koperasi, usaha kecil dan menengah;
12	Penanaman Modal	A	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir Barat;
		B	Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
13	Kepemudaan dan Olah Raga	A	Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;
		B	Belum optimalnya pembinaan terhadap atlet daerah;
		C	Keterbatasan jumlah sarana prasarana olahraga;
14	Statistik	A	Masih sulitnya melakukan penghitungan data statistik di daerah oleh Perangkat Daerah;
		B	Masih terbatasnya ketersediaan data sektoral
15	Persandian	A	Belum optimalnya kegiatan persandian daerah;
		B	Belum adanya sarana dan prasarana persandian;
		C	Belum adanya SDM yang menguasai;
16	Kebudayaan	A	Masih belum ditetapkannya cagar budaya daerah;
		B	Masih belum optimalnya pengembangan budaya daerah sebagai salah satu atraksi wisata daerah;
17	Perpustakaan	A	Masih belum adanya Perpustakaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
		B	Masih belum adanya manajemen pengembangan dan pengelolaan perpustakaan;
		C	Belum ada pustakawan daerah;
		D	Masih sedikitnya jumlah koleksi judul buku;
		E	Masih rendahnya minat baca masyarakat;
18	Kearsipan	A	Masih belum adanya Gedung Arsip Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
		B	Masih belum adanya manajemen pengembangan dan pengelolaan kearsipan;
		C	Belum ada arsiparis daerah;
III	Urusan Pilihan		
1	Kelautan dan Perikanan	A	Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap;
		B	Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya;
		C	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya perikanan yang sedikit;
		D	Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi;

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
2	Pariwisata	A	Masih belum memadai sarana dan prasarana serta akomodasi di lokasi wisata;
		B	Masih terbatasnya lokasi tujuan wisata di daerah;
		C	Masih belum adanya industri pendukung pariwisata;
3	Pertanian	A	Masih rendahnya produktivitas pertanian;
		B	Masih rendahnya produktivitas perkebunan;
		C	Masih rendahnya produktivitas peternakan;
		D	Masih adanya alih fungsi lahan pertanian;
		E	Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi;
4	Perdagangan	A	Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional;
		B	Masih belum optimalnya pengawasan pasar;
5	Perindustrian	A	Masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan industri kecil dan menengah sebagai penggerak ekonomi lokal;
		B	Belum optimalnya pembinaan terhadap industri daerah
		C	Masih sulitnya industri kecil menengah dalam mengakses bantuan modal dari pihak perbankan;
		D	Masih relatif minimnya pengembangan dan pelatihan softskill dan hardskill pelaku industri kecil;
6	Transmigrasi	A	Masih relatif belum berkembang secara signifikan kehidupan masyarakat transmigran;
		B	Masih belum optimalnya pembinaan masyarakat transmigran dalam pengembangan produk pertanian dan perkebunan dan peternakan;
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
1	Sekretariat Daerah	A	Belum Optimalnya proses pelayanan terhadap kepala daerah;
		B	Belum optimalnya proses pengkoordinasian antar perangkat daerah
2	Sekretariat DPRD	A	Belum optimalnya proses pelayanan kepada DPRD
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
1	Perencanaan	A	Masih belum optimalnya proses perencanaan daerah;
		B	Masih lemahnya pengendalian dan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
		C	Masih belum optimalnya sinergitas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pengendalian;
2	Kuangan	A	Masih belum optimalnya pembinaan dan pengendalian dalam proses penataan usaha keuangan daerah;
		B	Masih belum optimalnya pendataan aset daerah;
		C	Masih rendahnya nilai pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah;

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan	
		D	Masih rendahnya nilai retribusi daerah terhadap Pendapatan Daerah;
3	Kepegawaian	A	Belum optimalnya pembinaan dan pendataan pegawai;
		B	Belum optimalnya merit sistem dalam proses jenjang karir jabatan;
4	Pendidikan dan Pelatihan	A	Belum optimalnya sistem pendidikan dan pelatihan bagi PNS di daerah;
		B	Masih minimnya jumlah PNS yang mendapatkan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
5	Penelitian dan Pengembangan	A	Masih minimnya jumlah kajian penelitian dan pengembangan daerah sebagai materi teknis perencanaan daerah;
		B	Belum optimalnya hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
VI	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		
1	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	A	Masih belum optimalnya proses pembinaan terhadap pegawai daerah;
		B	Masih belum optimalnya proses reviu dan pengendalian terhadap dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan;
		C	Masih belum optimalnya pelaksanaan manajemen pengawasan;
VII	Unsur Kewilayahan		
1	Kecamatan	A	Masih belum meratanya sarana dan prasana di tingkat kecamatan;
		B	Masih belum adanya sistem pelayanan bagi masyarakat yang terintegrasi
VIII	Unsur Pemerintahan Umum		
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	A	Masih belum optimalnya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat;
		B	Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum;

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat (diolah)

4.2 Isu Strategis

A. Isu Strategis Berdasarkan Kriteria Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Kabupaten Pesisir Barat masuk kedalam daftar daerah tertinggal yang ada di Indonesia dan satu-satunya yang berada di Provinsi Lampung. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, sebagai daerah tertinggal tentu ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan diperbaiki. Daerah tertinggal ditetapkan berdasarkan pada kriteria, kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perekonomian Masyarakat;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Sarana Dan Prasarana;
- d. Kemampuan Keuangan Daerah;
- e. Aksesibilitas; dan
- f. Karakteristik Daerah.

Berdasarkan pada kriteria tersebut maka disusunlah isu strategis Kabupaten pesisir barat berdasar pada kriteria daerah tertinggal sebagaimana disebutkan di atas.

4.2.1. Perekonomian Masyarakat

1. Penguatan Struktur Ekonomi

Sektor pertanian dan perikanan merupakan penopang utama struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Barat. Sektor ini harus terus diperkuat, mengingat sektor ini memiliki ketahanan tinggi dalam menghadapi krisis dan Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi yang tinggi terhadap sektor ini. Penguatan struktur ekonomi pada sektor lainnya juga penting dilakukan secara terpadu, khususnya sektor industri dan sektor sektor penyediaan akomodasi dan makan minum agar dapat menjadi penopang dan penggerak perekonomian daerah. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Pesisir Barat dapat lebih cepat.

2. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Pariwisata)

Potensi sumber daya alam Kabupaten Pesisir Barat sangat kaya dan potensial untuk dikembangkan menjadi industri pariwisata. Potensi wisata pantai dengan ombak tinggi yang sangat disukai oleh penggemar *surfing* dari mancanegara serta tidak banyak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Namun demikian, upaya pengembangan sektor tersebut belum optimal. Hal tersebut dicerminkan oleh lama tinggal dan besarnya pengeluaran pengunjung wisata di Kabupaten Pesisir Barat yang masih rendah. Pemerintah Daerah dan *stakeholder* harus bersama-sama mengembangkan destinasi dan obyek wisata lainnya agar lebih beragam baik dari sisi akomodasi dan amenities. Dengan demikian akan meningkatkan daya tarik yang lebih tinggi bagi wisatawan baik nasional maupun mancanegara.

Pemerintah daerah dan seluruh *stakeholder* harus fokus mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata tersebut. Arah kebijakan, strategi, dan alokasi anggaran pembangunan harus diformulasikan dengan baik untuk menunjang pembangunan sektor pariwisata tersebut. Pemerintah daerah sebagai regulator harus membuat kebijakan dan program yang dapat memberikan insentif bagi para investor dan pelaku ekonomi khususnya di sektor pariwisata.

3. Investasi

Keterbatasan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai pembangunan dan pengembangan potensi daerah merupakan salah satu isu yang cukup strategis di Kabupaten Pesisir Barat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus terus berupaya menggali sumber-sumber pendanaan dari sektor lainnya untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan potensi daerah. Salah satunya adalah melalui investasi swasta. Pemerintah Daerah harus segera menerbitkan kebijakan yang mampu menggandeng investor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan pengembangan potensi daerah melalui investasi riil di lapangan dalam bentuk pembentukan usaha. Investasi yang riil di lapangan diharapkan mampu secara nyata menyerap jumlah tenaga kerja.

Paket investasi yang disertai dengan berbagai insentif dan kemudahan bagi investor swasta harus segera dirumuskan dan direalisasikan. Tidak hanya itu, perbaikan iklim investasi dan promosi investasi juga tidak kalah penting untuk segera dilakukan. Dengan demikian, daya saing investasi daerah yang baik akan menarik perhatian para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

4.2.2. Sumber Daya Manusia

1. Pendidikan

Secara umum isu strategis dalam bidang pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat adalah rendahnya angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pesisir Barat, yaitu sebesar 7,82 pada tahun 2019 dan 8,01 pada tahun 2020. Kondisi tersebut berarti secara rata-rata penduduk Kabupaten Pesisir Barat yang berusia 25 tahun ke atas menempuh pendidikan selama 7,82 tahun dan 8,01 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII (2 SMP). Begitu juga dengan harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Pesisir Barat, yaitu hanya 11,98 tahun pada tahun 2019 dan 11,99 tahun pada tahun 2020 atau hanya sampai dengan kelas 3 SMA.

Khusus bagi penduduk miskin, rendahnya daya serap pendidikan bagi mereka adalah isu yang cukup strategis. Hal tersebut tercermin dari angka partisipasi sekolah penduduk 40 persen terbawah usia 13 tahun ke atas yang terendah jika dibandingkan dengan kelompok penduduk 40 persen menengah dan 20 persen teratas. Sementara itu, menurut DTKS tahun 2020 terdapat 24,28 persen anggota rumah tangga miskin usia 7-18 tahun yang tidak/belum pernah sekolah. Pada sisi lain, pemerintah hanya mampu mengcover pendidikan anggota rumah tangga miskin usia sekolah sebesar 8 persen melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Bantuan Siswa Miskin (BSM). Kondisi tersebut harus segera ditangani dan diselesaikan, karena dengan tingkat pendidikan yang rendah, mereka akan sulit untuk meningkatkan kualitas hidupnya baik secara materil dan immateril.

2. Kesehatan

Isu strategis dalam bidang kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat secara umum adalah rendahnya usia harapan hidup, yaitu sebesar 63,50 tahun pada tahun 2020, dan merupakan yang terendah di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut dapat mencerminkan banyak hal, antara lain: angka kematian ibu dan bayi, angka

kesakitan yang tinggi, asupan makanan bergizi yang rendah, pelayanan kesehatan yang belum memadai, dan berbagai hal lainnya. Jika kondisi tubuh penduduk tidak sehat, maka akan sulit untuk menjadi produktif dalam meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.

Selain angka usia harapan hidup, Pandemi Covid-19 merupakan salah satu isu bidang kesehatan di Kabupaten Pesisir barat yang juga terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia dan global. Pandemi Covid-19 pada dasarnya merupakan permasalahan kesehatan, namun efek sistemik yang menyentuh hampir pada seluruh sektor menjadikan Covid-19 layak dijadikan isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus oleh seluruh pelaku pembangunan tidak hanya daerah dan nasional, bahkan seluruh dunia.

Pandemi Covid-19 tidak hanya dapat menurunkan aktivitas dan produktivitas manusia, bahkan mampu menghentikannya. Pertumbuhan ekonomi hampir di seluruh dunia mengalami perlambatan, bahkan banyak pula yang negatif. Tidak terkecuali Kabupaten Pesisir Barat yang mengalami pertumbuhan ekonomi (1,17%) pada tahun 2020. Lebih lanjut, Pandemi Covid-19 telah meningkatkan angka pengangguran hampir pada semua lapangan usaha.

Secara kebijakan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada dasarnya lebih banyak mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan prosedural penanganan Pandemi Covid-19 yang lebih efektif dan efisien dilaksanakan secara simultan dan terorganisir.

3. Kependudukan

Bonus demografi merupakan salah satu isu kependudukan yang paling strategis pada saat ini. Bonus Demografi adalah kesempatan atau jendela peluang keuntungan ekonomis akibat meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan menurunnya penduduk usia non produktif sehingga angka beban ketergantungan penduduk akan menjadi rendah, atau periode ketika rasio ketergantungan mengalami penurunan. Bonus demografi dapat membawa dampak positif dan negatif. Positifnya, melimpahnya jumlah penduduk usia produktif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Negatifnya, jika bonus demografi ini tidak dipersiapkan sebaik mungkin berpotensi menimbulkan berlebuhnya jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan lapangan kerja yang mampu disediakan oleh daerah. Kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan pengangguran yang dapat berakibat pada meningkatnya kemiskinan.

4. Ketenagakerjaan

Hampir setengah (49,29 persen) penduduk Kabupaten Pesisir Barat yang bekerja berpendidikan SD dan tidak sekolah. Sebanyak 45,37 persen lainnya berpendidikan sampai tingkat SMP dan SMA. Hanya 5,34 persen penduduk Kabupaten Pesisir Barat yang bekerja dengan tingkat pendidikan Diploma ke atas (S1 dan S2). Dari kondisi diatas, dapat disimpulkan bahwa isu rendahnya tenaga kerja terampil dan profesional di Kabupaten Pesisir Barat harus segera disikapi. Bagaimana tidak, dengan dibukanya jalur arus barang, jasa, investasi, dan tenaga

kerja terampil antar negara-negara ASEAN melalui *ASEAN Economic Community* akan sangat memungkinkan masuknya tenaga kerja asing yang tentunya akan memperketat tingkat persaingan dengan tenaga kerja lokal. Belum lagi dengan hadirnya inovasi teknologi yang dapat menggantikan kerja manusia. Hal ini memungkinkan meningkatnya angka pengangguran di Indonesia dan sangat mungkin terjadi di Kabupaten Pesisir Barat.

Lebih khusus beli melihat pada sisi tenaga kerja di sektor pariwisata yang akan coba dikembangkan daerah. Bahwa hingga saat ini belum banyak tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat kompetensi. Kerja keras Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat dalam mengembangkan sektor pariwisata akan menjadi sia-sia jika pada akhirnya tenaga kerja lokal daerah hanya menjadi penonton, karena tidak dapat memenuhi standar kompetensi kerja bidang pariwisata yang dibutuhkan.

Akan banyak tenaga kerja non lokal Kabupaten Pesisir Barat yang akan mengisinya. Baik dari dalam negeri bahkan dari luar negeri. Oleh karena itu, penguatan kompetensi tenaga kerja lokal sangat penting khususnya untuk penduduk usia produktif dengan tingkat pendidikan menengah keatas. Sebagai informasi tambahan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Pesisir Barat pada saat ini memang cukup terkendali, namun sayangnya jumlah tersebut justru berasal dari penduduk dengan tingkat pendidikan menengah yang seharusnya berada pada usia produktif.

5. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sementara itu, program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan program penggulangan kemiskinan harus dilaksanakan dengan seefektif mungkin dengan lebih mengoptimalkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terutama di luar Pemerintah Daerah. Seluruh pelaku dan pemangku kepentingan harus memiliki komitmen yang kuat terhadap keberhasilan pelaksanaan program.

Selain itu, penguatan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sangat diperlukan mengingat data kemiskinan yang kredibel merupakan kunci dari sukses penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan. Dengan data yang termutakhirkan dan telah tervalidasi oleh para pemangku kepentingan, maka program penanggulangan kemiskinan akan tepat sasaran. Pemerintah daerah memegang peran penting dalam pengelolaan data. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan

untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.

Penguatan pengelolaan data oleh Pemerintah daerah harus dilakukan melalui penguatan SDM, teknologi dan sistem informasi, keterlibatan berbagai pihak terkait seperti aparat desa/pekon/kelurahan, serta berbagai faktor pendukung lainnya. Selain itu, pengelolaan data juga harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS).

4.2.3. Sarana dan Prasarana

1. Infrastruktur Daerah

Ketersediaan infrastruktur wilayah merupakan syarat dasar terlaksananya program pembangunan diberbagai bidang. Infrastruktur wilayah yang terbatas akan menjadi penghambat dalam pemanfaatan potensi daerah dan proses pembangunan secara keseluruhan. Kualitas infrastruktur wilayah yang rendah juga akan menghambat masuknya investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Berdasarkan data kajian dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI tahun 2019 yang lalu, Indeks Infrastruktur Kabupaten Pesisir Barat adalah sebesar 53,46 persen jauh berada dibawah Provinsi Lampung yang sebesar 73,45 persen.

Keterbatasan jumlah jalan mantab, akses air minum layak, akses sanitasi sehat, dan terbatasnya pasokan energi listrik adalah sebagian masalah yang harus segera menjadi prioritas untuk diselesaikan. Oleh karena itu, isu peningkatan infrastruktur yang mantab di Kabupaten Pesisir Barat menjadi penting sebagai syarat utama proses pembangunan di berbagai sektor.

2. Pengelolaan Data Informasi Pembangunan Daerah

Data dan informasi pembangunan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Agar kebijakan pembangunan daerah dapat direncanakan dengan baik maka ketersediaan data yang berkualitas sangatlah penting. Data yang berkualitas adalah data yang memiliki relevansi dan akurasi tinggi terhadap kondisi apa yang ada di lapangan (kondisi sebenarnya). Selain itu, data yang berkualitas juga haruslah selalu termutakhir pada setiap periode waktu tertentu. Data dan informasi pembangunan juga harus terintegrasi dan tekoneksi, baik antar sektor, antar wilayah, maupun antar level pemerintahan, serta dapat diakses dengan mudah oleh para pihak yang membutuhkan.

Penguatan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan baik yang berupa data spasial maupun non spasial harus dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Daerah agar kebijakan pembangunan daerah dapat dirumuskan dengan baik dan tepat sasaran. Koordinasi dan kolaborasi antar sektor dan antar level pemerintahan harus dilakukan dengan baik untuk mewujudkan satu data terpadu (*one data* dan kebijakan satu peta) dan berkualitas.

4.2.4. Kemampuan Keuangan Daerah

Kapasitas fiskal daerah (KFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, KFD Kabupaten Pesisir Barat termasuk dalam kategori “Rendah” dan terus mengalami penurunan pada setiap tahunnya (PMK No. 119/PMK.07/2017 dan PMK No. 107/PMK.07/2018). Bahkan pada tahun 2019 KFD Kabupaten Pesisir Barat termasuk dalam kategori “Sangat Rendah” (PMK No. 126/PMK.01/2019). Dengan KFD yang sangat rendah, tentunya sumber daya keuangan Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar yang telah ditentukan juga sangat rendah.

4.2.5. Aksesibilitas Wilayah

Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah otonom termuda di Provinsi Lampung. Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir barat belum banyak terlihat hasilnya. Hingga saat ini, Kabupaten Pesisir Barat merupakan satu-satunya daerah kabupaten di Provinsi Lampung yang masih tertinggal. Hal itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Salah satu kriteria penilaian daerah tertinggal menurut perpres tersebut adalah aksesibilitas wilayah.

Hingga saat ini masih banyak Pekon yang sulit diakses, namun setidaknya hanya terdapat empat Pekon yang berada dalam kategori sangat sulit diakses yaitu kecamatan Bangkumat, Pekon Bandar Dalam, Pekon Way Haru, Pekon Way Tiyas, dan Pekon Siring Gading. Pekon-pekon tersebut sulit mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan berbagai fasilitas lainnya. Selain itu, akses wilayah yang sulit membuat harga produk pertanian jadi murah. Sebaliknya harga kebutuhan pokok yang tidak dapat diproduksi di desamenjadi mahal.

4.2.6. Karakteristik Daerah

Kabupaten Pesisir Barat memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak dari sisi geologis dan geografis. Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana Indoneisa (IRBI) yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2020, Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan resiko bencana yang berada pada zona merah. Hampir seluruh skor indeks resiko perancaman berada pada kelas resiko tinggi, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi. Bahkan pada ancaman bencana cuaca ekstrim Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten dengan skor indeks resiko tertinggi di Indonesia.

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2)

sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan; pendidikan dan pelatihan; logistik; kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; serta kapasitas pemulihan. Dalam analisis data, pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%.

Dengan demikian, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah dengan memperkuat kebijakan pada komponen kapasitas (*capacity*), seperti penguatan kebijakan dan kelembagaan, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, pengembangan sistem pemulihan bencana, pengelolaan tanggap darurat (ftp), kerentanan masyarakat (pkm), ketidak tergantungan masyarakat, dan partisipasi masyarakat.

B. Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat dan/atau kebijakan, rencana, dan program dari masing-masing Perangkat Daerah.

Berikut disajikan rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 untuk RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 berupa kebijakan, strategi dan rekomendasi. Kabupaten Pesisir Barat sebagian besar merupakan wilayah konservasi dan bergantung pada dana perimbangan, dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat sulit dan memerlukan perlakuan khusus dan salah satu potensi terbesarnya adalah sektor pariwisata untuk itu perlu dilakukan, antara lain:

- a. Membuka peluang usaha dan investasi baru di sektor pariwisata, dengan melakukan peningkatan yaitu membuka wisata premium dan wisata khusus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. Dalam hal meningkatkan wisata premium dilakukan penguatan budaya dan kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya maupun adat istiadat dengan membuat desa wisata dan desa budaya sehingga dapat menambah pendapatan daerah;
- c. Terhadap wisatawan mancanegara maupun domestik dibuatkan mekanisme pungutan pajak kunjungan ke daerah wisata di Kabupaten Pesisir Barat;
- d. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak dan retribusi;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak;
- f. Meningkatkan kemitraan konservasi dalam melakukan pemanfaatan hutan;

- g. Bekerja sama dengan KPH, Balai Besar TNBBS, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat, NGO serta masyarakat;
- h. Melakukan koordinasi pengelolaan hutan.

Adapun rekomendasi Isu Strategis Daerah berdasarkan pada KLHS RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Permasalahan dan Isu Strategis Hasil KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten termiskin ke 4 di Provinsi Lampung. Kecamatan Bangkuntan memiliki status sosial yang paling tinggi sekitar 4.739 rumah tangga dengan status kesejahteraan rendah dan Kecamatan Pulau Pisang memiliki status paling rendah yaitu 374 rumah tangga	Persentase penduduk miskin Kabupaten Pesisir Barat	a. Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal.	Strategi : Peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk pertanian (pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan) melalui penerapan teknologi pertanian tepat guna, padat karya, dan mutakhir; Arah Kebijakan: Penguatan daya saing destinasi wisata daerah pada tingkat regional, nasional, dan internasional yang terintegrasi dengan upaya pelestarian dan pengembangan seni, budaya, dan kreatifitas masyarakat;
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	a. Belum meratanya kualitas pelayanan kesehatan; b. Masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan; c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan; d. Pencapaian SPM di bidang kesehatan belum optimal;	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta manajemen pelayanan	Meningkatnya jumlah penduduk yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).	Strategi : Menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) wajib mengintegrasikan kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Arah Kebijakan : Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	a. Angka kemiskinan daerah yang tinggi dibandingkan dengan Provinsi Lampung; b. Angka PMKS yang tinggi; c. Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat termajinalkan; d. Masih rendahnya fasilitas umum yang ramah untuk kaum difabel; e. Pencapaian SPM di bidang sosial belum optimal;	a. Penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan; b. Peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat, khususnya PMKS;	Meningkatnya jumlah penduduk yang mendapatkan layanan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Strategi : Menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) wajib mengintegrasikan kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Arah Kebijakan : Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	a. Angka kemiskinan daerah yang tinggi dibandingkan dengan Provinsi Lampung; b. Angka PMKS yang tinggi; c. Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat termajinalkan; d. Masih rendahnya fasilitas umum yang ramah untuk kaum difabel; e. Pencapaian SPM di bidang sosial belum optimal;	a. Penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan; b. Peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat, khususnya PMKS;	Meningkatnya jumlah penduduk yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).	Strategi : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan daerah Arah Kebijakan : Penerapan SPM Bidang Sosial di 514 Kab/Kota dan 34 Provinsi
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	a. Angka kemiskinan daerah yang tinggi dibandingkan dengan Provinsi Lampung; b. Angka PMKS yang tinggi; c. Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat termajinalkan; d. Masih rendahnya fasilitas umum yang ramah untuk kaum difabel; e. Pencapaian SPM di bidang sosial belum optimal;	a. Penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan; b. Peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat, khususnya PMKS;	1. Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektifitas program bantuan sosial; 2. Mendorong cakupan layanan keuangan formal terutama masyarakat miskin dan rentan.	Strategi : Dukungan perencanaan daerah dalam melaksanakan major project integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh. Arah Kebijakan : Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	a. Masih rendahnya jumlah jaringan air minum dari sumber air ke rumah tangga dan hunian; b. Masih rendahnya jaringan limbah rumah tangga dan hunian; c. Masih rendahnya jaringan sanitasi rumah tangga dan hunian; d. Pencapaian SPM di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum optimal;	a. Peningkatan jaringan air minum kepada masyarakat; b. Peningkatan jaringan sanitasi masyarakat;	Tersedianya akses air minum aman dan layak, dengan sasaran untuk tahun 2021: a. Akses air minum layak: 94% b. Akses air minum aman: 8% c. Akses air minum perpipaan: 25% d. Akses air minum nonperpipaan: 68%	Strategi : 1. Pembangunan Sambungan Rumah (SR) melalui pemanfaatan kapasitas SPAM terbangun (<i>idle capacity</i>); 2. Peningkatan dan pembangunan SPAM; 3. Integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokumen perencanaan daerah; 4. Pemetaan kawasan yang tidak terlayani akses air minum layak; 5. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus; Arah Kebijakan : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	a. Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan; b. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidikan; c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; d. Pencapaian SPM di bidang pendidikan belum optimal;	a. Peningkatan kualitas dan pemerataan akses pelayanan pendidikan, baik secara infrastruktur maupun SDM pendidik; b. Peningkatan jumlah peserta didik.	Terpenuhinya layanan dasar bidang pendidikan: 1. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun); 2. Harapan Lama Sekolah (Tahun) 3. Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%/persentase) ▪ SD/MI/ sederajat; ▪ SMP/MTs/ sederajat; 4. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%/persentase)	Strategi : 1. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diluar belanja pegawai dan DAK; 2. Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku; Arah Kebijakan : Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui: 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun;
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	a. Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan; b. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidikan; c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; d. Pencapaian SPM di bidang pendidikan belum optimal;	a. Peningkatan kualitas dan pemerataan akses pelayanan pendidikan, baik secara infrastruktur maupun SDM pendidik; b. Peningkatan jumlah peserta didik.	Terpenuhinya layanan dasar bidang pendidikan: 1. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun); 2. Harapan Lama Sekolah (Tahun) 3. Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%/persentase) ▪ SD/MI/ sederajat; ▪ SMP/MTs/ sederajat; 4. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%/persentase)	Strategi : 1. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diluar belanja pegawai dan DAK; 2. Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku; Arah Kebijakan : Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui: 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun;

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	a. Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah yang rawan bencana: tsunami, gempa, banjir, angin kencang, tanah longsor; b. Masih minimnya sarana dan prasarana mitigasi bencana; c. Masih minimnya sarana dan prasarana bencana; d. Masih minimnya sarana dan prasarana pasca bencana;	a. Peningkatan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana: tsunami, gempa, banjir, angin kencang, tanah longsor; b. Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana; c. Peningkatan sarana dan prasarana bencana; d. Peningkatan sarana dan prasarana pasca bencana;	Tersedianya layanan dasar sub urusan trantibum, sub urusan bencana dan sub urusan pemadam kebakaran bagi warga negara yang wajib diberikan pelayanan sesuai kriteria.	Strategi : Jenis Pelayanan Dasar SPM sub urusan bencana meliputi: 1. layanan informasi rawan bencana, melalui penyusunan kajian resiko bencana, komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana; 2. layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontijensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi; 3. layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, melalui respon cepat kejadian KLB penyakit/wabah, respon cepat darurat bencana, aktivasi system komando penanganan darurat bencana, pencarian evakuasi dan pertolongan korban bencana. Arah Kebijakan : Percepatan Pemenuhan SPM bidang trantibumlinmas di Daerah meliputi: 1. Sub urusan trantibum 2. Sub urusan bencana. 3. Sub urusan pemadam kebakaran.
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	a. Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah yang rawan bencana: tsunami, gempa, banjir, angin kencang, tanah longsor; b. Masih minimnya sarana dan prasarana mitigasi bencana; c. Masih minimnya sarana dan prasarana bencana; d. Masih minimnya sarana dan prasarana pasca bencana;	a. Peningkatan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana : tsunami, gempa, banjir, angin kencang, tanah longsor; b. Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana; c. Peningkatan sarana dan prasarana bencana;	Tersedianya layanan dasar sub urusan trantibum, sub urusan bencana dan sub urusan pemadam kebakaran bagi warga negara yang wajib diberikan pelayanan sesuai kriteria.	Strategi : Jenis Pelayanan Dasar SPM sub urusan bencana meliputi: 1. layanan informasi rawan bencana, melalui penyusunan kajian resiko bencana, komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana; 2. layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontijensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi;

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
		d. Peningkatan sarana dan prasarana pasca bencana;		3. layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, melalui respon cepat kejadian KLB penyakit/wabah, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian evakuasi dan pertolongan korban bencana. Arah Kebijakan : Percepatan Pemenuhan SPM bidang trantibumlinmas di Daerah meliputi : 1. Sub urusan trantibum 2. Sub urusan bencana. 3. Sub urusan pemadam kebakaran.
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	a. Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah yang rawan bencana: tsunami, gempa, banjir, angin kencang, tanah longsor; b. Masih minimnya sarana dan prasarana mitigasi bencana; c. Masih minimnya sarana dan prasarana bencana; d. Masih minimnya sarana dan prasarana pasca bencana;	a. Peningkatan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana : tsunami, gempa, banjir, angin kencang, tanah longsor; b. Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana; c. Peningkatan sarana dan prasarana bencana; d. Peningkatan sarana dan prasarana pasca bencana;	Tersedianya layanan dasar sub urusan trantibum, sub urusan bencana dan sub urusan pemadam kebakaran bagi warga negara yang wajib diberikan pelayanan sesuai kriteria.	Strategi : Jenis Pelayanan Dasar SPM sub urusan bencana meliputi: 1. layanan informasi rawan bencana, melalui penyusunan kajian resiko bencana, komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana; 2. layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontijensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi; 3. layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, melalui respon cepat kejadian KLB penyakit/wabah, respon cepat darurat bencana, aktivasi system komando penanganan darurat bencana, pencarian evakuasi dan pertolongan korban bencana. Arah Kebijakan : Percepatan Pemenuhan SPM bidang trantibumlinmas di Daerah meliputi: 1. Sub urusan trantibum 2. Sub urusan bencana. 3. Sub urusan pemadam kebakaran.

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 2: Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan	a. Belum banyaknya diversifikasi produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat; b. Belum optimalnya ketersediaan pangan di lingkungan keluarga; c. Masih terjadi kenaikan harga bahan pokok pada hari-hari tertentu disebabkan oleh inflasi daerah	a. Peningkatan ketahanan dan diversifikasi pangan di masyarakat; b. Optimalisasi menjaga stabilitas inflasi daerah terutama pada harga bahan pokok.	Peningkatan daya saing daerah pemerataan akses pelayanan publik masyarakat.	Strategi : 1. Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per Tahun. 2. Penyusunan data cadangan pangan Provinsi dan Kab/Kota. 3. Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan. 4. Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah-daerah yang menjadi lokasi sasaran program. Arah kebijakan : 1. Memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri. 2. Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
Tujuan 2: Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan	a. Belum banyaknya diversifikasi produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat; b. Belum optimalnya ketersediaan pangan di lingkungan keluarga; c. Masih terjadi kenaikan harga bahan pokok pada hari-hari tertentu disebabkan oleh inflasi daerah	a. Peningkatan ketahanan dan diversifikasi pangan di masyarakat; b. Optimalisasi menjaga stabilitas inflasi daerah terutama pada harga bahan pokok.	1. Penurunan stunting dengan memaksimalkan tumbuh kembang anak dengan upaya penanganan intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik terutama pada 1000 HPK. 2. Menurunnya prevalensi stunting hingga 19%	Strategi : Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui percepatan penurunan stunting, meliputi: 1. Memastikan perencanaan dan penganggaran khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi. 2. Melaksanakan 8 aksi konvergensi program penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan peran seluruh OPD terkait dan multisektor. 3. Memperbaiki pengelolaan layanan dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang tersedia. 4. Mengoordinir kecamatan dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				Arah kebijakan : 1. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 2. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
Tujuan 2: Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan	a. Belum banyaknya diversifikasi produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat; b. Belum optimalnya ketersediaan pangan di lingkungan keluarga; c. Masih terjadi kenaikan harga bahan pokok pada hari-hari tertentu disebabkan oleh inflasi daerah	a. Peningkatan ketahanan dan diversifikasi pangan di masyarakat; b. Optimalisasi menjaga stabilitas inflasi daerah terutama pada harga bahan pokok.	1. Penurunan stunting dengan memaksimalkan tumbuh kembang anak dengan upaya penanganan intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik terutama pada 1000 HPK 2. Menurunnya prevalensi stunting hingga 19%	Strategi : Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui percepatan penurunan stunting, meliputi: 1. Memastikan perencanaan dan penganggaran khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi. 2. Melaksanakan 8 aksi konvergensi program penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan peran seluruh OPD terkait dan multisektor. 3. Memperbaiki pengelolaan layanan dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang tersedia. 4. Mengoordinir kecamatan dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data. Arah kebijakan : 1. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 2. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
Tujuan 2: Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan	a. Belum banyaknya diversifikasi produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat; b. Belum optimalnya ketersediaan pangan di lingkungan keluarga; c. Masih terjadi kenaikan harga bahan pokok pada hari-hari tertentu disebabkan oleh inflasi daerah	a. Peningkatan ketahanan dan diversifikasi pangan di masyarakat; b. Optimalisasi menjaga stabilitas inflasi daerah terutama pada harga bahan pokok.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal.	Strategi : Program urusan Kesehatan : 1. PMT pemulihan untuk Bumil KEK; 2. Pemberian IFA/Tablet tambah Darah bagi Ibu Hamil; 3. Kelas Ibu Hamil; 4. Pelayanan antenatal

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				Arah kebijakan : Percepatan perbaikan gizi masyarakat. Penerapan SPM kesehatan Daerah Kabupaten/Kota: 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil; 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4. Pelayanan kesehatan balita; 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)
Tujuan 2: Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan	a. Belum banyaknya diversifikasi produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat; b. Belum optimalnya ketersediaan pangan di lingkungan keluarga; c. Masih terjadi kenaikan harga bahan pokok pada hari-hari tertentu disebabkan oleh inflasi daerah	a. Peningkatan ketahanan dan diversifikasi pangan di masyarakat; b. Optimalisasi menjaga stabilitas inflasi daerah terutama pada harga bahan pokok.	1. Penurunan stunting dengan memaksimalkan tumbuh kembang anak dengan upaya penanganan intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik terutama pada 1000 HPK 2. Menurunnya prevalensi stunting hingga 19%	Strategi : Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui percepatan penurunan stunting, meliputi: 1. Memastikan perencanaan dan penganggaran khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi. 2. Melaksanakan 8 aksi konvergensi program penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan peran seluruh OPD terkait dan multisektor. 3. Memperbaiki pengelolaan layanan dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang tersedia.

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				4. Mengoordinir kecamatan dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data. Arah kebijakan : 1. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 2. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
Tujuan 2: Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan	a. Belum banyaknya diversifikasi produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat; b. Belum optimalnya ketersediaan pangan di lingkungan keluarga; c. Masih terjadi kenaikan harga bahan pokok pada hari-hari tertentu disebabkan oleh inflasi daerah	a. Peningkatan ketahanan dan diversifikasi pangan di masyarakat; b. Optimalisasi menjaga stabilitas inflasi daerah terutama pada harga bahan pokok.	1. Penurunan stunting dengan memaksimalkan tumbuh kembang anak dengan upaya penanganan intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik terutama pada 1000 HPK 2. Menurunnya prevalensi stunting hingga 19%	Strategi : Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui percepatan penurunan stunting, meliputi: 1. Memastikan perencanaan dan penganggaran khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi. 2. Melaksanakan 8 aksi konvergensi program penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan peran seluruh OPD terkait dan multisektor. 3. Memperbaiki pengelolaan layanan dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang tersedia. 4. Mengoordinir kecamatan dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data. Arah kebijakan : 1. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 2. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 2: Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan	a. Belum banyaknya diversifikasi produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat; b. Belum optimalnya ketersediaan pangan di lingkungan keluarga; c. Masih terjadi kenaikan harga bahan pokok pada hari-hari tertentu disebabkan oleh inflasi daerah;	a. Peningkatan ketahanan dan diversifikasi pangan di masyarakat; b. Optimalisasi menjaga stabilitas inflasi daerah terutama pada harga bahan pokok.	1. Penurunan stunting dengan memaksimalkan tumbuh kembang anak dengan upaya penanganan intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik terutama pada 1000 HPK 2. Menurunnya prevalensi stunting hingga 19%	Strategi : Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui percepatan penurunan stunting, meliputi: 1. Memastikan perencanaan dan penganggaran khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi. 2. Melaksanakan 8 aksi konvergensi program penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan peran seluruh OPD terkait dan multisektor. 3. Memperbaiki pengelolaan layanan dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang tersedia. 4. Mengoordinir kecamatan dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data. Arah kebijakan : 1. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 2. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	a. Belum meratanya kualitas pelayanan kesehatan; b. Masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan; c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan; d. Pencapaian SPM di bidang kesehatan belum optimal;	a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta manajemen pelayanan;	Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	Strategi : 1. Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait; 2. Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN Arah Kebijakan : Peningkatan Kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
		b. Peningkatan derajat kesehatan masy, pencegahan dan pengendalian penyakit menular; c. Peningkatan budaya hidup sehat masy untuk perbaikan gizi masy.		
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	a. Belum meratanya kualitas pelayanan kesehatan; b. Masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan; c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan; d. Pencapaian SPM di bidang kesehatan belum optimal;	a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta manajemen pelayanan. b. Peningkatan derajat kesehatan masy, pencegahan dan pengendalian penyakit menular; c. Peningkatan budaya hidup sehat masy untuk perbaikan gizi masy.	Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	Strategi : - Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait; - Memperhatikan indicator dan target pada sasaran RPJMN Arah Kebijakan : Peningkatan Kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	a. Belum optimalnya persiapan daerah dalam menghadapi bonus demografi daerah; b. Belum optimalnya penyuluhan terkait Keluarga Berencana di masyarakat;	a. Optimalisasi persiapan pemanfaatan struktur bonus demografi; b. Menjaga laju pertumbuhan penduduk yang seimbang;	Peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.	Strategi : Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Arah Kebijakan : Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				(Kab/Kota; pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB, pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB, dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB)
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	a. Belum meratanya kualitas pelayanan kesehatan; b. Masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan; c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan; d. Pencapaian SPM di bidang kesehatan belum optimal;	a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta manajemen pelayanan. b. Peningkatan derajat kesehatan masy, pencegahan dan pengendalian penyakit menular; c. Peningkatan budaya hidup sehat masy untuk perbaikan gizi masy.	1. Pengendalian penyakit menular; 2. Pengendalian Penyakit tidak menular	Strategi : 1. Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait; 2. Memperhatikan indicator dan target pada sasaran RPJMN Arah Kebijakan : Peningkatan Pengendalian Penyakit
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	a. Belum meratanya kualitas pelayanan kesehatan; b. Masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan; c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan; d. Pencapaian SPM di bidang kesehatan belum optimal;	a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta manajemen pelayanan.	1. Pengendalian penyakit menular; 2. Pengendalian Penyakit tidak menular	Strategi : 1. Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait; 2. Memperhatikan indicator dan target pada sasaran RPJMN Arah Kebijakan : Peningkatan Pengendalian Penyakit

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
		b. Peningkatan derajat kesehatan masy, pencegahan dan pengendalian penyakit menular; c. Peningkatan budaya hidup sehat masy untuk perbaikan gizi masy.		
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	a. Belum meratanya kualitas pelayanan kesehatan; b. Masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan; c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan; d. Pencapaian SPM di bidang kesehatan belum optimal;	a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta manajemen pelayanan; b. Peningkatan derajat kesehatan masy, pencegahan dan pengendalian penyakit menular; c. Peningkatan budaya hidup sehat masy untuk perbaikan gizi masy.	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi medis bagi pengguna NAPZA	Strategi : - Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait; - Memperhatikan indicator dan target pada sasaran RPJMN Arah Kebijakan : Peningkatan pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	a. Belum optimalnya persiapan daerah dalam menghadapi bonus demografi daerah; b. Belum optimalnya penyuluhan terkait Keluarga Berencana di masyarakat;	a. Optimalisasi persiapan pemanfaatan struktur bonus demografi; b. Menjaga laju pertumbuhan penduduk yang seimbang;	Peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.	Strategi : Angka prevalensi kontrasepsi modern/ Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) Arah Kebijakan : Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				(Kab/Kota; pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB, pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB, dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB)
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	a. Belum meratanya kualitas pelayanan kesehatan; b. Masih rendahnya kualitas tenaga kesehatan;	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta manajemen pelayanan.	Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas.	Strategi : - Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan serta pemenuhan SDM Kesehatan - Memperhatikan pengembangan kompetensi SDM kesehatan Arah kebijakan : Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Bagi Semua	a. Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan; b. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidikan; c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; d. Pencapaian SPM di bidang pendidikan belum optimal;	a. Peningkatan kualitas dan pemerataan akses pelayanan pendidikan, baik secara infrastruktur maupun SDM pendidik; b. Peningkatan jumlah peserta didik.	Terpenuhinya layanan dasar bidang pendidikan: - Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun); - Harapan Lama Sekolah (Tahun) - Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%/persentase) ▪ SD/MI/ sederajat; ▪ SMP/MTs/ sederajat; - Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%/persentase)	Strategi : - Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diluar belanja pegawai dan DAK; - Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; - Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku; Arah Kebijakan : Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui: - Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; - Pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun;

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Bagi Semua	a. Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan; b. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidikan; c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; d. Pencapaian SPM di bidang pendidikan belum optimal;	a. Peningkatan kualitas dan pemerataan akses pelayanan pendidikan, baik secara infrastruktur maupun SDM pendidik; b. Peningkatan jumlah peserta didik.	Terpenuhinya layanan dasar bidang pendidikan: 1. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun); 2. Harapan Lama Sekolah (Tahun) 3. Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%/persentase) ▪ SD/MI/ sederajat; ▪ SMP/MTs/ sederajat; 4. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%/persentase)	Strategi : 1. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diluar belanja pegawai dan DAK; 2. Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku; Arah Kebijakan : Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui: 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun;
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Bagi Semua	a. Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan; b. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidikan; c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; d. Pencapaian SPM di bidang pendidikan belum optimal;	a. Peningkatan kualitas dan pemerataan akses pelayanan pendidikan, baik secara infrastruktur maupun SDM pendidik; b. Peningkatan jumlah peserta didik.	Terpenuhinya layanan dasar bidang pendidikan: 1. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun); 2. Harapan Lama Sekolah (Tahun) 3. Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%/persentase) ▪ SD/MI/ sederajat; ▪ SMP/MTs/ sederajat; 4. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%/persentase)	Strategi : 1. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diluar belanja pegawai dan DAK; 2. Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku; Arah Kebijakan : Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui: 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun;

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Bagi Semua	a. Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan; b. Masih rendahnya kualitas tenaga pendidikan; c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; d. Pencapaian SPM di bidang pendidikan belum optimal;	a. Peningkatan kualitas dan pemerataan akses pelayanan pendidikan, baik secara infrastruktur maupun SDM pendidik; b. Peningkatan jumlah peserta didik.	Terpenuhinya layanan dasar bidang pendidikan: 1. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun); 2. Harapan Lama Sekolah (Tahun) 3. Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%/persentase) ▪ SD/MI/ sederajat; ▪ SMP/MTs/ sederajat; 4. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%/persentase)	Strategi : 1. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diluar belanja pegawai dan DAK; 2. Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku; Arah Kebijakan : Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui: 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun;
Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan	a. Masih kurangnya pemberdayaan perempuan dalam keluarga hingga pembangunan; b. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat;	Optimalisasi pemberdayaan perempuan, mulai dari tingkat keluarga hingga masyarakat	1. Penurunan kekerasan terhadap perempuan. Indikator: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan Baseline 2016 9,4% SPHP. 2. Penurunan kekerasan terhadap anak. Indikator: Indeks Perlindungan Khusus Anak. 3. Meningkatnya layanan perlindungan anak korban kekerasan. Indikator: Persentase anak korban kekerasan yg mendapatkan layanan 4. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Indikator TPAK Perempuan	Strategi : 1. Pelaksanaan SPHPN oleh KPPPA tahun 2021 dan 2024; 2. Data Rikesdas Tahun 2020 (KPPPA, data Rikesdas, Susenas BPS); 3. Data Simfoni-PPA; 4. Profil Perempuan Indonesia (KPPPA, data Sakernas BPS). Arah kebijakan : 1. Perlindungan Perempuan; 2. Perlindungan Khusus Anak; 3. Kualitas Hidup Perempuan.

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	a. Masih rendahnya jumlah jaringan air minum dari sumber air ke rumah tangga dan hunian; b. Masih rendahnya jaringan limbah rumah tangga dan hunian; c. Masih rendahnya jaringan sanitasi rumah tangga dan hunian; d. Pencapaian SPM di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum optimal;	a. Peningkatan jaringan air minum kepada masyarakat; b. Peningkatan jaringan sanitasi masyarakat;	1. Tersedianya akses air minum aman dan layak 2. Meningkatnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Strategi : 1. Pembangunan Sambungan Rumah (SR) melalui pemanfaatan kapasitas SPAM terbangun (idle capacity); 2. Peningkatan dan pembangunan SPAM; 3. Pembangunan SPAM Regional; 4. Peningkatan Kinerja UPTD dan KPSPAMS; 5. Integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokumen perencanaan daerah; 6. Penyusunan dokumen Jakstrada, RISPAM dan Business Plan PDAM; 7. Peningkatan melalui alokasi APBD yang memadai minimal 1% (satu persen) untuk pembangunan fisik SPAM dan SR; 8. Perkuatan peran dan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang; 9. Peningkatan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi yang didukung dengan sistem data dan informasi; 10. Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternative pendanaan; 11. Identifikasi dan penyiapan KPBU; 12. Pemetaan kawasan yang tidak terlayani akses air minum layak; 13. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus; 14. Penyusunan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM dan pengelola SPAM lainnya; 15. Pengawasan kualitas air minum (kab/kota); 16. Pengembangan Zona Air Minum Prima/ Layanan Potable Water. 17. Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait.

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				18. Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN 19. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengawasan kualitas air minum dan pembinaan STBM Arah kebijakan : Peningkatan kualitas air minum dan sanitasi layak dan aman melalui Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)serta Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	a. Masih rendahnya jumlah jaringan air minum dari sumber air ke rumah tangga dan hunian; b. Masih rendahnya jaringan limbah rumah tangga dan hunian; c. Masih rendahnya jaringan sanitasi rumah tangga dan hunian; d. Pencapaian SPM di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum optimal;	a. Peningkatan jaringan air minum kepada masyarakat; b. Peningkatan jaringan sanitasi masyarakat;	Meningkatnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Strategi : 1. Pembangunan Sambungan Rumah (SR) melalui pemanfaatan kapasitas SPAM terbangun (idle capacity); 2. Peningkatan dan pembangunan SPAM; 3. Pembangunan SPAM Regional; 4. Peningkatan Kinerja UPTD dan KPSPAMS; 5. Integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokumen perencanaan daerah; 6. Penyusunan dokumen Jakstrada, RISPAM dan Business Plan PDAM; 7. Peningkatan melalui alokasi APBD yang memadai minimal 1% (satu persen) untuk pembangunan fisik SPAM dan SR; 8. Perkuatan peran dan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang; 9. Peningkatan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi yang didukung dengan sistem data dan informasi; 10. Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan; 11. Identifikasi dan penyiapan KPBU; 12. Pemetaan kawasan yang tidak terlayani akses air minum layak;

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				13. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus; 14. Penyusunan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM dan pengelola SPAM lainnya; 15. Pengawasan kualitas air minum (kab/kota); 16. Pengembangan Zona Air Minum Prima/ Layanan Potable Water. 17. Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait. 18. Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN 19. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengawasan kualitas air minum dan pembinaan STBM Arah kebijakan : Peningkatan kualitas air minum dan sanitasi layak dan aman melalui Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	a. Masih rendahnya jumlah jaringan air minum dari sumber air ke rumah tangga dan hunian; b. Masih rendahnya jaringan limbah rumah tangga dan hunian; c. Masih rendahnya jaringan sanitasi rumah tangga dan hunian; d. Pencapaian SPM di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum optimal;	a. Peningkatan jaringan air minum kepada masyarakat; b. Peningkatan jaringan sanitasi masyarakat;	1. Tersedianya akses air minum aman dan layak; 2. Meningkatnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Strategi : 1. Pembangunan Sambungan Rumah (SR) melalui pemanfaatan kapasitas SPAM terbangun (idle capacity); 2. Peningkatan dan pembangunan SPAM; 3. Pembangunan SPAM Regional; 4. Peningkatan Kinerja UPTD dan KPSPAMS; 5. Integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokumen perencanaan daerah; 6. Penyusunan dokumen Jakstrada, RISPAM dan Business Plan PDAM; 7. Peningkatan melalui alokasi APBD yang memadai minimal 1% (satu persen) untuk pembangunan fisik SPAM dan SR;

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				8. Perkuatan peran dan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang; 9. Peningkatan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi yang didukung dengan sistem data dan informasi; 10. Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan; 11. Identifikasi dan penyiapan KPBU; 12. Pemetaan kawasan yang tidak terlayani akses air minum layak; 13. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus; 14. Penyusunan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM dan pengelola SPAM lainnya; 15. Pengawasan kualitas air minum (kab/kota); 16. Pengembangan Zona Air Minum Prima/ Layanan Potable Water. 17. Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait. 18. Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN 19. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengawasan kualitas air minum dan pembinaan STBM Arah kebijakan : Peningkatan kualitas air minum dan sanitasi layak dan aman melalui Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	a. Masih rendahnya jumlah jaringan air minum dari sumber air ke rumah tangga dan hunian; b. Masih rendahnya jaringan limbah rumah tangga dan hunian; c. Masih rendahnya jaringan sanitasi rumah tangga dan hunian; d. Pencapaian SPM di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum optimal;	a. Peningkatan jaringan air minum kepada masyarakat; b. Peningkatan jaringan sanitasi masyarakat;	Meningkatnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Strategi : 1. Pembangunan Sambungan Rumah (SR) melalui pemanfaatan kapasitas SPAM terbangun (idle capacity); 2. Peningkatan dan pembangunan SPAM; 3. Pembangunan SPAM Regional; 4. Peningkatan Kinerja UPTD dan KPSPAMS; 5. Integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokumen perencanaan daerah; 6. Penyusunan dokumen Jakstrada, RISPAM dan Business Plan PDAM; 7. Peningkatan melalui alokasi APBD yang memadai minimal 1% (satu persen) untuk pembangunan fisik SPAM dan SR; 8. Perkuatan peran dan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang; 9. Peningkatan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi yang didukung dengan sistem data dan informasi; 10. Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan; 11. Identifikasi dan penyiapan KPBU; 12. Pemetaan kawasan yang tidak terlayani akses air minum layak; 13. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus; 14. Penyusunan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM dan pengelola SPAM lainnya; 15. Pengawasan kualitas air minum (kab/kota); 16. Pengembangan Zona Air Minum Prima/Layanan Portable Water. 17. Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait.

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				18. Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN 19. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengawasan kualitas air minum dan pembinaan STBM Arah kebijakan : Peningkatan kualitas air minum dan sanitasi layak dan aman melalui Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	a. Belum optimalnya pengendalian/pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan; b. Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah masyarakat;	a. Optimalisasi pengendalian, pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam; b. Optimalisasi penegakan hukum di bidang lingkungan hidup; c. Peningkatan infrastruktur pembuangan sampah dan limbah;	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.	Strategi : 1. Penghijauan pada lahan kritis di luar kawasan hutan/daerah imbuhan mata air (kawasan lindung); 2. Rencana Pengelolaan DAS; 3. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung DAS; 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS; 5. Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan; 6. Penerapan teknik konservasi tanah dan air; 7. Pengembangan hutan rakyat, hutan kota dan penghijauan lingkungan; 8. Pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan. Arah Kebijakan : Pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua	a. Masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai penggerak ekonomi lokal; b. Belum optimalnya pembinaan terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah; c. Masih sulitnya usaha kecil menengah dalam mengakses bantuan modal dari pihak perbankan; d. Masih relatif minimnya pengembangan dan pelatihan softskill dan hardskill pelaku koperasi, usaha kecil dan menengah;	a. Peningkatan peran koperasi, usaha kecil dan menengah dalam perekonomian lokal; b. Optimalisasi pembinaan koperasi, UKM; c. Peningkatan bantuan permodalan dan manajemen UKM;	1. Meningkatnya Ekspor usaha mikro, kecil menengah sebesar 19%. 2. Meningkatnya UKM naik kelas sebesar 2,5% (20.110 unit)	Strategi : 1. Usaha mikro, kecil menengah naik kelas dan Modernisasi Koperasi. 2. Peningkatan ekspor dan penguatan substitusi impor serta UKM masuk Global Value Chain (GVC). Arah kebijakan : Akselerasi Pembiayaan dan Investasi.
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi	a. Masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai penggerak ekonomi lokal; b. Belum optimalnya pembinaan terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah; c. Masih sulitnya usaha kecil menengah dalam mengakses bantuan modal dari pihak perbankan; d. Masih relatif minimnya pengembangan dan pelatihan softskill dan hardskill pelaku koperasi, usaha kecil dan menengah;	a. Peningkatan peran koperasi, UKM dalam perekonomian lokal; b. Optimalisasi pembinaan koperasi, UKM; c. Peningkatan bantuan permodalan dan manajemen usaha kecil dan menengah;	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi berlandaskan pada struktur ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan.	Arah kebijakan : 1. Peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk pertanian (pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan) melalui penerapan teknologi pertanian tepat guna, padat karya, dan mutakhir. 2. Penguatan daya saing destinasi wisata daerah pada tingkat regional, nasional, dan internasional yang terintegrasi dengan upaya pelestarian dan pengembangan seni, budaya, dan kreatifitas masyarakat. 3. Peningkatan dan penguatan daya saing industri daerah pada level nasional dan internasional.
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi	a. Masih minimnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika daerah; b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas manajemen informatika; c. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah;	a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, khususnya di wilayah terluar;	1. Kualitas akses TIK yang merata dengan pemanfaatan yang optimal. 2. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif.	Strategi : 1. Dalam mendukung prioritas nasional kelima yaitu stabilitas keamanan nasional guna meningkatkan akses dan kualitas informasi publik, perlu adanya upaya penatakelolaan bidang komunikasi publik, penyediaan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik bidang politik, hukum, keamanan,

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
		b. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan; c. Peningkatan manajemen komunikasi dan informasi pembangunan.		perekonomian, maritim, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pengelolaan informasi publik melalui media Pemerintah; 2. Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional tersebut, arah dan kebijakan pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM bidang Komunikasi di Pemerintah daerah, peningkatan penyebaran informasi publik yang berkualitas melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, media tatap muka, pertunjukan rakyat, internet, kemitraan dengan komunitas informasi dan komunikasi publik serta media yang dimiliki Pemerintah daerah. 3. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah daerah harus memperhatikan: a. Seluruh anggaran belanja TIK di lingkungan Pemerintah daerah harus berada di satu rekening dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika. b. Infrastruktur TIK yang terintegrasi, seperti server pengolahan data dan jaringan komunikasi data. c. Selama belum ada kebijakan yang mengatur, pembangunan aplikasi umum di Pemerintah daerah harus menggunakan atau mengadopsi aplikasi serupa yang sudah digunakan di pusat atau daerah lain. d. Integrasi data di lingkungan Pemerintah daerah di bawah koordinasi dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika untuk dapat diakses secara berbagi pakai oleh seluruh SKPD; dan e. Peningkatan dan pengembangan SDM bidang TIK di lingkungan Pemerintah daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				Arah kebijakan : 1. Pengembangan e-Government di lingkup Pemerintah daerah. 2. Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Daerah. 3. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi melalui media publik dan kemitraan lembaga komunikasi di daerah.
Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara	a. Belum optimalnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan desa dan daerah; b. Belum optimalnya kualitasnya aparatur pekon;	a. Peningkatan peran masy dalam pembangunan, khususnya di desa; b. Peningkatan kualitas aparatur desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang bersinergi dengan kabupaten.	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	Arah kebijakan : Pengembangan SDM di Daerah Tertinggal
Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara	a. Belum optimalnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan desa dan daerah; b. Belum optimalnya kualitasnya aparatur pekon;	a. Peningkatan peran masy dalam pembangunan, khususnya di desa; b. Peningkatan kualitas aparatur desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang bersinergi dengan kabupaten.	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja di Daerah Tertinggal	Arah kebijakan : Pengembangan SDM di Daerah Tertinggal

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 11: Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	a. Belum optimalnya pengendalian/pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan; b. Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah masyarakat;	a. Optimalisasi pengendalian, pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam; b. Optimalisasi penegakan hukum di bidang lingkungan hidup; c. Peningkatan infrastruktur pembuangan sampah dan limbah;	Tersedianya sistem layanan sanitasi berkelanjutan: 1. Akses sanitasi (air limbah domestik) layak: 79% (tujuh puluh sembilan persen) akses layak, termasuk 9% akses aman; 2. BABS di tempat terbuka: 4,46%	Strategi : Pemerintah daerah harus memenuhi kriteria kesiapan yaitu: 1. Surat minat dari pemerintah daerah; 2. Masuk dalam kawasan rawan sanitasi di dalam SSK; 3. Memastikan kegiatan tercantum dalam RPIJM/RPI2JM yang terintegrasi dengan dokumen SSK; 4. Memastikan ketersediaan lahan; 5. Memastikan ketersediaan masterplan/DED; 6. Memastikan keberadaan dan kinerja institusi pengelola pasca konstruksi (KSM, UPTD, BLUD, dll); 7. Surat kesediaan menerima aset; 8. Mengalokasikan dana untuk operasional dan pemeliharaan pasca konstruksi (ditunjukan dengan RKA untuk kegiatan pengelolaan); dan 9. Ketersediaan tenaga fasilitator lapangan pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan teknis dan pemberdayaan selama pelaksanaan kegiatan.
Tujuan 11: Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	a. Masih rendahnya jumlah jaringan air minum dari sumber air ke rumah tangga dan hunian; b. Masih rendahnya jaringan limbah rumah tangga dan hunian; c. Masih rendahnya jaringan sanitasi rumah tangga dan hunian; d. Pencapaian SPM di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum optimal;	a. Peningkatan jaringan air minum kepada masyarakat; b. Peningkatan jaringan sanitasi masyarakat;	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau menjadi 70% pada tahun 2024.	Strategi : 1. Penguatan Perencanaan dalam penyelesaian akses terhadap hunian layak dan terjangkau: a. Penyusunan rencana penyediaan hunian layak/dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) provinsi/kabupaten/kota dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals(SDGs), terutama yang terkait akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau; b. Pembentukan Pokja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah;

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				c. Penyusunan dan pengembangan data RTLH sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota; d. Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan untuk pembangunan perumahan. 2. Pengalokasian anggaran (APBD) untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan sebagai urusan wajib layanan dasar: a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana (provinsi/kabupaten/kota); b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni beserta utilitasnya bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi /kabupaten/kota; c. Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan, termasuk mitigasi resiko bencana; d. Pelaksanaan fasilitasi dan/atau penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau serta mitigasi bencana dan mitigasi relokasi program pemerintah provinsi/kabupaten/kota; e. Pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan kewenangannya; f. Peningkatan efisiensi lahan perkotaan untuk penyediaan perumahan melalui peremajaan kawasan dan penyediaan hunian baru dalam rangka penanganan permukiman kumuh.

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				3. Penguatan kapasitas mendukung peningkatan akses terhadap hunian layak dan terjangkau: a. Pelaksanaan pembekalan dancapacity building bagi UPTD dan SDM di bidang perumahan; b. Penguatan kelembagaan di bidang perumahan terutama untuk mendukung perubahan UPTD menjadi BUMD; c. Pelaksanaan pembinaan terhadap penghuni Sarusun dengan penetapan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) untuk rusunami. 4. Peningkatan penyediaan lahan dan pihak ke-3 dalam pemenuhan kebutuhan perumahan: a. Pelaksanaan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan melaluipenerapan hunian berimbang dalam penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; b. Pelaksanaan penerapan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik dan upaya lainnya dalam rangka mendukung upaya kemudahan perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017; c. Penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang, serta terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, terutama akses air minum, sanitasi dan transportasi; d. Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan untuk pembangunan perumahan; e. Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam urusan jasa konstruksi dan jasa usaha terkait sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU sesuai dengan kewenangannya; g. Pemerintah daerah dapat memastikan berjalannya iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat, seperti melalui kemudahan perizinan dan juga dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi bagi masyarakat yang akan membangun rumahnya secara swadaya. h. Pemerintah daerah harus dapat memastikan kolaborasi berbagai sektor untuk bersama-sama menuntaskan penanganan permukiman kumuh. Arah kebijakan : 1. Menerapkan standarpelayanan minimum dan perumahan rakyat; 2. Meningkatkan kemudahan perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan bagi MBR; 3. Menyediakan data penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 4. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan bidang perumahan dan permukiman; 5. Menyediakan dokumen perencanaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman; 6. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				7. Meningkatkan peran dan kolaborasi antar pihak dalam pencegahan dan peningkatan kualitas PKPkumuh; 8. Menyelenggarakan PSU dilingkungan hunian, perumahan, dan kawasan permukiman yang berkualitas; 9. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU sesuai kewenangannya;
Tujuan 11: Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	a. Masih belum memadai sarana dan prasarana serta akomodasi di lokasi wisata; b. Masih terbatasnya lokasi tujuan wisata di daerah; c. Masih belum adanya industri pendukung pariwisata;	a. Peningkatan upaya pelestarian kebudayaan daerah dalam segala aspek kehidupan; b. Optimalisasi pemanfaatan kebudayaan daerah dalam rangka penguatan perekonomian lokal.	Meningkatnya Pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Strategi : 1. Keberadaan dan kelengkapan daftar arsip yang perlu dipreservasi; 2. Tata laksana preservasi arsip; 3. Kompetensi SDM Kearsipan daerah di bidang preservasi arsip; 4. Ketersediaan prasarana dan sarana preservasi arsip. Arah kebijakan : Perlindungan dan penyelamatan arsip terjaga dan arsip statis daerah
Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	a. Belum optimalnya pengendalian/ pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan; b. Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah masyarakat;	a. Optimalisasi pengendalian, pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup dan SDA; b. Optimalisasi penegakan hukum di bidang lingkungan hidup; c. Peningkatan infrastruktur pembuangan sampah dan limbah;	Meningkatnya pengelolaan timbulan sampah	Strategi : 1. Penyiapan dan pengelolaan operasional infrastruktur persampahan dan infrastruktur sampah menjadi energi dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah; 2. Pengelolaan sampah di darat dan di laut; 3. Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya; 4. Pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3; 5. Peningkatan pengurangan timbulan sampah dan penanganan timbulan sampah Arah kebijakan : Pengelolaan Timbulan Sampah

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 13: Membuat Langkah Segera Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	a. Belum optimalnya pengendalian/pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan; b. Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah masyarakat;	a. Optimalisasi pengendalian, pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup dan SDA; b. Optimalisasi penegakan hukum di bidang lingkungan hidup; c. Peningkatan infrastruktur pembuangan sampah dan limbah;	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Strategi : 1. Pengendalian kerusakan akibat perubahan iklim dilakukan dengan melestarikan fungsi atmosfer melalui inventarisasi emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 2. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; 3. Koordinasi pelaksanaan inventarisasi penurunan GRK. Arah kebijakan : Peningkatan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim
Tujuan 13: Membuat Langkah Segera Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	a. Belum optimalnya pengendalian/pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan; b. Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah masyarakat;	a. Optimalisasi pengendalian, pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup dan SDA; b. Optimalisasi penegakan hukum di bidang lingkungan hidup; c. Peningkatan infrastruktur pembuangan sampah dan limbah;	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.	Strategi : 1. Penghijauan pada lahan kritis di luar kawasan hutan/daerah imbuhan mata air (kawasan lindung) 2. Rencana Tahunan Pengelolaan Pantai; Arah Kebijakan : Pengelolaan Sempadan pantai lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Tujuan 14: Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	a. Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap; b. Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya; c. Jumlah sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya perikanan yang sedikit;	a. Peningkatan produktivitas budidaya perikanan tangkap; b. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya;	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	Strategi : 1. Pemahaman dan kepatuhan nelayan serta pemangku kepentingan terhadap regulasi tentang perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, BBM untuk nelayan, permodalan, illegal fishing, batas wilayah penangkapan/WPP, perizinan, dan transshipment); 2. Peningkatan pengelolaan akses area perikanan (PAAP);

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				3. Integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional (Major Project). Arah kebijakan : Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan
Tujuan 14: Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	a. Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap; b. Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya; c. Jumlah sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya perikanan yang sedikit;	a. Peningkatan produktivitas budidaya perikanan tangkap; b. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya;	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Strategi : 1. Perlindungan asuransi bagi nelayan kecil; 2. Pemberdayaan nelayan Arah kebijakan : Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan
Tujuan 14: Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan			Terwujudnya lingkungan yang indah berseri	Arah kebijakan : Peningkatkan upaya penataan lingkungan untuk keindahan dan kenyamanan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan upaya konservasi dan restorasi.
Tujuan 14: Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	a. Masih rendahnya produktivitas pertanian; b. Masih rendahnya produktivitas perkebunan; c. Masih rendahnya produktivitas peternakan; d. Masih adanya alih fungsi lahan pertanian; e. Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi;	a. Peningkatan produktivitas pertanian; b. Peningkatan produktivitas perkebunan; c. Peningkatan produktivitas peternakan;	Peningkatan daya saing daerah pemerataan akses pelayanan publik masyarakat.	Strategi : 1. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah Tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); 2. Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per Tahun; 3. Penyusunan data cadangan pangan Provinsi dan Kab/Kota; 4. Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan;

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
		d. Optimalisasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian daerah.		5. Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah-daerah yang menjadi lokasi sasaran program; 6. Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Provinsi; 7. Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian daerah Kab/Kota; 8. Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan Pertanian. Arah kebijakan : 1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan. 2. Mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu-hilir pangan, pertanian dan perikanan. 3. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan. 4. Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/konsumen. 5. Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi pemanfaatan waduk yang terbangun.
Tujuan 14: Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	a. Masih rendahnya produktivitas pertanian; b. Masih rendahnya produktivitas perkebunan; c. Masih rendahnya produktivitas peternakan; d. Masih adanya alih fungsi lahan pertanian;	a. Peningkatan produktivitas pertanian; b. Peningkatan produktivitas perkebunan; c. Peningkatan produktivitas peternakan;	Peningkatan daya saing daerah pemerataan akses pelayanan publik masyarakat.	Strategi : 1. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah Tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); 2. Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per Tahun; 3. Penyusunan data cadangan pangan Provinsi dan Kab/Kota;

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
	e. Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi;	d. Optimalisasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian daerah.		4. Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan; 5. Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah-daerah yang menjadi lokasi sasaran program; 6. Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Provinsi; 7. Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian daerah Kab/Kota; 8. Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan Pertanian. Arah kebijakan : 1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan. 2. Mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu-hilir pangan, pertanian dan perikanan. 3. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan. 4. Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/konsumen. 5. Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi pemanfaatan waduk yang terbangun.

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 14: Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	a. Masih rendahnya produktivitas pertanian; b. Masih rendahnya produktivitas perkebunan; c. Masih rendahnya produktivitas peternakan; d. Masih adanya alih fungsi lahan pertanian; e. Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi;	a. Peningkatan produktivitas pertanian; b. Peningkatan produktivitas perkebunan; c. Peningkatan produktivitas peternakan; d. Optimalisasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian daerah.	Peningkatan daya saing daerah pemerataan akses pelayanan publik masyarakat.	Strategi : 1. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah Tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); 2. Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per Tahun; 3. Penyusunan data cadangan pangan Provinsi dan Kab/Kota; 4. Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan; 5. Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah-daerah yang menjadi lokasi sasaran program; 6. Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Provinsi; 7. Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian daerah Kab/Kota; 8. Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan Pertanian. Arah kebijakan : 1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan. 2. Mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu-hilir pangan, pertanian dan perikanan. 3. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				4. Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/konsumen. Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi pemanfaatan waduk yang terbangun.
Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Mempromosikan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Manajemen Hutan Lestari, Mengurangi Penggurunan, Menghentikan dan Mengembalikan Degradasi Lahan serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati			Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Strategi : 1. Penguatan operasionalisasi KPH untuk tata kelola hutan di tingkat tapak; 2. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/Pendek (RPHJP/Pd); 3. Pengendalian Perizinan usaha/kerjasama pemanfaatan hutan; 4. Perlindungan dan pengamanan hutan; 5. Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha kecil dan menengah Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); 6. Rencana pengelolaan hasil hutan kayu kapasitas < 6.000 m³/tahun 7. Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk kepentingan religi Arah kebijakan : Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Mempromosikan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Manajemen Hutan Lestari, Mengurangi Penggurunan, Menghentikan dan Mengembalikan Degradasi Lahan serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati			Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Strategi : 1. Penguatan operasionalisasi KPH untuk tata kelola hutan di tingkat tapak; 2. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/Pendek (RPHJP/Pd); 3. Pengendalian Perizinan usaha/kerjasama pemanfaatan hutan; 4. Perlindungan dan pengamanan hutan; 5. Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha kecil dan menengah Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); 6. Rencana pengelolaan hasil hutan kayu kapasitas < 6.000 m3/tahun 7. Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk kepentingan religi Arah kebijakan : Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Tujuan 16: Mempromosikan Perdamaian dan Masyarakat yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	a. Masih kurangnya pemberdayaan perempuan dalam keluarga hingga pembangunan; b. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat;	Optimalisasi pemberdayaan perempuan, mulai dari tingkat keluarga hingga masyarakat	a. Penurunan kekerasan terhadap anak. Indikator: Indeks Perlindungan Khusus Anak b. Meningkatnya layanan perlindungan anak korban kekerasan. Indikator: Persentase anak korban kekerasan yg mendapatkan layanan	Strategi : 1. Data Rikesdas Tahun 2020 (KPPPA, data Riskesdas, Susenas BPS) 2. Data Simfoni-PPA Arah kebijakan : 1. Perlindungan Khusus Anak 2. Perlindungan Khusus Anak

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 16: Mempromosikan Perdamaian dan Masyarakat yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	a. Masih kurangnya pemberdayaan perempuan dalam keluarga hingga pembangunan; b. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat;	Optimalisasi pemberdayaan perempuan, mulai dari tingkat keluarga hingga masyarakat	Peningkatan pemberdayaan perempuan dim kewirausahaan. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Strategi : Profil Perempuan Indonesia (KPPPA, data Sakernas BPS) Arah kebijakan : Kualitas Hidup Perempuan
Tujuan 16: Mempromosikan Perdamaian dan Masyarakat yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	a. Masih rendahnya budaya dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan peraturan daerah; b. Masih rendahnya rasio jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk; c. Pencapaian SPM di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal;	a. Peningkatan budaya dan kesadaran hukum masyarakat; b. Peningkatan pelayanan terhadap perlindungan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum.	Persentase penurunan konflik inter dan antar kelompok masyarakat yang terjadi	Arah Kebijakan : Penguatan penyelenggaraan pencegahan, dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban umum dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dan juga pihak-pihak berwenang di bidang keamanan dan ketertiban umum

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
Tujuan 16: Mempromosikan Perdamaian dan Masyarakat yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	a. Belum optimalnya pembinaan dan pendataan pegawai; b. Belum optimalnya merit sistem dalam proses jenjang karir jabatan;	a. Peningkatan pembinaan dan pendataan pegawai; b. Optimalisasi merit sistem dalam proses jenjang karir jabatan;	a. Penurunan kekerasan terhadap anak. Indikator: Indeks Perlindungan Khusus Anak b. Meningkatnya layanan perlindungan anak korban kekerasan. Indikator: Persentase anak korban kekerasan yg mendapatkan layanan	Strategi : 1. Data Rikesdas Tahun 2020 (KPPPA, data Riskesdas, Susenas BPS) 2. Data Simfoni-PPA Arah kebijakan : 1. Perlindungan Khusus Anak 2. Perlindungan Khusus Anak
Tujuan 16: Mempromosikan Perdamaian dan Masyarakat yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	a. Belum optimalnya pembinaan dan pendataan pegawai; b. Belum optimalnya merit sistem dalam proses jenjang karir jabatan;	a. Peningkatan pembinaan dan pendataan pegawai; b. Optimalisasi merit sistem dalam proses jenjang karir jabatan;	1. Terpenuhinya layanan dasar bidang pendidikan a. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun); b. Harapan Lama Sekolah (Tahun); c. Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%/persentase) • SD/MI/ sederajat; • SMP/MTs/ sederajat; dan • SMA/SMK/MA/sederajat. d. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%/persentase);	Strategi : 1. Dukungan terhadap fungsi pendidikan dalam percepatan pencegahan anak kerdil atau stunting melalui: a. Penyelenggaraan PAUD; b. Penguatan UKS/M; c. bantuan sanitasi sekolah; dan d. kelas parenting. 2. Dukungan untuk fungsi pendidikan dari urusan pemerintahan bidang lainnya. (antara lain: Penanganan anak tidak sekolah, Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Gender, Olah Raga Prestasi Indonesia, Manajemen Talenta Indonesia, Pengarusutamaan Gender dan lain-lain). 3. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diluar belanja pegawai dan DAK;

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
			e. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya 2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing a. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%/persentase); b. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 ahun setelah kelulusan (%/persentase); c. Penetapan dan implementasi kebijakan daerah sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK; dan 3. Revitalisasi SMK yang mendukung Industri 4.0. Kerjasama dengan industri/swasta, pemutakhiran sistem pembelajaran berbasis Industri 4.0, peningkatan kualitas pendidik, upgrading dan pemenuhan sarana dan prasarana, penguasaan softskills, karakter kerja dan bahasa asing.	4. Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah(UKS/M) baik pada lingkup provinsi maupun kabupaten/kota; 5. Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku; 7. Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI) di lingkup kabupaten/kota; 8. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya “kembali ke sekolah” (back to school) bagi anak usia sekolah di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang (3T); 9. Peningkatan dan penguatan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dilingkup provinsi maupun kabupaten/kota; 10. Peningkatan dan Pengembangan kualitas dan SDM Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi; 11. Peningkatan dan pengembangan pendidikan literasi sekolah di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota;dan 12. Penguatandan pengembangan bahasa dan sastra di daerah. Arah Kebijakan : 1. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui: a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; b. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun;

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				c. Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan ; d. Penjaminan mutu pendidikan dan Peningkatan tata kelola pendidikan. 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri.
Tujuan 16: Mempromosikan Perdamaian dan Masyarakat yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	a. Masih rendahnya budaya dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan peraturan daerah; b. Masih rendahnya rasio jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk; c. Pencapaian SPM di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal;	a. Peningkatan budaya dan kesadaran hukum masyarakat; b. Peningkatan pelayanan terhadap perlindungan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum.	Persentase penurunan konflik inter dan antar kelompok masyarakat yang terjadi	Arah Kebijakan : Penguatan penyelenggaraan pencegahan, dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban umum dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dan juga pihak-pihak berwenang di bidang keamanan dan ketertiban umum
Tujuan 17: Memperkuat Cara Pelaksanaan dan Revitalisasi Kerjasama Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	a. Masih belum optimalnya pembinaan dan pengendalian dalam proses penataan usaha keuangan daerah; b. Masih belum optimalnya pendataan aset daerah; c. Masih rendahnya nilai pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah; d. Masih rendahnya nilai retribusi daerah terhadap Pendapatan Daerah;	a. Optimalisasi pembinaan dan pengendalian dalam proses penataan usaha keuangan daerah; b. Optimalisasi pendataan aset daerah; c. Peningkatan nilai pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah;	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi berlandaskan pada struktur ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan	Strategi : 1. Adanya koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam membangun pariwisata daerahDaerah menetapkan desa-desa yang menjadi desa wisata sesuai dengan potensi, kesiapan penyediaan dokumen teknis dan dokumen administrasi yang dibutuhkan, dan tingkat ketercapaian pengembangan destinasi wisata; 2. Daerah meningkatkan aksesibilitas ke desa-desa yang menjadi desa wisata;Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa berupa peningkatan kompetensi.

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
		d. Peningkatan nilai retribusi daerah terhadap Pendapatan Daerah;		3. Masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kepariwisataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa untuk mendukung pengembangan kepariwisataan; 4. Menyediakan kebijakan dan regulasi pemenuhan SPM Perdesaan melalui pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perdesaan, pembangunan prasarana dan sarana konektivitas perdesaan, pembangunan prasarana dan sarana pariwisata, social budaya dan kelembagaan serta pembangunan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika; Arah kebijakan : 1. Destinasi pariwisata. 2. Pemasaran pariwisata. 3. Industri pariwisata. 4. Kelembagaan.
Tujuan 17: Menguatkan Cara Pelaksanaan dan Revitalisasi Kerjasama Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	a. Masih belum optimalnya pembinaan dan pengendalian dalam proses penatausahaan keuangan daerah; b. Masih belum optimalnya pendataan aset daerah; c. Masih rendahnya nilai pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah; d. Masih rendahnya nilai retribusi daerah terhadap Pendapatan Daerah;	a. Optimalisasi pembinaan dan pengendalian dalam proses penataan usaha keuangan daerah; b. Optimalisasi pendataan aset daerah; c. Peningkatan nilai pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah; d. Peningkatan nilai retribusi daerah terhadap Pendapatan Daerah;	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi berlandaskan pada struktur ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan	Strategi : 1. Adanya koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam membangun pariwisata daerahDaerah menetapkan desa-desa yang menjadi desa wisata sesuai dengan potensi, kesiapan penyediaan dokumen teknis dan dokumen administrasi yang dibutuhkan, dan tingkat ketercapaian pengembangan destinasi wisata; 2. Daerah meningkatkan aksesibilitas ke desa-desa yang menjadi desa wisata;Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa berupa peningkatan kompetensi. 3. masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kepariwisataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa untuk mendukung pengembangan kepariwisataan;

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				4. Menyediakan kebijakan dan regulasi pemenuhan SPM Perdesaan melalui pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perdesaan, pembangunan prasarana dan sarana konektivitas perdesaan, pembangunan prasarana dan sarana pariwisata, social budaya dan kelembagaan serta pembangunan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika; Arah kebijakan : 1. Destinasi pariwisata. 2. Pemasaran pariwisata. 3. Industri pariwisata. 4. Kelembagaan.
Tujuan 17: Memperkuat Cara Pelaksanaan dan Revitalisasi Kerjasama Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	a. Masih minimnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika daerah; b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas manajemen informatika; c. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah;	a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, khususnya di wilayah terluar; b. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan; c. Peningkatan manajemen komunikasi dan informasi pembangunan.	1. Kualitas akses TIK yang merata dengan pemanfaatan yang optimal. 2. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif.	Strategi : 1. Dalam mendukung prioritas nasional kelima yaitu stabilitas keamanan nasional guna meningkatkan akses dan kualitas informasi publik, perlu adanya upaya penatakelolaan bidang komunikasi publik, penyediaan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, maritim, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pengelolaan informasi publik melalui media Pemerintah; 2. Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional tersebut, arah dan kebijakan pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM bidang Komunikasi di Pemerintah daerah, peningkatan penyebaran informasi publik yang berkualitas melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, media tatap muka, pertunjukan rakyat, internet, kemitraan dengan komunitas informasi dan komunikasi publik serta media yang dimiliki Pemerintah daerah.

TPB	Kondisi Umum Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
				3. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah daerah agar memperhatikan: - Seluruh anggaran belanja TIK di lingkungan Pemerintah daerah agar berada di satu rekening dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika. - Infrastruktur TIK yang terintegrasi, seperti server pengolahan data dan jaringan komunikasi data. - Selama belum ada kebijakan yang mengatur, pembangunan aplikasi umum di Pemerintah daerah agar menggunakan atau mengadopsi aplikasi serupa yang sudah digunakan di pusat atau daerah lain. - Integrasi data di lingkungan Pemerintah daerah di bawah koordinasi dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika untuk dapat diakses secara berbagi pakai oleh seluruh SKPD; dan - Peningkatan dan pengembangan SDM bidang TIK di lingkungan Pemerintah daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Arah kebijakan : - Pengembangan e-Government di lingkup Pemerintah daerah. - Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Daerah. - Pengelolaan dan Penyediaan Informasi melalui media publik dan kemitraan lembaga komunikasi di daerah.

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat (diolah)

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kabupaten Pesisir Barat yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mengacu pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 tahap yang ke-2 (periode 2021-2025). Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan penerjemahan dari kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (Visi) dalam periodisasi RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 yang dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif.

Visi pembangunan jangka panjang daerah (20 tahun) Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut **“Pesisir Barat Madani dan Sejahtera 2025”**.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- 1. Membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dasar Wilayah dalam Skala Mantab, Tanggap Bencana, dan Berwawasan Lingkungan.
- 2. Membangun Struktur Perekonomian yang Kuat dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal.
- 3. Membangun Pesisir Barat yang Asri dan Lestari.
- 4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing.
- 5. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Demokratis, Berbudaya, dan Tentram dengan Mengedepankan Supremasi Hukum.
- 6. Membangun Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*good and clean governance*).

Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahap ke-2 dari RPJPD Kabupaten Pesisir Barat 2005-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap ke-2 RPJPD Kabupaten Pesisir Barat 2005-2025

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi 1 : Membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dasar Wilayah dalam Skala mantap, Tanggap Bencana, dan Berwawasan Lingkungan	
1 Tersedianya prasarana (infrastruktur) dan sarana transportasi yang handal, mengkoneksikan seluruh pelosok daerah, terintegrasi dengan upaya pembangunan bidang lainnya, serta sesuai dengan RTRW	1 Pemantapan sistem jaringan transportasi darat untuk mendukung konektivitas antar pusat-pusat kegiatan yang merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	2 Pemantapan sistem jaringan transportasi laut serta sistem jaringan transportasi udara sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi daerah yang saling terkoneksi dan terintegrasi dengan baik
	3 Pemantapan pelayanan angkutan umum yang mudah diakses, aman, nyaman, tertib, serta menjangkau seluruh pelosok daerah
2 Terpenuhinya kebutuhan air minum dan sanitasi yang berkualitas, layak, sehat, aman, mencukupi kebutuhan, serta berkelanjutan	1 Pemantapan layanan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, aman, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan
3 Tersedianya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup (manusia, tumbuhan, dan hewan), baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang	1 Penguatan upaya konservasi untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
	2 Pemantapan pendayagunaan sumber daya air yang ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif
	3 Penguatan upaya mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir, dan abrasi pantai
4 Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal, efisien sesuai kebutuhan, berkelanjutan, dan ramah lingkungan	1 Pemantapan layanan jaringan teknologi informasi dan komunikasi pada seluruh kawasan kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan daerah
	2 Intensifikasi aplikasi teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan komprehensif kepada masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam rangka pengembangan ekonomi, pelayanan sosial, budaya, dan pemerintahan
5 Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata	1 Pemantapan layanan jaringan teknologi informasi dan komunikasi pada seluruh kawasan kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan daerah
	2 Intensifikasi aplikasi teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan komprehensif kepada masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam rangka pengembangan ekonomi, pelayanan sosial, budaya, dan pemerintahan
6 Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas pendukung mitigasi dan kesiapsiagaan bencana (gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kebakaran, kekeringan, serta bencana lainnya)	1 Pemantapan kualitas prasarana dan sarana pendukung penanggulangan bencana alam (khususnya bencana pesisir) dengan menerapkan teknologi yang mutakhir (canggih), tepat guna dan tepat sasaran

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
7 Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang wilayah	1 Pemantapan penerapan, pengendalian, dan pengawasan penataan ruang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stake holder)
8 Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas dasar (PSU) perkantoran pemerintahan daerah Kabupaten dalam skala mantap	1 Pemantapan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar (PSU) perkantoran pemerintahan daerah dilakukan strategis, efektif, dan efisien dengan memperhatikan ketersediaan lahan, anggaran serta dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, swasta, dan partisipasi masyarakat
Misi 2 : Membangun Struktur Perekonomian yang Kuat dan Berkelanjutan Berbasis Pariwisata, Sumber Daya Alam, dan Kearifan Lokal	
1 Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi berlandaskan pada struktur ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan	1 Peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk pertanian (pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan) melalui penerapan teknologi pertanian tepat guna, padat karya, dan mutakhir
	2 Penguatan daya saing destinasi wisata daerah pada tingkat regional, nasional, dan internasional yang terintegrasi dengan upaya pelestarian dan pengembangan seni, budaya, dan kreatifitas masyarakat
	3 Peningkatan dan penguatan daya saing industri daerah pada level nasional dan internasional
2 Pendapatan perkapita masyarakat tinggi disertai dengan penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masyarakat	1 Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM pada level regional, nasional, dan internasional melalui penerapan teknologi tepat guna, padat karya, dan mutakhir
3 Peningkatan peran investasi/penanaman modal dalam pembangunan ekonomi daerah	1 Pemantapan daya saing investasi yang berorientasi global untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah
4 Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan jasa	1 Memantapkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa seperti pasar rakyat dan pusat distribusi lainnya untuk menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang dan jasa kebutuhan pokok dan barang penting
	2 Memperkuat jaminan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah
	3 Penguatan perlindungan konsumen

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi 3 : Membangun Pesisir Barat yang Asri dan Lestari	
1 Terwujudnya lingkungan yang indah berseri	1 Peningkatkan upaya penataan lingkungan untuk keindahan dan kenyamanan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan upaya konservasi dan restorasi
2 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	1 Memperkuat upaya penjagaan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah/kawasan, didukung oleh kebijakan dan kerangka regulasi, SDM dan institusi berkualitas dan keterlibatan partisipasi masyarakat
3 Meningkatnya perilaku peduli lingkungan dan kehutanan	1 Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	2 Memperkuat penegakan hukum lingkungan secara adil dan merata
Misi 4 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing	
1 Peningkatan kualitas hidup manusia (SDM) - Peningkatan derajat pendidikan masyarakat	1 Menjamin kepastian layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, tinggi, serta pendidikan masyarakat yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1 Memantapkan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada seluruh siklus, lapisan/tingkatan kehidupan manusia secara adil dan merata dengan menerapkan seluruh pendekatan yang modern dan tanggap kebutuhan untuk mempercepat pembangunan manusia Kabupaten Pesisir Barat yang Sejahtera
2 Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang	1 Penguatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas
	2 Pemantapan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil secara terpadu dengan menerapkan teknologi yang mutakhir dan terintegrasi dengan basis data pembangunan bidang lainnya
3 Penurunan tingkat pengangguran dan perluasan kesempatan kerja	1 Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat bersaing pada pasar bebas tenaga kerja yang diberlakukan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan sesuai dengan Mutual Recognition Arrangement (MRA)"
4 Peningkatan Pembangunan Berkesetaraan Gender dan Perlindung Anak	1 Memperkuat upaya peningkatan kualitas hidup dan menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	2 Penguatan integrasi kebijakan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam kebijakan pembangunan
	3 Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat daerah
5 Peningkatan aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial	1 Memantapkan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adil, merata, dan menyeluruh pada setiap aspek penghidupan
	2 Memperkuat peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
6 Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda	1 Memperkuat karakter dan kompetensi pemuda melalui pengembangan pengetahuan dan kemampuan teknis (soft skill dan hard skill) pemuda
	2 Optimalisasi partisipasi pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik
	3 Peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan
7 Peningkatan Pembinaan Olahraga	1 Penguatan tata kelola olahraga daerah
Misi 5 : Membangun Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Berbudaya, Tentram, dan Demokratis dengan Mengedepankan Supremasi Hukum	
1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang religious	1 Penguatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama pada seluruh siklus kehidupan (individu, keluarga, dan masyarakat) dan aktivitas masyarakat
	2 Perluasan akses dan mutu pendidikan agama bagi masyarakat
	3 Penguatan sikap dan perilaku saling percaya, saling menghormati dan saling toleran inter dan antar kelompok masyarakat
2 Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudaya dan berperadaban luhur	1 Penguatan revitalisasi, reaktualisasi, internalisasi, dan apresiasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, sinergi dan terintegrasi dengan pembangunan bidang lainnya (sosial, ekonomi, dll)
3 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan nyaman	1 Penguatan penyelenggaraan pencegahan, dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban umum dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dan juga pihak-pihak berwenang di bidang keamanan dan ketertiban umum
4 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis	1 Memperkuat kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik
	2 Menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik
	3 Memperkuat media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	4 Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan
5 Terwujudnya karakter masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum	1 Memperkuat pemahaman dan persamaan persepsi serta kesadaran hukum dalam rangka membentuk budaya hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia
	2 Memantapkan penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil
MISI 6 : Membangun Pemerintahan yang Baik dan Bersih (<i>Good And Clean Governance</i>)	
1 Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintah daerah yang profesional	1 Penguatan kapasitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, netral, dan sejahtera
2 Terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien	1 Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan sistem manajemen pemerintahan daerah
3 Kapasitas keuangan pemerintah daerah	1 Penguatan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
4 Pelayanan publik yang berkualitas	1 Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik, penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik, dan pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik
5 Kapasitas lembaga legislatif daerah	1 Memperkuat lembaga legislatif (DPRD) sebagai lembaga perwakilan yang adil, independen, dan profesional melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan

5.1. VISI

Visi merupakan cerminan dari kondisi masa depan yang ingin dicapai (*desired future*) dalam kurun waktu tertentu. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah maka Visi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat merupakan cerminan dari kondisi Kabupaten Pesisir Barat yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun. Visi kepala daerah Kabupaten Pesisir Barat terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PESISIR BARAT YANG AMANAH, MAJU DAN SEJAHTERA”.

5.1.1. Pesisir Barat yang Amanah

Pesisir Barat yang Amanah mengandung makna setiap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan selalu dilandasi dan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan yang amanah adalah pemerintahan yang senantiasa mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam usaha-usaha untuk menyejahterakan masyarakat.

5.1.2. Pesisir Barat Maju

Pesisir Barat yang maju mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Dalam artian sumber daya manusia yang kompetitif, terampil dan menguasai teknologi informasi. Sumber daya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif. Sumber daya manusia yang sejahtera, jujur, beretika dan mempunyai integritas. Dengan demikian, maka akan dapat memenangkan persaingan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) dan rantai nilai (*value chain*) dari produk daerah dan sumber daya alam.

5.1.3. Pesisir Barat Sejahtera

Setelah Pesisir Barat mampu menjalankan pemerintahan yang amanah dan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta daya saing daerah, maka diharapkan secara bertahap Pesisir Barat akan sejahtera. Secara ekonomi, sejahtera adalah kondisi terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Dalam konteks sosial, kesejahteraan menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejahtera adalah suatu kondisi yang bersifat multidimensi yang mencakup terpenuhinya kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan), tersedianya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, ketersediaan jaminan masa depan, tingginya kualitas sumber daya manusia serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan bermasyarakat.

5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak *stakeholder* pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam

rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah periode 2021-2026, rumusan misi pembangunan daerah untuk mencapai Visi “TERWUJUDNYA PESISIR BARAT YANG AMANAH, MAJU DAN SEJAHTERA” dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing.
2. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan.
3. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan.
4. Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal.
5. Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga.

Gambar 5.1. *Logframe* Visi dan Misi



Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat tersebut selanjutnya akan diwujudkan ke dalam program kerja Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut:

Tabel 5.2. Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir BaratTahun 2021-2026

Misi	Program Kerja
Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas yang meliputi program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, kepemudaan, kesetaraan gender dan perlindungan anak.
Misi 2 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan	Pembangunan Infrastruktur wilayah yang berkualitas yang meliputi program pembangunan bidang prasarana dan sarana transportasi, permukiman dan perumahan, air minum, sumber daya air dan irigasi, penanggulangan bencana. Lingkungan hidup dan penataan ruang.
Misi 3 Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkualitas yang meliputi program pembangunan bidang pertanian, perdagangan, perindustrian, investasi, dan pembangunan sektor ekonomi lainnya serta penanggulangan kemiskinan daerah.
Misi 4 Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal	Pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing yang meliputi program pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan daerah.
Misi 5 Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga	Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas meliputi program pembangunan bidang pelayanan publik, tata kelola keuangan dan aset daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah, aparatur sipil negara, dan pembangunan Desa/Pekon.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Selaras dengan penggunaan paradigm penganggaran berbasis kinerja, dan konsep money follow program dan money follow priority, maka perencanaan pembangunan daerah wajib mempergunakan konsep yang sama.

Rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada program-program prioritas daerah yang berorientasi pada target kinerja, baik pada dampak, hasil maupun pada keluaran suatu sasaran kinerja.

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Rumusan tujuan dan sasaran untuk mencapai rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2021—2026 disajikan pada Tabel 5.3 dan Tabel 5.4.

Tabel 5.3
Visi, Misi dan Tujuan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

VISI : “TERWUJUDNYA PESISIR BARAT YANG AMANAH, MAJU DAN SEJAHTERA”

Misi	Tujuan	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	63.91	64.17	64.31	64.44	64.58	64.71	64.71
	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3.41	3.00	2.80	2.60	2.41	2.21	2.21
	Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Angka)	93.21	93.82	94.29	94.76	95.24	95.71	95.71
Misi II : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	Indeks Kualitas Infrastruktur (Angka)	53.46	55.00	55.00	60.00	60.00	65.00	65.00
Misi III : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	-1.17	3.20-3.70	3.40-3.90	3.60-4.10	3.80-4.30	4.00-4.50	4.00-4.50
Misi IV : Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal	Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (Persen)	1.71	1.73	1.74	1.76	1.78	1.80	1.80
Misi V : Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (Huruf)	n/a	C	C	C	C	C	C



Tabel 5.4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

VISI : “TERWUJUDNYA PESISIR BARAT YANG AMANAH, MAJU DAN SEJAHTERA”

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	63.91	64.17	64.31	64.44	64.58	64.71	64.71
	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	2 Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3.41	3.00	2.80	2.60	2.41	2.21	2.21
	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	3 Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (Angka)	93.21	93.82	94.29	94.76	95.24	95.71	95.71
Misi II : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	1 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	39.03	41.00	41.50	42.00	42.50	43.00	43.00
		2 Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Daya Air Yang Sehat Dan Aman (Persen)	35.00	37.50	40.00	42.50	43.50	45.00	45.00
		3 Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Rasio Jaringan Irigasi (Persen)	50.94	52.00	53.00	55.00	57.50	60.00	60.00
		4 Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	68.50	73.54	73.87	74.20	74.53	74.86	74.86
		5 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (Angka)	181.41	180.94	180.71	180.47	180.24	180.00	180.00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi III : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	-1.17	3.20-3.70	3.40-3.90	3.60-4.10	3.80-4.30	4.00-4.50	4.00-4.50
		2 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	28.45	28.20-28.81	28,60-29.04	28.70-29.29	29.00-29.56	29.20-29.85	29.20-29.85
		3 Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	Nilai Tukar Petani (Angka)	94.73	97.25	98.51	99.77	101.04	102.30	102.30
		4 Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini (Angka)	0.34	0.32	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29
		5 Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Tingkat Kemiskinan Daerah (Persen)	14.29	13.95	13.65	13.34	13.04	12.73	12.73
Misi IV : Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal	Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	1 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara (Persen)	-75.03	20.00	21.00	22.00	23.00	25.00	25.00
Misi V : Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	1 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (Angka)	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	80.00
		2 Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Nilai SAKIP (Huruf/Predikat)	CC	CC	CC	CC	B	B	B
		3 Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	Opini BPK (Huruf/Predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		4 Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon	Indeks Desa Membangun (Angka)	0.6100	0.6600	0.6700	0.6800	0.6900	0.7000	0.7000

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan implementasi sistem perencanaan pembangunan nasional yang merupakan bentuk kesatuan antara perencanaan pusat dan daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk dapat mendukung pencapaian target-target dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah di atasnya. Oleh karena itu, berikut ditampilkan hasil penyelarasan Indikator makro RPJMN tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Lampung tahun 2020-2024 dan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 5.5 serta Hasil Penyelarasan Indikator Makro RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 pada Tabel 5.6.

Tabel 5.5
Hasil Penyelarasan Indikator Makro RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024					RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026						
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.50	5.90	6.20	6.50	7.00	1.63	2.5-3.5	3.0-4.0	3.5-4.5	4.5-5.5	(1,17)	3.00-3.20	3.20-3.70	3.40-3.90	3.60-4.10	3.80-4.30	4.00-4.50
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11.56	11.27	10.35	9.68	9.20	11.10	12.76-12.4	12.4-11.9	11.9-11.4	11.4-10.9	14.29	14.23-14.50	13.95	13.65	13.34	13.04	12.73
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.80	3.60	3.40	3.00	2.70	3.85	4.5-4.0	4.4-4.3	4.3-4.0	4.0-3.8	3,41	3.20	3.00	2.80	2.60	2.41	2.21
4	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)					75.54		69.69-70.00	70.00-70.30	70.30-70.60	70.60-70.90	63,91	64.04-64.20	64.17	64.31	64.44	64.58	64.71
5	Rasio Gini (Angka)					0.360-0.374		0.310-0.334	0.308-0.324	0.302-0.319	0.293-0.314	0.34	0.33-0.34	0.32	0.32	0.31	0.30	0.29
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)					27.30		6.740	6.915	7.066	7.290	n/a		10.00	10.50	11.00	11.50	12.00



Tabel 5.6
Hasil Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan
RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan
RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2022	2023	2024	2025	2026
1	PN	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS																				
1.1.	PP	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5														
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68	68	68,8	69,2	70,3														
1.2.	PP	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m ³)	4	4,4	4,7	5,1	5,4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman	72,9	75	76	78	80	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman (SPAM)	37,50	40,00	42,50	43,50	45,00
1.3.	PP	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	90,4	91,6	92,8	94	95,2	Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi masyarakat						Pangan	Ketersediaan pangan utama (Ton)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari)	2100	2100	2100	2100	2100	Pangan	Capaian Indeks Ketahanan Pangan	76	77	78	79	80	Pangan	Ketersediaan pangan utama (Ton)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57	57	57	57	57	Pangan	Capaian Indeks Ketahanan Pangan	76	77	78	79	80	Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	7,00	7,00	5,00	5,00	4,00
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	6,2	5,8	5,5	5,2	5	Pangan	Capaian Indeks Ketahanan Pangan	76	77	78	79	80	Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	7,00	7,00	5,00	5,00	4,00
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4	Pangan	Persentase (%) penurunan daerah rawan pangan	1	1	1	1	1	Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	7,00	7,00	5,00	5,00	4,00
1.4.	PP	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (juta ha)	23,4	24,2	25,1	26	26,9	Kelautan dan Perikanan	Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau kecil	223,68	341,36	459,04	576,72	694,4							
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	<64	<67	<72	<76	≤80	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	188,79	193,51	198,348	203,3	208,38	Perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batas biologis yang aman	0,031	0,032	0,032	0,033	0,033
1.5.	PP	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4	Perdagangan	Pelaku usaha yang menjadi eksportir (UKM)	5	10	10	15	20	Perindustrian	Cakupan bina kelompok pengrajin	35,00	37,00	40,00	42,00	45,00
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	11,2	11,25	11,3	11,35	11,4	Perdagangan	kontribusi UMKM terhadap PDRB	1,89	1,98	2,08	2,18	2,29
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	11,2	11,25	11,3	11,35	11,4	Koperasi, UMKM	Persentase koperasi aktif	50,00	50,00	52,50	52,50	55,00
1.6.	PP	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,63	2,3	2,92	3,09	3,19	Pertanian	Produksi Sektor Pertanian (Ton)	145.418	146.872	148.34	145.944	151.322



No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2022	2023	2024	2025	2026
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,63	2,3	2,92	3,09	3,19	Pertanian	Produksi perikanan tangkap (Ton)	13.859	14.136	14.419	14.708	15.002
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	5	5,5	6,5	7,5	8,1	Perindustrian	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (TPB)	6,23	6,26	6,28	6,29	6,33	Perindustrian	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	3,98	3,99	3,99	4,00	4,00
			Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	4,8	5	5,2	5,3	5,5	Pariwisata	Jumlah kunjungan Wisatawan	10 juta	11 juta	12 juta	13 juta	14 juta	Pariwisata	Kontribusi PAD Sektor wisata (Persen)	2,58	2,78	2,98	3,18	3,38
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1189-1214	1314-1333	1439-1452	1564-1570	1689	Perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	11,2	11,25	11,3	11,35	11,4	Pariwisata	Kontribusi PAD Sektor wisata (Persen)	2,58	2,78	2,98	3,18	3,38
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4	Penanaman Modal	Jumlah realisasi investasi daerah terhadap target investasi nasional	100	100	100	100	100	Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	15,99	16,49	16,99	17,49	17,49
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3	2,7-3	2,7-3	2,7-3	2,7-3	Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	60	65	70	75	80	Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,71	73,04	73,88	74,71	75,54
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4	3,5-4,5	Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,85	4,5-4,0	4,4-4,3	4,3-4,0	4,0-3,8	Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,00	2,80	2,60	2,41	2,21
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	14,2	14,6	15	15,3	15,7	Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,85	4,5-4,0	4,4-4,3	4,3-4,0	4,0-3,8	Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,00	2,80	2,60	2,41	2,21
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22	Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	1939	1939	1939	1939	1939	Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,00	2,80	2,60	2,41	2,21
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	13	13,5	14	14,5	15	Pariwisata	Jumlah kunjungan Wisatawan	10 juta	11 juta	12 juta	13 juta	14 juta	Pariwisata	Cakupan fasilitasi pengembangan SDM Pariwisata	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19	20	20	21	21	Pariwisata	Jumlah kunjungan Wisatawan	10 juta	11 juta	12 juta	13 juta	14 juta	Pariwisata	Cakupan fasilitasi pengembangan SDM Pariwisata	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00
1.7.	PP	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	Perdagangan	Nilai Ekspor Non Migas	3,5	3,55	3,6	3,7	3,8	Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	11,53	11,55	11,56	11,58	11,59
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1	3	7,5	15	Perdagangan	Nilai Ekspor Non Migas	3,5	3,55	3,6			Perdagangan	Net Ekspor Barang dan Jasa	43.055	43.098	43.141	43.184	43.227
			Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27,5	30	Pariwisata	Rata-rata jumlah pengeluaran wisatawan (spending of Money)	700000	750000	800000	850000	900000	Pariwisata	Kontribusi PAD Sektor wisata (Persen)	2,58	2,78	2,98	3,18	3,38
1.8.	PP	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	Perdagangan	Pertumbuhan PDRB/LPE (TPB)	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	11,53	11,55	11,56	11,58	11,59
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18	Perdagangan	Pertumbuhan PDRB/LPE (TPB)	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	11,53	11,55	11,56	11,58	11,59
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N/A	34-39	N/A	29,34	N/A	Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan	1,87	2,12	2,37	2,6	2,8	Pariwisata	Kunjungan wisatawan (orang)	286.376	394.375	494.527	615.289	780.748
2	PN	MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING																				
2.1.	PP	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7				98	Sosial	Persentase keluarga fakir miskin mendapat bantuan dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta dapat menjalankan fungsi sosialnya	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Sosial	Cakupan perlindungan dan jaminan perlindungan sosial daerah	100	100	100	100	100



No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2022	2023	2024	2025	2026
			Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laju pertumbuhan penduduk	1,33	1,03	1,03	1,02	1,01	Jengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2.21	2.19	2.17	2.13	2.10
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2				80	Sosial	Persentase keluarga fakir miskin mendapat bantuan dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta dapat menjalankan fungsi sosialnya	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Sosial	Cakupan perlindungan dan jaminan perlindungan sosial daerah	100	100	100	100	100
2.2.	PP	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7				98	Sosial	Persentase keluarga fakir miskin mendapat bantuan dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta dapat menjalankan fungsi sosialnya	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Sosial	Cakupan perlindungan dan jaminan perlindungan sosial daerah	100	100	100	100	100
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2				80	Sosial	Persentase keluarga fakir miskin mendapat bantuan dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta dapat menjalankan fungsi sosialnya	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Sosial	Cakupan perlindungan dan jaminan perlindungan sosial daerah	100	100	100	100	100
2.3.	PP	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183	Kesehatan	Jumlah Kasus Kematian Ibu (TPB)	130	125	120	115	110	Kesehatan	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan	100	100	100	100	100
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16	Kesehatan	Jumlah Kasus Kematian Bayi (TPB)	600	580	560	540	520	Kesehatan	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan	100	100	100	100	100
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11	10	Kesehatan	Jumlah Kasus Kematian Bayi (TPB)	600	580	560	540	520	Kesehatan	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan	100	100	100	100	100
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4	Pengendalian Penduduk dan KB	Persentase Akseptor KB Aktif	74	74,37	75,59	76,21	77	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2.21	2.19	2.17	2.13	2.10
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8	7,7	7,4	Pengendalian Penduduk dan KB	Laju pertumbuhan penduduk	0,87	1,33	1,03	1,02	1,01	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2.21	2.19	2.17	2.13	2.10
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25	24	21	20	18								Kesehatan	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan	100	100	100	100	100
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16	14	Kesehatan	Prevalensi Stunting (TPB)	25,18	23,08	20,98	18,88	16,78	Kesehatan	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan	100	100	100	100	100
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7	Kesehatan	Prevalensi Wasting	9,27	7,99	6,71	5,43	4,51	Kesehatan	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan	100	100	100	100	100
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18								Kesehatan	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan	100	100	100	100	100
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190	Kesehatan	Penemuan kasus (CDR) TBC	58	65	70	75	80	Kesehatan	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan	100	100	100	100	100
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405								Kesehatan	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan	100	100	100	100	100
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	9	8,9	8,8	8,7								Kesehatan	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan	100	100	100	100	100



No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2022	2023	2024	2025	2026
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8								Kesehatan	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan	100	100	100	100	100
			Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1								Kesehatan	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan	100	100	100	100	100
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100	Kesehatan	% FKTP Terakreditasi	50	55	60	65	70	Kesehatan	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan	100	100	100	100	100
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100	Kesehatan	RSBNH Terakreditasi	100	100	100	100	100	Kesehatan	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Kesehatan	100	100	100	100	100
2.4.	PP	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA:																			
			a. Membaca	N/A	399,1			399,7	Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	73,43	74,23	75,42	76,6	77,8	Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	100	100	100	100	100
			b. Matematika	N/A	388,7			392,3	Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	73,43	74,23	75,42	76,6	77,8	Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	100	100	100	100	100
			c. Sains	N/A	400,4			406,2	Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	73,43	74,23	75,42	76,6	77,8	Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	100	100	100	100	100
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (persen)																			
			a. Membaca	N/A	34,4			35,6	Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	73,43	74,23	75,42	76,6	77,8	Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	100	100	100	100	100
			b. Matematika	N/A	46,6			47,4	Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	73,43	74,23	75,42	76,6	77,8	Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	100	100	100	100	100
			c. Sains	N/A	49			51	Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	73,43	74,23	75,42	76,6	77,8	Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	100	100	100	100	100
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16	Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,8	7,9	8	8,1	8,2	Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	100	100	100	100	100
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas (Tahun)	13,4	13,6	13,79	13,97	14,16	Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,64	12,71	12,78	12,85	12,92	Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	100	100	100	100	100
2.5.	PP	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung	6	9	13	14	15	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Terhadap Anak	100	100	100	100	100
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-Laki 61,7; Perempuan 62	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Terealisasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (TPB)	100	100	100	100	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Pendampingan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	100	100	100	100	100
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,21	91,27	91,27	91,33	91,38	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,03	91,26	91,49	91,72	91,95	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase PD yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG)	100	100	100	100	100
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,24	73,5	73,74	73,96	74,17	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,24	69,43	69,66	70	70,22	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase PD yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG)	100	100	100	100	100
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,51	53,13	53,75	54,37	55	Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPB)	3,85	4,5-4,0	4,4-4,3	4,3-4,0	4,0-3,8	Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,71	73,04	73,88	74,71	75,54
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Terealisasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (TPB)	100	100	100	100	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan (Persen)	100	100	100	100	100
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	5,33	56,5	56,5	58,17	57,67								Pemuda dan Olahraga	Cakupan Pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00

No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2022	2023	2024	2025	2026
2.6.	PP	Pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9				40	Sosial	Persentase Penduduk Miskin (TPB)	11,1	12.76-12.4	12.4-11.9	119.11.4	11.4-10.9	Sosial	Cakupan perlindungan dan jaminan perlindungan sosial daerah	100	100	100	100	100
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25,6				50	Sosial	Persentase keluarga fakir miskin mendapat bantuan dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya serta dapat menjalankan fungsi sosialnya	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Sosial	Cakupan perlindungan dan jaminan perlindungan sosial daerah	100	100	100	100	100
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	1600000	1850000	1350000	1100000	Kehutanan	Peningkatan pengelolaan Hutan tingkat tapak Unit KPH/Tahun	17	17	17	17	17							
			Bidang tanah yang didistribusi	750000				7750000								Pertanahan	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reformasi Agraria	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6286087				56286087								Pertanahan	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reformasi Agraria	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.7.	PP	Peningkatan produktivitas dan daya saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	1939	1939	1939	1939	1939	Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72.71	73.04	73.88	74.71	75.54
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University																			
			a. Top 200	0	0	0	0	1														
			b. Top 300	1	1	1	1	2														
			c. Top 500	2	2	2	2	3														
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43	45	47	48	50	Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPB)	3.85	4.5-4.0	4.4-4.3	4.3-4.0	4.0-3.8	Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72.71	73.04	73.88	74.71	75.54
3	PN	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN																				
3.1.	PP	Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter							Kesatuan Bangsa dan Politik	Prosentase jumlah masyarakat terhadap pembinaan idologi dan wawasan kebangsaan	20	20	20	20	20	Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan	46.00	48.00	49.00	51.00	53.00
3.2.	PP	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia							Kebudayaan	Persentase karya seni budaya yang berprestasi	50	60	70	80	90	Kebudayaan	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang terlibat pertunjukan seni	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00
3.3.	PP	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama						Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kerukunan Umat Beragama	69	70	71	72	73							



No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2022	2023	2024	2025	2026
3.4.	PP	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter							Perpustakaan	Persentase Penduduk gemar membaca	30	35	40	45	50	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dikelola daerah	1	1	1	1	1
4	PN	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR																				
4.1.	PP	Infrastruktur pelayanan dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rumah Tidak Layak Huni (persen) (TPB)	3,9	2,92	1,82	0,83	0	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rasio Rumah Layak Huni	86.00	87.00	88.00	88.67	90.00
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rumah Tidak Layak Huni (persen) (TPB)	3,9	2,92	1,82	0,83	0	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rasio Rumah Layak Huni	86.00	87.00	88.00	88.67	90.00
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rumah Tidak Layak Huni (persen) (TPB)	3,9	2,92	1,82	0,83	0	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rasio Rumah Layak Huni	86.00	87.00	88.00	88.67	90.00
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,1	3,3	3,6	4														
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak	79,43% akses layak	82,07% akses layak	86,03% akses layak	90% akses layak	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak (Persen) (TPB)	69,29	72,55	76,25	80,6	85,06	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	65.30	69.87	74.76	78.50	80.00
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Aman terhadap Sanitasi Layak (Persen) (TPB)	69,29	72,55	76,25	80,6	85,06	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	65.30	69.87	74.76	78.50	80.00
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72,92% penanganan; 3,70% pengurangan	73,70% penanganan; 5,51% pengurangan	75,28% penanganan; 9,13% pengurangan	77,64% penanganan; 14,57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan	Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	20	40	60	80	100	Lingkungan Hidup	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	49.61	52.09	54.70	57.43	60.30
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91,8	93,8	95,9	97,9	100	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman (TPB)	72,9	74,63	7676,44	78,36	80	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman (SPAM)	37.50	40.00	42.50	43.50	45.00
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman (TPB)	72,9	74,63	7676,44	78,36	80	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman (SPAM)	37.50	40.00	42.50	43.50	45.00
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,5	55,1	57	58,1	58,49	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman (TPB)	72,9	74,63	7676,44	78,36	80	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman (SPAM)	37.50	40.00	42.50	43.50	45.00
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP > 2	37	40	45	50	55	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan sarana dan prasarana SDA Daerah	30.00	35.00	45.00	45.00	50.00
			Luas lahan pertanian padi dan nonpadi yang beririgasi meningkat (Hektare)	45229,1	115942,7	116142,7	116342,7	116342,7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP > 2	37	40	45	50	55	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan sarana dan prasarana SDA Daerah	30.00	35.00	45.00	45.00	50.00

No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2022	2023	2024	2025	2026
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Indeks Resiko Bencana (TPB)	144.7	142.9	141	139.1	137.2	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	100	100	100	100	100
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,4	11,4	11,4	11,4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP > 2	37	40	45	50	55	Pekerjaan Umum dan Penataan Rung	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman (SPAM)	37.50	40.00	42.50	43.50	45.00
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65	Perhubungan	Peningkatan pembangunan prasarana, Sarana dan Fasilitas Perhubungan	100	100	100	100	100	Perhubungan	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	70.00	70.00	72.50	72.50	75.00
4.2.	PP	Infrastruktur ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentasi Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	70.69	74	76	77	78							
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)						Perhubungan	Meningkatnya pemeliharaan terminal, pelabuhan dan fasilitas LLAJ (%)	70	100	100	100	100	Perhubungan	Pesentase Cakupan Wilayah yang terlayani Angkutan Laut	50.00	55.00	60.00	60.00	65.00
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)																			
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)																			
4.3.	PP	Infrastruktur perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)													Perhubungan	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	70.00	70.00	72.50	72.50	75.00
4.4.	PP	Energi dan ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100	Energi dan SDM	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (TPB)	94	95	96	97	98	Sekretariat Daerah	Cakupan penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100	100	100	100	100
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408	Energi dan SDM	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (TPB)	94	95	96	97	98	Sekretariat Daerah	Cakupan penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100	100	100	100	100
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	86,24	87,11	87,98	88,86	89,75	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.54	73.87	74.20	74.53	74.86
4.5.	PP	Transformasi digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	Komunikasi dan Informatika	Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	10	20	30	40	50	Komunikasi dan Informatika	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi dan komunikasi (TIK)	80.00	80.00	82.50	82.50	85.00
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3	Komunikasi dan Informatika	Persentase layanan keamanan informasi daerah						Komunikasi dan Informatika	Persentase peningkatan desiminasi informasi dan komunikasi publik	80.00	80.00	80.00	85.00	85.00
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,5	98	98,5	99	100	Komunikasi dan Informatika	Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	10	20	30	40	50	Komunikasi dan Informatika	Persentase peningkatan desiminasi informasi dan komunikasi publik	80.00	80.00	80.00	85.00	85.00
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	70	72	73	74	75,7	Komunikasi dan Informatika	Persentase peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	10	20	30	40	50	Komunikasi dan Informatika	Persentase peningkatan desiminasi informasi dan komunikasi publik	80.00	80.00	80.00	85.00	85.00
5	PN	MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM																				
5.1.	PP	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	86,24	87,11	87,98	88,86	89,75	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.54	73.87	74.20	74.53	74.86
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	62,53	64,41	66,34	68,33	70,38	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.54	73.87	74.20	74.53	74.86



No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2022	2023	2024	2025	2026
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,5	59	59,5	60	60,5	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	62,53	64,41	66,34	68,33	70,38	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,54	73,87	74,20	74,53	74,86
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (TPB)	59,63	68,23	68,66	69,09	69,51	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,54	73,87	74,20	74,53	74,86
5.2.	PP	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Resiko Bencana (TPB)	144,7	142,9	141	139,1	137,2	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	100	100	100	100	100
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0,34	0,59	0,81	1	1,15	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Resiko Bencana (TPB)	144,7	142,9	141	139,1	137,2	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	100	100	100	100	100
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4,5	4	3,5	3	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Resiko Bencana (TPB)	144,7	142,9	141	139,1	137,2	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	100	100	100	100	100
5.3.	PP	Pembangunan rendah karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11,8	12,5	12,8	12,8	13,2	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (TPB)	59,63	68,23	68,66	69,09	69,51	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,54	73,87	74,20	74,53	74,86
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (TPB)	59,63	68,23	68,66	69,09	69,51	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,54	73,87	74,20	74,53	74,86
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,5	9	9,3	9,4	9,4	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (TPB)	59,63	68,23	68,66	69,09	69,51	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,54	73,87	74,20	74,53	74,86
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2	2,3	2,5	2,6	2,9	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (TPB)	59,63	68,23	68,66	69,09	69,51	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,54	73,87	74,20	74,53	74,86
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,5	6,6	6,8	7	7,3	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (TPB)	59,63	68,23	68,66	69,09	69,51	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,54	73,87	74,20	74,53	74,86
6	PN	MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK																				
6.1.	PP	Konsolidasi demokrasi														Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	84,08	84,08	84,92	84,92	84,92
6.2.	PP	Optimalisasi kebijakan luar negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	95,07	95,27	95,47	95,67	95,67														
6.3.	PP	Penegakan hukum nasional	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73														
6.4.	PP	Reformasi birokrasi dan tata kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	70	75	80	85	85								Inspektorat	Cakupan konsistensi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100

No	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024	Bidang Urusan Pemerintahan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	50	60	70	80	85	Sekretariat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	A	Inspektorat	Cakupan konsistensi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	30	35	45	55	70								Inspektorat	Cakupan konsistensi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100
6.5.	PP	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,2														
			Global Terrorism Index	4,44	4,39	4,34	4,29	4,24														
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tingkat kasus kriminalitas terselesaikan	78,85	82,18	85,5	88,83	92,15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	1,00
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tingkat kasus kriminalitas terselesaikan	78,85	82,18	85,5	88,83	92,15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	1,00

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2022. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan menjadi rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak hanya mengagendakan dan merencanakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya rumusan strategis tersebut akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Barat pada RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

VISI : “TERWUJUDNYA PESIRIS BARAT YANG AMANAH, MAJU DAN SEJAHTERA”

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	1 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	1 Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	2 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	2 Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pemuda dan Penduduk Usia Kerja
	3 Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	3 Terwujudnya Kesenjangan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	1 Pengarusutamaan Gender, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan serta Pemenuhan dan Perlindungan Anak
Misi II : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan	1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	1 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	1 Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan dan Sarana Perhubungan Daerah
		2 Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	1 Peningkatan Ketersediaan, Kualitas, dan Kapasitas Prasarana dan Sarana Jaringan Air Minum, Air Limbah, Sanitasi, Persampahan serta Pengelolaan Bangunan dan Lingkungannya
		3 Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	1 Peningkatan Ketersediaan, Kualitas, dan Kapasitas Prasarana dan Sarana pada Sistem Jaringan Irigasi Daerah
		4 Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	1 Pengendalian Lingkungan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Udara, Air, Lahan
		5 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	1 Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah termasuk Pemadam Kebakaran



Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi III : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	1 Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1 Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi Cepat Tumbuh
		2 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	1 Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat
		3 Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	1 Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu, dan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan
		4 Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	1 Penguatan Peran Koperasi dan UMKM sebagai Pengungkit Pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		5 Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	1 Mengurangi Beban Pengeluaran Penduduk Miskin dan Mempermudah Akses Mendapatkan Pelayanan
Misi IV : Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal	1 Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	1 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	1 Pengembangan Destinasi Wisata, Aksesibilitas serta Atraksi dan Amenitas Pariwisata Daerah dengan Peningkatan Promosi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata
Misi V : Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga	1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	1 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	1 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Responsif, Murah, Mudah dan Cepat serta Berdaya Saing sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik serta Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
		2 Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	1 Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Pemerintahan Daerah
		3 Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah
		4 Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon	1 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi berkesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun, namun dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Arah kebijakan pembangunan pada setiap tahunnya selanjutnya dijabarkan untuk setiap arah kebijakan berdasarkan sasaran dan strategi pembangunan jangka menengah daerah. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2021-2026 dapat disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

2022	2023	2024	2025	2026
Pemulihan Ekonomi Daerah dan Kesehatan Masyarakat Serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Melanjutkan Pemulihan Ekonomi dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Memantapkan Infrastruktur Daerah	Pemantapan Ekonomi Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Pemantapan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber : RKPD Tahun 2022 dan Proyeksi RPJMD Tahun 2021-2026

1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Tema pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2022 masih terfokus pada upaya pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Prioritas pembangunan pada tahun 2022 adalah peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pangan (pertanian dan perikanan), infrastruktur, pariwisata, dan UMKM. Secara rinci arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 pada masing-masing misi dan bidang urusan pemerintahan disajikan pada Tabel 6.3.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Pada tahun 2023, pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat diarahkan pada upaya untuk melanjutkan upaya pemulihan ekonomi daerah dan kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas kualitas sumber daya manusia. Prioritas pembangunan pada tahun 2023 juga masih terfokus pada peningkatan kualitas

kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pangan (pertanian dan perikanan), infrastruktur, pariwisata, dan UMKM. Pada tahun 2023 arah pembangunan juga diarahkan pada penyelesaian beberapa proyek strategis daerah dalam menunjang pelayanan umum kepada masyarakat. Secara rinci arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 pada masing-masing misi dan bidang urusan pemerintahan disajikan pada Tabel 6.3.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 diarahkan untuk pemantapan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya memantapkan ekonomi masyarakat dilakukan dengan revitalisasi sektor pertanian dan pemantapan daya saing sektor pariwisata unggulan Daerah yang berpijak pada kearifan lokal. Peningkatan kualitas SDM diarahkan untuk menyediakan manusia yang berkualitas sebagai faktor produksi untuk pembangunan daerah terutama sektor pertanian dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Pada tahun 2024 ini juga kembali fokus pembangunan untuk penyelesaian beberapa proyek strategis daerah dalam menunjang pelayanan umum kepada masyarakat.

Selain agenda pembangunan tersebut di atas, pada tahun 2024 Pemerintah Daerah juga memiliki satu agenda penting tingkat nasional, yaitu Pemilu serentak. Dengan adanya agenda tersebut, sumber daya daerah tentunya sedikit banyak akan teralokasikan juga untuk mensukseskan agenda tersebut, terutama sumber daya anggaran yang tidak sedikit jumlahnya. Secara rinci arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 pada masing-masing misi dan bidang urusan pemerintahan disajikan pada Tabel 6.3.

4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Pada tahun 2025, pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat diarahkan pada upaya untuk pemantapan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi daerah dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh melalui peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dan pemantapan pembangunan pariwisata unggulan daerah yang berpijak pada kearifan lokal dengan mengintegrasikan pembangunan sektor industri kreatif, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan sektor Informasi dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa. Peningkatan sektor-sektor ekonomi daerah selain dilakukan dengan mengembangkan potensi unggulan daerah juga dilakukan dengan peningkatan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang memiliki karakteristik cepat tumbuh, yaitu sektor sekunder dan sektor tersier seperti sektor Industri Pengolahan.

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk menyediakan manusia berkualitas yang siap bekerja/terserap oleh pasar kerja dan bahkan turut berperan aktif dalam mengembangkan sektor pertanian, pariwisata, industri kreatif, penyedia akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, dan

jasa. Secara rinci arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 pada masing-masing misi dan bidang urusan pemerintahan disajikan pada Tabel 6.3.

5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun akhir dari periode RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026. Pada akhir tahun 2026, diharapkan semua agenda pembangunan jangka menengah daerah dalam rangka mencapai misi dan mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati telah terlaksana dengan kinerja yang baik. Oleh karena itu, pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2026 diarahkan pada upaya untuk peningkatan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Upaya peningkatan ekonomi daerah dilakukan dengan memantapkan pengembangan potensi unggulan daerah dan memantapkan peningkatan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang memiliki karakteristik cepat tumbuh, yaitu sektor sekunder dan sektor tersier seperti sektor Industri Pengolahan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, dan sektor Jasa-jasa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang siap bekerja/terserap oleh pasar kerja dan bahkan turut berperan aktif dalam mengembangkan sektor pertanian, pariwisata, industri kreatif, penyedia akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, dan jasa. Secara rinci arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 pada masing-masing misi dan bidang urusan pemerintahan disajikan pada Tabel 6.3. dan Tabel 6.4.

Tabel 6.3.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026
Menurut Misi dan Bidang Urusan Pemerintahan

VISI: “TERWUJUDNYA PESISIR BARAT YANG AMANAH, MAJU DAN SEJAHTERA”

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan	2022	2023	2024	2025	2026	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing								
Sasaran 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini yang Terjangkau dan Bermutu bagi Penduduk						Pendidikan; Perpustakaan; Kearsipan;
		2 Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Fasilitas Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas						Kesehatan;
		3 Peningkatan Pembinaan dan Akses Layanan Keluarga Berencana						Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sasaran 2: Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	1 Pemberdayaan dan Pengembangan Kompetensi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan						Kepemudaan dan Olahraga
		2 Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Kerja, serta Pelayanan Penempatan Kerja bagi Penduduk Usia Kerja						Tenaga Kerja
Sasaran 3: Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Pengarusutamaan Gender, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan serta Pemenuhan dan Perlindungan Anak	1 Penurunan Diskriminasi dan Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan	2022	2023	2024	2025	2026	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Misi II : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan								
Sasaran 1: Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Jaringan Jalan dan Sarana Perhubungan Daerah	1 Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Jalan						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2 Mengembangkan Moda Transportasi yang Aman, Murah, Terjangkau dan Berkualitas						Perhubungan
Sasaran 2: Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Peningkatan Ketersediaan, Kualitas, dan Kapasitas Prasarana dan Sarana Jaringan Air Minum, Air Limbah, Sanitasi, Persampahan serta Pengelolaan Bangunan dan Lingkungannya	Pembangunan Fasilitas Layanan Permukiman dan Perumahan yang Layak dan Berkualitas dengan Memperhatikan Penataan Ruang						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sasaran 3: Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Peningkatan Ketersediaan, Kualitas, dan Kapasitas Prasarana dan Sarana pada Sistem Jaringan Irigasi Daerah	Pengembangan Jaringan Irigasi Daerah dari Hulu hingga Hilir						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 4: Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Pengendalian Lingkungan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Udara, Air, Lahan	Perencanaan, Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Kualitas Udara, Air dan Lahan						Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Lingkungan Hidup; Pertanahan
Sasaran 5: Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah termasuk Pemadam Kebakaran	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penyelamatan Bencana yang Efektif, Efisien dan Tepat Guna termasuk Pemadam Kebakaran						Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan	2022	2023	2024	2025	2026	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Misi III : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan								
Sasaran 1: Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi Cepat Tumbuh	1 Peningkatan Produktivitas Industri Cepat Tumbuh						Perindustrian
		2 Peningkatan Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pendukung Perdagangan Barang dan Jasa						Perdagangan
		3 Peningkatan dan Pengembangan Iklim Investasi yang Kondusif, Stabil, dan Berdaya Saing						Penanaman Modal
Sasaran 2: Meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat	Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat yang Terintegrasi dengan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal						Perindustrian
Sasaran 3: Meningkatkan Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu, dan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan	1 Optimalisasi Pengelolaan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan						Pertanian
		2 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh dan Petani						Pertanian
		3 Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya						Kelautan dan Perikanan
		4 Optimalisasi Penyediaan, Penyaluran, dan Pengendalian Pangan di Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan Daerah						Pangan
Sasaran 4: Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Penguatan Peran Koperasi dan UMKM sebagai Pengungkit Pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Peningkatan Kapasitas, Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM						Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Sasaran 5: Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Mengurangi Beban Pengeluaran Penduduk Miskin dan Mempermudah Akses Mendapatkan Pelayanan	Penguatan dan Perluasan Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penanggulangan Kemiskinan						Sosial



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan	2022	2023	2024	2025	2026	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Misi IV : Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal								
Sasaran 1: Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pengembangan Destinasi Wisata, Aksesibilitas serta Atraksi dan Amenitas Pariwisata Daerah dengan Peningkatan Promosi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Peningkatan Pengelolaan Pariwisata yang Terintegrasi dengan Pengelolaan Kebudayaan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat						Pariwisata; Kebudayaan
Misi V : Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga								
Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Responsif, Murah, Mudah dan Cepat serta Berdaya Saing sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik serta Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik						Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kecamatan
Sasaran 2: Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Pemerintahan Daerah	1 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah dengan berpedoman pada Penggunaan Data dan Teknologi Informasi						Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan; Statistik; Inspektorat Daerah; Komunikasi dan Informatika;
		2 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Profesional dan Proposional						Kepegawaian; Pendidikan dan Pelatihan
		3 Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah serta Peningkatan Layanan kepada Kepala Daerah dan Anggota DPRD						Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD
		4 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum						Kesatuan Bangsa dan Politik



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan	2022	2023	2024	2025	2026	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
		5 Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik						Komunikasi dan Informatika
		6 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pimpinan dan Pemerintah Daerah						Persandian
Sasaran 3: Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Membangun Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan						Keuangan
Sasaran 4: Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Pembangunan Desa dan Masyarakatnya termasuk pada Kawasan Transmigrasi						Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Transmigrasi



Tabel 6.4.
Sasaran dan Target Capaian Sasaran Jangka Menengah Daerah menurut Urusan Pemerintahan
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

VISI : “TERWUJUDNYA PESISIR BARAT YANG AMANAH, MAJU DAN SEJAHTERA”

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintah
				2022	2023	2024	2025	2026		
Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	1) Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	1) Indeks Pembangunan Manusia (satuan Angka)	63.91	64.17	64.31	64.44	64.58	64.71	64.71	Pendidikan; Perpustakaan; Kearsipan; Kesehatan; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2) Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	1) Tingkat Pengangguran Terbuka (satuan Persen)	3.41	3.00	2.80	2.60	2.41	2.21	2.21	Kepemudaan dan Olahraga; Tenaga Kerja
	3) Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	1) Indeks Pembangunan Gender (satuan Angka)	93.21	93.82	94.29	94.76	95.24	95.71	95.71	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi II : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan	1) Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	1) Tingkat Kemantapan Jalan (satuan Persen)	39.03	41.00	41.50	42.00	42.50	43.00	43.00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perhubungan
	2) Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	1) Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Daya Air Yang Sehat Dan Aman (satuan Persen)	35.00	37.50	40.00	42.50	43.50	45.00	45.00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	3) Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	1) Rasio Jaringan Irigasi (satuan Persen)	50.94	52.00	53.00	55.00	57.50	60.00	60.00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4) Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan Angka)	68.50	73.54	73.87	74.20	74.53	74.86	74.86	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Lingkungan Hidup; Pertanahan
	5) Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	1) Indeks Resiko Bencana (satuan Angka)	181.41	180.94	180.71	180.47	180.24	180.00	180.00	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Misi	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintah
				2022	2023	2024	2025	2026		
Misi III : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	1) Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1) Pertumbuhan Ekonomi (satuan Persen)	-1.17	3.20-3.70	3.40-3.90	3.60-4.10	3.80-4.30	4.00-4.50	4.00-4.50	Perindustrian; Perdagangan; Penanaman Modal
	2) Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	1) PDRB Perkapita (satuan Juta Rupiah)	28.45	28.20-28.81	28.60-29.04	28.70-29.29	29.00-29.56	29.20-29.85	29,20-29.85	Perindustrian
	3) Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	1) Nilai Tukar Petani (satuan Angka)	94.73	97.25	98.51	99.77	101.04	102.30	102.30	Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Pangan
	4) Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	1) Indeks Gini (satuan Angka)	0.34	0.32	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	5) Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	1) Tingkat Kemiskinan Daerah (satuan Persen)	14.29	13.95	13.65	13.34	13.04	12.73	12.73	Sosial
Misi IV : Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal	1) Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	1) Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara (satuan Persen)	-75.03	20.00	21.00	22.00	23.00	25.00	25.00	Pariwisata; Kebudayaan
Misi V : Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga	1) Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (satuan Angka)	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	80.00	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Komunikasi dan Informatika; Kecamatan
	2) Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	1) Nilai SAKIP (satuan Huruf/Predikat)	CC	CC	CC	CC	B	B	B	Statistik; Persandian; Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan; Kepegawaian; Pendidikan dan Pelatihan; Inspektorat Daerah; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Kesatuan Bangsa dan Politik dan Program Penunjang Seluruh Perangkat Daerah
	3) Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	1) Opini BPK (satuan Huruf/Predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan
	4) Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon	1) Indeks Desa Membangun (satuan Angka)	0.6100	0.6600	0.6700	0.6800	0.6900	0.7000	0.7000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Transmigrasi

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Untuk mencapai 5 Misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2021-2026 terdapat 18 sasaran yang akan dicapai, dan 116 program perangkat daerah yang akan dilaksanakan. Secara rinci program pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel 6.5.

Tabel 6.5.
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

VISI : "TERWUJUDNYA PESIRIS BARAT YANG AMANAH, MAJU DAN SEJAHTERA"

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir
						Tahun	Status	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
Misi I				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing															
Tujuan 1				Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	2020	63.91	64.17		64.31		64.44		65.58		64.71		64.71	
Sasaran 1				Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	2020	63.91	64.17		64.31		64.44		64.58		64.71		64.71	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan (Persen)	2020	54.92	100%	58,480,930,500	100%	58,539,229,905	100%	59,124,622,204	100%	62,080,853,314	100%	65,184,895,980	100%	303,410,531,903	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (Lokasi)	2020	1	1	258,572,700	1	316,872,105	1	320,040,826	1	336,042,867	1	352,845,011	1	1,584,373,509	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen)	2020	20.00	20.00%	124,159,000	25.00%	182,458,405	25.00%	184,282,989	35.00%	193,497,138	50.00%	203,171,995	50.00%	887,569,528	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (Persen)	2020	51.50	100%	56,104,365,714	100%	56,162,665,119	100%	61,778,931,631	100%	64,867,878,212	100%	65,516,556,994	100%	304,430,397,671	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan (Persen)	2020	n/a	100%	4,787,716,000	100%	4,846,015,405	100%	4,918,705,636	100%	5,164,640,918	100%	5,216,287,327	100%	24,933,365,286	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut terhadap Perizinan Usaha (Persen)	2020	n/a	100%	290,196,600	100%	348,496,005	100%	351,980,965	100%	369,580,013	100%	388,059,014	100%	1,748,312,597	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (Persen)	2020	n/a	100%	1,580,738,397	100%	1,639,037,802	100%	1,802,941,582	100%	2,704,412,373	100%	2,839,632,992	100%	10,566,763,146	Dinas Kesehatan



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Tahun	Status	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	2020	1.06	1.01	55,225,400	0.98	113,524,805	0.95	113,638,330	0.95	170,457,495	0.92	178,980,369	0.92	631,826,399	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (Angka)	2020	2.26	2.21	4,275,846,000	2.19	4,334,145,405	2.17	4,338,479,550	2.13	4,555,403,528	2.10	4,600,957,563	2.10	22,104,832,046	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)	2020	53.57	56.50	239,584,000	58.00	297,883,405	61.00	298,181,288	62.50	447,271,933	64.00	451,744,652	64.00	1,734,665,278	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Tujuan 2			Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2020	3.41	3.00		2.80		2.60		2.41		2.21		2.21		
Sasaran 2			Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2020	3.41	3.00		2.80		2.60		2.41		2.21		2.21		
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Persen)	2020	n/a	50.00%	2,107,100,000	55.00%	2,165,399,405	55.00%	2,167,564,804	60.00%	2,275,943,045	60.00%	2,298,702,475	60.00%	11,014,709,729	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pemenuhan Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan (Persen)	2020	n/a	45.00%	1,932,187,622	45.00%	1,990,487,027	50.00%	1,992,477,514	60.00%	2,092,101,390	60.00%	2,196,706,459	60.00%	10,203,960,012	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2020	3.41	3.00	198,325,000	2.80	256,624,405	2.6	259,190,649	2.41	388,785,973	2.21	392,673,833	2.21	1,495,599,861	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	2020	70.54	72.71	163,000,000	73.04	221,299,405	73.88	221,520,704	74.71	332,281,057	75.54	335,603,867	75.54	1,273,705,033	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Persen)	2020	n/a	60.00%	146,873,080	65.00%	205,172,485	70.00%	205,377,657	75.00%	308,066,486	80.00%	323,469,810	80.00%	1,188,959,519	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Tujuan 3			Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Angka)	2020	93.21	93.82		94.29		94.76		95.24		95.71		95.71		
Sasaran 3			Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (Angka)	2020	93.21	93.82		94.29		94.76		95.24		95.71		95.71		



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Tahun	Status	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (Persen)	2020	100	100%	149,062,000	100%	207,361,405	100%	207,568,766	100%	311,353,150	100%	326,920,807	100%	1,202,266,128	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan (Persen)	2020	100	100%	65,752,000	100%	124,051,405	100%	124,175,456	100%	186,263,185	100%	195,576,344	100%	695,818,390	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	2020	25.00	30.00%	165,275,000	30.00%	223,574,405	35.00%	223,797,979	40.00%	335,696,969	50.00%	352,481,817	50.00%	1,300,826,171	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Terhadap Anak (Persen)	2020	16.67	16.67%	328,344,800	33.33%	386,644,205	33.33%	387,030,849	33.33%	580,546,274	50.00%	586,351,736	50.00%	2,268,917,864	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pendampingan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Persen)	2020	100	100%	134,946,400	100%	193,245,805	100%	193,439,051	100%	290,158,576	100%	293,060,162	100%	1,104,849,994	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Misi II			Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan																
Tujuan 1			Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	Indeks Kualitas Infrastruktur (Angka)	2020	53.46	55.00		55.00		60.00		60.00		65.00	-	65.00		
Sasaran 1			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	2020	39.03	41.00		41.50		42.00		42.50		43.00		43.00		
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	2020	39.03	41.00	8,121,640,901	41.50	8,179,940,306	42.00	12,269,910,459	42.50	18,404,865,688	43.00	20,061,303,600	43.00	67,037,660,955	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Tahun	Status	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan Desa Strategis dengan kondisi baik (Persen)	2020	22.00	22.40	1,433,650,500	25.00	1,491,949,905	30.00	1,641,144,895	35.00	2,133,488,364	40.00	3,200,232,546	40.00	9,900,466,211	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat (Persen)	2020	66.00%	70.00%	1,000,000,000	70.00%	1,058,299,405	72.50%	1,059,357,704	72.50%	1,589,036,557	75.00%	1,668,488,384	75.00%	6,375,182,050	Dinas Perhubungan
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Cakupan Wilayah yang terlayani Angkutan Laut (Persen)	2020	50.00%	50.00%	593,590,000	55.00%	651,889,405	60.00%	652,541,294	60.00%	978,811,942	65.00%	1,027,752,539	65.00%	3,904,585,179	Dinas Perhubungan
Sasaran 2			Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen)	2020	35.00	37.50		40.00		42.50		43.50		45.00		45.00		
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen)	2020	33.00	37.5	1,215,829,286	40.00	1,274,128,691	42.50	2,275,402,820	43.50	3,413,104,229	45.00	3,720,283,610	45.00	11,898,748,636	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen)	2020	65.30	65.30%	1,015,829,286	69.87%	1,074,128,691	74.76%	1,975,202,820	78.50%	2,962,804,229	80.00%	3,229,456,610	80.00%	10,257,421,636	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan (Persen)	2020	n/a	25.00%	2,084,377,970	30.00%	2,142,677,375	35.00%	2,544,820,052	40.00%	3,308,266,068	45.00%	3,606,010,014	45.00%	13,686,151,479	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni (Persen)	2020	85.97	86.00%	1,084,377,970	87.00%	1,142,677,375	88.00%	1,643,820,052	88.67%	2,136,966,068	90.00%	2,329,293,014	90.00%	8,337,134,479	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Permukiman Layak Huni (Persen)	2020	n/a	35.00%	1,000,000,000	38.75%	1,058,299,405	42.50%	1,164,129,345	46.25%	1,513,368,149	50.00%	1,649,571,282	50.00%	6,385,368,182	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Permukiman yang Tertata (Persen)	2020	n/a	35.00%	3,782,262,000	40.00%	3,840,561,405	50.00%	3,844,401,966	55.00%	4,997,722,556	60.00%	5,247,608,684	60.00%	21,712,556,612	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sasaran 3			Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Rasio Jaringan Irigasi (Persen)	2020	50.94	52.00		53.00		55.00		57.50		60.00		60.00		



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Tahun	Status	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah (Persen)	2020	27.00%	30.00%	6,783,878,113	35.00%	6,842,177,518	45.00%	7,184,286,394	45.00%	10,058,000,951	50.00%	14,400,760,762	50.00%	45,269,103,738	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 4			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	2020	68.50	73.54		73.87		74.20		74.53		74.86		74.86		
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana Sarana Umum (Persen)	2020	n/a	35.00%	1,107,340,440	40.00%	1,165,639,845	45.00%	1,177,296,243.4	50.00%	1,236,161,056	60.00%	1,297,969,108	60.00%	5,984,406,692	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap (Persen)	2020	51.00	55.00%	157,686,059,466	60.00%	146,671,401,896	70.00%	96,818,073,298	80.00%	64,362,953,003	90.00%	47,581,100,653	90.00%	513,119,588,315	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Persen)	2020	4.52	4.70	3,616,857,150	5.00	3,675,156,555	5.00	3,678,831,711	5.30	4,009,926,566	5.50	4,210,422,894	5.50	19,191,194,876	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan (Persen)	2020	n/a	20.00%	467,577,600	27.50%	473,407,540	35.00%	473,880,948	42.50%	516,530,233	50.00%	542,356,745	50.00%	2,473,753,067	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog (Persen)	2020	n/a	20.00%	308,658,000	20.00%	314,487,940	30.00%	314,802,428	35.00%	343,134,647	50.00%	360,291,379	50.00%	1,641,374,395	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan hidup (Persen)	2020	n/a	100%	434,946,000	100%	493,245,405	100%	493,738,650	100%	518,425,583	100%	544,346,862	100%	2,484,702,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	2020	68.50	73.54	253,104,400	73.87	311,403,805	74.20	311,715,209	74.53	467,572,813	74.86	490,951,454	74.86	1,834,747,681	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan (Persen)	2020	45.00	49.61	2,044,331,000	52.09	2,102,630,405	54.70	2,104,733,035	57.43	2,209,969,687	60.30	2,320,468,171	60.30	10,782,132,299	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah (Persen)	2020	4.52	4.70%	143,975,000	5.00%	202,274,405	5.00%	202,476,679	5.30%	303,715,019	5.50%	318,900,770	5.50%	1,171,341,873	Dinas Lingkungan Hidup



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Tahun	Status	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan Pengendalian terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Izin Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berbasis Lingkungan Hidup (PUU LH) (Persen)	2020	n/a	100%	66,715,000	100%	125,014,405	100%	125,139,419	100%	187,709,129	100%	197,094,585	100%	701,672,539	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat (Persen)	2020	n/a	30.00%	48,410,700	30.00%	106,710,105	35.00%	106,816,815	40.00%	160,225,223	40.00%	168,236,484	40.00%	590,399,326	Dinas Lingkungan Hidup
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reformasi Agraria (Kepala Keluarga)	2020	n/a	5.000	34,000,000	5.000	92,299,405	5.000	92,391,704	5.000	138,587,557	5.000	145,516,934	25.000	502,795,600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rasio Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Persen)	2020	9.43	10.00	5,400,000,000	10.50	5,458,299,405	11.00	5,463,757,704	11.20	8,195,636,557	11.50	8,605,418,384	11.50	33,123,112,050	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan Pemanfaatan Tanah Kosong (Persen)	2020	n/a	0.80	239,582,712	1.85	297,882,117	2.90	298,179,999	2.95	447,269,999	1.00	469,633,499	9.5	1,752,548,325	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sasaran 5			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (Angka)	2020	181.41	180.94		180.71		180.47		180.24		180.00		180.00		
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen)	2020	100%	100%	679,000,000	100%	737,299,405	100%	738,036,704	100%	1,107,055,057	100%	1,162,407,809	100%	4,423,798,975	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen)	2020	100%	100%	2,313,074,000	100%	2,371,373,405	100%	2,373,744,778	100%	2,587,381,808	100%	2,716,750,899	100%	12,362,324,890	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Tahun	Status	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (Persen)	2020	100	100%	1,108,645,400	100%	1,166,944,805	100%	1,168,111,750	100%	1,226,517,337	100%	1,287,843,204	100%	5,958,062,496	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Misi III			Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan																
Tujuan 1			Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus Pada Potensi Lokal	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	2020	-1.17	3,20 s/d 3,70		3,40 s/d 3,90		3,60 s/d 4,10		3,80 s/d 4,30		4,00 s/d 4,50		4,00 s/d 4,50		
Sasaran 1			Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	2020	-1.17	3,20 s/d 3,70		3,40 s/d 3,90		3,60 s/d 4,10		3,80 s/d 4,30		4,00 s/d 4,50		4,00 s/d 4,50		
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Persen)	2020	35.00	35.00	1,088,029,000	37.00	446,328,405	40.00	446,332,868	42.00	468,649,512	45.00	492,081,987	45.00	2,941,421,772	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (Persen)	2020	11.53	11.54	44,590,000	11.55	102,889,405	11.56	103,918,299	11.58	109,114,214	11.59	114,569,925	11.59	475,081,843	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok (Persen)	2020	n/a	30.00%	267,621,000	40.00%	325,920,405	50.00%	329,179,609	60.00%	345,638,589	70.00%	362,920,519	70.00%	1,631,280,122	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Ekspor Barang dan Jasa (juta rupiah)	2020	43.012	43.055	202,962,000	43.098	261,261,405	43.141	263,874,019	43.184	277,067,720	43.227	290,921,106	43.227	1,296,086,250	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) (Perusahaan/ Perorangan)	2020	729	730	282,700,000	730	340,999,405	750	344,409,399	750	516,614,098	750	542,444,803	3,710	2,027,167,706	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Perizinan (Persen)	2020	80.00	80.00%	612,905,200	80.00%	671,204,605	80.00%	677,916,651	80.00%	1,016,874,976	90.00%	1,067,718,725	90.00%	4,046,620,158	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Tahun	Status	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA (Persen)	2020	4.05	5.05	677,031,800	5.55	735,331,205	6.05	742,684,517	6.55	809,526,124	6.55	850,002,430	6.55	3,814,576,075	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN (Persen)	2020	14.99	15.99	570,661,000	16.49	628,960,405	16.99	635,250,009	17.49	952,875,013	17.49	1,000,518,764	17.49	3,788,265,192	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan (Laporan)	2020	5	5	262,496,000	5	320,795,405	5	324,003,359	5	340,203,527	5	357,213,703	25	1,604,711,994	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 2			Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita (juta)	2020	28.45	28,20 s/d 28,81		28,60 s/d 29,04		28,70 s/d 29,29		29,00 s/d 29,56		29,20 s/d 29,85		29,20 s/d 29,85		
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Persen)	2020	3.98	3.98	142,780,000	3.99	201,079,405	3.99	201,280,484	4.00	211,344,509	4.00	221,911,734	4.00	978,396,132	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran 3			Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	Nilai Tukar Petani (Angka)	2020	94.73	97.25		98.51		99.77		101.04		102.30		102.30		
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (Angka)	2020	94.73	97.25	2,276,269,400	98.51	2,334,568,805	99.77	2,336,903,374	101.04	2,453,748,542	102.30	2,576,435,970	102.30	11,977,926,091	Dinas Pertanian
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian (Ton)	2020	126.350	145.418	2,287,053,000	146.872	2,345,352,405	148.340	2,368,805,929	149.944	2,487,246,225	151.322	2,611,608,537	151.322	12,100,066,096	Dinas Pertanian
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani (Poktan)	2020	n/a	955	814,336,800	965	872,636,205	975	881,362,567	985	925,430,695	995	971,702,230	995	4,465,468,497	Dinas Pertanian
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Persen)	2020	80.00	82.00%	178,944,400	84.00%	237,243,805	86.00%	239,616,243	88.00%	251,597,055	90.00%	264,176,908	90.00%	1,171,578,411	Dinas Pertanian



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Tahun	Status	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (Persen)	2020	80.00	82.00%	338,011,400	84.00%	396,310,805	86.00%	400,273,913	88.00%	420,287,609	90.00%	441,301,989	90.00%	1,996,185,716	Dinas Pertanian
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	2020	27.752,48	28,000	861,638,100	28,000	919,937,505	28,000	929,136,880	28,000	975,593,724	28,000	1,024,373,410	28,000	4,710,679,619	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peresentase Daerah Rentan Rawan Pangan (Persen)	2020	7.00	7.00%	209,066,520	7.00%	267,365,925	4.50%	270,039,584	5.00%	283,541,563	5.00%	297,718,642	5.00%	1,327,732,234	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (Persen)	2020	n/a	60.00%	47,515,000	60.00%	105,814,405	60.00%	106,872,549	60.00%	112,216,176	60.00%	117,826,985	60.00%	490,245,116	Dinas Ketahanan Pangan
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2020	10.980	13.859	553,964,660	14.136	612,264,065	14.419	618,386,706	14.708	649,306,041	15.002	681,771,343	15.002	3,115,692,814	Dinas Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2020	18.370	18.646	533,800,250	18.925	592,099,655	19.209	598,020,651	19.497	627,921,684	19.790	659,317,768	19.790	3,011,160,009	Dinas Perikanan
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman (Angka)	2020	0.030	0.031	102,360,800	0.032	160,660,205	0.032	162,266,807	0.033	170,380,147	0.033	178,899,155	0.033	774,567,114	Dinas Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tukar Nelayan (Angka)	2020	103.7	102	411,842,450	103	470,141,855	104	474,843,273	104	498,585,437	105	523,514,709	105	2,378,927,725	Dinas Perikanan
Sasaran 4			Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini (Angka)	2020	0.34	0.32		0.32		0.31		0.30		0.29		0.29		
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif (Persen)	2020	49.00	50.00	34,320,000	50.00	92,619,405	52.50	93,545,599	52.50	98,222,879	55.00	103,134,023	55.00	421,841,906	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten (Persen)	2020	n/a	45.00%	469,134,000	45.00%	527,433,405	50.00%	532,707,739	55.00%	559,343,126	60.00%	587,310,282	60.00%	2,675,928,552	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Tahun	Status	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persen)	2020	1.71	1.89	340,656,000	1.98	398,955,405	2.08	402,944,959	2.18	423,092,207	2.29	444,246,817	2.29	2,009,895,388	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Sasaran 5			Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Tingkat Kemiskinan Daerah (Persen)	2020	14.29	13.95		13.65		13.34		13.04		12.73		12.73		
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Terdatanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Persen)	2020	100	100%	254,237,000	100%	312,536,405	100%	312,848,941	100%	328,491,388	100%	344,915,958	100%	1,553,029,693	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial (Persen)	2020	4.83	100%	3,339,765,800	100%	3,398,065,205	100%	3,401,463,270	100%	3,571,536,434	100%	3,750,113,255	100%	17,460,943,964	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Perlindungan Sosial Daerah (Persen)	2020	100	100%	395,891,500	100%	454,190,905	100%	454,645,096	100%	477,377,351	100%	501,246,218	100%	2,283,351,070	Dinas Sosial
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Pemenuhan pasca Bencana (Persen)	2020	100	100%	232,780,200	100%	291,079,605	100%	291,370,685	100%	305,939,219	100%	321,236,180	100%	1,442,405,888	Dinas Sosial
Misi IV			Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal																
Tujuan 1			Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (Persen)	2020	1.71	1.73		1.74		1.76		1.78		1.80		1.80		
Sasaran 1			Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara (persen)	2020	-75.03	20.00		21.00		22.00		23.00		25.00		25.00		
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen)	2020	2.38	2.58	861,009,000	2.78	919,308,405	2.98	928,501,489	3.18	1,392,752,233	3.38	1,462,389,845	3.38	5,563,960,973	Dinas Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan Wisatawan (Orang)	2020	50.730	286.376	738,714,930	394.735	797,014,335	494.527	804,984,478	615.189	1,207,476,717	780.748	1,267,850,553	780.748	4,816,041,014	Dinas Pariwisata
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata (Persen)	2020	10	10.00%	374,090,240	20.00%	432,389,645	30.00%	432,822,035	40.00%	649,233,052	50.00%	681,694,704	50.0%	2,570,229,676	Dinas Pariwisata

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Tahun	Status	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi (Persen)	2020	n/a	20.00	25,260,000	25.00	83,559,405	30.00	91,915,345	30.00	137,873,018	40.00	144,766,669	40.00	483,374,438	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas yang Terlibat Pertunjukan Seni (Persen)	2020	n/a	20.00%	287,798,000	20.00%	346,097,405	25.00%	346,443,502	25.00%	377,623,418	30.00%	396,504,588	30.00%	1,754,466,913	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi V			Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga																
Tujuan 1			Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (Huruf)	n/a	n/a	C		C		C		C		C		C		
Sasaran 1			Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (Angka)	2020	75.00	76.00		77.00		78.00		79.00		80.00		80.00		
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas (Persen)	2020	n/a	100%	276,729,000	100%	335,028,405	100%	335,363,433	100%	503,045,150	100%	528,197,408	100%	1,978,363,396	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Persen)	2020	n/a	100%	50,100,000	100%	108,399,405	100%	108,507,804	100%	113,933,195	100%	119,629,854	100%	500,570,258	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Persen)	2020	n/a	100%	34,505,000	100%	92,804,405	100%	92,897,209	100%	139,345,814	100%	146,313,105	100%	505,865,533	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 Tahun (Persen)	2020	n/a	100%	40,125,000	100%	98,424,405	100%	98,522,829	100%	147,784,244	100%	155,173,456	100%	540,029,935	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik (Persen)	2020	78.00	80.00%	2,756,616,900	80.00%	2,814,916,305	80.00%	2,817,731,221	85.00%	2,958,617,782	85.00%	3,106,548,671	85.00%	14,454,430,880	Dinas Komunikasi Dan Informatika



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Tahun	Status	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) (Persen)	2020	77.00	80.00%	142,280,900	80.00%	200,580,305	82.50%	200,780,885	82.50%	301,171,328	85.00%	316,229,894	85.00%	1,161,043,312	Dinas Komunikasi Dan Informatika
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persen)	2020	n/a	100%	341,223,400	100%	341,223,400	100%	341,223,400	100%	351,223,400	100%	351,223,400	100%	1,726,117,000	Kecamatan Bangkuntat; Krui Selatan; Lemong; Ngambur; Ngaras; Pulau Pisang; Pesisir Selatan; Pesisir Utara
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Persen)	2020	n/a	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000	100%	1,040,000,000	Kecamatan Pesisir Tengah
Sasaran 2			Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Nilai SAKIP (Huruf/Predikat)	2020	CC	CC		CC		CC		CC		B		B		
1	16	17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	2020	90.00%	90.00%	329,718,926,697	90.00%	330,728,954,192	92.50%	334,036,243,734	92.50%	357,418,780,795	95.00%	360,992,968,603	95.00%	1,712,895,874,020	Seluruh Perangkat Daerah
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik (Dokumen)	2020	2	2	101,904,800	2	102,006,705	2	112,207,375	2	168,311,063	2	176,726,616	10	661,156,559	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara baik (Persen)	2020	n/a	100%	50,877,600	100%	50,928,478	100%	56,021,325	100%	95,236,253	100%	142,854,380	100%	395,918,036	Dinas Komunikasi Dan Informatika
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran (Persen)	2020	87.43	100%	2,865,466,380	100%	2,868,331,846	100%	3,155,165,031	100%	3,439,129,884	100%	3,611,086,378	100%	15,939,179,519	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Pusat (Persen)	2020	80.00	80.00%	2,842,770,970	85.00%	2,845,613,741	90.00%	3,130,175,115	95.00%	3,411,890,875	100%	3,446,009,784	100%	15,676,460,486	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
							Tahun	Status	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi daerah (Angka)	2020	Sangat Inovatif		1,622,732,160	Sangat Inovatif	1,624,354,892	Sangat Inovatif	1,640,598,441	Sangat Inovatif	1,788,252,301	Sangat Inovatif	1,806,134,824	Sangat Inovatif	8,482,072,618	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Persen)	2020	n/a	70.00%	1,730,872,100	71.75%	1,732,602,972	73.54%	1,734,335,575	75.38%	1,821,052,354	77.27%	1,839,262,877	77.27%	8,858,125,878	Badan Kepegawaian Daerah
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pejabat ASN telah yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Persen)	2020	21.76	21.98%	2,642,888,400	22.20%	2,645,531,288	22.42%	2,648,176,820	22.64%	2,780,585,661	22.87%	2,808,391,517	22.87%	13,525,573,686	Badan Kepegawaian Daerah
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang- undangan (Persen)	2020	88.50	100%	1,412,981,100	100%	1,414,394,081	100%	1,428,538,022	100%	2,142,807,033	100%	2,249,947,385	100%	8,648,667,620	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Konsistensi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terhadap Kepatuhan Peraturan perundang-undangan (Persen)	2020	n/a	100%	627,360,000	100%	627,987,360	100%	690,786,096	100%	1,036,179,144	100%	1,087,988,101	100%	4,070,300,701	Inspektorat
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	2020	80.00	80.00%	13,918,993,560	80.00%	13,932,912,554	85.00%	15,326,203,809	90.00%	16,092,513,999	95.00%	16,897,139,699	95.00%	76,167,763,621	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan (Persen)	2020	80.00	80.00%	4,021,530,624	80.00%	4,025,552,155	85.00%	4,428,107,370	90.00%	4,826,637,033	95.00%	5,067,968,885	95.00%	22,369,796,067	Sekretariat Daerah
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusun dan Terintegrasinya Program- program kerja DPRD untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan perda, dan Fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (Persen)	2020	100	100%	11,602,751,020	100%	11,614,353,771	100%	13,821,080,987.51	100%	14,512,135,037	100%	15,237,741,789	100%	66,788,062,604	Sekretariat DPRD
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Persen)	2020	40.00	46.00%	131,722,230	48.00%	131,853,952	49.00%	131,985,806	51.00%	197,978,709	53.00%	207,877,645	53.00%	801,418,342	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Tahun	Status	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (Persen)	2020	84.08	84.08%	561,673,128	84.08%	562,234,801	84.92%	32,390,266,865	84.92%	590,346,541	85%	596,250,007	84.92%	34,700,771,342	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif (Persen)	2020	70.00	70.00%	1,271,861,140	73.00%	1,273,133,001	75.00%	1,274,406,134	75.00%	1,338,126,441	77.50%	1,405,032,763	77.50%	6,562,559,479	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Persen)	2020	60.00	65.00%	142,002,800	65.00%	142,144,803	67.50%	142,286,948	67.50%	213,430,421	70.00%	224,101,942	70.00%	863,966,914	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Koordinasi dan Peran Lembaga dan Elemen Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Konflik Sosial (Persen)	2020	70.00	70.00%	204,554,750	70.00%	204,759,305	75.00%	204,964,064	75.00%	307,446,096	80.00%	322,818,401	80.00%	1,244,542,616	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sasaran 3			Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	Opini BPK (Huruf/Predikat)	2020	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Tata Kelola Keuangan Daerah sesuai Aturan (Persen)	2020	100	100%	15,122,057,382	100%	15,137,179,439	100%	15,288,551,234	100%	16,664,520,845	100%	16,831,166,053	100%	79,043,474,953	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Tata Kelola Barang Milik Daerah sesuai Aturan (Persen)	2020	100	100%	2,348,137,800	100%	2,350,485,938	100%	2,373,990,797	100%	2,587,649,969	100%	2,613,526,469	100%	12,273,790,973	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	2020	2.65	3.18%	3,066,551,080	3.50%	3,069,617,631	4.20%	3,100,313,807	4.62%	3,379,342,050	5.08%	3,548,309,153	5.08%	16,164,133,721	Badan Pendapatan Daerah
Sasaran 4			Meningkatnya pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun (Angka)	2020	0.6100	0.6600		0.6700		0.6800		0.6900		0.7000		0.7000		
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Berkembang (Pekon)	2020	53	55	1,300,000,000	60	1,301,300,000	60	1,302,601,300	65	1,419,835,417	70	1,490,827,188	70	6,814,563,905	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon



Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Tahun	Status	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pekon Tertib Administrasi (Pekon)	2020	n/a	90	167,234,283,280	95	167,401,517,563	100	169,075,532,739	110	177,529,309,376	116	179,304,602,470	116	860,545,245,428	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Pekon)	2020	n/a	90	2,792,330,270	95	2,795,122,600	100	2,823,073,826	110	2,964,227,518	116	2,993,869,793	116	14,368,624,007	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi (Angka)	2020	n/a	42.03	90,501,500	42.03	90,592,002	42.53	99,651,202	42.53	108,619,810	44.00	114,050,800	44.00	503,415,313	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibina (Lokasi)	2020	1	1	265,526,250	1	265,791,776	1	292,370,954	1	306,989,502	1	310,059,397	1	1,440,737,878	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi



Program pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah yang dirumuskan pada tabel 6.5 merupakan penjabaran teknis dari perumusan arah kebijakan dan strategi dari masing-masing misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Program yang ditetapkan telah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Lebih lanjut, program-program pembangunan pada tabel 6.5 juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 yang secara umum memberikan rekomendasi serta strategi dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Analisis hasil rekomendasi KLHS disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 6.6. Analisis Hasil KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Tujuan PB	Rekomendasi KLHS	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Pembangunan
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	1. Mengurangi beban pengeluaran kebutuhan masyarakat miskin melalui bantuan/santunan sembako dan uang tunai yang bersifat langsung; 2. Memberikan pelatihan kerja dan modal kerja usaha baru bagi masyarakat miskin; 3. Bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi harus dikururkan untuk membantu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat;	Peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk pertanian (pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan) melalui penerapan teknologi pertanian tepat guna, padat karya, dan mutakhir; Penguatan daya saing destinasi wisata daerah pada tingkat regional, nasional, dan internasional yang terintegrasi dengan upaya pelestarian dan pengembangan seni, budaya, dan kreatifitas masyarakat;	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	Meningkatkan perlindungan/jaminan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial yang lebih tepat sasaran dengan kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan.	Strategi : Menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) wajib mengintegrasikan kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Arah Kebijakan : Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	1. Meningkatkan perlindungan/jaminan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial yang lebih tepat sasaran dengan kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan; 2. Mengurangi beban pengeluaran kebutuhan masyarakat miskin melalui bantuan/santunan sembako dan uang tunai yang bersifat langsung;	Strategi : Menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) wajib mengintegrasikan kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

	3. Memberikan pelatihan kerja dan modal kerja usaha baru bagi masyarakat miskin;	Arah Kebijakan : Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	1. Meningkatkan perlindungan/jaminan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial yang lebih tepat sasaran dengan kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan; 2. Mengurangi beban pengeluaran kebutuhan masyarakat miskin melalui bantuan/santunan sembako dan uang tunai yang bersifat langsung; 3. Memberikan pelatihan kerja dan modal kerja usaha baru bagi masyarakat miskin; 4. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatan dan memberikan lapangan kerja lebih luas kepada masyarakat, khususnya keluarga miskin; 5. Bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi harus dikururkan untuk membantu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat.	Strategi : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan daerah Arah Kebijakan : Penerapan SPM Bidang Sosial di 514 Kab/Kota dan 34 Provinsi	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	1. Meningkatkan perlindungan/jaminan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial yang lebih tepat sasaran dengan kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan; 2. Mengurangi beban pengeluaran kebutuhan masyarakat miskin melalui bantuan/santunan sembako dan uang tunai yang bersifat langsung; 3. Memberikan pelatihan kerja dan modal kerja usaha baru bagi masyarakat miskin; 4. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatan dan memberikan lapangan kerja lebih luas kepada masyarakat, khususnya keluarga miskin;	Strategi : Dukungan perencanaan daerah dalam melaksanakan major project integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh. Arah Kebijakan : Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

	5. Bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi harus dikucurkan untuk membantu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat.		
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	1. Melakukan penambahan anggaran untuk pembangunan jalan lingkungan, drainase lingkungan, MCK Komunal, sumur bor komunal, SPAM Perdesaan, penyediaan lahan untuk pembangunan tempat pengolahan sampah 3R (TPS 3R); 2. Memberikan bantuan rumah swadaya, peningkatan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 3. Penambahan anggaran penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat; 4. Menyediakan IPAL komunal di masing-masing kecamatan;	Strategi : 1. Pembangunan Sambungan Rumah (SR) melalui pemanfaatan kapasitas SPAM terbangun (<i>idle capacity</i>); 2. Peningkatan dan pembangunan SPAM; 3. Integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokumen perencanaan daerah; 4. Pemetaan kawasan yang tidak terlayani akses air minum layak; 5. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus; Arah Kebijakan : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	1. Menuntaskan wajib belajar 9 tahun; 2. Memperluas pendidikan non formal; 3. Meningkatkan akses pendidikan yang merata; 4. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendidikan dasar; 5. Meningkatkan APK anak didik PAUD; 6. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana PAUD; 7. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik PAUD; 8. Meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga pendidik; 9. Meningkatkan persentase tenaga pendidik bersertifikat; 10. Meningkatkan gerakan membuka seluas-luasnya paket A, paket B, dan Paket C.	Strategi : 1. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diluar belanja pegawai dan DAK; 2. Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku; Arah Kebijakan : Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui: 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun;	Program Pengelolaan Pendidikan

Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	1. Menuntaskan wajib belajar 9 tahun; 2. Memperluas pendidikan non formal; 3. Meningkatkan akses pendidikan yang merata; 4. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendidikan dasar; 5. Meningkatkan APK anak didik PAUD; 6. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana PAUD; 7. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik PAUD; 8. Meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga pendidik; 9. Meningkatkan persentase tenaga pendidik bersertifikat; 10. Meningkatkan gerakan membuka seluas-luasnya paket A, paket B, dan Paket C.	Strategi : 1. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diluar belanja pegawai dan DAK; 2. Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku; Arah Kebijakan : Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui: 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun;	Program Pengelolaan Pendidikan
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	1. Peningkatan keandalan prasarana, sarana dan utilitas pendukung penanggulangan bencana dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir, tepat guna, dan tepat sasaran. 2. Peningkatan penganggaran penanggulangan bencana; 3. Penyusunan dokumen Masterplan strategi penanggulangan bencana; 4. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas penanggulangan bencana untuk Tim SAR dan TRC; 5. Penyediaan prasarana dan sarana utilitas penyelamatan dini; 6. Penganggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; 7. Penyediaan rambu-rambu peringatan di kawasan daerah rawan bencana;	Strategi : Jenis Pelayanan Dasar SPM sub urusan bencana meliputi: 1. Layanan informasi rawan bencana, melalui penyusunan kajian resiko bencana, komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana; 2. Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontijensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi; 3. Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, melalui respon cepat kejadian KLB penyakit/wabah, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian evakuasi dan pertolongan korban bencana. Arah Kebijakan : Percepatan Pemenuhan SPM bidang trantibumlinmas di Daerah meliputi: 1. Sub urusan trantibum 2. Sub urusan bencana. 3. Sub urusan pemadam kebakaran.	Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Penanganan Bencana

Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	1. Peningkatan keandalan prasarana, sarana dan utilitas pendukung penanggulangan bencana dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir, tepat guna, dan tepat sasaran. 2. Peningkatan penganggaran penanggulangan bencana; 3. Penyusunan dokumen Masterplan strategi penanggulangan bencana; 4. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas penanggulangan bencana untuk Tim SAR dan TRC; 5. Penyediaan prasarana dan sarana utilitas penyelamatan dini; 6. Penganggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; 7. Penyediaan rambu-rambu peringatan di kawasan daerah rawan bencana;	Strategi : Jenis Pelayanan Dasar SPM sub urusan bencana meliputi: 1. Layanan informasi rawan bencana, melalui penyusunan kajian resiko bencana, komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana; 2. Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontijensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi; 3. Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, melalui respon cepat kejadian KLB penyakit/wabah, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian evakuasi dan pertolongan korban bencana. Arah Kebijakan : Percepatan Pemenuhan SPM bidang trantibumlinmas di Daerah meliputi: 1. Sub urusan trantibum 2. Sub urusan bencana. 3. Sub urusan pemadam kebakaran.	Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Penanganan Bencana
Tujuan 1: Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan	1. Peningkatan keandalan prasarana, sarana dan utilitas pendukung penanggulangan bencana dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir, tepat guna, dan tepat sasaran. 2. Peningkatan penganggaran penanggulangan bencana; 3. Penyusunan dokumen Masterplan strategi penanggulangan bencana; 4. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas penanggulangan bencana untuk Tim SAR dan TRC; 5. Penyediaan prasarana dan sarana utilitas penyelamatan dini; 6. Penganggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; 7. Penyediaan rambu-rambu peringatan di kawasan daerah rawan bencana;	Strategi : Jenis Pelayanan Dasar SPM sub urusan bencana meliputi: 1. Layanan informasi rawan bencana, melalui penyusunan kajian resiko bencana, komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana; 2. Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontijensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi; 3. Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, melalui respon cepat kejadian KLB penyakit/wabah, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian evakuasi dan pertolongan korban bencana.	Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Penanganan Bencana

		Arah Kebijakan : Percepatan Pemenuhan SPM bidang trantibumlinmas di Daerah meliputi: 1. Sub urusan trantibum 2. Sub urusan bencana. 3. Sub urusan pemadam kebakaran.	
Tujuan 2: Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan	1. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan kualitas pangan; 2. Menurunkan ketergantungan terhadap pangan pokok beras; 3. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan pengendalian keamanan pangan;	Strategi : 1. Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per Tahun. 2. Penyusunan data cadangan pangan Provinsi dan Kab/Kota. 3. Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan. 4. Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah-daerah yang menjadi lokasi sasaran program. Arah kebijakan : 1. Memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri. 2. Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan
Tujuan 2: Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan	1. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan kualitas pangan; 2. Menurunkan ketergantungan terhadap pangan pokok beras; 3. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan pengendalian keamanan pangan;	Strategi : Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui percepatan penurunan stunting, meliputi: 1. Memastikan perencanaan dan penganggaran khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi. 2. Melaksanakan 8 aksi konvergensi program penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan peran seluruh OPD terkait dan multisektor. 3. Memperbaiki pengelolaan layanan dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang tersedia. 4. Mengoordinir kecamatan dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

		Arah kebijakan : 1. Percepatan perbaikan gizi masyarakat; 2. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.	
Tujuan 2: Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan	1. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan kualitas pangan; 2. Menurunkan ketergantungan terhadap pangan pokok beras; 3. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan pengendalian keamanan pangan;	Strategi : Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui percepatan penurunan stunting, meliputi: 1. Memastikan perencanaan dan penganggaran khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi. 2. Melaksanakan 8 aksi konvergensi program penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan peran seluruh OPD terkait dan multisektor. 3. Memperbaiki pengelolaan layanan dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang tersedia. 4. Mengoordinir kecamatan dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data. Arah kebijakan : 1. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 2. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Tujuan 2: Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan	1. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan kualitas pangan; 2. Menurunkan ketergantungan terhadap pangan pokok beras; 3. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan pengendalian keamanan pangan;	Strategi : Program urusan Kesehatan : 1. PMT pemulihan untuk Bumil KEK; 2. Pemberian IFA/Tablet tambah Darah bagi Ibu Hamil; 3. Kelas Ibu Hamil; 4. Pelayanan antenatal Arah kebijakan : Percepatan perbaikan gizi masyarakat. Penerapan SPM kesehatan Daerah Kabupaten/Kota: 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil; 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

		4. Pelayanan kesehatan balita; 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Tujuan 2: Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan	1. Pengembangan lumbung pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah; 2. Pembatasan alih fungsi lahan sawah; 3. Peningkatan penganggaran program cetak sawah; 4. Pengembangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menanam tanaman ubi kayu dan ubi jalar; 5. Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produk pertanian; 6. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air untuk pengembangan pertanian berkelanjutan; 7. Penyediaan data spasial LP2B.	Strategi : Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui percepatan penurunan stunting, meliputi: 1. Memastikan perencanaan dan penganggaran khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi. 2. Melaksanakan 8 aksi konvergensi program penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan peran seluruh OPD terkait dan multisektor. 3. Memperbaiki pengelolaan layanan dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang tersedia. 4. Mengoordinir kecamatan dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data. Arah kebijakan : 1. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 2. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Tujuan 2: Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan	1. Pengembangan lumbung pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah; 2. Pembatasan alih fungsi lahan sawah; 3. Peningkatan penganggaran program cetak sawah; 4. Pengembangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menanam tanaman ubi kayu dan ubi jalar; 5. Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produk pertanian; 6. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air untuk pengembangan pertanian berkelanjutan; 7. Penyediaan data spasial LP2B.	Strategi : Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui percepatan penurunan stunting, meliputi: 1. Memastikan perencanaan dan penganggaran khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi. 2. Melaksanakan 8 aksi konvergensi program penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan peran seluruh OPD terkait dan multisektor. 3. Memperbaiki pengelolaan layanan dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang tersedia. 4. Mengoordinir kecamatan dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data. Arah kebijakan : 1. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 2. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Tujuan 2: Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan	1. Pengembangan lumbung pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah; 2. Pembatasan alih fungsi lahan sawah; 3. Peningkatan penganggaran program cetak sawah; 4. Pengembangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menanam tanaman ubi kayu dan ubi jalar; 5. Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produk pertanian; 6. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air untuk pengembangan pertanian berkelanjutan; 7. Penyediaan data spasial LP2B.	Strategi : Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui percepatan penurunan stunting, meliputi: 1. Memastikan perencanaan dan penganggaran khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi. 2. Melaksanakan 8 aksi konvergensi program penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan peran seluruh OPD terkait dan multisektor. 3. Memperbaiki pengelolaan layanan dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang tersedia. 4. Mengoordinir kecamatan dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

		Arah kebijakan : 1. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 2. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	1. Menyelenggarakan program-program untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan; Mengembangkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan; 2. Penguatan database peserta penerima bantuan iuran melalui jaminan kesehatan/kartu indonesia sehat; 3. Penganggaran untuk peserta penerima bantuan iuran melalui jaminan kesehatan/kartu indonesia sehat; 4. Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan;	Strategi : 1. Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait; 2. Memperhatikan indicator dan target pada sasaran RPJMN Arah Kebijakan : Peningkatan Kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	1. Menyelenggarakan program-program untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan; Mengembangkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan; 2. Penguatan database peserta penerima bantuan iuran melalui jaminan kesehatan/kartu indonesia sehat; 3. Penganggaran untuk peserta penerima bantuan iuran melalui jaminan kesehatan/kartu indonesia sehat; 4. Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan;	Strategi : 1. Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait; 2. Memperhatikan indicator dan target pada sasaran RPJMN Arah Kebijakan : Peningkatan Kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	1. Menyelenggarakan program-program untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan; Mengembangkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan; 2. Penguatan database peserta penerima bantuan iuran melalui jaminan kesehatan/kartu indonesia sehat; 3. Penganggaran untuk peserta penerima bantuan iuran melalui jaminan kesehatan/kartu indonesia sehat; 4. Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan;	Strategi : Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Arah Kebijakan : Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. (Kab/Kota; Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB, pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB, dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB)	Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	1. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; 2. Menambahkan anggaran pembelian obat; 3. Menyelenggarakan program-program untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan.	Strategi : 1. Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait; 2. Memperhatikan indicator dan target pada sasaran RPJMN Arah Kebijakan : Peningkatan Pengendalian Penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	1. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; 2. Menambahkan anggaran pembelian obat; 3. Menyelenggarakan program-program untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan.	Strategi : 1. Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait; 2. Memperhatikan indicator dan target pada sasaran RPJMN Arah Kebijakan : Peningkatan Pengendalian Penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	1. Meningkatkan kualitas, kuantitas, perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial; 2. Penyelenggaraan fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial.	Strategi : 1. Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait; 2. Memperhatikan indicator dan target pada sasaran RPJMN Arah Kebijakan : Peningkatan pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	1. Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas; 2. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga; 3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan	Strategi : Angka prevalensi kontrasepsi modern/ ModernContraceptive Prevelance Rate(MCPR) Arah Kebijakan : Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.	Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

		(Kab/Kota; Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB, pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB, dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB)	
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk Dalam Segala Usia	Menjamin tersedianya tenaga kesehatan sesuai standar nasional	Strategi : 1. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan serta pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2. Memperhatikan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia kesehatan. Arah kebijakan : Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Bagi Semua	1. Menuntaskan wajib belajar 9 tahun; 2. Memperluas pendidikan non formal; 3. Meningkatkan akses pendidikan yang merata; 4. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendidikan dasar; 5. Meningkatkan APK anak didik PAUD; 6. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana PAUD; 7. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik PAUD; 8. Meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga pendidik; 9. Meningkatkan persentase tenaga pendidik bersertifikat; 10. Meningkatkan gerakan membuka seluas-luasnya paket A, paket B, dan Paket C.	Strategi : 1. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diluar belanja pegawai dan DAK; 2. Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku; Arah Kebijakan : Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui: 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun;	Program Pengelolaan Pendidikan

Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Bagi Semua	1. Menuntaskan wajib belajar 9 tahun; 2. Memperluas pendidikan non formal; 3. Meningkatkan akses pendidikan yang merata; 4. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendidikan dasar; 5. Meningkatkan APK anak didik PAUD; 6. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana PAUD; 7. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik PAUD; 8. Meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga pendidik; 9. Meningkatkan persentase tenaga pendidik bersertifikat; 10. Meningkatkan gerakan membuka seluas-luasnya paket A, paket B, dan Paket C.	Strategi : 1. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diluar belanja pegawai dan DAK; 2. Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku; Arah Kebijakan : Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui: 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun;	Program Pengelolaan Pendidikan
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Bagi Semua	1. Menuntaskan wajib belajar 9 tahun; 2. Memperluas pendidikan non formal; 3. Meningkatkan akses pendidikan yang merata; 4. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendidikan dasar; 5. Meningkatkan APK anak didik PAUD; 6. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana PAUD; 7. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik PAUD; 8. Meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga pendidik; 9. Meningkatkan persentase tenaga pendidik bersertifikat; 10. Meningkatkan gerakan membuka seluas-luasnya paket A, paket B, dan Paket C.	Strategi : 1. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diluar belanja pegawai dan DAK; 2. Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku; Arah Kebijakan : Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui: 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun;	Program Pengelolaan Pendidikan

Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Bagi Semua	1. Menuntaskan wajib belajar 9 tahun; 2. Memperluas pendidikan non formal; 3. Meningkatkan akses pendidikan yang merata; 4. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendidikan dasar; 5. Meningkatkan APK anak didik PAUD; 6. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana PAUD; 7. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik PAUD; 8. Meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga pendidik; 9. Meningkatkan persentase tenaga pendidik bersertifikat; 10. Meningkatkan gerakan membuka seluas-luasnya paket A, paket B, dan Paket C.	Strategi : 1. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diluar belanja pegawai dan DAK; 2. Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku; Arah Kebijakan : Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui: 1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun;	Program Pengelolaan Pendidikan
Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan	1. Pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender (PUG); 2. Pembuatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak; 3. Meningkatkan perlindungan pada anak dan perempuan melalui pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, diskriminasi serta perdagangan manusia; 4. Mengoptimalkan pengarusutamaan gender pada penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran; 5. Meningkatkan upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan.	Strategi : 1. Pelaksanaan SPHPN oleh KPPPA tahun 2021 dan 2024; 2. Data Rikesdas Tahun 2020 (KPPPA, data Riskesdas, Susenas BPS); 3. Data Simfoni-PPA; 4. Profil Perempuan Indonesia (KPPPA, data Sakernas BPS). Arah kebijakan : 1. Perlindungan Perempuan; 2. Perlindungan Khusus Anak; 3. Kualitas Hidup Perempuan.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak

Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	1. Memperbanyak kerjasama internasional dan dukungan pengembangan program terkait air; 2. Pembangunan dan peningkatan sarana air bersih; 3. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, aman, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan; 4. Penambahan anggaran penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat; 5. Menyediakan IPAL komunal di masing-masing kecamatan; 6. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, aman, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan.	Strategi : 1. Pembangunan Sambungan Rumah (SR) melalui pemanfaatan kapasitas SPAM terbangun (idle capacity); 2. Peningkatan dan pembangunan SPAM; 3. Pembangunan SPAM Regional; 4. Peningkatan Kinerja UPTD dan KPSPAMS; 5. Integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokumen perencanaan daerah; 6. Penyusunan dokumen Jakstrada, RISPAM dan Business Plan PDAM; 7. Peningkatan melalui alokasi APBD yang memadai minimal 1% (satu persen) untuk pembangunan fisik SPAM dan SR; 8. Perkuatan peran dan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang; 9. Peningkatan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi yang didukung dengan sistem data dan informasi; 10. Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan; 11. Identifikasi dan penyiapan KPBU; 12. Pemetaan kawasan yang tidak terlayani akses air minum layak; 13. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus; 14. Penyusunan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM dan pengelola SPAM lainnya; 15. Pengawasan kualitas air minum (kab/kota); 16. Pengembangan Zona Air Minum Prima/ Layanan Potable Water.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

		17. Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait. 18. Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN; 19. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengawasan kualitas air minum dan pembinaan STBM Arah kebijakan : Peningkatan kualitas air minum dan sanitasi layak dan aman melalui Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	1. Memperbanyak kerjasama internasional dan dukungan pengembangan program terkait air; 2. Pembangunan dan peningkatan sarana air bersih; 3. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, aman, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan; 4. Penambahan anggaran penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat; 5. Menyediakan IPAL komunal di masing-masing kecamatan; 6. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, aman, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan.	Strategi : 1. Pembangunan Sambungan Rumah (SR) melalui pemanfaatan kapasitas SPAM terbangun (idle capacity); 2. Peningkatan dan pembangunan SPAM; 3. Pembangunan SPAM Regional; 4. Peningkatan Kinerja UPTD dan KPSPAMS; 5. Integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokumen perencanaan daerah; 6. Penyusunan dokumen Jakstrada, RISPAM dan Business Plan PDAM; 7. Peningkatan melalui alokasi APBD yang memadai minimal 1% (satu persen) untuk pembangunan fisik SPAM dan SR; 8. Perkuatan peran dan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang; 9. Peningkatan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi yang didukung dengan sistem data dan informasi; 10. Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan; 11. Identifikasi dan penyiapan KPBU;	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

		12. Pemetaan kawasan yang tidak terlayani akses air minum layak; 13. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerahdi lokasi khusus; 14. Penyusunan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM dan pengelola SPAM lainnya; 15. Pengawasan kualitas air minum (kab/kota); 16. Pengembangan Zona Air Minum Prima/ Layanan Potable Water; 17. Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkanolehK/L terkait; 18. Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN; 19. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengawasan kualitas air minum dan pembinaan STBM Arah kebijakan : Peningkatan kualita sair minum dan sanitasi layak dan aman melalui Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)serta Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	1. Memberikan bantuan rumah swadaya peningkatan rumah tidak layak huni bagi mayarakat berpenghasilan rendah; 2. Penambahan anggaran penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat; 3. Menyediakan IPAL komunal di masing-masing kecamatan;	Strategi : 1. Pembangunan Sambungan Rumah (SR) melalui pemanfaatan kapasitas SPAM terbangun (idle capacity); 2. Peningkatan dan pembangunan SPAM; 3. Pembangunan SPAM Regional; 4. Peningkatan Kinerja UPTD dan KPSPAMS; 5. Integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokumen perencanaan daerah; 6. Penyusunan dokumen Jakstrada, RISPAM dan Business Plan PDAM;	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

	4. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, aman, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan; 5. Memperbanyak kerjasama internasional dan dukungan pengembangan program terkait air bersih; 6. Pembangunan dan peningkatan sarana air bersih;	7. Peningkatan melalui alokasi APBD yang memadai minimal 1% (satu persen) untuk pembangunan fisik SPAM dan SR; 8. Perkuatan peran dan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang; 9. Peningkatan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi yang didukung dengan sistem data dan informasi; 10. Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan; 11. Identifikasi dan penyiapan KPBU; 12. Pemetaan kawasan yang tidak terlayani akses air minum layak; 13. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus; 14. Penyusunan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM dan pengelola SPAM lainnya; 15. Pengawasan kualitas air minum (kab/kota); 16. Pengembangan Zona Air Minum Prima/ Layanan Potable Water; 17. Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait; 18. Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN; 19. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengawasan kualitas air minum dan pembinaan STBM	

		Arah kebijakan : Peningkatan kualitas air minum dan sanitasi layak dan aman melalui Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	1. Memberikan bantuan rumah swadaya peningkatan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 2. Penambahan anggaran penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat; 3. Menyediakan IPAL Komunal di masing-masing kecamatan; 4. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, aman, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan; 5. Memperbanyak kerjasama internasional dan dukungan pengembangan program terkait air bersih; 6. Pembangunan dan peningkatan sarana air bersih;	Strategi : 1. Pembangunan Sambungan Rumah (SR) melalui pemanfaatan kapasitas SPAM terbangun (idle capacity); 2. Peningkatan dan pembangunan SPAM; 3. Pembangunan SPAM Regional; 4. Peningkatan Kinerja UPTD dan KPSPAMS; 5. Integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokumen perencanaan daerah; 6. Penyusunan dokumen Jakstrada, RISPAM dan Business Plan PDAM; 7. Peningkatan melalui alokasi APBD yang memadai minimal 1% (satu persen) untuk pembangunan fisik SPAM dan SR; 8. Perkuatan peran dan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang; 9. Peningkatan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi yang didukung dengan sistem data dan informasi; 10. Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan; 11. Identifikasi dan penyiapan KPBU; 12. Pemetaan kawasan yang tidak terlayani akses air minum layak; 13. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus;	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman

		14. Penyusunan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM dan pengelola SPAM lainnya; 15. Pengawasan kualitas air minum (kab/kota); 16. Pengembangan Zona Air Minum Prima/ Layanan Potable Water. 17. Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait. 18. Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN 19. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengawasan kualitas air minum dan pembinaan STBM Arah kebijakan : Peningkatan kualitas air minum dan sanitasi layak dan aman melalui Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	1. Penambahan anggaran untuk pemeliharaan, pengembangan, dan rehabilitasi daerah irigasi dan jaringannya; 2. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air untuk pengembangan pertanian berkelanjutan; 3. Melakukan pengendalian pencemaran air sungai; 4. Penambahan anggaran untuk pembangunan embung; 5. Pemantauan kualitas air serta penghitungan Indeks Kualitas Air.	Strategi : 1. Penghijauan pada lahan kritis di luar kawasan hutan/daerah imbuhan mata air (kawasan lindung); 2. Rencana Pengelolaan DAS; 3. Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung DAS; 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS; 5. Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan; 6. Penerapan teknik konservasi tanah dan air; 7. Pengembangan hutan rakyat, hutan kota dan penghijauan lingkungan; 8. Pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan. Arah Kebijakan : Pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua	1. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; 2. Meningkatkan pengembangan wirausaha baru dan berdaya saing; 3. Menyelenggarakan kemitraan di dunia usaha dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.	Strategi : 1. Usaha mikro, kecil menengah naik kelas dan Modernisasi Koperasi; 2. Peningkatan ekspor dan penguatan substitusi impor serta UKM masuk Global Value Chain (GVC). Arah kebijakan : Akselerasi Pembiayaan dan Investasi.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi	1. Meningkatkan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah; 2. Meningkatkan pengembangan teknologi industri khususnya teknologi hasil pertanian/perkebunan; 3. Peningkatan penataan sistem distribusi daerah yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian berusaha, dan perlindungan konsumen.	Arah kebijakan : 1. Peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah produk pertanian (pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan) melalui penerapan teknologi pertanian tepat guna, padat karya, dan mutakhir. 2. Penguatan daya saing destinasi wisata daerah pada tingkat regional, nasional, dan internasional yang terintegrasi dengan upaya pelestarian dan pengembangan seni, budaya, dan kreatifitas masyarakat. 3. Peningkatan dan penguatan daya saing industri daerah pada level nasional dan internasional.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata

			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi	1. Melakukan inventarisasi data; 2. Meningkatkan jaringan internet di setiap Kecamatan; 3. Bekerjasama dengan pihak swasta untuk peningkatan aksesibilitas internet.	Strategi : 1. Dalam mendukung prioritas nasional kelima yaitu stabilitas keamanan nasional guna meningkatkan akses dan kualitas informasi publik, perlu adanya upaya penatakelolaan bidang komunikasi publik, penyediaan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, maritim, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pengelolaan informasi publik melalui media Pemerintah; 2. Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional tersebut, arah dan kebijakan pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Komunikasi di Pemerintah daerah, peningkatan penyebaran informasi publik yang berkualitas melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, media tatap muka, pertunjukan rakyat, internet, kemitraan dengan komunitas informasi dan komunikasi publik serta media yang dimiliki Pemerintah daerah. 3. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah daerah harus memperhatikan: a. Seluruh anggaran belanja TIK di lingkungan Pemerintah daerah harus berada di satu rekening dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika. b. Infrastruktur TIK yang terintegrasi, seperti server pengolahan data dan jaringan komunikasi data.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika

		c. Selama belum ada kebijakan yang mengatur, pembangunan aplikasi umum di Pemerintah daerah agar menggunakan atau mengadopsi aplikasi serupa yang sudah digunakan di pusat atau daerah lain. d. Integrasi data di lingkungan Pemerintah daerah di bawah koordinasi dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika untuk dapat diakses secara berbagi pakai oleh seluruh SKPD; dan e. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia bidang TIK di lingkungan Pemerintah daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Arah kebijakan : 1. Pengembangan e-Government di lingkup Pemerintah daerah. 2. Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Daerah. 3. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi melalui media publik dan kemitraan lembaga komunikasi di daerah.	
Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara	1. Meningkatkan kemampuan aparatur desa dan mengembangkan keswadayaan masyarakat; 2. Mengembangkan penerapan teknologi tepat guna untuk mengolah potensi-potensi unggulan pedesaan; 3. Memberikan aksesibilitas bagi desa-desa yang tertinggal seperti jalan, listrik, dan sanitasi layak; 4. Bekerjasama dengan BBTNBBBS dan NGO untuk mensejahterakan Desa tertinggal khususnya Pekon Way Haru, Pekon Way Tias, Pekon Bandar Dalam, dan Pekon Siring Gading	Arah kebijakan : Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal	Program Penataan Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara	1. Meningkatkan kemampuan aparatur desa dan mengembangkan keswadayaan masyarakat; 2. Mengembangkan penerapan teknologi tepat guna untuk mengolah potensi-potensi unggulan pedesaan; 3. Memberikan aksesibilitas bagi desa-desa yang tertinggal seperti jalan, listrik, dan sanitasi layak; 4. Bekerjasama dengan BBTNBBBS dan NGO untuk mensejahterakan Desa tertinggal khususnya Pekon Way Haru, Pekon Way Tias, Pekon Bandar Dalam, dan Pekon Siring Gading	Arah kebijakan : Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal	Program Penataan Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Tujuan 11: Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	1. Pembangunan TPS3R di masing masing Kecamatan; 2. Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah dan Bank Sampah di setiap Kecamatan; 3. Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis 3R.	Strategi : Pemerintah daerah harus memenuhi kriteria kesiapan yaitu: 1. Surat minat dari pemerintah daerah; 2. Masuk dalam kawasan rawan sanitasi di dalam SSK; 3. Memastikan kegiatan tercantum dalam RPIJM/RPI2JM yang terintegrasi dengan dokumen SSK; 4. Memastikan ketersediaan lahan; 5. Memastikan ketersediaan masterplan/DED; 6. Memastikan keberadaan dan kinerja institusi pengelola pasca konstruksi (KSM, UPTD, BLUD, dll); 7. Surat kesediaan menerima aset; 8. Mengalokasikan dana untuk operasional dan pemeliharaan pasca konstruksi (ditunjukan dengan RKA untuk kegiatan pengelolaan); dan 9. Ketersediaan tenaga fasilitator lapangan pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan teknis dan pemberdayaan selama pelaksanaan kegiatan.	Pengembangan Permukiman Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
Tujuan 11: Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	1. Memberikan bantuan rumah swadaya peningkatan rumah tidak layak huni bagi mayarakat berpenghasilan rendah; 2. Penambahan anggaran penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat;	Strategi : 1. Penguatan Perencanaan dalam penyelesaian akses terhadap hunian layak dan terjangkau:	Program Pengembangan Permukiman, Program Pengembangan Perumahan

	3. Menyediakan IPAL Komunal di masing-masing kecamatan; 4. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, aman, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan.	a. Penyusunan rencana penyediaan hunian layak/dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) provinsi/kabupaten/kota dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals (SDGs), terutama yang terkait akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau; b. Pembentukan Pokja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah; c. Penyusunan dan pengembangan data RTLH sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota; d. Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan untuk pembangunan perumahan. 2. Pengalokasian anggaran (APBD) untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan sebagai urusan wajib layanan dasar: a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana (provinsi/kabupaten/kota); b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni beserta utilitasnya bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; c. Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan, termasuk mitigasi resiko bencana; d. Pelaksanaan fasilitasi dan/atau penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau serta mitigasi bencana dan mitigasi relokasi program pemerintah provinsi/kabupaten/kota; e. Pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan kewenangannya;	Program Kawasan Permukiman Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

		f. Peningkatan efisiensi lahan perkotaan untuk penyediaan perumahan melalui peremajaan kawasan dan penyediaan hunian baru dalam rangka penanganan permukiman kumuh. 3. Penguatan kapasitas mendukung peningkatan akses terhadap hunian layak dan terjangkau: a. Pelaksanaan pembekalan dan capacity building bagi UPTD dan Sumber Daya Manusia di bidang perumahan; b. Penguatan kelembagaan di bidang perumahan terutama untuk mendukung perubahan UPTD menjadi BUMD; c. Pelaksanaan pembinaan terhadap penghuni Sarusun dengan penetapan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) untuk rusunami. 4. Peningkatan penyediaan lahan dan pihak ke-3 dalam pemenuhan kebutuhan perumahan: a. Pelaksanaan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan melalui penerapan hunian berimbang dalam penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; b. Pelaksanaan penerapan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik dan upaya lainnya dalam rangka mendukung upaya kemudahan perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017; c. Penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang, serta terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, terutama akses air minum, sanitasi dan transportasi; d. Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan untuk pembangunan perumahan;	

		e. Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah; f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam urusan jasa konstruksi dan jasa usaha terkait sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU sesuai dengan kewenangannya; g. Pemerintah daerah dapat memastikan berjalannya iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat, seperti melalui kemudahan perizinan dan juga dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi bagi masyarakat yang akan membangun rumahnya secara swadaya. h. Pemerintah daerah harus dapat memastikan kolaborasi berbagai sektor untuk bersama-sama menuntaskan penanganan permukiman kumuh. Arah kebijakan : 1. Menerapkan standar pelayanan minimum dan perumahan rakyat; 2. Meningkatkan kemudahan perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan bagi MBR; 3. Menyediakan data penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 4. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan bidang perumahan dan permukiman; 5. Menyediakan dokumen perencanaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman; 6. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh; 7. Meningkatkan peran dan kolaborasi antar pihak dalam pencegahan dan peningkatan kualitas PKP kumuh;	

		8. Menyelenggarakan PSU dilingkungan hunian, perumahan, dan kawasan permukiman yang berkualitas; 9. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU sesuai kewenangannya;	
Tujuan 11: Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan promosi pariwisata melalui pameran baik di dalam maupun di luar; 2. Meningkatkan even sejarah budaya dan kesenian daerah dalam pengembangan potensi daerah.	Strategi : 1. Keberadaan dan kelengkapan daftar arsip yang perlu dipreservasi; 2. Tata laksana preservasi arsip; 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan daerah di bidang preservasi arsip; 4. Ketersediaan prasarana dan sarana preservasi arsip. Arah kebijakan : Perlindungan dan penyelamatan arsip terjaga dan arsip statis daerah	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Arsip
Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	1. Pembangunan TPS3R di masing masing Kecamatan; 2. Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah dan Bank Sampah di setiap Kecamatan; 3. Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis 3R.	Strategi : 1. Penyiapan dan pengelolaan operasional infrastruktur persampahan dan infrastruktur sampah menjadi energi dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah; 2. Pengelolaan sampah di darat dan di laut; 3. Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya; 4. Pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3; 5. Peningkatan pengurangan timbulan sampah dan penanganan timbulan sampah Arah kebijakan : Pengelolaan Timbulan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan
Tujuan 13: Membuat Langkah Segera Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	1. Melakukan monitoring dan pendataan; 2. Peningkatan program kampung iklim dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan NGO;	Strategi : 1. Pengendalian kerusakan akibat perubahan iklim dilakukan dengan melestarikan fungsi atmosfer melalui inventarisasi emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;	Program Perencanaan Lingkungan Hidup

	3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait kerentanan terhadap kejadian ekstrim terkait iklim, ekonomi, sosial, lingkungan, serta bencana di sekitar lokasi tempat tinggal;	2. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; 3. Koordinasi pelaksanaan inventarisasi penurunan GRK. Arah kebijakan : Peningkatan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan
Tujuan 13: Membuat Langkah Segera Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	1. Melakukan pengelolaan daerah permukiman, bangunan, dan kegiatan usaha di wilayah pesisir pantai; 2. Menanam tanaman mangrove dan tanaman pelindung pantai; 3. Mengelola pariwisata dan bentang alam berbasis ramah lingkungan; 4. Menggalakkan kegiatan bersih pantai.	Strategi : 1. Penghijauan pada lahan kritis di luar kawasan hutan/daerah imbuhan mata air (kawasan lindung); 2. Rencana Tahunan Pengelolaan Pantai; Arah Kebijakan : Pengelolaan Sempadan pantai lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan
Tujuan 14: Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	1. Membudidayakan dan mengadakan bibit unggul ikan; 2. Pengembangan balai benih ikan; 3. Penerapan teknologi bioflok pada budidaya lele secara intensif; 4. Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan keamanan obat ikan; 5. Penguatan kelompok masyarakat dan nelayan dalam pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan; 6. Pengadaan anggaran peningkatan fasilitas kompetensi bagi kelompok usaha pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan; 7. Bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.	Strategi : 1. Pemahaman dan kepatuhan nelayan serta pemangku kepentingan terhadap regulasi tentang perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, BBM untuk nelayan, permodalan, illegal fishing, batas wilayah penangkapan/WPP, perizinan, dan transshipment); 2. Peningkatan pengelolaan akses area perikanan (PAAP); 3. Integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional (Major Project). Arah kebijakan : Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Tujuan 14: Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	1. Membudidayakan dan mengadakan bibit unggul ikan; 2. Pengembangan balai benih ikan; 3. Penerapan teknologi bioflok pada budidaya lele secara intensif; 4. Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan keamanan obat ikan; 5. Penguatan kelompok masyarakat dan nelayan dalam pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan; 6. Pengadaan anggaran peningkatan fasilitas kompetensi bagi kelompok usaha pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan; 7. Bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Strategi : 1. Perlindungan asuransi bagi nelayan kecil; 2. Pemberdayaan nelayan Arah kebijakan : Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tujuan 14: Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	1. Melakukan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 2. Meningkatkan anggaran untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau; 3. Inventarisasi RTH di Kab. Pesisir Barat.	Arah kebijakan : Peningkatkan upaya penataan lingkungan untuk keindahan dan kenyamanan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan upaya konservasi dan restorasi.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Tujuan 14: Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	1. Sosialisasi penggunaan pestisida dalam perawatan tanaman pangan dan pertanian; 2. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian; 3. Optimalisasi penggunaan bahan organik dalam perawatan tanaman pangan dan pertanian; 4. Meningkatkan daya tahan tanaman dari serangan penyakit; 5. Tidak melakukan alih fungsi lahan sesuai dengan Perda LP2B.	Strategi : 1. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah Tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); 2. Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per Tahun; 3. Penyusunan data cadangan pangan Provinsi dan Kab/Kota; 4. Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan; 5. Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah-daerah yang menjadi lokasi sasaran program; 6. Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Provinsi;	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan

		7. Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian daerah Kab/Kota; 8. Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan Pertanian. Arah kebijakan : 1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan. 2. Mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu-hilir pangan, pertanian dan perikanan. 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusiapertanian, perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan. 4. Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/konsumen. 5. Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi pemanfaatan waduk yang terbangun.	Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tujuan 14: Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	1. Sosialisasi penggunaan pestisida dalam perawatan tanaman pangan dan pertanian; 2. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian; 3. Optimalisasi penggunaan bahan organik dalam perawatan tanaman pangan dan pertanian; 4. Meningkatkan daya tahan tanaman dari serangan penyakit; 5. Tidak melakukan alih fungsi lahan sesuai dengan Perda LP2B.	Strategi : 1. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah Tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); 2. Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per Tahun; 3. Penyusunan data cadangan pangan Provinsi dan Kab/Kota; 4. Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan; 5. Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah-daerah yang menjadi lokasi sasaran program; 6. Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Provinsi; 7. Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian daerah Kab/Kota;	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

		8. Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan Pertanian. Arah kebijakan : 1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan. 2. Mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu-hilir pangan, pertanian dan perikanan. 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusiapertanian, perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, danpembudidaya ikan. 4. Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/konsumen. 5. Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi pemanfaatan waduk yang terbangun.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tujuan 14: Melakukan Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	1. Sosialisasi penggunaan pestisida dalam perawatan tanaman pangan dan pertanian; 2. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian; 3. Optimalisasi penggunaan bahan organik dalam perawatan tanaman pangan dan pertanian; 4. Meningkatkan daya tahan tanaman dari serangan penyakit; 5. Tidak melakukan alih fungsi lahan sesuai dengan Perda LP2B.	Strategi : 1. Penyusunan dan penetapan peraturan daerah Tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); 2. Penyusunan program/ kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita per Tahun; 3. Penyusunan data cadangan pangan Provinsi dan Kab/Kota; 4. Penyusunan Peta ketahanan dan kerentanan Pangan; 5. Penyusunan Program/Kegiatan dukungan untuk pelaksanaan Program FMSRB bagi daerah-daerah yang menjadi lokasi sasaran program; 6. Penyusun Master Plan Kawasan Pertanian Provinsi; 7. Penyusun action plan untuk Kab/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan pertanian daerah Kab/Kota; 8. Fasilitasi pembentukan korporasi petani di Kawasan Pertanian.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan

		Arah kebijakan : 1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan. 2. Mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu-hilir pangan, pertanian dan perikanan. 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusiapertanian, perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, danpembudidaya ikan. 4. Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/konsumen. 5. Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi pemanfaatan waduk yang terbangun.	Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Mempromosikan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Manajemen Hutan Lestari, Mengurangi Penggurunan, Menghentikan dan Mengembalikan Degradasi Lahan serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	1. Melestarikan pohon damar; 2. Bekerjasama dengan KPH, Balai Besar TNBBS, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;	Strategi : 1. Penguatan operasionalisasi KPH untuk tata kelola hutan di tingkat tapak; 2. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/Pendek (RPHJP/Pd); 3. Pengendalian Perizinan usaha/kerjasama pemanfaatan hutan; 4. Perlindungan dan pengamanan hutan; 5. Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha kecil dan menengah Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); 6. Rencana pengelolaan hasil hutan kayu kapasitas < 6.000 m3/tahun 7. Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk kepentingan religi Arah kebijakan : Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	<i>*tidak ada kewenangan daerah</i>

Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Mempromosikan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Manajemen Hutan Lestari, Mengurangi Penggurunan, Menghentikan dan Mengembalikan Degradasi Lahan serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	1. Melestarikan pohon damar; 2. Bekerjasama dengan KPH, Balai Besar TNBBS, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; 3. Melakukan koordinasi pengelolaan hutan.	Strategi : 1. Penguatan operasionalisasi KPH untuk tata kelola hutan di tingkat tapak; 2. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/Pendek (RPHJP/Pd); 3. Pengendalian Perizinan usaha/kerjasama pemanfaatan hutan; 4. Perlindungan dan pengamanan hutan; 5. Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha kecil dan menengah Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); 6. Rencana pengelolaan hasil hutan kayu kapasitas < 6.000 m3/tahun; 7. Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk kepentingan religi Arah kebijakan : Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
Tujuan 16: Mempromosikan Perdamaian dan Masyarakat yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	1. Pembuatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak; 2. Meningkatkan perlindungan pada anak dan perempuan melalui pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, diskriminasi serta perdagangan manusia; 3. Mengoptimalkan pengarusutamaan gender pada penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran;	Strategi : 1. Data Rikesdas Tahun 2020 (KPPPA, data Riskesdas, Susenas BPS); 2. Data Simfoni-PPA Arah kebijakan : 1. Perlindungan Khusus Perempuan; 2. Perlindungan Khusus Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Tujuan 16: Mempromosikan Perdamaian dan Masyarakat yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	1. Pembentukan kelompok kerja pengarusutamaan gender (PUG); 2. Mengoptimalkan pengarusutamaan gender pada penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran.	Strategi : Profil Perempuan Indonesia (KPPPI, data Sakernas BPS) Arah kebijakan : Kualitas Hidup Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan
Tujuan 16: Mempromosikan Perdamaian dan Masyarakat yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	1. Mendorong pembuatan produk hukum yang memberikan kepastian, dan keadilan bagi masyarakat dan dunia usaha; 2. Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi antara produk hukum daerah dan pusat dan antar produk hukum daerah;	Arah Kebijakan : Penguatan penyelenggaraan pencegahan, dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban umum dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dan juga pihak-pihak berwenang di bidang keamanan dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Tujuan 16: Mempromosikan Perdamaian dan Masyarakat yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Pengembangan kapasitas institusi yang terkait pada semua level	Strategi : 1. Data Rikesdas Tahun 2020 (KPPPA, data Riskesdas, Susenas BPS) 2. Data Simfoni-PPA Arah kebijakan : 1. Perlindungan Khusus Anak 2. Perlindungan Khusus Anak	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Tujuan 16: Mempromosikan Perdamaian dan Masyarakat yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Meningatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan baik formal maupun non-formal.	Strategi : 1. Dukungan terhadap fungsi pendidikan dalam percepatan pencegahan anak kerdil atau stunting melalui: a. Penyelenggaraan PAUD; b. Penguatan UKS/M; c. bantuan sanitasi sekolah;dan d. kelas parenting. 2. Dukungan untuk fungsi pendidikan dari urusan pemerintahan bidang lainnya. (antara lain: Penanganan anak tidak sekolah, Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Gender, Olah Raga Prestasi Indonesia, Manajemen Talenta Indonesia, Pengarusutamaan Gender dan lain-lain). 3. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) diluar belanja pegawai dan DAK; 4. Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah(UKS/M) baik pada lingkup provinsi maupun kabupaten/kota; 5. Memperhatikan pemenuhan dan pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;	Program Pengelolaan Pendidikan Program Peningkatan Kualitas Keluarga

		6. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku; 7. Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI) di lingkup kabupaten/kota; 8. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya “kembali ke sekolah” (back to school) bagi anak usia sekolah di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang (3T); 9. Peningkatan dan penguatan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota; 10. Peningkatan dan Pengembangan kualitas dan Sumber Daya Manusia Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi; 11. Peningkatan dan pengembangan pendidikan literasi sekolah di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota; 12. Penguatan dan pengembangan bahasa dan sastra di daerah. Arah Kebijakan : 1. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui: a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; b. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 Tahun; c. Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan ; d. Penjaminan mutu pendidikan dan Peningkatan tata kelola pendidikan. 2. Peningkatan produktivitas dan daya saing melalui Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri.	

Tujuan 16: Mempromosikan Perdamaian dan Masyarakat yang Inklusif Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua dan Membangun Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	1. Meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil; 2. Meningkatkan layanan serta bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan tidak mampu; 3. Penegakkan hukum yang mantap secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.	Arah Kebijakan : Penguatan penyelenggaraan pencegahan, dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban umum dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat dan juga pihak-pihak berwenang di bidang keamanan dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Tujuan 17: Menguatkan Cara Pelaksanaan dan Revitalisasi Kerjasama Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	1. Kabupaten Pesisir Barat sebagian besar merupakan wilayah konservasi dan bergantung pada dana perimbangan, dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat sulit dan memerlukan perlakuan khusus dan salah satu potensi terbesarnya adalah sektor pariwisata; 2. Membuka peluang usaha dan investasi baru di sektor pariwisata, dengan melakukan peningkatan yaitu membuka wisata premium, desa wisata, desa budaya, dan wisata minat khusus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah; 3. Untuk mempertahankan kearifan lokal perlu dilakukan penguatan budaya dan kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya maupun adat istiadat dengan membuat desa wisata dan desa budaya sehingga dapat menambah pendapatan daerah; 4. Perbedaan segmentasi pariwisata tersebut dituangkan secara legal ke dalam cluster/zona/ kawasan strategis di RTRW Kabupaten Pesisir Barat;	Strategi : 1. Adanya koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam membangun pariwisata daerahDaerah menetapkan desa-desa yang menjadi desa wisata sesuai dengan potensi, kesiapan penyediaan dokumen teknis dan dokumen administrasi yang dibutuhkan, dan tingkat ketercapaian pengembangan destinasi wisata; 2. Daerah meningkatkan aksesibilitas ke desa-desa yang menjadi desa wisata;Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa berupa peningkatan kompetensi. 3. masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kepariwisataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa untuk mendukung pengembangan kepariwisataan; 4. Menyediakan kebijakan dan regulasi pemenuhan SPM Perdesaan melalui pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perdesaan, pembangunan prasarana dan sarana konektivitas perdesaan, pembangunan prasarana dan sarana pariwisata, social budaya dan kelembagaan serta pembangunan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika;	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

	5. Terhadap wisatawan mancanegara maupun domestik dibuatkan mekanisme pungutan pajak kunjungan ke daerah wisata di Kabupaten Pesisir Barat; 6. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak dan retribusi; 7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak.	Arah kebijakan : 1. Destinasi pariwisata. 2. Pemasaran pariwisata. 3. Industri pariwisata. 4. Kelembagaan.	
Tujuan 17: Menguatkan Cara Pelaksanaan dan Revitalisasi Kerjasama Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	1. Kabupaten Pesisir Barat sebagian besarnya merupakan wilayah konservasi dan bergantung pada dana perimbangan, dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat sulit dan memerlukan perlakuan khusus dan salah satu potensi terbesarnya adalah sektor pariwisata; 2. Membuka peluang usaha dan investasi baru di sektor pariwisata, dengan melakukan peningkatan yaitu membuka wisata premium, desa wisata, desa budaya, dan wisata minat khusus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah; 3. Untuk mempertahankan kearifan lokal perlu dilakukan penguatan budaya dan kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya maupun adat istiadat dengan membuat desa wisata dan desa budaya sehingga dapat menambah pendapatan daerah; 4. Perbedaan segmentasi pariwisata tersebut dituangkan secara legal ke dalam cluster/zona/kawasan strategis di RTRW Kabupaten Pesisir Barat; 5. Terhadap wisatawan mancanegara maupun domestik dibuatkan mekanisme pungutan pajak kunjungan ke daerah wisata di Kabupaten Pesisir Barat; 6. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak dan retribusi; 7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak.	Strategi : 1. Adanya koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam membangun pariwisata daerahDaerah menetapkan desa-desa yang menjadi desa wisata sesuai dengan potensi, kesiapan penyediaan dokumen teknis dan dokumen administrasi yang dibutuhkan, dan tingkat ketercapaian pengembangan destinasi wisata; 2. Daerah meningkatkan aksesibilitas ke desa-desa yang menjadi desa wisata;Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat desa berupa peningkatan kompetensi. 3. masyarakat desa dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kepariwisataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa untuk mendukung pengembangan kepariwisataan; 4. Menyediakan kebijakan dan regulasi pemenuhan SPM Perdesaan melalui pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perdesaan, pembangunan prasarana dan sarana konektivitas perdesaan, pembangunan prasarana dan sarana pariwisata, social budaya dan kelembagaan serta pembangunan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika; Arah kebijakan : 1. Destinasi pariwisata. 2. Pemasaran pariwisata. 3. Industri pariwisata. 4. Kelembagaan.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Tujuan 17: Menguatkan Cara Pelaksanaan dan Revitalisasi Kerjasama Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan	1. Melakukan inventarisasi data; 2. Meningkatkan jaringan internet di setiap Kecamatan; 3. Bekerjasama dengan pihak swasta untuk peningkatan aksesibilitas internet.	Strategi : 1. Dalam mendukung prioritas nasional kelima yaitu stabilitas keamanan nasional guna meningkatkan akses dan kualitas informasi publik, perlu adanya upaya penatakelolaan bidang komunikasi publik, penyediaan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, maritim, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pengelolaan informasi publik melalui media Pemerintah; 2. Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional tersebut, arah dan kebijakan pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Komunikasi di Pemerintah daerah, peningkatan penyebaran informasi publik yang berkualitas melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, media tatap muka, pertunjukan rakyat, internet, kemitraan dengan komunitas informasi dan komunikasi publik serta media yang dimiliki Pemerintah daerah; 3. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah daerah agar memperhatikan: a. Seluruh anggaran belanja TIK di lingkungan Pemerintah daerah agar berada di satu rekening dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika. b. Infrastruktur TIK yang terintegrasi, seperti server pengolahan data dan jaringan komunikasi data. c. Selama belum ada kebijakan yang mengatur, pembangunan aplikasi umum di Pemerintah daerah agar menggunakan atau mengadopsi aplikasi serupa yang sudah digunakan di pusat atau daerah lain.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik Program Aplikasi Informatika

		d. Integrasi data di lingkungan Pemerintah daerah di bawah koordinasi dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika untuk dapat diakses secara berbagi pakai oleh seluruh SKPD; dan e. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia bidang TIK di lingkungan Pemerintah daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Arah kebijakan : 1. Pengembangan e-Government di lingkup Pemerintah daerah. 2. Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Daerah. 3. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi melalui media publik dan kemitraan lembaga komunikasi di daerah.	

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Barat (diolah)

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai target-target dimaksud melalui pelaksanaan program pembangunan daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah hingga akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Sementara itu, berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran dari RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
2. Berbasis Permasalahan serta Isu Strategis Daerah;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, Meningkatkan Akses, dan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Saing Daerah Serta Kualitas Lingkungan Hidup; dan
5. Penerapan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Program Perangkat Daerah yang diambil berdasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah junto Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Program yang termuat dalam RPJMD Ini ditetapkan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan kewenangan daerah dan Juga Prioritasnya.

Penganggaran untuk Belanja per Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Pemerintah Daerah, yaitu: (1) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (2) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (3) Urusan Pilihan; (4) Pelaksanaan Unsur Pendukung Pemerintahan Daerah; (5) Pelaksanaan Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah; (6) Pelaksanaan Unsur Pengawasan (Inspektorat); (7) Pelaksanaan Unsur Kewilayahan (Kecamatan); dan (8) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik).

Lebih lanjut, hubungan antara pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Indikasi rencana program Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berisikan program-program untuk pencapain target sasaran dan target kinerja daerah. Selanjutnya pagu indikatif sebagai wujud dari kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan Perangkat Daerah. Program, target kinerja beserta pagu indikatif tersebut, akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kerangka pendanaan daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan pada perhitungan kapasitas riil daerah disajikan pada Tabel 7.1. Kapasitas riil keuangan sebagaimana proyeksi pada tabel 7.1. merupakan kemampuan keuangan dari pendapatan daerah (seluruh pos pendapatan daerah) setelah dikurangi untuk mendanai pengeluaran daerah (Pengeluaran Pembiayaan). Kapasitas riil tersebut digunakan untuk mendanai (a) belanja pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (b) belanja pegawai; (c) belanja barang dan jasa pemenuhan sarana dan prasarana kantor; (d) belanja penambahan aset tetap dan peningkatan nilai aset tetap terutama dalam bidang infrastruktur pemerintah daerah; (e) belanja prioritas daerah berupa program kerja dari kepala daerah terpilih; (f) pendanaan belanja program-program urusan pemerintahan daerah sebagaimana menjadi kewenangan dari daerah guna mendukung pencapaian dan sinergitas dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung; (g) Belanja Bunga; (h) Belanja Subsidi; (i) Belanja Hibah; (j) Belanja Bantuan Sosial; (k) Belanja Tidak Terduga; (l) Belanja Bagi Hasil, dan (m) Belanja Bantuan Keuangan.

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Pesisir Barat Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		2022	2023	2024	2025	2026
I	Penerimaan :					
1	Pendapatan	909,641,882,399	904,309,437,334	910,362,926,302	916,815,619,232	923,719,539,232
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	22,667,103,379	23,500,000,000	23,500,000,000	23,000,000,000	23,000,000,000
	Total Penerimaan (1 s.d. 3)	932,308,985,778	927,809,437,334	933,862,926,302	939,815,619,232	946,719,539,232
	Dikurangi					
II	Pengeluaran :					
1	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000
	Kapasitas Riil kemampuan keuangan (I- II)	927,308,985,778	921,809,437,334	927,862,926,302	933,815,619,232	940,719,539,232

Sumber : RKPD Tahun 2022 dan Proyeksi RPJMD Tahun 2021-2026

Berdasarkan pada kondisi perhitungan kerangka pendanaan daerah pada Tahun 2021-2026 sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, disusun rencana indikasi program perangkat daerah berikut pendanaanya yang bersifat indikatif. Perumusan Program perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat disajikan berdasarkan Pelaksanaan Urusan dan Unsur Pemerintahan Daerah. Data dimaksud tersaji pada Tabel 7.2. di bawah ini:

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
						2020	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	125,575,532,480	90.00%	125,701,108,012	92.50%	126,958,119,093	92.50%	133,306,025,047	95.00%	133,559,306,495	95.00%	645,100,091,127	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan (Persen)	54.92	100%	58,480,930,500	100%	58,539,229,905	100%	59,124,622,204	100%	62,080,853,314	100%	65,184,895,980	100%	303,410,531,903	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	34,582,665,720	90.00%	34,617,248,386	92.50%	34,963,420,870	92.50%	35,313,055,078	95.00%	35,666,185,629	95.00%	175,142,575,683	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (Persen)	51.50	100%	56,104,365,714	100%	56,162,665,119	100%	61,778,931,631	100%	64,867,878,212	100%	65,516,556,994	100%	304,430,397,671	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan (Persen)	n/a	100%	4,787,716,000	100%	4,846,015,405	100%	4,918,705,636	100%	5,164,640,918	100%	5,216,287,327	100%	24,933,365,286	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut terhadap Perizinan Usaha (Persen)	n/a	100%	290,196,600	100%	348,496,005	100%	351,980,965	100%	369,580,013	100%	388,059,014	100%	1,748,312,597	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (Persen)	n/a	100%	1,580,738,397	100%	1,639,037,802	100%	1,802,941,582	100%	2,704,412,373	100%	2,839,632,992	100%	10,566,763,146	Dinas Kesehatan
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	5,289,995,847	90.00%	5,342,895,805	92.50%	5,348,238,701	92.50%	5,883,062,571	92.50%	5,941,893,197	95.00%	27,806,086,122	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah (Persen)	27.00%	30.00%	6,783,878,113	35.00%	6,842,177,518	45.00%	7,184,286,394	45.00%	10,058,000,951	50.00%	14,400,760,762	50.00%	45,269,103,738	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen)	33.00	37.5	1,215,829,286	40.00	1,274,128,691	42.50	2,275,402,820	43.50	3,413,104,229	45.00	3,720,283,610	45.00	11,898,748,636	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen)	65.30	65.30%	1,015,829,286	69.87%	1,074,128,691	74.76%	1,975,202,820	78.50%	2,962,804,229	80.00%	3,229,456,610	80.00%	10,257,421,636	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan (Persen)	n/a	25.00%	2,084,377,970	30.00%	2,142,677,375	35.00%	2,544,820,052	40.00%	3,308,266,068	45.00%	3,606,010,014	45.00%	13,686,151,479	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Jalan Desa Strategis dengan kondisi baik (Persen)	22.00	22.40	1,433,650,500	25.00	1,491,949,905	30.00	1,641,144,895	35.00	2,133,488,364	40.00	3,200,232,546	40.00	9,900,466,211	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap (Persen)	51.00	55.00%	157,686,059,466	60.00%	146,671,401,896	70.00%	96,818,073,298	80.00%	64,362,953,003	90.00%	47,581,100,653	90.00%	513,119,588,315	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Persen)	4.52	4.70	3,616,857,150	5.00	3,675,156,555	5.00	3,678,831,711	5.30	4,009,926,566	5.50	4,210,422,894	5.50	19,191,194,876	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	39.03	41.00	8,121,640,901	41.50	8,179,940,306	42.00	12,269,910,459	42.50	18,404,865,688	43.00	20,061,303,600	43.00	67,037,660,955	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan (Persen)	n/a	20.00%	467,577,600	27.50%	473,407,540	35.00%	473,880,948	42.50%	516,530,233	50.00%	542,356,745	50.00%	2,473,753,067	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog (Persen)	n/a	20.00%	308,658,000	20.00%	314,487,940	30.00%	314,802,428	35.00%	343,134,647	50.00%	360,291,379	50.00%	1,641,374,395	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	3,790,145,036	90.00%	3,828,046,486	92.50%	3,866,326,951	92.50%	4,252,959,646	95.00%	4,678,255,611	95.00%	20,415,733,731	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni (Persen)	85.97	86.00%	1,084,377,970	87.00%	1,142,677,375	88.00%	1,643,820,052	88.67%	2,136,966,068	90.00%	2,329,293,014	90.00%	8,337,134,479	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Permukiman Layak Huni (Persen)	n/a	35.00%	1,000,000,000	38.75%	1,058,299,405	42.50%	1,164,129,345	46.25%	1,513,368,149	50.00%	1,649,571,282	50.00%	6,385,368,182	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Permukiman yang Tertata (Persen)	n/a	35.00%	3,782,262,000	40.00%	3,840,561,405	50.00%	3,844,401,966	55.00%	4,997,722,556	60.00%	5,247,608,684	60.00%	21,712,556,612	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana Sarana Umum (Persen)	n/a	35.00%	1,107,340,440	40.00%	1,165,639,845	45.00%	1,177,296,243.4	50.00%	1,236,161,056	60.00%	1,297,969,108	60.00%	5,984,406,692	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	2,276,259,200	90.00%	2,278,535,459	92.50%	2,301,320,814	92.50%	2,646,518,936	95.00%	2,911,170,829	95.00%	12,413,805,238	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen)	100%	100%	2,313,074,000	100%	2,371,373,405	100%	2,373,744,778	100%	2,587,381,808	100%	2,716,750,899	100%	12,362,324,890	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
1	05	03	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen)	100%	100%	679,000,000	100%	737,299,405	100%	738,036,704	100%	1,107,055,057	100%	1,162,407,809	100%	4,423,798,975	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	1,738,065,800	90.00%	1,755,446,458	92.50%	1,773,000,923	92.50%	2,038,951,061	95.00%	2,242,846,167	95.00%	9,548,310,409	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (Persen)	100	100%	1,108,645,400	100%	1,166,944,805	100%	1,168,111,750	100%	1,226,517,337	100%	1,287,843,204	100%	5,958,062,496	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	2,193,309,000	90.00%	2,215,242,090	92.50%	2,237,394,511	92.50%	2,684,873,413	95.00%	2,953,360,754	95.00%	12,284,179,768	Dinas Sosial
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Terdatanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Persen)	100	100%	254,237,000	100%	312,536,405	100%	312,848,941	100%	328,491,388	100%	344,915,958	100%	1,553,029,693	Dinas Sosial



 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial (Persen)	4.83	100%	3,339,765,800	100%	3,398,065,205	100%	3,401,463,270	100%	3,741,609,597	100%	3,928,690,077	100%	17,809,593,949	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan dan jaminan Perlindungan Sosial Daerah (Persen)	100	100%	395,891,500	100%	454,190,905	100%	454,645,096	100%	477,377,351	100%	501,246,218	100%	2,283,351,070	Dinas Sosial
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Pemenuhan pasca Bencana (Persen)	100	100%	232,780,200	100%	291,079,605	100%	291,370,685	100%	305,939,219	100%	321,236,180	100%	1,442,405,888	Dinas Sosial
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	1,951,725,400	90.00%	1,971,242,654	92.50%	1,990,955,081	92.50%	2,190,050,589	95.00%	2,211,951,094	95.00%	10,315,924,818	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3.41	3.00	198,325,000	2.80	256,624,405	2.6	259,190,649	2.41	388,785,973	2.21	392,673,833	2.21	1,495,599,861	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	70.54	72.71	163,000,000	73.04	221,299,405	73.88	221,520,704	74.71	332,281,057	75.54	335,603,867	75.54	1,273,705,033	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Persen)	n/a	60.00%	146,873,080	65.00%	205,172,485	70.00%	205,377,657	75.00%	308,066,486	80.00%	323,469,810	80.00%	1,188,959,519	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	1,918,143,198	90.00%	1,937,324,630	92.50%	1,956,697,876	92.50%	2,348,037,452	95.00%	2,383,258,013	95.00%	10,543,461,169	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (Persen)	100	100%	149,062,000	100%	207,361,405	100%	207,568,766	100%	311,353,150	100%	326,920,807	100%	1,202,266,128	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan (Persen)	100	100%	65,752,000	100%	124,051,405	100%	124,175,456	100%	186,263,185	100%	195,576,344	100%	695,818,390	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	25.00	30.00%	165,275,000	30.00%	223,574,405	35.00%	223,797,979	40.00%	335,696,969	50.00%	352,481,817	50.00%	1,300,826,171	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Terhadap Anak (Persen)	16.67	16.67%	328,344,800	33.33%	386,644,205	33.33%	387,030,849	33.33%	580,546,274	50.00%	586,351,736	50.00%	2,268,917,864	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pendampingan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Persen)	100	100%	134,946,400	100%	193,245,805	100%	193,439,051	100%	290,158,576	100%	293,060,162	100%	1,104,849,994	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	2,151,434,100	90.00%	2,153,585,534	92.50%	2,155,739,120	92.50%	2,371,313,032	95.00%	2,395,026,162	95.00%	11,227,097,947	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	27.752,5	28.000	861,638,100	28.000	919,937,505	28.000	929,136,880	28.000	975,593,724	28.000	1,024,373,410	28.000	4,710,679,619	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peresentase Daerah Rentan Rawan Pangan (Persen)	7.00	7.00%	209,066,520	7.00%	267,365,925	4.50%	270,039,584	5.00%	283,541,563	5.00%	297,718,642	5.00%	1,327,732,234	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (Persen)	n/a	60.00%	47,515,000	60.00%	105,814,405	60.00%	106,872,549	60.00%	112,216,176	60.00%	117,826,985	60.00%	490,245,116	Dinas Ketahanan Pangan
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reformasi Agraria (Kepala Keluarga)	n/a	5.000	34,000,000	5.000	92,299,405	5.000	92,391,704	5.000	138,587,557	5.000	145,516,934	25.000	502,795,600	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rasio Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Persen)	9.43	10.00	5,400,000,000	10.50	5,458,299,405	11.00	5,463,757,704	11.20	8,195,636,557	11.50	8,605,418,384	11.50	33,123,112,050	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan Pemanfaatan Tanah Kosong (Persen)	n/a	0.80	239,582,712	1.85	297,882,117	2.90	298,179,999	2.95	447,269,999	1.00	469,633,499	9.5	1,752,548,325	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	3,232,118,900	90.00%	3,235,351,019	92.50%	3,267,704,529	92.50%	3,594,474,982	95.00%	3,630,419,732	95.00%	16,960,069,162	Dinas Lingkungan Hidup



 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan hidup (Persen)	n/a	100%	434,946,000	100%	493,245,405	100%	493,738,650	100%	518,425,583	100%	544,346,862	100%	2,484,702,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	68.50	73.54	253,104,400	73.87	311,403,805	74.20	311,715,209	74.53	467,572,813	74.86	490,951,454	74.86	1,834,747,681	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah (Persen)	4.52	4.70%	143,975,000	5.00%	202,274,405	5.00%	202,476,679	5.30%	303,715,019	5.50%	318,900,770	5.50%	1,171,341,873	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan Pengendalian terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Izin Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berbasis Lingkungan Hidup (PUU LH) (Persen)	n/a	100%	66,715,000	100%	125,014,405	100%	125,139,419	100%	187,709,129	100%	197,094,585	100%	701,672,539	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat (Persen)	n/a	30.00%	48,410,700	30.00%	106,710,105	35.00%	106,816,815	40.00%	160,225,223	40.00%	168,236,484	40.00%	590,399,326	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan (Persen)	45.00	49.61	2,044,331,000	52.09	2,102,630,405	54.70	2,104,733,035	57.43	2,209,969,687	60.30	2,320,468,171	60.30	10,782,132,299	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	4,699,281,000	90.00%	4,703,980,281	92.50%	4,751,020,084	92.50%	5,226,122,092	95.00%	5,278,383,313	95.00%	24,658,786,770	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas (Persen)	n/a	100%	276,729,000	100%	335,028,405	100%	335,363,433	100%	503,045,150	100%	528,197,408	100%	1,978,363,396	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Persen)	n/a	100%	50,100,000	100%	108,399,405	100%	108,507,804	100%	113,933,195	100%	119,629,854	100%	500,570,258	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Persen)	n/a	100%	34,505,000	100%	92,804,405	100%	92,897,209	100%	139,345,814	100%	146,313,105	100%	505,865,533	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 Tahun (Persen)	n/a	100%	40,125,000	100%	98,424,405	100%	98,522,829	100%	147,784,244	100%	155,173,456	100%	540,029,935	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	2,239,144,088	90.00%	2,241,383,232	92.50%	2,263,797,064	92.50%	2,490,176,771	95.00%	2,515,078,539	95.00%	11,749,579,694	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Berkembang (Pekon)	53	55	1,300,000,000	60	1,301,300,000	60	1,302,601,300	65	1,419,835,417	70	1,490,827,188	70	6,814,563,905	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pekon Tertib Administrasi (Pekon)	n/a	90	167,234,283,280	95	167,401,517,563	100	169,075,532,739	110	177,529,309,376	116	179,304,602,470	116	860,545,245,428	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Pekon)	n/a	90	2,792,330,270	95	2,795,122,600	100	2,823,073,826	110	2,964,227,518	116	2,993,869,793	116	14,368,624,007	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	2,571,641,800	90.00%	2,574,213,442	92.50%	2,599,955,576	92.50%	2,859,951,134	95.00%	2,888,550,645	95.00%	13,494,312,597	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	1.06	1.01	55,225,400	0.98	113,524,805	0.95	113,638,330	0.95	170,457,495	0.92	178,980,369	0.92	631,826,399	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (Angka)	2.26	2.21	4,275,846,000	2.19	4,334,145,405	2.17	4,338,479,550	2.13	4,555,403,528	2.10	4,600,957,563	2.10	22,104,832,046	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)	53.57	56.50	239,584,000	58.00	297,883,405	61.00	298,181,288	62.50	447,271,933	64.00	451,744,652	64.00	1,734,665,278	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	2,036,101,300	90.00%	2,038,137,401	92.50%	2,058,518,775	92.50%	2,470,222,530	95.00%	2,494,924,756	95.00%	11,097,904,763	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat (Persen)	66.00%	70.00%	1,000,000,000	70.00%	1,058,299,405	72.50%	1,059,357,704	72.50%	1,589,036,557	75.00%	1,668,488,384	75.00%	6,375,182,050	Dinas Perhubungan
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Cakupan Wilayah yang terlayani Angkutan Laut (Persen)	50.00%	50.00%	593,590,000	55.00%	651,889,405	60.00%	652,541,294	60.00%	978,811,942	65.00%	1,027,752,539	65.00%	3,904,585,179	Dinas Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	4,164,771,300	90.00%	4,168,936,071	92.50%	4,210,625,432	92.50%	4,842,219,247	95.00%	4,890,641,439	95.00%	22,277,193,489	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik (Persen)	78.00	80.00%	2,756,616,900	80.00%	2,814,916,305	80.00%	2,817,731,221	85.00%	2,958,617,782	85.00%	3,106,548,671	85.00%	14,454,430,880	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berdasarkan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) (Persen)	77.00	80.00%	142,280,900	80.00%	200,580,305	82.50%	200,780,885	82.50%	301,171,328	85.00%	316,229,894	85.00%	1,161,043,312	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	2,672,728,300	90.00%	2,675,401,028	92.50%	2,702,155,039	92.50%	3,107,478,294	95.00%	3,138,553,077	95.00%	14,296,315,739	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif (Persen)	49.00	50.00	34,320,000	50.00	92,619,405	52.50	93,545,599	52.50	98,222,879	55.00	103,134,023	55.00	421,841,906	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten (Persen)	n/a	45.00%	469,134,000	45.00%	527,433,405	50.00%	532,707,739	55.00%	559,343,126	60.00%	587,310,282	60.00%	2,675,928,552	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan



2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persen)	1.71	1.89	340,656,000	1.98	398,955,405	2.08	402,944,959	2.18	423,092,207	2.29	444,246,817	2.29	2,009,895,388	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	2,772,946,600	90.00%	2,775,719,547	92.50%	2,803,476,742	92.50%	3,223,998,253	95.00%	3,256,238,236	95.00%	14,832,379,378	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) (Perusahaan/ Perorangan)	729	730	282,700,000	730	340,999,405	750	344,409,399	750	516,614,098	750	542,444,803	3,710	2,027,167,706	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA (Persen)	4.05	5.05	677,031,800	5.55	735,331,205	6.05	742,684,517	6.55	809,526,124	6.55	850,002,430	6.55	3,814,576,075	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN (Persen)	14.99	15.99	570,661,000	16.49	628,960,405	16.99	635,250,009	17.49	952,875,013	17.49	1,000,518,764	17.49	3,788,265,192	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Perizinan (Persen)	80.00	80.00%	612,905,200	80.00%	671,204,605	80.00%	677,916,651	80.00%	1,016,874,976	90.00%	1,067,718,725	90.00%	4,046,620,158	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan (Laporan)	5	5	262,496,000	5	320,795,405	5	324,003,359	5	340,203,527	5	357,213,703	25	1,604,711,994	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	2,318,161,132	90.00%	2,320,479,293	92.50%	2,343,684,086	92.50%	2,695,236,699	95.00%	2,722,189,066	95.00%	12,399,750,276	Dinas Pemuda Dan Olahraga

 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Persen)	n/a	50.00%	2,107,100,000	55.00%	2,165,399,405	55.00%	2,167,564,804	60.00%	2,275,943,045	60.00%	2,298,702,475	60.00%	11,014,709,729	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pemenuhan Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan (Persen)	n/a	45.00%	1,932,187,622	45.00%	1,990,487,027	50.00%	1,992,477,514	60.00%	2,092,101,390	60.00%	2,196,706,459	60.00%	10,203,960,012	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik (Dokumen)	2	2	101,904,800	2	102,006,705	2	112,207,375	2	168,311,063	2	176,726,616	10	661,156,559	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengaman Informasi Daerah yang Terselenggara baik (Persen)	n/a	100%	50,877,600	100%	50,928,478	100%	56,021,325	100%	95,236,253	100%	142,854,380	100%	395,918,036	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas yang Terlibat Pertunjukan Seni (Persen)	n/a	20.00%	287,798,000	20.00%	346,097,405	25.00%	346,443,502	25.00%	377,623,418	30.00%	396,504,588	30.00%	1,754,466,913	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi (Persen)	n/a	20.00	25,260,000	25.00	83,559,405	30.00	91,915,345	30.00	137,873,018	40.00	144,766,669	40.00	483,374,438	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	2,062,630,580	90.00%	2,064,693,211	92.50%	2,066,757,904	92.50%	2,273,433,694	95.00%	2,296,168,031	95.00%	10,763,683,421	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (Lokasi)	1	1	258,572,700	1	316,872,105	1	320,040,826	1	336,042,867	1	352,845,011	1	1,584,373,509	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen)	20.00	20.00%	124,159,000	25.00%	182,458,405	25.00%	184,282,989	35.00%	193,497,138	50.00%	203,171,995	50.00%	887,569,528	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	3,170,501,140	90.00%	3,173,671,641	92.50%	3,205,408,358	92.50%	3,686,219,611	92.50%	3,723,081,807	95.00%	16,958,882,557	Dinas Perikanan
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	10.980	13.859	553,964,660	14.136	612,264,065	14.419	618,386,706	14.708	649,306,041	15.002	681,771,343	15.002	3,115,692,814	Dinas Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	18.370	18.646	533,800,250	18.925	592,099,655	19.209	598,020,651	19.497	627,921,684	19.790	659,317,768	19.790	3,011,160,009	Dinas Perikanan
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman (Angka)	0.030	0.031	102,360,800	0.032	160,660,205	0.032	162,266,807	0.033	170,380,147	0.033	178,899,155	0.033	774,567,114	Dinas Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tukar Nelayan (Angka)	103.7	102	411,842,450	103	470,141,855	104	474,843,273	104	498,585,437	105	523,514,709	105	2,378,927,725	Dinas Perikanan
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	3,405,756,560	90.00%	3,409,162,317	92.50%	3,443,253,940	92.50%	3,959,742,031	95.00%	3,999,339,451	95.00%	18,217,254,298	Dinas Pariwisata
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen)	2.38	2.58	861,009,000	2.78	919,308,405	2.98	928,501,489	3.18	1,392,752,233	3.38	1,462,389,845	3.38	5,563,960,973	Dinas Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan Wisatawan (Orang)	50.730	286.376	738,714,930	394.735	797,014,335	494.527	804,984,478	615.189	1,207,476,717	780.748	1,267,850,553	780.748	4,816,041,014	Dinas Pariwisata
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata (Persen)	10	10%	374,090,240	20%	432,389,645	30%	432,822,035	40%	649,233,052	50%	681,694,704	50%	2,570,229,676	Dinas Pariwisata
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	7,441,253,900	90.00%	7,448,695,154	92.50%	7,523,182,105	92.50%	8,275,500,316	95.00%	8,358,255,319	95.00%	39,046,886,794	Dinas Pertanian
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (Angka)	94.73	97.25	2,276,269,400	98.51	2,334,568,805	99.77	2,336,903,374	101.04	2,453,748,542	102.30	2,576,435,970	102.30	11,977,926,091	Dinas Pertanian
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian (Ton)	126.350	145.418	2,287,053,000	146.872	2,345,352,405	148.340	2,368,805,929	149.944	2,487,246,225	151.322	2,611,608,537	151.322	12,100,066,096	Dinas Pertanian

 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Persen)	80.00	82.00%	178,944,400	84.00%	237,243,805	86.00%	239,616,243	88.00%	251,597,055	90.00%	264,176,908	90.00%	1,171,578,411	Dinas Pertanian
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (Persen)	80.00	82.00%	338,011,400	84.00%	396,310,805	86.00%	400,273,913	88.00%	420,287,609	90.00%	441,301,989	90.00%	1,996,185,716	Dinas Pertanian
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani (Poktan)	n/a	955	814,336,800	965	872,636,205	975	881,362,567	985	925,430,695	995	971,702,230	995	4,465,468,497	Dinas Pertanian
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (Persen)	11.53	11.54	44,590,000	11.55	102,889,405	11.56	103,918,299	11.58	109,114,214	11.59	114,569,925	11.59	475,081,843	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok (Persen)	n/a	30.00%	267,621,000	40.00%	325,920,405	50.00%	329,179,609	60.00%	345,638,589	70.00%	362,920,519	70.00%	1,631,280,122	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Ekspor Barang dan Jasa (juta rupiah)	43.012	43.055	202,962,000	43.098	261,261,405	43.141	263,874,019	43.184	277,067,720	43.227	290,921,106	43.227	1,296,086,250	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Persen)	35.00	35.00	1,088,029,000	37.00	446,328,405	40.00	446,332,868	42.00	468,649,512	45.00	492,081,987	45.00	2,941,421,772	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Persen)	3.98	3.98	142,780,000	3.99	201,079,405	3.99	201,280,484	4.00	211,344,509	4.00	221,911,734	4.00	978,396,132	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi (Angka)	n/a	42.03	90,501,500	42.03	90,592,002	42.53	99,651,202	42.53	108,619,810	44.00	114,050,800	44.00	503,415,313	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibina (Lokasi)	1	1	265,526,250	1	265,791,776	1	292,370,954	1	306,989,502	1	310,059,397	1	1,440,737,878	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi



 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

4	01		SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	49,294,533,946	90.00%	49,381,763,210	92.50%	49,875,580,842	92.50%	53,369,359,884	95.00%	53,918,191,898	95.00%	255,839,429,780	Sekretariat Daerah
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	80.00	80.00%	13,918,993,560	80.00%	13,932,912,554	85.00%	15,326,203,809	90.00%	16,092,513,999	95.00%	16,897,139,699	95.00%	76,167,763,621	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan (Persen)	80.00	80.00%	4,021,530,624	80.00%	4,025,552,155	85.00%	4,428,107,370	90.00%	4,826,637,033	95.00%	5,067,968,885	95.00%	22,369,796,067	Sekretariat Daerah
4	02		SEKRETARIAT DPRD															
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	19,919,292,808	90.00%	20,218,082,200	92.50%	20,420,263,022	92.50%	21,648,656,225	95.00%	21,865,142,787	95.00%	104,071,437,043	Sekretariat DPRD
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan perda, dan Fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (Persen)	100	100%	11,602,751,020	100%	11,614,353,771	100%	13,821,080,987.51	100%	14,512,135,037	100%	15,237,741,789	100%	66,788,062,604	Sekretariat DPRD
5	01		PERENCANAAN															
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	3,640,543,200	90.00%	3,676,948,632	90.00%	3,866,833,917	92.50%	4,253,517,309	95.00%	4,296,052,482	95.00%	19,733,895,541	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran (Persen)	87.43	100%	2,865,466,380	100%	2,868,331,846	100%	3,155,165,031	100%	3,439,129,884	100%	3,611,086,378	100%	15,939,179,519	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Pusat (Persen)	80.00	80.00%	2,842,770,970	85.00%	2,845,613,741	90.00%	3,130,175,115	95.00%	3,411,890,875	100%	3,446,009,784	100%	15,676,460,486	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	02		KEUANGAN															
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	11,686,726,840	90.00%	11,803,594,108	92.50%	11,921,630,049	92.50%	13,113,793,054	95.00%	13,244,930,985	95.00%	61,770,675,037	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah



 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Tata Kelola Keuangan Daerah sesuai Aturan (Persen)	100	100%	15,122,057,382	100%	15,137,179,439	100%	15,288,551,234	100%	16,664,520,845	100%	16,831,166,053	100%	79,043,474,953	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Tata Kelola Barang Milik Daerah sesuai Aturan (Persen)	100	100%	2,348,137,800	100%	2,350,485,938	100%	2,373,990,797	100%	2,587,649,969	100%	2,613,526,469	100%	12,273,790,973	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	3,878,811,040	90.00%	3,917,599,150	92.50%	3,956,775,142	92.50%	4,352,452,656	95.00%	4,395,977,183	95.00%	20,501,615,171	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	2.65	3.18%	3,066,551,080	3.50%	3,069,617,631	4.20%	3,100,313,807	4.62%	3,379,342,050	5.08%	3,548,309,153	5.08%	16,164,133,721	Badan Pendapatan Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN															
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	2,555,180,800	90.00%	2,557,735,981	90.00%	2,583,313,341	92.50%	2,841,644,675	92.50%	2,870,061,121	95.00%	13,407,935,917	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Persen)	n/a	70.00%	1,730,872,100	71.75%	1,732,602,972	73.54%	1,734,335,575	75.38%	1,821,052,354	77.27%	1,839,262,877	77.27%	8,858,125,878	Badan Kepegawaian Daerah
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pejabat ASN telah yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Persen)	21.76	21.98%	2,642,888,400	22.20%	2,645,531,288	22.42%	2,648,176,820	22.64%	2,780,585,661	22.87%	2,808,391,517	22.87%	13,525,573,686	Badan Kepegawaian Daerah
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi daerah (Angka)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	1,622,732,160	Sangat Inovatif	1,624,354,892	Sangat Inovatif	1,640,598,441	Sangat Inovatif	1,788,252,301	Sangat Inovatif	1,806,134,824	Sangat Inovatif	8,482,072,618	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6	01		INSPEKTORAT DAERAH															
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	4,301,838,900	90.00%	4,344,857,289	92.50%	4,388,305,862	92.50%	5,046,551,741	95.00%	5,097,017,259	95.00%	23,178,571,051	Inspektorat
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (Persen)	88.50	100%	1,412,981,100	100%	1,414,394,081	100%	1,428,538,022	100%	2,142,807,033	100%	2,249,947,385	100%	8,648,667,620	Inspektorat



 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Konsistensi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terhadap Kepatuhan Peraturan perundang-undangan (Persen)	N/A	100%	627,360,000	100%	627,987,360	100%	690,786,096	100%	1,036,179,144	100%	1,087,988,101	100%	4,070,300,701	Inspektorat
7	01		KECAMATAN															
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	7,444,247,640	90.00%	7,451,691,888	90.00%	7,459,143,580	92.50%	7,832,100,759	95.00%	7,910,421,766	95.00%	38,097,605,632	11 Kecamatan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persen)	n/a	100%	341,223,400	100%	341,223,400	100%	341,223,400	100%	351,223,400	100%	351,223,400	100%	1,726,117,000	Kecamatan Bangkuntat; Krui Selatan; Lemong; Ngambur; Ngaras; Pulau Pisang; Pesisir Selatan; Pesisir Utara
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Persen)	n/a	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000	100%	1,040,000,000	Kecamatan Pesisir Tengah
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	90.00%	2,743,439,142	90.00%	2,746,182,581	92.50%	2,773,644,407	92.50%	3,051,008,848	95.00%	3,081,518,936	95.00%	14,395,793,914	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Persen)	40.00	46.00%	131,722,230	48.00%	131,853,952	49.00%	131,985,806	51.00%	197,978,709	53.00%	207,877,645	53.00%	801,418,342	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (Persen)	84.08	84.08%	561,673,128	84.08%	562,234,801	84.92%	32,390,266,865	84.92%	590,346,541	85%	596,250,007	84.92%	34,700,771,342	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif (Persen)	70.00	70.00%	1,271,861,140	73.00%	1,273,133,001	75.00%	1,274,406,134	75.00%	1,338,126,441	77.50%	1,405,032,763	77.50%	6,562,559,479	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Persen)	60.00	65.00%	142,002,800	65.00%	142,144,803	67.50%	142,286,948	67.50%	213,430,421	70.00%	224,101,942	70.00%	863,966,914	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Koordinasi dan Peran Lembaga dan Elemen Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Konflik Sosial (Persen)	70.00	70.00%	204,554,750	70.00%	204,759,305	75.00%	204,964,064	75.00%	307,446,096	80.00%	322,818,401	80.00%	1,244,542,616	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Total Kebutuhan Pendanaan				927,308,985,778		921,809,437,334		927,862,926,302		933,815,619,232		940,719,539,232		4,651,516,507,878	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran, dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam penyusunan dokumen RPJMD dimanatkan untuk menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Periode 2021-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disebut IKU, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKK/IKD yang dapat menjadi IKU perangkat daerah. IKU maupun IKD merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur tujuan dan/atau sasaran RPJMD, disajikan pada Tabel 8.1. Sementara indikator kinerja hasil (*outcome*) yang digunakan untuk menggambarkan kinerja urusan pemerintahan daerah disajikan pada Tabel 8.2. Pemilahan kinerja mulai dari IKU dan IKD/IKK diharapkan dapat memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah daerah dan perangkat daerah.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Barat

No	Indikator	Satuan	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	Target Tahun Ke-					KONDISI KINERJA PADA AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	
				(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	63.91	64.17	64.31	64.44	64.58	64.71	64.71
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3.41	3.00	2.80	2.60	2.41	2.21	2.21
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93.21	93.82	94.29	94.76	95.24	95.71	95.71
4	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	39.03	41.00	41.50	42.00	42.50	43.00	43.00
5	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Daya Air Yang Sehat Dan Aman	Persen	35.00	37.50	40.00	42.50	43.50	45.00	45.00
6	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	50.94	52.00	53.00	55.00	57.50	60.00	60.00
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68.50	73.54	73.87	74.20	74.53	74.86	74.86
8	Indeks Resiko Bencana	Angka	181.41	180.94	180.71	180.47	180.24	180.00	180.00
9	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1.17	3.20-3.70	3.40-3.90	3.60-4.10	3.80-4.30	4.00-4.50	4.00-4.50
10	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	28.45	28.20-28.81	28,60-29.04	28.70-29.29	29.00-29.56	29.20-29.85	29.20-29.85
11	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	94.73	97.25	98.51	99.77	101.04	102.30	102.30
12	Indeks Gini	Angka	0.34	0.32	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29
13	Tingkat Kemiskinan Daerah	Persen	14.29	13.95	13.65	13.34	13.04	12.73	12.73
14	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Persen	-75.03	20.00	21.00	22.00	23.00	25.00	25.00

15	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Angka	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	80.00
16	Nilai SAKIP	Huruf/ Predikat	CC	CC	CC	CC	B	B	B
17	Opini BPK	Huruf/ Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Indeks Desa Membangun	Angka	0.6100	0.6600	0.6700	0.6800	0.6900	0.7000	0.7000

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
I.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
	1	Pertumbuhan Ekonomi *TPB	Persen	-1.17	3.20-3.70	3.40-3.90	3.60-4.10	3.80-4.30	4.00-4.50	4.00-4.50
	2	PDRB per Kapita *TPB	Juta Rupiah	28.45	28.20-28.81	28.60-29.04	28.70-29.29	29.00-29.56	29.20-29.85	29.20-29.85
	3	Indeks Gini *TPB	Angka	0.34	0.32	0.32	0.31	0.30	0.29	0.29
	4	Nilai Tukar Petani	Angka	94.73	97.25	98.51	99.77	101.04	102.30	102.30
I.2	Fokus Kesejahteraan Sosial									
	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) *TPB	Angka	63,91	64.17	64.31	64.44	64.58	64.71	64.71
	2	Tingkat Kemiskinan Daerah *TPB	Persen	14.29	13.95	13.65	13.34	13.04	12.73	12.73
	3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah *TPB	Tahun	8.01	8.05	8.07	8.10	8.12	8.14	8.14
	4	Angka Harapan Lama Sekolah *TPB	Tahun	11.99	12.03	12.05	12.06	12.08	12.10	12.10
	5	Angka Harapan Hidup *TPB	Tahun	63.50	63.62	63.68	63.73	63.79	63.80	63.80
	6	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) *TPB	Persen	6.60	6.50	6.40	6.30	6.20	6.20	6.20
	7	Persentase Ruang Terbuka Lahan Hijau *TPB	Persen	4.52	4.50	4.60	4.70	4.80	5.00	5.00
	8	Jumlah Titik Kawasan Kumuh	Lokasi	61	60	60	55	55	50	50
	9	Indeks Pembangunan Gender *TPB	Angka	93.21	93.82	94.29	94.76	95.24	95.71	95.71
	10	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
	11	Indeks Desa Membangun (IDM) *TPB	Angka	0.6100	0.6600	0.6700	0.6800	0.6900	0.7000	0.7000



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
I.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
	1	Persentase Kesenian Budaya yang Dilestarikan	Persen	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	10.00	10.00
	2	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi	Orang	2	4	5	7	8	10	10
I.4	Fokus Reformasi Birokrasi									
	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	n/a	C	C	C	C	C	C
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Angka	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	80.00
	3	Nilai SAKIP	Huruf/ Predikat	CC	CC	CC	CC	B	B	B
	4	Indeks Inovasi Pemerintah daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
II.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib									
	II.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
	1	Pendidikan								
	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD *TPB	Persen	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	75.00
	2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP *TPB	Persen	92.08	92.08	92.10	92.12	92.14	92.16	92.16
	3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP *TPB	Persen	70.25	70.25	70.25	70.50	70.50	70.75	70.75
	4	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan dasar *TPB	Persen	79.77	80.27	80.77	81.27	81.77	82.27	82.27
	5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar *TPB	Persen	91.07	91.57	92.07	92.57	93.07	93.57	93.57
	6	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD *TPB *SPM	Persen	54.92	57.70	59.14	60.62	62.14	63.69	63.69

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	7	Tingkat Partisipasi Anak Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD *TPB	Persen	97.38	98.36	98.85	99.34	100.00	100.00	100.00
	8	Tingkat Partisipasi Anak Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan SMP *TPB	Persen	84.55	88.83	91.05	93.33	95.66	98.05	98.05
	9	Angka Putus Sekolah *TPB	Persen	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20
	10	Angke Melek Huruf (AMH) *TPB	Persen	90.24	92.05	92.97	93.90	94.84	95.79	95.79
	11	Rasio Guru SD terhadap Siswa *TPB	Rasio	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13
	12	Rasio Guru SMP terhadap Siswa *TPB	Rasio	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 13
	2	Kesehatan								
	1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup *TPB	Kasus	5,71 (17 kasus)	4,37 (13 kasus)	4,03 (12 kasus)	3,69 (11 kasus)	3,02 (9 kasus)	2,35 (7 kasus)	2,35 (7 kasus)
	2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup *TPB	Kasus	235 (7 kasus)	202 (6 kasus)	168 (5 kasus)	134 (4 kasus)	101 (3 kasus)	67 (2 kasus)	67 (2 kasus)
	3	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) *TPB	Kasus	615	212	210	205	200	195	195
	4	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1 : 8.969	1 : 1.689	1 : 6.407	1 : 6.042	1 : 5.773	1 : 5.526	1 : 5.526
	5	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil *TPB **SPM	Persen	88.00	100	100	100	100	100	100
	6	Pelayanan Kesehatan Balita *TPB **SPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan *TPB	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	8	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	36.36	36.36	45.45	45.45	54.55	54.55	54.55

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	9	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persen	35.71	42.86	57.14	71.43	85.71	100	100
	10	Angka Kematian Ibu (AKI) *TPB	Kasus	7	7	6	5	4	3	2
	11	Angka Kematian Bayi (AKB) *TPB	Kasus	17	13	12	11	9	7	7
	12	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan *TPB	Persen	85.08	85.08	90.00	90.00	95.00	100	100
	13	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada Balita *TPB	Persen	53.00	45.00	40.00	35.00	30.00	20.00	20.00
	14	Insidensi TB per 100.000 penduduk *TPB	Persen	22.85	21.16	20.11	19.10	18.15	17.24	17.24
	15	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) *TPB	Persen	22.85	23.00	23.20	23.40	23.80	24.00	24.00
	16	<i>Treatment coverage</i> pada pasien TB *TPB	Persen	24	100	100	100	100	100	100
	17	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan *TPB	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	18	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) *TPB	Unit	11	11	11	11	11	11	11
	19	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll) *TPB	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	20	Persentase Sarana Produksi UKOT	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	21	Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk *TPB	Angka	1.32	1.33	1.34	1.36	1.37	1.38	1.38

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	22	Rasio Perawat per 100.000 penduduk *TPB	Angka	11.02	11.13	11.24	11.35	11.47	11.58	11.58
	23	Rasio Bidan per 100.000 penduduk *TPB	Angka	12.02	12.13	12.24	12.35	12.47	12.58	12.58
	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	1	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk *TPB	Km	644.08	644.08	654.08	664.08	674.08	684.08	684.08
	2	Persentase rumah tinggal bersanitasi *TPB	Persen	65.30	67.50	70.00	72.50	75.00	77.50	77.50
	3	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	40.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	70.00
	4	Persentase penduduk berakses air minum *TPB	Persen	35.00	37.50	40.00	42.50	43.50	45.00	45.00
	5	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan *TPB	Persen	35.00	37.50	40.00	42.50	43.50	45.00	45.00
	6	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman *TPB	Persen	65.30	65.30	69.87	74.76	78.50	80.00	80.00
	7	Panjang jaringan irigasi primer kewenangan daerah yang dibangun	Km	30.20	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	55.00
	8	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Persen	59.47	60.00	63.00	65.00	68.00	70.00	70.00
	9	Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	Persen	n/a	0.00	5.00	7.00	12.00	15.00	15.00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	10	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap	Persen	51.00	55.00	60.00	70.00	80.00	90.00	90.00
	11	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak *TPB	Persen	35.00	37.50	40.00	42.50	43.50	45.00	45.00
	12	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan *TPB	Persen	21.52	25.00	35.00	45.00	50.00	60.00	60.00
	13	Ketersediaan Dokumen Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Peta Analog dan Peta Digital *TPB **SPM	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
	14	Ketersediaan dokumen RDTR Kecamatan	Dokumen	0	0	0	1	1	1	3
	4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
	1	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana Sarana Umum	Persen	n/a	35.00	40.00	45.00	50.00	60.00	60.00
	2	Persentase Rumah Susun Sewa Terpelihara	Persen	0.00	0.00	100	100	100	100	100
	3	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) *TPB	Persen	14.03	14.00	13.00	12.00	11.33	10.00	10.00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	5	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	6	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	n/a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.5
	7	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana Umum	Persen	33.00	39.60	41.32	42.50	43.20	45.96	45.96
	5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	24.00	100	100	100	100	100	100
	2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	15	15	15	15	15
	4	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana *TPB	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana *TPB	Persen	100	100	100	100	100	100	100

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana **SPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	9	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Daerah **SPM	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	6	Sosial								
	1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti *TPB	Persen	18.02	22.53	28.16	35.20	43.99	54.99	54.99
	2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti *TPB	Persen	4.83	6.04	7.55	9.43	11.79	14.74	14.74
	3	Persentase (%) Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti *TPB **SPM	Persen	0.36	100	100	100	100	100	100
	4	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti *TPB **SPM	Persen	0	100	100	100	100	100	100
	5	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat *TPB	Persen	100	100	100	100	100	100	100

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani *TPB	Persen	84.10	84.94	85.79	86.65	87.51	88.39	88.39
	II.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
	1	Tenaga Kerja								
	1	Persentase sengketa pengusaha-pekerja per tahun yang tertangani	Persen	44.00	50.00	70.00	80.00	100	100	100
	2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	0.25	0.30	0.35	0.40	0.50	0.60	0.60
	3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)	Persen	58.00	60.00	62.00	64.00	67.00	70.00	70.00
	4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	0.011	0.015	0.015	0.016	0.018	0.018	0.018
	2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah *TPB	Persen	0.92	1.01	1.11	1.22	1.34	1.47	1.47
	2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta *TPB	Persen	0.032	0.035	0.039	0.043	0.047	0.052	0.052
	3	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Tertangani *TPB	Persen	46.09	46.84	47.02	47.3	48.21	48.75	48.75

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	4	Partisipasi angkatan kerja perempuan *TPB	Persen	0.078	0.086	0.095	0.1	0.11	0.12	0.12
	5	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan *TPB	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	6	Cakupan Anak korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan *TPB	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	7	Persentase ARG pada Belanja APBD	Persen	0.009	0.011	0.011	0.012	0.013	0.015	0.015
	8	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif *TPB	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	3	Pangan								
	1	Skor Pola Pangan Harapan *TPB	Skor (Angka)	84.92	84.95	84.98	85.10	85.20	85.40	85.40
	2	Ketersediaan Pangan Utama *TPB	Ton	27.752,48	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	3	Ketersedian Energi per kapita *TPB	(kkal/kap/hari)	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	4	Ketersedian Protein per kapita *TPB	(gr/kap/ hari)	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00
	5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	n/a	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	4	Pertanahan								
	1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	44.88	50.00	53.00	55.00	57.00	60.00	60.00
	2	Persentase penerbitan Izin lokasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	3	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reformasi Agraria	Kepala Keluarga	n/a	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	4	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Ha	9.43	10.00	10.50	11.00	11.20	11.50	11.50
	5	Lingkungan Hidup								
	1	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Angka	65.6	87.47	87.57	87.67	87.77	87.87	87.87
	2	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Angka	86.11	58.44	58.54	58.64	58.74	58.84	58.84
	3	hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	68.2	73.7	74.86	76.02	77.18	78.34	78.34
	4	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	n/a	10.00	10.50	11.00	11.50	12.00	12.00
	5	RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	Dokumen	4	6	7	8	9	10	40
	6	Persentase ketersediaan Dokumen KLHS terhadap K/R/P	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	71.43	100	100	100	100	100	100
	8	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	Persen	n/a	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00
	9	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	Persen	45.00	49.61	52.09	54.70	57.43	60.30	60.30

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	10	Persentase jumlah pengurangan timbunan sampah	Persen	3.00	5.00	5.30	5.60	6.00	6.00	6.00
	11	Persentase jumlah penanganan timbunan sampah	Persen	14.45	18.23	19.23	20.48	21.37	22.98	22.98
	12	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Persen	4.52	4.70	5.00	5.00	5.30	5.50	5.50
	6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
	1	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Status	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
	3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) *TPB	Persen	95.54	97.00	98.00	99.00	100	100	100
	4	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun *TPB	Persen	92.11	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00	97.00
	5	Persentase penduduk yang ber-Kartu Keluarga (KK) *TPB	Persen	51.08	60.00	70.00	80.00	90.00	98.00	98.00
	6	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	16.09	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	70.00
	7	Pemberdayaan Masyarakat Desa								
	1	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	2	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Aktif	BUMDes	85	88	91	94	97	100	100

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	4	Persentase desa yang mendapatkan fasilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	5	Persentase Desa/Pekon yang muatan RPJMDes-nya sesuai dengan RPJMD Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	6	Persentase Desa Tertinggal *TPB	Persen	51.04	45.94	41.34	37.21	33.49	30.14	30.14
	7	Persentase Desa Mandiri *TPB	Persen	0.86	1.72	2.59	3.45	4.31	5.17	5.17
	8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	1	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.26	2.21	2.19	2.17	2.13	2.10	2.10
	2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	76.49	76.53	76.57	76.64	76.77	76.81	76.81
	3	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out KB)	Persen	18.45	18.45	16.00	14.00	12.00	10.00	10.00
	4	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	81.55	81.73	81.78	81.89	81.92	81.94	81.94
	5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	51.11	54.38	56.29	58.00	60.10	61.10	61.10
	6	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.06	1.01	0.98	0.95	0.95	0.92	0.92
	7	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	53.57	56.50	58.00	61.00	62.50	64.00	64.00
	8	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	76.40	76.40	76.40	76.40	76.40	76.40	76.40
	9	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	13.09	11.09	9.30	7.40	7.00	6.50	6.50

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	10	Persentase masyarakat yang terjangkau program bangga kencana	Persen	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	75.00	75.00
	11	Angka Kelahiran Remaja umur 15-49 tahun (age spicific fertility rate /ASFR 15-19)	Angka	30	25	24	23	22	21	21
	12	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	21.90	22.00	22.00	22.50	22.50	22.90	22.90
	13	Persentase Bayi Umur Dua Tahun yang Stunting *TPB	Persen	30.00	25.00	23.00	21.00	18.00	16.00	16.00
	14	Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikuti BKB	Persen	23.00	25.00	27.00	29.00	31.00	33.00	33.00
	9	Perhubungan								
	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Predikat	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik
	2	Jumlah rekomendasi uji KIR angkutan umum	Jumlah	50	55	60	65	70	75	75
	3	Persentase prasarana yang memenuhi standar dalam kondisi baik	Persen	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00
	4	Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum *TPB	Persen	66.00	70.00	72.50	75.00	77.50	80.00	80.00
	5	Persentase sarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	55.00
	6	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	7	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan Roda 4	Persen	16.25	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	21.00
	10	Komunikasi dan Informatika								
	1	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	2	Presentase aplikasi IT dan aplikasi E -government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	80.00	80.00	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	3	Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	Persen	90.00	90.00	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00
	4	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	0.00	0.00	20.00	25.00	25.00	30.00	30.00
	5	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Persen	n/a	70.00	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00
	6	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	Persen	n/a	70.00	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00
	11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
	1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Jumlah	251	270	300	330	350	370	370
	12	Penanaman Modal								
	1	Jumlah/nilai investasi PMA dan PMDN	Juta Rupiah (Rp)	344.371	361.589	379.669	398.652	418.585	439.514	439.514
	2	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/Perusahaan	186 orang/perusahaan	186 orang/perusahaan	190 orang/perusahaan	190 orang/perusahaan	192 orang/perusahaan	196 orang/perusahaan	196 orang/perusahaan
	3	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	20.52	20.50	20.50	20.50	21.00	21.00	21.00
	4	Rasio tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	5	Persentase terpenuhinya regulasi/kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta penerapan Online Single Submission (OSS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	6	Persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	7	Persentase penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman berakohol (SIUP MB)	Persen	n/a	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	8	Rasio jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	9	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan	Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	25 Laporan
	13	Kepemudaan dan Olahraga								
	1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	29	33	34	38	42	46	46
	2	Persentase wirausaha muda	Persen	1.03	1.10	1.24	1.32	1.39	1.47	1.47
	3	Peningkatan pelatih yang Bersertifikasi	Persen	14.28	14.57	14.86	15.15	15.46	15.77	15.77
	4	Atlet Berprestasi	Jumlah	22	22	22	25	25	25	25
	5	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	1.03	1.10	1.24	1.32	1.39	1.47	1.47
	6	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	39.75	42.74	44.29	45.07	45.85	46.62	46.62
	7	Jumlah Wirausahaan Muda Mandiri	Jumlah	133	140	150	160	170	180	180
	8	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	6.67	6.80	7.00	7.00	7.10	7.20	7.20

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	14	Statistik								
	1	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Dokumen	2	2	2	2	2	2	10
	2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	15	Persandian								
	1	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
	16	Kebudayaan								
	1	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
	17	Perpustakaan								
	1	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07
	2	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	2.06	2.27	2.38	2.50	2.62	2.76	2.76
	3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Jumlah	150	156	164	174	186	199	199
	18	Kearsipan								
	1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	20.00	20.00	25.00	25.00	35.00	50.00	50.00
	2	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	51	51	51	55	55	55	55

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00	80.00	80.00
	4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	70.00	80.00	80.00	85.00	90.00	100	100
II.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan									
	1	Kelautan dan Perikanan								
	1	Produksi perikanan tangkap	Ton	10.980	13.859	14.136	14.419	14.708	15.002	15.002
	2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	18.370	18.646	18.925	19.209	19.497	19.790	19.790
	3	Angka konsumsi ikan	Kg/kap/Th	33.05	40.05	40.85	41.66	42.50	43.35	43.35
	4	Cakupan bina kelompok nelayan	Jumlah	246	220	245	270	310	360	360
	2	Pariwisata								
	1	Lama kunjungan Wisata	Hari	8	8	8	9	9	10	10
	2	Kontribusi PAD sektor pariwisata	Persen	2.38	2.58	2.78	2.98	3.18	3.38	3.38
	3	Rata-rata Belanja Wisatawan Domestik	Rupiah/ Kunjungan	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
	4	Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/ Kunjungan	8.000.000	8.000.000	8.200.000	8.250.000	8.350.000	8.400.000	8.400.000
	5	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	230	276	334	407	501	626	626
	6	Jumlah wisatawan domestik	Orang	50.500	286.100	394.041	494.120	614.788	780.122	780.122

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	7	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik	Persen	-99.44	20.00	21.00	22.00	23.00	25.00	25.00
	8	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	Persen	-68.84	20.00	21.00	22.00	23.00	25.00	17.00
	9	Jumlah akomodasi pariwisata (hotel/losmen)	Jumlah	68	68	69	70	70	75	75
	3	Pertanian								
	1	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	90.00
	2	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	90.00
	3	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton/Tahun	108.721	109.808	110.906	112.015	113.136	114.267	114.267
	4	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton/Tahun	35.257	35.610	35.966	36.325	36.689	37.055	37.055
	5	Jumlah Produksi Hewan Ternak	Ekor/Tahun	104.992	106.042	107.102	108.173	109.255	110.348	110.348
	4	Perdagangan								
	1	Persentase Jumlah UTP Yang Ditera/Tera Ulang	Persen	69.54	70.00	70.00	71.00	71.00	72.00	72.00
	2	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	Persen	11.53	11.54	11.55	11.56	11.58	11.59	11.59
	5	Perindustrian								
	1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	35.00	35.00	37.00	40.00	42.00	45.00	45.00
	2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	3.98	3.98	3.99	3.99	4.00	4.00	4.00
	3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	n/a	20.00	20.00	25.00	25.00	30.00	30.00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	4	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	Persen	1.95	1.95	1.95	1.96	1.96	1.96	1.96
	5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	65.00	70.00	70.00	75.00	75.00	80.00	80.00
	6	Transmigrasi								
	1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibina	Lokasi	1	1	1	1	1	1	1
	7	Energi								
	1	Rasio Elektrifikasi *TPB	Persen	80.00	82.00	85.00	85.00	85.00	90.00	90.00
	2	Persentase Desa Teraliri Listrik *TPB	Persen	97.59	98.00	100	100	100	100	100
IL.3	Fokus Layanan Unsur Pendukung									
	1	Sekretariat Daerah								
	1	Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	2	Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	2	Sekretariat DPRD								
	1	Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program- Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Status	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2	Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Status	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	3	Tersedianya Rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Status	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
II.4	Fokus Layanan Unsur Penunjang									
	1	Perencanaan								
	1	RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Status	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2	RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Status	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	3	RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Status	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	87.43	100	100	100	100	100	100
	5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	89.57	100	100	100	100	100	100
	6	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	7	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra)	Persen	85.00	100	100	100	100	100	100
	8	Persentase pencapaian target program pembangunan daerah	Persen	77.78	100	100	100	100	100	100
	2	Keuangan								
	1	Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan Perubahan RAPBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	2	Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase ketercapaian target pendapatan daerah	Persen	94.43	95.37	96.33	97.29	97.39	97.49	97.49

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	4	Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah	Persen	2.65	3.18	3.50	4.20	4.62	5.08	5.08
	5	Rasio belanja modal terhadap total belanja Daerah	Persen	27.52	30.27	30.88	31.19	31.78	32.10	32.10
	3	Kepegawaian								
	1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	Persen	8.32	9.15	9.15	10.07	11.07	12.18	12.18
	2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan	Persen	21.76	21.98	22.20	22.42	22.64	22.87	22.87
	3	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	n/a	70.00	71.75	73.54	75.38	77.27	77.27
	4	Pendidikan dan pelatihan								
	1	Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	5	Penelitian dan Pengembangan								
	1	Persentase Implementasi Rencana kelitbangan	Persen	85.70	85.70	85.70	90.00	95.00	100	100
	2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	4	Persentase kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
II.5	Fokus Layanan Unsur Pengawas									
	1	Inspektorat								
	1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	80.00	90.00	90.00	90.00	100	100	100
	2	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pada objek pemeriksaan	Persen	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100	100

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	3	Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	4	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	100
II.6	Fokus Layanan Unsur Kewilayahan									
	1	Kecamatan								
	1	Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Pekon	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	2	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan/Pekon	Persen	80.00	80.00	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	3	Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persen	100	100	100	100	100	100	100
II.7	Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum									
	1	Kesatuan Bangsa dan Politik								
	1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	n/a	46.00	48.00	49.00	51.00	53.00	53.00
	2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	84.08	84.08	84.08	84.92	84.92	84.92	84.92

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
	3	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	67.00	70.00	75.00	75.00	80.00	80.00	80.00
III ASPEK DAYA SAING DAERAH										
III.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah										
	1	Opini BPK	Huruf/ Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	2	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	14.99	15.99	16.49	16.99	17.49	17.49	17.49
	3	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	4.05	5.05	5.55	6.05	6.55	6.55	6.55
	4	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	1.71	1.73	1.74	1.76	1.78	1.80	1.80
	5	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Persen	-75.03	20.00	21.00	22.00	23.00	25.00	25.00
	6	Persentase Koperasi Akfif	Persen	49.00	50.00	50.00	52.50	52.50	55.00	55.00
III.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur										
	1	Indeks Kualitas Infrastruktur	Angka	53.46	55.00	55.00	60.00	60.00	65.00	65.00
	2	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	39.03	41.00	41.50	42.00	42.50	43.00	43.00
	3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman	Persen	35.00	37.50	40.0	42.50	43.50	45.00	45.00
	4	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	50.94	52.00	53.00	55.00	57.50	60.00	60.00
	5	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	53.24	54.65	55.15	55.65	56.20	56.20	56.2
	6	Indeks Resiko Bencana	Angka	181.41	180.94	180.71	180.47	180.24	180.00	180.00
	7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	68.50	73.54	73.87	74.20	74.53	74.86	74.86

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
					(TAHUN 1)	(TAHUN 2)	(TAHUN 3)	(TAHUN 4)	(TAHUN 5)	
III.3 Fokus Iklim Berinvestasi										
	1	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	2	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	75.00	100	100	100	100	100	100
III.4 Fokus Sumber Daya Manusia										
	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) *TPB	Persen	3.41	3.00	2.80	2.60	2.41	2.21	2.21
	2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) *TPB	Persen	70.54	72.71	73.04	73.88	74.71	75.54	75.54

Ket:
* Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
** Standar Pelayanan Minimal (SPM)

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021—2026 memiliki peran strategis karena menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD bukan hanya menjadi penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah/wakil kepala daerah melainkan juga membawa kepentingan nasional dan regional sehingga menjadi perencanaan yang terpadu (*integrated*) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu setiap perkembangan baik berupa regulasi perundang-undangan maupun kebijakan nasional lainnya akan berdampak dan berpengaruh pada kondisi daerah, sehingga daerah harus melakukan penyesuaian. RPJMD Kabupaten Pesisir Barat dalam penyusunannya berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta memperhatikan regulasi yang berkaitan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat antara lain Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perda Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Perkembangan kondisi daerah akibat kondisi dan kebijakan nasional dan provinsi menunjukkan terjadinya dampak yang meluas dan mendalam tidak hanya terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, namun juga telah merambat ke seluruh sendi kehidupan lainnya. Untuk itu, telah ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak Maret tahun 2020.

Dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 memuat perencanaan selama 5 (lima) tahun. Serta untuk mewujudkan sukses perencanaan dan sukses implementasi, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD sebagai berikut:

1. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2022-2026, dikarena RKPD Tahun 2021 masih berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021;
2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
3. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan sumber daya daerah.

4. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang RPJMD Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.
5. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022-2026.
6. Pada tahun 2022, evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan berpedoman kepada dokumen Perda APBD Tahun 2021 yang disusun berdasarkan hasil program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RKPD Tahun 2021 sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

9.2. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan daerah RKPD Tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Tahun 2025.

Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Untuk itu, penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2027 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045, dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2024-2029, dan RKPD Tahun 2027.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2026, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026, berdasarkan pada hasil pengendalian apabila terdapat target kinerja daerah yang tidak tercapai dan/atau belum tercapai, maka diperlukan usaha untuk merumuskan kembali target kinerja dimaksud.

Demikianlah RPJMD Kabupaten Pesisir Barat ini disusun untuk dapat menjadi landasan bagi perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 kedepan. Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan agar dapat bersama-sama aktif dalam menyukseskan, dan mengawal **“Terwujudnya Pesisir Barat Yang Amanah, Maju dan Sejahtera”**.

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL